SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, berkaitan dengan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah berkenaan dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan rencana kerja pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah unruk periode 1 (satu) tahun angaran.
7. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I Pendahuluan;

b. bab II Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2026;

c. bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

f. bab VI Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 24 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026 adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih serta Program Prioritas Nasional.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Dalam RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2025, disamping terdapat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 diarahkan dalam rangka "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional", upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi antara lain: (1) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (2) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan; (3) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (4) penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal; (5) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; (6)penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; (7) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF); (8) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah", dengan prioritas daerah meliputi: (1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; (2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif Dan Berbasis Lingkungan; dan (3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter. Selanjutnya, RKPD Tahun 2026 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026 mendorong dan berdampak pada diperlukannya penyesuaian terhadap RKPD

Tahun 2026. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang telah disesuaikan dan mengakomodir kebijakan Asta Cita, PHTC serta program dan kegiatan Gubernur Terpilih. Perubahan RKPD juga dilakukan untuk mengakomodir arahan Pemerintah terkait dengan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang tertuang dalam penetapan APBN Tahun 2026. Guna menyikapi kebijakan Tranfer Keuangan Daerah Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Melalui penetapan Peraturan Gubernur tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan efisiensi belanja dan pergeseran anggaran dengan memfokuskan penghematan pada pos belanja non prioritas dan dialihkan pada belanja prioritas.

Dalam prosesnya, perubahan RKPD tahun 2026 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan beberapa hal yaitu:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU daerah, IKU OPD, IKD, IKP); dan/atau
3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026.

Sedangkan proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

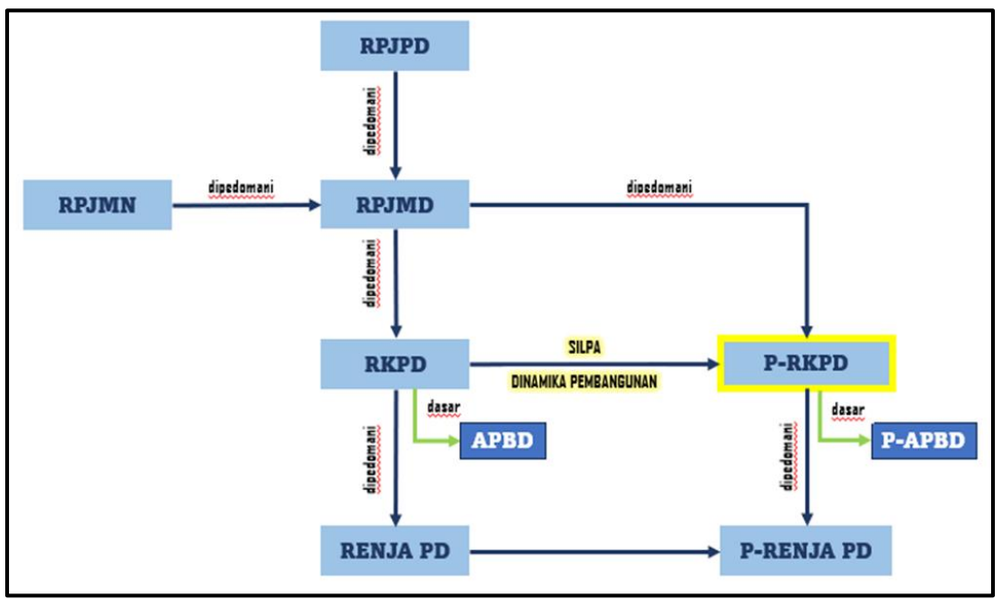
(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28).

1.3. Hubungan Antardokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Dinamika pembangunan yang terjadi baik dari sisi anggaran maupun non anggaran akan berdampak pada dibutuhkannya penyesuaian pada dokumen perencanaan, yaitu RKPD Tahun 2026.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dalam rangka mengakomodir penyesuaian dalam tahap perencanaan daerah, termasuk penyesuaian atas berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Perubahan RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUPA PPAS akan menjadi bahan pembahasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). RKPD Perubahan yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Hubungan antar dokumen – dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Selain itu, penyusunan dokumen Perubahan RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain

dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2026, Asta Cita dan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional, termasuk efisiensi baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

1.5. Sistematika

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi sistematika sebagai berikut:

BUKU I, yang berisi narasi dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan, serta program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 sampai dengan triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026; serta arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas tahun 2026 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

BUKU II, yang memuat Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 perlu dievaluasi secara berkala guna mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II ini disusun sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi target kinerja, baik dari aspek capaian indikator kinerja program maupun realisasi anggaran, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penilaian terhadap capaian kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana disajikan pada Tabel E.1. Melalui skala penilaian ini, tingkat capaian kinerja setiap program dikategorikan ke dalam beberapa kriteria, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada semester pertama Tahun 2026. Hasil penilaian ini selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2026			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
1	Tingkat Kemiskinan	%	8,70-8,53	9,21	94,14	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,00	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,46 - 89,50	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	65,72	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,80 (TW II)	116,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,62	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27	4,3	108.70	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Secara umum, capaian indikator yang telah memiliki data realisasi menunjukkan kinerja yang baik. Seluruh indikator yang telah diukur memperoleh kategori Sangat Tinggi, yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan: 94,14%;
b. Pertumbuhan Ekonomi: 116%; dan
c. Tingkat Pengangguran Terbuka: 108,70%.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah pada awal Tahun 2026 telah memberikan dampak positif. Sementara itu, indikator yang belum tersedia realisasinya dikarenakan data tersebut belum rilis pada Triwulan II Tahun 2026.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
A	**Aspek Geografi dan Demografi**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup[1)4)]	Angka	75,73	NA	NA	NA
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK[1)]	%	5,32	NA	NA	NA
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah[1)3)]	Angka	0,487	0	0	0
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman [1)3)]	%	17,83	NA	NA	NA
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [1)3)]	%	23	NA	NA	NA
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah[1)]	% RT	29	NA	NA	NA
7	Konsumsi Listrik per Kapita[1)3)]	kWh/ Kapita	883,94	425,22	48,11	Sangat Rendah
8	Intensitas Energi Primer[1)3)]	SBM/Rp miliar	203,21	NA	NA	Sangat Rendah
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) [1)3)]	%	7,83	NA	NA	NA
10	Indeks Ketahanan Pangan [1)3)]	Angka	85,6	NA	NA	NA
11	Kapasitas Air Baku[1)]	m^3/detik	5,82	NA	NA	NA
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan [1)3)]	%	42,6	NA	NA	NA
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi[1)]	%	58,97	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi 1)3)	Angka	70,14	69,11	98,53	Sangat Tinggi
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi 1)3)	%	52,38	NA	NA	NA
16	Indeks Risiko Bencana 1)3)	Angka	91,90	NA	NA	NA
17	Persentase Penurunan Emisi GRK1)					
	- Kumulatif	%	6,57	NA	NA	NA
	- Tahunan	%	15,84	NA	NA	NA
B	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
1	Tingkat Kemiskinan1)	%	8,70 - 8,53	NA	NA	NA
2	PDRB per Kapita1)	Juta Rp	52,0 - 55,7	NA	NA	NA
3	Pertumbuhan Ekonomi1)	%	5,00 - 6,00	5,80	116,00	Sangat Tinggi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka1)	%	4,71 - 4,27	4,24	111,08	Sangat Tinggi
5	Rasio Gini1)	Angka	0,351 - 0,361	0,354	101,98	Sangat Tinggi
6	Indeks Modal Manusia1)	Angka	0,62	NA	NA	NA
7	Usia Harapan Hidup (UHH) 1)3)	Tahun	75,46	75,24	99,71	Sangat Tinggi
8	Angka Kematian Ibu 1)3)4)	per 100.000 KH	78,27	59,39	131,79	Sangat Tinggi
9	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita 1)3)4)	%	17	17,1	99,42	Sangat Tinggi
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) 1)	%	95	NA	NA	NA
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) 1)	%	91	NA	NA	NA
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 1)3)	%	99,23	98,51	99,27	Sangat Tinggi
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca1)	%	87,86 - 90,71	NA	NA	NA
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi1)	%	34,29 - 39,29	NA	NA	NA
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca1)	%	72,49 - 74,99	NA	NA	NA
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi1)	%	65,65 - 68,15	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun[1)]	Tahun	8,69 - 8,71	NA	NA	NA
18	Harapan Lama Sekolah [1)3)]	Tahun	13,03 - 13,06	13,05	100,15	Sangat Tinggi
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi[1)]	%	8,43	NA	NA	NA
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi [1)3)]	%	67,71	NA	NA	NA
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi [1)3)]	%	51,03	NA	NA	NA
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal [1)3)]	%	21,75	NA	NA	NA
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) [1)3)]	Angka	62,86	63,89	101,64	Sangat Tinggi
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga [1)3)]	Angka	77,06	77,66	100,78	Sangat Tinggi
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) [1)3)4)]	Angka	0,304	0,225	135,11	Sangat Tinggi
26	Indeks Kesejahteraan Sosial [2)]	Angka	58,81	NA	NA	NA
C	**Aspek Daya Saing Daerah**					
1	Tingkat Inflasi[1)]	%	1,50 - 3,50	2,92	83,43	Tinggi
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia[1)]	Angka	61,4	NA	NA	NA
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	34,65 - 34,83	NA	NA	NA
4	Kontribusi PDRB Provinsi[1)]	%	8,2	NA	NA	NA
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	34,65- 34,83	NA	NA	NA
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [1)3)]	%	3,6	NA	NA	NA
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara [1)3)]	Ribu Orang	70,79	NA	NA	NA
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional [1)3)]	%	13,08	NA	NA	NA
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi [1)3)]	%	6,23	11,15	178,97	Sangat Tinggi
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi [1)3)]	%	6,23	11,16	179,13	Sangat Tinggi
11	Rasio Kewirausahaan Daerah [1)3)]	%	3,53	3,05	86,40	Tinggi
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB [1)3)]	%	2,16	1,54	71,30	Sedang
13	*Return on Aset* (RoA) BUMD[1)]	%	1,62	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal [1)3)]	%	44,05	NA	NA	NA
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan [1)3)]	%	63,15	63,37	100,35	Sangat Tinggi
16	Kapabilitas Inovasi [1)3)]	Angka	4,66	NA	NA	NA
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal [2)]	Produk	557.267	NA	NA	NA
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB [2)]	%	3,14	NA	NA	NA
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) [2)]	Angka	0,65	NA	NA	NA
20	Indeks Ekonomi Hijau [1)]	Angka	45,57	NA	NA	NA
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer [1)3)]	%	21,6	NA	NA	NA
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi [1)]	Angka	6,12	NA	NA	NA
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi [1)3)]	Angka	6,6	NA	NA	NA
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto [1)3)]	% PDRB	30,63	NA	NA	NA
25	Ekspor Barang dan Jasa [1)3)]	% PDRB	11,12	NA	NA	NA
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional[1)]	%	2,45	NA	NA	NA
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan [1)3)]	%	74,54	NA	NA	NA
28	Persentase Desa Mandiri [1)3)]	%	27,27	NA	NA	NA
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap [1)3)]	%	93,61	86,79	92,71	Sangat Tinggi
30	Indeks Pelayanan Transportasi [1)3)]	Angka	6,788	NA	NA	NA
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang [1)3)]	%	63,65	NA	NA	NA
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB[1)]	%	1,38	NA	NA	NA
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB[1)]	%	24,11	NA	NA	NA
34	Aset Dana Pensiun/PDRB[1)]	%	0,39	NA	NA	NA
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi[1)]	Nilai	3.846.660	NA	NA	NA
36	Total Kredit/PDRB[1)]	%	25,14	NA	NA	NA
37	Inklusi Keuangan[1)]	%	92,74	NA	NA	NA
D	**Aspek Pelayanan Umum**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi [2)]	Angka	92	NA	NA	NA
2	Indeks Integritas Nasional [1)]	Angka	80,97	NA	NA	NA
3	Indeks Demokrasi Indonesia [1)]	Angka	86,46 - 89,50	NA	NA	NA
4	Otonomi Fiskal Daerah [2)]	%	65,72	NA	NA	NA
5	Kapasitas Institusi [1)]	Angka	4,73	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
6	Indeks Reformasi Hukum [1)3)]	Angka	92	NA	NA	NA
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital [1)]	Angka	4,55/2,1	NA	NA	NA
8	Indeks Pelayanan Publik [1)]	Angka	4,56	NA	NA	NA
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM [1)3)]	Angka	86	NA	NA	NA
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya[1)]	%	79,5	NA	NA	NA
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah [1)]	Kategori	Sedang	NA	NA	NA
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah [1)]	Kategori	Cukup Tangguh	NA	NA	NA
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) [1)]	Angka	79,65 - 79,69	NA	NA	NA
14	Manajemen Risiko Indeks [2)]	Angka	3,38	NA	NA	NA
E	**Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**					
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
I	**Pendidikan**					
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun [3)4)]	%	72,88	77,97	106,98	Sangat Tinggi
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas [3)4)]	%	74,02	61,76	83,44	Tinggi
3	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesment Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi [3)6)]	%	64,95	53,21	81,92	Tinggi
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK [3)6)]	%	90,88	90,55	99,64	Sangat Tinggi
II	**Kesehatan**					
1	Angka Kematian Balita (AKABA) [2)3)]	per 1.000 KH	8,66	7,23	119,78	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan Kasus *Stunting* [2)3)]	%	0,15	0,14	107,14	Sangat Tinggi
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) [2)3)]	%	52	49	94,23	Sangat Tinggi
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) [2)3)]	%	34,3	20	58,31	Rendah
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [2)3)]	%	28,57	20	70,00	Sedang
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana dan Kesehatan Lingkungan [2)3)]	%	77	54,28	70,49	Sedang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
7	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Dr. Moewardi 3)6)	permil	55,8	64,63	86,34	Tinggi
8	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 3)6)	permil	30,13	56,38	53,44	Rendah
9	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH 3)6)	permil	33,1	39,49	83,82	Tinggi
10	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Rehatta 3)6)	permil	10,8	19	56,84	Rendah
11	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo 3)6)	permil	4,02	4,77	84,28	Tinggi
12	*Net Death Rate* (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin 3)6)	permil	2,98	2,05	145,37	Sangat Tinggi
13	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 3)6)	permil	13,05	13,17	99,09	Sangat Tinggi
14	*Net Death Rate* (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Roestam 3)6)	permil	33,1	NA	NA	NA
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 4)5)	%	100	NA	NA	NA
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 4)5)	%	100	NA	NA	NA
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	93,61	86,79	92,71	Sangat Tinggi
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap 3)6)	%	63,71	62,39	97,93	Sangat Tinggi
3	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor 3)6)	%	48,75	48,76	100,02	Sangat Tinggi
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 3)6)	%	41,20*)	NA	NA	NA
5	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar 3)6)	%	72,82	61,65	84,66	Tinggi
6	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air 3)6)	%	67,76	55,37	81,71	Tinggi
7	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 4)	%	24,65	NA	NA	NA
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 4)	%	100	NA	NA	NA
IV	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan 3)6)	%	62,66	61,87	98,74	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni [4)]	%	100	NA	NA	NA
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni [4)]	%	100	NA	NA	NA
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani [4)]	%	14,9	NA	NA	NA
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum [2)3)]	Angka	84,5	NA	NA	NA
2	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah [3)6)]	Angka	6,15	NA	NA	NA
3	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat [3)6)]	Angka	13,2	NA	NA	NA
4	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah [4)]	%	85,71	NA	NA	NA
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan [4)]	%	100	NA	NA	NA
6	Indeks Ketahanan Daerah [2)3)]	Angka	0,75	0,74	98,67	Sangat Tinggi
7	Persentase penanganan pra bencana[4)]	%	100	NA	NA	NA
8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana [4)]	%	100	NA	NA	NA
VI	**Sosial**					
1	Persentase Populasi PPKS [3)6)]	%	10,01	9,4	106,09	Sangat Tinggi
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sesuai SPM Bidang Sosial [3)5)]	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin [3)6)]	%	9,48	9,39	100,95	Sangat Tinggi
4	Persentase PSKS yang Meningkat Kompetensinya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [3)6)]	%	8,88	5,66	63,74	Rendah
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Persentase Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
9	Persentase korban bencana daerah provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat 4)5)	%	100	50	50	NA
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
I	**Tenaga Kerja**					
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR/*Employment to Population Ratio*) 2)3)	%	69,54	70,9	101,96	Sangat Tinggi
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 3)6)	%	74,39	65,94	88,64	Tinggi
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten 3)4)	%	10	5,62	56,20	Rendah
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 3)4)	Juta Rp	56,4	57,24	101,49	Sangat Tinggi
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja 3)4)	%	85,71	NA	NA	NA
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 4)	%	19,43	NA	NA	NA
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 4)	%	73,85	NA	NA	NA
8	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 4)	%	10,51	NA	NA	NA
II	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2)3)4)	Angka	93,47	93,73	100,28	Sangat Tinggi
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2)3)	Angka	65,35	73,67	112,73	Sangat Tinggi
3	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi 3)4)	%	12	NA	NA	NA
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif 4)	%	100	NA	NA	NA
5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif 4)	%	100	NA	NA	NA
III	**Pangan**					
1	Persentase cadangan pangan 4)	%	31	33,24	107,23	Sangat Tinggi
2	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah 3)4)	Angka	94,5	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
3	Persentase Daerah Rawan Pangan 3)4)	%	14.60	NA	NA	NA
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 3)4)	%	90,1	92,71	102,90	Sangat Tinggi
IV	**Pertanahan**					
1	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 3)6)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi 3)6)	%	55,5	52,78	95,10	Sangat Tinggi
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 4)	%	100	NA	NA	NA
4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 4)	%	100	NA	NA	NA
V	**Lingkungan Hidup**					
1	Indeks Kualitas Air (IKA) 2)3)	Angka	68,82	72,69	105,62	Sangat Tinggi
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) 2)3)	Angka	84,93	77,13	90,82	Sangat Tinggi
3	Indeks SO2 dan NO2 2)3)	Angka	0,3234	0,35	92.4	Sangat Tinggi
4	Indeks Pencemaran Air 2)3)	Angka	3,34	3,32	100.60	Sangat Tinggi
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 4)	%	50	NA	NA	NA
VI	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah 3)6)	Angka	85,5	NA	NA	NA
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah 3)6)	%	86,53	87,55	101,18	Sangat Tinggi
VII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah 3)6)	%	11,69	NA	NA	NA
VIII	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	*Total Fertility Rate* (TFR) 2)3)4)	Angka	2,1	2,06	98,10	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2)3)4)	Angka	64,5	71,5	110,85	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
3	Persentase *Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR 2)3)4)	%	69,75	NA	NA	NA
4	*Unmetneed* KB 2)3)4)	%	9,25	NA	NA	NA
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) 2)3)4)	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	16	NA	NA	NA
IX	**Perhubungan**					
1	Rasio Konektivitas Provinsi 3)6)	Angka	0,302	0,27	89,40	Tinggi
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi 3)6)	%	99,9838	99,98	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi 3)4)	%	6,94	6,36	91,64	Sangat Tinggi
4	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah 3)4)	%	98,03	98,03	100,00	Sangat Tinggi
X	**Komunikasi dan Informatika**					
1	Indeks Pemerintahan Digital 2)3)	Angka	2,1	NA	NA	NA
XI	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB 3)6)	%	13,52	6,46	47,78	Sangat Rendah
XII	**Penanaman Modal**					
1	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal 3)4)	%	10,13	5,35	52,81	Rendah
XIII	**Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2)3)	Angka	0,389	0,48	123,39	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 3)4)	Angka	60,25	63,23	104,95	Sangat Tinggi
XIV	**Statistik**					
1	Indeks Pembangunan Statistik 2)	Angka	2,81	NA	NA	NA
XV	**Persandian**					
1	Indeks Keamanan Sandi dan Siber 2)	Angka	3,59	NA	NA	NA
XVI	**Kebudayaan**					
1	Angka Melek Budaya 3)	%	55,32	53,85	97,34	Sangat Tinggi
XVII	**Perpustakaan**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 3)4)	Angka	42	38,86	92,52	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) 3)4)	Angka	68,5	57,11	83,37	Tinggi
XVIII	**Kearsipan**					
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah 3)4)	Angka	96,27	98,04	101,84	Sangat Tinggi
2	Persentase Arsip Bersejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) 3)6)	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (LKD Provinsi) 3)6)	Angka	97,29	99,5	102,27	Sangat Tinggi
	Urusan Pilihan					
I	**Kelautan dan Perikanan**					
1	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3)6)	%	2	5,46	273,00	Sangat Tinggi
2	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi 3)6)	%	0,84	0	0,00	Sangat Rendah
3	Produksi Perikanan 3)4)	Ton	954.029	465869,15	48,83	Sangat Rendah
4	Produksi Garam 3)4)	Ton	541.775,75	139,06	0,03	Sangat Rendah
II	**Pariwisata**					
1	Pengeluaran Wisatawan 3)6)	Rp	8.243.954	NA	NA	NA
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 3)6)	Juta Rp	102.344.465	NA	NA	NA
	Indikator Hasil Rakortek					
1	Rasio PDRB Akomodasi makan minum	%	3,6	3,9	108,33	Sangat Tinggi
2	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	152.820.000	134.431.531	87,97	Tinggi
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	70,79	NA	NA	NA
4	Tenaga Kerja Pariwisata	orang	43.795	NA	NA	NA
III	**Pertanian**					
1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian 3)6)	%	1,05	NA	NA	NA
2	Produksi Tanaman Pangan 3)4)	Ton	12.734.625	7263910	57,04	Rendah
3	Produksi Tanaman Hortikultura 3)4)	Ton	1.073.636***	507477	47,27	Sangat Rendah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
4	Produksi Tanaman Perkebunan 3)6)	Ton	3.868.006	701864,6	18,15	Sangat Rendah
5	Produksi Ternak 3)4)	Ton	1.936.930	1.262.231	65,17	Sedang
IV	**Kehutanan**					
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2)3)	Angka	59,47	60,3	101,40	Sangat Tinggi
2	Luas Tutupan Lahan 2)3)	Ha	1.022.457	1022457	100,00	Sangat Tinggi
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan 2)3)	%	0,43	NA	NA	NA
4	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi 3)4)	%	0,78	NA	NA	NA
V	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
1	Indeks Pengelolaan Air Tanah 3)6)	Angka	360	NA	NA	NA
2	Indeks Ketersediaan Air Tanah 3)6)	Angka	3,67	3,68	100,27	Sangat Tinggi
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan 3)6)	%	2,01	2,35	116,91	Sangat Tinggi
4	Persentase Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) 3)6)	%	63,5	67,42	106,17	Sangat Tinggi
5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik 3)6)	Angka	1	1,28	128,00	Sangat Tinggi
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda 4)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Rasio Elektrifikasi 2)	%	~100	99,99	99,99	Sangat Tinggi
VI	**Perdagangan**					
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 3)6)	%	4,3	0,75	17,44	Sangat Rendah
2	PDRB Sektor Perdagangan 3)6)	Milyar Rupiah	272.562,00	68819,52	25,25	Sangat Rendah
3	Ekspor barang dan jasa	%	11,12	NA	NA	NA
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen 4)	%	100	NA	NA	NA
VII	**Perindustrian**					
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian 3)6)	%	4	1,29	32,25	Sangat Rendah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
2	PDRB Sektor Perindustrian 3)6)	Milyar Rupiah	664.756.150.8	167351,32	0,03	Sangat Rendah
4	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki 3)6)	%	0,32	1,08	337,50	Sangat Tinggi
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 4)	%	100	NA	NA	NA
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
I	**Sekretariat Daerah**					
1	Indeks Kualitas Kebijakan 3)6)	Angka	66,4	NA	NA	NA
II	**Sekretariat DPRD**					
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3)6)	Angka	92	NA	NA	NA
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
I	**Perencanaan**					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2)3)	Angka	94,19	NA	NA	NA
2	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN 3)6)	Angka	27,75	NA	NA	NA
3	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN 3)6)	Angka	56,44	NA	NA	NA
4	Skor Aspek Keterhubunngan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja 3)6)	Angka	10	NA	NA	NA
II	**Keuangan**					
1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3)4)	%	5,41	1,19	22,00	Sangat Rendah
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3)6)	%	97,85	74,75	76,39	Tinggi
3	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 2)3)	Angka	3,12	3,08	98,72	Sangat Tinggi
III	**Kepegawaian**					
1	Indeks Sistem Merit 2)3)	Angka	0,87	0,87	100,00	Sangat Tinggi
2	Indeks NSPK Manajemen ASN 3)4)	Angka	93	91	97,85	Sangat Tinggi
IV	**Pendidikan dan Pelatihan**					
1	Indeks Kompetensi ASN 3)6)	Angka	3,1	3,94	127,10	Sangat Tinggi
V	**Penelitian dan Pengembangan**					
1	Indeks Inovasi Daerah 2)3)	Angka	73,5	NA	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala
			Target RKPD Tahun 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti 3)6)	%	100	50	50,00	Sangat Rendah
VI	**Pengelolaan Penghubung**					
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung 3)6)	Angka	86	86,25	100,29	Sangat Tinggi
	Unsur Pengawasan					
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 3)4)	Angka	3,52	2,97	84,38	Tinggi
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 3)4)	Angka	3,4	2,91	85,59	Tinggi
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2)3)	Angka	3,196	NA	NA	NA
	Unsur Pemerintahan Umum					
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD 3)6)	Angka	3,02	3,12	103,31	Sangat Tinggi
2	Indeks Harmonisasi Indonesia 2)3)	Angka	6,5	NA	NA	NA
3	Indeks Ketahanan Politik 3)6)	Angka	3,12	3,54	113,46	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Sebagian besar indikator telah menunjukkan progres yang sesuai dengan target tahunan, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai kategori tinggi hingga sangat tinggi. Total dari 250 indikator 70 indikator berskala sangat tinggi 17 indikator berskala tinggi, 4 indikator berskala sedang, 7 indikator berskala rendah, 14 indikator berskala sangat rendah dan 138 indikator data belum rilis.

Pada indikator urusan sosial realisasi mencapai 100% pada triwulan II dikarenakan seluruh sasaran atau penerima manfaat yang telah ditetapkan sebagai sasaran pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti telah mendapatkan layanan sejak masuk panti. Capaian tersebut tidak berarti seluruh proses rehabilitasi sosial telah selesai, karena layanan masih berlangsung secara berkelanjutan selama penerima manfaat berada di dalam panti. Indikator ini mengukur cakupan penerima layanan, sehingga setelah seluruh sasaran memperoleh layanan, capaian dapat tetap 100% sampai dengan akhir tahun. Capaian cakupan 100% juga tidak serta-merta menggambarkan kualitas dan intensitas layanan, karena perubahan dukungan sumber daya dapat memengaruhi mutu, kelengkapan, dan keberlanjutan layanan meskipun cakupan penerima manfaat tetap 100%. Dengan demikian, capaian 100% pada Triwulan II merupakan gambaran terpenuhinya cakupan layanan, sedangkan kualitas, keberlanjutan, dan hasil rehabilitasi sosial perlu dilihat melalui indikator kinerja lainnya.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMA	APK SMA	%	30,32	26,96	88,92	Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0,011	0,02	55,00	Rendah	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35,89	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64,45	63,75	98,91	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK	%	53,75	48,14	89,56	Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0,026	0,01	260,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Menengah Kejuruan
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	57	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Bidang Menengah Kejuruan
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60,86	60,35	99,16	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Menengah Kejuruan
		Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67,77	66,09	97,52	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Menengah Kejuruan
		Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB	%	91,74	94,09	102,56	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0,043	0,01	430,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
		Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54,05	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65,61	65,46	99,77	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76,84	70,83	92,18	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62,13	55,07	88,64	Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57,72	50,72	87,87	Tinggi	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1,74	1,15	66,09	Sedang	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	20,18	80,72	Tinggi	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	76,67	90	117,39	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,71	65,24	99,28	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,21	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83,1	87,23	104,97	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	73,3	79,2	108,05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83,8	82,8	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77,9	74,36	95,46	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,89	64,77	91,37	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	74,41	74,51	100,13	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,5	91,71	130,09	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	76,39	81,25	106,36	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	50,5	51,35	101,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70,56	72,81	103,19	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	73,33	54,79	74,72	Sedang	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	60,1	70,64	117,54	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	79,28	100,35	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	73,33	93,33	127,27	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89,9	89,77	99,86	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,2	82,26	120,62	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	83,05	82,43	99,25	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,49	65,38	95,46	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	70,34	61,42	87,32	Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86,2	89,2	103,48	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	68,28	67,53	98,90	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	81,8	81,13	99,18	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76,3	91,83	120,35	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	79,3	79,3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88,15	88,15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	69,17	69,17	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas sarpras Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	67,59	64,3	95,13	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	79,13	45,99	58,12	Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77,52	84,14	108,54	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya keterjangkauan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	71,15	37,5	52,71	Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	65,78	65,49	99,56	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79,25	76,08	96,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43,33	50	115,39	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	83,72	80,21	95,81	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,41	80,47	100,07	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,15	80	99,81	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	70	90	128,57	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	98,89	98,89	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	100	133,33	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	100	133,33	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	100	133,33	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	51	92,73	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0,43	0,15	34,88	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	66,66	70,91	Sedang	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70,36	66,66	94,74	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wilayah Pendidikan II							
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2,57	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	66,67	190,49	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	100	285,71	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12,4	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	17,4	20	114,94	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,7	68	98,98	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	70,8	70	98,87	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	15	60,00	Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	60	30	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85	100	117,65	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 95 indikator kinerja. Dari 95 indikator kinerja tersebut terdapat 62 indikator berskala sangat tinggi, 6 indikator berskala tinggi, 3 indikator berskala sedang, 4 indikator berskala rendah dan 20 indikator berskala sangat rendah. 20 Indikator yang berskala sangat rendah yaitu :

a. Persentase Prestasi Lomba SMA, SMK dan SLB Tingkat Nasional dikarenakan Isu strategis pada Triwulan II, kepastian pelaksanaan lomba di tingkat nasional belum dapat ditentukan tempat dan sumber pembiayaannya karena efisiensi anggaran baik di tingkat provinsi maupun nasional. Permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan lomba. Lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional belum dilaksanakan.
b. Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah dan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII dikarenakan usulan Perizinan Satuan Pendidikan masih dalam proses verifikasi cabang dinas.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	54,28	15,79	29,09	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	20,45	1.022,50	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7,5	7,57	99,08	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	70	90,91	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Prevalensi wasting balita	%	6,7	4,8	139,58	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51,19	45,71	89,29	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37,14	11,43	30,78	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	11,96	29,90	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	17,44	18,36	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	91	85,64	94,11	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	7	87,50	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	35	34	97,14	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota	20	24	120,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka kematian Dengue	%	0,5	0,2	250,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Hepatitis B	%	1,1	1,12	98,21	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	9,03	25,80	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	10,8	30,86	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	14,4	9,02	62,64	Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25,71	5,71	22,21	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	50	42,85	85,70	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	25	11,4	45,60	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8,57	2,85	33,26	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	40	80,00	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%	68,57	51,43	75,00	Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	41,27	25,4	61,55	Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	57,14	25,71	44,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74,28	73,16	98,49	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	85,06	100,07	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63,05	67,84	107,60	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,85	2,98	104,56	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	% CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sesuai dengan standar							
		Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34,28	20	58,34	Rendah	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 73 indikator kinerja. Dari 73 indikator kinerja tersebut terdapat 29 indikator berskala sangat tinggi, 7 indikator berskala tinggi, 5 indikator berskala sedang, 12 indikator berskala rendah dan 20 indikator berskala sangat rendah. 20 Indikator berskala rendah yaitu

a. Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar, Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH, Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung

pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar, Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%, Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten, Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam, Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam dan Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah.

b. Cakupan penemuan kasus tuberculosis dikarenakan:
    1) Belum maksimalnya kegiatan skrining skrining TBC
    Belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan jumlah petugas/kader terlatih dan belum meratanya jangkauan sasaran skrining.
    2) Masih terdapat delay reporting dalam penginputan di SITB
    Keterlambatan input data pada aplikasi SITB disebabkan oleh tingginya beban kerja petugas serta kendala akses jaringan/sistem.
    3) Masih terdapat stigma masyarakat terkait TBC
    Stigma masyarakat terhadap penderita TBC masih tinggi akibat kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai penyakit TBC.
    4) Belum intensifnya investigasi kontak
    Pelaksanaan investigasi kontak belum berjalan intensif karena keterbatasan tenaga pelaksana dan belum optimalnya jadwal kunjungan rumah.
c. Persentase Hipertensi dalam pengendalian dikarenakan belum semua kabupaten/kota melakukan input data disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM pengelola data serta belum optimalnya kepatuhan pelaporan di tingkat kabupaten/kota.
d. Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok dikarenakan perbedaan jumlah sasaran antara data Pusdatin dan daerah disebabkan oleh perbedaan sumber data serta belum sinkronnya metode penetapan sasaran antara pusat dan daerah serta aporan belum tersaji secara real time karena keterlambatan proses input data di tingkat pelaksana serta kendala kapasitas sistem pelaporan.

e. Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dikarenakan kualitas air belum memenuhi syarat disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sarana air bersih serta kurangnya pengawasan berkala terhadap sumber air dan kondisi SKUDR di TFU belum memenuhi syarat karena masih rendahnya kesadaran pengelola dalam menerapkan standar sanitasi serta kurangnya pembinaan dan pengawasan secara rutin.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
		Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	95,5	95,50	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA KONSTRUKSI
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58,97	95,5	95,50	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penampung air lainnya							
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68,45	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058,55	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,38	2688058,54	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65,71	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35,08	64,35	97,93	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	35,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	53	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69,64	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56,96	68,87	98,89	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,1	56,89	99,88	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	50,09	99,98	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69,3	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67,35	69,3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	67,35	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75,9	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	35	46,11	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	30	39,22	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					50	50,00	Sangat Rendah	
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31,02	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42,6	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
		Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
		Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	75	75	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
		Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,17	NA	NA	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	5	5,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189,63	1189,8	100,01	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59,69	58,32	97,70	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99,81	50	50,10	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19,67	5,91	30,05	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94,95	91,9	96,79	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64,59	63,5	98,31	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92,03	85,5	92,90	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70,53	65,06	92,24	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91,36	86,72	94,92	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50,84	52,08	102,44	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92,25	80,24	86,98	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65,54	68,88	105,10	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94,17	91,24	96,89	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73,4	71,36	97,22	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94,11	90,12	95,76	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59,12	58,31	98,63	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95,37	93,34	97,87	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75,41	72,92	96,70	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95,7	82,14	85,83	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59,5	56,83	95,51	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
		Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49,31	49,08	99,53	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	50	50	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58,86	20,86	35,44	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	41,5	98,81	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	51,5	99,04	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	39,87	38,26	95,96	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 58 indikator kinerja. Dari 58 indikator kinerja tersebut terdapat 31 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah dan 23 indikator berskala sangat rendah.

Capaian indikator sebesar 50% dari target termasuk dalam kategori sangat rendah berdasarkan Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik, realisasi sd TW II masih belum bisa dihitung tetapi akan tercapai di TW IV;
2. Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi, realisasi sd TW II masih belum bisa dihitung tetapi akan tercapai di TW IV;
3. Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal, akan tercapai di TW IV;
4. Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna, akan tercapai di TW IV
5. Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo, akan tercapai di TW IV;
6. Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto, akan tercapai di TW IV;
7. Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto, akan tercapai di TW IV;
8. Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan sangat rendah dikarenakan masih tahap pelaksanaan sampai dengan TW IV;
9. Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, akan tercapai di TW IV;
10. Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program, akan tercapai di TW IV;
11. Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal, akan tercapai di TW IV;
12. Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna, akan tercapai di TW IV;
13. Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo, akan tercapai di TW IV;
14. Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto, akan tercapai di TW IV.

Sedangkan capaian indikator yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dibawah 50% adalah sebagai berikut:

1. Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik dikarenakan capaian indikator masih rendah karena target berupa laporan penilaian kondisi fisik Embung baru dapat dinilai dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.
2. Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi dikarenakan capaian indikator masih rendah karena target berupa laporan penilaian kondisi fisik baru dapat dinilai dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.
3. Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik dikarenakan baru dapat dinilai dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.
4. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto dikarenakan tidak ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi.
5. Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto dikarenakan tidak ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi;
6. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan sangat rendah dikarenakan realisasi sd TW II masih belum bisa dihitung tetapi akan dilaksanakan pada TW IV;
7. Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan sangat rendah dikarenakan realisasi sd TW II masih belum bisa dihitung tetapi akan dilaksanakan pada TW IV;
8. Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun sangat rendah dikarenakan akan dilaksanakan pada TW IV;
9. Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis sangat rendah dikarenakan akan dilaksanakan pada TW III dan IV;
10. Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan dikarenakan capaian indikator masih sangat rendah karena penandatanganan kontrak Paket Jasa Konsultansi Pengawasan baru dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026, sehingga pelaksanaan pekerjaan belum berjalan optimal pada periode penilaian;
11. Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi dikarenakan sangat rendah dikarenakan akan dilaksanakan pada TW III dan IV;
12. Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi sangat rendah dikarenakan akan dilaksanakan pada TW IV;
13. Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program dikarenakan akan tercapai di TW IV.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
		Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16,9	14,18	83,91	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
		Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0,47	0,57	121,28	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
		Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14,9	8,45	56,71	Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
		Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7,69	6,15	79,97	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
		Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6,84	5,43	79,39	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 3 indikator berskala tinggi dan 1 indikator berskala rendah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Meningkatnya pengendalian Tibumtranmas di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80,71	22,86	28,32	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Meningkatnya penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85,71	0	0,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Hukum Daerah
		Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8,57	0	0,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
		Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6,8	5,23	76,91	Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	50	55,56	Rendah	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
		Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	0	0,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penanganan Kebakaran

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi,1 indikator berskala rendah dan 3 indikator berskala sangat rendah. 3 indikatro berskala sangat rendah.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
		Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8,88	6,33	71,28	Sedang	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								
		Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso							
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
		Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		Terselenggarannya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0,27	0,03	11,11	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
		Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
		Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 28 indikator kinerja. Dari 28 indikator kinerja tersebut terdapat 24 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, dan 3 indikator berskala sangat rendah. 3 indikator yang berskala rendah yaitu:

Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat dikarenakan Capaian indikator UEP masih rendah karena kelengkapan berkas pencairan dari penerima bantuan belum lengkap dan belum disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Capaian indikator KUBE masih rendah karena proses pembukaan rekening dan pemenuhan dokumen pencairan oleh kabupaten/kota masih berlangsung, meskipun SK Penerima telah diterbitkan dan pencairan dijadwalkan pada awal Juli.

Indikator pada program rehabilitasi sosial dengan capaian 100% pada triwulan II dikarenakan seluruh sasaran atau penerima manfaat yang telah ditetapkan sebagai sasaran pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti telah mendapatkan layanan sejak masuk panti. Capaian tersebut tidak berarti seluruh proses rehabilitasi sosial telah selesai, karena layanan masih berlangsung secara berkelanjutan selama penerima manfaat berada di dalam panti. Indikator ini mengukur cakupan penerima layanan, sehingga setelah seluruh sasaran memperoleh layanan, capaian dapat tetap 100% sampai dengan akhir tahun. Capaian cakupan 100% juga tidak serta-merta menggambarkan kualitas dan intensitas layanan, karena perubahan dukungan sumber daya dapat memengaruhi mutu, kelengkapan, dan keberlanjutan layanan meskipun cakupan penerima manfaat tetap 100%. Dengan demikian, capaian 100% pada Triwulan II merupakan gambaran terpenuhinya cakupan layanan, sedangkan kualitas, keberlanjutan, dan hasil rehabilitasi sosial perlu dilihat melalui indikator kinerja lainnya.

Indikator “Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak” pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian 100% pada Triwulan II dikarenakan seluruh permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan dan menjadi kewenangan pelayanan sampai dengan Triwulan II telah difasilitasi dan diterbitkan rekomendasinya. Capaian tersebut mencerminkan terpenuhinya fasilitasi terhadap seluruh permohonan yang menjadi sasaran pelayanan pada periode pengukuran, bukan menunjukkan bahwa seluruh proses pelayanan pengangkatan anak telah selesai. Dengan demikian, capaian 100% pada Triwulan II merupakan gambaran bahwa seluruh permohonan yang telah memenuhi persyaratan pada periode tersebut telah mendapatkan fasilitasi sesuai ketentuan. Sementara itu pada indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial” tercapai 100% pada triwulan II dikarenakan seluruh PPKS yang telah ditetapkan sebagai penerima jaminan sosial berdasarkan kriteria kelayakan dan ketepatan sasaran telah memperoleh jaminan sosial. Capaian tersebut tidak berarti penyelenggaraan jaminan sosial telah selesai, tetapi menunjukkan bahwa seluruh sasaran penerima yang telah ditetapkan sampai dengan periode pengukuran telah terlayani. Dengan demikian, angka 100% mencerminkan terpenuhinya cakupan penyelenggaraan jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran, sedangkan keberlanjutan dan kualitas perlindungan sosial tetap perlu dijaga selama PPKS masih menjadi sasaran penerima manfaat.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

7. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85,71	80	93,34	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
		Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,28	6,19	66,70	Sedang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14,29	3,8	26,59	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	46	67,65	Sedang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83,68	27,89	33,33	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	10	10,93	109,30	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A
		Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	32,44	44,44	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23,38	23,07	98,67	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44,05	41,21	93,55	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68,5	30,78	44,93	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21,75	19,39	89,15	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67,71	81,49	120,35	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
		Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51,03	29,52	57,85	Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,8	49,7	99,80	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43,26	44,58	103,05	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,75	98,67	101,98	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
		Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,8	40	49,50	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27,06	15,79	58,35	Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 18 indikator kinerja. Dari 18 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi,2 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah dan 5 indikator berskala sangat rendah. 5 indikator yang berskala rendah yaitu:

a. Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai pada bulan Juni, menyusul pembukaan portal akreditasi yang baru dilakukan pada bulan Mei.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	94,28	110,92	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
		Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	22,86	95,25	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61,5	71,96	117,01	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	80,93	102,44	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator berskala sangat tinggi, dan 2 indikator berskala tinggi. 2 indikator berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi rendahnya realisasi disebabkan oleh belum terlaksananya Bimbingan Teknis dari KemenPPPA, mengingat masih menunggu formulasi baru untuk perhitungan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sehubungan dengan hal tersebut, perhitungan ARG seluruh OPD Provinsi baru akan dimulai pada Triwulan III dengan hasil final pada Triwulan IV;
b. Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha dikarenakan pelaksanaan PPEP telah memasuki tahap 2 dari total 5 tahapan pelatihan yang dijadwalkan sepanjang tahun 2026, yaitu: (1) Workshop Need Assessment, Pengelolaan Sumber Daya Lokal dan Kewirausahaan Perempuan pada Mei; (2) Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif dan Teknik/Desain Pengemasan pada Juni; (3) Pelatihan Teknik Desain/Pengemasan dan Strategi Pemasaran pada Juli; (4) Perijinan Usaha dan Perencanaan Pengembangan Usaha pada Agustus; serta (5) Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal pada September. Adapun outcome berupa keberhasilan kelompok dampingan dalam melanjutkan usahanya baru akan dianalisis pada Triwulan IV

9. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
		Tercapaianya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1,21	2	165,29	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0,47	0,33	70,21	Sedang	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,5	92,86	148,58	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,3	80,93	92,70	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
		Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14,6	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90,1	92,71	102,90	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
		Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	40	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari total 7 indikator tersebut 6 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sedang.

10. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
		Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
		Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

11. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
		Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	46,15	46,15	Sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Menurunnya emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3,26	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0,4	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan ingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kebun Raya Baturraden	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
		Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	40	40	Sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	54,29	95,24	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	60	60	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
		Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	63	58,75	93,25	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 indikator kinerja. Dari 12 indikator kinerja tersebut terdapat 6 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah , 2 indikator berskala sangat rendah, dan 3 indikator NA. 3 indikator NA dikarenakan realisasi capaiannya dihitung pada akhir tahun anggaran sedangkan 2 indikator yang berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dikarenakan pada triwulan II, dokumen perencanaan lingkungan hidup telah terealisasi melalui penyusunan Dokumen SLHD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, pelaksanaan asistensi dan verifikasi RPPLH di beberapa kabupaten/kota, sinkronisasi dan bimbingan teknis D3TLH, pembinaan RPLH

- Indonesia Hijau, serta penyusunan KLHS RDTR untuk tiga kawasan, yaitu Undaan, Sumpiuh, dan Bawen;

b. Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan realisasi kegiatan mengalami hambatan disebabkan oleh adanya perubahan regulasi, yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, sehingga proses Rapat Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Teknis memerlukan penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99,07	99,43	100,36	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99,12	98,8	99,68	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
		Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah	Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dan seluruhnya berskala sangat tinggi.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								
		Meningkatnya Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	57,05	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya fasilitasi evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Bina Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45,96	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya di Jawa Tengah	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut 4 indikator berskala sangat tinggi dan 2 indikator berskala sangat rendah. 2 indikator berskala sangat rendah yaitu :

a. Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) dikarenakan kegiatan Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan direncanakan dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah ditetapkan;
b. Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah realisasi belum tercapai disebabkan oleh belum dirilisnya hasil pemeringkatan BUMDes dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengingat proses pendataan masih berlangsung .

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	100	133,33	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69,48	68,64	98,79	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	44,59	131,15	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

15. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
		Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6,94	6,36	91,64	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98,03	98,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46,74	44,26	94,69	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,85	41,3	59,13	Rendah	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menggunakan angkutan umum							
		Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70,14	70,14	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52,95	50,32	95,03	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22,04	22,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57,12	55,64	97,41	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,99	3,99	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86,2	86,34	100,16	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,11	45,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	1,5	50,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81,84	81,82	99,98	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8,04	7,66	95,27	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	1,8	60,00	Rendah	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92,83	92,45	99,59	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43,53	41,45	95,22	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87,09	86,4	99,21	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28,16	26,76	95,03	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88,66	89,02	100,41	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,42	4,42	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,472	0,41	86,86	Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
		Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	10	35,71	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 27 indikator kinerja. Dari 27 indikator kinerja tersebut terdapat 22 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala rendah,dan 2 indikator berskala sangat rendah. 2 indikator yang berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi penanganan daerah rawan kecelakaan pada tahun 2026 yang baru mencapai 50%. Dari target 2 lokasi penanganan, saat ini baru terealisasi 1 lokasi pada triwulan I, sementara 1 lokasi lainnya dijadwalkan selesai pada triwulan IV.

b. Persentase perlintasan sebidang kereta api yang dilengkapi perlengkapan jalan belum mencapai target penuh, mengingat proses pengerjaan pemasangan perlengkapan jalan saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada triwulan III.

16. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
		Meningkatnya Kualitas Informasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	84,32	99,20	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	15,58	62,32	Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	12	6	50,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	54,41	83,71	Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 1 indikator berskala sangat rendah yaitu Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dikarenakan hasil perhitungan persentase capaian kinerja

menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah.

17. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
		Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	27,1	9,94	36,68	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	93,92	103,21	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
		Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif	%	53,3	27,9	52,35	Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17,15	8,65	50,44	Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM
		Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	97,38	107,01	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
		Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	100	117,65	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
		Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	12,63	42,10	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala rendah, dan 2 indikator berskala sangat rendah. 2 indikator yang berskala rendah.

18. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
		Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	10	25,73	257,30	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	62	30	48,39	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
		Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91,5	99,71	108,97	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
		Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	6	24,00	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
		Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	9,01	90,10	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, dan 2 indikator berskala sangat rendah. 2 indikator berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui dikarenakan capaian yang ditampilkan merupakan capaian Triwulan I berdasarkan rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, sedangkan capaian Triwulan II masih

menunggu rilis data resmi dari BKPM RI.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8,6	3	34,88	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80,6	20,1	24,94	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pemberdayaan Pemuda

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20,85	8,5	40,77	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Pemuda
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	10	3,5	35,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0,34	0,02	5,88	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga pelajar tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir dikarenakan data Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Tahun 2026 belum tersedia dikarenakan proses pengukuran masih berlangsung sejak pertengahan Juli hingga akhir Oktober. Data yang ditampilkan merupakan Laporan Analisis Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

20. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
		Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat rendah yaitu Indeks satu Data Indonesia belum tercapai dikarenakan Asesmen dari Bappenas Tahun 2026 baru akan dilaksanakan pada Juli 2026.

21. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3,59	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat rendah.yaitu Tingkat Kematangan Keamanan Siber Realisasi belum tercapai dikarenakan Asesmen Tingkat Kematangan Indeks Keamanan Persandian (IKASANDI) Tahun 2026 baru akan dilaksanakan pada Agustus 2026.

22. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26,1	29,72	113,87	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27,11	24,44	90,15	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	32	44,44	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
		Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1,12	0,39	34,82	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
		Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53,55	53,21	99,37	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13,6	13,15	96,69	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16,12	14,96	92,80	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,1	90,38	100,31	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 6 indikator berskala sangat tinggi dan 2 indikator berskala sangat rendah. 2 indikator berskala sangat rendah yaitu.

23. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai bertikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	45,27	44,53	98,37	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	98,25	115,32	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
		Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9,43	5,32	56,42	Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator. Dari 3 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator masih berskala rendah.

24. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	54,67	122,19	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
		Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	76,8	97,03	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,7	86,25	100,64	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66,67	61,9	92,85	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20,34	9,49	46,66	Sangat Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	11,4	5,99	52,54	Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 1 indikator berskala sangat rendah yaitu Persentase pemulihan arsip akibat bencana dikarenakan realisasi kegiatan didasarkan pada adanya permintaan fasilitasi preservasi arsip terdampak bencana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Purwodadi sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50,17	50,28	100,22	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	12,5	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0,07	0,06	85,71	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0,16	0,18	112,50	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0,19	0,15	78,95	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	191746	54,16	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdoyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
		Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	274123,15	45,69	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	61,5	87,86	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	12	70,59	Sedang	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	48	66,67	Sedang	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	26	42,62	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	2	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	17,71	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 29 indikator. Dari 29 indikator kinerja tersebut terdapat 14 indikator berskala sangat tinggi, 3 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah,dan 9 indikator berskala sangat rendah. 9 indikator berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan dan Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan dikarenakan hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah
b. Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut dikarenakan realisasi produksi Ikan Kerapu belum optimal dikarenakan ikan yang layak dipasarkan merupakan ikan dengan bobot minimal 500 gram/ekor, sehingga ikan yang belum mencapai ukuran konsumsi tersebut masih memerlukan proses pembesaran lebih lanjut;

c. Produksi Perikanan Budidaya dikarenakan capaian yang ditampilkan merupakan data sementara produksi perikanan budidaya pada Triwulan II di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 135.095,38 ton;
d. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan dikarenakan data Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan belum tersedia dikarenakan masih menunggu penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan pengawasan.
e. Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan dikarenakan kegiatan pengawasan Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dari IUU Fishing pada Triwulan II telah dilaksanakan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, dengan hasil 5 (lima) kapal terperiksa pada kegiatan patroli pengawasan serta 3 (tiga) pelaku usaha terperiksa pada kegiatan pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi.
f. Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur dikarenakan kegiatan Operasi Pengawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 pada Triwulan II telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari, meliputi wilayah perairan Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang.
g. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur dikarenakan kegiatan pengawasan pada Triwulan II telah dilaksanakan, meliputi pengawasan budidaya laut di Kabupaten Jepara, pengawasan sumber daya kelautan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang, serta pengawasan penangkapan/pengangkutan ikan di Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang. Realisasi persentase kepatuhan pelaku usaha belum dapat dihitung karena bersifat akumulatif selama 1 (satu) tahun, sehingga baru dapat diketahui pada akhir tahun. Kegiatan pengawasan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.
h. Angka Konsumsi Ikan dikarenakan dikarenakan angka Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2025 tercatat sebesar 16,32 kg/kapita/tahun, sedangkan perhitungan Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2026 baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2026.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
		Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75348282	41136287	54,59	Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/Kota	1	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
		Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3,3	16,6	503,03	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4,3	3	69,77	Sedang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator. Dari 5 indikator kinerja tersebut terdapat, 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah dan 2 indikator berskala sangat rendah. Indikator yang berkala sangat rendah yaitu:

a. Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan dikarenakan perhitungan indikator dilakukan akhir Tahun 2026.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi	Ton	9380811	5664901	60,39	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung	Ton	3301024	1597500	48,39	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai	Ton	52790	1509	2,86	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah	Ton	617015	264784	42,91	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai	Ton	456621	242693	53,15	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392201	28839	7,35	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi	Ton	26875	5509,85	20,50	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu	Ton	3674236	626894,55	17,06	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	Ton	166955	69460,2	41,60	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6135083	4859861	79,21	Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan
		Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	75	92,59	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	40,47	40,47	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	11,63	11,63	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	13	13,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	24,34	24,34	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	27,01	2701,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	1,1	110,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	0,66	66,00	Sedang	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	0,66	66,00	Sedang	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	1	33,33	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	29,54	2954,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	20	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
		Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	48,39	4839,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	53,66	178,87	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner	%	100	57,68	57,68	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	5	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi pertanian							
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	2,5	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
		Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0,2	0,05	25,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1,25	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	53,57	53,57	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 39 indikator. Dari 39 indikator kinerja tersebut terdapat 9 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang , 4 indikator berskala rendah dan 23 indikator berskala sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah adalah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebagai berikut:
   1) Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan;
   2) Persentase layanan sertifikasi benih tanaman Perkebunan;
   3) Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura;
   4) Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan;
   5) Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan;
   6) Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura;
   7) Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura;
b. Produksi Jagung disebabkan oleh penurunan luas panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta dampak bencana banjir dan kekeringan.
c. Produksi Kedelai disebabkan oleh adanya alih komoditas ke tanaman padi sebagai prioritas program swasembada pangan, serta belum

adanya jaminan harga sehingga minat petani untuk menanam kedelai berkurang.

d. Produksi Bawang Merah dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang mengakibatkan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sehingga menghambat pertumbuhan tanaman.
e. Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat disebabkan oleh belum seluruh tanaman memasuki masa produksi (panen), serta adanya penurunan luas tanam pada tanaman obat akibat rendahnya minat petani seiring dengan harga jual yang relatif rendah.
f. Produksi Tebu dikarenakan proses pemanenan baru dimulai pada awal Juni dan diperkirakan mencapai puncak panen raya pada Agustus.
g. Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang dikarenakan sebagian tanaman padi Musim Tanam II (Januari) masih dalam tahap prosesing benih, sedangkan tanaman palawija Musim Tanam III (April) baru memasuki masa panen dan tahap prosesing benih.
h. Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang dikarenakan sebagian tanaman yang ditanam pada Mei masih dalam fase pemeliharaan dan direncanakan panen pada Agustus–September.
i. Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang sebagian tanaman yang ditanam pada akhir Mei masih dalam fase pemeliharaan.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21,96	10	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,11	0,03	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK I	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0,01	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK II	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0,02	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK II	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK III	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0,01	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK III	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IV	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0,02	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IV	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK V	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0,08	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK V	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0,01	0,1	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	50	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VIII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0,01	0,01	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IX	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0,01	0,02	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IX	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK X	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0,01	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK X	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	%	100	50	50,00	sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	42,05	42,05	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK XI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0,01	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK XI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	45	45,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0,01	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
		Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	50	50,00	Sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	82,5	113,01	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan eksosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	0,6	24,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK I	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0,3	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK II	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0,2	0,1	50,00	Sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK III	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IV	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK V	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0,3	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0,2	0,1	50,00	sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VIII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IX	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK X	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK XI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0,2	0	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0,3	0,8	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	5	50,00	Sangat rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 41 indikator. Dari 41 indikator kinerja tersebut terdapat 9 indikator berskala sangat tinggi dan 32 indikator berskala sangat rendah.Indikator yang berskala rendah adalah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebagai berikut:
   1) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6
   2) Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10
   3) Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif
   4) Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2
   5) Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6

6) Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani

b. Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan dikarenakan progres pelaksanaan kegiatan meliputi: (1) Pelayanan Rekomendasi Teknis Penggunaan Kawasan Hutan, melalui pengecekan lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Jalan Pemkab Jepara dan PT. Dwi Wahana Delta; (2) Penyediaan Data, melalui rekonsiliasi PNBP Triwulan I dengan Kementerian Kehutanan di Bandung; (3) Kegiatan HHBK, melalui fasilitasi perizinan industri di Kabupaten Demak, Banyumas, Sragen, Jepara, Klaten, dan Boyolali, serta Bimbingan Teknis Budidaya Cabai Jamu di Desa Waru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai Desa Binaan DLHK Provinsi Jawa Tengah; (4) Pengolahan HHK dan HHBK, melalui monitoring dan evaluasi tertib PUHH di KPH Blora, KPH Randublatung, KPH Pekalongan Timur, dan KPH Pemalang, Rapat Koordinasi (Zoom) input data SIPATOK/PUHH Perhutani, evaluasi kinerja PUHH PBPHH terhadap 30 peserta wilayah CDK Banyumas, serta monitoring dan evaluasi PUHH PBPHH Banyumas pada UD Semesta Raya, Indra Jaya, dan Berkah Rimba; dan (5) Penyuluhan, melalui penilaian kelas terhadap 6 (enam) Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan hasil seluruh KTH mengalami kenaikan kelas dari Pemula menjadi Madya.
c. Persentase lahan kritis tertangani dikarenakan menunggu kesiapan lokasi tanam dan bibit
d. Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I dikarenakan realisasi rehabilitasi mangrove telah tercapai seluas 0,7 Ha, sedangkan pengkayaan hutan rakyat belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap persiapan lokasi dan Calon Petani Calon Lahan (CPCL).
e. Persentase lahan kritis tertangani CDK 2 dikarenakan program Pengelolaan Hutan pada Triwulan II baru dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan persiapan penanaman hutan rakyat serta rehabilitasi mangrove. Penanaman hutan rakyat dijadwalkan pada Triwulan IV, sedangkan penanaman mangrove "Mageri Segoro" direncanakan berlangsung pada Juli–Oktober 2026 sesuai dengan kesiapan lokasi tanam dan bibit mangrove.
f. Persentase lahan kritis tertangani CDK 3 dikarenakan berdasarkan permintaan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta mempertimbangkan kondisi curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Sumowono, dan Kecamatan Bandungan, penanaman Pengkayaan Hutan Rakyat pada 4 (empat) KTH yang semula direncanakan pada Triwulan IV telah dimajukan dan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II.
g. Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3 dikarenakan masih terjadinya gangguan keamanan hutan di beberapa lokasi, seperti penebangan liar, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penggembalaan liar.
h. Persentase lahan kritis tertangani CDK 4 dikarenakan pelaksanaan pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove direncanakan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV (Oktober–November), menyesuaikan dengan musim penghujan.
i. Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4 dikarenakan pada Triwulan I tidak terdapat permasalahan terkait Gangguan Keamanan Hutan (Gukamhut), dpada tahap koordinasi dan perencanaanan kegiatan masih berada pada tahap koordinasi dan perencanaan, seperti persiapan patroli perlindungan serta pencegahan kebakaran hutan.

j. Persentase lahan kritis tertangani CDK 5 dikarenakan menunggu kesiapan lahan dan bibit
k. Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5 dikarenakan pada tahap koordinasi dan perencanaan
l. Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9 dikarenakan pada tahap koordinasi dan perencanaan
m. Persentase lahan kritis tertangani CDK 10 disebabkan oleh mulai memasuki musim kemarau, dengan intensitas hujan yang menurun serta kondisi cuaca yang sangat panas di lokasi tanam.
n. Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi dikarenakan Realisasi kegiatan ditunjukkan dengan telah terdistribusikannya bibit sejumlah 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) batang.
o. Persentase lahan kritis tertangani CDK 11 Progres kegiatan pada Triwulan II berupa pengendalian pelaksanaan program penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK XI.
p. Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11 progres kegiatan pada Triwulan II berupa pengendalian pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan untuk penanganan gangguan keamanan hutan.
q. Persentase lahan kritis tertangani CDK 7 dikarenakanpada tahap koordinasi dan perencanaan
r. Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani dikarenakanmasih tahap koordinasi
s. Persentase peningkatan kelas kelompok Masyarakat dikarenakan berdasarkan hasil pendampingan dan pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH), telah dilaksanakan penilaian kelas terhadap 6 (enam) KTH, dengan hasil seluruh KTH mengalami kenaikan kelas dari Pemula menjadi Madya, serta telah diterbitkan sertifikat penetapan kelas bagi keenam KTH dimaksud.
t. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) pada KTH Krida Taruwana, Desa Dringo, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, serta KTH Jati Makmur, Desa Ngulahan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
u. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3 dikarenakan sebagian Kelompok Tani Hutan (KTH) belum memenuhi indikator kenaikan kelas dikarenakan aspek kelembagaan dan administrasi yang masih belum tertata dengan baik.
v. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4 dikarenakan realisasi masih dalam tahap pendampingan dan bimbingan, dengan target penyelesaian Peningkatan Kelas Kelompok direncanakan tercapai pada Triwulan IV.
w. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8 dikarenakan realisasi masih dalam tahap pendampingan dan bimbingan, dengan target penyelesaian Peningkatan Kelas Kelompok direncanakan tercapai pada Triwulan IV.
x. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10 realisasi kegiatan berupa sosialisasi penguatan kelembagaan serta pendampingan pengembangan perhutanan sosial.
y. Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11 progres kegiatan pada Triwulan II berupa pengendalian pelaksanaan

kegiatan diklat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
		Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27,58	27,18	98,55	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Solo	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2,98	2,8	93,96	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,3	3,48	105,45	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,58	1,59	100,63	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,98	1,92	96,97	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	3,95	3,87	97,97	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,27	2,21	97,36	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,6	2,46	94,62	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6,99	4,7	67,24	Sedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Merapi	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,65	2,66	100,38	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,49	1,48	99,33	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72,9	77,48	106,28	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72,9	55,56	76,21	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72,9	66,67	91,45	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72,9	87,5	120,03	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	72,9	84,62	116,08	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72,9	82,53	113,21	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72,9	65,71	90,14	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Slamet Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72,9	81,82	112,24	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72,9	90	123,46	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72,9	77,78	106,69	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72,9	72,73	99,77	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972,99	450,76	46,33	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179,64	122,01	67,92	Sedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26,08	22,17	85,01	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144,05	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57,95	57,95	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45,11	45,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98,93	98,93	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165,42	165,42	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127,91	108,72	85,00	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28,97	28,97	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98,93	98,93	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43,02	22,61	52,56	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43,11	21,65	50,22	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Kendeng Muria	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43,13	23,66	54,86	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43,11	21,56	50,01	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43,13	22,86	53,00	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Slamet Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43,07	23,44	54,42	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43,1	21,59	50,09	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43,11	22,6	52,42	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42,31	21,61	51,08	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43,03	22,22	51,64	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43,07	23,46	54,47	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 46 indikator. Dari 46 indikator kinerja tersebut terdapat 26 indikator berskala sangat tinggi, 3 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang, 11 indikator berskala rendah dan 4 indikator berskala sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah adalah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebagai berikut:
   1) Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah
   2) Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah
b. Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah dikarenakan masih proses pelaksanaan dan ditargetkan akan tercapai di triwulan ketiga dan saat ini masih dalam proses pembangunan.
c. Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara dikarenakan masih proses pelaksanaan dan ditargetkan akan tercapai di triwulan ketiga dan saat ini masih dalam proses Pembangunan.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
		Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	3,81	42,33	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								
		Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0,52	-0,19	-36,54	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
		Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11,12	44,51	400,27	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
		Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1,05	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	1,02	51,00	Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	3,03	60,60	Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
		Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala rendah, dan 5 indikator berskala sangat rendah. Indikator berskala sangat rendah adalah sebagai berikut:

a. Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah realisasi berpotensi terpengaruh dikarenakan mulai 1 Januari 2027 Indonesia tidak lagi menerima fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) berupa keringanan tarif bea masuk dari United Kingdom melalui Duty Advantage Benefit (DAB) dan Surat Keterangan Asal (SKA), sebagaimana informasi resmi pada situs www.gov.uk. Hal tersebut sejalan dengan klasifikasi Bank Dunia yang telah menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*), serta dipengaruhi pula oleh kondisi politik global yang belum kondusif.
b. Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan
c. Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau dikarenakan terjadi deflasi sebesar 0,19% yang disebabkan oleh melimpahnya stok bahan pokok, sehingga mengakibatkan penurunan harga bahan pokok.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6,23	4,58	73,52	Sedang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri
		Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,41	4,04	167,63	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
		Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	8,11	81,10	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	3,75	75,00	Sedang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	100	116,28	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
		Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,4	4,4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	3,28	54,67	Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
		Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	4,88	48,80	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinera. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah, dan 1 indikator berskala sangat rendah yaitu Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional dikarenakan adanya sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan antara OPD Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan kegiatan desiminasi dan sosialisasi SIINAS.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
		Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2,06	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1,2	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan skala indikator sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah yaitu:

a. Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi dikarenakan alokasi transmigrasi baru diterbitkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2026 tanggal 6 Mei 2026, tentang Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penempatan Transmigran Tahun 2026.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	71	25	35,21	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91,43	85,71	93,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	33	35,87	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59,52	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71,42	48,57	68,01	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71,43	47,22	66,11	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	57,7	62,04	Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39,21	39,21	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	25	29,41	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	10	15,87	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	69,91	72,82	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	55,38	55,38	Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	91,18	107,27	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	83,93	98,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	91,3	107,41	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	61,33	70,49	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1,95	0,85	43,59	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2,3	2	86,96	Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
		Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	45	81,82	Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	63,92	69,48	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	61	71,76	Sedang	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	65,33	78,71	Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	27	31,40	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,5	110,59	127,85	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	35,56	39,51	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 33 indikator kinerja. Dari 33 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator berskala sangat tinggi, 3 indikator berskala tinggi, 6 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah dan 15 indikator berskala sangat rendah. Indikator berskala sangat rendah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator

tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebagai berikut:

1) Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti
2) Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti
3) Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah
4) Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan

b. Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi realisasi kegiatan berupa fasilitasi pengukuran tingkat kematangan organisasi perangkat daerah beserta identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penilaian mandiri, serta sosialisasi pengukuran kinerja organisasi pasca penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah.
c. Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A dikarenakan terdapat perbedaan indikator dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu realisasi indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kategori A.
d. Indeks Reformasi Hukum dikarenakan masih dalam tahapan unggah data dukung pemenuhan Indeks Reformasi Hukum oleh tim kerja, serta proses penilaian mandiri oleh asesor.
e. Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dikarenakan penilaian dilaksanakan pada akhir tahun dan saat ini masih menunggu instrumen penilaian dari Pemerintah Pusat.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Persidangan	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80,31	60	74,71	Sedang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87,29	50	57,28	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98,74	60	60,77	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,08	44,54	50,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	99,07	49,35	49,81	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80,49	40,25	50,01	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,59	38,3	50,01	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	85,76	38,3	44,66	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	97,84	48,92	50,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	99,29	49,65	50,01	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87,03	43,52	50,01	Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83,84	41,92	50,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 indikator kinerja. Dari 12 indikator kinerja tersebut 1 indikator berskala sedang, 6 indikator berskala rendah dan 5 indikator berskala sangat rendah. Indikator berskala sangat rendah yaitu:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebagai berikut:
   1) Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   2) Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   3) Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan .

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
		Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
		Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50,5	0	0,00	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70,5	0	0,00	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	0	0,00	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	39,48	39,48	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	69,38	69,38	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	38,7	38,70	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	68,31	68,31	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	48,97	48,97	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	62,97	62,97	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	39,47	39,47	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	57,84	57,84	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	37,48	37,48	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	88,84	88,84	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	39,89	39,89	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	51,93	51,93	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	42,67	42,67	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	62,28	62,28	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	43,28	43,28	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	54,8	54,80	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	39,66	39,66	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	54,71	54,71	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	39,56	39,56	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	52,82	52,82	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	39,76	39,76	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	62,07	62,07	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	38,45	38,45	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	50,69	50,69	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	40,14	40,14	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	38,46	38,46	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	40,37	40,37	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	69,54	69,54	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	39,59	39,59	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	56,46	56,46	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	44,25	44,25	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	95	95,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	41,42	41,42	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	82,57	82,57	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	43,42	43,42	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	54,9	54,90	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	41,39	41,39	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	57,36	57,36	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	41,34	41,34	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	47,69	47,69	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	41,6	41,60	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	52,76	52,76	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	42,97	42,97	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	51,41	51,41	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	41	41,00	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	54,72	54,72	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	42,06	42,06	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	63,36	63,36	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	40,38	40,38	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	89,81	89,81	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	42,49	42,49	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	51,37	51,37	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	42,23	42,23	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	72,9	72,90	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	41,56	41,56	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	65,5	65,50	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	41,92	41,92	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	77,16	77,16	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	41,86	41,86	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	74,7	74,70	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	43,18	43,18	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	73,04	73,04	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	37,92	37,92	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	61,19	61,19	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	39,81	39,81	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	87,17	87,17	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	42,76	42,76	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	86,57	86,57	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	41,11	41,11	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	76,66	76,66	Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	38,2	38,20	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	66,86	66,86	Sedang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	41,69	41,69	Sangat Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	51,04	51,04	Rendah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 89 indikator kinerja. Dari 89 indikator kinerja tersebut terdapat 13 indikator berskala sangat tinggi, 8 indikator berskala sedang 19 indikator berskala rendah dan 42 indikator berskala sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah sebagai berikut:

a. Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif
b. Tingkat Administrasi BMD yang Andal
c. Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif
d. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I
e. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II

f. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III
g. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran
h. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga
i. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal
j. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak
k. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi
l. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta
m. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten
n. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen
o. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo
p. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri
q. Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri
r. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar
s. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali
t. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati
u. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora
v. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang
w. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus
x. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara
y. Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara
z. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan
aa. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen
bb. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang
cc. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang
dd. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal
ee. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi
ff. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes
gg. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto

hh. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap
ii. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga
jj. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara
kk. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang
ll. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid
mm. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen
nn. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo
oo. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung
pp. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Kepegawaian

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	92	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi
		Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator seluruhnya berskala sangat tinggi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	95,5	100	104,71	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	95,5	100	104,71	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	95,5	100	104,71	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
		Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3,5	3,58	102,29	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator seluruhnya berskala sangat tinggi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH								
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kebutuhan	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah meskipun sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sudah menunjukan capaian kinerja sebesar lima puluh persen .

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaran unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Penghubung

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								
		Tercapainya pelaksanaan pelayanan penghubung	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penghubung - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pengawasan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96,23	59,42	61,75	Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35,71	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42,85	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61,9	0	0,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala rendah dan 8 indikator berskala sangat rendah. Indikator berskala sangat rendah.

2.5. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
		Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76,31	0	0,00	Sangat Rendah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88,11	89,31	101,36	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80,47	82,74	102,82	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
		Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Angka	78,26	80	102,22	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
		Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	75,4	89,26	118,38	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2,89	0	0,00	Sangat Rendah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
		Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	80,6	108,92	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari total 7 indikator kinerja tersebut 5 indokator berskala sangat tinggi dan 2 indikator berskala sangat rendah. Indikator yang berskala sangat rendah.

2.6. Penunjang Urusan

Kinerja penyelenggaran Penunjang Urusan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 45
Capaian Kinerja Penunjang Urusan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	98,59	98,59	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	58,48	58,48	Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	38,22	38,22	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	97,91	104,16	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90,5	50	55,25	Rendah	Dinas Kesehatan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	30	30,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Dr.MOEWARDI	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82,2	103,13	125,46	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	0	0,00	Sangat Rendah	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	49,27	63,5	128,88	Sangat Tinggi	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	59,56	114,54	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	37,87	102,35	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33,01	38,81	117,57	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40,88	60,73	148,56	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Jasa Konstruksi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Pemali Comal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Jratun Seluna	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Bengawan Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	112,75	112,75	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	33,05	33,05	Sangat Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Sosial	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perangkat daerah di Dinas Sosial							
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	102,16	102,16	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	88,89	88,89	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	41,62	41,62	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	100	181,82	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	87	87	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	100	111,11	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	50	57,47	Rendah	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	52,28	52,28	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79,5	40	50,31	Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di UPT Pusat Data	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	86	40	46,51	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	101,69	101,69	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	33,33	33,33	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	39,48	45,91	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	49,04	49,04	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	40,18	40,18	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	71,3	71,30	Sedang	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	49,46	49,46	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	56,66	56,66	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	52,51	52,51	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	64,9	64,90	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	47,94	47,94	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	%	100	59,27	59,27	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	59,82	59,82	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	50,92	50,92	Rendah	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	20	20,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
		Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD - Bagian Umum
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Ungaran	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Salatiga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kendal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sragen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sukoharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonogiri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Karanganyar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Boyolali	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Blora	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Rembang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kudus	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Jepara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kajen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Batang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pemalang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Slawi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purbalingga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Banjarnegara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Mungkid	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kebumen	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purworejo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Temanggung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81,5	20,38	25,01	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	%	96	50	52,08	Rendah	Badan Penghubung - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Badan Penghubung - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat

NO	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	SKALA PENILAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran penunjang urusan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 262 indikator kinerja. Dari 262 indikator kinerja tersebut terdapat 117 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 12 indikator berskala rendah dan 131 indikator berskala sangat rendah. Indikator berskala sangat rendah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan persentase capaian kinerja menunjukan capaian indikator sebesar lima puluh persen dari total target pada indikator tersebut namun dalam skala penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja masih menunjukan skala sangat rendah sebanyak 113 indikator.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah Tahun 2026.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global menunjukkan ketahanan yang relatif kuat meskipun masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain ketidakpastian perdagangan, ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara. Berdasarkan pembaruan *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2026, IMF memperkirakan perekonomian dunia tumbuh sekitar 3,5 persen pada 2025. Kinerja tersebut masih menunjukkan daya tahan ekonomi global di tengah ketidakpastian yang tinggi, meskipun pertumbuhannya belum kembali pada pola pertumbuhan yang lebih tinggi sebelum pandemi. Kelompok negara maju tumbuh sekitar 1,9 persen, sedangkan kelompok negara berkembang dan pasar berkembang tumbuh sekitar 4,5 persen.

Memasuki 2026, prospek ekonomi global menghadapi tekanan baru akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap harga energi, pangan, perdagangan, serta kondisi keuangan global. IMF dalam *World Economic Outlook Update* Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi sekitar 3,0 persen pada 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027. Dengan demikian, dibandingkan perkiraan sebelumnya, risiko terhadap pertumbuhan global tidak hanya berasal dari lemahnya permintaan dan perdagangan internasional, tetapi juga semakin kuat dipengaruhi oleh gangguan pasokan energi dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Tekanan terhadap perekonomian global juga tercermin pada perkembangan inflasi. Berbeda dengan kecenderungan penurunan inflasi yang berlangsung sejak 2024, IMF memperkirakan proses disinflasi global mengalami gangguan pada 2026. Inflasi global diproyeksikan meningkat dari sekitar 4,1 persen pada 2025 menjadi 4,7 persen pada 2026, sebelum kembali menurun menjadi sekitar 3,9 persen pada 2027. Kenaikan tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya harga energi dan pangan serta transmisi kenaikan biaya produksi ke berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko inflasi global belum sepenuhnya berakhir dan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik serta pasar komoditas.

Perbedaan proyeksi antar-lembaga internasional juga menunjukkan masih tingginya ketidakpastian terhadap arah perekonomian dunia. Dalam *Global*

Economic Prospects Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF sebesar 3,0 persen. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global kemudian meningkat menjadi sekitar 3,1 persen pada 2027. Untuk kelompok negara berkembang, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan turun dari sekitar 4,4 persen pada 2025 menjadi 3,6 persen pada 2026, sebelum meningkat kembali menjadi sekitar 4,2 persen pada 2027.

Perbedaan antara proyeksi IMF dan Bank Dunia tersebut terutama mencerminkan perbedaan asumsi mengenai dampak konflik geopolitik, perkembangan harga energi dan komoditas, perdagangan internasional, serta respons kebijakan ekonomi. Bank Dunia menilai konflik Timur Tengah memberikan tekanan cukup besar terhadap perekonomian dunia melalui kenaikan harga energi dan pupuk, yang selanjutnya dapat meningkatkan inflasi dan biaya produksi. Dalam skenario dasar Bank Dunia, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi sekitar 4,0 persen pada 2026, dari 3,3 persen pada 2025. Bahkan, apabila gangguan pasokan energi berlangsung lebih lama dan disertai tekanan pada pasar keuangan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global dapat turun hingga sekitar 1,3 persen pada 2026.

Meskipun menghadapi berbagai risiko, terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang pertumbuhan global. Salah satunya adalah meningkatnya investasi berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang menurut IMF menjadi salah satu sumber momentum pertumbuhan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki keterikatan kuat dengan rantai nilai teknologi global. IMF menilai perkembangan teknologi tersebut sebagian dapat mengimbangi dampak negatif konflik dan gangguan perdagangan terhadap aktivitas ekonomi dunia.

Dari perspektif pembangunan jangka menengah, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok negara berkembang tetap memiliki potensi pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara maju. Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik, termasuk model Solow, negara dengan tingkat modal per kapita yang relatif lebih rendah pada kondisi tertentu memiliki peluang memperoleh pertumbuhan yang lebih tinggi melalui akumulasi modal, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, kecenderungan tersebut tidak bersifat otomatis. Kesenjangan produktivitas, kualitas institusi, kapasitas fiskal, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi sangat menentukan kemampuan suatu negara atau wilayah untuk benar-benar melakukan konvergensi ekonomi.

Bagi Provinsi Jawa Tengah, dinamika ekonomi global tersebut perlu dipandang sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui berbagai jalur transmisi. Jalur pertama adalah perubahan harga energi dan komoditas yang dapat meningkatkan biaya produksi, terutama pada industri pengolahan, transportasi, pertanian, dan sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi dan bahan baku. Jalur kedua adalah perubahan permintaan dan perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi ekspor Jawa Tengah, khususnya produk manufaktur, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furniture, makanan dan minuman, serta komoditas unggulan lainnya.

Jalur transmisi berikutnya berasal dari kondisi pasar keuangan dan nilai tukar. Ketidakpastian global dapat mendorong perubahan arus modal, nilai tukar, suku bunga, serta biaya pembiayaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan investasi dan ekspansi dunia usaha di Jawa Tengah. Di sisi lain, pelemahan ekonomi negara mitra dagang dapat menekan permintaan ekspor, sementara penguatan permintaan dari negara-negara yang tumbuh lebih cepat dapat menciptakan peluang diversifikasi pasar dan peningkatan ekspor daerah.

Dengan demikian, tantangan utama bagi Jawa Tengah bukan semata-mata bagaimana mengantisipasi perlambatan ekonomi global, tetapi juga bagaimana memanfaatkan perubahan struktur ekonomi dunia sebagai peluang. Penguatan daya saing industri, diversifikasi pasar ekspor, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan hilirisasi komoditas, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi menjadi semakin penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pembangunan Jawa Tengah perlu memperkuat kapasitas ekonomi daerah agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Strategi tersebut antara lain dapat diarahkan pada penguatan rantai pasok domestik, peningkatan nilai tambah produk lokal, diversifikasi sumber bahan baku dan pasar, peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah, penguatan konektivitas logistik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan tersebut, guncangan ekonomi global tidak hanya dipandang sebagai risiko, tetapi juga sebagai momentum untuk mempercepat transformasi struktural dan meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Tengah.

3.1.2 Arah Pembangunan Ekonomi Nasional dan Jawa Tengah

Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, industri pengolahan, dan perdagangan. Stabilitas makro juga relatif terjaga dengan inflasi sebesar 2,92 persen. Kinerja perdagangan tetap positif dengan ekspor mencapai sekitar US$282,91 miliar, impor US$241,86 miliar, dan surplus neraca perdagangan sebesar US$41,05 miliar. Dari sisi kesejahteraan, kondisi pasar kerja membaik dengan TPT Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, sementara kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen dan IPM meningkat menjadi 75,90.

Memasuki 2026, momentum pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif kuat. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, antara lain didukung oleh PMTB yang tumbuh 5,96 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen. Pada Triwulan II-2026, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,29 persen, tetapi secara kumulatif Semester I-2026 mencapai 5,45 persen. Konsumsi domestik, investasi, industri pengolahan, transportasi, serta sektor akomodasi dan makan minum tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Namun, tekanan harga mulai meningkat, tercermin dari inflasi Juni 2026 sebesar 3,34 persen, sementara perdagangan hingga Mei 2026 masih mencatat surplus sekitar US$4,03 miliar.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan nasional. Pada Triwulan I-2026 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen, kemudian 5,71 persen pada Triwulan II-2026, sehingga pertumbuhan Semester I-2026 mencapai 5,80 persen (c-to-c), lebih tinggi daripada nasional sebesar 5,45 persen. Struktur

ekonomi Jawa Tengah masih didominasi Industri Pengolahan dengan kontribusi 33,18 persen, sementara Konsumsi Rumah Tangga menyumbang 59,73 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan juga didukung oleh sektor pertambangan, ekspor, pariwisata, akomodasi dan makan minum, serta konsumsi pemerintah. Kondisi ini berdampak pada kondisi kemiskinan Jawa Tengah yaitu sebesar 9,21% pada Maret 2026 turun sebesar 0,18 poin persen dibanding kondisi September 2025 dan 0,27 poin persen dibanding Maret 2025.

Dari sisi stabilitas dan kesejahteraan, kondisi Jawa Tengah juga relatif terjaga. Inflasi Juni 2026 sebesar 2,92 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 3,34 persen. TPT Februari 2026 sebesar 4,24 persen, lebih rendah dibandingkan nasional 4,68 persen, sedangkan jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 21,38 juta orang. NTP Juni 2026 sebesar 118,27, meningkat 0,75 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan relatif pada daya tukar petani. Untuk ketimpangan lebih baik, realisasi rasio gini per maret 2026 sebesar 0,354 lebih baik dari maret 2025 sebesar 0,359.

Secara keseluruhan, hingga Semester I-2026 perekonomian Jawa Tengah menunjukkan daya tahan yang cukup kuat, ditandai pertumbuhan yang konsisten lebih tinggi daripada nasional, inflasi yang relatif terkendali, serta perbaikan pasar kerja dan kesejahteraan petani. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya meningkatkan PDRB, tetapi juga menghasilkan peningkatan produktivitas, investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan nilai tambah industri, penguatan UMKM dan rantai pasok lokal, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Proyeksi indikator ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2026	P-RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00
2	PDRB per kapita	Juta Rp	52,00 - 55,70	52,00 - 55,70
3	Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 – 4,27	4,71 – 4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53	8,70-8,53
6	Rasio Gini	Angka	0,351 - 0,361	0,351 - 0,361

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, tahun 2026 merupakan tahap "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah". Sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2025-2029, tahun 2026 difokuskan pada tema pembangunan "**Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**" dengan strategi antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerjasama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, sampai pemberdayaan masyarakat, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya, salah satunya dukungan keuangan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam aspek pengelolaan keuangan daerah diperlukan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perubahan mekanisme pemungutan, seperti skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memicu disinformasi di ruang publik. Sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah diperkuat melalui skema Collaborative Funding. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan industri dan pemasaran otomotif, serta realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2023-2024 meningkat, sedangkan Tahun 2025 mengalami penyesuaian dampak dari pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah skema bagi hasil pajak daerah menjadi skema opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pada tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 dimana dampak dari pemberlakuan Opsen dan perlambatan ekonomi di tingkat masyarakat yang secara langsung menggerus daya beli dan prioritas pembayaran pajak masyarakat.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp14,973 triliun, memberikan kontribusi sebesar 63,01% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar Rp23,762 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp17,651 triliun, PAD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,678 triliun atau 15,17%.

Penopang utama sektor Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp11,438 triliun,

mengalami penurunan sebesar Rp2,771 triliun atau 19,51 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp14,210 triliun. Penurunan penerimaan Pajak Daerah terutama dipengaruhi oleh beberapa jenis pajak kendaraan bermotor. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 mencapai Rp3,960 triliun (95,31%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1,741 triliun (68,86%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp2,690 triliun (102,74%), Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp20,925 miliar (110,72%), Pajak Rokok sebesar Rp3,001 triliun (96,36%), Pajak Alat Berat sebesar Rp134,045 juta (401,24%), dan Opsen Pajak MBLB mencapai Rp23,238 miliar (105,63%).

Selain Pajak Daerah, komponen PAD lainnya yaitu Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2,673 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp354,563 miliar atau 15,29 persen dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp2,318 triliun.

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp546,657 miliar, turun sebesar Rp141,155 miliar atau 20,52 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp687,813 miliar.

Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp314,638 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp119,422 miliar atau 27,51 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp434,060 miliar. Penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya perpindahan pengakuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah ke dalam komponen Retribusi Jasa Kesehatan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer 2025 sebesar Rp8,625 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp76,07 miliar atau 0,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8,701 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya beberapa komponen transfer, antara lain Dana Alokasi Khusus Fisik yang pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi, serta menurunnya Dana Insentif Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp163,47 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp137,13 miliar atau 520,54% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar Rp26,34 miliar.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**25.369.733.556.675**	**26.378.719.626.419**	**23.761.968.977.877**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**17.012.509.421.006**	**17.650.936.913.504**	**14.973.131.878.336**
Pajak Daerah	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541	11.438.451.030.063
Retribusi Daerah	139.377.038.536	2.318.821.514.818	2.673.385.019.574
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	638.482.406.528	687.813.166.201	546.657.345.508
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.258.007.259.591	434.060.698.944	314.638.483.191
PENDAPATAN TRANSFER	**8.278.928.086.424**	**8.701.438.866.795**	**8.625.363.756.508**
Dana Bagi Hasil Pajak	601.686.290.991	570.985.609.000	976.507.947.700
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	331.425.232.000	325.246.959.000	
Dana Alokasi Umum	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028	3.978.828.515.369
Dana Alokasi Khusus (fisik)	425.034.850.842	473.940472.839	-
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	3.275.155.012.091	3.474.257.466.928	3.661.591.213.439
Dana Insentif Daerah	87.197.945.000	37.997.568.000	8.436.080.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**78.296.049.245**	**26.343.846.120**	**163.473.343.033**
Pendapatan Hibah	77.972.123.308	25.600.169.638	25.505.460.000
Lain lain pendapatan	323.925.937	743.676.482	137.967.883.033

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2023-2025 Audited.

Selama kurun waktu Tahun 2023–2025, PAD menjadi sumber utama Pendapatan Daerah, diikuti Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp17,013 triliun pada tahun 2024 sebesar Rp17,651 triliun atau naik 3,75 persen dibanding tahun 2023, namun pada 2025 menurun menjadi Rp14,973 triliun atau turun 15,17 persen dibandingkan 2024 (dampak implementasi UU HKPD).

Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah meningkat dari Rp25,370 triliun pada 2023 menjadi Rp26,379 triliun pada 2024 atau naik 3,98 persen, kemudian menurun menjadi Rp23,762 triliun pada 2025 atau turun 9,92 persen. Penurunan Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh menurunnya PAD, khususnya Pajak Daerah, seiring implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 dan berdampak pada perubahan struktur serta mekanisme pemungutan beberapa jenis pajak daerah.

Tabel 3.3.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi s/d Tw. II 2026	
		RKPD 2026	APBD 2026	Rp	%
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**16.318.898.370.000**	**15.929.432.150.000**	**6.908.742.561.468**	**43,97**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000	12.503.441.258.000	5.006.655.202.492	40,75
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000	2.406.226.823.000	1.303.099.607.734	54,16
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	701.832.870.000	707.736.377.000	479.221.526.627	67,71
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000	312.027.692.000	119.766.224.615	38,38
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**	**3.736.519.274.009**	**50,51**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000	3.736.519.274.009	50,51
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**	**25.600.170.000**	**48.200.972**	**0,19**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**23.741.914.261.000**	**23.352.448.041.000**	**10.645.310.036.449**	**46,02**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Capaian pada Semester I Tahun 2026 melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Hal ini dikarenakan pada Semester I tahun 2025 diberlakukan program Jateng Merah Putih dan Pemutihan, sehingga terdapat peningkatan volume Wajib Pajak pada Semester I Tahun 2025. Disamping itu eskalasi narasi negatif tentang pajak di media sosial yang berakibat pada penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Namun demikian pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan program Diskon 5% untuk pembayaran PKB. Program tersebut merupakan salah satu kebijakan daerah terkait insentif perpajakan yang bertujuan untuk meringankan dan mengurangi beban Masyarakat, mendorong Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Program Diskon 5% berlaku sejak 20 Februari sampai dengan 31 Desember 2026.

Tabel 3.4.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**16.318.898.370.000**	**15.929.432.150.000**	**15.767.140.615.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000	12.503.441.258.000	12.199.395.630.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000	2.406.226.823.000	2.514.447.763.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	701.832.870.000	707.736.377.000	741.727.098.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000	312.027.692.000	311.570.124.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.600.170.000	25.600.170.000	26.600.170.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.741.914.261.000	23.352.448.041.000	23.191.156.506.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target pendapatan di tahun 2026 yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
b. Penguatan perencanaan dan optimalisasi potensi PAD melalui pemetaan dan riset potensi daerah secara berkala berbasis kewilayahan;
c. Optimalisasi Tata Kelola dan Teknologi Informasi digitalisasi sebagai pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Asli Daerah serta penguatan basis data yang lebih akurat;
d. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan sinergi dan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
e. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan secara masif dengan pemanfaatan berbagai media komunikasi;
f. Perluasan akses dan titik layanan pembayaran Pendapatan Daerah melalui optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BUMDes, BPR BKK, serta mitra layanan lainnya;
g. Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha/industri, dan instansi terkait dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah, khususnya penerimaan PKB, BBNKB, Opsen Pajak, dan sumber PAD lainnya;
h. Melaksanakan program relaksasi Pajak Daerah antara lain berupa pengurangan atas PKB sebesar 5%, pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan progresif PKB sebagai langkah strategis penanganan tunggakan pajak serta optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;
i. Pelaksanaan program pemberian Reward dan Apresiasi terhadap Wajib Pajak Patuh untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan;
j. Menyelenggarakan kegiatan ekshibisi baik untuk kendaraan baru maupun layanan pajak;
k. Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah melalui penguatan tata kelola dan pelayanan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, PBBKB, serta peninjauan kebijakan tarif sesuai perkembangan objek pajak dan

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perkembangan kendaraan listrik dan tarif Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP);

l. Optimalisasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah melalui pemutakhiran data, penyesuaian tarif, pengembangan kerja sama pemungutan, serta pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi);
m. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui pendataan dan pemutakhiran aset, revitalisasi aset yang belum produktif, serta pengembangan kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga/investor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan peningkatan ROA BUMD, serta menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; dan
o. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan kinerja organisasi pengelola pendapatan daerah guna meningkatkan efektivitas pemungutan, kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2025, anggaran belanja daerah mengalami peningkatan sejumlah 23,871 triliun rupiah apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Belanja operasi mendapat porsi terbesar, di ikuti belanja transfer yang berisi bantuan keuangan dan dana bagi hasil. Realisasi APBD Tahun 2025 sampai dengan 31 Desember telah optimal. Sebagian besar realisasi belanja mengalami kenaikan. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN melalui PPPK dan peningkatan belanja barang dan jasa.

Belanja Operasi digunakan untuk pelayanan sehari-hari pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sejumlah 15,480 triliun rupiah atau mengalami penurunan realisasi tahun anggaran 2024. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 62,474 miliar rupiah dari tahun 2024. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sejumlah 7,192 miliar rupiah yang digunakan untuk penanganan bencana Korban Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan; tanah longsor dan gerak di Kabupaten Banjarnegara dan Brebes; Kebakaran Rumah di Kabupaten Grobogan; Darurat Bencana di Kabupaten Demak; kebakaran Kantor Walikota dan DPRD Kota Pekalongan; dan Kebakaran Pasar Kota Kabupaten Wonogiri.

Belanja Transfer Tahun 2025 terealisasi sejumlah 6,588 triliun rupiah mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Penurunan ini disebabkan karena dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kabupaten telah menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**25.800.341.207.782**	**27.187.126.497.803**	**23.871.838.129.256**
BELANJA OPERASI	**14.887.780.012.763**	**16.083.865.301.964**	**15.480.092.183.316**
Belanja Pegawai	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845	7.060.692.834.988
Belanja Barang dan Jasa	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506	6.306.083.040.496
Belanja Subsidi	5.350.753.069	1.399.999.100	12.291.564.636
Belanja Hibah	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054	2.068.441.743.196
Belanja Bantuan Sosial	118.686.467.885	45.008.996.459	32.583.000.000
BELANJA MODAL	**1.794.862.778.298**	**1.733.084.096.994**	**1.795.558.675.999**
BELANJA TAK TERDUGA	**740.000.000**	**10.225.800.500**	**7.192.800.000**
BELANJA TRANSFER	**9.116.958.416.721**	**9.359.951.298.345**	**6.588.994.469.941**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221	4.084.034.975.804
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	653.134.590.053	1.045.686.246.124	542.528.545.137
Bantuan Keuangan kepada Desa	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000	1.962.430.949.000
Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2022-2024 (Audited).

Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan kebijakan belanja daerah diperuntukkan dalam rangka:

1. Prioritas daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diarahkan untuk Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 meliputi:
   a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
   b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan
   c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
   b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
   c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
   d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan

Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan

rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; Belanja subsidi digunakan untuk subsidi bahan pangan guna penanganan stunting dan kemiskinan serta subsidi kepada BUMD sebagai penjamin agar Kelompok Penerima SPAM dapat memperoleh pinjaman untuk pengembangan tanpa menggunakan agunan;
d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   a. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
1.	**Belanja Operasi**	**15.630.119.890.500**	**15.571.460.039.336**	**15.660.616.311.273**
1.1.	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000	7.528.775.845.000	7.275.649.901.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500	5.978.582.099.336	6.298.634.508.273
1.3.	Belanja Subsidi	7.647.280.000	7.647.280.000	7.233.280.000
1.4.	Belanja Hibah	2.070.582.715.000	2.046.047.815.000	2.068.315.346.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000	10.407.000.000	10.783.276.000
2.	**Belanja Modal**	**1.679.982.022.500**	**1.699.107.432.664**	**1.629.887.222.727**
3.	**Belanja Tak Terduga**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**33.300.800.000**
4.	**Belanja Transfer**	**6.826.312.348.000**	**6.476.380.569.000**	**6.334.532.312.000**
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228.000	4.043.881.549.000	4.508.640.497.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.425.944.120.000	2.432.499.020.000	1.825.891.815.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**24.156.414.261.000**	**23.766.948.041.000**	**23.658.336.646.000**

Sumber: BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2023-2025 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	**1.330.794.071.071**	**1.406.058.065.812**	**577.049.291.379**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.330.794.071.071**	**1.406.058.065.812**	**577.049.291.379**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.236.470.622.932	900.123.938.112	576.951.194.428
Pencairan dana Cadangan	94.130.600.000	505.869.400.000	-
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	192.848.139	64.727.700	98.096.951
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**20.700.000.000**	**-**
Pembentukan dana cadangan	-	-	-
Penyertaan modal	-	20.700.000.000	-
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2023-2025 (Audited).

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan pada Penggunaan SILPA tahun 2025, sehingga Proyeksi Pembiayaan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	484.500.000.000	**484.500.000.000**	**467.180.140.000**
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000	484.500.000.000	467.180.140.000
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	70.000.000.000	**70.000.000.000**	**-**
2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
2.2.	Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	**414.500.000.000**	**414.500.000.000**	**467.180.140.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah pada perubahan tahun anggaran 2026 berasal dari penyesuaian SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah pada Perubahan RKPD 2026 tidak diproyeksi untuk penggunaan apapun sehingga pembiayaan netto akan digunakan untuk menutup defisit antara proyeksi pendapatan dan belanja pada Tahun 2026.

Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)
1.	**PAD**	**16.318.898.370.000**	**15.929.432.150.000**	**15.767.140.615.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000	12.503.441.258.000	12.199.395.630.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000	2.406.226.823.000	2.514.447.763.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000	707.736.377.000	741.727.098.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000	312.027.692.000	311.570.124.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**	**25.600.170.000**	**26.600.170.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**23.741.914.261.000**	**23.352.448.041.000**	**23.191.156.506.000**
1.	**Belanja Operasi**	**15.630.119.890.500**	**15.571.460.039.336**	**15.660.616.311.273**
1.1.	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000	7.528.775.845.000	7.275.649.901.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500	5.978.582.099.336	6.298.634.508.273
1.3.	Belanja Subsidi	7.647.280.000	7.647.280.000	7.233.280.000
1.4.	Belanja Hibah	2.070.582.715.000	2.046.047.815.000	2.068.315.346.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000	10.407.000.000	10.783.276.000
2.	**Belanja Modal**	**1.679.982.022.500**	**1.699.107.432.664**	**1.629.887.222.727**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**33.300.800.000**
4.	**Belanja Transfer**	**6.826.312.348.000**	**6.476.380.569.000**	**6.334.532.312.000**
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228.000	4.043.881.549.000	4.508.640.497.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.425.944.120.000	2.432.499.020.000	1.825.891.815.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**24.156.414.261.000**	**23.766.948.041.000**	**23.658.336.646.000**
	Surplus (defisit)	**(414.500.000.000)**	**(414.500.000.000)**	**(467.180.140.000)**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**484.500.000.000**	**484.500.000.000**	**467.180.140.000**
	SiLPA	484.500.000.000	484.500.000.000	467.180.140.000

NO	URAIAN	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	-
3	**Pembiayaan Daerah**	**414.500.000.000**	**414.500.000.000**	**467.180.140.000**
	SILPA	**-**	**-**	-

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2026.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Akan tetapi dengan terbitnya penetapan APBN Tahun 2026 telah terjadi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 650 triliun rupiah yang berdampak pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Sehingga gambaran untuk realisasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hingga Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah
Triwulan II Tahun 2026

s.d 31 Juli

NO	NAMA SKPD	SKPD				
		PAGU	REALISASI TERHADAP PAGU DIPA			
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)		(%)
DEKONSENTRASI		**24.902.881.000**	**18.766.851.215**	**75,36**	**19.017.452.735**	**76,37**
1	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	1.000	-	0,00	-	0,00
2	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	8.409.392.000	3.122.038.452	37,13	3.122.407.250	37,13
3	DINAS KETAHANAN PANGAN	708.958.000	374.101.659	52,77	374.117.137	52,77
4	DINAS KOPERASI DAN UMKM	15.784.530.000	15.270.711.104	96,74	15.520.928.349	98,33
TUGAS PEMBANTUAN		**72.607.439.000**	**39.313.654.720**	**54,15**	**43.144.563.469**	**59,42**
1	DINAS PUPR (Bidang SDA)	61.084.014.000	36.393.005.000	59,58	40.217.714.818	65,84
2	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	5.893.064.000	642.089.500	10,90	642.343.976	10,90
3	DINAS PUPR (Bidang Binamarga)	5.000.506.000	2.215.279.500	44,30	2.221.224.765	44,42
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	159.855.000	5.614.000	3,51	5.610.911	3,51
5	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	470.000.000	57.666.720	12,27	57.669.000	12,27

Sumber: Biro Bangda, Juli 2026.

Dalam dinamika kapasitas fiskal daerah yang tengah terjadi, pemerintah daerah dihadapkan pada sebuah paradoks yaitu kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, sementara ruang fiskal semakin terbatas. Kesenjangan pendanaan (*funding gap*) bukan lagi sekadar tantangan administratif, melainkan penghambat nyata bagi pencapaian target pembangunan. Pola pendanaan konvensional yang hanya mengandalkan anggaran tunggal (APBD) terbukti tidak lagi mencukupi untuk memikul beban pembangunan daerah. Oleh karena itu, *Collaborative Funding* hadir bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai keharusan strategis.

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017. Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2025 yang tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar 30,48 miliar rupiah dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar 995 juta rupiah. Perusahaan dengan alokasi anggaran

terbanyak adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta sebesar 19,89 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan dengan alokasi program terbanyak adalah PT Bhimasena Power Indonesia sebanyak 548 program.

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta	136	19.899.155.066
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang	110	19.613.352.879
3	PT Telkom Regional IV Jateng & DIY	273	12.337.925.114
4	PT Semen Gresik Tbk	211	6.663.292.867
5	PT Sumber Segara Primadaya – PLTU Cilacap	106	6.013.681.000
6	PT Pertamina Patra Niaga	58	4.904.567.985
7	Bank Jateng	30	4.646.720.000
8	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Cilacap	206	4.413.899.977
9	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	17	3.929.865.640
10	PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap	121	3.756.694.000
11	PT Bhimasena Power Indonesia	548	3.465.514.467
12	PT Phapros Tbk	86	2.955.579.698
13	PT Sinar Tambang Arthalestari	73	2.874.530.875
14	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	48	2.490.662.047
15	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10	2.134.000.000
16	PT Tirta Investama (AQUA) Klaten	12	1.904.845.000
17	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan da Ratu Boko	59	1.734.679.650
18	Yayasan Kesehatan Telogorejo	44	1.715.663.148
19	PT Pegadaian (Persero)Kanwil XI Semarang	11	1.543.802.710
20	PT Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya	98	1.457.466.094
21	BPR BKK PURWODADI	113	1.429.786.785
22	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	9	1.299.187.958
23	PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica Banjarnegara	60	1.256.939.050

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
24	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	40	1.167.489.000
25	Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	56	965.006.842
26	PT HM Sampoerna Tbk	9	949.999.998
27	PT Pupuk Indonesia (Persero)	28	885.189.700
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	53	878.958.636
29	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	40	865.790.000
30	PT INDONESIA POWER SEMARANG PGU	40	846.520.250
31	PT Nojorono Tobacco International	22	796.425.140
32	PT Jateng Petro Energi (JPE)	43	740.393.850
33	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	29	682.926.610
34	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	28	580.400.000
35	BPR BKK PURWOKERTO	236	550.817.250
36	BPR BKK KEBUMEN	25	530.276.024
37	BPR BKK TEMANGGUNG	28	470.260.000
38	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	43	423.162.082
39	PT Jamkrida Jawa Tengah	52	422.761.500
40	Angkasa Pura Airport	7	420.058.750
41	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)	24	372.477.873
42	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)	73	357.618.700
43	BPR BKK PURBALINGGA	16	335.988.500
44	PT DUA KELINCI	213	324.706.650
45	BPR BKK DEMAK	86	300.623.481
46	BPR BKK JEPARA	41	284.999.000
47	BPR BKK PATI	63	284.825.530
48	PT BPR SURYA YUDHAKENCANA	23	282.625.000
49	BPR BKK Kendal	81	263.594.000
50	BPR BKK BLORA	12	259.717.000
51	PT YEON HEUNG MEGA SARI	6	238.892.200
52	RS PANTI WILASA CITARUM	141	234.924.000

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
53	PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal	85	211.009.443
54	BPR BKK KARANGMALANG	5	184.600.000
55	BPR BKK TASIKMADU	61	169.597.000
56	BPR BKK UNGARAN	46	169.046.300
57	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	4	163.924.000
58	PT Perkebunan Nusantara I Regional 3	13	161.564.000
59	BPR BKK LASEM	20	125.518.000
60	PT Dan Liris	18	114.984.506
61	PT Semen Grobogan	4	96.200.000
62	BPR BKK KUDUS	7	76.695.000
63	PT Jateng Agro Berdikari (JTAB)	11	76.348.000
64	PT Trans Marga Jateng	5	70.225.000
65	BPR BKK BOYOLALI	5	70.126.000
66	BPR BKK BANJARHARJO	16	54.229.000
67	PT BPR BKK TAMAN(PERSERODA)	8	44.320.000
68	BPR BKK KAB. PEKALONGAN	7	42.990.000
69	PT SAS Kreasindo Utama	19	41.312.400
70	BPR BKK BATANG	10	35.463.500
71	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	9	34.255.000
72	BPR BKK KOTA MAGELANG	18	28.080.000
73	PT Shoenary Javanesia Inc	10	25.823.000
74	BPR BKK MUNTILAN	9	25.569.000
75	BPR BKK CILACAP	7	22.156.500
76	BPR BKK GROGOL	9	21.140.000
77	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	9	12.135.000
78	BPR BKK KOTA TEGAL	5	10.949.000
79	PT ROSALIA INDAH TRANSPORT	31	9.400.000
80	BPR BKK TULUNG	2	8.400.000
81	BPR BKK KAB. TEGAL	1	6.370.000
82	PT Kenlee Indonesia	5	4.250.000

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
83	PT BPR BKK KOTA SEMARANG	2	2.665.000
84	PT Sri Rejeki Isman Tbk	1	2.270.000
85	PT Siba Surya	1	2.000.000
TOTAL		**4.460**	**130.282.854.225**

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 12 Januari 2026.

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja
Tahun 2025

No	Bidang Pokja	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	680	30.487.700.720
2	Bidang Infrastruktur	531	24.553.280.334
3	Bidang Pendidikan	642	15.896.262.879
4	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	330	12.811.447.813
5	Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	247	12.054.888.166
6	Bidang Kesehatan	499	11.137.602.384
7	Bidang Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata	594	6.413.211.407
8	Bidang Keagamaan	412	5.802.822.506
9	Bidang Pendampingan Umum	252	3.934.389.113
10	Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan	73	3.756.562.493
11	Bidang Kedaruratan	192	2.438.936.720
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	8	995.749.690
TOTAL		**4.460**	**130.282.854.225**

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 12 Januari 2026.

Sedangkan untuk perkembangan atas pelaksanaan TJSLP hingga Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Triwulan I Tahun 2026

No	Bidang Pokja	TW.I Tahun 2026
		Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	94.765.000
2	Bidang Kesejahteraan Sosial	3.542.909.402

No	Bidang Pokja	TW.I Tahun 2026
		Jumlah Anggaran (Rp)
3	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	2.145.600.338
4	Bidang Pendidikan	235.533.070
5	Bidang Kedaruratan	260.784.250
6	Bidang Keagamaan	372.476.500
7	Bidang Pendampingan Umum	1.279.989.900
8	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	326.480.000
9	Bidang Kesehatan	204.226.175
10	Bidang Infrastruktur	3.521.348.333
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	689.890.000
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	15.000.000
TOTAL		**12.689.002.968**

Sumber: Silap CSR Online Tw.1 2026, Biro Pemotdaker.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai implementasi tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**.

Jawa Tengah sebagai lumbung pangan berarti menetapkan dan memperkuat peran daerah sebagai pusat produksi dan penyedia utama pangan, baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan dorongan untuk peningkatan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, irigasi, dan alat mesin pertanian (alsintan), potensi lahan, iklim, dan sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, peningkatan sarana seperti pembangunan jalan tani, gudang, irigasi, dan pasar agar hasil pertanian dapat tersimpan dan terdistribusikan. Program-program pendukung lainnya seperti pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan ditingkatkan agar petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem. Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional mengandung harapan bahwa daerah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, namun juga mampu menyuplai daerah lain bahkan berkontribusi pada cadangan pangan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan capaian indikator dengan **sasaran pembangunan**, meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter;

Tujuan dan sasaran pembangunan **daerah dengan indikator kinerja** yang akan dicapai pada tahun 2026 **berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029**, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan				
	Tingkat Kemiskinan	%	8,70 - 8,53	8,70 - 8,53
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	52,0 - 55,7	52,0 - 55,7
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,00	92,00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah				
	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97	80,97
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,46 - 89,50	86,46 - 89,50
	Otonomi Fiskal Daerah	%	65,72	65,72
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan				
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00
	Tingkat Inflasi	%	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,73	75,73
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,62	0,62
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27	4,71 - 4,27

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkualitas;
2. Penguatan struktur ekonomi dengan mendorong produk unggulan daerah;
3. Pembangunan Infrastruktur berbasis daerah;
4. Menjaga ekosistem lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis lokal;
6. Memperkuat fasilitas dan pelayanan Kesehatan;
7. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta Kematian Ibu melahirkan dan kematian bayi.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Musrenbang terdiri atas:

1. Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
   Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

2. Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu
   Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah.

   Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.

3. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
   Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.

4. Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM
   Transformasi yang dilakukan melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.

5. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia,
   Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.

Tabel 4.2
Telaah Terhadap Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2026

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
1.	Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk	Upaya pengentasan kemiskinan dan stunting menjadi prioritas daerah pada Tahun 2026. Melalui Prioritas Daerah 3, Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
	menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.	berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2.	Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui: peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui: peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.	Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja.
3.	Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui: Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.	Melalui Prioritas Daerah 2 Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan diharapkan dapat terwujud penguatan ketahanan pangan dan energi.
4.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM Transformasi yang dilakukan melalui: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM berupaya diwujudkan melalui Prioritas Daerah 2 yaitu Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
5.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui: Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.	Upaya peningkatan daya saing SDM melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global diwujudkan melalui Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas

2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
   Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
   Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6
   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Target indikator sasaran pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan dokumen Nota Keuangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 persen;
2. GNI Perkapita sebesar 5.520 US$;
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 37,14 persen;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,67;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen;
6. Rasio Gini sebesar 0,377 – 0,380;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44 – 4, 96 persen;
8. Kemiskinan Ekstrem sebesar 0 - 0,5 persen; dan
9. Indeks Modal Manusia sebesar 0,57.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada

RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada **tema Pembangunan Daerah Tahun 2026** yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. mendorong implementasi hilirisasi sektor pertanian (terutama komoditas perkebunan unggulan dan pangan strategis);
3. peningkatan industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman);
4. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
7. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
8. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
9. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
10. pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste*);
11. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
12. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
13. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
14. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
15. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
16. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
17. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
18. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
19. penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
20. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
21. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;

22. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
23. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
24. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tahun 2026 sebagai tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2029 **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
    a. penguatan landasan tata kelola disertai internalisasi nilai pelayanan publik yang merata dan inklusif sebagai basis penguatan standar layanan dasar;
    b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital pemerintah;
    c. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data dan bukti disertai manajemen risiko, sehingga berorientasi kinerja dan berdampak kepada masyarakat;
    d. penguatan landasan kebijakan data terpadu berbasis teknologi informasi melalui keterhubungan sistem (interoperabilitas) antarinstansi;
    e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
    f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
    g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
    h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
    i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabiltas APIP;
    j. pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
    k. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
    l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
    m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
    n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
    o. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;

p. pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
q. pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:

a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;
b. penguatan pondasi sektor perdagangan;
c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;
f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
i. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste);*
j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;
k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;

o. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;
p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;
q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
r. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
s. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
t. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa;
u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
z. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
bb. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
cc. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
dd. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
ee. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
ff. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
gg. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
hh. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;

nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:

a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;
f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
o. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;

u. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
w. peningkatan pembangunan berbasis gender;
x. penguatan perlindungan sosial adaptif yang mencakup peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong penyandang disabilitas bekerja disektor formal dan peningkatan kualitas bantuan sosial.
y. peningkatan ketahanan keluarga;
z. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama Tahun 2026 yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70 - 8,53 persen;
2. PDRB Per Kapita sebesar 52,0 - 55,7 juta rupiah;
3. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4. Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 - 89,50;
6. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
7. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 - 6,00 persen;
8. Inflasi sebesar 1,50 - 3,50 persen;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10. Indeks Modal Manusia sebesar 0,62; dan
11. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 - 4,27 persen.

Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dengan Nasional ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, dan prioritas** yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Dukungan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
1	**PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**313.683.429.000**	**268.390.024.000**	**257.841.725.000**	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000	4.482.690.000	4.456.563.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.472.866.000	1.472.866.000	1.365.895.000	Biro Hukum
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000	3.126.756.000	3.152.919.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000	61.817.623.000	61.799.888.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000	4.728.139.000	4.503.260.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000	192.761.950.000	182.563.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
2	**PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**548.807.623.000**	**554.088.648.000**	**510.600.275.000**	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000	48.621.302.000	62.696.638.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000	23.013.309.000	27.058.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000	11.770.900.000	11.759.145.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000	2.793.451.000	2.731.703.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000	997.688.000	789.599.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000	13.482.995.000	11.079.736.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000	4.925.924.000	4.772.583.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000	2.554.206.000	2.346.378.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	192.000.000	153.018.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000	1.001.614.000	914.464.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000	187.286.000	188.654.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000	25.000.000	19.068.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	392.000.000	282.283.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	192.000.000	142.659.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	30.000.000	20.741.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000	294.000.000	279.879.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000	1.683.800.000	1.341.773.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000	1.381.911.000	1.315.862.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000	9.771.576.000	7.214.874.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000	13.272.050.000	11.658.718.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000	983.227.000	974.012.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000	1.050.072.000	889.979.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000	159.558.128.000	135.144.133.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000	180.729.000.000	167.115.403.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000	4.637.563.000	4.411.423.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000	5.850.000.000	5.883.304.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000	53.099.252.000	37.466.881.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000	4.071.500.000	4.760.766.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000	591.362.000	394.176.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000	552.000.000	439.679.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000	115.000.000	83.175.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000	923.631.000	831.332.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000	1.077.356.000	953.589.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000	2.135.551.000	2.466.886.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000	2.131.994.000	2.019.412.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**	**PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**		**528.283.241.000**	**556.110.716.000**	**845.189.734.000**	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000	41.417.191.000	30.027.289.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000	349.789.477.000	649.175.219.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000	2.146.224.000	1.657.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000	272.000.000	169.238.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	503.000.000	382.859.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000	433.000.000	335.243.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000	136.498.296.000	142.731.386.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000	814.783.000	863.781.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000	1.600.000.000	1.589.730.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000	916.680.000	773.812.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000	184.000.000	136.714.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000	555.000.000	457.602.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000	822.000.000	701.386.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000	3.256.390.000	2.898.365.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000	6.525.625.000	4.621.371.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000	8.652.050.000	6.640.702.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000	700.000.000	618.389.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000	1.025.000.000	1.408.898.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	**PN 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**6.403.239.484.000**	**6.422.651.644.000**	**6.621.465.194.000**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.688.943.996.000	2.688.943.996.000	2.834.157.706.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000	3.087.472.248.000	3.123.325.408.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000	330.000.000	325.913.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000	400.000.000	397.238.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000	300.000.000	301.495.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000	507.201.291.000	522.250.001.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000	1.928.215.000	1.424.117.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000	75.000.000	69.536.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000	1.160.222.000	1.074.839.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000	121.635.000	95.386.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000	7.572.217.000	7.231.889.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000	1.510.000.000	1.200.802.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000	910.000.000	680.595.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000	1.748.312.000	1.382.124.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000	2.698.800.000	2.525.887.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000	770.432.000	660.574.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000	328.408.000	314.334.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000	373.720.000	298.546.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000	296.720.000	275.489.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000	70.000.000	54.929.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000	60.000.000	49.596.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000	75.000.000	65.270.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000	160.000.000	129.127.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000	389.667.000	319.788.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000	177.353.000	143.176.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000	11.340.000.000	11.523.755.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000	101.389.700.000	106.973.058.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000	1.469.708.000	1.441.994.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000	3.379.000.000	2.772.622.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**	**PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**		**58.615.900.000**	**59.770.900.000**	**52.698.375.000**	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000	667.200.000	614.748.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000	1.514.954.000	1.180.383.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000	790.000.000	497.738.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000	350.000.000	260.388.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000	210.000.000	168.343.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000	200.000.000	210.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000	33.550.000.000	32.962.828.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000	2.150.000.000	785.067.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000	999.054.000	980.469.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000	7.421.546.000	4.909.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000	11.286.146.000	9.497.411.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000	502.000.000	502.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
6	**PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**2.650.065.258.000**	**2.656.547.158.000**	**2.045.159.928.000**	
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000	12.827.000.000	12.226.014.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000	3.251.323.000	2.973.053.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000	2.663.000.000	2.645.005.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000	370.000.000	237.642.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000	10.246.000.000	7.704.130.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	200.000.000	181.864.000	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000	74.090.123.000	71.594.533.000	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000	110.594.572.000	112.590.623.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000	4.397.580.000	4.299.015.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	200.000.000	250.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000	155.000.000	122.575.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000	1.033.540.000	810.408.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000	3.870.000.000	3.561.046.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	150.000.000	72.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.425.944.120.000	2.432.499.020.000	1.825.891.815.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	**PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**13.206.221.696.000**	**12.788.219.846.000**	**12.877.399.753.000**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.275.970.898.000	8.206.981.713.000	7.825.781.861.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000	16.755.200.000	17.313.326.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000	48.206.035.000	45.740.887.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000	693.400.000	524.797.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000	2.056.666.000	1.665.086.000	Biro Organisasi
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000	2.919.557.000	2.860.176.000	Biro Pemerintahan,Otonomi Daerah Dan Kerja Sama
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.250.000.000	1.250.000.000	1.008.805.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.383.134.000	1.383.134.000	1.133.309.000	Biro Hukum
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000	4.640.000.000	4.131.912.000	Biro Perekonomian
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000	1.781.081.000	1.548.521.000	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000	1.755.000.000	1.386.044.000	Biro Administrasi Pembangunan
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000	336.517.695.000	340.447.712.000	Sekretariat DPRD
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000	4.850.000.000	4.131.401.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000	5.235.000.000	3.940.434.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.431.868.228.000	4.075.381.549.000	4.552.053.451.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000	2.815.905.000	2.748.538.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000	31.008.687.000	29.820.343.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000	5.871.840.000	5.358.143.000	Badan Kepegawaian Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000	26.892.349.000	26.308.989.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000	4.732.269.000	4.589.796.000	Badan Penghubung
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000	4.568.089.000	4.178.996.000	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000	1.924.677.000	727.226.000	Inspektorat
8	**PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**447.497.630.000**	**461.169.105.000**	**447.981.662.000**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000	5.975.000.000	5.490.421.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000	310.000.000	248.938.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000	25.090.000.000	25.698.202.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000	150.000.000	127.895.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000	1.205.000.000	1.082.312.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000	1.900.000.000	1.803.824.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000	102.581.000	70.355.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000	597.827.000	517.055.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000	20.065.000	17.837.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	410.388.757.000	421.168.757.000	408.502.339.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000	2.899.875.000	2.672.484.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL	**24.156.414.261.000**	**23.766.948.041.000**	**23.658.336.646.000**	

Sumber: diolah

4.2.3 136 Program Prioritas Gubernur

Guna melaksanakan 136 Program Prioritas Gubernur telah ditentukan OPD Koordinator yang mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Koordinator 136 Program Prioritas Gubernur

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	BPSDMD	BPSDMD
2	Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni	Diskomdigi	Diskomdigi
3	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam "Jateng Nglakoni"	Diskomdigi	Diskomdigi
4	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Biro Umum	Biro Umum
5	Digitalisasi Manajemen Arsip	Dinas Arpus	Dinas Arpus
6	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Biro Organisasi	Biro Organisasi
7	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Biro Hukum	Biro Hukum
8	Pengembangan *sister province*	Biro Pemotdaker	Biro Pemotdaker
9	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "Cyber Security Jawa Tengah" dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Diskomdigi	Diskomdigi
10	Program Kerjasama Forkopimda	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
11	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima	Bapenda	Bapenda
12	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah	Satpol PP	Satpol PP
13	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)	Bappeda	Bappeda
14	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Brida	Brida
15	Penetapan Zona Integritas / Zona Antikorupsi di OPD, BUMD, BLUD	Inspektorat	Inspektorat
16	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Inspektorat	Inspektorat

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
17	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Inspektorat	Inspektorat
18	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	Dinas ESDM	Dinas ESDM
19	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah	Brida	Brida
20	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Bapenda	Bapenda
21	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Biro BUMD dan BLUD	Biro BUMD dan BLUD
22	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
23	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
24	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Dispora	Dispora
25	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Dispermasdes	Dispermasdes
26	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Disbudparekraf	Disbudparekraf
27	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah.	Disbudparekraf	Disbudparekraf
28	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	Disbudparekraf	Disbudparekraf
29	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	Dishub	Dishub
30	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal	Disbudparekraf	Disbudparekraf
31	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
32	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)	Diskomdigi	Diskomdigi
33	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Dinkop UMKM	Dinkop UMKM
34	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 m	Dinas PUPR	Dinas PUPR
35	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	Dishub	Dishub

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
36	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	Dishub	Dishub
37	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	Dishub	Dishub
38	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	Dishub	Dishub
39	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	DPMPTSP	DPMPTSP
40	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Disperindag	Disperindag
41	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	DLHK	DLHK
42	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Distannak	Distannak
43	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Distannak	Distannak
44	Pendirian Koperasi Buruh	Dinkop UMKM	Dinkop UMKM
45	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Disbudparekraf	Disbudparekraf
46	Event olahraga memancing terbesar di Asia	Disbudparekraf	Disbudparekraf
47	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi.	Dispora	Dispora
48	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	DPMPTSP	DPMPTSP
49	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Distannak	Distannak
50	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	Dishub	Dishub
51	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Dinkop UMKM	Dinkop UMKM
52	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa.	Disbudparekraf	Disbudparekraf
53	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	Bappeda	Bappeda
54	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Bappeda	Bappeda
55	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Disbudparekraf	Disbudparekraf
56	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Dinas ESDM	Dinas ESDM
57	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Distannak	Distannak

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
58	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Dispermasdes	Dispermasdes
59	Revitalisasi embung	Dinas PUPR	Dinas PUPR
60	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
61	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Distannak	Distannak
62	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital	Disperindag	Disperindag
63	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah	Dispora	Dispora
64	Penyediaan benih yang berkualitas	Distannak	Distannak
65	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Distannak	Distannak
66	Regulasi Pengembangan kawasan industri	Disperindag	Disperindag
67	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha	DPMPTSP	DPMPTSP
68	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce)	Biro Perekonomian	Biro BUMD dan BLUD
69	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”.	Dispora	Dispora
70	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) migran	Disnakertrans	Disnakertrans
71	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
72	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Disnakertrans
73	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Biro BUMD dan BLUD	Biro BUMD dan BLUD
74	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	DKP	DKP
75	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Biro Kesrakin	Biro Kesrakin
76	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Distannak	Distannak
77	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	Disdik	Disdik

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
78	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	DLHK	DLHK
79	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
80	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	DP3AP2KB	DP3AP2KB
81	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Biro Organisasi	Biro Organisasi
82	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	DP3AP2KB	DP3AP2KB
83	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	Disbudparekraf	Disbudparekraf
84	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Disbudparekraf	Disbudparekraf
85	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
86	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
87	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Biro Kesrakin	Biro Kesrakin
88	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Dinkes	Dinkes
89	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Biro Kesrakin	Biro Kesrakin
90	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Dinkes	Dinkes
91	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)	Disdik	Disdik
92	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Dinkes	Dinkes
93	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Dinkes	Dinkes
94	Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS	Dinkes	Dinkes
95	BOSDa Madrasah Aliyah	Biro Kesrakin	Biro Kesrakin
96	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Disdik	Disdik
97	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Dispora	Dispora
98	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Disdik	Disdik
99	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)	Dinkes	Dinkes
100	Peningkatan operasional kader Posyandu	Dinkes	Dinkes

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
101	Peningkatan kualitas hidup lansia	Biro Kesrakin	Biro Kesrakin
102	Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba	Bakesbangpol	Bakesbangpol
103	Pelindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah	Dinsos	Dinas Kesehatan
104	Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Disdik	Disdik
105	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	Disdik	Disdik
106	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	Dispermasdes	Dispermasdes
107	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Biro Bangda	Biro Bangda
108	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	Disperakim	Disperakim
109	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	Dinas PUPR	DKP
110	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah priotitas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	Distannak	Distannak
111	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
112	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar	Dishub	Dishub
113	Petani milenial gajian	Distannak	Distannak
114	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	Biro Pemotdaker	Biro Pemotdaker
115	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.	BPBD	BPBD
116	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	Dispermasdes	Dispermasdes
117	Jambanisasi 100%	Dinkes	Dinkes
118	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
119	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
120	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Dinsos	Dinsos
121	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Dinas ESDM	Dinas ESDM

No.	Program	OPD Koordinator Awal	OPD Koordinator Perubahan
122	Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih	Dinas PUPR	Dinas PUPR
123	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren	DLHK	DLHK
124	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	BPBD	BPBD
125	Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak.	Dinas PUPR	Dinas PUPR
126	Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Disperakim	Disperakim
127	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	Dinas PUPR	Dinas PUPR
128	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	Dinas PUPR	Dinas PUPR
129	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	DLHK	DLHK
130	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bappeda	Bappeda
131	Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral	DLHK	DLHK
132	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Biro Perekonomian	Biro Perekonomian
133	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai	DLHK	DLHK
134	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Dinas PUPR	Dinas ESDM
135	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	DLHK	DLHK
136	Subsidi Pangan Murah	Dishanpan	Dishanpan
137	Cek kesehatan gratis	Dinkes	Dinkes

4.2.4 35 Program Delegasi

Guna melaksanakan 35 Program Delegasi telah ditentukan OPD Koordinator sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
OPD Koordinator 35 Program Delegasi

No.	Program	OPD Koordinator
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	BPSDMD
2	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Biro Perekonomian
3	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Dispermasdes
4	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Biro Bangda
5	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Badan Kesbangpol
6	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Dispora
7	Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);	Dispermasdes
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Disbudparekraf
9	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Bappeda
10	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK	Inspektorat
11	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Dinkes
12	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	Dinas Pendidikan
13	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	DP3AP2KB
14	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu	Dinkes
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Biro Hukum
16	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Biro Perekonomian
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Distannak

No.	Program	OPD Koordinator
18	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Disbudparekraf
19	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Dinkop UMKM
20	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	DLHK
21	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Dinkop UMKM
22	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Dispora
23	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Dinas Pendidikan
24	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	BPBD
25	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	DKP
26	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah	Dispermasdes
27	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	BPBD
28	Cek kesehatan gratis	Dinas Kesehatan
29	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Dinas Sosial
30	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Dinas ESDM
31	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Distannak
32	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Biro Perekonomian
33	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Badan Kesbangpol
34	Peningkatan operasional kader posyandu	Dinas Kesehatan
35	Peningkatan kualitas hidup lansia	Biro Kesrakin

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Rencana pendanaan daerah tahun 2026 mendukung kinerja pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun memperhatikan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih dan paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, serta dengan telah dietapkannya APBN Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan tahun 2026 meliputi:

a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 23,741 triliun rupiah, pada APBD Tahun 2026 menjadi sebesar 23,352 triliun rupiah, dan pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar 23,191 triliun rupiah;
b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2026 adalah sebesar 24,156 triliun rupiah, APBD Tahun 2026 menjadi sebesar 23,766 triliun rupiah, dan pada rencana perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar 23,658 triliun rupiah;
c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 sebesar 414,5 miliar rupiah, dan dalam perubahan RKPD Tahun 2026 tetap sebesar 467,1 miliar rupiah.

Proyeksi kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH				
1.	**PAD**	**16.318.898.370.000**	**15.929.432.150.000**	**15.767.140.615.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000	12.503.441.258.000	12.199.395.630.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000	2.406.226.823.000	2.514.447.763.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000	707.736.377.000	741.727.098.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000	312.027.692.000	311.570.124.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000	7.397.415.721.000
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**	**25.600.170.000**	**26.600.170.000**
Jumlah Pendapatan (1+2+3)		**23.741.914.261.000**	**23.352.448.041.000**	**23.191.156.506.000**
BELANJA DAERAH				
1.	**Belanja Operasi**	**15.630.119.890.500**	**15.571.460.039.336**	**15.660.616.311.273**
1.1.	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000	7.528.775.845.000	7.275.649.901.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500	5.978.582.099.336	6.298.634.508.273
1.3.	Belanja Subsidi	7.647.280.000	7.647.280.000	7.233.280.000
1.4.	Belanja Hibah	2.070.582.715.000	2.046.047.815.000	2.068.315.346.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000	10.407.000.000	10.783.276.000
2.	**Belanja Modal**	**1.679.982.022.500**	**1.699.107.432.664**	**1.629.887.222.727**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**33.300.800.000**
4.	**Belanja Transfer**	**6.826.312.348.000**	**6.476.380.569.000**	**6.334.532.312.000**

NO	URAIAN	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
4.1.	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000	4.043.881.549.000	4.508.640.497.000
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000	2.432.499.020.000	1.825.891.815.000
Jumlah Belanja (1+2+3+4)		**24.156.414.261.000**	**23.766.948.041.000**	**23.658.336.646.000**
Surplus/Defisit		**(414.500.000.000)**	**(414.500.000.000)**	**(467.180.140.000)**
PEMBIAYAAN DAERAH				
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**484.500.000.000**	**484.500.000.000**	**467.180.140.000**
	SiLPA	484.500.000.000	484.500.000.000	467.180.140.000
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**0**
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	0
Pembiayaan Netto (1-2)		**414.500.000.000**	**414.500.000.000**	**467.180.140.000**
SILPA		**0**	**0**	**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2026.

5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi perluasan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan berorientasi kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI); peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara adaptif; percepatan implementasi kurikulum adaptif; perbaikan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi; peningkatan pembinaan potensi siswa; penguatan pengelolaan *boarding* dan semi *boarding* dengan sasaran siswa dari keluarga kurang mampu; penyediaan layanan pendidikan jarak jauh (sekolah virtual dan kelas jarak jauh); pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDa Reguler, Kemitraan dan BOP serta siswa melalui BSM (Beasiswa Siswa Miskin) dan seragam miskin; Seleksi Beasiswa Luar Negeri dan Identifikasi pemetaan Sekolah Unggulan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan *softskill* melalui internalisasi kurikulum, muatan lokal dan ekstra kurikuler serta adanya upaya perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI).

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan; pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan usia produktif, kesehatan lansia, melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP), peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar, pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; peningkatan kesehatan lingkungan melalui pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; Bantuan jamban sehat; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota, pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi, penyusunan rencana epidemologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan, penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan primer dan rujukan melalui fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) serta pemenuhan layanan unggulan KJSU (kanker, jantung, *stroke* dan urologi), pendampingan institusi layanan primer, pelayanan pengujian kalibrasi; pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD; Pelayanan dokter spesialis keliling; pengelolaan sistem informasi kesehatan melalui implementasi sistem analisis kesehatan berbasis *Big Data* dan *AI* (kecerdasan buatan); distribusi dan pengadaan alat kesehatan, obat bahan habis pakai, vaksin, makan dan minuman di fasilitas kesehatan melalui pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota. Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan

pemenuhan SDMK tingkat provinsi; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta. Peningkatan operasional kader Posyandu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, SPAM Desalinasi dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui fasilitasi proses pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Purbalingga-Banjarnegara, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi melalui

pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka pencapaian 1 KK 1 rumah layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah adaptif banjir di pesisir utara, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah susun.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman di kawasan pesisir.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM sub-urusan bencana kabupaten/kota serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang. Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial (Kartu Jateng Ngopeni) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery, housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan

dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan

bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas. Bantuan hukum bagi perempuan (Kecamatan Berdaya).

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak. Bantuan hukum bagi anak dan disabilitas.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, serta fasilitasi perdes tentang pelestarian lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim, serta pendampingan kelompok masyarakat dalam program kampung iklim (Proklim).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (Adiwiyata).

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain fasilitasi persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional, serta fasilitasi kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah, Produk unggulan *go internasional* bekerjasama dengan diaspora.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk pemberdayaan masyarakat, dan penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang terintegrasi dengan 6 (enam) bidang layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum (Trans Jateng) di 10 Wilayah Pengembangan; moderanisasi sistem dan halte Trans Jateng; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap V dan peningkatan Terminal Sukoharjo; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diantaranya pada jalan akses menuju kawasan pariwisata dan *Geopark* Dieng, serta perlengkapan jalan lainnya (rambu pendahulu penunjuk jurusan/RPPJ, *warning light, guardrail*, marka dan rambu) di ruas jalan provinsi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antarkabupaten di Desa Yosorejo Kabupaten Batang (Sungai Kalikutho); penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan (rambu dan marka) perlintasan kereta api di Kabupaten Cilacap serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik, sekaligus mendukung penyampaian kebijakan pemerintah secara terbuka, efektif, dan timbal balik. Pelaksanaan program difokuskan pada penyebarluasan informasi secara luas dan merata kepada masyarakat Jawa Tengah melalui relasi media, optimalisasi berbagai kanal komunikasi milik pemerintah seperti media sosial, radio online, situs web maupun media komunikasi lainnya; Pelaksanaan program juga mencakup *government public relation* atau kehumasan, Kerja sama penyebarluasan informasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta pengelolaan dan penyajian konten publik agar lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, program juga mendukung pengelolaan informasi publik, aduan terhadap sengketa informasi, peningkatan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Untuk meningkatkan responsivitas komunikasi pemerintah, program ini turut mendukung pelaksanaan Smart Response "Jateng Nglakoni", analisis opini masyarakat dan informasi *hoaks*, serta penyusunan strategi komunikasi sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada tiga aspek penting, yaitu penyediaan infrastruktur teknologi Digital terutama jaringan internet; peningkatan kapasitas penyimpanan data dan aplikasi melalui pengembangan Pusat Data; serta penguatan sinergi dan integrasi aplikasi pemerintahan. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang terintegrasi dan efektif.

Pelaksanaan program mencakup pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai, pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung terwujudnya *smart province*, pengembangan integrasi layanan Pemerintah Digital melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Selain itu, program meliputi penyusunan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi akses internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE)

Penguatan infrastruktur pendukung dilakukan melalui pemenuhan fasilitas pusat data dengan standar *data center facilities rated III*, penyediaan layanan *bandwidth* internet bagi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang. Pengembangan koperasi pesantren.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi. Fasilitasi jaringan pemasaran *one pesantren one product*.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda (contoh: Kartu Zilenial).

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, peningkatan penyediaan prasarana sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, pelaksanaan event olahraga (contoh: *e-Sport*, Tarkam, Memancing, dan sebagainya); serta pembinaan dan pelatihan atlet.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah dan pemetaan geospasial tematik pendukung program prioritas pembangunan daerah, dan peningkatan kapasitas SDM statistisi dan surveyor pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah maupun Forum Sandi dan Keamanan Siber antar instansi, peningkatan layanan *penetration testing* dalam rangka meningkatkan keamanan siber di setiap aplikasi dan website milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*) bahkan hingga memberdayakan siswa-siswa SMK, peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan/atau Instrumen

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pembinaan SDM/lembaga/pranata kebudayaan, dan evaluasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Peningkatan kualitas kebudayaan melalui upaya pelindungan dengan penguatan pendataan dan pemanfaatan kesenian tradisional, termasuk peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan; pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, peningkatan kelestarian arsip statis sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), peningkatan kualitas layanan kearsipan Provinsi Jawa Tengah melalui Pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, peningkatan pemanfaatan arsip oleh masyarakat melalui digitalisasi manajemen kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi manajemen kearsipan.

6.2.1 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan (wisata alam, budaya dan religi) berdasarkan potensi wilayah; pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun melalui perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan yang meliputi penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, dan pembangunan sumber benih.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi melalui pengamanan kawasan TAHURA provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi, pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi, kerja sama penyelenggaraan TAHURA provinsi, perencanaan pengelolaan TAHURA; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan daerah provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam

lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; sinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah, dan monitoring terjadinya *Land Subsidence*/amblesan tanah; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah dengan mendorong pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah; penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi; serta melakukan evaluasi terhadap zona konservasi air tanah pada CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2026 akan dilaksanakan pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan dan keandalan pelayanan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan geopark global sebagai dukungan revalidasi UGGp Gunung Sewu dan penetapan geopark Klaten. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi *(geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan good mining practice melalui sosialisasi regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; updating sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); kajian *blueprint* Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat; pemberian penghargaan good mining practice sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha pertambangan skala kecil. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral serta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, Pompa Air Tenaga Surya (PATS), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi terutama EBT bagi masyarakat antara lain pada kelompok tani, dan pondok pesantren, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi Jawa Tengah, penyusunan dokumen kajian strategi pengembangan DME di Jawa Tengah; dan pemodelan untuk persiapan evaluasi regulasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; pemberian penghargaan Jateng Energy Transition Award (JETA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, yang telah melaksanakan inovasi transisi energi.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan keandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; Kajian Evaluasi Program Bantuan Listrik; koordinasi K2 bersama stakeholder terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM). Regulasi Pengembangan kawasan industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

6.2.2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi melalui penyusunan pergub SOTK baru; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah, fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pemerintah digital; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/ kota; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

6.2.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan

barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

6.2.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

6.2.5 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		10.964.914.894.000	10.895.925.709.000	10.659.939.567.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.964.914.894.000	10.895.925.709.000	10.659.939.567.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.029.319.802.000	3.088.502.248.000	3.124.350.054.000
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000	3.087.472.248.000	3.123.325.408.000
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000	330.000.000	325.913.000
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000	400.000.000	397.238.000
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000	300.000.000	301.495.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		550.415.014.000	510.364.728.000	524.818.493.000
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000	507.201.291.000	522.250.001.000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000	1.928.215.000	1.424.117.000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000	75.000.000	69.536.000
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000	1.160.222.000	1.074.839.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		452.602.467.000	480.549.542.000	785.895.693.000
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000	48.621.302.000	62.696.638.000
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000	23.013.309.000	27.058.350.000
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000	11.770.900.000	11.759.145.000
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000	2.793.451.000	2.731.703.000
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000	41.417.191.000	30.027.289.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000	349.789.477.000	649.175.219.000
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000	2.146.224.000	1.657.750.000
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000	997.688.000	789.599.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		19.144.323.000	19.111.323.000	18.081.714.000
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000	12.827.000.000	12.226.014.000
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000	3.251.323.000	2.973.053.000
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000	2.663.000.000	2.645.005.000
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000	370.000.000	237.642.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		10.767.690.000	10.767.690.000	10.195.922.000
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000	4.482.690.000	4.456.563.000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000	5.975.000.000	5.490.421.000
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000	310.000.000	248.938.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		199.768.275.000	199.728.275.000	196.620.165.000
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000	10.246.000.000	7.704.130.000
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	200.000.000	181.864.000
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000	74.090.123.000	71.594.533.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000	110.594.572.000	112.590.623.000
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000	4.397.580.000	4.299.015.000
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	200.000.000	250.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		11.902.164.000	11.862.164.000	10.590.796.000
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000	121.635.000	95.386.000
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000	7.572.217.000	7.231.889.000
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000	1.510.000.000	1.200.802.000
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000	910.000.000	680.595.000
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000	1.748.312.000	1.382.124.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		4.468.080.000	4.468.080.000	4.074.830.000
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000	2.698.800.000	2.525.887.000
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000	770.432.000	660.574.000
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000	328.408.000	314.334.000
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000	373.720.000	298.546.000
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000	296.720.000	275.489.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		21.183.125.000	20.963.125.000	18.198.697.000
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000	13.482.995.000	11.079.736.000
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000	4.925.924.000	4.772.583.000
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000	2.554.206.000	2.346.378.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.200.000.000	1.208.000.000	887.340.000
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000	272.000.000	169.238.000
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	503.000.000	382.859.000
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000	433.000.000	335.243.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG		2.224.600.000	2.313.900.000	2.000.766.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	192.000.000	153.018.000
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000	1.001.614.000	914.464.000
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000	187.286.000	188.654.000
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000	25.000.000	19.068.000
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	392.000.000	282.283.000
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	192.000.000	142.659.000
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	30.000.000	20.741.000
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000	294.000.000	279.879.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		205.000.000	205.000.000	169.795.000
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000	70.000.000	54.929.000
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000	60.000.000	49.596.000
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000	75.000.000	65.270.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		5.058.540.000	5.058.540.000	4.494.029.000
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000	155.000.000	122.575.000
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000	1.033.540.000	810.408.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000	3.870.000.000	3.561.046.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		727.020.000	727.020.000	592.091.000
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000	160.000.000	129.127.000
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000	389.667.000	319.788.000
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000	177.353.000	143.176.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		138.755.679.000	138.913.079.000	145.184.897.000
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000	136.498.296.000	142.731.386.000
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000	814.783.000	863.781.000
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000	1.600.000.000	1.589.730.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		58.086.829.000	64.961.235.000	63.054.213.000
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000	16.755.200.000	17.313.326.000
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000	48.206.035.000	45.740.887.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5.844.070.000	5.734.070.000	4.967.879.000
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000	916.680.000	773.812.000
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000	184.000.000	136.714.000
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000	555.000.000	457.602.000
2.17.07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000	822.000.000	701.386.000
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000	3.256.390.000	2.898.365.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		3.532.154.000	3.532.154.000	2.721.600.000
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000	667.200.000	614.748.000
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000	1.514.954.000	1.180.383.000
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000	790.000.000	497.738.000
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000	350.000.000	260.388.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000	210.000.000	168.343.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		112.409.700.000	112.729.700.000	118.496.813.000
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000	11.340.000.000	11.523.755.000
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000	101.389.700.000	106.973.058.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		740.000.000	693.400.000	524.797.000
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000	693.400.000	524.797.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1.783.800.000	1.683.800.000	1.341.773.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000	1.683.800.000	1.341.773.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		27.680.000.000	30.095.000.000	30.462.233.000
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000	25.090.000.000	25.698.202.000
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000	150.000.000	127.895.000
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000	1.205.000.000	1.082.312.000
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000	1.900.000.000	1.803.824.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.572.289.000	1.572.289.000	1.512.349.000
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000	1.469.708.000	1.441.994.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000	102.581.000	70.355.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		617.892.000	617.892.000	534.892.000
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000	597.827.000	517.055.000
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000	20.065.000	17.837.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		25.905.836.000	26.458.836.000	22.053.445.000
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000	1.381.911.000	1.315.862.000
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000	9.771.576.000	7.214.874.000
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000	13.272.050.000	11.658.718.000
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000	983.227.000	974.012.000
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000	1.050.072.000	889.979.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		17.077.675.000	16.902.675.000	13.289.360.000
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000	6.525.625.000	4.621.371.000
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000	8.652.050.000	6.640.702.000
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000	700.000.000	618.389.000
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000	1.025.000.000	1.408.898.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		400.962.343.000	403.873.943.000	350.021.144.000
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000	159.558.128.000	135.144.133.000
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000	180.729.000.000	167.115.403.000
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000	4.637.563.000	4.411.423.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000	5.850.000.000	5.883.304.000
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000	53.099.252.000	37.466.881.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		3.282.737.000	5.329.862.000	5.677.796.000
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000	4.071.500.000	4.760.766.000
3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000	591.362.000	394.176.000
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000	552.000.000	439.679.000
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000	115.000.000	83.175.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		6.268.532.000	6.268.532.000	6.271.219.000
3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000	923.631.000	831.332.000
3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000	1.077.356.000	953.589.000
3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000	2.135.551.000	2.466.886.000
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000	2.131.994.000	2.019.412.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		43.760.600.000	44.390.600.000	39.917.364.000
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000	70.000.000	70.000.000
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000	200.000.000	210.000.000
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000	33.550.000.000	32.962.828.000
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000	2.150.000.000	785.067.000
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000	999.054.000	980.469.000
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000	7.421.546.000	4.909.000.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		11.323.146.000	11.848.146.000	10.059.411.000
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000	11.286.146.000	9.497.411.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000	502.000.000	502.000.000
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		150.000.000	150.000.000	72.205.000
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	150.000.000	72.205.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		427.000.853.000	438.427.061.000	423.602.087.000
4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000	2.056.666.000	1.665.086.000
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000	2.919.557.000	2.860.176.000
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	411.638.757.000	422.418.757.000	409.511.144.000
4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.856.000.000	2.856.000.000	2.499.204.000
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000	4.640.000.000	4.131.912.000
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000	1.781.081.000	1.548.521.000
4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000	1.755.000.000	1.386.044.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD		336.517.695.000	336.517.695.000	340.447.712.000
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000	336.517.695.000	340.447.712.000
5.01	PERENCANAAN		10.085.000.000	10.085.000.000	8.071.835.000
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000	4.850.000.000	4.131.401.000
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000	5.235.000.000	3.940.434.000
5.02	KEUANGAN		6.891.636.940.000	6.541.705.161.000	6.410.514.147.000
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.857.812.348.000	6.507.880.569.000	6.377.945.266.000
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000	2.815.905.000	2.748.538.000
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000	31.008.687.000	29.820.343.000
5.03	KEPEGAWAIAN		5.871.840.000	5.871.840.000	5.358.143.000
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000	5.871.840.000	5.358.143.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		26.892.349.000	26.892.349.000	26.308.989.000
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000	26.892.349.000	26.308.989.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		3.379.000.000	3.379.000.000	2.772.622.000
5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000	3.379.000.000	2.772.622.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		4.732.269.000	4.732.269.000	4.589.796.000
5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000	4.732.269.000	4.589.796.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		6.492.766.000	6.492.766.000	4.906.222.000
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000	4.568.089.000	4.178.996.000
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000	1.924.677.000	727.226.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		310.151.273.000	265.334.343.000	254.691.751.000
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000	3.126.756.000	3.152.919.000
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000	61.817.623.000	61.799.888.000
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000	4.728.139.000	4.503.260.000
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000	2.899.875.000	2.672.484.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000	192.761.950.000	182.563.200.000
TOTAL			**24.156.414.261.000**	**23.766.948.041.000**	**23.658.336.646.000**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2026.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diukur menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 dan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian target beberapa indikator kinerja. Penyesuaian dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026		Perangkat Daerah Koordinator
			RKPD	RKPD P	
1	2	3	5	6	7
1	Tingkat Kemiskinan	%	8,70-8,53	8,70-8,53	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,00	92,00	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97	80,97	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,46 - 89,50	86,46 - 89,50	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	65,72	65,72	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,62	0,62	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27	4,71 - 4,27	Sekretariat Daerah

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Penyesuaian IKU Perangkat Daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
A	Aspek Geografi dan Demografi			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup1)4)	Angka	75,73	75,73
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK1)	%	5,32	5,32
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah1)3)	Angka	0,487	0,487
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 1)3)	%	17,83	14,08
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 1)3)	%	23,00	23,00
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah1)	% RT	29,00	29,00
7	Konsumsi Listrik per Kapita1)3)	kWh/ Kapita	883,94	883,94
8	Intensitas Energi Primer1)3)	SBM/Rp miliar	203,21	203,21
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 1)3)	%	7,83	7,83
10	Indeks Ketahanan Pangan 1)3)	Angka	85,60	75,88**)
11	Kapasitas Air Baku1)	m3/detik	5,82	5,82
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 1)3)	%	42,60	36,0
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi1)	%	58,97	58,97
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi 1)3)	Angka	70,14	69,2
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi 1)3)	%	52,38	52,38
16	Indeks Risiko Bencana 1)3)	Angka	94,75	91,90
17	Persentase Penurunan Emisi GRK1)			
	- Kumulatif	%	6,57	6,57
	- Tahunan	%	15,84	15,84
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Tingkat Kemiskinan1)	%	8,70 - 8,53	8,70 - 8,53
2	PDRB per Kapita1)	Juta Rp	52,0 - 55,7	52,0 - 55,7
3	Pertumbuhan Ekonomi1)	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka1)	%	4,71 - 4,27	4,71 - 4,27
5	Rasio Gini1)	Angka	0,351 - 0,361	0,351 - 0,361
6	Indeks Modal Manusia1)	Angka	0,62	0,62
7	Usia Harapan Hidup (UHH) 1)3)	Tahun	75,46	75,46
8	Angka Kematian Ibu 1)3)4)	per 100.000 KH	78,27	78,27
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 1)3)4)	%	17,00	17,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 1)	%	95,00	95,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 1)	%	91,00	91,00
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 1)3)	%	99,23	99,23
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca1)	%	87,86 - 90,71	87,86 - 90,71
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi1)	%	34,29 - 39,29	34,29 - 39,29
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca1)	%	72,49 - 74,99	72,49 - 74,99
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi1)	%	65,65 - 68,15	65,65 - 68,15
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun1)	Tahun	8,69 - 8,71	8,69 - 8,71
18	Harapan Lama Sekolah 1)3)	Tahun	13,03 - 13,06	13,03 - 13,06
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi1)	%	8,43	8,43
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi 1)3)	%	67,71	67,71
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi 1)3)	%	51,03	44,30***)
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal 1)3)	%	21,75	21,75
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 1)3)	Angka	62,86	62,86
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 1)3)	Angka	77,06	77,06
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 1)3)4)	Angka	0,304	0,304
26	Indeks Kesejahteraan Sosial 2)	Angka	58,81	58,81
C	Aspek Daya Saing Daerah			
1	Tingkat Inflasi1)	%	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia1)	Angka	61,40	61,40
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan1)	%	34,65 - 34,83	34,65 - 34,83
4	Kontribusi PDRB Provinsi1)	%	8,20	8,20
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan1)	%	34,65-34,83	34,65-34,83
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 1)3)	%	3,60	3,60

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 1)3)	Ribu Orang	70,79	70,79
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional 1)3)	%	13,08	13,08
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi 1)3)	%	10,49	10,49
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi 1)3)	%	6,23	6,23
11	Rasio Kewirausahaan Daerah 1)3)	%	3,53	3,35
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 1)3)	%	2,16	2,16
13	Return on Aset (RoA) BUMD1)	%	1,62	1,62
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 1)3)	%	44,05	44,05
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 1)3)	%	63,15	63,15
16	Kapabilitas Inovasi 1)3)	Angka	4,66	4,66
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal 2)	Produk	557.267	557.267
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB 2)	%	3,14	3,14
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) 2)	Angka	0,65	0,65
20	Indeks Ekonomi Hijau 1)	Angka	45,57	45,57
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 1)3)	%	21,60	22.35
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1)	Angka	6,12	6,12
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 1)3)	Angka	6,60	6,60
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto 1)3)	% PDRB	30,63	30,63
25	Ekspor Barang dan Jasa 1)3)	% PDRB	11,12	11,12
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional1)	%	2,45	2,45
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 1)3)	%	74,54	76,89
28	Persentase Desa Mandiri 1)3)	%	27,27	27,27
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap 1)3)	%	93,12	90,30
30	Indeks Pelayanan Transportasi 1)3)	Angka	6,788	6,788
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang 1)3)	%	63,65	63,65
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB1)	%	1,38	1,38
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB1)	%	24,11	24,11
34	Aset Dana Pensiun/PDRB1)	%	0,39	0,39
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi1)	Nilai	3.846.660	3.846.660
36	Total Kredit/PDRB1)	%	25,14	25,14
37	Inklusi Keuangan1)	%	92,74	92,74
D	Aspek Pelayanan Umum			
1	Indeks Reformasi Birokrasi 2)	Angka	92,00	92,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
2	Indeks Integritas Nasional 1)	Angka	80,97	80,97
3	Indeks Demokrasi Indonesia 1)	Angka	86,46 - 89,50	86,46 - 89,50
4	Otonomi Fiskal Daerah 2)	%	65,72	65,72
5	Kapasitas Institusi 1)	Angka	4,73	4,73
6	Indeks Reformasi Hukum 1)3)	Angka	92,00	92,00
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1)	Angka	4,55	4,56****)
8	Indeks Pelayanan Publik 1)	Angka	4,56	4,56
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 1)3)	Angka	86,00	86,00
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya1)	%	79,50	79,50
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah 1)	Kategori	Sedang	Sedang
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah 1)	Kategori	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 1)	Angka	79,65 - 79,69	79,65 - 79,69
14	Manajemen Risiko Indeks 2)	Angka	3,380	3,380
E	Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar			
I	Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun 3)4)	%	72,88	72,88
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas 3)4)	%	74,02	74,02
3	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesment Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi 3)6)	%	64,95	64,95
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 3)6)	%	90,88	90,88
II	Kesehatan			
1	Angka Kematian Balita (AKABA) 2)3)	per 1.000 KH	8,66	8,66
2	Persentase Penurunan Kasus Stunting 2)3)	%	0,15	0,15
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 2)3)	%	52,00	52,00
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) 2)3)	%	34,30	34,30
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2)3)	%	28,57	28,57
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana dan Kesehatan Lingkungan 2)3)	%	77,00	77,00
7	Net Death Rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi 3)6)	permil	55,80	55,80
8	Net Death Rate (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 3)6)	permil	30,13	30,13
9	Net Death Rate (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH 3)6)	permil	33,10	33,10

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
10	Net Death Rate (NDR) RSUD dr. Rehatta 3)6)	permil	10,80	10,80
11	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo 3)6)	permil	4,02	4,02
12	Net Death Rate (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin 3)6)	permil	2,98	2,98
13	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 3)6)	permil	13,05	13,05
14	Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Roestam 3)6)	permil	33,10	33,10
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 4)5)	%	100	100
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 4)5)	%	100	100
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	93,61	90,30
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap 3)6)	%	63,71	64,47
3	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor 3)6)	%	48,75	49,05
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 3)6)	%	41,20	36,60
5	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar 3)6)	%	72,82	72,82
6	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air 3)6)	%	67,76	67,42
7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 4)	%	24,65	24,65
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 4)	%	100	100
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan 3)6)	%	62,66	63,20
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 4)	%	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 4)	%	100	100
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani 4)	%	14,90	14,19
V	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2)3)	Angka	84,50	84,50

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
2	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah 3)6)	Angka	6,15	6,20
3	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3)6)	Angka	13,20	13,20
4	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah 4)	%	85,71	85,71
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 4)	%	100	100
6	Indeks Ketahanan Daerah 2)3)	Angka	0,77	0,75*****)
7	Persentase penanganan pra bencana4)	%	100	100
8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana 4)	%	100	100
VI	Sosial			
1	Persentase Populasi PPKS 3)6)	%	10,01	10,01
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sesuai SPM Bidang Sosial 3)5)	%	100	100
3	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin 3)6)	%	9,48	9,48
4	Persentase PSKS yang Meningkat Kompetensinya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3)6)	%	8,88	8,88
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100
6	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100
7	Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100
8	Persentase Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100
9	Persentase korban bencana daerah provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat 4)5)	%	100	100
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
I	Tenaga Kerja			
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR/Employment to Population Ratio) 2)3)	%	69,54	69,54
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 3)6)	%	74,39	74,39
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten 3)4)	%	10,00	10,00
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 3)4)	Juta Rp	56,40	56,40
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja 3)4)	%	85,71	85,71
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	%	19,43	19,43

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
	Ketenagakerjaan) 4)			
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 4)	%	73,85	73,85
8	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 4)	%	10,51	10,51
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2)3)4)	Angka	93,47	93,57
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2)3)	Angka	65,35	65,35
3	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi 3)4)	%	12,00	12,00
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif 4)	%	100	100
5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif 4)	%	100	100
III	Pangan			
1	Persentase cadangan pangan 4)	%	31,00	36,00
2	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah 3)4)	Angka	94,50	94,50
3	Persentase Daerah Rawan Pangan 3)4)	%	14.60	7,99
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 3)4)	%	90,10	90,10
IV	Pertanahan			
1	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 3)6)	%	100	100
2	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi 3)6)	%	55,50	55,50
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 4)	%	100	100
4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 4)	%	100	100
V	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air (IKA) 2)3)	Angka	68,82	68,82
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) 2)3)	Angka	84,93	84,93
3	Indeks SO2 dan NO2 2)3)	Angka	0,3234	0,3234
4	Indeks Pencemaran Air 2)3)	Angka	3,34	3,34
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 4)	%	50,00	50,00
VI	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah 3)6)	Angka	85,50	85,50
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah 3)6)	%	86,53	86,53

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
VII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah 3)6)	%	11,69	11,69
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertility Rate (TFR) 2)3)4)	Angka	2,10	2,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2)3)4)	Angka	64,50	64,50
3	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR 2)3)4)	%	69,75	69,75
4	Unmetneed KB 2)3)4)	%	9,25	9,25
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 2)3)4)	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	16,00	16,00
IX	Perhubungan			
1	Rasio Konektivitas Provinsi 3)6)	Angka	0,302	0,302
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi 3)6)	%	99,9838	99,9838
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi 3)4)	%	6.94	6.94
4	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah 3)4)	%	98,03	98,03
X	Komunikasi dan Informatika			
1	Indeks Pemerintahan Digital 2)3)	Angka	2,10	2,10
XI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB 3)6)	%	13,52	13,52
XII	Penanaman Modal			
1	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal 3)4)	%	10,13	10,13
XIII	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2)3)	Angka	0,389	0,389
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 3)4)	Angka	60,25	60,25
XIV	Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik 2)	Angka	2,81	2,81
XV	Persandian			
1	Indeks Keamanan Sandi dan Siber 2)	Angka	3,59	3,59
XVI	Kebudayaan			
1	Angka Melek Budaya 3)	%	55,32	55,32
XVII	Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 3)4)	Angka	42	40,10
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) 3)4)	Angka	68,50	60,25
XVIII	Kearsipan			
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah 3)4)	Angka	96,27	96,27
2	Persentase Arsip Bersejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) 3)6)	%	50,00	50,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (LKD Provinsi) 3)6)	Angka	97,29	97,29
	Urusan Pilihan			
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3)6)	%	2,00	2,00
2	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi 3)6)	%	0,84	0,84
3	Produksi Perikanan 3)4)	Ton	954.029	954.029
4	Produksi Garam 3)4)	Ton	541.775,75	541.775,75
II	Pariwisata			
1	Pengeluaran Wisatawan 3)6)	Rp	8.243.954	8.243.954
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 3)6)	Juta Rp	102.344.465	102.344.465
	Indikator Hasil Rakortek			
1	Rasio PDRB Akomodasi makan minum	%	3,60	3,60
2	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	152.820.000	152.820.000
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	70,79	70,79
4	Tenaga Kerja Pariwisata	orang	43.795	43.795
III	Pertanian			
1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian 3)6)	%	1,05	1,05
2	Produksi Tanaman Pangan 3)4)	Ton	12.734.625	12.671.311
3	Produksi Tanaman Hortikultura 3)4)	Ton	1.073.636	1.046.521
4	Produksi Tanaman Perkebunan 3)6)	Ton	3.868.006	3.844.211
5	Produksi Ternak 3)4)	Ton	1.936.930	1.936.930
IV	Kehutanan			
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2)3)	Angka	59,47	59,47
2	Luas Tutupan Lahan 2)3)	Ha	1.022.457	1.022.457
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan 2)3)	%	0,43	0,43
4	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi 3)4)	%	0,78	0,78
V	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Indeks Pengelolaan Air Tanah 3)6)	Angka	360	360
2	Indeks Ketersediaan Air Tanah 3)6)	Angka	3,67	3,67
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan 3)6)	%	2,01	2,01
4	Persentase Penerapan Good Mining Practice (GMP) 3)6)	%	63,50	63,50
5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik 3)6)	Angka	1,00	1,00
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda 4)	%	100	100
7	Rasio Elektrifikasi 2)	%	~100	~100
VI	Perdagangan			
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 3)6)	%	4,30	4,30
2	PDRB Sektor Perdagangan 3)6)	Milyar Rupiah	272.562,00	272.562,00
3	Ekspor barang dan jasa	%	11,12	11,12

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen 4)	%	100	100
VII	Perindustrian			
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian 3)6)	%	4	4
2	PDRB Sektor Perindustrian 3)6)	Milyar Rupiah	664.756.150.8	664.756.150.8
4	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki 3)6)	%	0,32	0,32
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 4)	%	100	100
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
I	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Kualitas Kebijakan 3)6)	Angka	66,40	66,40
II	Sekretariat DPRD			
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3)6)	Angka	92,00	92,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
I	Perencanaan			
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2)3)	Angka	94,19	94,19
2	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN 3)6)	Angka	27,75	27,75
3	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN 3)6)	Angka	56,44	56,44
4	Skor Aspek Keterhubunngan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja 3)6)	Angka	10,00	10,00
II	Keuangan			
1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3)4)	%	5,41	5,41
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3)6)	%	97,85	97,85
3	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 2)3)	Angka	3,12	3,12
III	Kepegawaian			
1	Indeks Sistem Merit 2)3)	Angka	0,87	0,87
2	Indeks NSPK Manajemen ASN 3)4)	Angka	93,00	93,00
IV	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Kompetensi ASN 3)6)	Angka	3,10	3,10
V	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah 2)3)	Angka	73,50	73,50
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti 3)6)	%	100	100
VI	Pengelolaan Penghubung			
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung 3)6)	Angka	86,00	86,00
	Unsur Pengawasan			
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 3)4)	Angka	3,52	3,52
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Angka	3,40	3,40

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026	
			RKPD	RKPD-P
1	2	3	4	5
	(APIP) 3)4)			
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2)3)	Angka	3,196	3,196
	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD 3)6)	Angka	3,02	3,02
2	Indeks Harmonisasi Indonesia 2)3)	Angka	6,50	6,50
3	Indeks Ketahanan Politik 3)6)	Angka	3,12	3,12

Keterangan:
1) IUP RPJPD/ Indikator Sasaran Visi RPJPD
2) Indikator Mandatori Lainnya (Indikator mandatori Blue Print Gubernur/ Wakil Gubernur, hasil evaluasi Raperda Kemendagri, dan/ atau mandatori Pusat lainnya)
3) Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah
4) Indikator Kinerja Kunci (IKK)
5) Indikator SPM
6) Indikator Mandiri/ Lokal Daerah

**) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman: Indikator tersebut mengalami penurunan dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti: Keterbatasan anggaran; Kelompok masyarakat (KPP) tidak aktif; Belum ditetapkan peraturan terkait pengelolaan limbah domestik pada beberapa kabupaten; Belum dibentuk UPTD pengelola IPLT untuk layanan Lumpur Tinja Terjadwal pada beberapa kabupaten.*
***) Indeks Ketahanan Pangan: Pada kurun waktu 2020-2024 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren meningkat, sedangkan pada Tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,73. Namun demikian, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan menurunnya kondisi ketahanan pangan daerah, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metodologi perhitungan IKP yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Perubahan dimaksud meliputi penyesuaian indikator penyusun dari sebelumnya 9 indikator menjadi 12 indikator, sehingga menghasilkan basis pengukuran yang lebih komprehensif dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian IKP Tahun 2025 perlu dimaknai sebagai baseline baru dalam pengukuran ketahanan pangan, sehingga perbandingan kinerja antarwaktu perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perubahan metode tersebut. Target IKP dalam RKPD Murni 2026 masih menggunakan formulasi perhitungan dengan metode lama sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, target IKP dalam RKPD Perubahan 2026 ditetapkan mengacu pada angka proyeksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Jawa Tengah, sehingga selaras dengan upaya mendukung pencapaian target IKP Nasional tahun 2026.*
****) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi: Ketidakpastian & gejolak pada perekonomian jelas berdampak pada sektor riil & dipastikan berdampak pada sektor ketenagakerjaan, karena dominasi cakupan UCJ Jateng adalah Bukan Penerima Upah (BPU) / sektor informal. Selain itu realisasi 2025 sebesar 39,27% dari target 2025 sebesar 47,56%, hanya tumbuh 2,06% dari realisasi tahun 2024 yaitu 38,48%, dan pada Rakortekbangpus 2026, untuk target cakupan UCJ 2026 disepakati sebesar 44,30%.*
*****) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Angka merupakan realisasi terakhir. Mendasari Surat Edaran Kemen PANRB No:B/66/PD.02/2025 tgl 21 April 2025 sebagaimana amanat Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029, pada lampiran 1 hal 188, mulai Tahun 2026 evaluasi akan mengalami perubahan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital.*
******) Indeks Ketahanan Daerah: Mendasarkan surat BNPB Nomor B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah, terdapat penyesuaian komponen penyusun pada perhitungan Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.*

6.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Indikator kinerja program tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	100	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	94	Dinas Kesehatan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90,5	90,5	Dinas Kesehatan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	100	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82,2	82,2	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	91	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	100	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	49,27	49,27	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	52	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	100	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	37	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33,01	33,01	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40,88	40,88	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	100	Dinas Sosial - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	100	Dinas Sosial - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	87	87	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	90	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	87	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	100	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79,5	79,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	86	86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	86	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang statistikDinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	Sekretariat DPRD - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	Sekretariat DPRD - Bagian Umum
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	90	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81,5	81,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	%	96	96	Badan Penghubung - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	100	Badan Penghubung - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	APK SMA	%	30,32	30,32	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
	Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0,011	0,011	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35,89	35,89	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64,45	64,45	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Atas
	APK SMK	%	53,75	53,75	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
	Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0,026	0,026	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	57	57	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60,86	60,86	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67,77	67,77	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
	APK SLB	%	91,74	91,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
	Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0,043	0,043	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54,05	54,05	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65,61	65,61	Dinas Pendidikan - Bidang Pendidikan Khusus
	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76,84	76,84	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62,13	62,13	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57,72	57,72	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1,74	1,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	25	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	76,67	76,67	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,71	65,71	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,21	65,21	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83,1	83,1	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	73,3	73,3	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83,8	83,8	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77,9	77,9	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,89	70,89	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	74,41	74,41	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,5	70,5	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	76,39	76,39	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	50,5	50,5	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70,56	70,56	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	73,33	73,33	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	60,1	60,1	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	79	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	73,33	73,33	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89,9	89,9	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,2	68,2	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	83,05	83,05	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,49	68,49	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	70,34	70,34	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86,2	86,2	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	68,28	68,28	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	81,8	81,8	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76,3	76,3	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	79,3	79,3	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88,15	88,15	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	69,17	69,17	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	67,59	67,59	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	79,13	79,13	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77,52	77,52	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	71,15	71,15	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	65,78	65,78	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79,25	79,25	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43,33	43,33	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	83,72	83,72	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,41	80,41	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,15	80,15	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	70	70	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	75	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	75	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	75	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	55	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0,43	0,43	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	94	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74,2	74,2	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70,36	70,36	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2,57	2,57	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	75,2	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	75,2	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	35	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	35	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12,4	12,4	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	17,4	17,4	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,7	68,7	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	70,8	70,8	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	25	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	60	60	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	25	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	60	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	25	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	60	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	50	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	50	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85	85	Dinas Pendidikan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	54,28	54,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7,5	7,5	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	77	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Prevalensi wasting balita	%	6,7	6,7	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51,19	51,19	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85,71	85,71	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37,14	37,14	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	40	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	95	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	91	91	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	8	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	35	35	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota	20	20	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Angka kematian Dengue	%	0,5	0,5	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Insidensi Hepatitis B	%	1,1	1,1	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	35	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	35	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	14,4	14,4	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25,71	25,71	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	100	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	50	50	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	25	25	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8,57	8,57	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	50	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%	68,57	68,57	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	41,27	41,27	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	57,14	57,14	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74,28	74,28	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan
	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63,05	63,05	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Wilayah Magelang				
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	71,42	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	57,14	57,14	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupatan/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	60	60	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	71,42	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	20	20	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	54	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	72	72	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	25	25	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	60	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	60	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	100	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,85	2,85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	%	99	99	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	30	30	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	91	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34,28	34,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	5,24	5,24	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	10	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA KONSTRUKSI
	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58,97	58,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68,45	66,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058,55	2688058,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,38	52,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65,71	65,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35,08	35,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69,64	68,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56,96	56,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,1	50,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69,3	68,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67,35	67,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75,9	73,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	76,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31,02	31,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42,6	~~35,0~~ 36,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,17	11,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189,63	1196.97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA KONSTRUKSI
	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59,69	60,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA KONSTRUKSI
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99,81	99,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19,67	19,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94,95	94,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64,59	64,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92,03	91,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70,53	70,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91,36	90,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50,84	52,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92,25	83.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65,54	68,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94,17	93,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73,4	73,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94,11	95,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59,12	59,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95,37	96,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75,41	75,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95,7	84,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59,5	59,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49,31	49,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58,86	58,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	39,87	39,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16,9	15,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0,47	0,59	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14,9	14,19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7,69	7,69	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6,84	6,84	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80,71	80,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85,71	85,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Hukum Daerah

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8,57	8,57	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pelindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6,8	6,8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	90	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	29	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penanganan Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8,88	8,88	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0,27	0,27	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	100	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85,71	85,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,28	9,28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14,29	14,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83,68	83,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	10	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A
	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23,38	29,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44,05	44,05	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68,5	68,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21,75	21,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67,71	67,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51,03	44,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,8	49,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43,26	43,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,75	96,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,8	80,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27,06	27,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61,5	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1,21	1,21	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0,47	0,36	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,5	62,5	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,3	87,3	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14,6	7,99	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90,1	90,1	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	40	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3,26	3,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0,4	0,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	63	63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99,07	99,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99,12	99,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
	Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	57,05	57,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Bina Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45,96	45,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69,48	69,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6,94	6,94	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98,03	98,03	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46,74	46,74	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,85	69,85	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70,14	70,14	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52,95	52,95	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22,04	22,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57,12	57,12	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,99	3,99	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86,2	86,2	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,11	45,11	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81,84	81,84	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8,04	8,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92,83	92,83	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43,53	43,53	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87,09	87,09	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28,16	28,16	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88,66	88,66	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,42	4,42	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,472	0,472	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	28	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	12	12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	27,1	27,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
	Persentase Koperasi Produktif	%	53,3	53,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17,15	17,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	62	62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91,5	91,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan
	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8,6	8,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pemberdayaan Pemuda

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80,6	80,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pemberdayaan Pemuda
	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20,85	20,85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Pemuda
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0,34	0,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga
	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3,59	3,59	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26,1	26,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27,11	27,11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1,12	1,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53,55	53,55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13,6	13,6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16,12	16,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,1	90,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	45,27	45,27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	85,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9,43	9,43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	44,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	79,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,7	85,7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66,67	66,67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20,34	20,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	11,4	11,4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50,17	50,17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	25	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0,07	0,07	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0,16	0,16	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0,19	0,19	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	354029	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	91	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	600000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	70	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	72	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	61	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	17,71	17,71	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75.348.282	75.348.282	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/Kota	1	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3,3	20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4,3	16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Produksi Padi	Ton	9.380.811	9.380.811	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Jagung	Ton	3.301.024	3.301.024	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Kedelai	Ton	52.790	52.790	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Bawang Merah	Ton	617.015	617.015	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Cabai	Ton	456.621	456.621	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392.201	392.201	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Kopi	Ton	26.875	26.875	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
	Produksi Tebu	Ton	3.674.236	3.674.236	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
	Produksi Kelapa	Ton	166.955	166.955	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6.135.083	6.135.083	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan
	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	81	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	3	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	30	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Layanan Veteriner	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	20	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	10	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	10	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0,2	0,2	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1,25	1,25	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21,96	21,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,11	0,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0,02	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0,02	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0,08	0,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	2,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0,3	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0,3	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0,2	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0,3	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27,58	27,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2,98	2,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,3	3,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,58	1,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,98	1,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	3,95	3,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,27	2,27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,6	2,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6,99	6,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,65	2,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,49	1,49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72,9	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972,99	1002,37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179,64	202.67	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26,08	17,38	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144,05	189,16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57,95	57,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45,11	45,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98,93	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165,42	75.19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127,91	127,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28,97	28,97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98,93	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43,02	43,02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43,11	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43,13	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43,11	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43,13	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43,07	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43,1	43,1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43,11	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42,31	42,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43,03	43,03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43,07	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0,52	0,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11,12	11,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1,05	1,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	5,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6,23	6,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri
	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,41	2,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,4	4,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2,06	2,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1,2	1,2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	71	71	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91,43	91,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	92	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59,52	59,52	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71,42	71,42	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71,43	71,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	93	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39,21	39,21	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	63	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	92	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	96	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	86	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	80	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	87	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1,95	1,95	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2,3	2,3	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	55	Sekretariat Daerah - BIRO BUMD DAN BLUD
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	92	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	85	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	83	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	86	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,5	86,5	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	90	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	75	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	75	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan
PERENCANAAN					
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80,31	80,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87,29	87,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98,74	98,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,08	89,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	99,07	99,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80,49	80,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,59	76,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	85,76	85,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	97,84	97,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	99,29	99,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87,03	87,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83,84	83,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50,5	50,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70,5	70,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
KEPEGAWAIAN					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi
	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	92	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	10	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	100	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	70	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	95,5	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	95,5	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	95,5	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3,5	3,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	50	50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	100	Badan Penghubung - Sekretariat
INSPEKTORAT DAERAH					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96,23	96,23	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35,71	35,71	INSPEKTORAT - Sekretariat

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42,85	42,85	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61,9	61,9	INSPEKTORAT - Sekretariat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76,31	76,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88,11	88,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80,47	80,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
	Indeks Kinerja Ormas	Angka	78,26	78,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					

URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
	Indeks Toleransi	Angka	75,4	75,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2,89	2,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

BAB VII
PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun 2026 menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika atas pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Perubahan terjadi pada kondisi baik dalam tataran global maupun nasional, turut memberi dampak terhadap kebijakan nasional maupun regional. Sehingga penyesuaian pada sisi kebijakan baik secara nasional maupun regional sangat diperlukan agar dapat mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Penyesuaian RKPD 2026 salah satunya adalah pada program/kegiatan sesuai Asta Cita dan Visi Misi Gubernur. Sehingga perlu adanya perubahan RKPD Tahun 2026 antara lain pada Program/Kegiatan dan target kinerja. Penyesuaian pada beberapa target kinerja diharapkan dapat memperkuat beberapa hal yang akan menjadi daya ungkit terhadap pembangunan Jawa Tengah di tahun 2026. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 juga sebagai pelaksanaan tahun kedua RPJMD Tahun 2025 - 2029.

Perubahan RKPD akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegatan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2026. Selanjutnya KUPA-PPAS Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dokumen perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.

Pelaksanaan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Kerja sama dan kolaborasi oleh semua pihak dalam pembangunan akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
197007291996031001

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pendidikan

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua									**3.029.319.802.000**		**3.088.502.248.000**		**3.124.350.054.000**	**Dinas Pendidikan**	
						Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.03		13.03		13.07		Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus								**160.477.431.000**		**159.213.861.000**		**147.612.627.000**		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun	%	72.88	150.887.431.000	72.88	149.623.861.000	79.69	140.338.165.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						150.247.431.000		148.983.861.000		139.691.999.000		
						Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0.011	15.200.000.000	0.011	14.080.000.000	0.011	14.080.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.200.000.000		14.080.000.000		14.080.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	38980	15.200.000.000	38980	14.080.000.000	33200	14.080.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01.0038			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				11.200.000.000		10.080.000.000		10.080.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	28000	11.200.000.000	25200	10.080.000.000	25200	10.080.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4000	4.000.000.000	4000	4.000.000.000	4000	4.000.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0.026	27.097.200.000	0.026	25.248.090.000	0.026	27.395.689.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					27.097.200.000		25.248.090.000		27.395.689.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	57253	27.097.200.000	57253	25.248.090.000	57253	27.395.689.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0030			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				16.797.200.000		15.217.200.000		15.217.200.000		
						Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	41993	16.797.200.000	38043	15.217.200.000	38043	15.217.200.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				10.300.000.000		10.030.890.000		12.178.489.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5075	10.300.000.000	5075	10.030.890.000	5075	12.178.489.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						APK SMA	%	30.32	37.750.000.000	30.32	39.250.000.000	28.89	28.235.500.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					37.750.000.000		39.250.000.000		28.235.500.000		
						Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA	Angka	0.48	37.750.000.000	0.48	39.250.000.000	0.48	28.235.500.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				22.000.000.000		22.000.000.000		14.035.500.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	22.000.000.000	2	22.000.000.000	2	14.035.500.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.003			Pengadaan Mebel Sekolah				750.000.000		750.000.000		3.250.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3	750.000.000	3	750.000.000	4	3.250.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				15.000.000.000		16.500.000.000		10.950.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000	15.000.000.000	1100	16.500.000.000	396	10.950.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0072			Pembangunan Ruang Kelas Baru				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						APK SMK	%	53.75	13.865.731.000	53.75	14.071.271.000	53.75	15.865.081.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					13.865.731.000		14.071.271.000		15.865.081.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK	Angka	0.5	13.865.731.000	0.5	14.071.271.000	0.5	15.865.081.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				13.115.731.000		13.321.271.000		12.615.081.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	13.115.731.000	1	13.321.271.000	1	12.615.081.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				750.000.000		750.000.000		3.250.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	750.000.000	1	750.000.000	1	3.250.000.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0064			Pembangunan Ruang Kelas Baru										
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	77.9	1.822.300.000	76.67	1.822.300.000	74.36	1.822.300.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I	Angka	118	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	75.16	12.000.000.000	77.9	12.000.000.000	77.9	12.000.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II	Angka	120	12.000.000.000	360	12.000.000.000	353	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	353	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	72.7	8.000.000.000	76.39	8.000.000.000	76.39	8.000.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III	Angka	308	8.000.000.000	167	8.000.000.000	211	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	216	8.000.000.000	216	8.000.000.000	211	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	62	5.466.900.000	73.33	5.466.900.000	73.33	5.466.900.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV	Angka	180	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	82.87	7.289.200.000	69.17	7.289.200.000	69.17	6.156.072.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					7.289.200.000		7.289.200.000		6.156.072.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX	Angka	528	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	6.156.072.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				7.289.200.000		7.289.200.000		6.156.072.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	340	6.156.072.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	75.5	1.822.300.000	73.33	1.822.300.000	73.33	1.414.467.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		1.822.300.000		1.414.467.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V	Angka	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.414.467.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		1.822.300.000		1.414.467.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	83	1.414.467.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68.49	3.644.600.000	68.49	3.644.600.000	68.49	3.644.600.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI	Angka	185	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	180	3.644.600.000	209	3.644.600.000	209	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	46.86	12.644.600.000	71.15	12.644.600.000	37.5	12.146.790.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.644.600.000		12.644.600.000		12.146.790.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X	Angka	180	12.644.600.000	348	12.644.600.000	464	12.146.790.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				12.644.600.000		12.644.600.000		12.146.790.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	468	12.644.600.000	468	12.644.600.000	468	12.146.790.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43.33	1.822.300.000	43.33	1.822.300.000	43.33	1.822.300.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI	Angka	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	192	1.822.300.000	192	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	65	1.822.300.000	70	1.822.300.000	90	1.642.300.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		1.822.300.000		1.642.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII	Angka	1	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.642.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		1.822.300.000		1.642.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.642.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						400.000.000		400.000.000		397.238.000		
						Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0.43	400.000.000	0.43	400.000.000	0.43	397.238.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
		1.01.04.1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					400.000.000		400.000.000		397.238.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah yang didistribusikan	Orang	2265	400.000.000	2265	400.000.000	2265	397.238.000		
		1.01.04.1.01.0002			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				400.000.000		400.000.000		397.238.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	691	400.000.000	691	400.000.000	691	397.238.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						240.000.000		240.000.000		248.928.000		
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	20.000.000	60	20.000.000	60	28.466.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		28.466.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VIII	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	28.466.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		28.466.000		

						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	28.466.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	20.000.000	94	20.000.000	94	17.499.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.499.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin I	Dokumen	6	20.000.000	4	20.000.000	4	17.499.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.499.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.499.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70.36	20.000.000	70.36	20.000.000	70.36	17.274.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.274.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin II	Angka	4	20.000.000	3	20.000.000	3	17.274.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.274.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.274.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	20.000.000	75.2	20.000.000	75.2	17.540.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.540.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin III	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.540.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.540.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.540.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	20.000.000	35	20.000.000	66.67	17.997.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.997.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin 4	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	2	17.997.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.997.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	2	17.997.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	20.000.000	60	20.000.000	60	33.480.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		33.480.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin IX	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	33.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		33.480.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	33.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12.4	20.000.000	17.4	20.000.000	17.4	25.259.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		25.259.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin V	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.259.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		25.259.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.259.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	93.6	20.000.000	70.8	20.000.000	70.8	17.800.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.800.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VI	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	17.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	60	20.000.000	60	20.000.000	60	22.512.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		22.512.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VII	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		22.512.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	22.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	17.679.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		17.679.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin X	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.679.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		17.679.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.679.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	20.000.000	50	20.000.000	50	18.742.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		18.742.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin XI	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	18.742.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		18.742.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	18.742.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	20.000.000	85	20.000.000	85	14.680.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		14.680.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII	Dokumen	6	20.000.000	6	20.000.000	6	14.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		14.680.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	14.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	%	74.02	9.590.000.000	74.02	9.590.000.000	64.12	7.274.462.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						9.530.000.000		9.530.000.000		7.221.895.000		
						Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0.043	2.530.000.000	0.043	2.530.000.000	0.043	2.630.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.530.000.000		2.530.000.000		2.630.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	4710	2.080.000.000	4710	2.080.000.000	3700	2.080.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0037			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2700	1.080.000.000	2700	1.080.000.000	2700	1.080.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	1	450.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0039			Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah				450.000.000		450.000.000		550.000.000		
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	1	450.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						APK SLB	%	91.74	7.000.000.000	91.74	7.000.000.000	91.74	4.591.895.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.000.000.000		7.000.000.000		4.591.895.000		
						Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB	Angka	0.94	7.000.000.000	0.94	7.000.000.000	0.94	4.591.895.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				3.500.000.000		3.500.000.000		3.191.895.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.191.895.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				3.000.000.000		3.000.000.000		900.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	60	900.000.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0		0		0		Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0070			Pembangunan Ruang Kelas Baru				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0		0		0		Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						60.000.000		60.000.000		52.567.000		
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	5.000.000	25	5.000.000	25	1.480.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		1.480.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VIII	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	1.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		1.480.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	1.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74.2	5.000.000	74.2	5.000.000	74.2	4.461.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.461.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin I	Angka	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.461.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.461.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.461.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2.57	5.000.000	2.57	5.000.000	2.57	4.573.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.573.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin II	Angka	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.573.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.573.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	5	4.573.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	5.000.000	75.2	5.000.000	75.2	4.480.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.480.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin III	Angka	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.480.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	5.000.000	35	5.000.000	100	4.216.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.216.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin 4	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.216.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.216.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.216.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	5.000.000	25	5.000.000	25	7.520.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		7.520.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin IX	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.520.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		7.520.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.520.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12.4	5.000.000	12.4	5.000.000	12.4	4.529.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.529.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan khusus Cabdin V	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.529.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.529.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.529.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	91.8	5.000.000	68.7	5.000.000	68.7	4.400.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.400.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VI	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	5.000.000	25	5.000.000	25	4.445.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.445.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VII	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.445.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.445.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.445.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.277.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.277.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin X	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.277.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.277.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.277.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	5.000.000	50	5.000.000	50	4.682.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		4.682.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin	Dokumen	1	5.000.000	6	5.000.000	6	4.682.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.682.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.682.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.504.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		3.504.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.504.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		3.504.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	3.504.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus								**2.809.384.698.000**		**2.869.795.714.000**		**2.904.374.424.000**		
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	%	64.95	2.809.384.698.000	64.95	2.869.795.714.000	64.95	2.904.374.424.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.809.054.698.000		2.869.465.714.000		2.904.048.511.000		
						Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65.61	85.631.830.000	65.61	83.281.830.000	65.61	83.653.706.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					85.631.830.000		83.281.830.000		83.653.706.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB	Angka	52.78	85.631.830.000	52.78	83.281.830.000	52.78	83.653.706.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				82.731.830.000		82.731.830.000		82.807.600.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	189	82.731.830.000	189	82.731.830.000	189	82.807.600.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0059			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2.900.000.000		550.000.000		846.106.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	8	2.900.000.000	8	550.000.000	9	846.106.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64.45	728.206.810.000	64.45	730.176.970.000	63.75	729.698.572.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					728.206.810.000		730.176.970.000		729.698.572.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA	Angka	60.31	728.206.810.000	60.31	730.176.970.000	64.06	729.698.572.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				719.471.810.000		719.471.810.000		719.100.427.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	867	719.471.810.000	867	719.471.810.000	867	719.100.427.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0060			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8.735.000.000		10.705.160.000		10.598.145.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	4	8.735.000.000	4	10.705.160.000	4	10.598.145.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60.86	1.394.715.710.000	60.86	1.398.514.280.000	60.86	1.401.065.763.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.394.715.710.000		1.398.514.280.000		1.401.065.763.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK	Angka	54.75	1.394.715.710.000	54.75	1.398.514.280.000	54.75	1.401.065.763.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.369.240.710.000		1.369.240.710.000		1.371.012.849.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1540	1.369.240.710.000	1540	1.369.240.710.000	1540	1.371.012.849.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0053			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				25.475.000.000		29.273.570.000		30.052.914.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	25.475.000.000	5	29.273.570.000	5	30.052.914.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57.72	223.666.000	57.72	223.666.000	57.72	222.940.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					223.666.000		223.666.000		222.940.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	1623	223.666.000	1623	223.666.000	1623	222.940.000		
		1.01.02.1.03.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				223.666.000		223.666.000		222.940.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	327	223.666.000	327	223.666.000	327	222.940.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76.84	1.036.188.000	76.84	1.036.188.000	76.84	1.236.296.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.036.188.000		1.036.188.000		1.236.296.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	20750	1.036.188.000	20750	1.036.188.000	20750	1.236.296.000		
		1.01.02.1.01.0075			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.036.188.000		1.036.188.000		1.236.296.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	784	1.036.188.000	784	1.036.188.000	784	1.236.296.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	1.600.000.000	25	1.600.000.000	25	1.418.016.000	Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					450.000.000		450.000.000		411.721.000		
						Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	6741	450.000.000	6741	450.000.000	6741	411.721.000		
		1.01.02.1.01.0057			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150.000.000		150.000.000		123.319.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	6741	150.000.000	6741	150.000.000	6741	123.319.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0058			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				300.000.000		300.000.000		288.402.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	19	300.000.000	19	300.000.000	19	288.402.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					850.000.000		850.000.000		728.940.000		
						Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	11901	850.000.000	11901	850.000.000	11901	728.940.000		
		1.01.02.1.02.0050			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				550.000.000		550.000.000		469.262.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	11901	550.000.000	11901	550.000.000	11901	469.262.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0051			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				300.000.000		300.000.000		259.678.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	23	300.000.000	23	300.000.000	23	259.678.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					300.000.000		300.000.000		277.355.000		
						Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	712	300.000.000	712	300.000.000	712	277.355.000		
		1.01.02.1.03.0056			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100.000.000		100.000.000		105.490.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	712	100.000.000	712	100.000.000	712	105.490.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0057			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				200.000.000		200.000.000		171.865.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	15	200.000.000	15	200.000.000	15	171.865.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62.13	318.661.000	62.13	318.661.000	62.13	478.732.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					318.661.000		318.661.000		478.732.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	29060	318.661.000	29060	318.661.000	29060	478.732.000		
		1.01.02.1.02.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				318.661.000		318.661.000		478.732.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	657	318.661.000	657	318.661.000	657	478.732.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54.05	1.250.000.000	54.05	1.250.000.000	54.05	1.222.849.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.250.000.000		1.250.000.000		1.222.849.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional	Angka	15	1.250.000.000	15	1.250.000.000	15	1.222.849.000	Bidang Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.250.000.000		1.250.000.000		1.222.849.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	26	1.250.000.000	26	1.250.000.000	26	1.222.849.000	Bidang Pendidikan Khusus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35.89	3.000.000.000	35.89	2.849.840.000	30.15	2.515.490.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.000.000.000		2.849.840.000		2.515.490.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional	Angka	38	3.000.000.000	38	2.849.840.000	30	2.515.490.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.000.000.000		2.849.840.000		2.515.490.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	120	3.000.000.000	120	2.849.840.000	120	2.515.490.000	Bidang Pendidikan Menengah Atas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	58.5	3.000.000.000	57	3.000.000.000	57	2.812.200.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.000.000.000		3.000.000.000		2.812.200.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional	Angka	31	3.000.000.000	31	3.000.000.000	31	2.812.200.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.000.000.000		3.000.000.000		2.812.200.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	3.000.000.000	50	3.000.000.000	50	2.812.200.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	59.7	12.258.152.000	65.71	12.258.152.000	62.53	11.645.812.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					12.258.152.000		12.258.152.000		11.645.812.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I	Angka	1667	12.258.152.000	1593	12.258.152.000	1593	11.645.812.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	2	0	2	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				12.258.152.000		12.258.152.000		11.645.812.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	12.258.152.000	5	12.258.152.000	5	11.645.812.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	2	0	2	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I	Angka	1716	0	1414	0	1414	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I	Angka	162	0	94	0	94	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	49.83	0	71.78	0	71.78	0	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II	Angka	1015	0	2732	0	2732	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II	Angka	1270	0	4616	0	4616	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II	Angka	55	0	178	0	178	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	80.15	4.793.848.000	70.89	4.793.848.000	66.7	4.553.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					4.793.848.000		4.793.848.000		4.553.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III	Angka	1383	4.793.848.000	1747	4.793.848.000	1747	4.553.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				4.793.848.000		4.793.848.000		4.553.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	4.793.848.000	20	4.793.848.000	20	4.553.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III	Angka	2800	0	4591	0	4591	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III	Angka	111	0	143	0	143	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	49.71	0	57.82	0	57.82	693.516.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		693.516.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV	Angka	1094	0	1477	0	1477	693.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		693.516.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	1	693.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV	Angka	1412	0	1841	0	1841	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV	Angka	68	0	163	0	163	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	83.18	0	70.06	0	70.06	0	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX	Angka	2066	0	2049	0	2049	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX	Angka	3849	0	6226	0	6226	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX	Angka	248	0	782	0	782	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	84.5	0	61.24	0	61.24	0	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V	Angka	1630	0	1391	0	1391	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V	Angka	2820	0	2865	0	2865	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V	Angka	454	0	167	0	167	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89.9	430.000.000	89.9	430.000.000	89.9	430.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI	Angka	1750	0	1750	0	1750	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					430.000.000		430.000.000		430.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI	Angka	3113	430.000.000	3113	430.000.000	3113	430.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				430.000.000		430.000.000		430.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	430.000.000	1	430.000.000	1	430.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik											
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI	Angka	361	0	361	0	361	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	68	0	68	0	68	0	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII	Angka	1996	0	1996	0	1996	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII	Angka	2249	0	2249	0	2249	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII	Angka	1060	0	1060	0	1060	0		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	89.17	150.000.000	68.28	150.000.000	68.28	200.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII	Angka	1112	0	1490	0	1490	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		50.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII	Angka	1471	0	1676	0	1676	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	1	0	1	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		50.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII	Angka	147	150.000.000	73	150.000.000	73	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	84.19	4.445.278.000	67.59	4.445.278.000	67.59	3.479.820.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X	Angka	1296	220.000.000	2083	220.000.000	4435	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0		0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					4.225.278.000		4.225.278.000		3.259.820.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X	Angka	2263	4.225.278.000	1381	4.225.278.000	4272	3.259.820.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				4.225.278.000		4.225.278.000		3.259.820.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	16	4.225.278.000	16	4.225.278.000	16	3.259.820.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X	Angka	58	0	158	0	158	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	85.15	0	68.98	0	68.98	131.843.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI	Angka	1.005	0	1601	0	1601	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		131.843.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI	Angka	1.988	0	1381	0	1381	131.843.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		131.843.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	1	131.843.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI	Angka	40	0	158	0	158	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	92	2.465.962.000	83.72	2.465.962.000	81	2.465.962.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.465.962.000		2.465.962.000		2.465.962.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII	Angka	575	2.465.962.000	1248	2.465.962.000	1248	2.465.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.465.962.000		2.465.962.000		2.465.962.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2.465.962.000	1	2.465.962.000	18	2.465.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII	Angka	1195	0	1361	0	1361	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				0		0		0		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				0		0		0		
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					0		0		0		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII	Angka	96	0	158	0	158	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		0		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		0		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	95.95	37.500.000	65.21	37.500.000	79.2	33.281.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		13.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	1	15.000.000	67	15.000.000	67	13.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	2	15.000.000	2	13.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		13.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	10	15.000.000	119	15.000.000	119	13.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.281.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	1	7.500.000	17	7.500.000	17	7.281.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		7.281.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.281.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	80.51	37.500.000	73.3	37.500.000	73.3	33.371.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	55	15.000.000	105	15.000.000	104	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		9.460.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	105	15.000.000	128	15.000.000	128	9.460.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		9.460.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	9.460.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		8.911.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	2	7.500.000	21	7.500.000	18	8.911.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		8.911.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	2	7.500.000	2	8.911.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	87.9	37.500.000	74.41	37.500.000	74.41	33.168.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		13.703.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	62	15.000.000	71	15.000.000	71	13.703.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.703.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.703.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		13.204.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	103	15.000.000	124	15.000.000	124	13.204.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.204.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.204.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.261.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	11	7.500.000	10	7.500.000	10	6.261.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		6.261.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.261.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	88.66	37.500.000	50.5	37.500.000	51.35	31.773.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		9.897.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	58	15.000.000	72	15.000.000	49	9.897.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		9.897.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	9.897.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		14.626.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	112	15.000.000	139	15.000.000	60	14.626.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		14.626.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	14.626.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.250.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	11	7.500.000	13	7.500.000	5	7.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		7.250.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	98.74	37.500.000	79.3	37.500.000	79.3	28.410.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		9.760.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	68	15.000.000	75	15.000.000	75	9.760.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		9.760.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	9.760.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		14.850.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	157	15.000.000	161	15.000.000	161	14.850.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		14.850.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	14.850.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		3.800.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	14	7.500.000	15	7.500.000	15	3.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		3.800.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	3.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	88.84	37.500.000	60.1	37.500.000	60.1	43.987.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		13.742.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	65	15.000.000	54	15.000.000	54	13.742.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.742.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	13.742.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		23.370.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	109	15.000.000	90	15.000.000	90	23.370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		23.370.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	23.370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.875.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	32	7.500.000	25	7.500.000	25	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		6.875.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	2	7.500.000	2	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89.61	37.500.000	68.2	37.500.000	68.2	32.968.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		12.734.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	361	15.000.000	62	15.000.000	62	12.734.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		12.734.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	12.734.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		12.734.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	116	15.000.000	129	15.000.000	129	12.734.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		12.734.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	12.734.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	25	7.500.000	29	7.500.000	29	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	80.5	37.500.000	70.34	37.500.000	70.34	23.523.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		7.900.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	60	15.000.000	60	15.000.000	60	7.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		7.900.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	7.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		9.179.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	81	15.000.000	81	15.000.000	81	9.179.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		9.179.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	9.179.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.444.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	24	7.500.000	24	7.500.000	24	6.444.000		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		6.444.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.444.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	88.3	37.500.000	81.8	37.500.000	81.8	24.783.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		12.304.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angkatan	90	15.000.000	67	15.000.000	67	12.304.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		12.304.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	12.304.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		5.580.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angka	123	15.000.000	84	15.000.000	84	5.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		5.580.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	5.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.899.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angka	11	7.500.000	8	7.500.000	8	6.899.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		6.899.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.899.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	82.77	37.500.000	65.78	37.500.000	65.78	36.357.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		14.313.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI	Angka	7	15.000.000	70	15.000.000	70	14.313.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		14.313.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.313.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		14.996.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin	Angka	10	15.000.000	177	15.000.000	177	14.996.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		14.996.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.996.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.996.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.048.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI	Angka	3	7.500.000	6	7.500.000	6	7.048.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		7.048.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.048.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85	37.500.000	80.41	37.500.000	80.47	31.479.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		12.226.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	66	15.000.000	66	15.000.000	67	12.226.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		12.226.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	15.000.000	3	15.000.000	4	12.226.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		12.654.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	150	15.000.000	127	15.000.000	127	12.654.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		12.654.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	15.000.000	3	15.000.000	3	12.654.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.599.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	5	7.500.000	6	7.500.000	6	6.599.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		6.599.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	7.500.000	3	7.500.000	3	6.599.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	96.67	37.500.000	79.13	37.500.000	45.99	32.831.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		15.000.000		14.706.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	79	15.000.000	96	15.000.000	96	14.706.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		14.706.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.706.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		15.000.000		13.071.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	146	15.000.000	181	15.000.000	181	13.071.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		15.000.000		13.071.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	146	15.000.000	146	15.000.000	146	13.071.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		5.054.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	8	7.500.000	13	7.500.000	13	5.054.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		7.500.000		5.054.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10	7.500.000	10	7.500.000	10	5.054.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83.1	43.336.908.000	83.1	49.098.287.000	82.8	51.429.204.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.611.032.000		26.072.743.000		26.916.581.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	100	22.611.032.000	67	26.072.743.000	67	26.916.581.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.611.032.000		26.072.743.000		26.916.581.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	278	11.142.368.000	336	11.439.686.000	336	11.821.654.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	67	10.985.664.000	67	14.150.057.000	67	14.503.927.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	478	483.000.000	478	483.000.000	528	591.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.218.260.000		20.082.545.000		21.492.107.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	123	18.218.260.000	119	20.082.545.000	119	21.492.107.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.218.260.000		20.082.545.000		21.492.107.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	180	7.411.408.000	225	7.587.299.000	225	7.798.335.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	119	9.132.852.000	119	10.821.246.000	119	11.632.772.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1643	1.674.000.000	1643	1.674.000.000	1854	2.061.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.507.616.000		2.942.999.000		3.020.516.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	24	2.507.616.000	17	2.942.999.000	17	3.020.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.507.616.000		2.942.999.000		3.020.516.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	27	996.968.000	39	1.384.772.000	39	1.388.714.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	17	1.455.648.000	17	1.503.227.000	17	1.576.802.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	55	55.000.000	55	55.000.000	55	55.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83.8	62.180.786.000	83.8	70.102.621.000	83.8	74.221.146.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					31.847.194.000		38.337.025.000		40.499.368.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	45	31.847.194.000	105	38.337.025.000	104	40.499.368.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				31.847.194.000		38.337.025.000		40.499.368.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	410	17.534.752.000	500	19.486.256.000	389	20.320.852.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	105	13.957.442.000	105	18.495.769.000	104	19.639.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	325	355.000.000	325	355.000.000	399	539.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					26.648.866.000		29.165.635.000		30.818.528.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	85	26.648.866.000	128	29.165.635.000	128	30.818.528.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				26.648.866.000		29.165.635.000		30.818.528.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	294	12.027.796.000	329	12.665.727.000	225	12.806.357.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	128	13.307.070.000	128	15.185.908.000	128	16.486.171.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1284	1.314.000.000	1284	1.314.000.000	1381	1.526.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.684.726.000		2.599.961.000		2.903.250.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	2	3.684.726.000	21	2.599.961.000	18	2.903.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.684.726.000		2.599.961.000		2.903.250.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	24	1.068.124.000	30	1.289.776.000	30	1.289.821.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	21	2.557.602.000	21	1.251.185.000	18	1.554.429.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	59	59.000.000	59	59.000.000	59	59.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70.5	44.339.967.000	70.5	50.047.401.000	70.5	52.292.273.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.014.014.000		26.298.192.000		26.753.635.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	62	22.014.014.000	71	26.298.192.000	71	26.753.635.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.014.014.000		26.298.192.000		26.753.635.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	218	8.555.192.000	320	10.080.094.000	320	10.386.909.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	71	13.181.822.000	71	15.941.098.000	71	15.911.726.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	249	277.000.000	249	277.000.000	331	455.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.378.861.000		20.093.750.000		21.799.738.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	102	19.378.861.000	124	20.093.750.000	124	21.799.738.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.378.861.000		20.093.750.000		21.799.738.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	165	6.385.033.000	216	6.724.942.000	216	7.005.949.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	124	11.932.828.000	124	12.307.808.000	124	13.534.789.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1033	1.061.000.000	1033	1.061.000.000	1165	1.259.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.947.092.000		3.655.459.000		3.738.900.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	11	2.947.092.000	10	3.655.459.000	10	3.738.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.947.092.000		3.655.459.000		3.738.900.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	27	996.092.000	40	1.384.256.000	40	1.418.876.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	10	1.942.000.000	10	2.262.203.000	10	2.311.024.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	9	9.000.000	9	9.000.000	9	9.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70.56	36.484.049.000	70.56	43.065.503.000	72.81	45.233.998.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.386.178.000		23.751.567.000		24.061.389.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	112	19.386.178.000	72	23.751.567.000	72	24.061.389.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.386.178.000		23.751.567.000		24.061.389.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	223	7.739.884.000	325	8.847.174.000	260	8.796.367.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	72	10.839.294.000	72	14.097.393.000	72	14.132.022.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	773	807.000.000	773	807.000.000	954	1.133.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.089.297.000		16.678.117.000		18.285.943.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	58	15.089.297.000	139	16.678.117.000	139	18.285.943.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				15.089.297.000		16.678.117.000		18.285.943.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	112	4.108.240.000	143	3.984.144.000	131	4.158.089.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	139	7.553.057.000	139	9.265.973.000	139	10.011.854.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3319	3.428.000.000	3319	3.428.000.000	3746	4.116.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.008.574.000		2.635.819.000		2.886.666.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	11	2.008.574.000	13	2.635.819.000	13	2.886.666.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.008.574.000		2.635.819.000		2.886.666.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	23	661.508.000	31	873.116.000	30	1.047.062.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	13	1.299.066.000	13	1.714.703.000	13	1.791.604.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	48	48.000.000	48	48.000.000	48	48.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88.15	67.446.722.000	88.15	72.515.081.000	88.15	76.756.072.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					30.808.783.000		34.609.270.000		35.669.700.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	68	30.808.783.000	75	34.609.270.000	75	35.669.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				30.808.783.000		34.609.270.000		35.669.700.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	533	16.174.676.000	579	15.409.398.000	579	16.029.845.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	75	13.935.107.000	75	18.500.872.000	75	18.438.855.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	629	699.000.000	629	699.000.000	911	1.201.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.207.262.000		34.962.768.000		37.991.370.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	157	34.207.262.000	161	34.962.768.000	161	37.991.370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.207.262.000		34.962.768.000		37.991.370.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	275	9.510.420.000	319	8.660.104.000	319	9.184.683.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	161	15.984.842.000	161	17.590.664.000	161	18.944.687.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	54468	8.712.000.000	54468	8.712.000.000	9148	9.862.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.430.677.000		2.943.043.000		3.095.002.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	14	2.430.677.000	15	2.943.043.000	15	3.095.002.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.430.677.000		2.943.043.000		3.095.002.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	29	845.848.000	31	894.556.000	31	938.611.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	15	1.471.829.000	15	1.935.487.000	15	2.043.391.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	113	113.000.000	113	113.000.000	113	113.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	39.167.242.000	79	39.410.982.000	79	41.370.191.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.990.847.000		19.316.782.000		19.648.476.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	30217	18.990.847.000	54	19.316.782.000	54	19.648.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				18.990.847.000		19.316.782.000		19.648.476.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	180	7.102.616.000	180	5.620.236.000	180	5.960.780.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	54	11.603.231.000	54	13.411.546.000	54	13.314.696.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	260	285.000.000	260	285.000.000	322	373.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.582.483.000		19.365.094.000		21.031.307.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	30843	19.582.483.000	90	19.365.094.000	90	21.031.307.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.582.483.000		19.365.094.000		21.031.307.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	140	5.905.867.000	140	4.451.167.000	140	4.558.668.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	90	11.280.616.000	90	12.517.927.000	90	13.570.639.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	2189	2.396.000.000	2189	2.396.000.000	2638	2.902.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					593.912.000		729.106.000		690.408.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	314	593.912.000	25	729.106.000	25	690.408.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				593.912.000		729.106.000		690.408.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	6	181.324.000	6	181.324.000	6	181.324.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	220.588.000	25	355.782.000	25	317.084.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	192	192.000.000	192	192.000.000	192	192.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	84.16	46.333.314.000	83.05	47.132.110.000	83.05	50.812.414.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.716.490.000		20.559.485.000		22.383.435.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	41	19.716.490.000	62	20.559.485.000	62	22.383.435.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.716.490.000		20.559.485.000		22.383.435.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	255	8.922.596.000	259	7.410.812.000	259	8.170.813.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	62	10.633.894.000	62	12.988.673.000	62	13.962.622.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	146	160.000.000	146	160.000.000	146	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					24.005.568.000		23.241.082.000		25.086.539.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	116	24.005.568.000	129	23.241.082.000	129	25.086.539.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				24.005.568.000		23.241.082.000		25.086.539.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	195	7.444.260.000	195	6.095.843.000	195	6.445.792.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	129	13.957.308.000	129	14.541.239.000	129	15.748.747.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	2528	2.604.000.000	2528	2.604.000.000	2726	2.892.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.611.256.000		3.331.543.000		3.342.440.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	25	2.611.256.000	29	3.331.543.000	29	3.342.440.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.611.256.000		3.331.543.000		3.342.440.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	34	986.112.000	34	986.112.000	34	1.017.427.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	29	1.506.144.000	29	2.226.431.000	29	2.206.013.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	119	119.000.000	119	119.000.000	119	119.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86.2	29.285.248.000	86.2	35.430.865.000	86.2	36.877.558.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.353.911.000		16.550.474.000		16.879.967.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	60	13.353.911.000	60	16.550.474.000	60	16.879.967.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.353.911.000		16.550.474.000		16.879.967.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	178	6.212.056.000	275	7.896.982.000	275	8.007.299.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	60	6.835.855.000	60	8.347.492.000	60	8.486.668.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	301	306.000.000	301	306.000.000	314	386.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.575.316.000		17.543.344.000		18.591.518.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	81	14.575.316.000	81	17.543.344.000	81	18.591.518.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.575.316.000		17.543.344.000		18.591.518.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	187	6.766.672.000	267	7.831.032.000	267	8.165.482.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	81	6.824.644.000	81	8.728.312.000	81	9.302.036.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	972	984.000.000	972	984.000.000	972	1.124.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.356.021.000		1.337.047.000		1.406.073.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	24	1.356.021.000	24	1.337.047.000	24	1.406.073.000		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.356.021.000		1.337.047.000		1.406.073.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	5	237.836.000	6	268.280.000	6	323.440.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	24	999.185.000	24	949.767.000	24	963.633.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	119	119.000.000	119	119.000.000	119	119.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76.3	32.553.230.000	76.3	33.592.327.000	76.3	36.249.232.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.812.292.000		17.579.407.000		19.176.673.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angkatan	90	16.812.292.000	67	17.579.407.000	67	19.176.673.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.812.292.000		17.579.407.000		19.176.673.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	248	7.976.672.000	260	7.245.289.000	260	8.011.685.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	67	7.894.620.000	67	9.393.118.000	67	9.715.988.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	884	941.000.000	884	941.000.000	1130	1.449.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.898.532.000		15.065.396.000		16.066.407.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angka	123	14.898.532.000	84	15.065.396.000	84	16.066.407.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				0		0		0		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.898.532.000		15.065.396.000		16.066.407.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	116	4.122.208.000	124	3.559.061.000	124	3.779.783.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	84	6.781.324.000	84	7.511.335.000	84	7.569.624.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3861	3.995.000.000	3861	3.995.000.000	4288	4.717.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					842.406.000		947.524.000		1.006.152.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angka	11	842.406.000	8	947.524.000	8	1.006.152.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				842.406.000		947.524.000		1.006.152.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	9	292.608.000	9	292.608.000	9	297.629.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	8	499.798.000	8	604.916.000	8	658.523.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77.52	74.210.994.000	77.52	78.106.665.000	84.14	82.014.323.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					35.969.383.000		36.728.434.000		37.298.326.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	32	35.969.383.000	96	36.728.434.000	96	37.298.326.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				35.969.383.000		36.728.434.000		37.298.326.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	399	14.491.820.000	427	13.113.306.000	427	13.318.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	96	19.444.563.000	96	21.582.128.000	96	21.212.846.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	1890	2.033.000.000	1890	2.033.000.000	2376	2.767.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					36.029.899.000		38.722.828.000		41.919.521.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	17	36.029.899.000	181	38.722.828.000	181	41.919.521.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				36.029.899.000		38.722.828.000		41.919.521.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	198	8.262.872.000	245	7.542.826.000	245	7.739.284.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	181	16.027.027.000	181	19.440.002.000	181	20.854.237.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	11224	11.740.000.000	11224	11.740.000.000	12296	13.326.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.211.712.000		2.655.403.000		2.796.476.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	3	2.211.712.000	13	2.655.403.000	13	2.796.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.211.712.000		2.655.403.000		2.796.476.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	28	988.212.000	30	1.044.864.000	30	1.068.746.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	13	1.076.500.000	13	1.463.539.000	13	1.580.730.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	147	147.000.000	147	147.000.000	147	147.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79.25	42.629.503.000	79.25	49.662.982.000	79.25	51.845.155.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.227.638.000		26.167.501.000		27.095.342.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	43	22.227.638.000	70	26.167.501.000	70	27.095.342.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.227.638.000		26.167.501.000		27.095.342.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	496	9.732.396.000	333	9.778.905.000	333	10.276.315.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	70	12.099.242.000	70	15.992.596.000	70	16.243.027.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	342	396.000.000	342	396.000.000	416	576.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.711.061.000		21.333.451.000		22.504.746.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	109	18.711.061.000	177	21.333.451.000	177	22.504.746.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.711.061.000		21.333.451.000		22.504.746.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	376	5.240.608.000	376	5.630.654.000	376	5.844.221.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	177	9.498.453.000	177	11.730.797.000	177	12.468.525.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3835	3.972.000.000	3835	3.972.000.000	4034	4.192.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.690.804.000		2.162.030.000		2.245.067.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	4	1.690.804.000	6	2.162.030.000	6	2.245.067.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.690.804.000		2.162.030.000		2.245.067.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	45	648.972.000	24	761.424.000	24	813.631.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	1.026.832.000	6	1.385.606.000	6	1.416.436.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80.15	47.110.630.000	80.15	54.056.215.000	80	56.636.497.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.883.082.000		26.732.747.000		28.269.088.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	66	22.883.082.000	66	26.732.747.000	67	28.269.088.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.883.082.000		26.732.747.000		28.269.088.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	486	9.927.368.000	351	10.520.996.000	351	10.707.676.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	66	12.466.714.000	66	15.722.751.000	67	16.604.412.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	428	489.000.000	428	489.000.000	686	957.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.987.211.000		23.406.258.000		24.901.220.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	150	20.987.211.000	127	23.406.258.000	127	24.901.220.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.987.211.000		23.406.258.000		24.901.220.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	373	5.645.832.000	171	5.304.195.000	171	5.433.961.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	127	9.980.379.000	127	12.741.063.000	127	13.424.259.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	5079	5.361.000.000	5079	5.361.000.000	5565	6.043.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.240.337.000		3.917.210.000		3.466.189.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	5	3.240.337.000	6	3.917.210.000	6	3.466.189.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.240.337.000		3.917.210.000		3.466.189.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	101	1.111.176.000	101	1.111.176.000	101	1.157.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	2.127.161.000	6	2.804.034.000	6	2.306.673.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						330.000.000		330.000.000		325.913.000		
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	23.861.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.345.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X	Angka	225	20.000.000	181	20.000.000	181	17.345.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.345.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.345.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.516.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X	Angka	9	7.500.000	13	7.500.000	13	6.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.516.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.516.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	24.277.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.512.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I	Angka	225	20.000.000	186	20.000.000	186	17.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.512.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.512.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.765.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I	Angka	24	7.500.000	17	7.500.000	17	6.765.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.765.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.765.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	26.051.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		19.157.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II	Angka	125	20.000.000	233	20.000.000	232	19.157.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		19.157.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	19.157.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.894.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II	Angka	2	7.500.000	21	7.500.000	18	6.894.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.894.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.894.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	24.047.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.353.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III	Angka	103	20.000.000	195	20.000.000	195	17.353.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.353.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.353.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.694.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III	Angka	11	7.500.000	10	7.500.000	10	6.694.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.694.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.694.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	24.605.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.821.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4	Angka	170	20.000.000	211	20.000.000	211	17.821.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.821.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.821.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.784.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4	Angka	11	7.500.000	13	7.500.000	13	6.784.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.784.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.784.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	27.500.000	75	27.500.000	75	28.630.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		21.110.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX	Angka	225	20.000.000	236	20.000.000	236	21.110.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		21.110.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	21.110.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.520.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX	Angka	14	7.500.000	15	7.500.000	15	7.520.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		7.520.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.520.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	33.048.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		26.248.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V	Angka	182	20.000.000	144	20.000.000	144	26.248.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		26.248.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	26.248.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.800.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V	Angka	32	7.500.000	25	7.500.000	25	6.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.800.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	87.92	27.500.000	100	27.500.000	100	24.539.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.570.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI	Angka	169	20.000.000	192	20.000.000	192	17.570.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.570.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.570.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.969.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI	Angka	25	7.500.000	29	7.500.000	29	6.969.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.969.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.969.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	27.500.000	75	27.500.000	75	22.825.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		16.231.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII	Angka	141	20.000.000	141	20.000.000	141	16.231.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		16.231.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	16.231.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.594.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII	Angka	24	7.500.000	24	7.500.000	24	6.594.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.594.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.594.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	27.500.000	75	27.500.000	75	48.703.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		42.434.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII	Angka	213	20.000.000	151	20.000.000	151	42.434.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		42.434.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	42.434.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		6.269.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII	Angka	11	7.500.000	8	7.500.000	8	6.269.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		6.269.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.269.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	27.500.000	55	27.500.000	55	24.342.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		17.246.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI	Angka	156	20.000.000	247	20.000.000	247	17.246.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		17.246.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	17.246.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.096.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI	Angka	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.096.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		7.096.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.096.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	27.500.000	100	27.500.000	100	20.985.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		20.000.000		15.569.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII	Angka	215	20.000.000	193	20.000.000	388	15.569.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		20.000.000		15.569.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	15.569.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		5.416.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII	Angka	5	7.500.000	6	7.500.000	14	5.416.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		5.416.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	7.500.000	2	7.500.000	2	5.416.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan								**59.457.673.000**		**59.492.673.000**		**72.363.003.000**		
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	90.88	59.457.673.000	90.88	59.492.673.000	91.16	72.363.003.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59.457.673.000		59.492.673.000		72.363.003.000		
						Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67.77	57.100.000.000	67.77	57.135.000.000	67.77	70.030.736.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					57.100.000.000		57.135.000.000		70.030.736.000		
						Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI	Siswa	189837	5.100.000.000	189837	5.135.000.000	189837	5.107.760.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0060			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.100.000.000		5.135.000.000		5.107.760.000		
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	10000	5.100.000.000	10000	5.135.000.000	10000	5.107.760.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian	Unit	225190	52.000.000.000	225190	52.000.000.000	225190	64.922.976.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				52.000.000.000		52.000.000.000		64.922.976.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	800	52.000.000.000	800	52.000.000.000	300	64.922.976.000	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1.74	2.357.673.000	1.74	2.357.673.000	1.74	2.332.267.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.357.673.000		2.357.673.000		2.332.267.000		
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian	Orang	815	2.357.673.000	815	2.357.673.000	815	2.332.267.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0056			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK				2.357.673.000		2.357.673.000		2.332.267.000		
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	150	2.357.673.000	150	2.357.673.000	150	2.332.267.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pendidikan									**5.396.218.243.000**		**5.342.455.797.000**		**5.162.634.922.000**	**Dinas Pendidikan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	70.12		70.12		77.89		Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan								**5.303.959.076.000**		**5.248.016.630.000**		**5.068.271.925.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	3.35	5.303.959.076.000	3.35	5.248.016.630.000	3.45	5.068.271.925.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.303.959.076.000		5.248.016.630.000		5.068.271.925.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	2.423.100.000	100	3.623.100.000	100	3.731.091.000	Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					998.000.000		2.198.000.000		2.026.712.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	68	998.000.000	68	2.198.000.000	68	2.026.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		24.000.000		34.273.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	12	24.000.000	12	34.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				147.000.000		147.000.000		148.829.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	147.000.000	12	147.000.000	12	148.829.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000		24.000.000		26.505.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	12	24.000.000	12	26.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	20.000.000	8	20.000.000	8	16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.000.000		33.000.000		53.517.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	33.000.000	12	33.000.000	12	53.517.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		123.140.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	123.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				650.000.000		1.850.000.000		1.623.750.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	650.000.000	2	1.850.000.000	2	1.623.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.700.000		140.700.000		249.947.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	140.700.000	5	140.700.000	5	249.947.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		45.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	3	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.200.000		114.200.000		177.947.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	114.200.000	5	114.200.000	5	177.947.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				26.500.000		26.500.000		26.500.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	26.500.000	1	26.500.000	1	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.800.000		868.800.000		865.428.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	868.800.000	15	868.800.000	15	865.428.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3.000.000	3	3.000.000	3	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		330.000.000		327.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	330.000.000	4	330.000.000	4	327.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				535.800.000		535.800.000		535.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	535.800.000	4	535.800.000	4	535.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.600.000		403.600.000		577.004.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	290	403.600.000	290	403.600.000	290	577.004.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		60.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	60.000.000	12	60.000.000	12	30.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.500.000		132.500.000		99.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	210	132.500.000	210	132.500.000	210	99.700.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.100.000		136.100.000		321.534.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	136.100.000	2	136.100.000	2	321.534.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		60.770.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	60.770.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	1.073.000.000	100	1.073.000.000	100	1.074.673.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					339.000.000		339.000.000		335.770.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	339.000.000	100	339.000.000	100	335.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		17.523.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	3	20.000.000	3	17.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		75.047.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000	4	80.000.000	4	75.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		32.000.000		32.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	4	32.000.000	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.349.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				4.000.000		4.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		73.000.000		61.608.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	65.000.000	12	73.000.000	12	61.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		124.545.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	124.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					99.000.000		99.000.000		90.166.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	99.000.000	12	99.000.000	12	90.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		27.523.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	27.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.000.000		69.000.000		62.643.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	69.000.000	5	69.000.000	5	62.643.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.000.000		410.000.000		424.976.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.000.000	12	410.000.000	12	424.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		130.000.000		122.129.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	130.000.000	4	130.000.000	4	122.129.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.587.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				270.000.000		270.000.000		293.880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	270.000.000	1	270.000.000	1	293.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		195.000.000		193.761.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	22	195.000.000	22	195.000.000	22	193.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		40.000.000		38.761.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	40.000.000	5	40.000.000	5	38.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	2.246.890.000	100	2.246.890.000	100	2.157.116.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					480.000.000		480.000.000		405.576.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	97	480.000.000	97	480.000.000	97	405.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		21.257.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	3	21.257.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		65.000.000		56.951.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	65.000.000	1	65.000.000	3	56.951.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		62.618.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	75.000.000	1	75.000.000	4	62.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		12.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	3	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.000.000		95.000.000		82.250.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	85.000.000	12	95.000.000	12	82.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		165.000.000		130.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	175.000.000	12	165.000.000	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.000.000		310.000.000		350.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	310.000.000	22	310.000.000	22	350.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		88.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	3	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.000.000		190.000.000		242.400.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	190.000.000	10	190.000.000	8	242.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					593.000.000		593.000.000		504.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	593.000.000	2	593.000.000	2	504.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		116.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	116.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				384.000.000		384.000.000		384.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	384.000.000	12	384.000.000	4	384.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					863.890.000		863.890.000		895.860.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	36	863.890.000	36	863.890.000	36	895.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.290.000		24.290.000		24.290.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	24.290.000	2	24.290.000	1	24.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		18.000.000		9.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	9	18.000.000	9	18.000.000	9	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.600.000		26.600.000		45.607.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	26.600.000	30	26.600.000	30	45.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		36.963.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	1	36.963.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	1.601.000.000	100	1.601.000.000	100	1.725.651.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		433.624.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	433.624.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		31.285.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	31.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		75.510.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000	4	80.000.000	4	75.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.396.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		48.989.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	48.989.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		7.350.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	7.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		50.094.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	50.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					130.000.000		130.000.000		324.221.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	130.000.000	40	130.000.000	40	324.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		27.523.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	27.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		296.698.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	296.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					721.000.000		721.000.000		617.806.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	721.000.000	12	721.000.000	12	617.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		5.217.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	5.217.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		239.310.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	239.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000		400.000.000		371.979.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	12	400.000.000	12	371.979.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.000.000		290.000.000		290.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	290.000.000	60	290.000.000	60	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		70.000.000		50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	70.000.000	8	70.000.000	8	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		30.000.000		10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	30.000.000	4	30.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		80.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	30.000.000	3	30.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	1.093.000.000	100	1.093.000.000	100	1.136.527.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					316.000.000		316.000.000		308.349.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	316.000.000	100	316.000.000	100	308.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		41.251.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	41.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		30.217.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	30.217.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		24.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		7.680.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000		6.000.000		1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	8	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		54.255.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	54.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		140.985.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	140.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		80.000.000		252.878.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	80.000.000	8	80.000.000	54	252.878.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		133.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	30.000.000	15	30.000.000	1	133.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		119.378.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	8	119.378.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.400.000		470.400.000		378.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	470.400.000	4	470.400.000	4	378.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		5.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		250.000.000		160.850.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	160.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				214.400.000		214.400.000		212.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	214.400.000	1	214.400.000	1	212.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					226.600.000		226.600.000		197.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	226.600.000	56	226.600.000	63	197.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		28.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	28.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		41.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	40.000.000	60	40.000.000	60	41.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.200.000		50.200.000		127.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.200.000	1	50.200.000	1	127.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.400.000		106.400.000		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	106.400.000	1	106.400.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	1.409.500.000	100	1.409.500.000	100	1.585.377.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					586.000.000		586.000.000		503.432.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	586.000.000	100	586.000.000	100	503.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				240.000.000		240.000.000		28.555.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240.000.000	1	240.000.000	1	28.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		42.713.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	42.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		28.443.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	28.443.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		48.300.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	48.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		15.250.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		2.256.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.000.000		33.000.000		109.915.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	33.000.000	12	33.000.000	12	109.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		228.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	228.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		150.000.000		426.999.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	150.000.000	4	150.000.000	4	426.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		64.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		145.999.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	145.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		17.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								200.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					533.500.000		533.500.000		460.196.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	533.500.000	12	533.500.000	12	460.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		240.000.000		185.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	185.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		27.000.000		8.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	27.000.000	12	27.000.000	12	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				265.000.000		265.000.000		264.996.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	265.000.000	12	265.000.000	12	264.996.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		110.000.000		164.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	110.000.000	1	110.000.000	1	164.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		53.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	20.000.000	10	20.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		31.750.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	50.000.000	56	50.000.000	56	31.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								80.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	4.030.000.000	100	4.030.000.000	100	4.179.873.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		6.746.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	6.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		7.000.000		6.746.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	6.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.500.000		283.500.000		314.783.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	283.500.000	100	283.500.000	100	314.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		10.500.000		25.698.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	1	25.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		62.390.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	62.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		22.110.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	22.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		32.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.349.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		38.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	38.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		122.136.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	122.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.072.000.000		3.072.000.000		3.334.973.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	3.072.000.000	3	3.072.000.000	3	3.334.973.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				60.000.000		60.000.000		93.900.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	93.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		12.000.000		238.153.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	9	238.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000		3.000.000.000		3.002.920.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.002.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					493.500.000		493.500.000		452.070.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	5	493.500.000	5	493.500.000	5	452.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		3.062.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		145.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	145.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		290.000.000		303.258.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	290.000.000	2	290.000.000	2	303.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.000.000		174.000.000		71.301.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	174.000.000	48	174.000.000	48	71.301.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		37.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		4.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	4.000.000	20	4.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		17.136.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	20.000.000	24	20.000.000	18	17.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.000.000		66.000.000		17.165.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	66.000.000	1	66.000.000	1	17.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		44.000.000		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	44.000.000	1	44.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	1.120.800.000	100	1.120.800.000	100	1.477.700.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					306.000.000		306.000.000		355.733.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	306.000.000	100	306.000.000	100	355.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		40.796.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		29.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.009.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		66.200.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	66.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		182.530.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	182.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000		135.000.000		180.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	135.000.000	13	135.000.000	13	180.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.000.000		135.000.000		180.200.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	135.000.000	11	135.000.000	13	180.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					553.800.000		553.800.000		552.767.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	553.800.000	12	553.800.000	12	552.767.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.587.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				368.800.000		368.800.000		368.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	368.800.000	12	368.800.000	12	368.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.000.000		126.000.000		389.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	126.000.000	47	126.000.000	47	389.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		23.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		35.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	50.000.000	33	50.000.000	33	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		0		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		160.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	3	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								115.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		0		40	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	1.514.000.000	100	1.514.000.000	100	1.464.701.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					361.000.000		361.000.000		373.642.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	361.000.000	100	361.000.000	100	373.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		35.000.000		30.666.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	30.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		30.666.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	30.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.000.000		42.000.000		35.066.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	42.000.000	12	42.000.000	12	35.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.000.000		24.000.000		20.037.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	12	24.000.000	12	20.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		50.589.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	50.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		191.618.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	191.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		100.000.000		118.279.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	118.279.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		118.279.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	118.279.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					738.000.000		738.000.000		642.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	738.000.000	12	738.000.000	12	642.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		400.000.000		312.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	12	400.000.000	12	312.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				333.000.000		333.000.000		326.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	333.000.000	12	333.000.000	12	326.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.000.000		275.000.000		290.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	374	275.000.000	374	275.000.000	374	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	374	45.000.000	374	45.000.000	374	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		115.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	1.321.250.000	100	1.321.250.000	100	1.293.695.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					313.500.000		313.500.000		337.776.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		313.500.000		313.500.000		337.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.500.000		16.500.000		14.457.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.500.000	1	16.500.000	1	14.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		39.428.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	1	45.000.000	1	39.428.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.349.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		49.945.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	49.945.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		191.597.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	191.597.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		200.000.000		247.936.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	200.000.000	12	200.000.000	12	247.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		72.936.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	8	72.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					466.750.000		466.750.000		426.283.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	466.750.000	4	466.750.000	4	426.283.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.750.000		1.750.000		1.533.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.750.000	4	1.750.000	4	1.533.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		118.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.000.000	4	7.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		308.000.000		305.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	308.000.000	4	308.000.000	4	305.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.000.000		311.000.000		251.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	311.000.000	12	311.000.000	12	251.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		50.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	50.000.000	10	50.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.000.000		36.000.000		26.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	36.000.000	15	36.000.000	15	26.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	1.013.000.000	100	1.013.000.000	100	1.519.171.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					385.000.000		385.000.000		402.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X	%	100	385.000.000	100	385.000.000	100	402.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		17.523.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		35.047.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	2	40.000.000	2	35.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		34.340.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	2	35.000.000	2	34.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		14.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		1.950.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		230.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		50.000.000		295.811.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	198	295.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel								175.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					180	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		120.811.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	45	120.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					438.000.000		438.000.000		370.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	438.000.000	12	438.000.000	12	370.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		6.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		48.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		8.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		308.000.000		308.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	308.000.000	12	308.000.000	12	308.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		110.000.000		420.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	110.000.000	18	110.000.000	26	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		60.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	30.000.000	15	30.000.000	15	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		330.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	1.657.000.000	100	1.657.000.000	100	1.650.683.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					459.500.000		459.500.000		568.043.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	459.500.000	100	459.500.000	100	568.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.500.000		17.500.000		15.333.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.500.000	1	17.500.000	1	15.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		56.113.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	2	40.000.000	2	56.113.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		29.822.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	29.822.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000		90.000.000		99.100.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	90.000.000	3	90.000.000	3	99.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		33.523.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	33.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		7.000.000		6.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		268.152.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	268.152.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		300.000.000		304.410.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	300.000.000	13	300.000.000	13	304.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		45.872.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	45.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		78.538.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	100.000.000	8	100.000.000	8	78.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					645.000.000		645.000.000		492.430.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	645.000.000	12	645.000.000	12	492.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		330.000.000		186.780.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	330.000.000	12	330.000.000	12	186.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		9.000.000		5.650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	1	5.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		300.000.000		294.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	300.000.000	4	300.000.000	4	294.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.500.000		237.500.000		285.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	87	237.500.000	87	237.500.000	87	285.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.500.000		27.500.000		81.600.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	27.500.000	3	27.500.000	3	81.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	20.000.000	60	20.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		54.200.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	40.000.000	22	40.000.000	22	54.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	1.318.300.000	100	1.318.300.000	100	1.409.455.000	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Cabdin XII	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					418.000.000		429.036.000		411.348.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII	%	100	418.000.000	100	429.036.000	100	411.348.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		61.036.000		61.036.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	61.036.000	2	61.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		35.076.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	2	40.000.000	2	35.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		30.473.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	30.473.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.000.000		44.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		6.750.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		4.992.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	5.000.000	24	5.000.000	24	4.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		50.094.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	50.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		178.927.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	178.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		200.000.000		181.839.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII	Unit	4	200.000.000	4	200.000.000	4	181.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		81.839.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	81.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					526.300.000		515.264.000		506.175.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII	Laporan	12	526.300.000	12	515.264.000	12	506.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		4.800.000		4.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		135.000.000		135.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.500.000		6.500.000		5.963.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.500.000	12	6.500.000	12	5.963.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.000.000		368.964.000		360.912.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	380.000.000	12	368.964.000	12	360.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.000.000		144.000.000		280.093.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII	Unit	30	144.000.000	30	144.000.000	30	280.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		1.093.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5.000.000	5	5.000.000	5	1.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		19.000.000		19.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	19.000.000	20	19.000.000	20	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	5.282.138.236.000	100	5.224.995.790.000	100	5.043.866.212.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.155.662.053.000		5.155.662.053.000		5.015.862.364.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.155.662.053.000	12	5.155.662.053.000	12	5.015.862.364.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.153.515.173.000		5.153.515.173.000		5.013.627.863.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32.844	5.153.515.173.000	32844	5.153.515.173.000	32844	5.013.627.863.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2.146.880.000		2.146.880.000		2.234.501.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.146.880.000	12	2.146.880.000	12	2.234.501.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					583.000.000		520.276.000		666.078.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	583.000.000	0	520.276.000	4	666.078.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				55.000.000		43.760.000		40.372.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	55.000.000	2	43.760.000	2	40.372.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				308.000.000		308.000.000		437.216.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	308.000.000	4	308.000.000	4	437.216.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				165.000.000		113.516.000		131.463.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	165.000.000	5	113.516.000	5	131.463.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				55.000.000		55.000.000		57.027.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	55.000.000	2	55.000.000	2	57.027.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					537.500.000		474.695.000		486.159.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	537.500.000	100	474.695.000	100	486.159.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				275.000.000		212.195.000		241.485.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	275.000.000	4	212.195.000	4	241.485.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				55.000.000		55.000.000		48.522.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	55.000.000	2	55.000.000	2	48.522.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000		80.000.000		67.337.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	80.000.000	11	80.000.000	11	67.337.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27.493.000		27.493.000		27.493.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	27.493.000	80	27.493.000	80	27.493.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.007.000		100.007.000		101.322.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	440	100.007.000	440	100.007.000	440	101.322.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.626.500.000		2.439.189.000		2.597.308.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.626.500.000	100	2.439.189.000	100	2.597.308.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				176.000.000		176.000.000		154.208.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	176.000.000	1	176.000.000	1	154.208.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.000.000		220.000.000		188.723.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	220.000.000	2	220.000.000	2	188.723.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				250.000.000		250.000.000		256.294.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	250.000.000	2	250.000.000	2	256.294.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000		175.000.000		155.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	1	175.000.000	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		56.745.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	56.745.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				555.500.000		555.500.000		532.082.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	555.500.000	12	555.500.000	12	532.082.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.000.000		750.000.000		1.016.982.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	900.000.000	12	750.000.000	12	1.016.982.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		88.478.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	88.478.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		162.689.000		148.796.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	200.000.000	2	162.689.000	2	148.796.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.450.000.000		1.612.500.000		1.463.814.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	1.450.000.000	24	1.612.500.000	24	1.463.814.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				200.000.000		200.000.000		183.491.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	200.000.000	2	200.000.000	2	183.491.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				750.000.000		912.500.000		780.323.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	750.000.000	17	912.500.000	17	780.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.860.683.000		62.660.397.000		20.490.041.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	119.860.683.000	4	62.660.397.000	4	20.490.041.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				22.000.000		22.000.000		9.276.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	22.000.000	12	22.000.000	12	9.276.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.000.000		220.000.000		199.462.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	220.000.000	12	220.000.000	12	199.462.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.818.683.000		60.618.397.000		18.481.303.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	117.818.683.000	12	60.618.397.000	12	18.481.303.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.418.500.000		1.626.680.000		2.300.448.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	120	1.418.500.000	120	1.626.680.000	120	2.300.448.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		200.000.000		250.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	200.000.000	17	200.000.000	17	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				55.000.000		55.000.000		45.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200	55.000.000	200	55.000.000	200	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.500.000		82.500.000		142.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	82.500.000	12	82.500.000	12	142.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				11.000.000		11.000.000		5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	11.000.000	1	11.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.000.000		40.000.000		20.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		808.180.000		1.407.948.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	600.000.000	6	808.180.000	6	1.407.948.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				330.000.000		330.000.000		330.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	220	330.000.000	220	330.000.000	220	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan								**92.259.167.000**		**94.439.167.000**		**94.362.997.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	3.15	92.259.167.000	3.15	94.439.167.000	3.26	94.362.997.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						92.259.167.000		94.439.167.000		94.362.997.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	92.259.167.000	100	94.439.167.000	100	94.362.997.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.259.167.000		94.439.167.000		94.362.997.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	92.259.167.000	100	94.439.167.000	100	94.362.997.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				91.279.167.000		93.459.167.000		93.480.156.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	91.279.167.000	6	93.459.167.000	6	93.480.156.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				800.000.000		800.000.000		724.690.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	800.000.000	6	800.000.000	6	724.690.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				150.000.000		150.000.000		131.008.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	150.000.000	1	150.000.000	1	131.008.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		30.000.000		27.143.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	27.143.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**8.425.538.045.000**		**8.430.958.045.000**		**8.286.984.976.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**437.886.735.000**		**397.872.575.000**		**383.749.977.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar								**60.575.972.000**		**60.435.860.000**		**47.466.003.000**		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	87	60.575.972.000	28.57	60.435.860.000	28.57	47.466.003.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						59.222.757.000		59.082.645.000		46.380.303.000		
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63.05	225.000.000	63.05	225.000.000	69.96	200.137.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					225.000.000		225.000.000		200.137.000		
						Persentase fasilitas kesehatan yang terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	76.16	194.815.000	76.16	194.815.000	90.54	183.944.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				194.815.000		194.815.000		183.944.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	194.815.000	4	194.815.000	4	183.944.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	17	30.185.000	17	30.185.000	20	16.193.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				30.185.000		30.185.000		16.193.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (masyarakat terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	Dokumen	4	30.185.000	4	30.185.000	4	16.193.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	72.82	3.369.000.000	41.27	3.369.000.000	41.27	2.938.098.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.012.500.000		2.012.500.000		1.624.221.000		
						Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	60	2.012.500.000	60	2.012.500.000	60	1.624.221.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.012.500.000		2.012.500.000		1.624.221.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1.590.000	5	1.590.000	5	1.590.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (layanan prioritas)	Unit	5	16.300.000	5	16.300.000	5	13.741.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (ramah disabilitas)	Unit	15	13.820.000	15	13.820.000	30	8.770.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	1.965.604.000	2	1.965.604.000	10	1.585.604.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Layanan KJSU)	Unit	3	15.186.000	3	15.186.000	3	14.516.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.356.500.000		1.356.500.000		1.313.877.000		
						Presentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%	40	1.356.500.000	40	1.356.500.000	40	1.313.877.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1.356.500.000		1.356.500.000		1.313.877.000		
						Jumlah Kegiatan yang diperlukan dukungan Tim Kesehatan Provinsi	Kegiatan	30	387.290.000	30	318.500.000	30	313.495.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	5	969.210.000	7	1.038.000.000	7	1.000.382.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	98.27	135.830.000	57.14	135.830.000	57.14	106.317.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					135.830.000		135.830.000		106.317.000		
						Persentase Faskes Lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna	%	95.2	135.830.000	57.72	135.830.000	57.72	106.317.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				135.830.000		135.830.000		106.317.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	20	135.830.000	20	135.830.000	20	106.317.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85.71	60.000.000	85.71	60.000.000	85.71	25.785.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.000.000		60.000.000		25.785.000		
						Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP)	%	48.57	30.000.000	48.57	30.000.000	48.57	13.001.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		30.000.000		13.001.000		
						Jumlah dokumen pembinaan Integrasi Layanan Primer (ILP)	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	13.001.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna	%	94.87	30.000.000	94.87	30.000.000	94.87	12.784.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		30.000.000		12.784.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Labkesmas	Dokumen	40	30.000.000	40	30.000.000	40	12.784.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	537.994.000	54	537.994.000	54	730.568.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					537.994.000		537.994.000		730.568.000		
						Persentase Peningkatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	537.994.000	54	537.994.000	54	730.568.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				537.994.000		537.994.000		730.568.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	19	537.994.000	19	537.994.000	19	730.568.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37.14	21.000.000	37.14	21.000.000	37.14	12.681.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.000.000		21.000.000		12.681.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik	Dokumen	37.14	21.000.000	37.14	21.000.000	37.14	12.681.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				21.000.000		21.000.000		12.681.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4	21.000.000	4	21.000.000	4	12.681.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51.19	30.000.000	51.19	30.000.000	57.14	14.723.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		14.723.000		
						Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	51.19	30.000.000	51.19	30.000.000	51.19	14.723.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		30.000.000		14.723.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA)Puskesmas	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	14.723.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	25	102.166.000	25	102.166.000	25	85.369.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					102.166.000		102.166.000		85.369.000		
						Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	27	102.166.000	27	102.166.000	35	85.369.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				102.166.000		102.166.000		85.369.000		
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	10	102.166.000	10	102.166.000	35	85.369.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	60	1.513.856.000	60	1.513.856.000	60	1.567.726.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					830.537.000		830.537.000		895.056.000		
						Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit	%	10	0	10	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0001			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		0		0		
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	677.788.000	100	642.788.000	100	651.332.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				677.788.000		642.788.000		651.332.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	677.788.000	4	642.788.000	4	651.332.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	70	152.749.000	70	187.749.000	83	243.724.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				15.000.000		15.000.000		167.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	167.300.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				137.749.000		137.749.000		41.424.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	137.749.000	2	137.749.000	2	41.424.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					683.319.000		683.319.000		672.670.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	85	683.319.000	85	683.319.000	95	672.670.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				683.319.000		683.319.000		672.670.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	683.319.000	1	683.319.000	1	672.670.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	1.380.474.000	100	1.380.474.000	100	2.176.149.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					865.000.000		865.000.000		1.577.576.000		
						Persentase pembangunan fasilitas rumah sakit	%	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0001			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		0		0		
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	750.000.000	100	750.000.000	100	702.612.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				750.000.000		750.000.000		702.612.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	750.000.000	5	750.000.000	4	702.612.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	115.000.000	100	115.000.000	65	874.964.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		850.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	850.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				115.000.000		115.000.000		24.964.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	115.000.000	2	115.000.000	6	24.964.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					515.474.000		515.474.000		598.573.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	515.474.000	100	515.474.000	100	598.573.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				515.474.000		515.474.000		598.573.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	515.474.000	1	515.474.000	1	598.573.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	1.495.142.000	100	1.455.830.000	100	1.561.367.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					720.142.000		720.142.000		961.965.000		
						Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS)	Unit	2	0	2	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0001			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		0		0		
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Unit	100	700.000.000	100	700.000.000	100	775.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				700.000.000		700.000.000		775.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	700.000.000	4	700.000.000	4	775.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	20.142.000	100	20.142.000	100	186.965.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		149.670.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	149.670.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.142.000		20.142.000		37.295.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	4	20.142.000	4	20.142.000	4	37.295.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					775.000.000		735.688.000		599.402.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	775.000.000	100	735.688.000	100	599.402.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				775.000.000		735.688.000		599.402.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	775.000.000	1	735.688.000	1	599.402.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	72	3.500.000.000	72	3.500.000.000	72.14	3.483.528.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.500.000.000		3.500.000.000		3.483.528.000		
						Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	72	3.500.000.000	72	3.500.000.000	72	3.483.528.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
		1.02.02.1.01.0002			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	1	0	0	0	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.500.000.000		1.500.000.000		1.552.040.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	3	1.552.040.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.000.000.000		2.000.000.000		1.931.488.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	1.931.488.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	1.768.813.000	100	1.668.013.000	100	1.649.351.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.229.813.000		1.229.813.000		1.276.891.000		
						Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit	%	30	0	30	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.01.0001			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		0		0		
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien	%	100	1.079.813.000	100	1.079.813.000	100	1.161.641.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.079.813.000		1.079.813.000		1.161.641.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	1.079.813.000	4	1.079.813.000	4	1.161.641.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	115.250.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.000.000		15.000.000		16.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	6	15.000.000	6	15.000.000	5	16.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				135.000.000		135.000.000		99.250.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	135.000.000	2	135.000.000	8	99.250.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					539.000.000		438.200.000		372.460.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	539.000.000	100	438.200.000	100	372.460.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				539.000.000		438.200.000		372.460.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	539.000.000	1	438.200.000	4	372.460.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	45.083.482.000	85	45.083.482.000	85	31.828.504.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					45.083.482.000		45.083.482.000		31.828.504.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar	%	85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Faskes Lanjutan)	Dokumen	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	%	85	44.783.482.000	85	44.783.482.000	85	31.528.504.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0025			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				270.000.000		270.000.000		270.000.000		
						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2	270.000.000	2	270.000.000	2	270.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				44.513.482.000		44.513.482.000		31.258.504.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	9	44.513.482.000	9	44.513.482.000	9	31.258.504.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.278.215.000		1.278.215.000		1.016.164.000		
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	%	99	700.000.000	99	700.000.000	99	548.716.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000		700.000.000		548.716.000		
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai program prioritas nasional yang diselenggarakan Bapelkes	%	80	600.000.000	80	600.000.000	80	541.103.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				600.000.000		600.000.000		541.103.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	660	600.000.000	660	600.000.000	660	541.103.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan	%	80	100.000.000	80	100.000.000	80	7.613.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100.000.000		100.000.000		7.613.000		
						Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan mutu pelatihan SDM Kesehatan dl Bapelkes	Dokumen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	7.613.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2.85	578.215.000	2.85	578.215.000	2.85	467.448.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					273.215.000		273.215.000		270.891.000		
						Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Mamusia Kesehatan sesuai dengan standart	%	66.17	268.025.000	66.17	268.025.000	66.17	266.115.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.01.0001			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				268.025.000		268.025.000		266.115.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	10	268.025.000	10	268.025.000	10	266.115.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai dengan standar	%	67.16	5.190.000	67.16	5.190.000	67.16	4.776.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.01.0002			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.190.000		5.190.000		4.776.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	10	5.190.000	10	5.190.000	10	4.776.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					305.000.000		305.000.000		196.557.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten	%	90	305.000.000	90	305.000.000	90	196.557.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				305.000.000		305.000.000		196.557.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4	305.000.000	4	305.000.000	4	196.557.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						75.000.000		75.000.000		69.536.000		
						Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	30	75.000.000	91	75.000.000	91	69.536.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					75.000.000		75.000.000		69.536.000		
						Persentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	87	75.000.000	87	75.000.000	87	69.536.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				75.000.000		75.000.000		69.536.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	35	75.000.000	35	75.000.000	35	69.536.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan								**372.662.615.000**		**332.752.367.000**		**332.749.744.000**		
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.23	372.662.615.000	99.23	332.752.367.000	99.23	332.749.744.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						372.662.615.000		332.752.367.000		332.749.744.000		
						Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74.28	372.662.615.000	74.28	332.752.367.000	74.28	332.749.744.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					372.662.615.000		332.752.367.000		332.749.744.000		
						Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif	%	77.4	372.662.615.000	77.4	332.752.367.000	77.4	332.749.744.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				372.662.615.000		332.752.367.000		332.749.744.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	372.662.615.000	12	332.752.367.000	12	332.749.744.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak								**659.570.000**		**659.570.000**		**539.051.000**		
						Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 KH	11.8	105.050.000	8.66	105.050.000	8.66	77.173.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						105.050.000		105.050.000		77.173.000		
						Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	10.3	105.050.000	7.5	105.050.000	7.5006	77.173.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					105.050.000		105.050.000		77.173.000		
						Angka kematian neonatal	1.000/KH	6.8	46.000.000	6.01	46.000.000	6.01	37.666.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				46.000.000		46.000.000		37.666.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Angka kematian Neonatal)	Dokumen	4	46.000.000	4	46.000.000	4	37.666.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Cakupan skrining Bayi Baru Lahir	%	40	59.050.000	40	59.050.000	40	39.507.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				59.050.000		59.050.000		39.507.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Cakupan Skrining Bayi Baru)	Dokumen	4	59.050.000	4	59.050.000	4	39.507.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Angka Kematian Ibu	per 100.000	82.5	554.520.000	78.27	554.520.000	78.27	461.878.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						554.520.000		554.520.000		461.878.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	14.570.000	28.57	14.570.000	33.33	11.368.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					14.570.000		14.570.000		11.368.000		
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	14.570.000	28.57	14.570.000	33.33	11.368.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				14.570.000		14.570.000		11.368.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	14.570.000	4	14.570.000	4	11.368.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	15.000.000	28.57	15.000.000	44.44	4.984.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.000.000		15.000.000		4.984.000		
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	42.85	15.000.000	28.57	15.000.000	33.33	4.984.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				15.000.000		15.000.000		4.984.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	4.984.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	20	25.000.000	20	25.000.000	22.22	17.240.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		17.240.000		
						Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	30	25.000.000	30	25.000.000	44.44	17.240.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				25.000.000		25.000.000		17.240.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	17.240.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%	68.57	100.000.000	68.57	100.000.000	68.57	101.211.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		101.211.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)sesuai standar	%	42.86	63.690.000	42.86	63.690.000	56.98	69.031.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				63.690.000		63.690.000		69.031.000		
						"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (RS PONEK)	Unit	20	63.690.000	20	63.690.000	50	69.031.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon (AMPSR) sesuai standar	%	56.25	36.310.000	56.25	36.310.000	56.25	32.180.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				36.310.000		36.310.000		32.180.000		
						"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (AMPSR)	Unit	20	36.310.000	20	36.310.000	50	32.180.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	384.950.000	2	384.950.000	2	323.624.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					384.950.000		384.950.000		323.624.000		
						Persentase ANC 6 Kali (K6)	%	82	247.950.000	82	247.950.000	82	221.994.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				247.950.000		247.950.000		221.994.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ANC 6 Kali)	Dokumen	4	247.950.000	4	247.950.000	4	221.994.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				247.950.000		247.950.000		221.994.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ANC 6 Kali)	Dokumen	4	247.950.000	4	247.950.000	4	221.994.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	%	60	0	60	0	60	0	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Skrening Pre Eklamsi)	Dokumen	4	0	4	0	4	0	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	%	17.14	35.000.000	17.14	35.000.000	17.14	7.989.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				35.000.000		35.000.000		7.989.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	4	35.000.000	4	35.000.000	4	7.989.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						prevalensi anemia pada ibu hamil	%	25	47.000.000	25	47.000.000	25	44.672.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				47.000.000		47.000.000		44.672.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	47.000.000	4	47.000.000	4	44.672.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						prevalensi anemia pada remaja putri	%	23	55.000.000	23	55.000.000	23	48.969.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				55.000.000		55.000.000		48.969.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	55.000.000	4	55.000.000	4	48.969.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28.57	15.000.000	28.57	15.000.000	25	3.451.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.000.000		15.000.000		3.451.000		
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten	%	30	15.000.000	30	15.000.000	30.46	3.451.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				15.000.000		15.000.000		3.451.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	3.451.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
	Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)								**2.669.934.000**		**2.669.934.000**		**1.997.971.000**		
						Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	31.4	603.490.000	34.3	603.490.000	34.3	495.698.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						603.490.000		603.490.000		495.698.000		
						Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	90	50.000.000	91	50.000.000	91	39.300.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		39.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90%	%	31.4	50.000.000	40	50.000.000	40	39.300.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50.000.000		50.000.000		39.300.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Sesuai Standar	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	39.300.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Angka kematian Dengue	%	0.5	37.130.000	0.5	37.130.000	0.4	25.670.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					37.130.000		37.130.000		25.670.000		
						Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue	%	50	37.130.000	50	37.130.000	71.4	25.670.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				37.130.000		37.130.000		25.670.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Dengue sesuai standar	Dokumen	4	37.130.000	4	37.130.000	4	25.670.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	92	100.000.000	95	100.000.000	92	138.507.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		138.507.000		
						Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90%	%	62.9	100.000.000	60	100.000.000	60	138.507.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100.000.000		100.000.000		138.507.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Penemuan Tuberkulosis Sesuai Standar	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	138.507.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Insidensi Hepatitis B	%	1.1	30.000.000	1.1	30.000.000	1.1	25.230.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		25.230.000		
						Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80%	%	62.8	30.000.000	62.8	30.000.000	62.8	25.230.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30.000.000		30.000.000		25.230.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Hepatitis B sesuai standar	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	25.230.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	63.570.000	8	63.570.000	9.3	45.890.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					63.570.000		63.570.000		45.890.000		
						Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 %	%	31.43	63.570.000	31.43	63.570.000	31.43	45.890.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				63.570.000		63.570.000		45.890.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	63.570.000	4	63.570.000	4	45.890.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota	0	51.150.000	20	51.150.000	20	49.812.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					51.150.000		51.150.000		49.812.000		
						Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target	Kabupaten/Kota	2	20.150.000	3	20.150.000	3	20.150.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20.150.000		20.150.000		20.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	20.150.000	4	20.150.000	4	20.150.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90%	%	71.43	31.000.000	71.43	31.000.000	71.43	29.662.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				31.000.000		31.000.000		29.662.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	31.000.000	4	31.000.000	4	29.662.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	35	73.520.000	35	73.520.000	35	61.128.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					73.520.000		73.520.000		61.128.000		
						Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5%	%	28.6	73.520.000	28.6	73.520.000	100	61.128.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				73.520.000		73.520.000		61.128.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	73.520.000	4	73.520.000	4	61.128.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	55.510.000	28.57	55.510.000	33.33	28.026.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					55.510.000		55.510.000		28.026.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	55.510.000	28.57	55.510.000	33.33	28.026.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				55.510.000		55.510.000		28.026.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Ambarawa	Dokumen	4	55.510.000	4	55.510.000	4	28.026.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28.57	45.868.000	28.57	45.868.000	28.57	39.620.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					45.868.000		45.868.000		39.620.000		
						Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40%	%	28.57	45.868.000	28.57	45.868.000	75	39.620.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				45.868.000		45.868.000		39.620.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Dokumen	4	45.868.000	4	45.868.000	4	39.620.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	49.952.000	28.57	49.952.000	33.33	21.658.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					49.952.000		49.952.000		21.658.000		
						Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40%	%	28.57	49.952.000	28.57	49.952.000	77.77	21.658.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				49.952.000		49.952.000		21.658.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Magelang	Dokumen	4	49.952.000	4	49.952.000	4	21.658.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	46.790.000	28.57	46.790.000	44.44	20.857.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					46.790.000		46.790.000		20.857.000		
						Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	46.790.000	28.57	46.790.000	88.88	20.857.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				46.790.000		46.790.000		20.857.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Pati	Dokumen	4	46.790.000	4	46.790.000	4	20.857.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	40	2.066.444.000	52	2.066.444.000	52	1.502.273.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.617.222.000		1.617.222.000		1.109.135.000		
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	311.300.000	40	311.300.000	46	284.089.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					311.300.000		311.300.000		284.089.000		
						Persentase depresi yang medapatkan layanan	%	1	79.500.000	1	79.500.000	1.25	70.876.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				79.500.000		79.500.000		70.876.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	79.500.000	4	79.500.000	4	70.876.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik	%	71.43	231.800.000	22	231.800.000	22	213.213.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				231.800.000		231.800.000		213.213.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Assesment Aktifitas Fisik Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Dokumen	4	231.800.000	4	231.800.000	4	213.213.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	35.315.000	35	35.315.000	35	14.595.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					35.315.000		35.315.000		14.595.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar	%	31.43	35.315.000	31.43	35.315.000	31.43	14.595.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35.315.000		35.315.000		14.595.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar	Dokumen	4	35.315.000	4	35.315.000	4	14.595.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	344.755.000	35	344.755.000	35	336.390.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					344.755.000		344.755.000		336.390.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar	%	20	310.354.000	20	310.354.000	20	310.334.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				310.354.000		310.354.000		310.334.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Hipertensi sesuai standar	Dokumen	4	310.354.000	4	310.354.000	4	310.334.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30%	%	48.57	11.526.000	48.57	11.526.000	48.57	9.726.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11.526.000		11.526.000		9.726.000		
						Jumlah Dokumen Hasil persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30%	Dokumen	4	11.526.000	4	11.526.000	4	9.726.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas	%	31.43	22.875.000	31.43	22.875.000	31.43	16.330.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				22.875.000		22.875.000		16.330.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas	Dokumen	4	22.875.000	4	22.875.000	4	16.330.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28.57	65.076.000	28.57	65.076.000	33.33	46.025.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					65.076.000		65.076.000		46.025.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	65.076.000	28.57	65.076.000	33.33	46.025.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				65.076.000		65.076.000		46.025.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	65.076.000	4	65.076.000	4	46.025.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	57.14	60.000.000	57.14	60.000.000	50	2.931.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.000.000		60.000.000		2.931.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50%	%	28.57	60.000.000	28.57	60.000.000	50	2.931.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60.000.000		60.000.000		2.931.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	60.000.000	4	60.000.000	4	2.931.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	71.42	100.048.000	71.42	100.048.000	77.77	64.675.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.048.000		100.048.000		64.675.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50%	%	28.57	100.048.000	57.14	100.048.000	66.66	64.675.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100.048.000		100.048.000		64.675.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	100.048.000	4	100.048.000	4	64.675.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28.57	60.210.000	28.57	60.210.000	88.88	49.386.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.210.000		60.210.000		49.386.000		
						Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	60.210.000	28.57	60.210.000	88.88	49.386.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60.210.000		60.210.000		49.386.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	60.210.000	4	60.210.000	4	49.386.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25.71	351.635.000	25.71	351.635.000	25.71	135.470.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					351.635.000		351.635.000		135.470.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	20	351.635.000	20	351.635.000	20	135.470.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				351.635.000		351.635.000		135.470.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	Dokumen	4	351.635.000	4	351.635.000	4	135.470.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	55	200.000.000	54.28	200.000.000	54.28	112.561.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		112.561.000		
						Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal	%	51.4	150.000.000	51.4	150.000.000	51.4	95.243.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150.000.000		150.000.000		95.243.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Dokumen	4	150.000.000	4	150.000.000	4	95.243.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi
						Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran	%	40	50.000.000	40	50.000.000	40	17.318.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.000.000		50.000.000		17.318.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kesehatan Olahraga	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	17.318.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lanjut usia yang mandiri	%	91	32.000.000	77	32.000.000	77	21.663.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					32.000.000		32.000.000		21.663.000		
						Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91	32.000.000	55	32.000.000	55	21.663.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				32.000.000		32.000.000		21.663.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	4	32.000.000	4	32.000.000	4	21.663.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	60	22.688.000	14.4	22.688.000	10.4	18.970.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					22.688.000		22.688.000		18.970.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	28.57	22.688.000	60	22.688.000	60	18.970.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				22.688.000		22.688.000		18.970.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan skrinning merokok pada anak sekolah (usia 10-21 th)	Dokumen	4	22.688.000	4	22.688.000	4	18.970.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	59	34.195.000	25	34.195.000	25	22.380.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					34.195.000		34.195.000		22.380.000		
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4%	%	59	34.195.000	59	34.195.000	59	22.380.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				34.195.000		34.195.000		22.380.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrinning obesitas melalui pegukuran IMT (Indeks Masa Tubuh) atau LP (Lingkar Perut)	Dokumen	4	34.195.000	4	34.195.000	4	22.380.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						449.222.000		449.222.000		393.138.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34.28	449.222.000	34.28	449.222.000	34.28	393.138.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					113.000.000		113.000.000		67.780.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	57.14	113.000.000	57.14	113.000.000	57.14	67.780.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				113.000.000		113.000.000		67.780.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	113.000.000	4	113.000.000	4	67.780.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					336.222.000		336.222.000		325.358.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye pembudayaan hidup sehat	%	51.42	336.222.000	51.42	336.222.000	51.42	325.358.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				336.222.000		336.222.000		325.358.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	336.222.000	4	336.222.000	4	325.358.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana								**1.318.644.000**		**1.354.844.000**		**997.208.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan	%	77	1.318.644.000	77	1.354.844.000	77	997.208.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.318.644.000		1.354.844.000		997.208.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	27.680.000	100	27.680.000	100	4.377.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					27.680.000		27.680.000		4.377.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	%	100	27.680.000	100	27.680.000	100	4.377.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				27.680.000		27.680.000		4.377.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1500	27.680.000	1500	27.680.000	1500	4.377.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	83	330.000.000	50	330.000.000	50	223.424.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					330.000.000		330.000.000		223.424.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana	%	83	330.000.000	78	330.000.000	78	223.424.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				250.000.000		250.000.000		188.285.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2800	250.000.000	2800	250.000.000	12460	188.285.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0026			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				80.000.000		80.000.000		35.139.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	35.139.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	27.300.000	100	27.300.000	100	19.311.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					27.300.000		27.300.000		19.311.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	27.300.000	100	27.300.000	100	19.311.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				27.300.000		27.300.000		19.311.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	500	27.300.000	500	27.300.000	500	19.311.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	15.280.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		15.280.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	15.280.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				30.000.000		30.000.000		15.280.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	750	30.000.000	750	30.000.000	750	15.280.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	23.674.000	100	23.674.000	100	10.201.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					23.674.000		23.674.000		10.201.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai	%	100	23.674.000	100	23.674.000	100	10.201.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	

						Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati									
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			23.674.000		23.674.000		10.201.000			
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1500	23.674.000	1500	23.674.000	1500	10.201.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8.57	170.000.000	8.57	160.000.000	8.57	145.449.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					170.000.000		160.000.000		145.449.000		
						Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	80	10.000.000	80	3.900.000	80	3.600.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		3.900.000		3.600.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Dokumen	4	10.000.000	4	3.900.000	4	3.600.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	5.71	14.900.000	5.71	13.520.000	5.71	11.420.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14.900.000		13.520.000		11.420.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan kualitas air minum memenuhi syarat	Dokumen	4	14.900.000	4	13.520.000	4	11.420.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat	%	57.1	10.000.000	57.1	8.120.000	57.1	7.620.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		8.120.000		7.620.000		
						Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat	Dokumen	4	10.000.000	4	8.120.000	4	7.620.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	20	70.100.000	20	61.900.000	20	61.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				70.100.000		61.900.000		61.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu pengawasan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	Dokumen	4	70.100.000	4	61.900.000	4	61.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	20	25.000.000	20	25.048.000	20	15.961.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000		25.048.000		15.961.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penerapan pilar STBM di Kabupaten/Kota	Dokumen	4	25.000.000	4	25.048.000	4	15.961.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota sehat	%	45.71	25.000.000	45.71	26.402.000	45.71	26.402.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000		26.402.000		26.402.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayan an kesehatan lingkungan	Dokumen	4	25.000.000	4	26.402.000	4	26.402.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara	%	5.71	10.000.000	5.71	17.360.000	5.71	16.746.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		17.360.000		16.746.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam penyelenggaraan pengawasan kualitas udara	Dokumen	4	10.000.000	4	17.360.000	4	16.746.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan	%	25	5.000.000	25	3.750.000	25	2.700.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5.000.000		3.750.000		2.700.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan	Dokumen	4	5.000.000	4	3.750.000	4	2.700.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	559.990.000	50	606.190.000	50	463.591.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					409.990.000		456.190.000		381.951.000		
						Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Kabupaten/Kota	28	209.990.000	28	209.990.000	28	166.580.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				209.990.000		209.990.000		166.580.000		
						Jumlah Dokumen respon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Dokumen	4	209.990.000	4	209.990.000	4	166.580.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan	%	42	150.000.000	42	196.200.000	42	174.949.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		196.200.000		174.949.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans kesehatan haji	Dokumen	4	150.000.000	4	196.200.000	4	174.949.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	81.640.000		
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		150.000.000		81.640.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans PD3I	Dokumen	4	150.000.000	4	150.000.000	4	81.640.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	%	70	50.000.000	70	50.000.000	70	40.422.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000		50.000.000		40.422.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Surveilans dan Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	40.422.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		81.640.000		
						Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Kabupaten/Kota	28	209.990.000	28	209.990.000	28	166.580.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				209.990.000		209.990.000		166.580.000		
						Jumlah Dokumen respon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Dokumen	4	209.990.000	4	209.990.000	4	166.580.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan	%	42	150.000.000	42	196.200.000	42	174.949.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		196.200.000		174.949.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans kesehatan haji	Dokumen	4	150.000.000	4	196.200.000	4	174.949.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	81.640.000		
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		150.000.000		81.640.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans PD3I	Dokumen	4	150.000.000	4	150.000.000	4	81.640.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	%	70	50.000.000	70	50.000.000	70	40.422.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000		50.000.000		40.422.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Surveilans dan Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	40.422.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	42.86	150.000.000	100	150.000.000	100	115.575.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		115.575.000		
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	62.85	100.000.000	97	100.000.000	97	81.330.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100.000.000		100.000.000		81.330.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	81.330.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target	%	42.86	50.000.000	82	50.000.000	82	34.245.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000		50.000.000		34.245.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	34.245.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**103.708.301.000**		**103.812.213.000**		**102.690.436.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan								**103.383.527.000**		**103.499.895.000**		**102.532.166.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	90.5	103.383.527.000	90.5	103.499.895.000	90.5	102.532.166.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						103.383.527.000		103.499.895.000		102.532.166.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	5.937.483.000	100	5.937.483.000	100	6.086.980.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.765.500.000		2.820.000.000		3.190.246.000		
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.765.500.000		2.820.000.000		3.190.246.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.765.500.000	4	2.820.000.000	4	3.190.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.765.500.000		2.820.000.000		3.190.246.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	2.765.500.000	4	2.820.000.000	4	3.190.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					252.493.000		252.493.000		196.875.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	252.493.000	100	252.493.000	100	196.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.839.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.493.000		108.493.000		89.137.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	108.493.000	4	108.493.000	10	89.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				42.000.000		42.000.000		35.066.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	42.000.000	2	42.000.000	3	35.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		1.269.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	2	1.269.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.000.000		11.000.000		4.879.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	11.000.000	4	11.000.000	4	4.879.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		80.000.000		55.685.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	80.000.000	4	80.000.000	4	55.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		22.405.000		22.405.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	4	0	4	22.405.000	1	22.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		22.405.000		22.405.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	22.405.000	1	22.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.335.030.000		2.280.530.000		2.105.144.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.335.030.000	4	2.280.530.000	4	2.105.144.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				140.000.000		140.000.000		138.210.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	140.000.000	1	140.000.000	12	138.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.122.400.000		1.122.400.000		970.850.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.122.400.000	1	1.122.400.000	12	970.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.072.630.000		1.018.130.000		996.084.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.072.630.000	1	1.018.130.000	12	996.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					584.460.000		562.055.000		572.310.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	584.460.000	4	562.055.000	80	572.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.060.000		58.060.000		116.650.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	58.060.000	5	58.060.000	5	116.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	60	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				18.000.000		18.000.000		14.660.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.000.000	1	18.000.000	1	14.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				215.400.000		192.995.000		123.250.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	215.400.000	4	192.995.000	2	123.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.000.000		93.000.000		117.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	93.000.000	4	93.000.000	12	117.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	3.043.561.000	100	3.043.561.000	100	2.981.637.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.000.000		162.000.000		118.163.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.000.000	100	162.000.000	100	118.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		17.523.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	17.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		12.956.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	12.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		25.047.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.000.000		55.000.000		46.580.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	55.000.000	4	55.000.000	4	46.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		0		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		6.040.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	6.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		10.017.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	4	10.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		10.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	0	5	0	5	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.311.561.000		2.311.561.000		2.301.961.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.311.561.000	4	2.311.561.000	4	2.301.961.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		655.573.000		645.973.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	700.000.000	4	655.573.000	4	645.973.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.610.061.000		1.654.488.000		1.654.488.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.610.061.000	4	1.654.488.000	4	1.654.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					570.000.000		570.000.000		561.513.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	570.000.000	15	570.000.000	15	561.513.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		75.000.000		68.495.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	75.000.000	7	75.000.000	7	68.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		48.018.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	5	48.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	3.162.657.000	100	3.300.457.000	100	3.711.145.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.500.000.000		1.537.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	1.500.000.000	12	1.537.000.000	12	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.500.000.000		1.537.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.500.000.000	12	1.537.000.000	12	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.039.000		178.039.000		190.845.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	178.039.000	100	178.039.000	100	190.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.271.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		27.000.000		36.541.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	27.000.000	2	27.000.000	3	36.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.058.000		75.058.000		84.784.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	75.058.000	4	75.058.000	4	84.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		17.000.000		15.575.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17.000.000	2	17.000.000	2	15.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.481.000		44.481.000		39.174.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	44.481.000	12	44.481.000	12	39.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		31.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	0	15	0	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	4	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		31.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.272.543.000		1.373.343.000		1.270.570.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.272.543.000	12	1.373.343.000	12	1.270.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.500.000	2	1.500.000	3	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				415.000.000		400.873.000		303.635.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	415.000.000	12	400.873.000	12	303.635.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				856.043.000		970.970.000		964.435.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	856.043.000	12	970.970.000	12	964.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.075.000		212.075.000		218.730.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	212.075.000	56	212.075.000	56	218.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.725.000		72.725.000		76.630.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	72.725.000	8	72.725.000	8	76.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	0	5	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.000.000		38.000.000		41.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	38.000.000	30	38.000.000	30	41.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		24.000.000		6.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	24.000.000	2	24.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.350.000		43.350.000		49.300.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	43.350.000	4	43.350.000	4	49.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.000.000		34.000.000		44.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	34.000.000	8	34.000.000	8	44.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	1.973.434.000	100	1.976.434.000	100	2.090.282.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					540.000.000		540.000.000		577.330.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	540.000.000	4	540.000.000	4	577.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				540.000.000		540.000.000		577.330.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	540.000.000	4	540.000.000	4	577.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.534.000		109.534.000		122.701.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	109.534.000	100	109.534.000	100	122.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.415.000		4.415.000		5.662.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.415.000	1	4.415.000	1	5.662.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.811.000		12.811.000		11.904.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.811.000	4	12.811.000	4	11.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				708.000		708.000		708.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	708.000	4	708.000	4	708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.940.000		24.940.000		25.471.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	24.940.000	3	24.940.000	3	25.471.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.300.000		20.300.000		16.948.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.300.000	12	20.300.000	12	16.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.360.000		6.360.000		5.835.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.360.000	4	6.360.000	4	5.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		56.173.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	56.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	0	3	0	3	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.086.040.000		1.089.040.000		1.038.037.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.086.040.000	4	1.089.040.000	4	1.038.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.200.000		2.200.000		1.771.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.200.000	12	2.200.000	12	1.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.025.000		299.025.000		261.808.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	299.025.000	12	299.025.000	12	261.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				784.815.000		787.815.000		774.458.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	784.815.000	12	787.815.000	12	774.458.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.860.000		237.860.000		352.214.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	237.860.000	6	237.860.000	5	352.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.940.000		66.940.000		84.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	66.940.000	11	66.940.000	11	84.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.300.000		14.300.000		13.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	14.300.000	5	14.300.000	3	13.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		15.000.000		10.500.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.420.000		105.420.000		155.420.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	105.420.000	3	105.420.000	3	155.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.200.000		36.200.000		88.554.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	36.200.000	3	36.200.000	5	88.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	1.999.958.000	100	1.999.958.000	100	1.994.993.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					753.200.000		766.000.000		807.816.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	753.200.000	4	766.000.000	4	807.816.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				753.200.000		766.000.000		807.816.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	753.200.000	12	766.000.000	12	807.816.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.250.000		124.250.000		117.065.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	124.250.000	100	124.250.000	100	117.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		7.410.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.250.000		24.250.000		24.105.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.250.000	4	24.250.000	4	24.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		11.275.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	11.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		4.218.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	300	5.000.000	300	5.000.000	152	4.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		37.821.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	37.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.000.000		8.000.000		7.236.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	8.000.000	3	8.000.000	3	7.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		25.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					859.758.000		846.958.000		790.068.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	859.758.000	4	846.958.000	4	790.068.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000		320.000.000		283.882.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	320.000.000	4	320.000.000	4	283.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				536.758.000		523.958.000		503.186.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	536.758.000	4	523.958.000	4	503.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.750.000		262.750.000		255.044.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	262.750.000	9	262.750.000	10	255.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.750.000		70.750.000		64.570.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	70.750.000	9	70.750.000	9	64.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.000.000		32.000.000		31.058.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	32.000.000	7	32.000.000	7	31.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		49.416.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	6	49.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	2.554.100.000	100	2.593.412.000	100	2.351.652.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.010.000.000		1.010.000.000		800.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.010.000.000	4	1.010.000.000	4	800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.010.000.000		1.010.000.000		800.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.010.000.000	4	1.010.000.000	4	800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.000.000		172.000.000		211.185.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	172.000.000	100	172.000.000	100	211.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.500.000		17.500.000		30.645.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.500.000	4	17.500.000	4	30.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		3.150.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	1	3.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		38.376.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35.000.000	4	35.000.000	4	38.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		43.835.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	43.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		6.528.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.500.000		53.500.000		73.651.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	53.500.000	12	53.500.000	12	73.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	0	3	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		50.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.062.992.000		1.097.641.000		965.421.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.062.992.000	4	1.097.641.000	4	965.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				367.600.000		367.600.000		289.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	367.600.000	12	367.600.000	12	289.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				689.892.000		724.541.000		670.721.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	689.892.000	12	724.541.000	12	670.721.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.108.000		313.771.000		325.046.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	309.108.000	6	313.771.000	6	325.046.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		79.663.000		96.173.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	75.000.000	10	79.663.000	10	96.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		89.265.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	75.000.000	120	75.000.000	120	89.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		25.000.000		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				134.108.000		134.108.000		139.608.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	134.108.000	4	134.108.000	4	139.608.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90.5	84.712.334.000	90.5	84.648.590.000	90.5	83.315.477.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.322.944.000		75.322.944.000		75.179.335.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	75.322.944.000	3	75.322.944.000	4	75.179.335.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.027.944.000		74.027.944.000		74.027.944.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	621	74.027.944.000	621	74.027.944.000	458	74.027.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000		1.250.000.000		1.119.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.119.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000		30.000.000		22.636.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	216	30.000.000	216	30.000.000	216	22.636.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		9.555.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	217	15.000.000	217	15.000.000	217	9.555.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					358.800.000		358.800.000		236.010.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	358.800.000	4	358.800.000	4	236.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250.000.000		250.000.000		192.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	192.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				108.800.000		108.800.000		44.010.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	108.800.000	2	108.800.000	3	44.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		13.984.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	13.984.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		13.984.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	13.984.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.122.114.000		1.122.114.000		899.187.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.122.114.000	100	1.122.114.000	100	899.187.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				74.637.000		74.637.000		71.595.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	74.637.000	4	74.637.000	4	71.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.208.000		28.208.000		35.541.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.208.000	4	28.208.000	4	35.541.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				67.931.000		67.931.000		31.501.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	67.931.000	4	67.931.000	4	31.501.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.980.000		69.980.000		75.314.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	69.980.000	4	69.980.000	4	75.314.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				124.979.000		124.979.000		87.148.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	124.979.000	4	124.979.000	4	87.148.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				64.228.000		64.228.000		41.749.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	64.228.000	4	64.228.000	4	41.749.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				652.531.000		652.531.000		543.671.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	652.531.000	4	652.531.000	4	543.671.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				39.620.000		39.620.000		12.668.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	39.620.000	2	39.620.000	3	12.668.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		86.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	0	4	0	3	86.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	2	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	2	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		86.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	86.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.665.406.000		6.611.662.000		5.387.236.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.665.406.000	4	6.611.662.000	4	5.387.236.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.620.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	4.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.220.300.000		2.220.300.000		1.689.360.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.220.300.000	4	2.220.300.000	4	1.689.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.200.000		111.200.000		105.089.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	111.200.000	4	111.200.000	4	105.089.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.328.906.000		4.275.162.000		3.588.167.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.328.906.000	4	4.275.162.000	4	3.588.167.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.228.070.000		1.218.070.000		1.513.225.000		
						Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	1.228.070.000	50	1.218.070.000	103	1.513.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				427.350.000		427.350.000		536.025.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44	427.350.000	44	427.350.000	58	536.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		10.000.000		19.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	20.000.000	2	10.000.000	2	19.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.720.000		143.720.000		161.350.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	143.720.000	10	143.720.000	20	161.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		60.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				407.000.000		407.000.000		526.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	407.000.000	3	407.000.000	3	526.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		210.650.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	180.000.000	8	180.000.000	20	210.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan								**324.774.000**		**312.318.000**		**158.270.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	2.88	324.774.000	2.88	312.318.000	2.88	158.270.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						324.774.000		312.318.000		158.270.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	324.774.000	94	312.318.000	94	158.270.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					324.774.000		312.318.000		158.270.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	94	324.774.000	94	312.318.000	100	158.270.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				209.526.000		209.526.000		98.575.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	209.526.000	10	209.526.000	10	98.575.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.248.000		102.792.000		59.695.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	115.248.000	4	102.792.000	4	59.695.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data							SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen							SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan status gizi									**503.086.000**		**503.086.000**		**427.985.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	17		17		17		Dinas Kesehatan	
	Menurunnya kasus stunting								**503.086.000**		**503.086.000**		**427.985.000**		
						Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	17	503.086.000	0.15	503.086.000	0.15	427.985.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						503.086.000		503.086.000		427.985.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28.57	15.360.000	28.57	15.360.000	33.33	9.028.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.360.000		15.360.000		9.028.000		
						Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	15.360.000	28.57	15.360.000	33.33	9.028.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15.360.000		15.360.000		9.028.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	15.360.000	4	15.360.000	4	9.028.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	71.42	20.000.000	71.42	20.000.000	62.5	9.999.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		9.999.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	57.14	20.000.000	57.14	20.000.000	87.5	9.999.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		20.000.000		9.999.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	9.999.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28.57	20.000.000	28.57	20.000.000	33.33	11.129.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		11.129.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	71.42	20.000.000	28.57	20.000.000	77.77	11.129.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		20.000.000		11.129.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	11.129.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	42.85	20.000.000	28.57	20.000.000	33.33	16.860.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		16.860.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	20.000.000	42.85	20.000.000	88.88	16.860.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		20.000.000		16.860.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	16.860.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Prevalensi wasting balita	%	6.7	427.726.000	6.7	427.726.000	6.7	380.969.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					427.726.000		427.726.000		380.969.000		
						Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	55	292.220.000	55	292.220.000	55	262.533.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				292.220.000		292.220.000		262.533.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pemantauan Balita Tumbuh Kembang)	Dokumen	4	292.220.000	4	292.220.000	4	262.533.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar	%	92	135.506.000	92	135.506.000	92	118.436.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				135.506.000		135.506.000		118.436.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	135.506.000	4	135.506.000	4	118.436.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									**542.098.122.000**		**502.187.874.000**		**486.868.398.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**0**		**0**		**0**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Dr. Moewardi								**0**		**0**		**0**		
						Net Death Rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi	Permil	45.92	0	55.8	0	55.8	0	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0		0		0		
						Persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi	%	100	0	100	0	100	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan di Rumah Sakit sesuai target	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.04.0002			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah institusi pendidikan klinis yang memiliki MOU dengan RS	Unit	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	5	0	5	0	5	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%	28	0	28	0	28	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian indikator mutunya sesuai target	%	30	0	30	0	30	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rawat Inap yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	5	0	5	0	5	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	6	0	6	0	6	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%	25	0	25	0	25	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target	%	30	0	30	0	30	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Medis Rawat Jalan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	6	0	6	0	6	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	5	0	5	0	5	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang prasarana sarana yang sesuai standar di RSUD Dr. Moewardi	%	33	0	33	0	33	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi yang sesuai standar	%	33	0	33	0	33	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah unit pelayanan penunjang medis diagnostik yang ditingkatkan mutunya sesuai standar	Unit	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit pelayanan penunjang medis terapi yang ditingkatkan mutunya sesuai standar	Unit	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						persentase indikator mutu pelayanan penunjang sarpras medis dan non medis yang sesuai dengan standar RS	%	33	0	33	0	33	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah unit pelayanan penunjang sarpras medis yang ditingkatkan mutunya sesuai standar	Unit	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit pelayanan penunjang sarpras non medis yang ditingkatkan mutunya sesuai standar	Unit	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr. Moewardi	%	90	0	90	0	90	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP					0		0		0		

				Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
						Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi	%	90	0	90	0	90	0		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	50	0	50	0	50	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.moewardi Surakarta	%	60	0	60	0	60	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD Dr. Moewardi	%	90	0	90	0	90	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi	%	90	0	90	0	90	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi	%	60	0	60	0	60	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Prasarana Jaringan Pelayanan RS yang disediakan untuk pelayanan	Paket	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Dr. Moewardi	%	34	0	34	0	34	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah Jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	400	0	400	0	820	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Dr. Moewardi	%	3	0	3	0	3	0	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Moewardi	Orang	4405	0	4405	0	4405	0		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**1.253.600.228.000**		**1.253.600.228.000**		**1.386.037.745.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD Dr. Moewardi								**1.253.600.228.000**		**1.253.600.228.000**		**1.386.037.745.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Moewardi	Angka	91.02	1.253.600.228.000	91.02	1.253.600.228.000	91.02	1.386.037.745.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.253.600.228.000		1.253.600.228.000		1.386.037.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82.2	1.160.400.000.000	82.2	1.160.400.000.000	82.2	1.325.995.193.000	RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1.160.400.000.000		1.160.400.000.000		1.325.995.193.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial RSUD Dr. MOEWARDI	%	100	1.160.400.000.000	100	1.160.400.000.000	100	1.325.995.193.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.160.400.000.000		1.160.400.000.000		1.325.995.193.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	10	1.160.400.000.000	10	1.160.400.000.000	10	1.325.995.193.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan pendapatan RS	%	13.27	0	13.27	0	3.5	0		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Pendapatan BLUD di RS Moewardi	Dokumen	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Dokumen Pengembangan Pendapatan BLUD di RS Moewardi	Dokumen	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	93.200.228.000	100	93.200.228.000	100	60.042.552.000	RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93.200.228.000		93.200.228.000		60.042.552.000		
						persentase ketercapaian tata kelola anggaran,perbendaharaan,dan akuntansi	%	100	93.200.228.000	100	93.200.228.000	100	60.042.552.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				93.200.228.000		93.200.228.000		60.042.552.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1415	93.200.228.000	1415	93.200.228.000	1375	60.042.552.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD Dr. Moewardi								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Moewardi	Angka	3	0	3	0	3	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Dr. Moewardi	%	100	0	100	0	100	0	RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						persentase dokumen perencanaan & evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	0	9	0	9	0		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	0	10	0	10	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	45	0	45	0	45	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**1.253.600.228.000**		**1.253.600.228.000**		**1.386.037.745.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**0**		**0**		**0**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo								**0**		**0**		**0**		
						Net Death Rate (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Permil	29.94	0	30.13	0	30.13	0	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0		0		0		
						Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	0	75	0	75	0	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan alat kesehatan utuk mendukung pelayana unggula dan pelayanan RS di RSUD Margono Soekarjo	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12	0	10	0	10	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayana Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan pelayaan rumah sakit laiya di RSUD Margoo Soekarjo	%	60	0	60	0	60	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Jaringan RS/Ambulance))	Unit	1	0	1	0	1	0		
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat, BHP-BMHP RSUD Margono Soekarjo	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Laboratorium, Radiologi dan Bank Darah)	Paket	1	0	1	0	1	0		
						Persentase peyediaan Sarana di RSUD Margono Soekarjo	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0		0		0		
						Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSUD prof DR.Margono Soekarjo	Paket	1	0	1	0	1	0		
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah Instansi yang memiliki MOU dengan RSUD Margono Soekarjo	Instansi	50	0	50	0	50	0		
		1.02.02.1.04.0002			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah instansi memiliki MOU dengan RS	Unit	5	0	50	0	50	0		OPD Provinsi
						Persentase Penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.04.0002			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Margono Soekarjo	Unit	2	0	2	0	2	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian idikator mutunya sesuai target	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan yang dilakuka pengukuran Idikator Nasional Mutu (INM) Pelayana Kesehatan	Unit	28	0	28	0	28	0		
						Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator capaian mutunya sesuai target	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	9	0	9	0	9	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase unit kerja pelayanan penunjang sarpras medis yang capaian indikator mutunya mencapai target	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah unit kerja pelayanan penunjang sarpras medis yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	0	65	0	65	0	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis pelatihan internal dan eksternal yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal/eksternal meningkat	Orang	10	0	1750	0	1750	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Jumlah jenis pendidikan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	200	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Prof Dr Margono SoekarjoRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	0	50	0	50	0	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Orang	3	0	2000	0	2000	0		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**1.133.338.354.000**		**1.133.338.354.000**		**1.041.873.273.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo								**1.133.338.354.000**		**1.133.338.354.000**		**1.041.873.273.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Angka	86.75	1.133.338.354.000	86.75	1.133.338.354.000	86.75	1.041.873.273.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.133.338.354.000		1.133.338.354.000		1.041.873.273.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	1.074.999.996.000	91	1.074.999.996.000	91	1.013.004.389.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1.074.999.996.000		1.074.999.996.000		1.013.004.389.000		
						Realisasi CRR Parsial RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	%	101	1.074.999.996.000	101	1.074.999.996.000	101	1.013.004.389.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.074.999.996.000		1.074.999.996.000		1.013.004.389.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.074.999.996.000	9	1.074.999.996.000	9	1.013.004.389.000		OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	58.338.358.000	100	58.338.358.000	100	28.868.884.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.338.358.000		58.338.358.000		28.868.884.000		
						jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	100	58.338.358.000	100	58.338.358.000	100	28.868.884.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				58.338.358.000		58.338.358.000		28.868.884.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	825	58.338.358.000	886	58.338.358.000	886	28.868.884.000		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	13	0	13	0	13	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentasi layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	935	0	886	0	0	0		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	12	0	12	0		OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo	Angka	3.13	0	3.13	0	3.13	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	0	100	0	100	0	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	0	6	0	6	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						jumlah unit kerja yang telah terintegrasi dalam pengelolaan IT	Unit	5	0	10	0	10	0		OPD Provinsi; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
JUMLAH									**1.133.338.354.000**		**1.133.338.354.000**		**1.041.873.273.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**70.055.500.000**		**70.055.500.000**		**72.055.500.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH								**70.055.500.000**		**70.055.500.000**		**72.055.500.000**		
						Net Death Rate (NDR) RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Permil	33.1	70.055.500.000	33.1	70.055.500.000	33.1	72.055.500.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						70.000.000.000		70.000.000.000		72.000.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	100	68.888.500.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					70.000.000.000		70.000.000.000		68.888.500.000		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	%	85	0	85	0	85	0		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	850	0	850	0	15	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit	%	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	100	68.888.500.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				70.000.000.000		70.000.000.000		68.888.500.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	70.000.000.000	3	70.000.000.000	3	68.888.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan layanan kesehatan	%	0	0	0	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	0	100	0	100	3.111.500.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		3.111.500.000		
						Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	17	0	17	0	17	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan	%	100	0	100	0	100	3.111.500.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		3.111.500.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	0	6	0	18	3.111.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	86.95	0	86.95	0	86.95	0	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	1020	0	1020	0	1100	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	5.24	55.500.000	5.24	55.500.000	5.24	55.500.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Adhyatma, MPH	Orang	1105	55.500.000	1105	55.500.000	1105	55.500.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3	55.500.000	3	55.500.000	3	55.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**290.250.879.000**		**290.250.879.000**		**292.355.218.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH								**290.250.879.000**		**290.250.879.000**		**292.355.218.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Angka	94.08	290.250.879.000	94.08	290.250.879.000	94.08	292.355.218.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						290.250.879.000		290.250.879.000		292.355.218.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	49.27	190.000.000.000	49.27	190.000.000.000	48.43	214.424.909.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					190.000.000.000		190.000.000.000		214.424.909.000		
						Cost recovery Rate (CRR) Parsial RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	93.42	190.000.000.000	93.42	190.000.000.000	82.31	214.424.909.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				190.000.000.000		190.000.000.000		214.424.909.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	190.000.000.000	6	190.000.000.000	6	214.424.909.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100.250.879.000	100	100.250.879.000	100	77.930.309.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100.250.879.000		100.250.879.000		77.930.309.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	100.250.879.000	1	100.250.879.000	1	77.930.309.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.250.879.000		100.250.879.000		77.930.309.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	846	100.250.879.000	846	100.250.879.000	834	77.930.309.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Angka	3.01	0	3.01	0	3.01	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	0	6	0	6	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**360.306.379.000**		**360.306.379.000**		**364.410.718.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**0**		**0**		**0**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. REHATTA								**0**		**0**		**0**		
						Net Death Rate (NDR) RSUD dr. REHATTA	Permil	10	0	10.8	0	10.8	0	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0		0		0		
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	690	0	690	0	690	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	6	0	6	0	10	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan	%	100	0	100	0	0	0		
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	0	1	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Rawat Inap	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular kusta	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kusta di Rawat Inap	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kusta di Rawat Jalan	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penyediaan layanan kesehatan	%	100	0	100	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	0	12	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. REHATTA	%	40	0	40	0	40	0	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	160	0	160	0	517	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. REHATTA	%	100	0	31	0	31	0	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Rehatta	Orang	3	0	590	0	590	0		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**122.584.704.000**		**122.584.704.000**		**111.065.690.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. REHATTA								**122.584.704.000**		**122.584.704.000**		**111.065.690.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. REHATTA	Angka	90	122.584.704.000	90.01	122.584.704.000	90.01	111.065.690.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						122.584.704.000		122.584.704.000		111.065.690.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	76.028.000.000	52	76.028.000.000	52	72.736.628.000	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					76.028.000.000		76.028.000.000		72.736.628.000		
						CRR Parsial RSUD dr. Rehatta	%	90	76.028.000.000	90	76.028.000.000	90	72.736.628.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				76.028.000.000		76.028.000.000		72.736.628.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	4	76.028.000.000	4	76.028.000.000	4	72.736.628.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	46.556.704.000	100	46.556.704.000	100	38.329.062.000	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.556.704.000		46.556.704.000		38.329.062.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	46.556.704.000	14	46.556.704.000	14	38.329.062.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.556.704.000		46.556.704.000		38.329.062.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	302	46.556.704.000	302	46.556.704.000	296	38.329.062.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD dr. REHATTA								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. REHATTA	Angka	3.13	0	3.1	0	3.1	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. REHATTA	%	100	0	100	0	100	0	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	0	11	0	11	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	0	11	0	11	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									**122.584.704.000**		**122.584.704.000**		**111.065.690.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**55.500.000**		**55.500.000**		**3.055.500.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo								**55.500.000**		**55.500.000**		**3.055.500.000**		
						Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Permil	4.02	55.500.000	4.02	55.500.000	4.02	3.055.500.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0		0		3.000.000.000		
						Persentase pasien jiwa bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	0	0	0	0	0	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	0	0	0	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Rawat Jalan (Rajal)	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi
						Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	0	100	0	100	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.001													
		0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	0	5	0	5	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	0	100	0	100	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan layanan kesehatan	%	100	0	100	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	0	12	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	0	100	0	100	3.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		3.000.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan BHP	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bahan habis pakai, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan dan BMHP	%	100	0	100	0	100	3.000.000.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		3.000.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	0	1	0	1	3.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	86.72	0	86.72	0	86.72	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	437	0	437	0	437	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	55.500.000	10	55.500.000	10	55.500.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS	Orang	765	55.500.000	765	55.500.000	765	55.500.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	55.500.000	4	55.500.000	4	55.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	0	10	0	10	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh RS	Orang	765	0	765	0	765	0		
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**142.537.779.000**		**142.537.779.000**		**136.272.272.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo								**142.537.779.000**		**142.537.779.000**		**136.272.272.000**		
						Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Angka	92.75	142.537.779.000	92.76	142.537.779.000	92.76	136.272.272.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						142.537.779.000		142.537.779.000		136.272.272.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	68.383.000.000	37	68.383.000.000	40	77.145.537.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					68.383.000.000		68.383.000.000		77.145.537.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	93	68.383.000.000	93	68.383.000.000	75	77.145.537.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				68.383.000.000		68.383.000.000		77.145.537.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	68.383.000.000	6	68.383.000.000	6	77.145.537.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	74.154.779.000	100	74.154.779.000	100	59.126.735.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.154.779.000		74.154.779.000		59.126.735.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	74.154.779.000	12	74.154.779.000	12	59.126.735.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.154.779.000		74.154.779.000		59.126.735.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	520	74.154.779.000	520	74.154.779.000	520	59.126.735.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Angka	2.76	0	2.76	0	2.76	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	0	100	0	100	0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	3	0	3	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**142.593.279.000**		**142.593.279.000**		**139.327.772.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**0**		**0**		**9.200.662.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN								**0**		**0**		**9.200.662.000**		
						Net Death Rate (NDR) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Permil	2.98	0	2.98	0	2.98	9.200.662.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0		0		9.200.662.000		
						Persentase pasien bunuh diri di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	0	0	0	0	0	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri	%	0	0	0	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	500	0	500	0	500	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				0		0		0		
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang	60	0	60	0	60	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	3.478.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		3.478.000.000		
						Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS	%	100	0	100	0	100	3.478.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		3.478.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	0	2	0	2	3.478.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0026			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	5.722.662.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		5.722.662.000		
						Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien	%	100	0	100	0	100	5.722.662.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		5.722.662.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	25	0	25	0	25	5.722.662.000		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	60	0	60	0	60	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	200	0	200	0	200	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS	Kegiatan	4	0	4	0	4	0		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan Rumah Sakit	Kegiatan	5	0	5	0	5	0		
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**126.343.716.000**		**126.343.716.000**		**112.157.562.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN								**126.343.716.000**		**126.343.716.000**		**112.157.562.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Angka	90.75	126.343.716.000	90.85	126.343.716.000	90.85	112.157.562.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						126.343.716.000		126.343.716.000		112.157.562.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33.01	56.393.000.000	33.01	56.393.000.000	33.01	56.419.476.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					56.393.000.000		56.393.000.000		56.419.476.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. Arif Zainudin	%	95.3	56.393.000.000	95.3	56.393.000.000	95.3	56.419.476.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				56.393.000.000		56.393.000.000		56.419.476.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	56.393.000.000	6	56.393.000.000	6	56.419.476.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	69.950.716.000	100	69.950.716.000	100	55.738.086.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.950.716.000		69.950.716.000		55.738.086.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	69.950.716.000	5	69.950.716.000	5	55.738.086.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.950.716.000		69.950.716.000		55.738.086.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	431	69.950.716.000	431	69.950.716.000	431	55.738.086.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	25	0	25	0	25	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Angka	3.05	0	3	0	3	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	96.94	0	100	0	100	0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	0	7	0	7	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	5	0	5	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**126.343.716.000**		**126.343.716.000**		**121.358.224.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**21.215.394.000**		**21.215.394.000**		**21.215.394.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi								**21.215.394.000**		**21.215.394.000**		**21.215.394.000**		
						Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Permil	13.05	21.215.394.000	13.05	21.215.394.000	13.05	21.215.394.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.215.394.000		21.215.394.000		21.215.394.000		
						Persentase Pasien Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	0	0	0	0	0	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	0	0	0	0	0	0		
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rawat Jalan	Dokumen	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	0	100	0	100	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	500	0	500	0	500	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	0	10	0	10	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	20.900.000.000	100	20.900.000.000	100	18.229.897.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.900.000.000		20.900.000.000		18.229.897.000		
						Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan	%	100	20.900.000.000	100	20.900.000.000	100	18.229.897.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				20.900.000.000		20.900.000.000		18.229.897.000		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	6	20.900.000.000	6	20.900.000.000	6	18.229.897.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	315.394.000	100	315.394.000	100	2.985.497.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					315.394.000		315.394.000		2.985.497.000		
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman	%	100	0	100	0	100	0		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		0		

						Jumlah bahan habis pakai dan makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket	2	0	2	0	2	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP	%	100	315.394.000	100	315.394.000	100	2.985.497.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				315.394.000		315.394.000		2.985.497.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	315.394.000	2	315.394.000	2	2.985.497.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	98.5	0	98.5	0	98.5	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	Kegiatan	11	0	11	0	20	0		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	489	0	489	0	463	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		0		0		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	4.44	0	4.44	0	4.44	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh rumah sakit	Orang	1175	0	1175	0	1175	0		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	7	0	7	0	7	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	5.58	0	5.58	0	5.58	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah pemerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh rumah sakit	Orang	14380	0	14380	0	14380	0		
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	48	0	48	0	48	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**116.631.305.000**		**116.631.305.000**		**116.056.006.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi								**116.631.305.000**		**116.631.305.000**		**116.056.006.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Angka	91.2	116.631.305.000	91.1	116.631.305.000	91.1	116.056.006.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						116.631.305.000		116.631.305.000		116.056.006.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40.88	62.740.000.000	40.88	62.740.000.000	44.96	74.431.574.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					62.740.000.000		62.740.000.000		74.431.574.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	89.64	62.740.000.000	89.64	62.740.000.000	89.74	74.431.574.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				62.740.000.000		62.740.000.000		74.431.574.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	62.740.000.000	1	62.740.000.000	1	74.431.574.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	53.891.305.000	100	53.891.305.000	100	41.624.432.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.891.305.000		53.891.305.000		41.624.432.000		
						Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	12	53.891.305.000	12	53.891.305.000	12	41.624.432.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.891.305.000		53.891.305.000		41.624.432.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	352	53.891.305.000	352	53.891.305.000	349	41.624.432.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	0	12	0	12	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	15	0	15	0	15	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai Standar Layanan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi								**0**		**0**		**0**		
						Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. RM Soejarwadi	Angka	3	0	3	0	3	0	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0		0		0		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	0	100	0	100	0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan	%	100	0	100	0	100	0		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	0	10	0	10	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	0	14	0	14	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									**137.846.699.000**		**137.846.699.000**		**137.271.400.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kesehatan									**20.698.799.000**		**20.662.673.000**		**35.113.475.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.09		75.46		75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								**20.698.799.000**		**20.662.673.000**		**35.113.475.000**		
						Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Permil	33.1	20.698.799.000	33.1	20.662.673.000	33.1	35.113.475.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						19.448.799.000		19.412.673.000		34.134.821.000		
						Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	2.648.584.000	100	2.648.584.000	100	1.711.492.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.248.584.000		2.248.584.000		1.311.492.000		
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		2.248.584.000		2.248.584.000		1.311.492.000		
		1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	4	0		
		1.02.02.1.02.0031			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.248.584.000		2.248.584.000		1.311.492.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	12	2.248.584.000	12	2.248.584.000	12	1.311.492.000		
		1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSMD Soepradjo Roestam	Paket		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000		
						Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	5.999.029.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					5.000.000.000		5.000.000.000		5.175.000.000		
						Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan	%	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.175.000.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				5.000.000.000		5.000.000.000		5.175.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.175.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000		1.000.000.000		824.029.000		
						Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target	%	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	824.029.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.000.000.000		1.000.000.000		824.029.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	824.029.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	9.300.215.000	60	9.264.089.000	60	24.840.970.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					9.300.215.000		9.264.089.000		24.840.970.000		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan"	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	130	500.000.000	130	500.000.000	130	500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS	%	100	7.800.215.000	100	7.764.089.000	100	21.628.474.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				7.800.215.000		7.764.089.000		21.628.474.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	7.800.215.000	2	7.764.089.000	2	21.628.474.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.712.496.000		
		1.02.02.1.01.0016			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.000.000.000		1.000.000.000		2.712.496.000		
						Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000	160	1.000.000.000	160	2.712.496.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	1.583.330.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000		1.500.000.000		1.583.330.000		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan	%	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.583.330.000		
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.083.330.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.083.330.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0009			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0026			Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						650.000.000		650.000.000		407.953.000		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	30	650.000.000	30	650.000.000	30	407.953.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					650.000.000		650.000.000		407.953.000		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	650.000.000	5	650.000.000	5	407.953.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				650.000.000		650.000.000		407.953.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	40	650.000.000	40	650.000.000	40	407.953.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						600.000.000		600.000.000		570.701.000		
						Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	600.000.000	100	600.000.000	100	570.701.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					600.000.000		600.000.000		570.701.000		
						Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS	Kegiatan	4	600.000.000	4	600.000.000	4	570.701.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				600.000.000		600.000.000		570.701.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	600.000.000	4	600.000.000	4	570.701.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									**30.000.000.000**		**30.036.126.000**		**29.871.956.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								**29.980.691.000**		**30.016.817.000**		**29.855.392.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Angka	85.5	29.980.691.000	85.5	30.016.817.000	85.5	29.855.392.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.980.691.000		30.016.817.000		29.855.392.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	29.980.691.000	100	30.016.817.000	100	29.855.392.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.717.120.000		22.717.120.000		20.864.792.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	22.717.120.000	4	22.717.120.000	4	20.864.792.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.000.000.000		20.000.000.000		17.171.647.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	160	20.000.000.000	160	20.000.000.000	160	17.171.647.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.707.120.000		2.707.120.000		3.684.240.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	2.707.120.000	4	2.707.120.000	4	3.684.240.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		10.000.000		8.905.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.905.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		18.000.000		0		
						Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	18.000.000	4	18.000.000	4	0		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		18.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18.000.000	1	18.000.000	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		17.588.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	17.588.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		17.588.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	20.000.000	10	20.000.000	10	17.588.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.400.000.000		1.400.000.000		1.102.148.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.102.148.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		87.618.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	87.618.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		87.618.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	87.618.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		37.618.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	37.618.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		92.323.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	92.323.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		125.236.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	150.000.000	4	150.000.000	4	125.236.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000		400.000.000		216.909.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	400.000.000	4	400.000.000	4	216.909.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		454.826.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	500.000.000	4	500.000.000	4	454.826.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.020.000.000		1.020.000.000		951.401.000		
						Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	1.020.000.000	4	1.020.000.000	4	951.401.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				320.000.000		320.000.000		296.887.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	320.000.000	4	320.000.000	4	296.887.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		500.000.000		458.642.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	500.000.000	10	500.000.000	10	458.642.000		
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		95.872.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	100.000.000	12	100.000.000	12	95.872.000		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.105.571.000		4.141.697.000		4.956.125.000		
						Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Laporan	4	4.105.571.000	4	4.141.697.000	4	4.956.125.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.571.000		5.571.000		5.055.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.571.000	4	5.571.000	4	5.055.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.070.000.000		2.070.000.000		2.070.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.070.000.000	12	2.070.000.000	12	2.070.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		19.186.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	19.186.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.000.000.000		2.036.126.000		2.861.884.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	12	2.036.126.000	12	2.861.884.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					700.000.000		700.000.000		1.963.338.000		
						Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	700.000.000	10	700.000.000	10	1.963.338.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		206.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	200.000.000	12	200.000.000	12	206.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		733.044.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	200.000.000	4	200.000.000	4	733.044.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		824.294.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	824.294.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					0		0		0		
						CRR Parsial Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		0		0		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								**19.309.000**		**19.309.000**		**16.564.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Angka	2.75	19.309.000	2.75	19.309.000	2.75	16.564.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.309.000		19.309.000		16.564.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	19.309.000	100	19.309.000	100	16.564.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.309.000		19.309.000		16.564.000		
						Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan	%	100	19.309.000	100	19.309.000	100	16.564.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.309.000		9.309.000		7.818.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	9.309.000	4	9.309.000	4	7.818.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		8.746.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.746.000		
JUMLAH									**50.698.799.000**		**50.698.799.000**		**64.985.431.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									**186.731.430.000**		**173.784.355.000**		**169.370.924.000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	82.6		80.02		80.02		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								**185.610.430.000**		**172.663.355.000**		**168.653.406.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	92.35	185.610.430.000	88.8	172.663.355.000	88.8	168.653.406.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						185.610.430.000		172.663.355.000		168.653.406.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	953.479.000	100	953.479.000	100	901.002.000	BALAI JASA KONSTRUKSI	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.674.000		145.674.000		115.656.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.674.000	100	145.674.000	100	115.656.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.300.000		9.300.000		8.150.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.300.000	1	9.300.000	1	8.150.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.600.000		38.600.000		27.343.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.600.000	1	38.600.000	1	27.343.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.300.000		9.300.000		7.771.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.300.000	1	9.300.000	1	7.771.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.900.000		2.900.000		2.900.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.900.000	2	2.900.000	2	2.900.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		3.500.000		1.792.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	500	3.500.000	500	3.500.000	375	1.792.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.938.000		55.938.000		42.190.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	55.938.000	12	55.938.000	12	42.190.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				26.136.000		26.136.000		25.510.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	26.136.000	1	26.136.000	1	25.510.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					625.805.000		625.805.000		617.130.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	625.805.000	26	625.805.000	26	617.130.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		1.600.000		1.480.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.480.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		94.000.000		91.295.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	94.000.000	12	94.000.000	12	91.295.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				530.205.000		530.205.000		524.355.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	530.205.000	2	530.205.000	2	524.355.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.000.000		182.000.000		168.216.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	51	182.000.000	51	182.000.000	51	168.216.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		55.000.000		41.908.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	55.000.000	2	55.000.000	2	41.908.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		99.308.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	99.308.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	27.000.000	34	27.000.000	34	27.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	2.265.017.000	100	2.265.017.000	100	2.062.011.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					89.000.000		89.000.000		53.794.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	14	89.000.000	14	89.000.000	14	53.794.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89.000.000		89.000.000		53.794.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	89.000.000	14	89.000.000	14	53.794.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					296.001.000		296.001.000		246.140.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Laporan	100	296.001.000	100	296.001.000	100	246.140.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.500.000		15.500.000		11.855.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.500.000	1	15.500.000	1	11.855.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.500.000		63.500.000		56.097.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	63.500.000	1	63.500.000	1	56.097.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		18.000.000		15.368.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.000.000	1	18.000.000	1	15.368.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.000.000		53.000.000		41.916.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	53.000.000	2	53.000.000	2	41.916.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		7.000.000		4.870.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	7.000.000	672	7.000.000	672	4.870.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118.145.000		118.145.000		95.178.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	118.145.000	12	118.145.000	12	95.178.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.856.000		20.856.000		20.856.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20.856.000	1	20.856.000	1	20.856.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.292.016.000		1.292.016.000		1.225.955.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.292.016.000	26	1.292.016.000	26	1.225.955.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		7.009.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	7.009.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				207.000.000		207.000.000		163.330.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	207.000.000	12	207.000.000	12	163.330.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.077.016.000		1.077.016.000		1.055.616.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.077.016.000	4	1.077.016.000	4	1.055.616.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.000.000		588.000.000		536.122.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	216	588.000.000	216	588.000.000	216	536.122.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.000.000		198.000.000		173.249.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	198.000.000	35	198.000.000	35	173.249.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		290.080.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	3	300.000.000	3	290.080.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		90.000.000		72.793.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	180	90.000.000	180	90.000.000	180	72.793.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	1.855.914.000	100	1.855.914.000	100	1.543.778.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					34.790.000		34.790.000		36.210.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	7	34.790.000	7	34.790.000	7	36.210.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				34.790.000		34.790.000		36.210.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	7	34.790.000	7	34.790.000	7	36.210.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					383.528.000		383.528.000		274.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	383.528.000	100	383.528.000	100	274.050.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		16.169.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.169.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		37.072.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	37.072.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		14.726.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	14.726.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		34.484.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	34.484.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		3.438.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	702	10.000.000	702	10.000.000	702	3.438.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		150.253.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	150.253.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.528.000		18.528.000		17.908.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.528.000	1	18.528.000	1	17.908.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					725.626.000		725.626.000		718.396.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	725.626.000	26	725.626.000	26	718.396.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		7.500.000		10.266.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	10.266.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		125.000.000		115.004.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.000.000	12	125.000.000	12	115.004.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				593.126.000		593.126.000		593.126.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	593.126.000	2	593.126.000	2	593.126.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					711.970.000		711.970.000		515.122.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	62	711.970.000	62	711.970.000	62	515.122.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				230.000.000		230.000.000		230.005.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	230.000.000	11	230.000.000	11	230.005.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				421.970.000		421.970.000		238.415.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	421.970.000	3	421.970.000	3	238.415.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		46.702.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	48	60.000.000	48	60.000.000	48	46.702.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	1.658.213.000	100	1.658.213.000	100	1.504.676.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		125.000.000		84.869.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	25	125.000.000	25	125.000.000	25	84.869.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		125.000.000		84.869.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	25	125.000.000	25	125.000.000	25	84.869.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					300.711.000		300.711.000		175.626.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	300.711.000	100	300.711.000	100	175.626.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		24.000.000		16.880.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	1	24.000.000	1	16.880.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		33.656.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	33.656.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		24.000.000		13.418.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	1	24.000.000	1	13.418.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		22.000.000		9.027.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	2	9.027.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		3.500.000		1.844.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	3.500.000	720	3.500.000	50	1.844.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.353.000		148.353.000		87.275.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	148.353.000	12	148.353.000	12	87.275.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.858.000		18.858.000		13.526.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.858.000	1	18.858.000	1	13.526.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					792.502.000		792.502.000		790.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	792.502.000	26	792.502.000	26	790.740.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		2.238.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	2.238.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	155.000.000	12	155.000.000	12	155.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				633.502.000		633.502.000		633.502.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	633.502.000	2	633.502.000	2	633.502.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440.000.000		440.000.000		453.441.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	440.000.000	73	440.000.000	73	453.441.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		115.791.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	100.000.000	7	100.000.000	7	115.791.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		37.650.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	40.000.000	63	40.000.000	63	37.650.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	2.576.618.000	100	2.576.618.000	100	2.393.970.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					124.800.000		124.800.000		119.137.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	20	124.800.000	20	124.800.000	20	119.137.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				124.800.000		124.800.000		119.137.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	124.800.000	20	124.800.000	20	119.137.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					327.979.000		327.979.000		230.304.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	327.979.000	100	327.979.000	100	230.304.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.950.000		15.950.000		13.975.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.950.000	1	15.950.000	1	13.975.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.100.000		67.100.000		58.791.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.100.000	1	67.100.000	1	58.791.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.800.000		19.800.000		16.531.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.800.000	1	19.800.000	1	16.531.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000		55.000.000		42.420.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	55.000.000	2	55.000.000	2	42.420.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.200.000		2.200.000		1.680.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	336	2.200.000	336	2.200.000	336	1.680.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.575.000		149.575.000		79.173.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	149.575.000	12	149.575.000	12	79.173.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.354.000		18.354.000		17.734.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.354.000	1	18.354.000	1	17.734.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.533.479.000		1.533.479.000		1.478.613.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.533.479.000	26	1.533.479.000	26	1.478.613.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.600.000		6.600.000		5.782.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.600.000	12	6.600.000	12	5.782.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				366.200.000		366.200.000		358.144.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	366.200.000	12	366.200.000	12	358.144.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.160.679.000		1.160.679.000		1.114.687.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.160.679.000	4	1.160.679.000	4	1.114.687.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.360.000		590.360.000		565.916.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	590.360.000	73	590.360.000	73	565.916.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				196.613.000		196.613.000		174.863.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	196.613.000	31	196.613.000	31	174.863.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.747.000		93.747.000		91.053.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	93.747.000	38	93.747.000	38	91.053.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	1.513.461.000	100	1.513.461.000	100	1.475.784.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		59.260.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		60.000.000		60.000.000		59.260.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		60.000.000		59.260.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	60.000.000	6	60.000.000	6	59.260.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.348.000		220.348.000		191.843.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	220.348.000	100	220.348.000	100	191.843.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		11.000.000		9.638.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	9.638.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.000.000		73.000.000		63.345.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	73.000.000	1	73.000.000	1	63.345.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.698.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		35.000.000		29.221.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	2	35.000.000	2	29.221.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000		6.000.000		4.514.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	384	6.000.000	384	6.000.000	384	4.514.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.212.000		49.212.000		43.274.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	49.212.000	12	49.212.000	12	43.274.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				26.136.000		26.136.000		25.153.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	26.136.000	1	26.136.000	1	25.153.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					743.113.000		743.113.000		732.284.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	743.113.000	26	743.113.000	26	732.284.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		9.000.000		7.885.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	7.885.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.000.000		190.000.000		190.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				544.113.000		544.113.000		534.399.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	544.113.000	2	544.113.000	2	534.399.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					490.000.000		490.000.000		492.397.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	64	490.000.000	64	490.000.000	64	492.397.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000		180.000.000		189.714.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	180.000.000	6	180.000.000	6	189.714.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		52.683.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	57	60.000.000	57	60.000.000	57	52.683.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	1.344.439.000	100	1.344.439.000	100	1.178.146.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					75.000.000		75.000.000		65.322.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	5	75.000.000	5	75.000.000	5	65.322.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		75.000.000		65.322.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	75.000.000	5	75.000.000	5	65.322.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.294.000		195.294.000		130.225.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	195.294.000	100	195.294.000	100	130.225.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.150.000		5.150.000		3.165.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.150.000	1	5.150.000	1	3.165.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.290.000		44.290.000		23.829.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.290.000	1	44.290.000	1	23.829.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.240.000		8.240.000		8.132.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	8.240.000	1	8.240.000	1	8.132.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.600.000		20.600.000		10.031.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.600.000	2	20.600.000	2	10.031.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		3.500.000		2.520.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	3.500.000	672	3.500.000	672	2.520.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.110.000		94.110.000		63.879.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	94.110.000	12	94.110.000	12	63.879.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.404.000		19.404.000		18.669.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	19.404.000	1	19.404.000	1	18.669.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					569.795.000		569.795.000		566.295.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	569.795.000	26	569.795.000	26	566.295.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	2.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.145.000		125.145.000		125.145.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.145.000	12	125.145.000	12	125.145.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.650.000		438.650.000		438.650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	438.650.000	2	438.650.000	2	438.650.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					504.350.000		504.350.000		416.304.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	504.350.000	73	504.350.000	73	416.304.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.850.000		200.850.000		134.728.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	200.850.000	17	200.850.000	17	134.728.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.500.000		53.500.000		31.576.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	53.500.000	50	53.500.000	50	31.576.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	2.882.801.000	100	2.882.801.000	100	2.577.355.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					185.000.000		185.000.000		135.957.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	185.000.000	35	185.000.000	35	135.957.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				185.000.000		185.000.000		135.957.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	35	185.000.000	35	185.000.000	35	135.957.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.106.000		421.106.000		271.726.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	421.106.000	100	421.106.000	100	271.726.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.425.000		17.425.000		13.516.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.425.000	1	17.425.000	1	13.516.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.945.000		72.945.000		56.223.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.945.000	1	72.945.000	1	56.223.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.218.000		30.218.000		25.229.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.218.000	1	30.218.000	1	25.229.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				57.945.000		57.945.000		32.848.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	57.945.000	2	57.945.000	2	32.848.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		1.921.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1008	5.000.000	1008	5.000.000	1008	1.921.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218.703.000		218.703.000		123.939.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	218.703.000	12	218.703.000	12	123.939.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.870.000		18.870.000		18.050.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.870.000	1	18.870.000	1	18.050.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.228.130.000		1.228.130.000		1.221.768.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.228.130.000	26	1.228.130.000	26	1.221.768.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.108.000		12.108.000		5.746.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.108.000	12	12.108.000	12	5.746.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.200.000		230.200.000		230.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	230.200.000	12	230.200.000	12	230.200.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				985.822.000		985.822.000		985.822.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	985.822.000	2	985.822.000	2	985.822.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.048.565.000		1.048.565.000		947.904.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	1.048.565.000	88	1.048.565.000	88	947.904.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.675.000		278.675.000		210.348.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	278.675.000	13	278.675.000	13	210.348.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.890.000		69.890.000		37.556.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	69.890.000	71	69.890.000	71	37.556.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	1.356.377.000	100	1.356.377.000	100	1.114.662.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					47.000.000		47.000.000		39.976.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	9	47.000.000	9	47.000.000	9	39.976.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				47.000.000		47.000.000		39.976.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	9	47.000.000	9	47.000.000	9	39.976.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					265.613.000		265.613.000		145.355.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	265.613.000	100	265.613.000	100	145.355.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000		17.000.000		13.378.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	1	17.000.000	1	13.378.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		28.313.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	28.313.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.000.000		14.000.000		13.648.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000	1	13.648.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.000.000		39.000.000		20.068.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	39.000.000	2	39.000.000	2	20.068.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		1.450.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	1.450.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134.465.000		134.465.000		50.575.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	134.465.000	12	134.465.000	12	50.575.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.648.000		18.648.000		17.923.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.648.000	1	18.648.000	1	17.923.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					579.538.000		579.538.000		578.946.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	579.538.000	26	579.538.000	26	578.946.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.340.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.340.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.700.000		84.700.000		84.268.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	84.700.000	12	84.700.000	12	84.268.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.338.000		492.338.000		492.338.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	492.338.000	2	492.338.000	2	492.338.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					464.226.000		464.226.000		350.385.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	464.226.000	37	464.226.000	37	350.385.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				182.226.000		182.226.000		175.728.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	182.226.000	8	182.226.000	14	175.728.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		151.900.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	2	250.000.000	2	151.900.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.000.000		32.000.000		22.757.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	32.000.000	27	32.000.000	27	22.757.000	Kasubag Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	1.974.164.000	100	1.974.164.000	100	1.837.207.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					235.653.000		235.653.000		173.742.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	235.653.000	100	235.653.000	100	173.742.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.250.000		24.250.000		19.548.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.250.000	1	24.250.000	1	19.548.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.982.000		48.982.000		34.975.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.982.000	1	48.982.000	1	34.975.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		15.867.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	15.867.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.190.000		10.190.000		7.407.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.190.000	2	10.190.000	2	7.407.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		1.875.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	1.875.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.161.000		103.161.000		73.115.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	103.161.000	12	103.161.000	12	73.115.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				21.570.000		21.570.000		20.955.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	21.570.000	1	21.570.000	1	20.955.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.308.956.000		1.308.956.000		1.269.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.308.956.000	26	1.308.956.000	26	1.269.200.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	1.300.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212.220.000		212.220.000		180.180.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	212.220.000	12	212.220.000	12	180.180.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.094.736.000		1.094.736.000		1.087.720.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.094.736.000	2	1.094.736.000	2	1.087.720.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					429.555.000		429.555.000		394.265.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	429.555.000	72	429.555.000	72	394.265.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.100.000		152.100.000		125.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	152.100.000	10	152.100.000	10	125.800.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		209.110.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	2	209.110.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.455.000		77.455.000		59.355.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	59	77.455.000	59	77.455.000	59	59.355.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	715.406.000	100	715.406.000	100	684.240.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.697.000		87.697.000		69.679.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	87.697.000	100	87.697.000	100	69.679.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.917.000		18.917.000		16.984.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.917.000	1	18.917.000	1	16.984.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.480.000		8.480.000		5.205.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	8.480.000	2	8.480.000	2	5.205.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.100.000		2.100.000		1.050.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.100.000	12	2.100.000	12	1.050.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		6.600.000		5.280.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	6.600.000	5	6.600.000	5	5.280.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.600.000		51.600.000		41.160.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	51.600.000	12	51.600.000	12	41.160.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.749.000		473.749.000		472.313.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	473.749.000	36	473.749.000	36	472.313.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				850.000		850.000		740.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	850.000	12	850.000	12	740.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.071.000		190.071.000		188.745.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.071.000	12	190.071.000	12	188.745.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.828.000		282.828.000		282.828.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	282.828.000	12	282.828.000	12	282.828.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.960.000		153.960.000		142.248.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	153.960.000	72	153.960.000	72	142.248.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.714.000		37.714.000		37.714.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	37.714.000	21	37.714.000	21	37.714.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				63.000.000		63.000.000		62.280.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	63.000.000	2	63.000.000	2	62.280.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.246.000		53.246.000		42.254.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	49	53.246.000	49	53.246.000	49	42.254.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	1.776.259.000	100	1.776.259.000	100	1.714.482.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.233.000		111.574.000		90.964.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	119.233.000	100	111.574.000	100	90.964.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.944.000		26.285.000		24.461.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	33.944.000	2	26.285.000	2	24.461.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.649.000		18.649.000		15.515.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18.649.000	4	18.649.000	4	15.515.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.900.000		10.900.000		9.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.900.000	4	10.900.000	4	9.100.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.740.000		55.740.000		41.888.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	55.740.000	12	55.740.000	12	41.888.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.071.275.000		1.086.934.000		1.027.061.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.071.275.000	12	1.086.934.000	12	1.027.061.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.190.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.190.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				383.510.000		446.312.000		386.749.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	383.510.000	4	446.312.000	4	386.749.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				685.265.000		638.122.000		638.122.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	685.265.000	4	638.122.000	4	638.122.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					585.751.000		577.751.000		596.457.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	585.751.000	72	577.751.000	72	596.457.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				194.406.000		206.406.000		198.051.000		

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	194.406.000	56	206.406.000	56	198.051.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000		200.000.000		193.420.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	220.000.000	4	200.000.000	4	193.420.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				171.345.000		171.345.000		204.986.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	171.345.000	12	171.345.000	12	204.986.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	990.873.000	100	990.873.000	100	965.392.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.234.000		64.234.000		68.757.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	64.234.000	100	64.234.000	100	68.757.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.234.000		15.234.000		13.259.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.234.000	1	15.234.000	1	13.259.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	16.698.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		1.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.500.000	10	2.500.000	10	1.500.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		9.000.000		5.940.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.000.000	4	9.000.000	4	5.940.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.500.000		17.500.000		31.360.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	17.500.000	12	17.500.000	12	31.360.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					664.900.000		664.900.000		619.438.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	664.900.000	12	664.900.000	12	619.438.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.000.000		301.000.000		256.720.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301.000.000	12	301.000.000	12	256.720.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				362.700.000		362.700.000		361.518.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	362.700.000	2	362.700.000	2	361.518.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.739.000		261.739.000		277.197.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	74	261.739.000	74	261.739.000	74	277.197.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.999.000		108.999.000		104.514.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	108.999.000	29	108.999.000	29	104.514.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.740.000		62.740.000		82.683.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	62.740.000	44	62.740.000	44	82.683.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	1.576.684.000	100	1.576.684.000	100	1.529.048.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.512.000		75.512.000		65.982.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	75.512.000	100	75.512.000	100	65.982.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.981.000		14.981.000		14.314.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.981.000	2	14.981.000	2	14.314.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.555.000		11.555.000		9.647.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11.555.000	4	11.555.000	4	9.647.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				970.000		970.000		549.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	970.000	96	970.000	96	549.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.250.000		6.250.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.250.000	4	6.250.000	4	4.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.756.000		41.756.000		37.472.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.756.000	4	41.756.000	4	37.472.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.140.683.000		1.140.683.000		1.078.192.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.140.683.000	26	1.140.683.000	26	1.078.192.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.328.000		1.328.000		1.163.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.328.000	12	1.328.000	12	1.163.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				646.788.000		618.853.000		570.405.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	646.788.000	12	618.853.000	12	570.405.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.567.000		520.502.000		506.624.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	492.567.000	2	520.502.000	2	506.624.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.489.000		360.489.000		384.874.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	360.489.000	88	360.489.000	88	384.874.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.700.000		101.700.000		92.362.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	101.700.000	50	101.700.000	50	92.362.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		101.129.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	80.000.000	6	80.000.000	6	101.129.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.789.000		178.789.000		191.383.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	178.789.000	34	178.789.000	34	191.383.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	162.170.725.000	100	149.223.650.000	100	147.171.653.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					137.626.945.000		124.679.870.000		124.476.180.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	59	137.626.945.000	59	124.679.870.000	59	124.476.180.000	Sub Bagian Keuangan	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				134.578.493.000		121.631.418.000		121.631.418.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	942	134.578.493.000	942	121.631.418.000	942	121.631.418.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.435.280.000		2.435.280.000		2.435.280.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	2.435.280.000	26	2.435.280.000	26	2.435.280.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				613.172.000		613.172.000		409.482.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	613.172.000	19	613.172.000	19	409.482.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					771.850.000		771.850.000		771.850.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	771.850.000	2	771.850.000	2	771.850.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				771.850.000		771.850.000		771.850.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	771.850.000	2	771.850.000	2	771.850.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.169.000		300.169.000		185.852.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	300.169.000	100	300.169.000	100	185.852.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				56.700.000		56.700.000		56.700.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	56.700.000	1	56.700.000	1	56.700.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				243.469.000		243.469.000		129.152.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	846	243.469.000	846	243.469.000	846	129.152.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.992.931.000		3.017.931.000		2.404.109.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.992.931.000	100	3.017.931.000	100	2.404.109.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				116.324.000		116.324.000		101.921.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	116.324.000	1	116.324.000	1	101.921.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		125.000.000		109.008.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	125.000.000	1	109.008.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				583.290.000		583.290.000		486.995.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	583.290.000	1	583.290.000	1	486.995.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		64.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	64.800.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				30.250.000		30.250.000		4.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2450	30.250.000	2450	30.250.000	250	4.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.503.568.000		1.503.568.000		1.171.433.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.503.568.000	12	1.503.568.000	12	1.171.433.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		150.000.000		143.705.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	143.705.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				429.499.000		429.499.000		322.247.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	429.499.000	1	429.499.000	1	322.247.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.577.473.000		1.090.369.000		916.476.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	82	1.577.473.000	82	1.090.369.000	60	916.476.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.577.473.000		1.090.369.000		916.476.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82	1.577.473.000	82	1.090.369.000	60	916.476.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.978.314.000		14.840.418.000		14.647.309.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	55	14.978.314.000	55	14.840.418.000	55	14.647.309.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		9.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	9.800.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		1.763.397.000		1.497.197.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	12	1.763.397.000	12	1.497.197.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.148.314.000		13.047.021.000		13.140.312.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	31	13.148.314.000	31	13.047.021.000	28	13.140.312.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.923.043.000		4.523.043.000		3.769.877.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	712	3.923.043.000	712	4.523.043.000	712	3.769.877.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.712.897.000		1.912.897.000		1.435.897.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	1.712.897.000	64	1.912.897.000	64	1.435.897.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				999.600.000		1.399.600.000		1.274.305.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	999.600.000	6	1.399.600.000	6	1.274.305.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.210.546.000		1.210.546.000		1.059.675.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	642	1.210.546.000	642	1.210.546.000	641	1.059.675.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								**1.121.000.000**		**1.121.000.000**		**717.518.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	3.05	1.121.000.000	3.05	1.121.000.000	3.05	717.518.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.121.000.000		1.121.000.000		717.518.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	1.121.000.000	100	1.121.000.000	100	717.518.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.121.000.000		1.121.000.000		717.518.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.121.000.000	100	1.121.000.000	100	717.518.000	Sub Bagian Program	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				571.000.000		571.000.000		352.497.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23	571.000.000	23	571.000.000	23	352.497.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				450.000.000		450.000.000		299.983.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	45	450.000.000	45	450.000.000	45	299.983.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		43.631.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	140	50.000.000	140	50.000.000	140	43.631.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		21.407.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	21.407.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)									**102.812.990.000**		**130.760.065.000**		**136.720.474.000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	43.95		43.95		41.16		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	58.58		58.58		58.58		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air	%	67.76		67.76		67.42		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman								**37.577.660.000**		**37.577.660.000**		**41.549.198.000**		
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	41.2	23.013.309.000	41.2	23.013.309.000	36.6	27.058.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						23.013.309.000		23.013.309.000		27.058.350.000		
						Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	14.954.847.000	100	14.971.347.000	100	14.968.592.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					14.954.847.000		14.971.347.000		14.968.592.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik)	Liter/Detik	12	14.954.847.000	12	14.971.347.000	12	14.968.592.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				13.599.672.000		13.516.172.000		13.515.219.000		
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	12	13.599.672.000	12	13.516.172.000	12	13.515.219.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
		1.03.03.1.01.0025			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				1.355.175.000		1.455.175.000		1.453.373.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	9	1.355.175.000	9	1.455.175.000	9	1.453.373.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31.02	7.808.462.000	31.02	7.791.962.000	31.02	11.865.965.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					7.808.462.000		7.791.962.000		11.865.965.000		
						Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga)	Sambungan Rumah (SR)	109004	7.808.462.000	109004	7.791.962.000	109004	11.865.965.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0014			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				7.808.462.000		7.791.962.000		11.865.965.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/ Kota	35	30.891.000	35	30.841.000	35	38.803.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Perdesaan	Kabupaten/ Kota	7	168.075.000	7	198.959.000	7	190.959.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)	Lokasi	12	7.609.496.000	12	7.562.162.000	12	11.636.203.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
						Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42.6	250.000.000	42.6	250.000.000	36	223.793.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		223.793.000		
						Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional	Sambungan Rumah (SR)	154181	250.000.000	154181	250.000.000	154181	223.793.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0020			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				250.000.000		250.000.000		223.793.000		
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	4	250.000.000	4	250.000.000	4	223.793.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17.83	14.564.351.000	17.83	14.564.351.000	14.08	14.490.848.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						11.770.900.000		11.770.900.000		11.759.145.000		
						Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	11.770.900.000	100	11.770.900.000	100	11.759.145.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.04.1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					11.770.900.000		11.770.900.000		11.759.145.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)	Unit	6	11.770.900.000	6	11.770.900.000	6	11.759.145.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		1.03.04.1.01.0013			Pembangunan TPA/TPST/SPA				11.325.900.000		11.214.900.000		11.205.145.000		
						Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun	Ton/hari	26	11.325.900.000	26	11.214.900.000	26	11.205.145.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.04.1.01.0016			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				445.000.000		556.000.000		554.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	3	445.000.000	3	556.000.000	4	554.000.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun (Unit)	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		1.03.04.1.01.0013			Pembangunan TPA/TPST/SPA				0		0		0		
						Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.793.451.000		2.793.451.000		2.731.703.000		
						Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	2.793.451.000	100	2.793.451.000	100	2.731.703.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					2.793.451.000		2.793.451.000		2.731.703.000		
						Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	1746439	2.793.451.000	1746439	2.793.451.000	1746439	2.731.703.000		
		1.03.05.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05.1.01.0023			Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.693.451.000		2.693.451.000		2.631.703.000		
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1625	2.693.451.000	1625	2.693.451.000	880	2.631.703.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					0		0		0		
						Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		1.03.05.1.01.0013			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				0		0		0		
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M³/Hari	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)								**15.616.340.000**		**43.563.415.000**		**31.685.039.000**		
						Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	72.82	15.616.340.000	72.82	43.563.415.000	72.82	31.685.039.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						13.470.116.000		41.417.191.000		30.027.289.000		
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11.17	13.470.116.000	11.17	41.417.191.000	11.17	30.027.289.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					13.470.116.000		41.417.191.000		30.027.289.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)	Lokasi	115	13.470.116.000	115	41.417.191.000	115	30.027.289.000		
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				109.668.000		109.668.000		71.384.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	240	109.668.000	240	109.668.000	240	71.384.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				13.360.448.000		41.307.523.000		29.955.905.000		
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	2	13.010.089.000	5	40.957.164.000	3	29.622.772.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n (Dokumen)	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	244.562.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	100.359.000	60	100.359.000	60	88.571.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						2.146.224.000		2.146.224.000		1.657.750.000		
						Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	146.224.000	100	146.224.000	100	27.824.000	BIDANG CIPTA KARYA	
		1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					146.224.000		146.224.000		27.824.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	4	146.224.000	4	146.224.000	4	27.824.000		
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				146.224.000		146.224.000		27.824.000		
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	160	146.224.000	160	146.224.000	160	27.824.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49.31	2.000.000.000	49.31	2.000.000.000	49.29	1.629.926.000	BALAI JASA KONSTRUKSI	
		1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1.251.000.000		1.261.400.000		1.027.236.000		
						Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N	Dokumen	3	1.251.000.000	3	1.261.400.000	3	1.027.236.000		
		1.03.11.1.01.0009			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				115.000.000		115.000.000		88.099.000		
						Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	20	115.000.000	20	115.000.000	20	88.099.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				469.537.000		479.937.000		374.565.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	720	469.537.000	720	479.937.000	634	374.565.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				666.463.000		666.463.000		564.572.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	400	666.463.000	400	666.463.000	394	564.572.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					597.000.000		586.600.000		497.713.000		
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Dokumen	2	597.000.000	2	586.600.000	2	497.713.000		
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				544.000.000		544.000.000		488.518.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	2	240.608.000	2	240.608.000	2	231.658.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	49.000.000	1	49.000.000	1	44.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	3	248.392.000	3	248.392.000	3	206.360.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				53.000.000		42.600.000		9.195.000		
						Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	70	53.000.000	70	42.600.000	70	9.195.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					152.000.000		152.000.000		104.977.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	2	152.000.000	2	152.000.000	2	104.977.000		
		1.03.11.1.03.0004			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				28.000.000		28.000.000		30.766.000		
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	65	28.000.000	65	28.000.000	65	30.766.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03.0005			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0		0		0		
						Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				124.000.000		124.000.000		74.211.000		
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	80	124.000.000	80	124.000.000	80	74.211.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03.0007			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0		0		0		
						Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang								**997.688.000**		**997.688.000**		**789.599.000**		
						Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	%	75.31	300.000.000	75.31	300.000.000	75.31	236.794.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						300.000.000		300.000.000		236.794.000		
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58.86	152.611.000	58.86	152.611.000	58.86	125.889.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					152.611.000		152.611.000		125.889.000		
						Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang	Dokumen	2	152.611.000	2	152.611.000	2	125.889.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.03.0006			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.03.0007			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				152.611.000		152.611.000		125.889.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	2	152.611.000	2	152.611.000	2	125.889.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
						Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	147.389.000	100	147.389.000	100	110.905.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					147.389.000		147.389.000		110.905.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	2	147.389.000	2	147.389.000	2	110.905.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				147.389.000		147.389.000		110.905.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	2	147.389.000	2	147.389.000	2	110.905.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	52.44	300.000.000	52.44	300.000.000	52.44	232.325.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						300.000.000		300.000.000		232.325.000		
						Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	39.87	300.000.000	39.87	300.000.000	39.87	232.325.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					300.000.000		300.000.000		232.325.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	9	300.000.000	9	300.000.000	9	232.325.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			170.000.000		170.000.000		134.274.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	8	170.000.000	8	170.000.000	8	134.274.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				130.000.000		130.000.000		98.051.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	130.000.000	1	130.000.000	1	98.051.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
						Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	65	0	65	0	65	0	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					0		0		0		
						Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.01.0006			Penetapan RTRW Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
						Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.01.0009			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				0		0		0		
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
						Persentase Tertib Ruang	%	48	397.688.000	48	397.688.000	48	320.480.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						397.688.000		397.688.000		320.480.000		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	21.238.000	100	21.238.000	100	12.980.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					21.238.000		21.238.000		12.980.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	21.238.000	1	21.238.000	1	12.980.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				21.238.000		21.238.000		12.980.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	21.238.000	1	21.238.000	1	12.980.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	13.856.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		13.856.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	13.856.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20.000.000		20.000.000		13.856.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	13.856.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	20.025.000	100	20.025.000	100	14.433.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					20.025.000		20.025.000		14.433.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	20.025.000	1	20.025.000	1	14.433.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20.025.000		20.025.000		14.433.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	20.025.000	1	20.025.000	1	14.433.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	36.425.000	100	36.425.000	100	27.877.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					36.425.000		36.425.000		27.877.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	36.425.000	1	36.425.000	1	27.877.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				36.425.000		36.425.000		27.877.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	36.425.000	1	36.425.000	1	27.877.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	107.143.000	42	107.143.000	42	84.159.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					107.143.000		107.143.000		84.159.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	107.143.000	2	107.143.000	2	84.159.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0006			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				62.789.000		62.789.000		50.700.000		
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	62.789.000	1	62.789.000	1	50.700.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0007			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				44.354.000		44.354.000		33.459.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	44.354.000	1	44.354.000	1	33.459.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	192.857.000	52	192.857.000	52	167.175.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					192.857.000		192.857.000		167.175.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	2	192.857.000	2	192.857.000	2	167.175.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				192.857.000		192.857.000		167.175.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	192.857.000	2	192.857.000	2	167.175.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0014			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				0		0		0		
						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Meningkatnya Pengelolaan SDA								**48.621.302.000**		**48.621.302.000**		**62.696.638.000**		
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	70.14	24.028.818.000	70.14	24.028.818.000	69.2	25.985.913.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						24.028.818.000		24.028.818.000		25.985.913.000		
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69.3	3.908.392.000	69.3	3.908.392.000	68.38	4.446.180.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.908.392.000		3.908.392.000		4.446.180.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	73.01	3.908.392.000	73.01	3.908.392.000	71.48	4.446.180.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.908.392.000		3.908.392.000		4.446.180.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	419.42	3.908.392.000	419.42	3.908.392.000	419.42	4.446.180.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69.64	7.570.000.000	69.64	7.570.000.000	68.94	8.571.351.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.570.000.000		7.570.000.000		8.571.351.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	67.05	7.570.000.000	67.05	7.570.000.000	66.69	8.571.351.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.570.000.000		7.570.000.000		8.571.351.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	408.808	7.570.000.000	408.808	7.570.000.000	408.8	8.571.351.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65.71	4.872.963.000	65.71	4.872.963.000	65.71	4.729.584.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.872.963.000		4.872.963.000		4.729.584.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	60.3	4.872.963.000	60.3	4.872.963.000	59.86	4.729.584.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.872.963.000		4.872.963.000		4.729.584.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	202.39	4.872.963.000	202.39	4.872.963.000	202.39	4.729.584.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75.9	6.762.463.000	75.9	6.762.463.000	73.77	7.404.836.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.762.463.000		6.762.463.000		7.404.836.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	73.45	6.762.463.000	73.45	6.762.463.000	69.65	7.404.836.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.762.463.000		6.762.463.000		7.404.836.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	326.51	6.762.463.000	326.51	6.762.463.000	326.51	7.404.836.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68.45	915.000.000	68.45	915.000.000	66.92	833.962.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					915.000.000		915.000.000		833.962.000		
						Jumlah DI yang direhab	Daerah	2	565.000.000	2	565.000.000	2	556.857.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				565.000.000		565.000.000		556.857.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0.08	565.000.000	0.08	565.000.000	0.08	556.857.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	194.651.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.0046			Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air				250.000.000		250.000.000		194.651.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	194.651.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	82.454.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
		1.03.02.1.02.0030			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi				100.000.000		100.000.000		82.454.000		
						Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	1	100.000.000	1	100.000.000	1	82.454.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
						Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	%	70.45	18.465.172.000	70.45	18.465.172.000	69.97	29.443.809.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						18.465.172.000		18.465.172.000		29.443.809.000		
						Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058.55	250.000.000	2688058.55	250.000.000	2688058.55	4.504.129.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		4.504.129.000		
						jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	204.693.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				250.000.000		250.000.000		204.693.000		
						Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	2	250.000.000	2	250.000.000	2	204.693.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
						Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Unit	101	0	102	0	102	4.299.436.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0130			Pembangunan Embung				0		0		4.299.436.000		
						Jumlah Embung yang dibangun	Unit	0	0	0	0	2	4.299.436.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
						Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58.97	100.000.000	58.97	100.000.000	58.97	72.928.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		72.928.000		
						Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	72.928.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0125			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				100.000.000		100.000.000		72.928.000		
						Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	Unit	101	100.000.000	101	100.000.000	102	72.928.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	Unit	101		101		102		Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang direhab	%	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0134			Rehabilitasi Embung				0		0		0		
						Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67.35	491.608.000	67.35	491.608.000	67.35	469.551.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					491.608.000		491.608.000		469.551.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	491.608.000	100	491.608.000	100	469.551.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				491.608.000		491.608.000		469.551.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	20	491.608.000	20	491.608.000	20	469.551.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56.96	900.000.000	56.96	900.000.000	56.96	864.114.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					900.000.000		900.000.000		864.114.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	900.000.000	100	900.000.000	100	864.114.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				900.000.000		900.000.000		864.114.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	32	900.000.000	32	900.000.000	32	864.114.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35.08	747.931.000	35.08	747.931.000	35.08	723.071.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					747.931.000		747.931.000		723.071.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	81.48	747.931.000	81.48	747.931.000	81.48	723.071.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				747.931.000		747.931.000		723.071.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	22	747.931.000	22	747.931.000	22	723.071.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76.5	466.527.000	76.5	466.527.000	76.5	453.666.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					466.527.000		466.527.000		453.666.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	466.527.000	100	466.527.000	100	453.666.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				466.527.000		466.527.000		453.666.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	14	466.527.000	14	466.527.000	14	453.666.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50.1	530.000.000	50.1	530.000.000	50.1	1.167.385.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					530.000.000		530.000.000		1.167.385.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	530.000.000	100	530.000.000	100	1.167.385.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				530.000.000		530.000.000		1.167.385.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.5	530.000.000	0.5	530.000.000	0.5	1.167.385.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	1.229.106.000	53	1.229.106.000	53	2.213.346.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.229.106.000		1.229.106.000		2.213.346.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	1.229.106.000	100	1.229.106.000	100	2.213.346.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1.229.106.000		1.229.106.000		2.213.346.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.15	1.229.106.000	0.15	1.229.106.000	0.15	2.213.346.000	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
						Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52.38	13.750.000.000	52.38	13.750.000.000	52.39	18.975.619.000	BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					13.750.000.000		13.750.000.000		18.975.619.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun	Km	4	11.000.000.000	4	11.000.000.000	4	16.302.843.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0009			Pembangunan Tanggul Sungai				0		0		5.800.000.000		
						Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Km	0	0	0	0	0.1	5.800.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				1.000.000.000		1.000.000.000		961.140.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	961.140.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0102			Pembangunan Check Dam				0		0		0		
						Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit		0		0		0	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0127			Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai				10.000.000.000		10.000.000.000		9.541.703.000		
						Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	Km	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	0.9	9.541.703.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir	Dokumen	4	300.000.000	4	300.000.000	4	265.460.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
		1.03.02.1.01.0019			Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				0		0		0		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				300.000.000		300.000.000		265.460.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	300.000.000	4	300.000.000	4	265.460.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	133.989.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		133.989.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	133.989.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	234.906.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				300.000.000		300.000.000		234.906.000		
						Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	2	300.000.000	2	300.000.000	2	234.906.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	0.5	2.000.000.000	0.5	2.000.000.000	0.5	2.038.421.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.000.000.000		2.000.000.000		2.038.421.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.5	2.000.000.000	0.5	2.000.000.000	0.5	2.038.421.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
						Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	%	62.7	6.127.312.000	62.7	6.127.312.000	63.1	7.266.916.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						6.127.312.000		6.127.312.000		7.266.916.000		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	978.762.000	100	978.762.000	100	982.812.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					978.762.000		978.762.000		982.812.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	978.762.000	5	978.762.000	5	982.812.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				978.762.000		978.762.000		982.812.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	978.762.000	5	978.762.000	5	982.812.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen							Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	1.480.000.000	100	1.480.000.000	100	2.066.153.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.480.000.000		1.480.000.000		2.066.153.000		

						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.480.000.000	5	1.480.000.000	5	2.066.153.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.480.000.000		1.480.000.000		2.066.153.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	1.480.000.000	5	1.480.000.000	5	2.066.153.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	979.975.000	100	979.975.000	100	902.975.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					979.975.000		979.975.000		902.975.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	979.975.000	5	979.975.000	5	902.975.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				979.975.000		979.975.000		902.975.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	979.975.000	5	979.975.000	5	902.975.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	1.213.575.000	100	1.213.575.000	100	1.151.420.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.213.575.000		1.213.575.000		1.151.420.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.213.575.000	5	1.213.575.000	5	1.151.420.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.213.575.000		1.213.575.000		1.151.420.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Serayu Bogowonto	Dokumen	5	1.213.575.000	5	1.213.575.000	5	1.151.420.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	0		0		0		Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	1.475.000.000	100	1.475.000.000	100	2.163.556.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.287.974.000		1.337.974.000		1.337.441.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	141.221.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				100.000.000		100.000.000		141.221.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	141.221.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Dokumen	2	700.000.000	2	700.000.000	2	516.098.000	Seksi Pengelolaan Aset	
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				700.000.000		700.000.000		516.098.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	700.000.000	2	700.000.000	2	516.098.000	Seksi Pengelolaan Aset	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	1	487.974.000	1	537.974.000	2	680.122.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.01.0121			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				487.974.000		537.974.000		680.122.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	1	487.974.000	1	537.974.000	3	680.122.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					187.026.000		137.026.000		826.115.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	1	187.026.000	1	137.026.000	7	826.115.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				187.026.000		137.026.000		826.115.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	187.026.000	1	137.026.000	7	826.115.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)									**349.789.477.000**		**349.789.477.000**		**649.175.219.000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
						Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap	%	48.75		48.75		49.05		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Terjaganya Kondisi Jalan Mantap								**349.789.477.000**		**349.789.477.000**		**649.175.219.000**		
						Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	93.61	43.750.502.000	93.61	59.125.596.000	90.3	189.917.917.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						43.750.502.000		59.125.596.000		189.917.917.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95.37	6.324.866.000	95.37	6.324.866.000	96.02	17.992.605.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.324.866.000		6.324.866.000		17.992.605.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	Unit	163	2.079.746.000	163	2.079.746.000	163	1.696.640.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.079.746.000		2.079.746.000		1.696.640.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2688.27	2.079.746.000	2688.27	2.079.746.000	2688.27	1.696.640.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	196.33	4.245.120.000	196.33	4.245.120.000	197.65	16.295.965.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.245.120.000		4.245.120.000		16.295.965.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2	4.245.120.000	2	4.245.120.000	6	16.295.965.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Km	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94.17	4.367.320.000	94.17	5.177.880.000	93.96	19.545.075.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.367.320.000		5.177.880.000		19.545.075.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	Unit	173	1.244.760.000	173	1.644.760.000	173	1.547.440.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				0		0		0		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.244.760.000		1.644.760.000		1.547.440.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2300.6	1.244.760.000	2300.6	1.644.760.000	2300.6	1.547.440.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	244.96	3.122.560.000	244.96	3.533.120.000	244.43	17.997.635.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				3.122.560.000		3.533.120.000		17.997.635.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Km	0.041	991.667.000	0.1	3.533.120.000	0.1	4.217.870.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.130.893.000	0	0	4.6	13.779.765.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92.03	7.795.376.000	92.03	10.551.536.000	91.25	18.921.983.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.795.376.000		10.551.536.000		18.921.983.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	Unit	178	1.427.696.000	178	1.427.696.000	178	1.427.696.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				0		0		0		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.427.696.000		1.427.696.000		1.427.696.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2725.9	1.427.696.000	2725.9	1.427.696.000	2725.9	1.427.696.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	228.99	6.367.680.000	228.99	9.123.840.000	227.06	17.494.287.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				6.367.680.000		9.123.840.000		17.494.287.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	3	6.367.680.000	4.3	9.123.840.000	7.3	17.494.287.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91.36	5.710.253.000	91.36	5.520.947.000	90.37	22.211.026.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.710.253.000		5.520.947.000		22.211.026.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Unit	233	5.710.253.000	233	5.520.947.000	233	5.502.125.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				3.173.000.000		2.983.694.000		2.974.502.000		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	112.1	3.173.000.000	112.1	2.983.694.000	112.1	2.974.502.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.537.253.000		2.537.253.000		2.527.623.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	3850.5	2.537.253.000	3850.5	2.537.253.000	3850.5	2.527.623.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	350.96	0	350.96	0	347.13	16.708.901.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				0		0		16.708.901.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	0	0	0	0	3.75	16.708.901.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94.95	3.625.753.000	94.95	3.625.753.000	94.66	22.630.433.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.625.753.000		3.625.753.000		22.630.433.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Unit	246	1.503.193.000	246	1.503.193.000	246	1.503.193.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan				0		0		0		
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				0		0		0		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.503.193.000		1.503.193.000		1.503.193.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	3312.65	1.503.193.000	3312.65	1.503.193.000	3312.65	1.503.193.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	286.82	2.122.560.000	286.82	2.122.560.000	285.93	21.127.240.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		2.122.560.000		21.127.240.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Km	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	1	2.122.560.000	4.71	21.127.240.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Km	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92.25	5.384.555.000	92.25	14.920.235.000	83.69	23.932.217.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.384.555.000		14.920.235.000		23.932.217.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	Unit	320	3.261.995.000	320	3.261.995.000	320	3.261.995.000	Pokja Wilayah I	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				0		0		0		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.261.995.000		3.261.995.000		3.261.995.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	4683.32	3.261.995.000	4683.32	3.261.995.000	4683.32	3.261.995.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	383.74	2.122.560.000	383.74	11.658.240.000	348.14	20.670.222.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		11.658.240.000		20.670.222.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	5.5	11.658.240.000	6.5	20.670.222.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95.7	6.608.209.000	95.7	8.720.209.000	84.32	29.825.948.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.608.209.000		8.720.209.000		29.825.948.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal	Unit	290	2.363.089.000	290	2.363.089.000	290	4.183.925.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				0		0		0		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	0	0	0	0	0	0	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.363.089.000		2.363.089.000		4.183.925.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	4647.12	2.363.089.000	4647.12	2.363.089.000	4647.12	4.183.925.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	359.8	4.245.120.000	359.8	6.357.120.000	317.01	25.642.023.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.245.120.000		6.357.120.000		25.642.023.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal (KM)	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2	4.245.120.000	3	6.357.120.000	6.2	25.425.795.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal (KM)	Km	0		0		0	216.228.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94.11	3.934.170.000	94.11	4.284.170.000	95.49	34.858.630.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.934.170.000		4.284.170.000		34.858.630.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Unit	154	1.811.610.000	154	2.161.610.000	154	2.161.610.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0049			Pelebaran Jembatan										
						Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter							Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				809.000.000		1.159.000.000		1.159.000.000		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	16.5	809.000.000	16.5	1.159.000.000	16.5	1.159.000.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.002.610.000		1.002.610.000		1.002.610.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2237.41	1.002.610.000	2237.41	1.002.610.000	2237.41	1.002.610.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	232.62	2.122.560.000	232.62	2.122.560.000	236.03	32.697.020.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		2.122.560.000		32.697.020.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	1	2.122.560.000	9.5	32.697.020.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	0		0		0		Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	63.71	157.094.234.000	63.71	158.289.100.000	64.47	159.025.240.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						157.094.234.000		158.289.100.000		159.025.240.000		
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75.41	13.066.759.000	75.41	13.066.759.000	75.41	13.411.792.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					13.066.759.000		13.066.759.000		13.411.792.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap	Km	155.24	13.066.759.000	155.24	13.066.759.000	155.24	13.411.792.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				13.066.759.000		13.066.759.000		13.411.792.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	203.85	13.066.759.000	203.85	13.066.759.000	198.35	13.411.792.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73.4	16.035.366.000	73.4	16.035.366.000	73.4	15.611.734.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					16.035.366.000		16.035.366.000		15.611.734.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	190.93	16.035.366.000	190.93	16.035.366.000	190.93	15.611.734.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				16.035.366.000		16.035.366.000		15.611.734.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	259.13	16.035.366.000	260.13	16.035.366.000	253.52	15.611.734.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70.53	15.892.729.000	70.53	15.892.729.000	70.53	15.817.801.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.892.729.000		15.892.729.000		15.817.801.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	175.49	15.892.729.000	175.49	15.892.729.000	175.49	15.817.801.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				15.892.729.000		15.892.729.000		15.817.801.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	243.82	15.892.729.000	243.42	15.892.729.000	240.45	15.817.801.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50.84	26.493.201.000	50.84	27.688.067.000	52.08	27.699.961.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					26.493.201.000		27.688.067.000		27.699.961.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	195.28	26.493.201.000	195.28	27.688.067.000	200.06	27.699.961.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				26.493.201.000		27.688.067.000		27.699.961.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	379.14	26.493.201.000	380.69	27.688.067.000	377.49	27.699.961.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64.59	19.188.976.000	64.59	19.188.976.000	64.59	19.662.585.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					19.188.976.000		19.188.976.000		19.662.585.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	195.1	19.188.976.000	195.1	19.188.976.000	195.1	19.662.585.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				19.188.976.000		19.188.976.000		19.662.585.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	300.07	19.188.976.000	299.07	19.188.976.000	292.36	19.662.585.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65.54	26.315.888.000	65.54	26.315.888.000	68.88	26.415.888.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					26.315.888.000		26.315.888.000		26.415.888.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	277.64	26.315.888.000	277.64	26.315.888.000	286.53	26.415.888.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				26.315.888.000		26.315.888.000		26.415.888.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	412.98	26.315.888.000	410.48	26.315.888.000	402.31	26.415.888.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59.5	24.856.265.000	59.5	24.856.265.000	59.5	25.160.429.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					24.856.265.000		24.856.265.000		25.160.429.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	223.71	24.856.265.000	223.71	24.856.265.000	223.71	25.160.429.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				24.856.265.000		24.856.265.000		25.160.429.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	369.96	24.856.265.000	370.16	24.856.265.000	364.4	25.160.429.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59.12	15.245.050.000	59.12	15.245.050.000	59.12	15.245.050.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.245.050.000		15.245.050.000		15.245.050.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	146.12	15.245.050.000	146.12	15.245.050.000	146.12	15.245.050.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				15.245.050.000		15.245.050.000		15.245.050.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	245.17	15.245.050.000	245.17	15.245.050.000	234.17	15.245.050.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	48.75	148.944.741.000	48.75	132.374.781.000	49.05	300.232.062.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						148.944.741.000		132.374.781.000		300.232.062.000		
						Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189.63	132.660.096.000	1189.63	115.940.136.000	1196.97	281.540.235.000	BIDANG BINA MARGA	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					132.660.096.000		115.940.136.000		281.540.235.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	Km	15	132.660.096.000	15	115.940.136.000	13.39	281.540.235.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0031			Rekonstruksi Jalan										
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km							Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0048			Pembangunan Underpass										
						Panjang Underpass yang Dibangun	Meter							Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0051			Pelebaran Jalan Menuju Standar				104.520.096.000		93.204.886.000		260.558.025.000		
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	15	104.520.096.000	10.35	93.204.886.000	13.39	260.558.025.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0054			Pembangunan Jembatan				28.140.000.000		22.735.250.000		20.982.210.000		
						Panjang jembatan yang dibangun	Meter	37.3	28.140.000.000	37.3	22.735.250.000	37.3	20.982.210.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0055			Pembangunan Flyover										
						Panjang Flyover yang Dibangun	Meter							Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0058			Pembangunan Jalan										
						Panjang Jalan yang Dibangun	Km							Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
						Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	5.880.000.000	100	5.605.000.000	100	4.318.679.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.880.000.000		5.605.000.000		4.318.679.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	6	5.880.000.000	6	5.605.000.000	6	4.318.679.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				4.380.000.000		4.105.000.000		2.998.669.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	4	3.405.000.000	4	3.130.000.000	3	2.248.069.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	m2	250	975.000.000	250	975.000.000	250	750.600.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.500.000.000		1.500.000.000		1.320.010.000		
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	2440.12	1.500.000.000	2440.12	1.500.000.000	2440.12	1.320.010.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59.69	380.000.000	59.69	380.000.000	60.43	318.364.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					380.000.000		380.000.000		318.364.000		
						Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM)	Km	1456.52	380.000.000	1456.52	380.000.000	1456.52	318.364.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0044			Pengelolaan Leger Jalan				380.000.000		380.000.000		318.364.000		
						Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1	380.000.000	1	380.000.000	1	318.364.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99.81	5.241.888.000	99.81	5.241.888.000	99.81	5.241.888.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.241.888.000		5.241.888.000		5.241.888.000		
						Jumlah Peralatan yang Tersedia	Unit	1142	5.241.888.000	1142	5.241.888.000	1142	5.241.888.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				5.241.888.000		5.241.888.000		5.241.888.000		
						Jumlah Peralatan bertambah	Unit	120	725.000.000	120	725.000.000	120	725.000.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan yang dipelihara (Unit)	Unit	1079	3.528.970.000	1079	3.528.970.000	1079	3.528.970.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksipenanganan kerusakan khusus (Unit)	Unit	1050	987.918.000	1050	987.918.000	1430	987.918.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	2440.12		2440.12		2440.12		Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	2.000.000.000	100	2.425.000.000	100	6.129.111.000	BIDANG BINA MARGA	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.000.000.000		2.425.000.000		6.129.111.000		
						Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dokumen	4	2.000.000.000	4	2.425.000.000	16	6.129.111.000	Pokja Pengawasan	
		1.03.10.1.01.0053			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				2.000.000.000		2.425.000.000		6.129.111.000		
						Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Km	15	2.000.000.000	15	2.425.000.000	13.39	6.129.111.000	Pokja Pengawasan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19.67	2.782.757.000	19.67	2.782.757.000	19.67	2.683.785.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.782.757.000		2.782.757.000		2.683.785.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	1430	2.782.757.000	1430	2.782.757.000	1430	2.683.785.000	Seksi Pengujian Mutu	
		1.03.10.1.01.0059			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi				2.782.757.000		2.782.757.000		2.683.785.000		
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)	Dokumen	2	419.320.000	2	414.803.000	2	400.736.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)	Unit	116	249.800.000	116	249.800.000	116	269.000.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah penambahan alat uji (Unit)	Unit	2	1.648.634.000	2	1.648.634.000	2	1.648.634.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)	Orang	60	31.934.000	60	67.938.000	60	9.960.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	1430	433.069.000	1430	401.582.000	1430	355.455.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km							Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
JUMLAH									**639.333.897.000**		**654.333.897.000**		**955.266.617.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat									**20.344.323.000**		**20.319.323.000**		**18.969.054.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	%	62.66		62.66		63.2		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	55.5		55.5		55.5		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	74.54		74.54		76.89		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni								**13.215.000.000**		**13.197.000.000**		**12.463.656.000**		
						Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	9.88	7.405.000.000	9.88	7.387.000.000	35.46	6.952.158.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						7.405.000.000		7.387.000.000		6.952.158.000		
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16.9	7.405.000.000	16.9	7.387.000.000	15.58	6.952.158.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					50.000.000		50.000.000		33.147.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	33.147.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.01.0010			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				50.000.000		50.000.000		33.147.000		
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	33.147.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					130.000.000		112.000.000		74.186.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Dokumen	1	130.000.000	1	112.000.000	1	74.186.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.02.0001			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				130.000.000		112.000.000		74.186.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	200	130.000.000	200	112.000.000	356	74.186.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.643.000.000		5.643.000.000		5.541.589.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	111	5.643.000.000	111	5.643.000.000	111	5.541.589.000	Pokja Perumahan Umum	
		1.04.02.1.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				1.635.000.000		1.635.000.000		1.606.792.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	74	1.635.000.000	74	1.635.000.000	74	1.606.792.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				4.008.000.000		4.008.000.000		3.934.797.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	37	4.008.000.000	37	4.008.000.000	37	3.934.797.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.582.000.000		1.582.000.000		1.303.236.000		
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	10000	1.582.000.000	10000	1.582.000.000	5000	1.303.236.000	Pokja Perumahan Swadaya	
		1.04.02.1.04.0005			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1.582.000.000		1.582.000.000		1.303.236.000		
						Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	10000	1.582.000.000	10000	1.582.000.000	5000	1.303.236.000	Pokja Perumahan Swadaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	%	9.65	5.810.000.000	9.65	5.810.000.000	9.65	5.511.498.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						5.440.000.000		5.440.000.000		5.273.856.000		
						Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0.47	5.440.000.000	0.47	5.440.000.000	0.59	5.273.856.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					120.000.000		120.000.000		71.687.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	71.687.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.01.0007			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				120.000.000		120.000.000		71.687.000		
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	71.687.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.320.000.000		5.320.000.000		5.202.169.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	20	950.000.000	20	950.000.000	20	923.706.000	Pokja Perumahan Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.1.03.0008			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				950.000.000		950.000.000		923.706.000		
						Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	20	950.000.000	20	950.000.000	20	923.706.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Unit	100	4.370.000.000	100	4.370.000.000	100	4.278.463.000	Pokja Perumahan Swadaya	
		1.04.02.1.03.0008			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				4.370.000.000		4.370.000.000		4.278.463.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan	Unit	100	4.370.000.000	100	4.370.000.000	100	4.278.463.000	Pokja Perumahan Swadaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						370.000.000		370.000.000		237.642.000		
						Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6.84	370.000.000	6.84	370.000.000	6.84	237.642.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.06.1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					370.000.000		370.000.000		237.642.000		
						Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	50	370.000.000	50	370.000.000	50	237.642.000	Pokja Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				370.000.000		370.000.000		237.642.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	370.000.000	1	370.000.000	1	237.642.000	Pokja Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								**5.929.323.000**		**5.914.323.000**		**5.618.058.000**		
						Persentase Kawasan Kumuh	%	37.34	5.929.323.000	37.34	5.914.323.000	36.8	5.618.058.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.266.323.000		3.251.323.000		2.973.053.000		
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	1.254.800.000	100	1.227.300.000	100	1.063.764.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.254.800.000		1.227.300.000		1.063.764.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	2	479.800.000	2	492.300.000	2	373.923.000	Pokja Keterpaduan Infrastruktur	
		1.04.03.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				479.800.000		492.300.000		373.923.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	2	479.800.000	2	492.300.000	2	373.923.000	Pokja Keterpaduan Infrastruktur	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	775.000.000	2	735.000.000	2	689.841.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				775.000.000		735.000.000		689.841.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	2	775.000.000	2	735.000.000	2	689.841.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14.9	2.011.523.000	14.9	2.024.023.000	14.19	1.909.289.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					142.500.000		155.000.000		101.968.000		
						Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	7	142.500.000	7	155.000.000	7	101.968.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				142.500.000		155.000.000		101.968.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	245	142.500.000	245	155.000.000	245	101.968.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.869.023.000		1.869.023.000		1.807.321.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	2	171.950.000	2	171.950.000	2	156.003.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.02.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)				171.950.000		171.950.000		156.003.000		

					Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	2	171.950.000	2	171.950.000	2	156.003.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Ha	100	1.697.073.000	100	1.697.073.000	75	1.651.318.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.02.0003			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				14.520.000		14.520.000		11.663.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	600	14.520.000	600	14.520.000	600	11.663.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.0014			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.682.553.000		1.682.553.000		1.639.655.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	6	1.682.553.000	6	1.682.553.000	6	1.639.655.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						2.663.000.000		2.663.000.000		2.645.005.000		
						Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7.69	2.663.000.000	7.69	2.663.000.000	7.69	2.645.005.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.05.1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					2.663.000.000		2.663.000.000		2.645.005.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Laporan	1	2.663.000.000	1	2.663.000.000	1	2.645.005.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	
		1.04.05.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				25.000.000		25.000.000		18.832.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	18.832.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.0009			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman				2.638.000.000		2.638.000.000		2.626.173.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	5	2.638.000.000	5	2.638.000.000	5	2.626.173.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum								**270.000.000**		**272.000.000**		**169.238.000**		
						Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	270.000.000	100	272.000.000	100	169.238.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						270.000.000		272.000.000		169.238.000		
						Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	270.000.000	100	272.000.000	100	169.238.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.03.1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					270.000.000		272.000.000		169.238.000		
						Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	2	270.000.000	2	272.000.000	2	169.238.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		2.10.03.1.01.0003			Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				270.000.000		272.000.000		169.238.000		
						Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	2	270.000.000	2	272.000.000	2	169.238.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah								**930.000.000**		**936.000.000**		**718.102.000**		
						Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	%	22.2	930.000.000	22.2	936.000.000	33.3	718.102.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						500.000.000		503.000.000		382.859.000		
						Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	500.000.000	100	503.000.000	100	382.859.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.04.1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		503.000.000		382.859.000		
						Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	Dokumen	1	500.000.000	1	503.000.000	1	382.859.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	
		2.10.04.1.01.0005			Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				375.000.000		378.000.000		308.611.000		
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	375.000.000	1	378.000.000	1	308.611.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.0006			Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				125.000.000		125.000.000		74.248.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	5	125.000.000	5	125.000.000	5	74.248.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						430.000.000		433.000.000		335.243.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	430.000.000	100	433.000.000	100	335.243.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.06.1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					430.000.000		433.000.000		335.243.000		
						Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	3	430.000.000	3	433.000.000	3	335.243.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota				365.000.000		368.000.000		282.106.000		
						Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria	Berita Acara	2	15.600.000	2	15.600.000	2	8.050.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara	8	349.400.000	8	352.400.000	8	274.056.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0004			Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi				65.000.000		65.000.000		53.137.000		
						Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	2	6.300.000	2	6.300.000	2	2.650.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	4	58.700.000	4	58.700.000	4	50.487.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									**19.466.548.000**		**19.491.548.000**		**18.966.061.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	79		79		79		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								**18.627.159.000**		**18.717.159.000**		**18.496.318.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	91.6	18.627.159.000	91.6	18.717.159.000	91.6	18.496.318.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.627.159.000		18.717.159.000		18.496.318.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	18.627.159.000	100	18.717.159.000	100	18.496.318.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.844.944.000		13.844.944.000		13.798.775.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	13.844.944.000	6	13.844.944.000	6	13.798.775.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.368.944.000		13.368.944.000		13.368.944.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	87	13.368.944.000	87	13.368.944.000	82	13.368.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				386.000.000		386.000.000		362.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	386.000.000	12	386.000.000	12	362.150.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		41.303.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	41.303.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		4.498.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.498.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				30.000.000		30.000.000		17.728.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	17.728.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		5.000.000		4.152.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.152.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					170.000.000		170.000.000		162.814.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	170.000.000	4	170.000.000	4	162.814.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		2.519.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	2.519.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		3.236.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	3.236.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		2.059.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	2.059.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					62.305.000		62.305.000		54.228.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	62.305.000	100	62.305.000	100	54.228.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		8.793.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.793.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		11.130.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	11.130.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		10.000.000		7.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	10.000.000	50	10.000.000	50	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				11.641.000		11.641.000		11.641.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	79	11.641.000	79	11.641.000	165	11.641.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.664.000		15.664.000		15.664.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	79	15.664.000	79	15.664.000	100	15.664.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.115.000.000		1.115.000.000		914.189.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.115.000.000	100	1.115.000.000	100	914.189.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000		28.000.000		28.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		89.652.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	89.652.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		10.018.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12.000.000	12	12.000.000	12	10.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	0	12	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.000.000		78.000.000		75.738.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	78.000.000	12	78.000.000	12	75.738.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				630.000.000		630.000.000		456.703.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	630.000.000	12	630.000.000	12	456.703.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				21.000.000		21.000.000		17.210.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	21.000.000	2	21.000.000	2	17.210.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		200.000.000		190.868.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	190.868.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		90.000.000		89.830.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	90.000.000	8	89.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		90.000.000		89.830.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	0	8	90.000.000	8	89.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.830.515.000		2.830.515.000		2.869.302.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.830.515.000	3	2.830.515.000	3	2.869.302.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.325.515.000		2.325.515.000		2.364.302.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.325.515.000	12	2.325.515.000	12	2.364.302.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					604.395.000		604.395.000		607.180.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	294	604.395.000	294	604.395.000	260	607.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				89.395.000		89.395.000		69.685.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	89.395.000	2	89.395.000	2	69.685.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	56	13.000.000	56	13.000.000	56	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		68.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	145	60.000.000	145	60.000.000	130	68.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		208.283.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	2	208.283.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.000.000		42.000.000		47.962.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	70	42.000.000	70	42.000.000	51	47.962.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								**839.389.000**		**774.389.000**		**469.743.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	3.06	839.389.000	3.06	774.389.000	3.06	469.743.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						839.389.000		774.389.000		469.743.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	839.389.000	100	774.389.000	100	469.743.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					839.389.000		774.389.000		469.743.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	20	839.389.000	20	774.389.000	100	469.743.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				497.234.000		452.234.000		290.133.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	497.234.000	7	452.234.000	7	290.133.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				292.155.000		292.155.000		166.502.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	292.155.000	9	292.155.000	9	166.502.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		15.000.000		8.882.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	25.000.000	2	15.000.000	2	8.882.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		15.000.000		4.226.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	15.000.000	1	4.226.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**39.810.871.000**		**39.810.871.000**		**37.935.115.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum									**4.792.690.000**		**4.792.690.000**		**4.705.501.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	84.5		84.5		84.5		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								**2.250.000.000**		**2.250.000.000**		**2.521.462.000**		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.15	2.250.000.000	6.15	2.250.000.000	6.2	2.521.462.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.250.000.000		2.250.000.000		2.521.462.000		
						Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85.71	2.250.000.000	85.71	2.250.000.000	85.71	2.521.462.000	Bidang Penegakan Hukum Daerah	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					200.000		200.000		200.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.01.0015			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				200.000		200.000		200.000		
						Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					2.221.680.000		2.221.680.000		2.508.202.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	125	70.850.000	125	70.850.000	125	43.801.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan	
		1.05.02.1.02.0002			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				70.850.000		70.850.000		43.801.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	70.850.000	4	70.850.000	4	43.801.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	Orang	100	2.150.830.000	100	2.150.830.000	100	2.464.401.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.02.0010			Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.790.000		20.790.000		9.092.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20.790.000	1	20.790.000	1	9.092.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0012			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.130.040.000		2.130.040.000		2.455.309.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	4	2.130.040.000	4	2.130.040.000	4	2.455.309.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					28.120.000		28.120.000		13.060.000		
						Jumlah PPNS yang dilakukan pembinaan	Orang	100	28.120.000	100	28.120.000	100	13.060.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.03.0005			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				19.920.000		19.920.000		6.801.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	1	19.920.000	1	19.920.000	1	6.801.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.03.0007			Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				8.200.000		8.200.000		6.259.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	8.200.000	1	8.200.000	1	6.259.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								**2.542.690.000**		**2.542.690.000**		**2.184.039.000**		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Angka	13.2	2.542.690.000	13.2	2.542.690.000	13.2	2.184.039.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.182.690.000		2.232.690.000		1.935.101.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8.57	610.000.000	8.57	660.000.000	8.57	582.874.000	Bidang Pelindungan Masyarakat	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					610.000.000		660.000.000		582.874.000		
						Jumlah Komandan Regu (Danru) Satlinmas yang dibina	Orang	225	350.000.000	225	350.000.000	225	297.159.000	Pokja Pembinaan Satlinmas	
		1.05.02.1.01.0030			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				350.000.000		350.000.000		297.159.000		
						Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	225	350.000.000	225	350.000.000	225	297.159.000	Pokja Pembinaan Satlinmas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Linmas yang diberdayakan	%	0.09	260.000.000	0.09	310.000.000	0.09	285.715.000	Pokja Pemberdayaan Satlinmas	
		1.05.02.1.01.002			Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam										

		2			penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				260.000.000		310.000.000		285.715.000		
						Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Laporan	1	260.000.000	1	310.000.000	1	285.715.000	Pokja Pemberdayaan Satlinmas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80.71	1.572.690.000	80.71	1.572.690.000	80.71	1.352.227.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.572.690.000		1.572.690.000		1.352.227.000		
						Jumlah tindakan penanganan gangguan Tibumtranmas	Kegiatan	32	231.940.000	32	231.940.000	32	188.221.000	Pokja Penanganan	
		1.05.02.1.01.0020			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				231.940.000		231.940.000		188.221.000		
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	4	231.940.000	4	231.940.000	4	188.221.000	Pokja Penanganan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah tindakan pencegahan gangguan Tibumtranmas	Kegiatan	81	1.340.750.000	81	1.340.750.000	81	1.164.006.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.02.1.01.0021			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1.340.750.000		1.340.750.000		1.164.006.000		
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	4	1.340.750.000	4	1.340.750.000	4	1.164.006.000	Pokja Pencegahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						360.000.000		310.000.000		248.938.000		
						Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	360.000.000	29	310.000.000	29	248.938.000	Bidang Penanganan Kebakaran	
		1.05.04.1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					360.000.000		310.000.000		248.938.000		
						Persentase Kab/Kota yang dibina terkait penanganan kebakaran	%	29	200.000.000	29	100.000.000	29	76.101.000	Pokja Pembinaan	
		1.05.04.1.01.0009			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				200.000.000		100.000.000		76.101.000		
						Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	210	200.000.000	210	100.000.000	210	76.101.000	Pokja Pembinaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kab/Kota yang telah dilakukan Pemetaan Rawan Kebakaran	%	29	160.000.000	29	210.000.000	29	172.837.000	Pokja Pencegahan dan Penanggulangan	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				160.000.000		210.000.000		172.837.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	10	160.000.000	10	210.000.000	10	172.837.000	Pokja Pencegahan dan Penanggulangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Satuan Polisi Pamong Praja									**17.742.868.000**		**17.742.868.000**		**17.241.277.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	78		78		78		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja								**17.590.503.000**		**17.590.503.000**		**17.166.780.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	84.5	17.590.503.000	84.5	17.590.503.000	84.5	17.166.780.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.590.503.000		17.590.503.000		17.166.780.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	17.590.503.000	100	17.590.503.000	100	17.166.780.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.148.333.000		13.148.333.000		13.136.813.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	13.148.333.000	13	13.148.333.000	13	13.136.813.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.846.333.000		12.846.333.000		12.846.333.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	12.846.333.000	80	12.846.333.000	85	12.846.333.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				282.000.000		282.000.000		279.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	282.000.000	12	282.000.000	12	279.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		20.000.000		11.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	11.080.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					415.835.000		415.835.000		394.521.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	415.835.000	100	415.835.000	100	394.521.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				130.835.000		130.835.000		130.835.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	130.835.000	2	130.835.000	2	130.835.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		35.000.000		13.686.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	35.000.000	1	35.000.000	1	13.686.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	250.000.000	70	250.000.000	70	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					655.707.000		639.387.000		545.081.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	655.707.000	100	639.387.000	100	545.081.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		33.680.000		29.509.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	33.680.000	1	29.509.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.400.000		75.400.000		62.880.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	75.400.000	1	75.400.000	1	62.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.000.000		45.000.000		37.571.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	1	45.000.000	1	37.571.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		25.047.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.047.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				95.155.000		95.155.000		64.774.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	95.155.000	1	95.155.000	1	64.774.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320.000.000		320.000.000		275.584.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	320.000.000	1	320.000.000	1	275.584.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.152.000		40.152.000		49.716.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	40.152.000	1	40.152.000	1	49.716.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		115.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	18	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		115.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.559.171.000		2.616.907.000		2.151.010.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.559.171.000	3	2.616.907.000	3	2.151.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.752.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.752.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		330.000.000		330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.227.171.000		2.284.907.000		1.819.258.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.227.171.000	1	2.284.907.000	1	1.819.258.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					761.457.000		720.041.000		774.355.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	761.457.000	75	720.041.000	75	774.355.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				309.000.000		292.584.000		295.584.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	309.000.000	21	292.584.000	21	295.584.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		60.000.000		62.914.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	65.000.000	52	60.000.000	52	62.914.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				348.457.000		328.457.000		381.857.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	348.457.000	1	328.457.000	1	381.857.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		39.000.000		34.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	39.000.000	2	39.000.000	2	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja								**152.365.000**		**152.365.000**		**74.497.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	3.15	152.365.000	3.15	152.365.000	3.15	74.497.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						152.365.000		152.365.000		74.497.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	152.365.000	100	152.365.000	100	74.497.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					152.365.000		152.365.000		74.497.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	152.365.000	100	152.365.000	100	74.497.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				103.305.000		103.305.000		45.699.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	103.305.000	8	103.305.000	8	45.699.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.060.000		44.060.000		27.773.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	44.060.000	6	44.060.000	6	27.773.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		2.500.000		625.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	2.500.000	2	2.500.000	2	625.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		2.500.000		400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	2.500.000	2	2.500.000	2	400.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**22.535.558.000**		**22.535.558.000**		**21.946.778.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah									**14.421.444.000**		**14.421.444.000**		**13.663.593.000**	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	74.5		74.5		72.15		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah								**14.161.444.000**		**14.161.444.000**		**13.451.110.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	91.75	14.161.444.000	91.75	14.161.444.000	92.5	13.451.110.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.161.444.000		14.161.444.000		13.451.110.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	14.161.444.000	100	14.161.444.000	100	13.451.110.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.182.223.000		7.182.223.000		7.109.913.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.182.223.000	1	7.182.223.000	1	7.109.913.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.832.223.000		6.832.223.000		6.832.223.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	6.832.223.000	39	6.832.223.000	39	6.832.223.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		350.000.000		277.690.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	350.000.000	1	350.000.000	1	277.690.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					61.500.000		61.500.000		1.625.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	61.500.000	1	61.500.000	1	1.625.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				61.500.000		61.500.000		1.625.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	61.500.000	1	61.500.000	1	1.625.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		5.800.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	5.800.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000		5.000.000		2.900.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	39	5.000.000	39	5.000.000	39	2.900.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		2.900.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	39	10.000.000	39	10.000.000	39	2.900.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					537.500.000		537.500.000		484.845.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	537.500.000	100	537.500.000	100	484.845.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	20.000.000	10	20.000.000	10	16.698.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		300.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1.000.000	2	1.000.000	2	300.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				130.500.000		130.500.000		82.030.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	130.500.000	1	130.500.000	1	82.030.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				316.000.000		316.000.000		341.030.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	316.000.000	1	316.000.000	1	341.030.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.000.000		40.000.000		14.787.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	14.787.000	BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.528.000.000		1.528.000.000		1.320.142.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	31	1.528.000.000	31	1.528.000.000	19	1.320.142.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				828.000.000		828.000.000		620.142.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	828.000.000	25	828.000.000	13	620.142.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	700.000.000	6	700.000.000	6	700.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.931.721.000		3.931.721.000		3.472.258.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	3.931.721.000	3	3.931.721.000	3	3.472.258.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				529.000.000		529.000.000		400.584.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	529.000.000	1	529.000.000	1	400.584.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.401.221.000		3.401.221.000		3.070.174.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.401.221.000	1	3.401.221.000	1	3.070.174.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.500.000		905.500.000		1.056.527.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	163	905.500.000	163	905.500.000	163	1.056.527.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				685.500.000		685.500.000		770.675.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	61	685.500.000	61	685.500.000	61	770.675.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		87.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	75.000.000	5	75.000.000	5	87.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		50.918.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	70.000.000	4	70.000.000	4	50.918.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		147.434.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	75.000.000	93	75.000.000	93	147.434.000	BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah								**260.000.000**		**260.000.000**		**212.483.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	2.735	260.000.000	2.735	260.000.000	2.735	212.483.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						260.000.000		260.000.000		212.483.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	260.000.000	100	260.000.000	100	212.483.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					260.000.000		260.000.000		212.483.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	260.000.000	100	260.000.000	100	212.483.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		74.540.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	100.000.000	5	100.000.000	5	74.540.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		133.024.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	150.000.000	5	150.000.000	5	133.024.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		300.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	6	5.000.000	6	5.000.000	6	300.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		4.619.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.619.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Menurunkan Risiko Bencana									**5.975.000.000**		**5.975.000.000**		**5.490.421.000**	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
						Indeks Risiko Bencana	Angka	94.75		94.75		91.9		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam								**5.975.000.000**		**5.975.000.000**		**5.490.421.000**		
						Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0.77	5.975.000.000	0.77	5.975.000.000	0.75	5.490.421.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						5.975.000.000		5.975.000.000		5.490.421.000		
						Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	350.000.000	90	350.000.000	90	300.953.000	Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					250.000.000		250.000.000		238.258.000		
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	238.258.000	Pokja Pengendalian Operasi	
		1.05.03.1.03.0030			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				150.000.000		150.000.000		143.009.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	35	150.000.000	1	150.000.000	1	143.009.000	Pokja Pengendalian Operasi	
		1.05.03.1.03.0031			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				100.000.000		100.000.000		95.249.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	95.249.000	Pokja Pengendalian Operasi	
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		100.000.000		62.695.000		
						Jumlah personil kab/kota yang di tingkatkan kapasitas pengolahan data dan informasi bencana	Orang	70	100.000.000	70	100.000.000	70	62.695.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	
		1.05.03.1.04.0022			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000		100.000.000		62.695.000		
						Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	35	100.000.000	35	100.000.000	35	62.695.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	253.182.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					300.000.000		300.000.000		253.182.000		
						Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	28.876.000	Pokja Rehabilitasi	
		1.05.03.1.04.0009			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				50.000.000		50.000.000		28.876.000		
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	28.876.000	Pokja Rehabilitasi	
						Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana	%	20	250.000.000	20	250.000.000	20	224.306.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				80.000.000		80.000.000		68.949.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	68.949.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0013			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi				130.000.000		130.000.000		122.207.000		
						Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	35	130.000.000	35	130.000.000	35	122.207.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0023			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		33.150.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten/ Kota	35	40.000.000	35	40.000.000	35	33.150.000	Pokja Rekonstruksi	
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	2.500.000.000	100	2.430.000.000	100	2.384.401.000	Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					2.500.000.000		2.430.000.000		2.384.401.000		
						Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana	%	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.132.441.000	Pokja Logistik	
		1.05.03.1.03.0028			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.100.000.000		2.100.000.000		2.132.441.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7000	2.100.000.000	7000	2.100.000.000	7000	2.132.441.000	Pokja Logistik	
						Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	400.000.000	100	330.000.000	100	251.960.000	Pokja Kedaruratan	
		1.05.03.1.03.0025			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				200.000.000		170.000.000		99.490.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	200.000.000	35	170.000.000	35	99.490.000	Pokja Kedaruratan	
		1.05.03.1.03.0026			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi				200.000.000		160.000.000		152.470.000		
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	200	200.000.000	200	160.000.000	200	152.470.000	Pokja Kedaruratan	
						Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6.8	2.825.000.000	6.8	2.895.000.000	6.8	2.551.885.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					700.000.000		770.000.000		690.822.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.023	700.000.000	0.023	770.000.000	0.023	690.822.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.03.1.01.0003			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pencegahan	
		1.05.03.1.01.0004			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)				700.000.000		770.000.000		690.822.000		
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	700.000.000	3000	770.000.000	3000	690.822.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					2.125.000.000		2.125.000.000		1.861.063.000		
						Persentase penanganan pra bencana	%	100	2.125.000.000	100	2.125.000.000	100	1.861.063.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				400.000.000		400.000.000		318.933.000		
						Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	30	400.000.000	30	400.000.000	30	318.933.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0023			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				75.000.000		75.000.000		65.546.000		
						Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	200	75.000.000	200	75.000.000	200	65.546.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0024			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0025			Penyusunan Rencana Kontijensi				100.000.000		100.000.000		91.268.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	91.268.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0026			Pengelolaan Risiko Bencana				1.250.000.000		1.250.000.000		1.181.160.000		
						Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	15	1.250.000.000	10	1.250.000.000	15	1.181.160.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0030			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				300.000.000		300.000.000		204.156.000		
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	400	300.000.000	400	300.000.000	400	204.156.000	Pokja Kesiapsiagaan	
JUMLAH									**20.396.444.000**		**20.396.444.000**		**19.154.014.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Sosial									**134.126.589.000**		**134.126.589.000**		**136.693.241.000**	**Dinas Sosial**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	81.25		81.25		81.25		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Sosial								**133.276.589.000**		**133.276.589.000**		**135.976.007.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	89	133.276.589.000	89	133.276.589.000	89	135.976.007.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						133.276.589.000		133.276.589.000		135.976.007.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	124.332.974.000	100	124.332.974.000	100	126.982.536.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.930.738.000		95.930.738.000		95.552.395.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	95.930.738.000	5	95.930.738.000	5	95.552.395.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				94.255.738.000		94.255.738.000		93.924.841.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	550	94.255.738.000	550	94.255.738.000	550	93.924.841.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.300.000.000		1.300.000.000		1.265.105.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.265.105.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000.000		200.000.000		190.810.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	190.810.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				175.000.000		175.000.000		171.639.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	175.000.000	4	175.000.000	4	171.639.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					225.000.000		225.000.000		189.146.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	225.000.000	2	225.000.000	2	189.146.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		75.000.000		39.146.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	39.146.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		84.625.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	84.625.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		75.000.000		44.887.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	75.000.000	4	75.000.000	4	44.887.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		75.000.000		39.738.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	75.000.000	10	75.000.000	10	39.738.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.024.100.000		2.024.100.000		1.894.131.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.024.100.000	100	2.024.100.000	100	1.894.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		43.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	43.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		29.550.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	4	40.000.000	4	29.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		69.290.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	2	75.000.000	2	69.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		60.000.000		55.750.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	60.000.000	2	60.000.000	2	55.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.600.000		3.600.000		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	0.9992	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				75.000.000		75.000.000		68.240.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	2	75.000.000	2	68.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				145.500.000		145.500.000		150.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	145.500.000	4	145.500.000	4	150.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.300.000.000		1.300.000.000		1.347.590.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.347.590.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		75.000.000		29.961.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	75.000.000	2	75.000.000	2	29.961.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.509.693.000		1.509.693.000		2.916.657.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	1.509.693.000	20	1.509.693.000	20	2.916.657.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		800.000.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				17.500.000		17.500.000		28.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	17.500.000	10	17.500.000	10	28.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				734.193.000		734.193.000		1.145.247.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	734.193.000	10	734.193.000	10	1.145.247.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				443.000.000		443.000.000		443.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	443.000.000	5	443.000.000	5	443.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				315.000.000		315.000.000		499.910.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	315.000.000	10	315.000.000	10	499.910.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.910.193.000		18.910.193.000		19.755.132.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	16	18.910.193.000	16	18.910.193.000	16	19.755.132.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		35.000.000		28.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	35.000.000	4	35.000.000	4	28.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		676.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	676.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		183.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	183.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.975.193.000		17.975.193.000		18.866.582.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	17.975.193.000	4	17.975.193.000	4	18.866.582.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.583.250.000		5.583.250.000		6.590.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	5.583.250.000	5	5.583.250.000	5	6.590.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000		150.000.000		187.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	150.000.000	6	150.000.000	6	187.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		383.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	300.000.000	20	300.000.000	20	383.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		69.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	75.000.000	10	75.000.000	10	69.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.843.250.000		4.843.250.000		5.706.750.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	4.843.250.000	12	4.843.250.000	12	5.706.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				215.000.000		215.000.000		244.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	215.000.000	24	215.000.000	24	244.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	337.600.000	100	337.600.000	100	344.011.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					94.700.000		94.700.000		81.441.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	94.700.000	100	94.700.000	100	81.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.760.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.570.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	1.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		8.343.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.343.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	16.500.000	4	16.500.000	4	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		3.490.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		10.538.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	10.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.000.000		36.000.000		30.240.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	36.000.000	4	36.000.000	4	30.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.500.000		114.500.000		114.170.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	114.500.000	4	114.500.000	4	114.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.170.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.000.000		113.000.000		113.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	113.000.000	12	113.000.000	12	113.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.400.000		92.400.000		112.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	92.400.000	4	92.400.000	4	112.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.400.000		74.400.000		94.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	74.400.000	10	74.400.000	10	94.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	542.250.000	100	542.250.000	100	570.432.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000		160.000.000		153.057.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	160.000.000	100	160.000.000	100	153.057.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000		18.000.000		15.771.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	15.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.380.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		5.009.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.000.000		56.000.000		46.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	56.000.000	4	56.000.000	4	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.009.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.354.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		15.771.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	15.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.128.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.700.000		46.700.000		57.635.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.700.000	4	46.700.000	4	57.635.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.500.000		47.500.000		56.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	1	47.500.000	1	47.500.000	1	56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.500.000		47.500.000		56.400.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	47.500.000	1	47.500.000	1	56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.250.000		194.250.000		170.971.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	194.250.000	4	194.250.000	4	170.971.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		1.971.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	1.971.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				192.000.000		192.000.000		169.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	192.000.000	12	192.000.000	12	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.500.000		140.500.000		190.004.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	140.500.000	4	140.500.000	4	190.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.500.000		95.500.000		145.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	95.500.000	10	95.500.000	10	145.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.004.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	694.955.000	100	694.955.000	100	633.945.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.155.000		223.155.000		196.986.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	223.155.000	100	223.155.000	100	196.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.415.000		19.415.000		19.415.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	19.415.000	4	19.415.000	4	19.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.120.000		21.120.000		13.090.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.120.000	4	21.120.000	4	13.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		10.106.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	10.106.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.650.000		28.650.000		31.900.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.650.000	4	28.650.000	4	31.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		600.000		600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	600.000	12	600.000	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		19.181.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	19.181.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	4	12.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111.370.000		111.370.000		90.694.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111.370.000	4	111.370.000	4	90.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.500.000		177.500.000		149.909.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	177.500.000	4	177.500.000	4	149.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	4	500.000	4	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.000.000		177.000.000		149.509.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	177.000.000	12	177.000.000	12	149.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.800.000		286.800.000		279.550.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	286.800.000	4	286.800.000	4	279.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.000.000		51.000.000		56.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	51.000.000	2	51.000.000	2	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.400.000		17.400.000		11.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	17.400.000	10	17.400.000	10	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.400.000		203.400.000		203.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	203.400.000	10	203.400.000	10	203.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		8.650.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	10	8.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	444.025.000	100	444.025.000	100	476.025.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.100.000		152.100.000		136.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	152.100.000	100	152.100.000	100	136.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		28.000.000		24.210.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	4	28.000.000	4	24.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		9.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	4	8.000.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		600.000		600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	600.000	12	600.000	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.500.000		61.500.000		48.319.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	61.500.000	4	61.500.000	4	48.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					24.700.000		24.700.000		128.830.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit		24.700.000		24.700.000	1	128.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.700.000		24.700.000		128.830.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	24.700.000	1	24.700.000	1	128.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199.550.000		199.550.000		145.602.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	4	199.550.000	4	199.550.000	4	145.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				196.550.000		196.550.000		142.602.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	196.550.000	12	196.550.000	12	142.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.675.000		67.675.000		64.964.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit		67.675.000		67.675.000	2	64.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.000.000		16.000.000		16.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.025.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	8.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.275.000		39.275.000		38.739.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	39.275.000	10	39.275.000	10	38.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.400.000		2.400.000		2.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	2.400.000	10	2.400.000	10	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	357.140.000	100	357.140.000	100	353.608.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.130.000		116.130.000		116.748.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	116.130.000	100	116.130.000	100	116.748.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.447.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.447.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		1.870.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	1.870.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.830.000		41.830.000		47.431.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.830.000	4	41.830.000	4	47.431.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.760.000		9.760.000		9.760.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	1	9.760.000	1	9.760.000	1	9.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.760.000		9.760.000		9.760.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.760.000	1	9.760.000	1	9.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.250.000		146.250.000		142.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	146.250.000	4	146.250.000	4	142.100.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		2.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.100.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.000.000		144.000.000		140.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	144.000.000	12	144.000.000	12	140.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	493.700.000	100	493.700.000	100	496.154.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.860.000		99.860.000		103.114.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	99.860.000	100	99.860.000	100	103.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		8.125.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	4	9.000.000	4	8.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.300.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		5.450.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		4.865.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	4.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		150.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		16.750.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	16.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.560.000		30.560.000		40.474.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.560.000	4	30.560.000	4	40.474.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.650.000		30.650.000		30.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	30.650.000	1	30.650.000	1	30.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.650.000		30.650.000		30.650.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.650.000	1	30.650.000	1	30.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					221.250.000		221.250.000		220.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	221.250.000	4	221.250.000	4	220.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		1.450.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	1.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		219.000.000		219.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	219.000.000	12	219.000.000	12	219.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.940.000		141.940.000		141.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	141.940.000	4	141.940.000	4	141.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.000.000		27.000.000		27.000.000		

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.040.000		94.040.000		94.040.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	94.040.000	10	94.040.000	10	94.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.400.000		13.400.000		13.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	13.400.000	10	13.400.000	10	13.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	317.914.000	100	317.914.000	100	305.635.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.414.000		87.414.000		73.785.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	87.414.000	100	87.414.000	100	73.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.320.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		9.880.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	4	14.000.000	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		1.440.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		11.470.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	11.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.700.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.214.000		41.214.000		32.975.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.214.000	4	41.214.000	4	32.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.214.000		41.214.000		32.975.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.214.000	4	41.214.000	4	32.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		21.000.000		21.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		65.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	61.500.000	4	61.500.000	4	65.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		63.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	63.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					148.000.000		148.000.000		145.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		148.000.000		148.000.000	2	145.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		2.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	2.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	503.209.000	100	503.209.000	100	472.343.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.339.000		118.339.000		121.423.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	118.339.000	100	118.339.000	100	121.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.915.000		11.915.000		12.900.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.915.000	4	11.915.000	4	12.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.900.000		2.900.000		2.900.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.900.000	4	2.900.000	4	2.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.438.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.995.000		20.995.000		20.995.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.995.000	4	20.995.000	4	20.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		6.275.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	4	6.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		80.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	80.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				25.507.000		25.507.000		22.458.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	25.507.000	4	25.507.000	4	22.458.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.550.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.222.000		37.222.000		44.827.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	37.222.000	4	37.222.000	4	44.827.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		20.000.000		16.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		16.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.650.000		162.650.000		137.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	162.650.000	4	162.650.000	4	137.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.400.000		160.400.000		135.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	160.400.000	12	160.400.000	12	135.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.220.000		202.220.000		197.620.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	202.220.000	4	202.220.000	4	197.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.200.000		49.200.000		44.900.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	49.200.000	2	49.200.000	2	44.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.700.000		17.700.000		17.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	17.700.000	10	17.700.000	10	17.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				111.720.000		111.720.000		111.720.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	111.720.000	10	111.720.000	10	111.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.600.000		23.600.000		23.300.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	23.600.000	10	23.600.000	10	23.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	548.866.000	100	548.866.000	100	528.278.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					166.126.000		166.126.000		157.052.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	166.126.000	100	166.126.000	100	157.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		16.000.000		14.018.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	16.000.000	4	16.000.000	4	14.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.431.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.431.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		17.459.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	17.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		7.514.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	4	9.000.000	4	7.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.750.000		3.750.000		3.750.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.750.000	12	3.750.000	12	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		30.000.000		26.625.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	26.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.750.000		6.750.000		6.210.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.750.000	4	6.750.000	4	6.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.626.000		42.626.000		44.045.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.626.000	4	42.626.000	4	44.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.990.000		55.990.000		55.990.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	55.990.000	1	55.990.000	1	55.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.990.000		55.990.000		55.990.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	55.990.000	1	55.990.000	1	55.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.250.000		132.250.000		100.656.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	132.250.000	4	132.250.000	4	100.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		130.000.000		99.156.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	130.000.000	12	130.000.000	12	99.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.500.000		194.500.000		214.580.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	194.500.000	4	194.500.000	4	214.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.830.000		63.830.000		61.510.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	63.830.000	2	63.830.000	2	61.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		122.600.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	122.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.670.000		15.670.000		15.470.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15.670.000	10	15.670.000	10	15.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	412.200.000	100	412.200.000	100	440.855.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.700.000		110.700.000		113.505.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	110.700.000	100	110.700.000	100	113.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		12.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.000.000		56.000.000		59.805.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.000.000	4	56.000.000	4	59.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit		5.000.000		5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.500.000		108.500.000		108.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	108.500.000	4	108.500.000	4	108.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.000.000		107.000.000		107.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	107.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.000.000		188.000.000		213.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit		188.000.000		188.000.000	2	213.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.000.000		170.000.000		195.850.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	170.000.000	10	170.000.000	10	195.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	276.750.000	100	276.750.000	100	264.493.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					89.200.000		89.200.000		115.743.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	89.200.000	100	89.200.000	100	115.743.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.475.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	1.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		5.100.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		318.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		250.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		42.000.000		69.600.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	4	42.000.000	4	69.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					68.000.000		68.000.000		23.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit		68.000.000		68.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.000.000		68.000.000		23.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	68.000.000	1	68.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		65.000.000		61.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	65.000.000	4	65.000.000	4	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.000.000		61.000.000		60.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.000.000	12	61.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.550.000		54.550.000		64.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit		54.550.000		54.550.000	2	64.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.350.000		12.350.000		12.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	12.350.000	2	12.350.000	2	12.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.200.000		22.200.000		35.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	22.200.000	10	22.200.000	10	35.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		7.900.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	7.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	437.000.000	100	437.000.000	100	467.970.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					98.500.000		98.500.000		125.615.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	98.500.000	100	98.500.000	100	125.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		12.625.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	4	9.000.000	4	12.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		5.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		7.180.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	7.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		23.400.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	25.000.000	4	25.000.000	4	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		3.300.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		1.010.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.300.000		36.300.000		55.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	36.300.000	4	36.300.000	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		13.000.000		13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					220.500.000		220.500.000		180.555.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	220.500.000	4	220.500.000	4	180.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		219.000.000		177.055.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	219.000.000	12	219.000.000	12	177.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000		105.000.000		148.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		105.000.000		105.000.000	2	148.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		18.000.000		22.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	2	18.000.000	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				77.000.000		77.000.000		114.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	77.000.000	10	77.000.000	10	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	308.040.000	100	308.040.000	100	299.487.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					93.700.000		93.700.000		89.717.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	93.700.000	100	93.700.000	100	89.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		7.625.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	7.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		3.500.000		2.795.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.500.000	4	3.500.000	4	2.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.339.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		42.000.000		43.358.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	4	42.000.000	4	43.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit		13.000.000		13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.740.000		77.740.000		77.670.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	77.740.000	4	77.740.000	4	77.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				740.000		740.000		670.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	740.000	4	740.000	4	670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000		77.000.000		77.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	77.000.000	12	77.000.000	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.600.000		123.600.000		119.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit		123.600.000		123.600.000	2	119.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		7.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	7.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		7.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	7.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.600.000		98.600.000		98.600.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	98.600.000	10	98.600.000	10	98.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		4.850.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	4.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	528.581.000	100	528.581.000	100	548.020.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					164.400.000		164.400.000		161.403.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	164.400.000	100	164.400.000	100	161.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		10.514.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	10.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.174.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		28.299.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	28.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		28.000.000		28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.349.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.400.000		2.400.000		1.805.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	12	2.400.000	12	1.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		20.000.000		17.523.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	17.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		5.504.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.000.000		67.000.000		58.235.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.000.000	4	67.000.000	4	58.235.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.500.000		49.500.000		73.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	1	49.500.000	1	49.500.000	1	73.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.500.000		49.500.000		73.900.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.500.000	1	49.500.000	1	73.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.000.000		149.000.000		133.628.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	149.000.000	4	149.000.000	4	133.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.620.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				146.000.000		146.000.000		131.008.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	146.000.000	12	146.000.000	12	131.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.681.000		165.681.000		179.089.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	4	165.681.000	4	165.681.000	4	179.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.536.000		21.536.000		22.275.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	21.536.000	2	21.536.000	2	22.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.145.000		124.145.000		137.145.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	124.145.000	10	124.145.000	10	137.145.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		9.669.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	9.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	482.627.000	100	482.627.000	100	482.114.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.177.000		144.177.000		149.714.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	144.177.000	100	144.177.000	100	149.714.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		24.000.000		21.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	4	24.000.000	4	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		150.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.359.000		21.359.000		25.090.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.359.000	4	21.359.000	4	25.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.360.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.128.000		21.128.000		19.914.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	21.128.000	4	21.128.000	4	19.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.890.000		50.890.000		59.900.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.890.000	4	50.890.000	4	59.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					44.000.000		44.000.000		82.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	1	44.000.000	1	44.000.000	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		44.000.000		82.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	44.000.000	1	44.000.000	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.750.000		159.750.000		110.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	159.750.000	4	159.750.000	4	110.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		2.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.500.000		157.500.000		108.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	157.500.000	12	157.500.000	12	108.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.700.000		134.700.000		139.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	134.700.000	4	134.700.000	4	139.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		8.000.000		1.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	8.000.000	10	8.000.000	10	1.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		115.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.700.000		8.700.000		4.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	8.700.000	10	8.700.000	10	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	529.050.000	100	529.050.000	100	537.011.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.800.000		132.800.000		131.591.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	132.800.000	100	132.800.000	100	131.591.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		10.500.000		9.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.500.000	4	10.500.000	4	9.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.525.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.525.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		10.035.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	10.035.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		15.681.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	15.681.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.120.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.120.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.000.000		56.000.000		62.230.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.000.000	4	56.000.000	4	62.230.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.750.000		193.750.000		172.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	193.750.000	4	193.750.000	4	172.920.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		1.920.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	1.920.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				191.500.000		191.500.000		171.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	191.500.000	12	191.500.000	12	171.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		195.000.000		225.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		195.000.000		195.000.000	2	225.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		180.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150.000.000	10	150.000.000	10	180.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	458.458.000	100	458.458.000	100	460.512.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.248.000		163.248.000		133.532.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	163.248.000	100	163.248.000	100	133.532.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.259.000		21.259.000		17.584.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.259.000	4	21.259.000	4	17.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.952.000		29.952.000		23.536.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	29.952.000	4	29.952.000	4	23.536.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.350.000		25.350.000		25.350.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	25.350.000	4	25.350.000	4	25.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.055.000		8.055.000		6.555.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.055.000	4	8.055.000	4	6.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				22.132.000		22.132.000		17.197.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	22.132.000	4	22.132.000	4	17.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		2.260.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	2.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.700.000		46.700.000		35.750.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.700.000	4	46.700.000	4	35.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.500.000		34.500.000		34.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	34.500.000	1	34.500.000	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.500.000		34.500.000		34.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.500.000	1	34.500.000	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.400.000		165.400.000		162.320.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	165.400.000	4	165.400.000	4	162.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		5.400.000		2.320.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.400.000	4	5.400.000	4	2.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.310.000		95.310.000		130.160.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	95.310.000	4	95.310.000	4	130.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.960.000		24.960.000		39.960.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	24.960.000	2	24.960.000	2	39.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.400.000		7.400.000		7.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.400.000	10	7.400.000	10	7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.200.000		56.200.000		76.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	56.200.000	10	56.200.000	10	76.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.750.000		6.750.000		6.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	6.750.000	10	6.750.000	10	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	287.320.000	100	287.320.000	100	311.875.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					97.400.000		97.400.000		86.575.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	97.400.000	100	97.400.000	100	86.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		5.255.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.350.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		3.475.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		12.000.000		10.550.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	10.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.200.000		51.200.000		44.495.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.200.000	4	51.200.000	4	44.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.420.000		12.420.000		12.420.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	1	12.420.000	1	12.420.000	1	12.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.420.000		12.420.000		12.420.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.420.000	1	12.420.000	1	12.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.500.000		137.500.000		131.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	137.500.000	4	137.500.000	4	131.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.000.000		136.000.000		131.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	136.000.000	12	136.000.000	12	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		40.000.000		81.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		6.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	10	20.000.000	10	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		4.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	373.050.000	100	373.050.000	100	363.672.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.300.000		115.300.000		103.202.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	115.300.000	100	115.300.000	100	103.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		7.885.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	4	9.000.000	4	7.885.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		5.008.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.420.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		18.000.000		15.771.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	4	18.000.000	4	15.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		2.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		42.000.000		38.218.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	4	42.000.000	4	38.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		7.500.000		12.590.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit		7.500.000		7.500.000	1	12.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		12.590.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	12.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.250.000		163.250.000		162.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	163.250.000	4	163.250.000	4	162.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		1.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	4	2.250.000	4	1.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.000.000		161.000.000		161.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	161.000.000	12	161.000.000	12	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.000.000		87.000.000		84.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit		87.000.000		87.000.000	2	84.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		5.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	610.880.000	100	610.880.000	100	637.031.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.230.000		150.230.000		154.661.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	150.230.000	100	150.230.000	100	154.661.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		21.000.000		21.280.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.280.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.340.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.340.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		8.000.000		7.460.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	4	8.000.000	4	7.460.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		28.000.000		28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.230.000		9.230.000		8.330.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9.230.000	4	9.230.000	4	8.330.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.400.000		2.400.000		500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	12	2.400.000	12	500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				24.000.000		24.000.000		25.921.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	4	24.000.000	4	25.921.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		5.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.600.000		47.600.000		54.330.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	47.600.000	4	47.600.000	4	54.330.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.000.000		34.000.000		56.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	34.000.000	1	34.000.000	1	56.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.000.000		34.000.000		56.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.000.000	1	34.000.000	1	56.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.300.000		303.300.000		280.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	303.300.000	4	303.300.000	4	280.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.300.000		300.300.000		277.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.300.000	12	300.300.000	12	277.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.350.000		123.350.000		146.170.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	123.350.000	4	123.350.000	4	146.170.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.800.000		25.800.000		35.120.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.800.000	2	25.800.000	2	35.120.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		11.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	11.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				77.550.000		77.550.000		87.550.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	77.550.000	10	77.550.000	10	87.550.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		12.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Sosial								**850.000.000**		**850.000.000**		**717.234.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	3.075	850.000.000	3.075	850.000.000	3.075	717.234.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						850.000.000		850.000.000		717.234.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	717.234.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000		850.000.000		717.234.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	717.234.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		400.000.000		345.938.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	400.000.000	5	400.000.000	5	345.938.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000		400.000.000		325.948.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	400.000.000	2	400.000.000	2	325.948.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		22.674.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.674.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		22.674.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.674.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									**199.768.275.000**		**199.728.275.000**		**196.620.165.000**	**Dinas Sosial**	
						Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	10.01		10.01		10.01		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								**10.486.000.000**		**10.446.000.000**		**7.954.130.000**		
						Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	8.88	10.486.000.000	8.88	10.446.000.000	8.88	7.954.130.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						10.286.000.000		10.246.000.000		7.704.130.000		
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8.88	10.286.000.000	8.88	10.246.000.000	8.88	7.704.130.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		185.111.000		
						Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	100	200.000.000	100	200.000.000	100	185.111.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
		1.06.02.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				200.000.000		200.000.000		185.111.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	200.000.000	100	200.000.000	100	185.111.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
		1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					10.086.000.000		10.046.000.000		7.519.019.000		
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	2300	850.000.000	2300	850.000.000	2300	790.898.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				750.000.000		750.000.000		705.702.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	2300	750.000.000	2300	750.000.000	2300	705.702.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0015			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan				100.000.000		100.000.000		85.196.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	60	100.000.000	60	100.000.000	60	85.196.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	670	400.000.000	670	400.000.000	670	552.193.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		1.06.02.1.02.0011			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				355.720.000		355.720.000		486.058.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	670	355.720.000	670	355.720.000	670	486.058.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0017			Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional				44.280.000		44.280.000		66.135.000		
						Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	5	44.280.000	5	44.280.000	5	66.135.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	1733	8.836.000.000	1733	8.796.000.000	1733	6.175.928.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				4.384.000.000		4.344.000.000		4.371.585.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	100	4.384.000.000	100	4.344.000.000	100	4.371.585.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0006			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi				150.000.000		150.000.000		114.431.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga	50	150.000.000	50	150.000.000	50	114.431.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0008			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi				4.002.000.000		4.002.000.000		1.425.693.000		
						Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1318	4.002.000.000	1318	4.002.000.000	1318	1.425.693.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0012			Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		71.850.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	35	150.000.000	35	150.000.000	35	71.850.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0016			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		192.369.000		
						Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	15	150.000.000	15	150.000.000	15	192.369.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						200.000.000		200.000.000		250.000.000		
						Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.07.1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					200.000.000		200.000.000		250.000.000		
						Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				50.000.000		50.000.000		100.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin								**26.200.000.000**		**26.200.000.000**		**24.983.053.000**		
						Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin	%	9.48	26.200.000.000	9.48	26.200.000.000	9.48	24.983.053.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						26.200.000.000		26.200.000.000		24.983.053.000		
						Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0.27	26.200.000.000	0.27	26.200.000.000	0.27	24.983.053.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					26.200.000.000		26.200.000.000		24.983.053.000		
						Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Kelompok)	Orang	7500	17.250.000.000	7500	17.250.000.000	7500	16.763.450.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Kelompok	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				17.250.000.000		17.250.000.000		16.763.450.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	7500	17.250.000.000	7500	17.250.000.000	7500	16.763.450.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Kelompok	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Perseorangan)	Orang	2000	7.250.000.000	2000	7.250.000.000	2000	6.949.164.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Perseorangan	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				7.250.000.000		7.250.000.000		6.949.164.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	7.250.000.000	2000	7.250.000.000	2000	6.949.164.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Perseorangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data	Kabupaten/ Kota	35	1.700.000.000	35	1.700.000.000	35	1.270.439.000	Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin	
		1.06.05.1.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				1.700.000.000		1.700.000.000		1.270.439.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kabupaten/ Kota	35	1.700.000.000	35	1.700.000.000	35	1.270.439.000	Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								**163.082.275.000**		**163.082.275.000**		**163.682.982.000**		
						Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	163.082.275.000	100	163.082.275.000	100	163.682.982.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						200.000.000		200.000.000		181.864.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	181.864.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					200.000.000		200.000.000		181.864.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	181.864.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		1.06.03.1.01.0003			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				200.000.000		200.000.000		181.864.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	181.864.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						74.090.123.000		74.090.123.000		71.594.533.000		
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	3.312.095.000	100	3.312.095.000	100	3.100.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.032.015.000		1.032.015.000		917.054.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi	Orang	75	932.015.000	75	932.015.000	75	809.824.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				707.410.000		707.410.000		588.970.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	707.410.000	75	707.410.000	75	588.970.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Sandang				136.905.000		136.905.000		129.889.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	136.905.000	75	136.905.000	75	129.889.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				74.950.000		74.950.000		73.965.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	74.950.000	75	74.950.000	75	73.965.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.750.000		12.750.000		17.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	75	12.750.000	75	12.750.000	75	17.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi	Orang	75	100.000.000	75	100.000.000	75	107.230.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Alat Bantu				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	75	2.000.000	75	2.000.000	75	2.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				59.810.000		59.810.000		69.670.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	59.810.000	75	59.810.000	75	69.670.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.600.000	75	3.600.000	75	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.200.000		13.200.000		14.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.200.000	75	13.200.000	75	14.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				370.000		370.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	370.000	75	370.000	75	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.640.000		5.640.000		5.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	5.640.000	75	5.640.000	75	5.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	75	500.000	75	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.001			Pemulasaraan				3.000.000		3.000.000		100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.000.000	75	3.000.000	75	100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				11.880.000		11.880.000		11.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	11.880.000	4	11.880.000	4	11.880.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					2.280.080.000		2.280.080.000		2.182.946.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi	Orang	120	1.782.870.000	120	1.782.870.000	120	1.744.570.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	120	500.000	120	500.000	120	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				359.580.000		359.580.000		334.233.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	359.580.000	120	359.580.000	120	334.233.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				270.790.000		270.790.000		328.110.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	270.790.000	120	270.790.000	120	328.110.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.000.000		12.000.000		13.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000	120	12.000.000	120	13.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.140.000.000		1.140.000.000		1.068.527.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.140.000.000	120	1.140.000.000	120	1.068.527.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi	Orang	120	497.210.000	120	497.210.000	120	438.376.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				39.675.000		39.675.000		54.675.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	39.675.000	120	39.675.000	120	54.675.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.600.000		6.600.000		1.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.600.000	120	6.600.000	120	1.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				437.450.000		437.450.000		367.938.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	437.450.000	120	437.450.000	120	367.938.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				470.000		470.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	470.000	120	470.000	120	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		6.000.000		5.680.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.000.000	120	6.000.000	120	5.680.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				6.310.000		6.310.000		8.223.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	6.310.000	4	6.310.000	4	8.223.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				250.000		250.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	120	250.000	120	250.000	120	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				455.000		455.000		20.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	120	455.000	120	455.000	120	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	2.336.180.000	100	2.336.180.000	100	2.318.780.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.336.180.000		2.336.180.000		2.318.780.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	160	2.103.030.000	160	2.103.030.000	160	2.084.070.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.553.600.000		1.553.600.000		1.541.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.553.600.000	160	1.553.600.000	160	1.541.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				437.430.000		437.430.000		437.430.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	437.430.000	160	437.430.000	160	437.430.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				97.600.000		97.600.000		91.040.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	97.600.000	160	97.600.000	160	91.040.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	160	14.400.000	160	14.400.000	160	14.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	160	233.150.000	160	233.150.000	160	234.710.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.000.000	160	1.000.000	160	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				126.350.000		126.350.000		126.350.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	126.350.000	160	126.350.000	160	126.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	160	14.400.000	160	14.400.000	160	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				8.000.000		8.000.000		4.190.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	8.000.000	160	8.000.000	160	4.190.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		8.000.000		4.020.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	8.000.000	160	8.000.000	160	4.020.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		36.000.000		48.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	160	36.000.000	160	36.000.000	160	48.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.000.000	160	1.000.000	160	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				30.400.000		30.400.000		30.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	30.400.000	160	30.400.000	160	30.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.000.000		8.000.000		6.350.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	6.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	3.817.310.000	100	3.817.310.000	100	3.572.499.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					636.040.000		636.040.000		509.000.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	562.240.000	50	562.240.000	50	457.590.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				470.500.000		470.500.000		366.346.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	50	470.500.000	50	366.346.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				60.740.000		60.740.000		60.740.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	60.740.000	50	60.740.000	50	60.740.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.000.000		21.000.000		20.504.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	21.000.000	50	21.000.000	50	20.504.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	73.800.000	50	73.800.000	50	51.410.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				37.000.000		37.000.000		37.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	37.000.000	50	37.000.000	50	37.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.600.000	50	3.600.000	50	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.200.000		17.200.000		2.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.200.000	50	17.200.000	50	2.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		417.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	417.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				7.500.000		7.500.000		0		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.500.000	50	7.500.000	50	0	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2.500.000		2.500.000		2.293.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.293.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					3.181.270.000		3.181.270.000		3.063.499.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	215	2.895.845.000	215	2.895.845.000	215	2.786.416.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				2.087.650.000		2.087.650.000		2.005.265.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	215	2.087.650.000	215	2.087.650.000	215	2.005.265.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				655.320.000		655.320.000		655.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	215	655.320.000	215	655.320.000	215	655.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				112.875.000		112.875.000		85.831.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	215	112.875.000	215	112.875.000	215	85.831.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	215	40.000.000	215	40.000.000	215	40.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	215	285.425.000	215	285.425.000	215	277.083.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	215	1.000.000	215	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				134.875.000		134.875.000		134.875.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	215	134.875.000	215	134.875.000	215	134.875.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		8.805.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	215	14.400.000	215	14.400.000	215	8.805.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				8.750.000		8.750.000		7.821.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	8.750.000	215	8.750.000	215	7.821.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.750.000		8.750.000		7.821.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	8.750.000	215	8.750.000	215	7.821.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	215	72.000.000	215	72.000.000	215	72.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		834.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	215	1.000.000	215	834.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				35.900.000		35.900.000		30.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	215	35.900.000	215	35.900.000	215	30.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.750.000		8.750.000		13.027.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.750.000	4	8.750.000	4	13.027.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	4.350.654.000	100	4.350.654.000	100	4.332.031.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.690.894.000		1.690.894.000		1.682.835.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	1.526.134.000	130	1.526.134.000	130	1.527.552.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.227.900.000		1.227.900.000		1.227.990.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.227.900.000	130	1.227.900.000	130	1.227.990.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				228.574.000		228.574.000		228.574.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	228.574.000	130	228.574.000	130	228.574.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				54.660.000		54.660.000		55.988.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	54.660.000	130	54.660.000	130	55.988.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	130	15.000.000	130	15.000.000	130	15.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	164.760.000	133	164.760.000	130	155.283.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		640.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	130	500.000	130	500.000	130	640.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				91.500.000		91.500.000		90.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	91.500.000	130	91.500.000	130	90.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	130	14.400.000	130	14.400.000	130	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.440.000		20.440.000		20.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	20.440.000	130	20.440.000	130	20.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.720.000		3.720.000		2.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	3.720.000	130	3.720.000	130	2.070.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.440.000		6.440.000		4.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	6.440.000	130	6.440.000	130	4.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.000.000	130	1.000.000	130	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		3.000.000		1.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	130	3.000.000	130	3.000.000	130	1.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				23.760.000		23.760.000		20.733.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	23.760.000	4	23.760.000	4	20.733.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.659.760.000		2.659.760.000		2.649.196.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	195	2.453.795.000	195	2.453.795.000	195	2.435.669.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.818.900.000		1.818.900.000		1.816.101.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.818.900.000	195	1.818.900.000	195	1.816.101.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				382.165.000		382.165.000		386.923.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	195	382.165.000	195	382.165.000	195	386.923.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				204.730.000		204.730.000		184.645.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	195	204.730.000	195	204.730.000	195	184.645.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	195	48.000.000	195	48.000.000	195	48.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	195	205.965.000	195	205.965.000	195	213.527.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.280.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.000.000	195	1.000.000	195	1.280.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				104.645.000		104.645.000		104.645.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	195	104.645.000	195	104.645.000	195	104.645.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	195	14.400.000	195	14.400.000	195	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.720.000		3.720.000		1.430.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	3.720.000	195	3.720.000	195	1.430.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.440.000		6.440.000		4.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	6.440.000	195	6.440.000	195	4.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		36.000.000		54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	195	36.000.000	195	36.000.000	195	54.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.000.000	195	1.000.000	195	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				15.000.000		15.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	195	15.000.000	195	15.000.000	195	12.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				23.760.000		23.760.000		20.872.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	23.760.000	4	23.760.000	4	20.872.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	2.593.013.000	100	2.593.013.000	100	2.506.142.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					497.852.000		497.852.000		461.599.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	35	436.052.000	35	436.052.000	35	405.383.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				329.350.000		329.350.000		301.986.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	35	329.350.000	35	329.350.000	35	301.986.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				42.320.000		42.320.000		42.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	35	42.320.000	35	42.320.000	35	42.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				61.232.000		61.232.000		57.927.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	35	61.232.000	35	61.232.000	35	57.927.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.150.000		3.150.000		3.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.150.000	35	3.150.000	35	3.150.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	35	61.800.000	35	61.800.000	35	56.216.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	35	500.000	35	500.000	35	800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				44.500.000		44.500.000		44.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	35	44.500.000	35	44.500.000	35	44.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.600.000	35	3.600.000	35	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.500.000		6.500.000		5.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	35	6.500.000	35	6.500.000	35	5.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.140.000		1.140.000		1.290.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	35	1.140.000	35	1.140.000	35	1.290.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1.000.000		1.000.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	35	1.000.000	35	1.000.000	35	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		200.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	35	500.000	35	500.000	35	200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		3.000.000		20.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.000.000	35	3.000.000	35	20.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1.060.000		1.060.000		586.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	1.060.000	4	1.060.000	4	586.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.404.111.000		1.404.111.000		1.359.903.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	80	1.120.891.000	80	1.120.891.000	80	1.166.561.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		200.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	80	500.000	80	200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				186.310.000		186.310.000		193.190.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	186.310.000	80	186.310.000	80	193.190.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				182.536.000		182.536.000		266.676.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	182.536.000	80	182.536.000	80	266.676.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				800.000		800.000		1.570.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	800.000	80	800.000	80	1.570.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				750.745.000		750.745.000		704.925.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	750.745.000	80	750.745.000	80	704.925.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	80	283.220.000	80	283.220.000	80	193.342.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				254.400.000		254.400.000		170.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	254.400.000	80	254.400.000	80	170.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.940.000		1.940.000		32.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	1.940.000	80	1.940.000	80	32.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.710.000		2.710.000		1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.710.000	80	2.710.000	80	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2.710.000		2.710.000		2.710.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	2.710.000	4	2.710.000	4	2.710.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		500.000		250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	80	500.000	80	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.960.000		2.960.000		650.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.960.000	80	2.960.000	80	650.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					691.050.000		691.050.000		684.640.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	625.900.000	50	625.900.000	50	622.680.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				473.450.000		473.450.000		473.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	473.450.000	50	473.450.000	50	473.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				61.700.000		61.700.000		61.700.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	61.700.000	50	61.700.000	50	61.700.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				84.750.000		84.750.000		82.550.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	84.750.000	50	84.750.000	50	82.550.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		6.000.000		4.980.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.000.000	50	6.000.000	50	4.980.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	65.150.000	50	65.150.000	50	61.960.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				12.600.000		12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.600.000	50	12.600.000	50	12.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				30.990.000		30.990.000		30.990.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	30.990.000	50	30.990.000	50	30.990.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				7.300.000		7.300.000		6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.300.000	50	7.300.000	50	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				3.160.000		3.160.000		1.510.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.160.000	50	3.160.000	50	1.510.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				1.600.000		1.600.000		1.460.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	1.600.000	4	1.600.000	4	1.460.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis				500.000		500.000		400.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	3.157.773.000	100	3.157.773.000	100	3.198.193.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.671.232.000		1.671.232.000		1.739.762.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra	Orang	135	1.551.102.000	135	1.551.102.000	135	1.622.052.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.270.350.000		1.270.350.000		1.270.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.270.350.000	135	1.270.350.000	135	1.270.350.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				244.127.000		244.127.000		244.127.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	135	244.127.000	135	244.127.000	135	244.127.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				29.625.000		29.625.000		100.575.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	135	29.625.000	135	29.625.000	135	100.575.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	135	7.000.000	135	7.000.000	135	7.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra	Orang	135	120.130.000	135	120.130.000	135	117.710.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.000.000	135	1.000.000	135	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.200.000		55.200.000		55.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	135	55.200.000	135	55.200.000	135	55.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				5.800.000		5.800.000		5.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	135	5.800.000	135	5.800.000	135	5.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.250.000		17.250.000		17.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	135	17.250.000	135	17.250.000	135	17.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.750.000		6.750.000		6.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	6.750.000	135	6.750.000	135	6.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.750.000		6.750.000		6.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	6.750.000	135	6.750.000	135	6.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		80.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.000.000	135	1.000.000	135	80.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				13.500.000		13.500.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	135	13.500.000	135	13.500.000	135	12.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.880.000		12.880.000		12.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	12.880.000	4	12.880.000	4	12.880.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.486.541.000		1.486.541.000		1.458.431.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	1.154.181.000	80	1.154.181.000	80	1.157.391.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				750.000		750.000		200.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	750.000	80	750.000	80	200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				208.880.000		208.880.000		208.880.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	208.880.000	80	208.880.000	80	208.880.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				183.593.000		183.593.000		187.353.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	183.593.000	80	183.593.000	80	187.353.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	6.000.000	80	6.000.000	80	6.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				754.958.000		754.958.000		754.958.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	754.958.000	80	754.958.000	80	754.958.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	332.360.000	145	332.360.000	80	301.040.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		25.200.000		25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	25.200.000	80	25.200.000	80	25.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				12.000.000		12.000.000		9.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.000.000	80	12.000.000	80	9.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				272.610.000		272.610.000		247.010.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	272.610.000	80	272.610.000	80	247.010.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.000.000		3.000.000		2.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	3.000.000	80	3.000.000	80	2.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.400.000		7.400.000		7.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.400.000	80	7.400.000	80	7.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				9.400.000		9.400.000		9.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	9.400.000	4	9.400.000	4	9.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		500.000		40.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	80	500.000	80	40.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.250.000		2.250.000		40.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.250.000	80	2.250.000	80	40.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	4.623.520.000	100	4.623.520.000	100	4.565.485.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					3.264.180.000		3.264.180.000		3.224.493.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	210	340.850.000	210	340.850.000	210	318.058.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	210	4.000.000	210	4.000.000	210	4.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				135.450.000		135.450.000		135.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	210	135.450.000	210	135.450.000	210	135.450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	210	14.400.000	210	14.400.000	210	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				21.570.000		21.570.000		16.510.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	21.570.000	210	21.570.000	210	16.510.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.500.000		10.500.000		9.482.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	10.500.000	210	10.500.000	210	9.482.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				110.250.000		110.250.000		96.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	210	110.250.000	210	110.250.000	210	96.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		850.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	210	1.000.000	210	1.000.000	210	850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				35.400.000		35.400.000		33.820.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	210	35.400.000	210	35.400.000	210	33.820.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.280.000		8.280.000		7.546.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.280.000	4	8.280.000	4	7.546.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial	Orang	210	2.923.330.000	210	2.923.330.000	210	2.906.435.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				2.023.600.000		2.023.600.000		2.023.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	210	2.023.600.000	210	2.023.600.000	210	2.023.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				640.080.000		640.080.000		640.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	210	640.080.000	210	640.080.000	210	640.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				211.650.000		211.650.000		194.755.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	210	211.650.000	210	211.650.000	210	194.755.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	210	48.000.000	210	48.000.000	210	48.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.359.340.000		1.359.340.000		1.340.992.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial	Orang	110	1.263.240.000	110	1.263.240.000	110	1.253.086.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				1.035.100.000		1.035.100.000		1.030.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	110	1.035.100.000	110	1.035.100.000	110	1.030.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				141.240.000		141.240.000		141.240.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	110	141.240.000	110	141.240.000	110	141.240.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				62.900.000		62.900.000		57.246.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	110	62.900.000	110	62.900.000	110	57.246.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	110	24.000.000	110	24.000.000	110	24.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	96.100.000	110	96.100.000	110	87.906.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				45.500.000		45.500.000		45.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	45.500.000	110	45.500.000	110	45.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				12.700.000		12.700.000		12.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	12.700.000	110	12.700.000	110	12.650.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				17.500.000		17.500.000		9.794.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	110	17.500.000	110	17.500.000	110	9.794.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				5.500.000		5.500.000		5.062.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.062.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	110	500.000	110	500.000	110	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	2.049.206.000	100	2.049.206.000	100	2.045.247.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					663.416.000		663.416.000		692.246.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono	Orang	50	583.750.000	50	583.750.000	50	615.450.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				472.750.000		472.750.000		473.330.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	472.750.000	50	472.750.000	50	473.330.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				84.450.000		84.450.000		84.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	84.450.000	50	84.450.000	50	84.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.550.000		20.550.000		49.670.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	20.550.000	50	20.550.000	50	49.670.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		6.000.000		8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.000.000	50	6.000.000	50	8.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono	Orang	50	79.666.000	50	79.666.000	50	76.796.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				49.366.000		49.366.000		49.366.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	49.366.000	50	49.366.000	50	49.366.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				900.000		900.000		900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	900.000	50	900.000	50	900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.700.000		10.700.000		10.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.700.000	50	10.700.000	50	10.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		2.500.000		990.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	990.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.200.000		5.200.000		5.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.200.000	50	5.200.000	50	5.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.000.000		7.000.000		5.890.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	7.000.000	4	7.000.000	4	5.890.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.385.790.000		1.385.790.000		1.353.001.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Orang	70	1.000.630.000	70	1.000.630.000	70	1.095.136.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	70	500.000	70	500.000	70	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				183.080.000		183.080.000		183.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	70	183.080.000	70	183.080.000	70	183.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				146.750.000		146.750.000		252.586.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	146.750.000	70	146.750.000	70	252.586.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				660.300.000		660.300.000		648.970.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	70	660.300.000	70	660.300.000	70	648.970.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Orang	70	385.160.000	70	385.160.000	70	257.865.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.200.000	70	1.200.000	70	1.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				332.850.000		332.850.000		209.040.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	332.850.000	70	332.850.000	70	209.040.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.110.000		1.110.000		370.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.110.000	70	1.110.000	70	370.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.500.000		3.500.000		1.680.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	3.500.000	70	3.500.000	70	1.680.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		9.990.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.990.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		500.000		250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	70	500.000	70	500.000	70	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				1.000.000		1.000.000		335.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.000.000	70	1.000.000	70	335.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	3.797.341.000	100	3.797.341.000	100	3.799.895.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					786.118.000		786.118.000		829.743.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	60	711.128.000	60	711.128.000	60	755.668.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				570.600.000		570.600.000		566.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	570.600.000	60	570.600.000	60	566.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				72.888.000		72.888.000		72.888.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	72.888.000	60	72.888.000	60	72.888.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				62.240.000		62.240.000		111.380.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	62.240.000	60	62.240.000	60	111.380.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				5.400.000		5.400.000		5.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.400.000	60	5.400.000	60	5.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA BARAT
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	60	74.990.000	60	74.990.000	60	74.075.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	60	500.000	60	500.000	60	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				37.500.000		37.500.000		37.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	37.500.000	60	37.500.000	60	37.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	3.600.000	60	3.600.000	60	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.500.000		14.500.000		14.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	14.500.000	60	14.500.000	60	14.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		5.000.000		5.345.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.345.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.200.000		5.200.000		5.270.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.200.000	60	5.200.000	60	5.270.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		400.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	60	500.000	60	500.000	60	400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA BARAT
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				4.800.000		4.800.000		3.200.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	60	4.800.000	60	4.800.000	60	3.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3.390.000		3.390.000		3.760.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	3.390.000	4	3.390.000	4	3.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					879.189.000		879.189.000		792.458.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo	Orang	50	631.050.000	50	631.050.000	50	551.943.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		300.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				110.450.000		110.450.000		110.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	110.450.000	50	110.450.000	50	110.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.100.000		47.100.000		44.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	47.100.000	50	47.100.000	50	44.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				470.500.000		470.500.000		394.593.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	50	470.500.000	50	394.593.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo	Orang	50	248.139.000	50	248.139.000	50	240.515.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				47.500.000		47.500.000		47.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	47.500.000	50	47.500.000	50	47.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	14.400.000	50	14.400.000	50	14.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				175.239.000		175.239.000		168.939.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	175.239.000	50	175.239.000	50	168.939.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		2.500.000		2.288.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.288.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		2.500.000		2.234.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.234.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				1.000.000		1.000.000		800.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	50	1.000.000	50	1.000.000	50	800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.500.000		2.500.000		2.054.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.054.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					2.132.034.000		2.132.034.000		2.177.694.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	1.991.984.000	170	1.991.984.000	170	2.036.354.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.591.200.000		1.591.200.000		1.596.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	1.591.200.000	170	1.591.200.000	170	1.596.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				293.674.000		293.674.000		293.674.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	293.674.000	170	293.674.000	170	293.674.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				86.710.000		86.710.000		125.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	86.710.000	170	86.710.000	170	125.780.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				20.400.000		20.400.000		20.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	170	20.400.000	170	20.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	140.050.000	170	140.050.000	170	141.340.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		4.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	170	7.200.000	170	7.200.000	170	4.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				84.900.000		84.900.000		80.900.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	84.900.000	170	84.900.000	170	80.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.600.000		15.600.000		15.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	15.600.000	170	15.600.000	170	15.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				18.000.000		18.000.000		21.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	170	18.000.000	170	18.000.000	170	21.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			6.650.000		6.650.000		11.440.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	6.650.000	4	6.650.000	4	11.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS			500.000		500.000		400.000		
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	170	500.000	170	500.000	170	400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	4.577.556.000	100	4.577.556.000	100	4.548.479.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.349.981.000		2.349.981.000		2.368.373.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu	Orang	190	2.181.272.000	190	2.181.272.000	190	2.213.926.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.787.900.000		1.787.900.000		1.787.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.787.900.000	190	1.787.900.000	190	1.787.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				254.562.000		254.562.000		278.312.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	190	254.562.000	190	254.562.000	190	278.312.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				121.710.000		121.710.000		130.614.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	190	121.710.000	190	121.710.000	190	130.614.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				17.100.000		17.100.000		17.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	190	17.100.000	190	17.100.000	190	17.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu	Orang	190	168.709.000	190	168.709.000	190	154.447.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.000.000	190	1.000.000	190	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				87.500.000		87.500.000		87.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	190	87.500.000	190	87.500.000	190	87.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.600.000		6.600.000		6.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	190	6.600.000	190	6.600.000	190	6.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.202.000		35.202.000		31.202.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	190	35.202.000	190	35.202.000	190	31.202.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				9.930.000		9.930.000		9.002.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	190	9.930.000	190	9.930.000	190	9.002.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.620.000		8.620.000		8.008.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	190	8.620.000	190	8.620.000	190	8.008.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.500.000		1.500.000		1.275.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.500.000	190	1.500.000	190	1.275.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				9.000.000		9.000.000		1.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraamnya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	190	9.000.000	190	9.000.000	190	1.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				9.357.000		9.357.000		8.360.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	9.357.000	4	9.357.000	4	8.360.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.227.575.000		2.227.575.000		2.180.106.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	140	2.018.220.000	140	2.018.220.000	140	2.010.305.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.359.400.000		1.359.400.000		1.345.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.359.400.000	140	1.359.400.000	140	1.345.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				426.720.000		426.720.000		457.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	426.720.000	140	426.720.000	140	457.520.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				219.500.000		219.500.000		194.285.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	219.500.000	140	219.500.000	140	194.285.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				12.600.000		12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	140	12.600.000	140	12.600.000	140	12.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	140	209.355.000	140	209.355.000	140	169.801.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.000.000	140	1.000.000	140	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				96.520.000		96.520.000		79.195.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	96.520.000	140	96.520.000	140	79.195.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	140	14.400.000	140	14.400.000	140	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.240.000		6.240.000		5.980.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	6.240.000	140	6.240.000	140	5.980.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.240.000		6.240.000		5.996.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	6.240.000	140	6.240.000	140	5.996.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				31.500.000		31.500.000		21.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	140	31.500.000	140	31.500.000	140	21.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		850.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.000.000	140	1.000.000	140	850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				48.180.000		48.180.000		38.180.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	48.180.000	140	48.180.000	140	38.180.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				4.275.000		4.275.000		3.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	4.275.000	4	4.275.000	4	3.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	2.465.760.000	100	2.465.760.000	100	2.413.490.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.465.760.000		2.465.760.000		2.413.490.000		
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	2.257.260.000	200	2.257.260.000	200	2.228.650.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.907.000.000		1.907.000.000		1.886.790.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.907.000.000	200	1.907.000.000	200	1.886.790.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				242.960.000		242.960.000		234.560.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	242.960.000	200	242.960.000	200	234.560.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				89.300.000		89.300.000		89.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	89.300.000	200	89.300.000	200	89.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	200	18.000.000	200	18.000.000	200	18.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	208.500.000	200	208.500.000	200	184.840.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	200	500.000	200	500.000	200	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				94.000.000		94.000.000		94.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	94.000.000	200	94.000.000	200	94.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	200	7.200.000	200	7.200.000	200	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.400.000		54.400.000		46.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	54.400.000	200	54.400.000	200	46.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				10.000.000		10.000.000		16.190.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	10.000.000	200	10.000.000	200	16.190.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.515.000		5.515.000		5.515.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	5.515.000	200	5.515.000	200	5.515.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		150.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.000.000	200	1.000.000	200	150.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	200	30.000.000	200	30.000.000	200	9.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.885.000		5.885.000		5.885.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	5.885.000	4	5.885.000	4	5.885.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	1.585.750.000	100	1.585.750.000	100	1.374.527.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.585.750.000		1.585.750.000		1.374.527.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	115	1.386.550.000	115	1.386.550.000	115	1.190.367.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.068.650.000		1.068.650.000		873.817.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	115	1.068.650.000	115	1.068.650.000	115	873.817.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				199.900.000		199.900.000		199.900.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	115	199.900.000	115	199.900.000	115	199.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				108.000.000		108.000.000		106.650.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	115	108.000.000	115	108.000.000	115	106.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	115	10.000.000	115	10.000.000	115	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	115	199.200.000	115	199.200.000	115	184.160.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	115	3.000.000	115	3.000.000	115	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				128.600.000		128.600.000		128.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	115	128.600.000	115	128.600.000	115	128.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	115	6.000.000	115	6.000.000	115	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.100.000		24.100.000		21.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	115	24.100.000	115	24.100.000	115	21.050.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		5.000.000		4.630.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	115	5.000.000	115	5.000.000	115	4.630.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		4.630.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	115	5.000.000	115	5.000.000	115	4.630.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	115	1.000.000	115	1.000.000	115	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				15.000.000		15.000.000		4.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	115	15.000.000	115	15.000.000	115	4.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				11.500.000		11.500.000		11.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	11.500.000	4	11.500.000	4	11.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	2.676.195.000	100	2.676.195.000	100	2.657.882.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.350.680.000		1.350.680.000		1.336.542.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	100	1.241.880.000	100	1.241.880.000	100	1.234.495.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				941.000.000		941.000.000		939.855.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	941.000.000	100	941.000.000	100	939.855.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				197.980.000		197.980.000		197.980.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	197.980.000	100	197.980.000	100	197.980.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				93.900.000		93.900.000		87.660.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	93.900.000	100	93.900.000	100	87.660.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	100	108.800.000	100	108.800.000	100	102.047.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				48.500.000		48.500.000		48.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	48.500.000	100	48.500.000	100	48.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.200.000		27.200.000		25.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.200.000	100	27.200.000	100	25.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		5.000.000		3.445.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.445.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		3.807.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.807.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		450.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	100	500.000	100	450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				13.500.000		13.500.000		10.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.500.000	100	13.500.000	100	10.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		5.000.000		5.445.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.445.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.325.515.000		1.325.515.000		1.321.340.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	1.208.665.000	85	1.208.665.000	85	1.206.595.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				825.350.000		825.350.000		826.625.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	825.350.000	85	825.350.000	85	826.625.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				327.490.000		327.490.000		327.490.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	327.490.000	85	327.490.000	85	327.490.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.175.000		48.175.000		44.830.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	48.175.000	85	48.175.000	85	44.830.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				7.650.000		7.650.000		7.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	116.850.000	85	116.850.000	85	114.745.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	85	8.000.000	85	8.000.000	85	8.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.100.000		52.100.000		52.100.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	52.100.000	85	52.100.000	85	52.100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	85	3.600.000	85	3.600.000	85	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		5.000.000		3.815.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	5.000.000	85	5.000.000	85	3.815.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	5.000.000	85	5.000.000	85	4.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	85	18.000.000	85	18.000.000	85	18.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		500.000		450.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	85	500.000	85	500.000	85	450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				15.700.000		15.700.000		15.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	15.700.000	85	15.700.000	85	15.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.950.000		8.950.000		8.930.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.950.000	4	8.950.000	4	8.930.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	4.563.239.000	100	4.563.239.000	100	4.463.813.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.365.882.000		1.365.882.000		1.368.556.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	1.232.750.000	100	1.232.750.000	100	1.249.485.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				941.000.000		941.000.000		940.635.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	941.000.000	100	941.000.000	100	940.635.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				197.550.000		197.550.000		197.550.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	197.550.000	100	197.550.000	100	197.550.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				89.200.000		89.200.000		106.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	89.200.000	100	89.200.000	100	106.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	133.132.000	100	133.132.000	100	119.071.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.500.000		64.500.000		64.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	64.500.000	100	64.500.000	100	64.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.050.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.050.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.418.000		27.418.000		27.418.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.418.000	100	27.418.000	100	27.418.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.240.000		6.240.000		2.764.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.240.000	100	6.240.000	100	2.764.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.624.000		6.624.000		4.069.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.624.000	100	6.624.000	100	4.069.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		862.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.000.000	100	1.000.000	100	862.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				10.000.000		10.000.000		7.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	7.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				9.650.000		9.650.000		4.408.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	9.650.000	4	9.650.000	4	4.408.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.836.113.000		1.836.113.000		1.755.583.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	1.422.538.000	100	1.422.538.000	100	1.395.496.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		417.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	100	500.000	100	417.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				244.300.000		244.300.000		244.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	244.300.000	100	244.300.000	100	244.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				239.828.000		239.828.000		225.585.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	239.828.000	100	239.828.000	100	225.585.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				936.910.000		936.910.000		924.194.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	936.910.000	100	936.910.000	100	924.194.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	413.575.000	100	413.575.000	100	360.087.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				14.925.000		14.925.000		14.925.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	14.925.000	100	14.925.000	100	14.925.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				373.940.000		373.940.000		327.960.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	373.940.000	100	373.940.000	100	327.960.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.480.000		3.480.000		1.860.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	3.480.000	100	3.480.000	100	1.860.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		3.872.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.872.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.970.000		3.970.000		3.310.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	3.970.000	4	3.970.000	4	3.310.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		500.000		60.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	100	500.000	100	60.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				4.560.000		4.560.000		900.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	100	4.560.000	100	4.560.000	100	900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					765.984.000		765.984.000		750.509.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	667.434.000	50	667.434.000	50	660.688.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				486.875.000		486.875.000		482.568.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	486.875.000	50	486.875.000	50	482.568.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				146.370.000		146.370.000		146.370.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	146.370.000	50	146.370.000	50	146.370.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				29.689.000		29.689.000		27.250.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	29.689.000	50	29.689.000	50	27.250.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	98.550.000	50	98.550.000	50	89.821.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				44.250.000		44.250.000		44.250.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	44.250.000	50	44.250.000	50	44.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				11.200.000		11.200.000		10.679.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.200.000	50	11.200.000	50	10.679.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		2.500.000		986.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	986.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		2.500.000		1.533.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	1.533.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				11.250.000		11.250.000		6.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.250.000	50	11.250.000	50	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		500.000		230.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	230.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				23.350.000		23.350.000		23.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	23.350.000	50	23.350.000	50	23.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				2.500.000		2.500.000		2.293.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.293.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					595.260.000		595.260.000		589.165.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	40	512.490.000	40	512.490.000	40	507.921.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				381.330.000		381.330.000		381.445.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	381.330.000	40	381.330.000	40	381.445.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				84.760.000		84.760.000		84.760.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	84.760.000	40	84.760.000	40	84.760.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				43.400.000		43.400.000		38.716.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	43.400.000	40	43.400.000	40	38.716.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	40	82.770.000	40	82.770.000	40	81.244.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				12.300.000		12.300.000		12.300.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	12.300.000	40	12.300.000	40	12.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				9.624.000		9.624.000		9.624.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	40	9.624.000	40	9.624.000	40	9.624.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				34.800.000		34.800.000		33.610.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	34.800.000	40	34.800.000	40	33.610.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				21.546.000		21.546.000		21.584.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	21.546.000	40	21.546.000	40	21.584.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				2.000.000		2.000.000		1.817.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	40	2.000.000	40	2.000.000	40	1.817.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2.000.000		2.000.000		1.851.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	2.000.000	4	2.000.000	4	1.851.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				500.000		500.000		458.000		
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	40	500.000	40	500.000	40	458.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	3.165.280.000	100	3.165.280.000	100	3.191.930.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.602.940.000		2.602.940.000		2.632.200.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	215	2.425.620.000	215	2.425.620.000	215	2.471.820.000	Pokja Penyantunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.001.850.000		2.001.850.000		2.006.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	215	2.001.850.000	215	2.001.850.000	215	2.006.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				267.475.000		267.475.000		267.475.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	215	267.475.000	215	267.475.000	215	267.475.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				138.295.000		138.295.000		179.895.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	215	138.295.000	215	138.295.000	215	179.895.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	215	18.000.000	215	18.000.000	215	18.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	215	177.320.000	215	177.320.000	215	160.380.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	215	500.000	215	500.000	215	100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				99.600.000		99.600.000		99.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	215	99.600.000	215	99.600.000	215	99.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.200.000	215	7.200.000	215	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				28.700.000		28.700.000		27.380.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	215	28.700.000	215	28.700.000	215	27.380.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.440.000		7.440.000		3.820.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.440.000	215	7.440.000	215	3.820.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.440.000		7.440.000		4.930.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.440.000	215	7.440.000	215	4.930.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		50.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	215	1.000.000	215	50.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				18.000.000		18.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	215	18.000.000	215	18.000.000	215	12.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.440.000		7.440.000		5.300.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	7.440.000	4	7.440.000	4	5.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					562.340.000		562.340.000		559.730.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti	Orang	40	481.620.000	40	481.620.000	40	487.300.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				386.990.000		386.990.000		386.990.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	386.990.000	40	386.990.000	40	386.990.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				67.465.000		67.465.000		67.465.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	67.465.000	40	67.465.000	40	67.465.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				19.425.000		19.425.000		25.105.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	19.425.000	40	19.425.000	40	25.105.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				7.740.000		7.740.000		7.740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40	7.740.000	40	7.740.000	40	7.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial	Orang	40	80.720.000	40	80.720.000	40	72.430.000		
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				900.000		900.000		75.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	40	900.000	40	900.000	40	75.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.220.000		1.220.000		480.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	1.220.000	40	1.220.000	40	480.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1.220.000		1.220.000		1.220.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	1.220.000	40	1.220.000	40	1.220.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	9.000.000	40	9.000.000	40	9.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		500.000		15.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	40	500.000	40	500.000	40	15.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				10.880.000		10.880.000		7.040.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	10.880.000	40	10.880.000	40	7.040.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				9.000.000		9.000.000		6.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	6.600.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	3.963.440.000	100	3.963.440.000	100	3.839.089.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					2.610.620.000		2.610.620.000		2.554.444.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	145	1.854.620.000	145	1.854.620.000	145	1.800.456.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				1.500.000		1.500.000		1.360.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.500.000	145	1.500.000	145	1.360.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				365.000.000		365.000.000		358.258.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	365.000.000	145	365.000.000	145	358.258.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				120.670.000		120.670.000		110.850.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	120.670.000	145	120.670.000	145	110.850.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	145	3.000.000	145	3.000.000	145	3.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA BARAT
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.364.450.000		1.364.450.000		1.326.988.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.364.450.000	145	1.364.450.000	145	1.326.988.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	145	756.000.000	145	756.000.000	145	753.988.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				21.600.000		21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	145	21.600.000	145	21.600.000	145	21.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	145	14.400.000	145	14.400.000	145	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				690.000.000		690.000.000		687.758.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	690.000.000	145	690.000.000	145	687.758.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.250.000		7.250.000		740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	145	7.250.000	145	740.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.250.000		7.250.000		6.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	145	7.250.000	145	6.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.250.000		7.250.000		21.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.250.000	4	7.250.000	4	21.550.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				1.000.000		1.000.000		800.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.000.000	145	1.000.000	145	800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				7.250.000		7.250.000		740.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	145	7.250.000	145	740.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.352.820.000		1.352.820.000		1.284.645.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Orang	90	1.210.470.000	90	1.210.470.000	90	1.161.875.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				873.900.000		873.900.000		828.005.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	873.900.000	90	873.900.000	90	828.005.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				274.320.000		274.320.000		274.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	274.320.000	90	274.320.000	90	274.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.250.000		47.250.000		44.550.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	47.250.000	90	47.250.000	90	44.550.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	90	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Orang	90	142.350.000	90	142.350.000	90	122.770.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				65.250.000		65.250.000		46.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	65.250.000	90	65.250.000	90	46.950.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.200.000		7.200.000		3.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	7.200.000	90	7.200.000	90	3.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.500.000		4.500.000		1.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	4.500.000	90	4.500.000	90	1.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		36.000.000		42.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	90	36.000.000	90	36.000.000	90	42.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	90	500.000	90	500.000	90	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				16.200.000		16.200.000		15.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	16.200.000	90	16.200.000	90	15.070.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	3.795.580.000	100	3.795.580.000	100	3.724.597.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.266.061.000		2.266.061.000		2.257.781.000		
						Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	185	2.123.346.000	185	2.123.346.000	185	2.121.876.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.743.800.000		1.743.800.000		1.743.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	185	1.743.800.000	185	1.743.800.000	185	1.743.800.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				236.351.000		236.351.000		236.351.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	185	236.351.000	185	236.351.000	185	236.351.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				131.195.000		131.195.000		129.725.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	185	131.195.000	185	131.195.000	185	129.725.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	185	12.000.000	185	12.000.000	185	12.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	185	142.715.000	185	142.715.000	185	135.905.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				2.400.000		2.400.000		300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	185	2.400.000	185	2.400.000	185	300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				87.145.000		87.145.000		87.145.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	185	87.145.000	185	87.145.000	185	87.145.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.760.000		14.760.000		14.760.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	185	14.760.000	185	14.760.000	185	14.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	185	10.800.000	185	10.800.000	185	10.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.740.000		2.740.000		2.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	185	2.740.000	185	2.740.000	185	2.240.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.480.000		3.480.000		3.480.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	185	3.480.000	185	3.480.000	185	3.480.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		1.000.000		100.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	185	1.000.000	185	1.000.000	185	100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				6.000.000		6.000.000		3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	185	6.000.000	185	6.000.000	185	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				14.390.000		14.390.000		14.080.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	14.390.000	4	14.390.000	4	14.080.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.529.519.000		1.529.519.000		1.466.816.000		
						Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	1.169.835.000	80	1.169.835.000	80	1.107.882.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		350.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	80	500.000	80	350.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				217.680.000		217.680.000		217.680.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	217.680.000	80	217.680.000	80	217.680.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				178.655.000		178.655.000		194.155.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	178.655.000	80	178.655.000	80	194.155.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				763.000.000		763.000.000		685.697.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	763.000.000	80	763.000.000	80	685.697.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	359.684.000	80	359.684.000	80	358.934.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				298.856.000		298.856.000		298.856.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	298.856.000	80	298.856.000	80	298.856.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				10.870.000		10.870.000		10.870.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.870.000	80	10.870.000	80	10.870.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				900.000		900.000		900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	900.000	80	900.000	80	900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.740.000		2.740.000		2.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.740.000	80	2.740.000	80	2.240.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				29.940.000		29.940.000		27.390.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	29.940.000	80	29.940.000	80	27.390.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				14.460.000		14.460.000		17.210.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	14.460.000	4	14.460.000	4	17.210.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				550.000		550.000		100.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	550.000	80	550.000	80	100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				1.368.000		1.368.000		1.368.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	1.368.000	80	1.368.000	80	1.368.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	2.240.215.000	100	2.240.215.000	100	2.186.697.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.240.215.000		2.240.215.000		2.186.697.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	2.002.035.000	145	2.002.035.000	145	1.951.617.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.407.950.000		1.407.950.000		1.407.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.407.950.000	145	1.407.950.000	145	1.407.950.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				441.960.000		441.960.000		440.467.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	441.960.000	145	441.960.000	145	440.467.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				116.125.000		116.125.000		67.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	116.125.000	145	116.125.000	145	67.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	145	36.000.000	145	36.000.000	145	36.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	238.180.000	145	238.180.000	145	235.080.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	145	10.000.000	145	10.000.000	145	10.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				112.625.000		112.625.000		116.425.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	145	112.625.000	145	112.625.000	145	116.425.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				5.400.000		5.400.000		200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.400.000	145	5.400.000	145	200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.940.000		5.940.000		5.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.940.000	145	5.940.000	145	5.450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.940.000		5.940.000		5.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.940.000	145	5.940.000	145	5.450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				61.125.000		61.125.000		61.125.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	145	61.125.000	145	61.125.000	145	61.125.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.000.000	145	1.000.000	145	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				28.900.000		28.900.000		28.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	28.900.000	145	28.900.000	145	28.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				7.250.000		7.250.000		6.530.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	7.250.000	4	7.250.000	4	6.530.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	3.441.200.000	100	3.441.200.000	100	2.913.526.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					668.450.000		668.450.000		656.830.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	578.850.000	50	578.850.000	50	578.850.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				470.500.000		470.500.000		470.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	50	470.500.000	50	470.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				76.100.000		76.100.000		76.100.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	76.100.000	50	76.100.000	50	76.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.750.000		27.750.000		27.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	27.750.000	50	27.750.000	50	27.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	89.600.000	50	89.600.000	50	77.980.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				52.800.000		52.800.000		52.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	52.800.000	50	52.800.000	50	52.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.600.000	50	3.600.000	50	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.200.000		17.200.000		14.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.200.000	50	17.200.000	50	14.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		2.500.000		1.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	1.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		2.500.000		2.220.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.220.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	50	500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				7.500.000		7.500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.500.000	50	7.500.000	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2.500.000		2.500.000		1.110.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	1.110.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.263.700.000		1.263.700.000		1.229.527.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	75	976.550.000	75	976.550.000	75	955.380.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	75	500.000	75	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				168.300.000		168.300.000		168.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	168.300.000	75	168.300.000	75	168.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				101.250.000		101.250.000		90.035.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	101.250.000	75	101.250.000	75	90.035.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				750.000		750.000		750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	75	750.000	75	750.000	75	750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				705.750.000		705.750.000		695.795.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	705.750.000	75	705.750.000	75	695.795.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	75	287.150.000	75	287.150.000	75	274.147.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				257.250.000		257.250.000		249.075.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	257.250.000	75	257.250.000	75	249.075.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.750.000		3.750.000		300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	75	3.750.000	75	300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		3.750.000		3.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	75	3.750.000	75	3.100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.750.000		3.750.000		3.738.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	3.750.000	4	3.750.000	4	3.738.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		500.000		250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	75	500.000	75	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				3.750.000		3.750.000		3.284.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	75	3.750.000	75	3.284.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.509.050.000		1.509.050.000		1.027.169.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	120	1.384.150.000	120	1.384.150.000	120	912.633.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.129.200.000		1.129.200.000		661.391.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.129.200.000	120	1.129.200.000	120	661.391.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				184.080.000		184.080.000		184.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	184.080.000	120	184.080.000	120	184.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				63.000.000		63.000.000		59.292.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	63.000.000	120	63.000.000	120	59.292.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				7.870.000		7.870.000		7.870.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	7.870.000	120	7.870.000	120	7.870.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	120	124.900.000	120	124.900.000	120	114.536.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	3.600.000	120	3.600.000	120	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	3.600.000	120	3.600.000	120	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				92.000.000		92.000.000		91.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	92.000.000	120	92.000.000	120	91.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.200.000		13.200.000		8.902.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	13.200.000	120	13.200.000	120	8.902.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				6.000.000		6.000.000		2.300.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	120	6.000.000	120	6.000.000	120	2.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			6.000.000		6.000.000		3.884.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	3.884.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS			500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	120	500.000	120	500.000	120	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	5.725.910.000	100	5.725.910.000	100	5.283.696.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					5.725.910.000		5.725.910.000		5.283.696.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	310	4.330.560.000	310	4.330.560.000	310	4.001.586.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				2.000.000		2.000.000		1.500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.000.000	310	2.000.000	310	1.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				709.560.000		709.560.000		709.560.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	310	709.560.000	310	709.560.000	310	709.560.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				631.600.000		631.600.000		686.090.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	310	631.600.000	310	631.600.000	310	686.090.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	310	14.400.000	310	14.400.000	310	14.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				2.973.000.000		2.973.000.000		2.590.036.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.973.000.000	310	2.973.000.000	310	2.590.036.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	310	1.395.350.000	310	1.395.350.000	310	1.282.110.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				195.000.000		195.000.000		195.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	310	195.000.000	310	195.000.000	310	195.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	310	38.000.000	310	38.000.000	310	38.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1.063.300.000		1.063.300.000		943.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	310	1.063.300.000	310	1.063.300.000	310	943.070.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				9.250.000		9.250.000		7.030.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	310	9.250.000	310	9.250.000	310	7.030.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.200.000		21.200.000		18.460.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	310	21.200.000	310	21.200.000	310	18.460.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				62.900.000		62.900.000		77.330.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	62.900.000	4	62.900.000	4	77.330.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				2.000.000		2.000.000		1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.000.000	310	2.000.000	310	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				3.700.000		3.700.000		2.220.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	310	3.700.000	310	3.700.000	310	2.220.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	5.852.906.000	100	5.852.906.000	100	5.558.535.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.769.900.000		2.769.900.000		2.599.676.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti	Orang	2100	2.769.900.000	2100	2.769.900.000	2100	2.599.676.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.882.500.000		1.882.500.000		1.828.430.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2100	1.882.500.000	2100	1.882.500.000	2100	1.828.430.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				487.400.000		487.400.000		443.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	487.400.000	20	487.400.000	20	443.150.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				400.000.000		400.000.000		328.096.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	328.096.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.840.656.000		1.840.656.000		1.840.656.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	1700	1.840.656.000	1700	1.840.656.000	1700	1.840.656.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.542.300.000		1.542.300.000		1.542.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1700	1.542.300.000	1700	1.542.300.000	1700	1.542.300.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				298.356.000		298.356.000		298.356.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	298.356.000	4	298.356.000	4	298.356.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					652.100.000		652.100.000		603.505.000		
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	400	652.100.000	400	652.100.000	400	603.505.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				477.600.000		477.600.000		477.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	477.600.000	400	477.600.000	400	477.600.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				49.500.000		49.500.000		49.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	49.500.000	20	49.500.000	20	49.500.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				125.000.000		125.000.000		76.405.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	125.000.000	4	125.000.000	4	76.405.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					439.750.000		439.750.000		392.833.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	250	439.750.000	250	439.750.000	250	392.833.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				254.750.000		254.750.000		254.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	254.750.000	250	254.750.000	250	254.750.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				185.000.000		185.000.000		138.083.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	185.000.000	4	185.000.000	4	138.083.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					150.500.000		150.500.000		121.865.000		
						Jumlah PMKS lain diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti	Orang	20	150.500.000	20	150.500.000	20	121.865.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				150.500.000		150.500.000		121.865.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	150.500.000	4	150.500.000	4	121.865.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						84.394.572.000		84.394.572.000		87.607.570.000		
						Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	350.000.000	100	350.000.000	100	293.440.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					350.000.000		350.000.000		293.440.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	200	350.000.000	200	350.000.000	200	293.440.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				350.000.000		350.000.000		293.440.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	200	350.000.000	200	350.000.000	200	293.440.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	84.044.572.000	100	84.044.572.000	100	87.314.130.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					84.044.572.000		84.044.572.000		87.314.130.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	10250	84.044.572.000	10250	84.044.572.000	10250	87.314.130.000	Pokja Jaminan Sosial	
		1.06.05.1.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				84.044.572.000		84.044.572.000		87.314.130.000		
						Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10250	84.044.572.000	10250	84.044.572.000	10250	87.314.130.000	Pokja Jaminan Sosial	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						4.397.580.000		4.397.580.000		4.299.015.000		
						Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	4.397.580.000	100	4.397.580.000	100	4.299.015.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					4.397.580.000		4.397.580.000		4.299.015.000		
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	5000	3.146.080.000	5000	3.146.080.000	5000	3.053.359.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.115.018.000		2.115.018.000		2.298.773.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	5000	2.115.018.000	5000	2.115.018.000	5000	2.298.773.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				174.312.000		174.312.000		167.314.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	300	174.312.000	300	174.312.000	300	167.314.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				100.000.000		100.000.000		77.500.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	77.500.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00011			Penyediaan Sandang				215.000.000		215.000.000		200.045.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	5000	215.000.000	5000	215.000.000	5000	200.045.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00013			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				177.000.000		177.000.000		171.945.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	5000	177.000.000	5000	177.000.000	5000	171.945.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00016			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				364.750.000		364.750.000		137.782.000		
						Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	300	364.750.000	300	364.750.000	300	137.782.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	500	1.251.500.000	500	1.251.500.000	500	1.245.656.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				234.000.000		234.000.000		248.610.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	250	234.000.000	250	234.000.000	250	248.610.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				650.000.000		650.000.000		645.148.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	500	650.000.000	500	650.000.000	500	645.148.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00011			Penyediaan Sandang				32.500.000		32.500.000		32.500.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	250	32.500.000	250	32.500.000	250	32.500.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00013			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				70.000.000		70.000.000		70.830.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	250	70.000.000	250	70.000.000	250	70.830.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00022			Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam				165.000.000		165.000.000		148.568.000		
						Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	150	165.000.000	150	165.000.000	150	148.568.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**333.894.864.000**		**333.854.864.000**		**333.313.406.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									**77.615.772.000**		**77.655.772.000**		**76.614.387.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	79.8		79.8		79.8		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								**77.237.407.000**		**77.237.407.000**		**76.300.715.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	87.6	77.237.407.000	87.6	77.237.407.000	87.6	76.300.715.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						77.237.407.000		77.237.407.000		76.300.715.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	851.688.000	100	851.688.000	100	803.018.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.560.000		43.560.000		37.291.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	43.560.000	12	43.560.000	12	37.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		42.600.000		36.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	42.600.000	12	42.600.000	12	36.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				960.000		960.000		691.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	960.000	12	960.000	12	691.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.520.000		69.520.000		52.847.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	69.520.000	100	69.520.000	100	52.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.223.000		8.223.000		4.705.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.223.000	1	8.223.000	1	4.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.266.000		3.266.000		1.738.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.266.000	1	3.266.000	1	1.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.461.000		12.461.000		12.461.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.461.000	1	12.461.000	1	12.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.550.000		2.550.000		2.129.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.129.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.020.000		33.020.000		26.814.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	33.020.000	12	33.020.000	12	26.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	18	0	18	0	18	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.268.000		543.268.000		530.276.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	543.268.000	36	543.268.000	36	530.276.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.812.000		7.812.000		6.716.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.812.000	12	7.812.000	12	6.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		202.900.000		205.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.900.000	12	202.900.000	12	205.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				332.556.000		332.556.000		318.260.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	332.556.000	12	332.556.000	12	318.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.340.000		177.340.000		164.604.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	177.340.000	50	177.340.000	50	164.604.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.940.000		94.940.000		68.650.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	94.940.000	0	94.940.000	0	68.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		10.000.000		17.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	10.000.000	1	10.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.400.000		72.400.000		71.954.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	72.400.000	1	72.400.000	1	71.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.202.044.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		54.000.000		54.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		54.000.000		54.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		1.669.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		2.000.000		2.000.000		1.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		1.669.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					177.354.000		177.354.000		122.666.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	177.354.000	100	177.354.000	100	122.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.970.000		5.970.000		8.230.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.970.000	1	5.970.000	1	8.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.303.000		16.303.000		14.243.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.303.000	1	16.303.000	1	14.243.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.273.000		10.273.000		8.775.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.273.000	1	10.273.000	1	8.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.160.000		30.160.000		17.310.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.160.000	1	30.160.000	1	17.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.100.000		1.100.000		420.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.100.000	1	1.100.000	1	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.548.000		113.548.000		73.688.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.548.000	12	113.548.000	12	73.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		36.497.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	0	2	0	0	36.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		36.497.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	7	36.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					879.596.000		879.596.000		817.364.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	879.596.000	27	879.596.000	27	817.364.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		1.920.000		1.682.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1.920.000	3	1.920.000	3	1.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.200.000		180.200.000		123.835.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.200.000	12	180.200.000	12	123.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				697.476.000		697.476.000		691.847.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	697.476.000	12	697.476.000	12	691.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.050.000		187.050.000		169.848.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	187.050.000	15	187.050.000	15	169.848.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.860.000		19.860.000		23.860.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	19.860.000	4	19.860.000	4	23.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				62.300.000		62.300.000		68.900.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	62.300.000	2	62.300.000	2	68.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.890.000		93.890.000		66.088.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	93.890.000	1	93.890.000	1	66.088.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	1.300.000.000	100	1.280.000.000	100	1.211.620.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		31.501.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	12	31.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		45.000.000		31.501.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	12	31.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					146.073.000		146.073.000		135.453.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	146.073.000	100	146.073.000	100	135.453.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.350.000		12.350.000		31.135.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.350.000	12	12.350.000	12	31.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.439.000		4.439.000		6.529.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.439.000	1	4.439.000	1	6.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.811.000		2.811.000		7.276.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.811.000	1	2.811.000	1	7.276.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.500.000		34.500.000		30.522.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.500.000	1	34.500.000	12	30.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.800.000		10.800.000		15.308.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.800.000	0	10.800.000	3	15.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.903.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	0	3.000.000	1	3.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.173.000		78.173.000		40.780.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	78.173.000	0	78.173.000	4	40.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					170.177.000		150.177.000		152.030.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	170.177.000	22	150.177.000	22	152.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				170.177.000		150.177.000		152.030.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	170.177.000	0	150.177.000	22	152.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					872.800.000		872.800.000		807.537.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	872.800.000	36	872.800.000	36	807.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		5.500.000		3.037.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.500.000	0	5.500.000	1	3.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.800.000		301.800.000		239.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301.800.000	12	301.800.000	12	239.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				565.500.000		565.500.000		565.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	565.500.000	12	565.500.000	12	565.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.950.000		65.950.000		85.099.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	65.950.000	9	65.950.000	9	85.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.500.000		34.500.000		26.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	34.500.000	5	34.500.000	5	26.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.450.000		31.450.000		38.199.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	31.450.000	4	31.450.000	4	38.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		20.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	20.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	1.111.155.000	100	1.111.155.000	100	1.025.450.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.286.000		53.286.000		40.611.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	53.286.000	12	53.286.000	12	40.611.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.286.000		53.286.000		40.611.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53.286.000	12	53.286.000	12	40.611.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.495.000		144.495.000		104.188.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	144.495.000	100	144.495.000	100	104.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.601.000		3.601.000		3.601.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.601.000	1	3.601.000	12	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		12.557.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	12.557.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	3	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				158.000		158.000		158.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	158.000	1	158.000	1	158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		8.596.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.000.000	1	10.000.000	1	8.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.736.000		105.736.000		69.276.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	105.736.000	12	105.736.000	12	69.276.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.201.000		26.201.000		26.201.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	26.201.000	1	26.201.000	3	26.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.201.000		26.201.000		26.201.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.201.000	1	26.201.000	3	26.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.173.000		765.173.000		732.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	765.173.000	36	765.173.000	36	732.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		870.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		125.000.000		130.999.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.000.000	12	125.000.000	12	130.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				639.173.000		639.173.000		600.581.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	639.173.000	12	639.173.000	12	600.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122.000.000		122.000.000		122.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	122.000.000	40	122.000.000	40	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.275.918.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		34.800.000		34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		34.800.000		34.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.076.000		104.076.000		95.931.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.076.000	100	104.076.000	100	95.931.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.093.000		21.093.000		27.422.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.093.000	1	21.093.000	1	27.422.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.908.000		27.908.000		22.935.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	27.908.000	12	27.908.000	12	22.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.671.000		10.671.000		10.159.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.671.000	1	10.671.000	1	10.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.124.000		9.124.000		8.874.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	9.124.000	1	9.124.000	1	8.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.720.000		16.720.000		9.494.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	16.720.000	1	16.720.000	1	9.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.560.000		18.560.000		17.047.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.560.000	12	18.560.000	12	17.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	0	13	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.080.000		765.080.000		700.406.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	765.080.000	36	765.080.000	36	700.406.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		1.400.000		1.226.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	1	1.400.000	1	1.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		225.000.000		160.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	225.000.000	12	225.000.000	12	160.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				538.680.000		538.680.000		538.680.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	538.680.000	12	538.680.000	12	538.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446.044.000		446.044.000		444.781.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	446.044.000	40	446.044.000	40	444.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.679.000		13.679.000		14.246.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	13.679.000	3	13.679.000	3	14.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.733.000		38.733.000		36.903.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	38.733.000	50	38.733.000	50	36.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	17.000.000	11	17.000.000	11	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				376.632.000		376.632.000		376.632.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	376.632.000	6	376.632.000	6	376.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	71.324.564.000	100	71.344.564.000	100	70.782.665.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.755.977.000		62.755.977.000		62.721.701.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	62.755.977.000	12	62.755.977.000	12	62.721.701.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.251.652.000		62.251.652.000		62.251.652.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	450	62.251.652.000	420	62.251.652.000	420	62.251.652.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				412.980.000		412.980.000		367.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	412.980.000	12	412.980.000	12	367.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				91.345.000		91.345.000		102.169.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	91.345.000	1	91.345.000	1	102.169.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		49.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		49.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					36.100.000		36.100.000		42.439.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	36.100.000	100	36.100.000	100	42.439.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000		9.145.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.145.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.300.000		7.300.000		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	7.300.000	1	7.300.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.900.000		10.900.000		25.394.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	10.900.000	20	10.900.000	20	25.394.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7.900.000		7.900.000		7.900.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	7.900.000	20	7.900.000	20	7.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.234.695.000		1.234.695.000		1.031.679.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.234.695.000	100	1.234.695.000	100	1.031.679.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.385.000		32.385.000		29.375.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.385.000	12	32.385.000	9	29.375.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.000.000		62.000.000		61.106.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.000.000	1	62.000.000	7	61.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.093.000		54.093.000		52.591.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	54.093.000	1	54.093.000	7	52.591.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.000.000		108.000.000		100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	108.000.000	1	108.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.632.000		21.632.000		17.165.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.632.000	1	21.632.000	7	17.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				63.500.000		63.500.000		64.839.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	63.500.000	12	63.500.000	12	64.839.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				875.085.000		875.085.000		705.853.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	875.085.000	12	875.085.000	12	705.853.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.000.000		18.000.000		750.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	18.000.000	12	18.000.000	12	750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.048.000		26.048.000		20.048.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	26.048.000	30	26.048.000	30	20.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.048.000		26.048.000		20.048.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	26.048.000	10	26.048.000	2	20.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.633.036.000		6.653.036.000		6.306.402.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	40	6.633.036.000	40	6.653.036.000	40	6.306.402.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		3.650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	5.000.000	12	5.000.000	7	3.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.125.458.000		1.125.458.000		870.888.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.125.458.000	12	1.125.458.000	12	870.888.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				145.939.000		145.939.000		88.395.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	145.939.000	6	145.939.000	6	88.395.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.356.639.000		5.376.639.000		5.343.469.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.356.639.000	12	5.376.639.000	12	5.343.469.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.708.000		588.708.000		611.396.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	588.708.000	75	588.708.000	75	611.396.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.407.000		198.407.000		214.207.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	198.407.000	20	198.407.000	20	214.207.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		9.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000	15	9.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.800.000		62.800.000		63.880.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	62.800.000	25	62.800.000	25	63.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				65.000.000		65.000.000		64.457.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	65.000.000	4	65.000.000	3	64.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				157.496.000		157.496.000		181.547.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	157.496.000	5	157.496.000	2	181.547.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.010.000		62.010.000		61.010.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	62.010.000	6	62.010.000	6	61.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.995.000		32.995.000		16.795.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	32.995.000	1	32.995.000	1	16.795.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								**378.365.000**		**418.365.000**		**313.672.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	3.01	378.365.000	3.01	418.365.000	3.01	313.672.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						378.365.000		418.365.000		313.672.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	378.365.000	100	418.365.000	100	313.672.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					378.365.000		418.365.000		313.672.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	81	378.365.000	81	418.365.000	81	313.672.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				237.284.000		277.284.000		165.770.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	237.284.000	5	277.284.000	5	165.770.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.691.000		100.691.000		120.619.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	100.691.000	4	100.691.000	4	120.619.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				28.290.000		28.290.000		23.613.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	17	28.290.000	17	28.290.000	17	23.613.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12.100.000		12.100.000		3.670.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	12.100.000	1	12.100.000	1	3.670.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja									**12.052.164.000**		**12.012.164.000**		**10.663.001.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)	%	69.54		69.54		69.54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja								**6.303.845.000**		**6.303.845.000**		**6.125.416.000**		
						Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	%	10	6.303.845.000	10	6.303.845.000	10	6.125.416.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						6.303.845.000		6.303.845.000		6.125.416.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14.29	93.677.000	14.29	93.677.000	14.29	82.176.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					93.677.000		93.677.000		82.176.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	31.82	93.677.000	31.82	93.677.000	31.82	82.176.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				93.677.000		93.677.000		82.176.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	26	93.677.000	26	93.677.000	26	82.176.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
						Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9.28	331.323.000	9.28	331.323.000	9.28	266.060.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					331.323.000		331.323.000		266.060.000		
						Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	33.33	331.323.000	33.33	331.323.000	33.33	266.060.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				279.463.000		279.463.000		226.117.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	165	279.463.000	165	279.463.000	80	226.117.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				51.860.000		51.860.000		39.943.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	7	51.860.000	3	51.860.000	3	39.943.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0004			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				0		0		0		
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	9.6	2.065.542.000	10	2.065.542.000	10	2.020.465.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.065.542.000		2.065.542.000		2.020.465.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	100	3.845.000	100	3.845.000	100	3.545.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				3.845.000		3.845.000		3.545.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	4	3.845.000	3	3.845.000	3	3.545.000	Pokja Pemasaran	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	55.6	2.036.697.000	55.6	2.036.697.000	55.6	1.994.920.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.036.697.000		2.036.697.000		1.994.920.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	580	2.036.697.000	580	2.036.697.000	600	1.994.920.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	22.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				25.000.000		25.000.000		22.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	105	25.000.000	4	25.000.000	1	22.000.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83.68	1.550.000.000	83.68	1.550.000.000	83.68	1.517.992.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					1.550.000.000		1.550.000.000		1.517.992.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	9.09	0	9.09	0	9.09	0	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				0		0		0		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	0	0	0	0	0	0	Pokja Pemasaran	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	50.65	1.550.000.000	83.68	1.550.000.000	83.68	1.517.992.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				1.550.000.000		1.550.000.000		1.517.992.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	444	1.550.000.000	264	1.550.000.000	264	1.517.992.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	22.22	0	77.78	0	77.78	0	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				0		0		0		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pelatihan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23.38	2.263.303.000	23.38	2.263.303.000	29.33	2.238.723.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.263.303.000		2.263.303.000		2.238.723.000		
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	%	23.38	2.218.553.000	23.38	2.218.553.000	29.33	2.194.675.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.218.553.000		2.218.553.000		2.194.675.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	424	2.218.553.000	424	2.218.553.000	440	2.194.675.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	40	11.750.000	40	11.750.000	40	9.448.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				11.750.000		11.750.000		9.448.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	8	11.750.000	8	11.750.000	8	9.448.000	Pokja Pemasaran	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	33.000.000	100	33.000.000	100	34.600.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				33.000.000		33.000.000		34.600.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	33.000.000	3	33.000.000	4	34.600.000	Pokja Pelatihan	
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja								**1.781.635.000**		**1.781.635.000**		**1.368.393.000**		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60.05	121.635.000	63.15	121.635.000	63.15	95.386.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						121.635.000		121.635.000		95.386.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85.71	121.635.000	85.71	121.635.000	85.71	95.386.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					121.635.000		121.635.000		95.386.000		
						Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	84	121.635.000	84	121.635.000	84	95.386.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				51.510.000		51.510.000		46.632.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	51.510.000	1	51.510.000	1	46.632.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				31.605.000		31.605.000		22.624.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	31.605.000	35	31.605.000	35	22.624.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				38.520.000		38.520.000		26.130.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	38.520.000	35	38.520.000	35	26.130.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	74.39	1.660.000.000	74.39	1.660.000.000	74.39	1.273.007.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.510.000.000		1.510.000.000		1.200.802.000		
						Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21.75	14.290.000	21.75	14.290.000	21.75	12.972.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					14.290.000		14.290.000		12.972.000		
						Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan	%	58.82	14.290.000	58.82	14.290.000	58.82	12.972.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0006			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				14.290.000		14.290.000		12.972.000		
						Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	50	14.290.000	49300	14.290.000	49300	12.972.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68.5	450.915.000	68.5	450.915.000	68.5	294.391.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					320.609.000		320.609.000		228.754.000		
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	47.68	320.609.000	47.68	320.609.000	47.68	228.754.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.01.000			Perluasan Kesempatan Kerja				320.609.000		320.609.000		228.754.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	210	320.609.000	210	320.609.000	180	228.754.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					130.306.000		130.306.000		65.637.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	1.68	110.697.000	51.25	110.697.000	51.25	55.300.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				27.063.000		27.063.000		12.351.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	80	27.063.000	80	27.063.000	40	12.351.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				83.634.000		83.634.000		42.949.000		
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	83.634.000	60	83.634.000	60	42.949.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	51.25	19.609.000	1.68	19.609.000	1.68	10.337.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				15.089.000		15.089.000		6.523.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	10	15.089.000	10	15.089.000	16	6.523.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				4.520.000		4.520.000		3.814.000		
						Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	100	4.520.000	100	4.520.000	100	3.814.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67.3	37.470.000	67.71	37.470.000	67.71	29.193.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					37.470.000		37.470.000		29.193.000		
						Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	38.63	37.470.000	38.63	37.470.000	38.63	29.193.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				37.470.000		37.470.000		29.193.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	12	37.470.000	1	37.470.000	1	29.193.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	71.07	1.007.325.000	44.05	1.007.325.000	44.05	864.246.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					356.380.000		356.380.000		298.842.000		
						Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja	%	75	356.380.000	75	356.380.000	75	298.842.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				69.870.000		69.870.000		50.630.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	69.870.000	100	69.870.000	100	50.630.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja				245.290.000		245.290.000		215.767.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	1040	245.290.000	1040	245.290.000	1040	215.767.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				24.860.000		24.860.000		19.584.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	200	24.860.000	200	24.860.000	200	19.584.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				16.360.000		16.360.000		12.861.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	16.360.000	50	16.360.000	50	12.861.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.820.000		3.820.000		3.504.000		
						Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan	%	60	3.820.000	60	3.820.000	60	3.504.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.02.0001			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi				0		0		0		
						Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	4	0	0	0	0	0	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				3.820.000		3.820.000		3.504.000		
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2	3.820.000	2	3.820.000	2	3.504.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					638.040.000		638.040.000		557.341.000		
						Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja	%	83.33	638.040.000	83.33	638.040.000	83.33	557.341.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				0		0		0		
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair/Bursa Kerja				638.040.000		638.040.000		557.341.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	638.040.000	100	638.040.000	100	557.341.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					9.085.000		9.085.000		4.559.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	9.085.000	100	9.085.000	100	4.559.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9.085.000		9.085.000		4.559.000		
						Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	200	9.085.000	200	9.085.000	200	4.559.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						150.000.000		150.000.000		72.205.000		
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1.2	60.000.000	1.2	60.000.000	0	0	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					60.000.000		60.000.000		0		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	100	60.000.000	100	60.000.000	0	0	Pokja Pelatihan	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi				60.000.000		60.000.000		0		
						Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	32	60.000.000	10	60.000.000	0	0	Pokja Pelatihan	
						Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2.06	90.000.000	2.06	90.000.000	2.06	72.205.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					90.000.000		90.000.000		72.205.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	10.31	90.000.000	10.31	90.000.000	10.31	72.205.000	Pokja Transmigrasi	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				90.000.000		90.000.000		72.205.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	90.000.000	1	90.000.000	1	72.205.000	Pokja Transmigrasi	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja								**3.966.684.000**		**3.926.684.000**		**3.169.192.000**		
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	56.4	3.966.684.000	56.4	3.926.684.000	56.4	3.169.192.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.268.372.000		1.268.372.000		1.106.473.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	375.000.000	68	375.000.000	68	345.275.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					334.000.000		334.000.000		318.851.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21.11	334.000.000	21.5	334.000.000	21.5	318.851.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				334.000.000		334.000.000		318.851.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	665	334.000.000	275	334.000.000	245	318.851.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					41.000.000		41.000.000		26.424.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	2	41.000.000	2	41.000.000	2	26.424.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				41.000.000		41.000.000		26.424.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	41.000.000	1	41.000.000	1	26.424.000	Pokja Produktivitas	
						Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	893.372.000	73	893.372.000	73	761.198.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					857.088.000		857.088.000		734.201.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	27.78	79.192.000	27.78	79.192.000	27.78	57.153.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				79.192.000		79.192.000		57.153.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	79.192.000	3	79.192.000	3	57.153.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan	%	72.99	772.896.000	72.99	772.896.000	72.99	672.048.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				772.896.000		772.896.000		672.048.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	861	772.896.000	861	772.896.000	861	672.048.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					36.284.000		36.284.000		26.997.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	10	36.284.000	5	36.284.000	5	26.997.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				36.284.000		36.284.000		26.997.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12	36.284.000	12	36.284.000	18	26.997.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						950.000.000		910.000.000		680.595.000		
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	41.99	141.605.000	51.03	131.605.000	44.3	95.533.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					141.605.000		131.605.000		95.533.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	93.75	141.605.000	93.75	131.605.000	93.75	95.533.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				53.333.000		53.333.000		38.877.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	70	53.333.000	70	53.333.000	70	38.877.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				14.158.000		14.158.000		12.937.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	70	14.158.000	70	14.158.000	20	12.937.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				74.114.000		64.114.000		43.719.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	35	74.114.000	35	64.114.000	35	43.719.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
						Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.8	295.084.000	49.8	285.084.000	49.8	230.176.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					295.084.000		285.084.000		230.176.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	50.66	208.536.000	50.66	198.536.000	50.66	179.449.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				13.316.000		7.716.000		4.422.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1000	13.316.000	1000	7.716.000	1000	4.422.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				195.220.000		190.820.000		175.027.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	36	195.220.000	36	190.820.000	36	175.027.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	86.85	86.548.000	86.85	86.548.000	86.85	50.727.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				86.548.000		86.548.000		50.727.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	86.548.000	39	86.548.000	39	50.727.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.75	216.272.000	96.75	216.272.000	96.75	115.013.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					216.272.000		216.272.000		115.013.000		
						Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	%	96.77	47.272.000	96.77	47.272.000	96.77	35.715.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				47.272.000		47.272.000		35.715.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	125	47.272.000	125	47.272.000	125	35.715.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.74	169.000.000	96.74	169.000.000	96.74	79.298.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				169.000.000		169.000.000		79.298.000		
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	%	196	169.000.000	196	169.000.000	196	79.298.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	96.75	297.039.000	43.26	277.039.000	43.26	239.873.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					297.039.000		277.039.000		239.873.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	1.41	297.039.000	1.41	277.039.000	1.41	239.873.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				245.476.000		225.476.000		194.647.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	245.476.000	1	225.476.000	1	194.647.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				23.197.000		23.197.000		22.616.000		
						Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	1	23.197.000	1	23.197.000	1	22.616.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				28.366.000		28.366.000		22.610.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	100	28.366.000	100	28.366.000	100	22.610.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						1.748.312.000		1.748.312.000		1.382.124.000		
						Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80.8	1.300.000.000	80.8	1.300.000.000	80.8	991.993.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.300.000.000		1.300.000.000		991.993.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55.21	231.305.000	55.21	231.305.000	55.21	199.989.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				231.305.000		231.305.000		199.989.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	180	231.305.000	180	231.305.000	180	199.989.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	37.87	306.975.000	37.87	306.975.000	37.87	255.109.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				306.975.000		306.975.000		255.109.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	92	306.975.000	92	306.975.000	92	255.109.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.92	761.720.000	62.92	761.720.000	62.92	536.895.000	Pokja Norma Kerja	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				761.720.000		761.720.000		536.895.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	500	761.720.000	500	761.720.000	500	536.895.000	Pokja Norma Kerja	
						Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27.06	448.312.000	27.06	448.312.000	27.06	390.131.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					448.312.000		448.312.000		390.131.000		
						Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	%	62.86	448.312.000	62.86	448.312.000	62.86	390.131.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				448.312.000		448.312.000		390.131.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	60	448.312.000	60	448.312.000	60	390.131.000		
JUMLAH									**89.667.936.000**		**89.667.936.000**		**87.277.388.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									**727.020.000**		**727.020.000**		**592.091.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	74.08		77.06		77.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga								**337.353.000**		**337.353.000**		**272.303.000**		
						Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64.5	337.353.000	64.5	337.353.000	64.5	272.303.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						160.000.000		160.000.000		129.127.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	160.000.000	75	160.000.000	75	129.127.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					151.230.000		151.230.000		126.627.000		
						Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	Kabupaten/ Kota	28	151.230.000	28	151.230.000	28	126.627.000	Pokja Pengendalian Penduduk	
		2.14.02.1.01.0007			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			36.170.000		36.170.000		31.793.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	1	36.170.000	1	36.170.000	1	31.793.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0021			Advokasi dan Sosialisasi GDPK				22.488.000		22.488.000		23.929.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	3	22.488.000	3	22.488.000	2	23.929.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0022			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				26.780.000		26.780.000		15.413.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	26.780.000	2	26.780.000	2	15.413.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0024			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				65.792.000		65.792.000		55.492.000		
						Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah	2	65.792.000	2	65.792.000	2	55.492.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					8.770.000		8.770.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	Dokumen	1	8.770.000	1	8.770.000	1	2.500.000	Pokja Pengendalian Penduduk	
		2.14.02.1.02.0010			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				8.770.000		8.770.000		2.500.000		
						Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	8.770.000	1	8.770.000	1	2.500.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						177.353.000		177.353.000		143.176.000		
						Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	177.353.000	34	177.353.000	34	143.176.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					88.586.000		88.586.000		72.450.000		
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	per 1000 WUS 15 -19	16	88.586.000	16	88.586.000	16	72.450.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				27.109.000		27.109.000		22.049.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	3	27.109.000	3	27.109.000	3	22.049.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0019			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				25.570.000		25.570.000		16.570.000		
						Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	3	25.570.000	3	25.570.000	3	16.570.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				35.907.000		35.907.000		33.831.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah	3	35.907.000	3	35.907.000	3	33.831.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					88.767.000		88.767.000		70.726.000		
						Persentase kelomppok tribina yang aktif	%	95	39.629.000	95	39.629.000	95	28.307.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				39.629.000		39.629.000		28.307.000		
						Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	2	39.629.000	2	39.629.000	2	28.307.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kelomppok UPPKA yang aktif	%	95	49.138.000	95	49.138.000	95	42.419.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				13.210.000		13.210.000		10.510.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	3	13.210.000	3	13.210.000	3	10.510.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				35.928.000		35.928.000		31.909.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	35.928.000	2	35.928.000	2	31.909.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								**389.667.000**		**389.667.000**		**319.788.000**		
						Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.1	389.667.000	2.1	389.667.000	2.1	319.788.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						389.667.000		389.667.000		319.788.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69.48	389.667.000	69.48	389.667.000	69.48	319.788.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
		2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					352.667.000		352.667.000		289.727.000		
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	27.9	352.667.000	27.9	352.667.000	27.9	289.727.000	Pokja Keluarga Berencana	
		2.14.03.1.01.0007			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				148.000.000		148.000.000		127.658.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	10	148.000.000	10	148.000.000	10	127.658.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0010			Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana				35.856.000		35.856.000		31.244.000		
						Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	4	35.856.000	4	35.856.000	4	31.244.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0012			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				168.811.000		168.811.000		130.825.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	4	168.811.000	4	168.811.000	4	130.825.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					37.000.000		37.000.000		30.061.000		
						Unmetneed KB	%	9.25	37.000.000	9.25	37.000.000	9.25	30.061.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				37.000.000		37.000.000		30.061.000		

						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	37.000.000	2	37.000.000	2	30.061.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak									**4.468.080.000**		**4.468.080.000**		**4.074.830.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.315		0.304		0.304		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan								**3.782.040.000**		**3.782.040.000**		**3.487.207.000**		
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.47	3.782.040.000	93.47	3.782.040.000	93.47	3.487.207.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2.698.800.000		2.698.800.000		2.525.887.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	121.730.000	12	121.730.000	12	107.678.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.02.1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					121.730.000		121.730.000		107.678.000		
						Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Nilai	900	121.730.000	900	121.730.000	900	107.678.000	Pokja Kesetaraan Gender	
		2.08.02.1.01.0010			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				25.800.000		25.800.000		25.825.000		
						jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	Orang	35	25.800.000	35	25.800.000	35	25.825.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0011			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				55.000.000		55.000.000		45.581.000		
						jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	5	55.000.000	5	55.000.000	5	45.581.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0012			Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi				40.930.000		40.930.000		36.272.000		
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	35	40.930.000	35	40.930.000	35	36.272.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	2.577.070.000	80	2.577.070.000	80	2.418.209.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					2.577.070.000		2.577.070.000		2.418.209.000		
						Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	%	40	2.577.070.000	40	2.577.070.000	40	2.418.209.000	Pokja Kesetaraan Gender	
		2.08.02.1.02.0005			Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				1.439.500.000		1.439.500.000		1.378.022.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga	3	1.439.500.000	3	1.439.500.000	3	1.378.022.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0008			sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				705.070.000		705.070.000		647.687.000		
						jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	35	705.070.000	35	705.070.000	1350	647.687.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0009			peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				432.500.000		432.500.000		392.500.000		
						jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	80	432.500.000	80	432.500.000	540	392.500.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						770.432.000		770.432.000		660.574.000		
						Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	136.040.000	100	136.040.000	100	133.902.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					136.040.000		136.040.000		133.902.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%	100	136.040.000	100	136.040.000	100	133.902.000		
		2.08.03.1.02.0003			layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9.270.000		9.270.000		9.270.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	9.270.000	5	9.270.000	5	9.270.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0004			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		

					Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	2	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0005			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				17.720.000		17.720.000		15.582.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	17.720.000	10	17.720.000	10	15.582.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0007			layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6.750.000		6.750.000		6.750.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	6.750.000	2	6.750.000	2	6.750.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0008			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				87.300.000		87.300.000		87.300.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	12	87.300.000	12	87.300.000	12	87.300.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0009			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0010			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	634.392.000	85	634.392.000	85	526.672.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					115.750.000		115.750.000		98.336.000		
						Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	%	25	115.750.000	25	115.750.000	25	98.336.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.01.0003			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				14.750.000		14.750.000		11.305.000		
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	14.750.000	1	14.750.000	1	11.305.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0004			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		36.031.000		
						Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Orang	35	50.000.000	35	50.000.000	35	36.031.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				51.000.000		51.000.000		51.000.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	5	51.000.000	5	51.000.000	5	51.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					518.642.000		518.642.000		428.336.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	Unit	15	518.642.000	15	518.642.000	15	428.336.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.03.0005			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				347.642.000		347.642.000		305.761.000		
						jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	15	347.642.000	15	347.642.000	15	305.761.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0006			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		115.000.000		83.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	5	115.000.000	1	115.000.000	1	83.440.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0009			Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				56.000.000		56.000.000		39.135.000		
						Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	5	56.000.000	5	56.000.000	5	39.135.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						312.808.000		312.808.000		300.746.000		
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	312.808.000	20	312.808.000	20	300.746.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujutkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					312.808.000		312.808.000		300.746.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	%	20	312.808.000	20	312.808.000	20	300.746.000	Pokja Kesetaraan Gender	
		2.08.04.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				312.808.000		312.808.000		300.746.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	10	312.808.000	10	312.808.000	10	300.746.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Anak								**686.040.000**		**686.040.000**		**587.623.000**		
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65.35	686.040.000	65.35	686.040.000	65.35	587.623.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						15.600.000		15.600.000		13.588.000		
						Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	15.600.000	24	15.600.000	25.71	13.588.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					15.600.000		15.600.000		13.588.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	15.600.000	100	15.600.000	100	13.588.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.04.1.03.0004			layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.600.000		15.600.000		13.588.000		
						Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	15.600.000	20	15.600.000	20	13.588.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						373.720.000		373.720.000		298.546.000		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61.5	373.720.000	61.5	373.720.000	61.5	298.546.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.06.1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					271.100.000		271.100.000		238.462.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya	Kabupaten/ Kota	30	271.100.000	30	271.100.000	30	238.462.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.06.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi				271.100.000		271.100.000		238.462.000		
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	20	271.100.000	20	271.100.000	20	238.462.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					102.620.000		102.620.000		60.084.000		
						Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga	35	102.620.000	35	102.620.000	35	60.084.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				43.840.000		43.840.000		30.380.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	3	43.840.000	3	43.840.000	3	30.380.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0007			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				51.780.000		51.780.000		23.513.000		
						jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	1	51.780.000	1	51.780.000	1	23.513.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0010			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				7.000.000		7.000.000		6.191.000		
						jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	10	7.000.000	10	7.000.000	10	6.191.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						296.720.000		296.720.000		275.489.000		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	160.680.000	79	160.680.000	79	141.339.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					96.000.000		96.000.000		83.501.000		
						Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	%	25	96.000.000	25	96.000.000	25	83.501.000	Pokja Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.01.0006			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		20.125.000		
						Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Orang	30	25.000.000	30	25.000.000	30	20.125.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				51.000.000		51.000.000		51.000.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	35	51.000.000	35	51.000.000	35	51.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0009			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				10.000.000		10.000.000		6.216.000		
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.216.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0010			monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				10.000.000		10.000.000		6.160.000		
						jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.160.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					64.680.000		64.680.000		57.838.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	Lembaga	50	64.680.000	50	64.680.000	50	57.838.000	Pokja Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.03.0010			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				15.000.000		15.000.000		12.184.000		
						jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga	3	15.000.000	3	15.000.000	3	12.184.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0011			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				34.680.000		34.680.000		34.680.000		
						jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	25	34.680.000	25	34.680.000	25	34.680.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0012			Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				15.000.000		15.000.000		10.974.000		
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10	15.000.000	10	15.000.000	10	10.974.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	136.040.000	100	136.040.000	100	134.150.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					136.040.000		136.040.000		134.150.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%	100	136.040.000	100	136.040.000	100	134.150.000		
		2.08.07.1.02.0008			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				17.720.000		17.720.000		15.830.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	17.720.000	10	17.720.000	10	15.830.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0010			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				87.300.000		87.300.000		87.300.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	12	87.300.000	12	87.300.000	12	87.300.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0011			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	2	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0012			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9.270.000		9.270.000		9.270.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	9.270.000	5	9.270.000	5	9.270.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0013			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0014			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0015			layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6.750.000		6.750.000		6.750.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	6.750.000	2	6.750.000	2	6.750.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									**16.341.824.000**		**16.341.824.000**		**16.099.389.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	87.7		87.7		84		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								**16.134.824.000**		**16.134.824.000**		**15.936.151.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	89	16.134.824.000	89	16.134.824.000	89	15.936.151.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.134.824.000		16.134.824.000		15.936.151.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	90	15.506.272.000	100	15.506.272.000	100	15.327.999.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.876.189.000		11.876.189.000		11.810.952.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	11.876.189.000	1	11.876.189.000	1	11.810.952.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.457.489.000		11.457.489.000		11.457.489.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71	11.457.489.000	71	11.457.489.000	63	11.457.489.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				326.000.000		326.000.000		280.725.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	326.000.000	1	326.000.000	1	280.725.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		20.000.000		18.380.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.380.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				72.700.000		72.700.000		54.358.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	72.700.000	1	72.700.000	1	54.358.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		36.118.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	40.000.000	90	40.000.000	100	36.118.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		8.637.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.637.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		15.000.000		13.722.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	15.000.000	20	15.000.000	20	13.722.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		15.000.000		13.759.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	15.000.000	20	15.000.000	20	13.759.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					601.383.000		601.383.000		515.852.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	601.383.000	90	601.383.000	100	515.852.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.462.000		55.462.000		99.562.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	55.462.000	2	55.462.000	1	99.562.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		8.360.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				116.921.000		116.921.000		93.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	116.921.000	12	116.921.000	12	93.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		4.401.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	4.401.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		37.933.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	37.933.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				276.000.000		276.000.000		198.252.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	276.000.000	1	276.000.000	1	198.252.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		7.000.000		4.740.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	4.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.000.000		71.000.000		61.604.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	71.000.000	1	71.000.000	1	61.604.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.000.000		7.000.000		3.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	7.000.000	3	7.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		3.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.325.510.000		2.325.510.000		2.335.806.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.325.510.000	1	2.325.510.000	1	2.335.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				395.000.000		348.990.000		321.992.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	395.000.000	1	348.990.000	1	321.992.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.928.510.000		1.974.520.000		2.012.064.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.928.510.000	1	1.974.520.000	1	2.012.064.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					596.190.000		596.190.000		566.271.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	596.190.000	1	596.190.000	1	566.271.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				175.000.000		175.000.000		164.078.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	175.000.000	20	175.000.000	20	164.078.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		1.000.000		600.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				340.190.000		340.190.000		340.193.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	340.190.000	1	340.190.000	1	340.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		61.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	80.000.000	6	80.000.000	6	61.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	628.552.000	100	628.552.000	100	608.152.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.200.000		40.200.000		36.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	Dokumen	1	40.200.000	1	40.200.000	1	36.500.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.200.000		40.200.000		36.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	40.200.000	1	40.200.000	1	36.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					6.570.000		6.570.000		6.570.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	%	90	6.570.000	90	6.570.000	100	6.570.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.570.000		6.570.000		6.570.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6.570.000	1	6.570.000	1	6.570.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					27.248.000		22.248.000		21.748.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	%	90	27.248.000	90	22.248.000	100	21.748.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.999.000		1.999.000		1.999.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.999.000	4	1.999.000	4	1.999.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		4.000.000		3.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.000.000	2	4.000.000	2	3.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	10.500.000	3	10.500.000	3	10.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.749.000		5.749.000		5.749.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.749.000	1	5.749.000	1	5.749.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.500.000		2.500.000		703.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	Unit	3	2.500.000	3	2.500.000	1	703.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.500.000		2.500.000		703.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	703.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					511.071.000		520.925.000		503.622.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	Laporan	1	511.071.000	1	520.925.000	1	503.622.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.536.000		52.536.000		28.496.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.536.000	1	52.536.000	1	28.496.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				458.535.000		468.389.000		475.126.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	458.535.000	1	468.389.000	1	475.126.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.963.000		36.109.000		39.009.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	Unit	1	40.963.000	1	36.109.000	1	39.009.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		11.400.000		14.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	11.400.000	3	11.400.000	3	14.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.938.000		10.084.000		10.084.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.938.000	1	10.084.000	1	10.084.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.625.000		14.625.000		14.125.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	14.625.000	5	14.625.000	5	14.125.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								**207.000.000**		**207.000.000**		**163.238.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	2.95	207.000.000	2.95	207.000.000	2.95	163.238.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						207.000.000		207.000.000		163.238.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	207.000.000	55	207.000.000	100	163.238.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					207.000.000		207.000.000		163.238.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	50	207.000.000	50	207.000.000	100	163.238.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.000.000		55.000.000		45.245.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	55.000.000	7	55.000.000	7	45.245.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.000.000		62.000.000		62.195.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	62.000.000	5	62.000.000	5	62.195.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				60.000.000		60.000.000		54.478.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	60.000.000	1	60.000.000	1	54.478.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		30.000.000		1.320.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	1.320.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**21.536.924.000**		**21.536.924.000**		**20.766.310.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan									**23.986.170.000**		**24.206.170.000**		**23.812.688.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	75.6		75.6		75.6		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan								**23.586.170.000**		**23.818.170.000**		**23.446.340.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	85.5	23.586.170.000	85.5	23.818.170.000	85.5	23.446.340.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23.586.170.000		23.818.170.000		23.446.340.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	811.014.000	87	811.014.000	87	929.226.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.600.000		42.600.000		40.332.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	42.600.000	100	42.600.000	100	40.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		9.000.000		7.884.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	12	9.000.000	12	7.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		8.000.000		10.250.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	10.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.600.000		10.600.000		8.850.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.600.000	12	10.600.000	12	8.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	9.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		227.878.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	20	227.878.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		227.878.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	20	227.878.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					488.319.000		488.319.000		440.721.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	488.319.000	24	488.319.000	24	440.721.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		198.000.000		150.402.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	198.000.000	12	198.000.000	12	150.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.319.000		290.319.000		290.319.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.319.000	12	290.319.000	12	290.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240.095.000		240.095.000		180.295.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	240.095.000	11	240.095.000	13	180.295.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				109.095.000		109.095.000		109.095.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	109.095.000	1	109.095.000	1	109.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				131.000.000		131.000.000		71.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	131.000.000	10	131.000.000	12	71.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	87	22.775.156.000	87	23.007.156.000	87	22.517.114.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.873.531.000		14.863.531.000		14.767.419.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	14.873.531.000	3	14.863.531.000	3	14.767.419.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.317.257.000		14.317.257.000		14.317.257.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	95	14.317.257.000	111	14.317.257.000	111	14.317.257.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				376.274.000		376.274.000		368.945.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	376.274.000	12	376.274.000	12	368.945.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				180.000.000		170.000.000		81.217.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	180.000.000	12	170.000.000	12	81.217.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					114.000.000		114.000.000		112.821.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	114.000.000	1	114.000.000	1	112.821.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14.000.000		14.000.000		12.821.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	14.000.000	4	14.000.000	4	12.821.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		5.223.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	5.223.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.000.000		6.000.000		5.223.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	5.223.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		46.000.000		40.166.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	50.000.000	100	46.000.000	100	40.166.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		46.000.000		40.166.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	50.000.000	12	46.000.000	12	40.166.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					720.901.000		710.901.000		723.155.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	720.901.000	100	710.901.000	100	723.155.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.000.000		46.000.000		44.247.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	46.000.000	12	46.000.000	12	44.247.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.000.000		42.000.000		36.161.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48.000.000	12	42.000.000	12	36.161.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				145.600.000		145.600.000		132.912.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	145.600.000	12	145.600.000	12	132.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000		325.000.000		398.173.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	325.000.000	12	325.000.000	12	398.173.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.000.000		8.000.000		7.234.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.000.000	1	8.000.000	1	7.234.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				87.301.000		84.301.000		44.428.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	87.301.000	12	84.301.000	12	44.428.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					635.200.000		1.041.200.000		1.186.409.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	635.200.000	30	1.041.200.000	105	1.186.409.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				635.200.000		1.041.200.000		1.186.409.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	635.200.000	30	1.041.200.000	105	1.186.409.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.884.341.000		2.884.341.000		2.874.991.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	2.884.341.000	24	2.884.341.000	24	2.874.991.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		240.000.000		245.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	245.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.644.341.000		2.644.341.000		2.629.991.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.644.341.000	12	2.644.341.000	12	2.629.991.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.491.183.000		3.341.183.000		2.806.930.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	3.491.183.000	77	3.341.183.000	77	2.806.930.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000		210.000.000		251.420.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	210.000.000	26	210.000.000	26	251.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.081.183.000		3.081.183.000		2.502.227.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.081.183.000	1	3.081.183.000	1	2.502.227.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		50.000.000		53.283.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	200.000.000	50	50.000.000	50	53.283.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan								**400.000.000**		**388.000.000**		**366.348.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	2.92	400.000.000	2.92	388.000.000	2.92	366.348.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						400.000.000		388.000.000		366.348.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	400.000.000	90	388.000.000	90	366.348.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		388.000.000		366.348.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	400.000.000	100	388.000.000	100	366.348.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		244.000.000		258.487.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	250.000.000	5	244.000.000	5	258.487.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000		124.000.000		106.693.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	130.000.000	5	124.000.000	5	106.693.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		584.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	10.000.000	1	10.000.000	1	584.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		584.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	584.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah									**21.183.125.000**		**20.963.125.000**		**18.198.697.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85.6		85.6		75.88		Dinas Ketahanan Pangan	
						Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7.83		7.83		7.83		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan								**11.630.030.000**		**11.552.030.000**		**11.234.179.000**		
						Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	8	4.975.924.000	8	4.925.924.000	19.57	4.772.583.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						4.975.924.000		4.925.924.000		4.772.583.000		
						Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14.6	4.975.924.000	14.6	4.925.924.000	7.99	4.772.583.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					4.975.924.000		4.925.924.000		4.772.583.000		
						Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	12	1.633.205.000	12	1.605.205.000	12	1.598.984.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02.0005			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1.633.205.000		1.605.205.000		1.598.984.000		
						Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	2	1.633.205.000	2	1.605.205.000	2	1.598.984.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	6	3.025.402.000	6	3.003.402.000	8.72	2.831.129.000	Pokja Kerawanan Pangan	
		2.09.04.1.02.0002			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				275.000.000		273.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	275.000.000	2	273.000.000	2	120.000.000	Pokja Kerawanan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2.750.402.000		2.730.402.000		2.711.129.000		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	2.750.402.000	1	2.730.402.000	1	2.711.129.000	Pokja Kerawanan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan	%	3	317.317.000	3	317.317.000	3	342.470.000	Pokja Penyelamatan Pangan	
		2.09.04.1.02.0003			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				317.317.000		317.317.000		342.470.000		
						Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	317.317.000	1	317.317.000	1	342.470.000	Pokja Penyelamatan Pangan	
						Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	8	6.654.106.000	8	6.626.106.000	8	6.461.596.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						6.654.106.000		6.626.106.000		6.461.596.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62.5	6.654.106.000	62.5	6.626.106.000	62.5	6.461.596.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					6.654.106.000		6.626.106.000		6.461.596.000		
						Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan	Angka	10	377.226.000	10	377.226.000	10	374.031.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	
		2.09.03.1.01.0011			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi				377.226.000		377.226.000		374.031.000		
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	10	377.226.000	10	377.226.000	10	374.031.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	
						Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	%	100	3.138.440.000	100	3.110.440.000	100	3.105.180.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				3.138.440.000		3.110.440.000		3.105.180.000		
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	2	3.138.440.000	2	3.110.440.000	2	3.105.180.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	725	3.138.440.000	725	3.138.440.000	950	2.982.385.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3.138.440.000		3.138.440.000		2.982.385.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	3.138.440.000	3	3.138.440.000	3	2.982.385.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan								**5.096.389.000**		**5.071.389.000**		**3.235.973.000**		
						Angka Ketersediaan Energi (AKE)	kkal/kapita/h	3625	5.096.389.000	3625	5.071.389.000	3625	3.235.973.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						5.096.389.000		5.071.389.000		3.235.973.000		
						Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0.47	5.025.529.000	0.47	5.000.529.000	0.36	3.171.511.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					5.025.529.000		5.000.529.000		3.171.511.000		
						persentase penyaluran cppd	%	50	5.025.529.000	50	5.000.529.000	50	3.171.511.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				5.025.529.000		5.000.529.000		3.171.511.000		
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	320	5.025.529.000	320	5.000.529.000	300	3.171.511.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1.21	70.860.000	1.21	70.860.000	1.21	64.462.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					70.860.000		70.860.000		64.462.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Dokumen	1	70.860.000	1	70.860.000	1	64.462.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				70.860.000		70.860.000		64.462.000		
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	70.860.000	2	70.860.000	2	64.462.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan								**4.456.706.000**		**4.339.706.000**		**3.728.545.000**		
						Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Angka	94.5	4.456.706.000	94.5	4.339.706.000	94.5	3.728.545.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.864.500.000		1.785.500.000		1.382.167.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87.3	1.864.500.000	87.3	1.785.500.000	87.3	1.382.167.000	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.353.825.000		1.274.825.000		899.553.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	1.006.835.000	10	966.135.000	10	623.570.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	
		2.09.03.1.01.0007			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.006.835.000		966.135.000		623.570.000		
						Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1.006.835.000	1	966.135.000	1	623.570.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA	%	42	346.990.000	42	308.690.000	42	275.983.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	
		2.09.03.1.01.0006			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				346.990.000		308.690.000		275.983.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	2	346.990.000	1	308.690.000	1	275.983.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					510.675.000		510.675.000		482.614.000		
						Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal	Kali	7	510.675.000	7	510.675.000	7	482.614.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				510.675.000		510.675.000		482.614.000		
						Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	2	510.675.000	5	510.675.000	5	482.614.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						2.592.206.000		2.554.206.000		2.346.378.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	1.657.085.000	40	1.651.085.000	40	1.524.339.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.657.085.000		1.651.085.000		1.524.339.000		
						Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan	Dokumen	100	1.437.085.000	100	1.434.085.000	100	1.326.150.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.437.085.000		1.434.085.000		1.326.150.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1.437.085.000	1	1.434.085.000	1	1.326.150.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	220.000.000	80	217.000.000	80	198.189.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	
		2.09.05.1.01.0007			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				220.000.000		217.000.000		198.189.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	51	220.000.000	50	217.000.000	90	198.189.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90.1	935.121.000	90.1	903.121.000	90.1	822.039.000	Bidang Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					935.121.000		903.121.000		822.039.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN	Dokumen	1	150.000.000	1	140.000.000	1	118.905.000	Pokja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				150.000.000		140.000.000		118.905.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2	150.000.000	1	140.000.000	1	118.905.000	Pokja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan	Kelompok	50	338.743.000	50	320.743.000	50	311.424.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				338.743.000		320.743.000		311.424.000		
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2	338.743.000	1	320.743.000	1	311.424.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	84	446.378.000	84	442.378.000	84	391.710.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0008			Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				446.378.000		442.378.000		391.710.000		
						Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	446.378.000	1	442.378.000	1	391.710.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**45.169.295.000**		**45.169.295.000**		**42.011.385.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKA)									**1.405.000.000**		**1.425.000.000**		**1.213.058.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indiks Kualitas Air (IKA)	Angka	68.82		68.82		68.82		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								**1.405.000.000**		**1.425.000.000**		**1.213.058.000**		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.34	1.405.000.000	3.34	1.425.000.000	3.34	1.213.058.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						200.000.000		192.000.000		153.018.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	200.000.000	100	192.000.000	100	153.018.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					145.772.000		137.772.000		118.342.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	3	145.772.000	3	137.772.000	3	118.342.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01.0002			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				101.088.000		93.088.000		87.136.000		
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	2	101.088.000	2	93.088.000	2	87.136.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.01.0006			Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi				44.684.000		44.684.000		31.206.000		
						Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	1	44.684.000	1	44.684.000	1	31.206.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					54.228.000		54.228.000		34.676.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	10	54.228.000	10	54.228.000	10	34.676.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.02.0002			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02.0009			Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota				54.228.000		54.228.000		34.676.000		
						Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen	10	54.228.000	10	54.228.000	10	34.676.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						750.000.000		786.000.000		737.948.000		
						Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	600.000.000	100	661.000.000	100	633.767.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					600.000.000		661.000.000		633.767.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	70	150.000.000	70	131.000.000	70	126.277.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				150.000.000		131.000.000		126.277.000		
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	2	150.000.000	2	131.000.000	2	126.277.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup	sampel	360	450.000.000	360	530.000.000	360	507.490.000	Pokja Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0009			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				450.000.000		530.000.000		507.490.000		
						Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	46	450.000.000	46	530.000.000	46	507.490.000	Pokja Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	150.000.000	4.76	125.000.000	4.76	104.181.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					150.000.000		125.000.000		104.181.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu	Usaha/Kegiatan	105	150.000.000	111	125.000.000	111	104.181.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0010			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				150.000.000		125.000.000		104.181.000		
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	3	150.000.000	3	125.000.000	3	104.181.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						25.000.000		25.000.000		19.068.000		
						Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	25.000.000	80	25.000.000	80	19.068.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.05.1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		19.068.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440	25.000.000	1476440	25.000.000	1476440	19.068.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				25.000.000		25.000.000		19.068.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	19.068.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						400.000.000		392.000.000		282.283.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	200.000.000	57	200.000.000	57	144.712.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		144.712.000		
						Jumlah pelaku usaha berizin yang taat	Pelaku Usaha	20	200.000.000	20	200.000.000	20	144.712.000		
		2.11.06.1.01.0009			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				200.000.000		200.000.000		144.712.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan	35	200.000.000	35	200.000.000	35	144.712.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	200.000.000	100	192.000.000	100	137.571.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					200.000.000		192.000.000		137.571.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	10	200.000.000	10	192.000.000	10	137.571.000	Pokja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				200.000.000		192.000.000		137.571.000		
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	10	200.000.000	10	192.000.000	10	137.571.000	Pokja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						30.000.000		30.000.000		20.741.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	20.741.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.10.1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					30.000.000		30.000.000		20.741.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Pengaduan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	20.741.000		
		2.11.10.1.01.0009			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				30.000.000		30.000.000		20.741.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	20	30.000.000	20	30.000.000	20	20.741.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKL)									**2.976.723.000**		**4.800.148.000**		**5.299.416.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	59.47		59.47		59.47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas lahan								**2.626.375.000**		**4.021.500.000**		**4.716.586.000**		
						Luas Tutupan Lahan	Ha	1022457	2.626.375.000	1022457	4.021.500.000	1022457	4.716.586.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						2.511.375.000		3.906.500.000		4.633.411.000		
						Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	73.375.000	100	258.675.000	100	249.107.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		3.28.03.1.09		Perbenihan Tanaman Hutan					73.375.000		258.675.000		249.107.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Batang	45000	47.575.000	45000	232.875.000	45000	230.834.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	
		3.28.03.1.09.000			Pembangunan Sumber Benih				20.150.000		32.890.000		31.410.000		
						Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	0.5	20.150.000	0.5	32.890.000	0.5	31.410.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0007			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan				27.425.000		199.985.000		199.424.000		
						Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang	45000	27.425.000	45000	199.985.000	45000	199.424.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	36	25.800.000	36	25.800.000	36	18.273.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Sumber Benih				2.610.000		2.610.000		2.394.000		
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	2	2.610.000	2	2.610.000	2	2.394.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Mutu Benih				2.610.000		2.610.000		2.394.000		
						Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	4	2.610.000	4	2.610.000	4	2.394.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Mutu Bibit				14.490.000		14.490.000		7.857.000		
						Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	30	14.490.000	30	14.490.000	30	7.857.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				3.480.000		3.480.000		3.234.000		
						Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	2	3.480.000	2	3.480.000	2	3.234.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.09.0010			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan				2.610.000		2.610.000		2.394.000		
						Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha	2	2.610.000	2	2.610.000	2	2.394.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.11	60.000.000	0.11	60.000.000	0.27	40.690.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					60.000.000		60.000.000		40.690.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	385.4	60.000.000	385.4	60.000.000	852.43	40.690.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				20.000.000		20.000.000		12.915.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	12.915.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.000.000		40.000.000		27.775.000		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	27.775.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0.01	63.800.000	0.01	163.800.000	0.03	563.800.000	CDK WILAYAH X	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					63.800.000		163.800.000		563.800.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10	Ha	14	63.800.000	14	163.800.000	95.85	563.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				63.800.000		163.800.000		563.800.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	14	63.800.000	14	163.800.000	95.85	563.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan		0		0		0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0.01	85.600.000	0.01	185.600.000	0.02	221.389.000	CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					85.600.000		185.600.000		221.389.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11	Ha	21	85.600.000	21	185.600.000	49	221.389.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				69.600.000		169.600.000		205.622.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	19	69.600.000	19	169.600.000	49	205.622.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				16.000.000		16.000.000		15.767.000		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	2	16.000.000	2	16.000.000	2	15.767.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan		0		0		0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0.02	357.500.000	0.02	467.500.000	0.03	496.716.000	CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					357.500.000		467.500.000		496.716.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2	Ha	53.4	357.500.000	53.4	467.500.000	87.4	496.716.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				89.500.000		199.500.000		233.128.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	89.500.000	30	199.500.000	64	233.128.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				268.000.000		268.000.000		263.588.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	23.4	268.000.000	23.4	268.000.000	23.4	263.588.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0.01	173.500.000	0.01	283.500.000	0.01	317.394.000	CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					173.500.000		283.500.000		317.394.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3	Ha	19.7	173.500.000	19.7	283.500.000	46.5	317.394.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				91.640.000		201.640.000		237.570.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	18.2	91.640.000	18.2	201.640.000	45	237.570.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				81.860.000		81.860.000		79.824.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	1.5	81.860.000	1.5	81.860.000	1.5	79.824.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0.02	337.484.000	0.02	447.484.000	0.03	478.782.000	CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					337.484.000		447.484.000		478.782.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4	Ha	70	337.484.000	70	447.484.000	110	478.782.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				54.984.000		164.984.000		200.661.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	54.984.000	30	164.984.000	70	200.661.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				282.500.000		282.500.000		278.121.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	40	282.500.000	40	282.500.000	40	278.121.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0.08	377.396.000	0.08	502.396.000	0.02	530.260.000	CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					377.396.000		502.396.000		530.260.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5	Ha	37.5	377.396.000	37.5	502.396.000	59.5	530.260.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				68.730.000		193.730.000		229.779.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	7.5	68.730.000	7.5	193.730.000	48	229.779.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				308.666.000		308.666.000		300.481.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	30	308.666.000	30	308.666.000	11.5	300.481.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0.01	269.720.000	0.01	394.720.000	0.03	429.415.000	CDK WILAYAH VI	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					269.720.000		394.720.000		429.415.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6	Ha	28.2	269.720.000	28.2	394.720.000	83.06	429.415.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				53.720.000		178.720.000		216.168.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	20	53.720.000	20	178.720.000	74.86	216.168.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				216.000.000		216.000.000		213.247.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	8.2	216.000.000	8.2	216.000.000	8.2	213.247.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0.01	149.000.000	0.01	268.825.000	0.03	297.340.000	CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					149.000.000		268.825.000		297.340.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7	Ha	43.5	149.000.000	43.5	268.825.000	98.77	297.340.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				130.780.000		253.745.000		282.535.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	41.5	130.780.000	41.5	253.745.000	96.77	282.535.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				18.220.000		15.080.000		14.805.000		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	2	18.220.000	2	15.080.000	2	14.805.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0.01	201.000.000	0.01	301.000.000	0.03	330.291.000	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					201.000.000		301.000.000		330.291.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8	Ha	39.1	201.000.000	39.1	301.000.000	98.35	330.291.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				31.000.000		131.000.000		166.112.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	10	31.000.000	10	131.000.000	69.25	166.112.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				170.000.000		170.000.000		164.179.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	29.1	170.000.000	29.1	170.000.000	29.1	164.179.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0.01	58.000.000	0.01	158.000.000	0.02	195.847.000	CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					58.000.000		158.000.000		195.847.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9	Ha	26	58.000.000	26	158.000.000	62	195.847.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				58.000.000		158.000.000		195.847.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	26	58.000.000	26	158.000.000	62	195.847.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0.01	200.000.000	0.01	310.000.000	0.02	388.865.000	CDK WILAYAH I	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					200.000.000		310.000.000		388.865.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1	Ha	33	200.000.000	33	310.000.000	60	388.865.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				93.000.000		203.000.000		284.523.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	93.000.000	30	203.000.000	57	284.523.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				0		0		0		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				107.000.000		107.000.000		104.342.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	3	107.000.000	3	107.000.000	3	104.342.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan				0		0		0		
						Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug				0		0		0		
						Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan				0		0		0		
						Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	46.122.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		46.122.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	46.122.000		
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		46.122.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	46.122.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.836.000	CDK WILAYAH X	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		4.836.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 10	Kelompok	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.836.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		4.836.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.836.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.885.000	CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		3.885.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 11	Kelompok	2	5.000.000	2	5.000.000	2	3.885.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		3.885.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.885.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.193.000	CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		4.193.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 2	Kelompok	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.193.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		4.193.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.193.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	13.153.000	CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					15.000.000		15.000.000		13.153.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 3	Kelompok	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				15.000.000		15.000.000		13.153.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.618.000	CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		4.618.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 4	Kelompok	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.618.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		4.618.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.618.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.919.000	CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		3.919.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 5	Kelompok	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.919.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		3.919.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.919.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	3.669.000	CDK WILAYAH VI	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		3.669.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 6	Kelompok	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.669.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		3.669.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.669.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.531.000	CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		4.531.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 7	Kelompok	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.531.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		4.531.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.531.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 8	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					0		0		0		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 8	Kelompok	1	0	1	0	1	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.589.000	CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		5.000.000		4.589.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 9	Kelompok	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.589.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		5.000.000		4.589.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.589.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK I	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH I	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					0		0		0		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 1	Kelompok	1	0	1	0	1	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						115.000.000		115.000.000		83.175.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	100	115.000.000	10	115.000.000	10	83.175.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					115.000.000		115.000.000		83.175.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	5	115.000.000	5	115.000.000	5	83.175.000		
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				50.000.000		50.000.000		36.914.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	500	50.000.000	500	50.000.000	500	36.914.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				15.000.000		15.000.000		8.121.000		
						Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	12	15.000.000	12	15.000.000	12	8.121.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0007			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				0		0		0		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	1	0	1	0	1	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0008			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				50.000.000		50.000.000		38.140.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	38.140.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati								**350.348.000**		**778.648.000**		**582.830.000**		
						Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0.478	350.348.000	0.487	778.648.000	0.487	582.830.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						158.986.000		187.286.000		188.654.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0.4	64.386.000	0.4	64.386.000	0.4	66.868.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					64.386.000		64.386.000		66.868.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	10	64.386.000	10	64.386.000	10	66.868.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				64.386.000		64.386.000		66.868.000		
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	10	64.386.000	10	64.386.000	10	66.868.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	2.6	94.600.000	3	122.900.000	3	121.786.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					94.600.000		122.900.000		121.786.000		
						Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	94.600.000	2	122.900.000	2	121.786.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.000			Pengelolaan Kebun Raya				94.600.000		122.900.000		121.786.000		
						Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	94.600.000	143.5	122.900.000	143.5	121.786.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						191.362.000		591.362.000		394.176.000		
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	90.000.000	73	90.000.000	73	86.268.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		3.28.04.1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					90.000.000		90.000.000		86.268.000		
						Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi	Ha	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.04.1.01.0013			Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	55.000.000	20	55.000.000	20	55.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0014			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura	Kali	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.587.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.01.0015			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				5.000.000		5.000.000		4.587.000		
						Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha	2549.3	5.000.000	2549.3	5.000.000	2549.3	4.587.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	21.681.000	Pokja Pemanfaatan	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				10.000.000		10.000.000		8.776.000		
						Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.776.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				5.000.000		5.000.000		3.731.000		
						Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	3.731.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0008			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	0	0	0	0	0	0	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.174.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	30.000.000	5	30.000.000	5	20.605.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		20.605.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	Jenis	2	30.000.000	2	30.000.000	2	20.605.000		
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				30.000.000		30.000.000		20.605.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	20.605.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	21.362.000	100	21.362.000	100	21.104.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					21.362.000		21.362.000		21.104.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Jenis	554	21.362.000	554	21.362.000	554	21.104.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				21.362.000		21.362.000		21.104.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	21.362.000	1	21.362.000	1	21.104.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 1	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH I	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 1	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 10	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH X	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 10	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 11	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH XI	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 11	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 2	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH II	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 2	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 3	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH III	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 3	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 4	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IV	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 4	Jenis		0		0		0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 5	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH V	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 5	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 6	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VI	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 6	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 7	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VII	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 7	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 8	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 8	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 9	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IX	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					0		0		0		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 9	Jenis	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	50.000.000	100	450.000.000	100	266.199.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					50.000.000		450.000.000		266.199.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP	Dokumen	7	50.000.000	7	450.000.000	7	266.199.000		
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				50.000.000		450.000.000		266.199.000		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	200	50.000.000	200	450.000.000	200	266.199.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 1	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH I	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 1	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		

						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 2	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH II	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 2	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 3	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH III	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 3	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 4	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IV	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 4	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 5	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH V	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 5	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 6	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VI	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 6	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 8	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 8	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 9	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IX	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					0		0		0		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 9	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKU)									**660.614.000**		**701.614.000**		**599.054.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	84.93		84.93		77.13		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								**660.614.000**		**701.614.000**		**599.054.000**		
						Indeks NO2 dan SO2	Angka	0.3234	660.614.000	0.3234	701.614.000	0.3234	599.054.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						215.614.000		215.614.000		176.516.000		
						Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3.26	215.614.000	3.26	215.614.000	3.26	176.516.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					215.614.000		215.614.000		176.516.000		
						Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak	Lokasi	50	215.614.000	50	215.614.000	50	176.516.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				14.370.000		14.370.000		6.834.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	14.370.000	1	14.370.000	1	6.834.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.03.1.01.0006			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				201.244.000		201.244.000		169.682.000		
						Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan	2	201.244.000	2	201.244.000	2	169.682.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						200.000.000		192.000.000		142.659.000		
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	200.000.000	100	192.000.000	100	142.659.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		192.000.000		142.659.000		
						Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	50	200.000.000	50	192.000.000	50	142.659.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	400	0	400	0	400	0	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				85.000.000		80.000.000		55.165.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	3	85.000.000	3	80.000.000	3	55.165.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0007			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				115.000.000		112.000.000		87.494.000		
						Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	50	115.000.000	50	112.000.000	50	87.494.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						245.000.000		294.000.000		279.879.000		
						Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	61	245.000.000	63	294.000.000	63	279.879.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					245.000.000		294.000.000		279.879.000		
						Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	18.46	245.000.000	23	294.000.000	23	279.879.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	
		2.11.11.1.01.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				0		0		0		
						Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				155.000.000		155.000.000		147.011.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	1	155.000.000	1	155.000.000	1	147.011.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0014			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				90.000.000		139.000.000		132.868.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	90.000.000	1	139.000.000	1	132.868.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (PE)									**465.000.000**		**717.000.000**		**567.034.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	0.47		0.47		0.47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan								**465.000.000**		**717.000.000**		**567.034.000**		
						Pertumbuhan produksi hasil hutan	%	0.47	465.000.000	0.47	717.000.000	0.47	567.034.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						165.000.000		165.000.000		127.355.000		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21.96	165.000.000	21.96	165.000.000	21.96	127.355.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					50.000.000		50.000.000		36.714.000		
						Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan	Dokumen	1	50.000.000	6	50.000.000	6	36.714.000		
		3.28.03.1.01.0010			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)				50.000.000		50.000.000		36.714.000		
						Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan	Dokumen	11	50.000.000	11	50.000.000	11	36.714.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.01.0011			Review atau revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)				0		0		0		
						Dokumen review atau revisi RKTP yang disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					20.000.000		20.000.000		16.224.000		
						Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.224.000		
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				20.000.000		20.000.000		16.224.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.224.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					45.000.000		45.000.000		36.632.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	8	45.000.000	8	45.000.000	8	36.632.000		
		3.28.03.1.06.0007			Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				25.000.000		25.000.000		18.834.000		
						Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen	12	25.000.000	12	25.000.000	12	18.834.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				20.000.000		20.000.000		17.798.000		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	17.798.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50.000.000		50.000.000		37.785.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	183	50.000.000	183	50.000.000	183	37.785.000		
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		50.000.000		37.785.000		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	37.785.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0005			Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0006			Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 10	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH X	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 10	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 10	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 11	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 11	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 11	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 2	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 2	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 2	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 3	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 3	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 3	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 4	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 4	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 4	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 5	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 5	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 5	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 6	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VI	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 6	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 6	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 7	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 7	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 7	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 8	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 8	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 8	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 9	%	0	0	0	0	0	0	CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 9	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					0		0		0		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 9	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				0		0		0		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						300.000.000		552.000.000		439.679.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	120.000.000	2.5	120.000.000	2.5	76.301.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					120.000.000		120.000.000		76.301.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	120.000.000	25	120.000.000	25	76.301.000		
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				31.000.000		31.000.000		25.970.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1000	31.000.000	1000	31.000.000	1000	25.970.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan				49.000.000		49.000.000		31.432.000		
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	90	49.000.000	30	49.000.000	30	31.432.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0008			Penyiapan Perhutanan Sosial				0		0		0		
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0		0		
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				40.000.000		40.000.000		18.899.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5	40.000.000	5	40.000.000	5	18.899.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0.3	25.000.000	0.3	69.000.000	0.3	20.841.000	CDK WILAYAH I	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					25.000.000		69.000.000		20.841.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 1	Kelompok	3	25.000.000	3	69.000.000	3	20.841.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				25.000.000		25.000.000		20.841.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	130	25.000.000	130	25.000.000	130	20.841.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		44.000.000		0		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	44.000.000	1	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0.2	15.000.000	0.2	45.000.000	0.2	44.447.000	CDK WILAYAH X	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		45.000.000		44.447.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 10	Kelompok	2	15.000.000	2	45.000.000	2	44.447.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		14.447.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	105	15.000.000	105	15.000.000	105	14.447.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0.2	15.000.000	0.2	15.000.000	0.2	11.868.000	CDK WILAYAH XI	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		15.000.000		11.868.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 11	Kelompok	2	15.000.000	2	15.000.000	2	11.868.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		11.868.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	57	15.000.000	57	15.000.000	57	11.868.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		0		0		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0		0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0.2	15.000.000	0.2	45.000.000	0.2	40.820.000	CDK WILAYAH II	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		45.000.000		40.820.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 2	Kelompok	2	15.000.000	2	45.000.000	2	40.820.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		10.820.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	101	15.000.000	101	15.000.000	101	10.820.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0.2	15.000.000	0.2	45.000.000	0.2	43.523.000	CDK WILAYAH III	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		45.000.000		43.523.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 3	Kelompok	2	15.000.000	2	45.000.000	2	43.523.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		13.523.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	109	15.000.000	109	15.000.000	109	13.523.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0.2	15.000.000	0.2	45.000.000	0.2	42.549.000	CDK WILAYAH IV	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		45.000.000		42.549.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 4	Kelompok	2	15.000.000	2	45.000.000	2	42.549.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		12.549.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	54	15.000.000	54	15.000.000	54	12.549.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0.3	15.000.000	0.3	59.000.000	0.3	56.608.000	CDK WILAYAH V	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		59.000.000		56.608.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 5	Kelompok	3	15.000.000	3	59.000.000	3	56.608.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		12.608.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	75	15.000.000	75	15.000.000	75	12.608.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		44.000.000		44.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	44.000.000	1	44.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0.2	15.000.000	0.2	59.000.000	0.2	57.722.000	CDK WILAYAH VI	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		59.000.000		57.722.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 6	Kelompok	2	15.000.000	2	59.000.000	2	57.722.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		13.722.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	107	15.000.000	107	15.000.000	107	13.722.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		44.000.000		44.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	44.000.000	1	44.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0.3	15.000.000	0.3	15.000.000	0.3	13.896.000	CDK WILAYAH VII	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		15.000.000		13.896.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 7	Kelompok	3	15.000.000	3	15.000.000	3	13.896.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		13.896.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	121	15.000.000	121	15.000.000	121	13.896.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		0		0		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0.2	20.000.000	0.2	20.000.000	0.2	18.255.000	CDK WILAYAH VIII	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					20.000.000		20.000.000		18.255.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 8	Kelompok	2	20.000.000	2	20.000.000	2	18.255.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				20.000.000		20.000.000		18.255.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	72	20.000.000	72	20.000.000	72	18.255.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		0		0		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0.2	15.000.000	0.2	15.000.000	0.2	12.849.000	CDK WILAYAH IX	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		15.000.000		12.849.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 9	Kelompok	2	15.000.000	2	15.000.000	2	12.849.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		15.000.000		12.849.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	69	15.000.000	69	15.000.000	69	12.849.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				0		0		0		
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	60	0	60	0	60	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				0		0		0		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5	0	5	0	5	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									**135.158.813.000**		**133.022.388.000**		**132.474.963.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								**134.773.313.000**		**132.686.888.000**		**132.182.318.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	85	134.773.313.000	85	132.686.888.000	85	132.182.318.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						134.773.313.000		132.686.888.000		132.182.318.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	1.383.251.000	100	1.354.951.000	100	1.335.184.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.000.000		37.000.000		37.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah KRB	Dokumen	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.000.000		37.000.000		37.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.451.000		83.451.000		63.968.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB	%	100	83.451.000	100	83.451.000	100	63.968.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.451.000		3.451.000		3.451.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.451.000	1	3.451.000	1	3.451.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		7.000.000		5.844.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	5.844.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		7.899.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.899.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		9.978.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	9.978.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		11.232.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	11.232.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		22.936.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.936.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan KRB	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.147.000.000		1.098.700.000		1.079.263.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB	Laporan	1	1.147.000.000	1	1.098.700.000	1	1.079.263.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		876.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	876.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000		85.200.000		92.220.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	85.200.000	1	85.200.000	1	92.220.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.060.800.000		1.012.500.000		986.167.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.060.800.000	1	1.012.500.000	1	986.167.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.800.000		125.800.000		144.953.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB	Unit	1	105.800.000	1	125.800.000	1	144.953.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		55.000.000		63.550.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.000.000	1	55.000.000	1	63.550.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.600.000		34.600.000		45.203.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	34.600.000	1	34.600.000	1	45.203.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	669.432.000	100	608.432.000	100	570.749.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BPL2H	Dokumen	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				22.000.000		22.000.000		22.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.000.000		57.000.000		33.757.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H	%	100	57.000.000	100	57.000.000	100	33.757.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		3.353.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.472.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		2.970.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		2.293.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.293.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		2.669.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		15.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.332.000		439.332.000		427.084.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H	Laporan	1	453.332.000	1	439.332.000	1	427.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.752.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				58.000.000		58.000.000		46.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	58.000.000	1	58.000.000	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				393.332.000		379.332.000		378.832.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	393.332.000	1	379.332.000	1	378.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.100.000		90.100.000		87.908.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H	Unit	1	137.100.000	1	90.100.000	1	87.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				102.100.000		80.100.000		79.439.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	102.100.000	1	80.100.000	1	79.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.469.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	1.222.891.000	100	1.170.591.000	100	1.141.122.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BSPTH	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.244.000		76.862.000		60.366.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH	%	100	75.244.000	100	76.862.000	100	60.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.599.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.799.000		9.417.000		9.417.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.799.000	1	9.417.000	1	9.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		6.000.000		4.123.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	4.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.525.000		2.525.000		2.497.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.525.000	1	2.525.000	1	2.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.400.000		8.400.000		6.720.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.400.000	1	8.400.000	1	6.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.520.000		42.520.000		30.010.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	42.520.000	1	42.520.000	1	30.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		12.500.000		11.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH	Unit	1	10.500.000	1	12.500.000	1	11.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		4.000.000		3.100.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.095.897.000		1.028.029.000		1.024.365.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH	Laporan	1	1.095.897.000	1	1.028.029.000	1	1.024.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.000		400.000		350.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	400.000	1	400.000	1	350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.897.000		165.897.000		165.897.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	165.897.000	1	165.897.000	1	165.897.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				929.600.000		861.732.000		858.118.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	929.600.000	1	861.732.000	1	858.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.250.000		53.200.000		44.791.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH	Unit	1	41.250.000	1	53.200.000	1	44.791.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.250.000		48.200.000		39.960.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	36.250.000	1	48.200.000	1	39.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		4.831.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	1.123.312.000	100	1.123.312.000	100	1.123.777.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		55.000.000		48.465.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA	%	100	55.000.000	100	55.000.000	100	48.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		4.000.000		3.834.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.834.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		2.100.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasiliitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		4.000.000		2.650.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		27.501.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	27.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		20.000.000		23.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		23.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					903.312.000		903.312.000		873.612.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA	Laporan	1	903.312.000	1	903.312.000	1	873.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		76.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	76.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				818.312.000		818.312.000		792.312.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	818.312.000	1	818.312.000	1	792.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.000.000		120.000.000		153.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	1	153.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		104.300.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	104.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		8.000.000		13.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		6.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	1	6.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	616.060.000	100	616.060.000	100	598.803.000	CDK WILAYAH I	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.000.000		69.000.000		62.035.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	69.000.000	100	69.000.000	100	62.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.450.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.388.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.340.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		4.000.000		3.865.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		3.250.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		8.000.000		6.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	6.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		36.942.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	36.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					431.760.000		431.760.000		412.268.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1	431.760.000	1	431.760.000	1	412.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.537.000		1.537.000		1.437.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.537.000	1	1.537.000	1	1.437.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		75.000.000		64.908.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	64.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				355.223.000		355.223.000		345.923.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	355.223.000	1	355.223.000	1	345.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.300.000		110.300.000		119.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1	Unit	1	110.300.000	1	110.300.000	1	119.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.700.000		95.700.000		79.200.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	95.700.000	1	95.700.000	1	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.600.000		14.600.000		25.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	14.600.000	1	14.600.000	1	25.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	536.831.000	100	565.135.000	100	529.022.000	CDK WILAYAH II	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.582.000		57.582.000		42.980.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2	%	100	57.582.000	100	57.582.000	100	42.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.165.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.800.000		2.800.000		2.464.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.800.000	1	2.800.000	1	2.464.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.277.000		4.277.000		3.570.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.277.000	1	4.277.000	1	3.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		3.000.000		2.595.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		1.662.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.662.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		8.000.000		6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.005.000		35.005.000		24.524.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.005.000	1	35.005.000	1	24.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 2	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.249.000		407.553.000		401.423.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2	Laporan	1	379.249.000	1	407.553.000	1	401.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		870.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		70.000.000		64.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.249.000		336.553.000		336.553.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	308.249.000	1	336.553.000	1	336.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		85.000.000		69.619.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2	Unit	1	85.000.000	1	85.000.000	1	69.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		70.000.000		58.400.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	58.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		11.219.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	11.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	654.926.000	100	654.926.000	100	614.177.000	CDK WILAYAH III	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 3	Dokumen	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.000.000		72.000.000		60.466.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3	%	100	72.000.000	100	72.000.000	100	60.466.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		2.504.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.504.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.000.000		6.711.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	6.711.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.009.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.009.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000		13.000.000		10.853.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	13.000.000	1	13.000.000	1	10.853.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		24.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	24.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 3	Unit	1	0	1	0	1	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					499.426.000		499.426.000		467.992.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3	Laporan	1	499.426.000	1	499.426.000	1	467.992.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.500.000		60.500.000		45.805.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	60.500.000	1	60.500.000	1	45.805.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				437.926.000		437.926.000		421.687.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	437.926.000	1	437.926.000	1	421.687.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000		80.000.000		82.219.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	82.219.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		70.000.000		65.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	65.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		11.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		6.219.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	6.219.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	599.975.000	100	599.975.000	100	589.309.000	CDK WILAYAH IV	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.550.000		10.550.000		10.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	10.550.000	1	10.550.000	1	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.550.000		10.550.000		10.350.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.550.000	1	10.550.000	1	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.038.000		57.188.000		48.003.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4	%	100	57.038.000	100	57.188.000	100	48.003.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.381.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.227.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.118.000		7.118.000		6.666.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.118.000	1	7.118.000	1	6.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.920.000		3.070.000		2.569.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.920.000	1	3.070.000	1	2.569.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000		7.000.000		6.250.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	6.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		18.910.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	18.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 4	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.387.000		442.966.000		433.856.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4	Laporan	1	448.387.000	1	442.966.000	1	433.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950.000		800.000		800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	950.000	1	800.000	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.190.000		70.190.000		57.920.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.190.000	1	70.190.000	1	57.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.247.000		371.976.000		375.136.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	377.247.000	1	371.976.000	1	375.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.000.000		89.271.000		97.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4	Unit	1	84.000.000	1	89.271.000	1	97.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		75.000.000		72.200.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	72.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		14.271.000		9.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.000.000	1	14.271.000	1	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	340.180.000	100	340.180.000	100	320.537.000	CDK WILAYAH IX	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 9	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.340.000		58.340.000		47.793.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9	%	100	58.340.000	100	58.340.000	100	47.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.752.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.120.000		3.120.000		2.733.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.120.000	1	3.120.000	1	2.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.339.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.000.000		5.904.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	5.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000		1.500.000		1.252.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.760.000		5.760.000		4.809.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.760.000	1	5.760.000	1	4.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.960.000		34.960.000		28.004.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	34.960.000	1	34.960.000	1	28.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 9	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.460.000		210.460.000		198.784.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9	Laporan	1	210.460.000	1	210.460.000	1	198.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	500.000	1	500.000	1	100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		38.724.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	38.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				159.960.000		159.960.000		159.960.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	159.960.000	1	159.960.000	1	159.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.380.000		67.380.000		69.960.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9	Unit	1	67.380.000	1	67.380.000	1	69.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.680.000		57.680.000		53.260.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	57.680.000	1	57.680.000	1	53.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.700.000		9.700.000		8.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.700.000	1	9.700.000	1	8.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		8.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	481.788.000	100	485.556.000	100	614.986.000	CDK WILAYAH V	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.902.000		13.902.000		13.902.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	13.902.000	1	13.902.000	1	13.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.902.000		13.902.000		13.902.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	13.902.000	1	13.902.000	1	13.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.500.000		59.500.000		50.506.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5	%	100	59.500.000	100	59.500.000	100	50.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.187.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.625.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.500.000		3.500.000		2.621.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.500.000	1	3.500.000	1	2.621.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		4.000.000		2.575.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		1.218.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		4.000.000		3.339.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		35.941.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	35.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 5	Unit	1	0	1	0	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.386.000		357.154.000		356.961.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5	Laporan	1	353.386.000	1	357.154.000	1	356.961.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.020.000		1.020.000		829.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.020.000	1	1.020.000	1	829.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.990.000		79.990.000		59.922.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	79.990.000	1	79.990.000	1	59.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				272.376.000		276.144.000		296.210.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	272.376.000	1	276.144.000	1	296.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		55.000.000		43.617.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	43.617.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		38.617.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	38.617.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	488.200.000	100	488.200.000	100	481.616.000	CDK WILAYAH VI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 6	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		55.000.000		46.170.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6	%	100	55.000.000	100	55.000.000	100	46.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.100.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		2.504.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		4.000.000		2.324.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		1.904.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		4.000.000		2.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		32.110.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	32.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 6	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.816.000		366.816.000		358.496.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6	Laporan	1	366.816.000	1	366.816.000	1	358.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		770.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.200.000		90.200.000		82.110.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	90.200.000	1	90.200.000	1	82.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.616.000		275.616.000		275.616.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	275.616.000	1	275.616.000	1	275.616.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.384.000		66.384.000		76.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6	Unit	1	66.384.000	1	66.384.000	1	76.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				63.884.000		63.884.000		55.350.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	63.884.000	1	63.884.000	1	55.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.500.000		2.500.000		1.600.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	1	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		20.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	425.000.000	100	430.175.000	100	425.258.000	CDK WILAYAH VII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		2.539.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.539.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		3.000.000		2.539.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.539.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.800.000		71.500.000		62.190.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7	%	100	73.800.000	100	71.500.000	100	62.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.625.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.622.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		3.872.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		6.000.000		3.625.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	3.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		1.455.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.100.000		2.100.000		1.900.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2.100.000	1	2.100.000	1	1.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.700.000		51.400.000		46.091.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	53.700.000	1	51.400.000	1	46.091.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 7	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					263.000.000		263.000.000		253.770.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7	Laporan	1	263.000.000	1	263.000.000	1	253.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		34.000.000		28.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	34.000.000	1	34.000.000	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.000.000		228.000.000		225.120.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	228.000.000	1	228.000.000	1	225.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.200.000		92.675.000		106.759.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7	Unit	1	85.200.000	1	92.675.000	1	106.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.300.000		77.775.000		79.659.000		

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.300.000	1	77.775.000	1	79.659.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.900.000		9.900.000		7.100.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.900.000	1	9.900.000	1	7.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		20.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	434.000.000	100	434.000.000	100	404.682.000	CDK WILAYAH VIII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.350.000		1.350.000		1.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 8	Dokumen	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.350.000		1.350.000		1.350.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.890.000		64.890.000		53.810.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8	%	100	64.890.000	100	64.890.000	100	53.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.775.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.800.000		3.800.000		3.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.800.000	1	3.800.000	1	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		4.000.000		3.225.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.090.000		2.090.000		1.400.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.090.000	1	2.090.000	1	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		7.230.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		33.380.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	33.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 8	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					293.760.000		293.760.000		288.090.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8	Laporan	1	293.760.000	1	293.760.000	1	288.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.760.000		2.760.000		2.390.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.760.000	1	2.760.000	1	2.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				240.000.000		240.000.000		239.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	240.000.000	1	240.000.000	1	239.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.000.000		74.000.000		61.432.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8	Unit	1	74.000.000	1	74.000.000	1	61.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				69.000.000		69.000.000		56.432.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	69.000.000	1	69.000.000	1	56.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	605.070.000	100	605.070.000	100	570.311.000	CDK WILAYAH X	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.041.000		3.041.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 10	Dokumen	1	3.041.000	1	3.041.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.041.000		3.041.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.041.000	1	3.041.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.000.000		62.000.000		51.403.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10	%	100	62.000.000	100	62.000.000	100	51.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.524.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.000.000		1.669.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		3.699.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		1.353.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		2.000.000		600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		8.000.000		5.820.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	5.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		32.110.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	32.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 10	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					385.029.000		385.029.000		380.898.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10	Laporan	1	385.029.000	1	385.029.000	1	380.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.000		400.000		300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	400.000	1	400.000	1	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.512.000		111.512.000		110.650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	111.512.000	1	111.512.000	1	110.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				273.117.000		273.117.000		269.948.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	273.117.000	1	273.117.000	1	269.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.000.000		155.000.000		135.010.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10	Unit	1	155.000.000	1	155.000.000	1	135.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.000.000		71.000.000		53.110.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	71.000.000	1	71.000.000	1	53.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		74.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	74.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	379.500.000	100	379.500.000	100	365.042.000	CDK WILAYAH XI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.002.000		30.002.000		30.002.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 11	Dokumen	1	30.002.000	1	30.002.000	1	30.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.002.000		30.002.000		30.002.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.002.000	1	30.002.000	1	30.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.500.000		63.500.000		50.140.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11	%	100	63.500.000	100	63.500.000	100	50.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		1.726.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		5.500.000		4.592.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000	1	4.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		4.200.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		28.622.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	28.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 11	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.998.000		212.998.000		211.248.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11	Laporan	1	212.998.000	1	212.998.000	1	211.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		30.000.000		28.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	28.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				182.998.000		182.998.000		182.998.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	182.998.000	1	182.998.000	1	182.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.000.000		73.000.000		73.652.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	73.000.000	1	73.000.000	1	73.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.000.000		65.000.000		55.652.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	65.000.000	1	65.000.000	1	55.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	124.812.897.000	100	122.830.825.000	100	122.497.743.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					120.250.739.000		118.250.739.000		118.226.593.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	120.250.739.000	1	118.250.739.000	1	118.226.593.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				120.165.739.000		118.165.739.000		118.165.739.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	665	120.165.739.000	665	118.165.739.000	648	118.165.739.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.000.000		35.000.000		27.961.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	27.961.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		32.893.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	32.893.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		39.893.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	45.000.000	100	45.000.000	100	39.893.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		13.658.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.658.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		26.235.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	30.000.000	10	30.000.000	10	26.235.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					642.259.000		655.109.000		482.828.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	642.259.000	100	655.109.000	100	482.828.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		17.850.000		15.639.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	17.850.000	1	15.639.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.259.000		32.259.000		20.618.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.259.000	1	32.259.000	1	20.618.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		60.000.000		52.921.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	60.000.000	1	52.921.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		12.751.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	12.751.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		120.000.000		74.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	74.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		256.399.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	350.000.000	1	350.000.000	1	256.399.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		5.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	5.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		5.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	5.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.308.499.000		3.308.577.000		3.166.529.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.308.499.000	1	3.308.577.000	1	3.166.529.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		9.000.000		5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	9.000.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				593.499.000		670.777.000		423.363.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	593.499.000	1	670.777.000	1	423.363.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				155.000.000		155.000.000		182.680.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	155.000.000	1	155.000.000	1	182.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.550.000.000		2.473.800.000		2.554.986.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.550.000.000	1	2.473.800.000	1	2.554.986.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426.400.000		426.400.000		416.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	426.400.000	1	426.400.000	1	416.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				270.000.000		270.000.000		270.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	270.000.000	17	270.000.000	17	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.400.000		6.400.000		6.400.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	6.400.000	1	6.400.000	1	6.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		22.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	22.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								**385.500.000**		**335.500.000**		**292.645.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	3	385.500.000	3	335.500.000	3	292.645.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						385.500.000		335.500.000		292.645.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	385.500.000	100	335.500.000	100	292.645.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					385.500.000		335.500.000		292.645.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	385.500.000	100	335.500.000	100	292.645.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		145.000.000		129.049.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	150.000.000	8	145.000.000	8	129.049.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.500.000		180.500.000		155.248.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	225.500.000	5	180.500.000	5	155.248.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		8.348.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	60	10.000.000	60	10.000.000	60	8.348.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**140.666.150.000**		**140.666.150.000**		**140.153.525.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah									**5.058.540.000**		**5.058.540.000**		**4.494.029.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Persentase Desa Mandiri	%	29.13		27.27		27.27		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah								**5.058.540.000**		**5.058.540.000**		**4.494.029.000**		
						Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah	%	0.7396	5.058.540.000	11.69	5.058.540.000	11.69	4.494.029.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						0		0		0		
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	0	0	0	0	0	0	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
		2.13.02.1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					0		0		0		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan Penataan Desa	Daerah	0	0	0	0	0	0	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.02.1.01.0003			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						155.000.000		155.000.000		122.575.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	57.05	155.000.000	57.05	155.000.000	57.05	122.575.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
		2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					155.000.000		155.000.000		122.575.000		
						Jumlah pelaksanaan kerjasama Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kerja Sama	0	0	0	0	0	0	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	
		2.13.03.1.01.0002			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kawasan	1	155.000.000	1	155.000.000	1	122.575.000	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				155.000.000		155.000.000		122.575.000		
						jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	155.000.000	1	155.000.000	1	122.575.000	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.033.540.000		1.033.540.000		810.408.000		
						Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	0	0	0	0	0	0	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
		2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					0		0		0		
						Jumlah Pengelola BUMDesma yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	
		2.13.04.1.01.0015			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	385.000.000	100	385.000.000	100	307.633.000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
		2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					385.000.000		385.000.000		307.633.000		
						Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades	Daerah	29	10.000.000	29	10.000.000	29	7.685.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	
		2.13.04.1.01.0007			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				10.000.000		10.000.000		7.685.000		
						jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	29	10.000.000	1	10.000.000	29	7.685.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	Kabupaten/ Kota	35	200.000.000	35	200.000.000	35	166.459.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				200.000.000		200.000.000		166.459.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	166.459.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan	Kabupaten/ Kota	35	0	35	0	35	0	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0009			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	0	1	0	1	0	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	Daerah	8	20.000.000	8	20.000.000	8	13.212.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				20.000.000		20.000.000		13.212.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	13.212.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa	Dokumen	50	85.000.000	50	85.000.000	75	67.434.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.04.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				85.000.000		85.000.000		67.434.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1	85.000.000	1	85.000.000	1	67.434.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Desa	29	70.000.000	29	70.000.000	29	52.843.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0018			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				70.000.000		70.000.000		52.843.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	52.843.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah penyusunan produk hukum Desa yang terfasilitasi	Desa	0	0	0	0	0	0	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	
		2.13.04.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	648.540.000	100	648.540.000	100	502.775.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					648.540.000		648.540.000		502.775.000		
						Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilatih dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01.0019			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam Penguatan manajemen Pemerintahan Desa	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01.0002			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa	Orang	200	418.540.000	200	418.540.000	200	303.574.000	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01.0010			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				418.540.000		418.540.000		303.574.000		
						jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	200	418.540.000	200	418.540.000	300	303.574.000	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	29	25.000.000	29	25.000.000	29	19.434.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	
		2.13.04.1.01.0005			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				25.000.000		25.000.000		19.434.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	25.000.000	0	25.000.000	1	19.434.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa	Daerah	29	120.000.000	29	120.000.000	29	113.900.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	
		2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				120.000.000		120.000.000		113.900.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	113.900.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data	Dokumen	50	85.000.000	50	85.000.000	50	65.867.000	Pokja Pengelolaan Aset Desa	
		2.13.04.1.01.0006			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				85.000.000		85.000.000		65.867.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	85.000.000	1	85.000.000	1	65.867.000	Pokja Pengelolaan Aset Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.870.000.000		3.870.000.000		3.561.046.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45.96	165.000.000	45.96	165.000.000	45.96	126.170.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000		165.000.000		126.170.000		
						Jumlah pengelola BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	300	165.000.000	300	165.000.000	300	126.170.000	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				165.000.000		165.000.000		126.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	165.000.000	1	165.000.000	1	126.170.000	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.950.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat					3.000.000.000		3.000.000.000		2.950.000.000		

				Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	175	1.000.000.000	175	1.000.000.000	175	1.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	1.950.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2.000.000.000		2.000.000.000		1.950.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.950.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	705.000.000	100	705.000.000	100	484.876.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				705.000.000		705.000.000		484.876.000		
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG	Kabupaten/Kota	35	50.000.000	35	50.000.000	35	18.367.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				50.000.000		50.000.000		18.367.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	18.367.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	550.000.000	35	550.000.000	35	390.303.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				550.000.000		550.000.000		390.303.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	550.000.000	1	550.000.000	1	390.303.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K	Orang	116	80.000.000	116	80.000.000	116	60.512.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				80.000.000		80.000.000		60.512.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	60.512.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Daerah	29	25.000.000	29	25.000.000	29	15.694.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0001			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				25.000.000		25.000.000		15.694.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	15.694.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**205.000.000**		**205.000.000**		**169.795.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Angka	85.5		85.5		85.5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah								**205.000.000**		**205.000.000**		**169.795.000**		
						Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	%	91.5	205.000.000	86.53	205.000.000	86.53	169.795.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						70.000.000		70.000.000		54.929.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99.4	70.000.000	99.07	70.000.000	99.07	54.929.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02.1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					70.000.000		70.000.000		54.929.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	99.4	70.000.000	99.43	70.000.000	99.43	54.929.000	Pokja Pendaftaran Penduduk	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				70.000.000		70.000.000		54.929.000		
						Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	54.929.000	Pokja Pendaftaran Penduduk	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						60.000.000		60.000.000		49.596.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99	60.000.000	99.12	60.000.000	99.12	49.596.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.03.1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil					60.000.000		60.000.000		49.596.000		
						Presentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	98	60.000.000	98	60.000.000	98	49.596.000	Pokja Pencatatan Sipil	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				60.000.000		60.000.000		49.596.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	1	49.596.000	Pokja Pencatatan Sipil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						75.000.000		75.000.000		65.270.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	65.270.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.04.1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					75.000.000		75.000.000		65.270.000		
						Persentase sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang terpublish	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	65.270.000	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				75.000.000		75.000.000		65.270.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	65.270.000	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0		0		0		
						Persentase Profil Data Kependudukan Jawa Tengah yang tersusun	%	100	0	100	0	100	0	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.05.1.01		Penyediaan Profil Kependudukan					0		0		0		
						Jumlah data dukung penyusunan profil data kependudukan Jawa Tengah yang terkumpul	Data	4	0	4	0	4	0	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		2.12.05.1.01.0001			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	1	0	0	0	0	0	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**18.645.901.000**		**18.645.901.000**		**18.358.293.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	74.5		74.5		74.5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								**18.360.901.000**		**18.360.901.000**		**18.086.467.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	74.5	18.360.901.000	84.75	18.360.901.000	84.75	18.086.467.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.360.901.000		18.360.901.000		18.086.467.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	18.360.901.000	100	18.360.901.000	100	18.086.467.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.069.218.000		14.069.218.000		14.065.846.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.069.218.000	12	14.069.218.000	12	14.065.846.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.712.218.000		13.712.218.000		13.712.218.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	13.712.218.000	80	13.712.218.000	80	13.712.218.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				357.000.000		357.000.000		353.628.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	357.000.000	0	357.000.000	1	353.628.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		99.320.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	99.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		99.320.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	99.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					651.683.000		651.683.000		579.020.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	651.683.000	100	651.683.000	100	579.020.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		7.382.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	12	9.000.000	12	7.382.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	7	25.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.000.000		53.000.000		26.316.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	53.000.000	12	53.000.000	12	26.316.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				85.000.000		85.000.000		97.840.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	85.000.000	12	85.000.000	12	97.840.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		7.609.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	12	12.000.000	12	7.609.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				115.000.000		115.000.000		82.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	115.000.000	1	115.000.000	1	82.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				205.000.000		205.000.000		215.266.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	205.000.000	1	205.000.000	1	215.266.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		2.507.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.507.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				142.683.000		142.683.000		140.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	142.683.000	2	142.683.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75.000.000		75.000.000		78.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	3	78.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				75.000.000		75.000.000		78.850.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	3	78.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.945.000.000		2.945.000.000		2.820.378.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.945.000.000	12	2.945.000.000	12	2.820.378.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				496.000.000		496.000.000		490.479.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	496.000.000	1	496.000.000	1	490.479.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		12.892.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	12.892.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.424.000.000		2.424.000.000		2.317.007.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.424.000.000	1	2.424.000.000	1	2.317.007.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					520.000.000		520.000.000		443.053.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	520.000.000	12	520.000.000	12	443.053.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				170.000.000		170.000.000		195.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	170.000.000	15	170.000.000	15	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		34.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	30.000.000	12	30.000.000	12	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		18.974.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	20.000.000	12	20.000.000	12	18.974.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				130.000.000		130.000.000		96.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	130.000.000	2	130.000.000	2	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		77.321.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	77.321.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		21.758.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.758.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								**285.000.000**		**285.000.000**		**271.826.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	84.5	285.000.000	2.7	285.000.000	2.7	271.826.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						285.000.000		285.000.000		271.826.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	285.000.000	100	285.000.000	100	271.826.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					285.000.000		285.000.000		271.826.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	285.000.000	100	285.000.000	100	271.826.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				180.000.000		180.000.000		149.371.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	180.000.000	5	180.000.000	5	149.371.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		105.000.000		122.455.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	105.000.000	4	105.000.000	4	122.455.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**23.909.441.000**		**23.909.441.000**		**23.022.117.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi									**138.755.679.000**		**138.913.079.000**		**145.184.897.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.788		6.788		6.788		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah								**11.758.693.000**		**11.756.493.000**		**18.005.274.000**		
						Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99.9838	11.758.693.000	99.9838	11.756.493.000	99.9838	18.005.274.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						10.158.693.000		10.156.493.000		16.415.544.000		
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81.84	358.208.000	81.84	358.208.000	81.84	353.923.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					358.208.000		358.208.000		353.923.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	6889	358.208.000	6889	358.208.000	6889	353.923.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				337.978.000		337.978.000		335.383.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	337.978.000	36	337.978.000	36	335.383.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.230.000		20.230.000		18.540.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.230.000	2	20.230.000	2	18.540.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86.2	94.520.000	86.2	94.520.000	86.2	92.413.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					94.520.000		94.520.000		92.413.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	1261	94.520.000	1261	94.520.000	1261	92.413.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				84.520.000		84.520.000		83.248.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	84.520.000	36	84.520.000	36	83.248.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				10.000.000		10.000.000		9.165.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	9.165.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57.12	181.700.000	57.12	181.700.000	57.12	176.859.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					181.700.000		181.700.000		176.859.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2241	181.700.000	2241	181.700.000	2241	176.859.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				169.200.000		169.200.000		165.399.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	169.200.000	36	169.200.000	36	165.399.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12.500.000		12.500.000		11.460.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	12.500.000	2	12.500.000	2	11.460.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92.83	166.530.000	92.83	166.530.000	92.83	163.360.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.530.000		166.530.000		163.360.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	6889	166.530.000	6889	166.530.000	6889	163.360.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.530.000		151.530.000		149.400.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.530.000	36	151.530.000	36	149.400.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		15.000.000		13.960.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	13.960.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88.66	198.855.000	88.66	198.855.000	88.66	194.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					198.855.000		198.855.000		194.990.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3500	198.855.000	3500	198.855.000	3500	194.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				183.855.000		183.855.000		181.235.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	183.855.000	36	183.855.000	36	181.235.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		15.000.000		13.755.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	13.755.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87.09	166.570.000	87.09	166.570.000	87.09	164.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.570.000		166.570.000		164.100.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	3353	166.570.000	3353	166.570.000	3353	164.100.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.570.000		151.570.000		150.345.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.570.000	36	151.570.000	36	150.345.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		15.000.000		13.755.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	13.755.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6.94	5.564.416.000	6.94	5.562.216.000	6.94	5.557.308.000	Bidang Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					5.445.560.000		5.445.560.000		5.451.005.000		
						Persentase perlengkapan jalan terpenuhi	%	64.51	5.445.560.000	64.51	5.445.560.000	64.51	5.451.005.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				5.445.560.000		5.445.560.000		5.451.005.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	361	5.445.560.000	361	5.445.560.000	363	5.451.005.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					81.540.000		79.340.000		71.960.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	19	22.916.000	19	22.916.000	19	20.976.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				22.916.000		22.916.000		20.976.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	22.916.000	30	22.916.000	30	20.976.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Dokumen	12	58.624.000	12	56.424.000	12	50.984.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				58.624.000		56.424.000		50.984.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	7	58.624.000	7	56.424.000	7	50.984.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					37.316.000		37.316.000		34.343.000		
						Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin	%	73.13	37.316.000	73.13	37.316.000	73.13	34.343.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.06.0007			Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin				37.316.000		37.316.000		34.343.000		
						Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	33	37.316.000	33	37.316.000	33	34.343.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98.03	192.113.000	98.03	192.113.000	98.03	182.221.000	Bidang Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					192.113.000		192.113.000		182.221.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	317984	192.113.000	317984	192.113.000	317984	182.221.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				173.460.000		173.460.000		165.061.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	173.460.000	135	173.460.000	135	165.061.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				18.653.000		18.653.000		17.160.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	18.653.000	66	18.653.000	66	17.160.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	645.080.000	3	645.080.000	3	1.959.324.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					645.080.000		645.080.000		1.959.324.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	55.56	645.080.000	55.56	645.080.000	66.67	1.959.324.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				192.840.000		192.840.000		192.350.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	192.840.000	78	192.840.000	78	192.350.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				452.240.000		452.240.000		1.766.974.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	452.240.000	2	452.240.000	3	1.766.974.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	474.210.000	3	474.210.000	3	1.390.043.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					474.210.000		474.210.000		1.390.043.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	43.75	474.210.000	43.75	474.210.000	50	1.390.043.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				116.040.000		116.040.000		115.535.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	116.040.000	46	116.040.000	46	115.535.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				358.170.000		358.170.000		1.274.508.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	358.170.000	1	358.170.000	2	1.274.508.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	580.800.000	3	580.800.000	3	1.506.358.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					580.800.000		580.800.000		1.506.358.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	33.33	580.800.000	33.33	580.800.000	38.89	1.506.358.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				140.040.000		140.040.000		139.560.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	140.040.000	56	140.040.000	56	139.560.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				440.760.000		440.760.000		1.366.798.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	440.760.000	2	440.760.000	4	1.366.798.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	470.344.000	3	470.344.000	3	1.349.694.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					470.344.000		470.344.000		1.349.694.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	33.33	470.344.000	33.33	470.344.000	40	1.349.694.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				120.840.000		120.840.000		120.365.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	48	120.840.000	48	120.840.000	48	120.365.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				349.504.000		349.504.000		1.229.329.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	349.504.000	1	349.504.000	3	1.229.329.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	506.037.000	3	506.037.000	3	1.644.967.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					506.037.000		506.037.000		1.644.967.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	45.83	506.037.000	45.83	506.037.000	50	1.644.967.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				130.440.000		130.440.000		129.960.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	130.440.000	52	130.440.000	52	129.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				375.597.000		375.597.000		1.515.007.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	375.597.000	1	375.597.000	3	1.515.007.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	559.310.000	3	559.310.000	3	1.679.984.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					559.310.000		559.310.000		1.679.984.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	75	559.310.000	75	559.310.000	100	1.679.984.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				164.040.000		164.040.000		163.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	66	164.040.000	66	164.040.000	66	163.560.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				395.270.000		395.270.000		1.516.424.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	395.270.000	1	395.270.000	2	1.516.424.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.600.000.000		1.600.000.000		1.589.730.000		
						Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	1.600.000.000	28	1.600.000.000	28	1.589.730.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.05.1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.600.000.000		1.600.000.000		1.589.730.000		
						Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian	%	70.48	1.600.000.000	70.48	1.600.000.000	70.48	1.589.730.000	Pokja Perkeretaapian	
		2.15.05.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Perkeretaapian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.600.000.000		1.600.000.000		1.589.730.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	7	1.600.000.000	7	1.600.000.000	7	1.589.730.000	Pokja Perkeretaapian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah								**126.996.986.000**		**127.156.586.000**		**127.179.623.000**		
						Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.302	126.996.986.000	0.302	127.156.586.000	0.302	127.179.623.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						126.280.003.000		126.341.803.000		126.315.842.000		
						Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52.95	101.800.000	52.95	120.800.000	52.95	111.331.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.02.1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					101.800.000		120.800.000		111.331.000		
						Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ	%	43.9	101.800.000	43.9	120.800.000	43.9	111.331.000	Pokja Perencanaan Transportasi	
		2.15.02.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				101.800.000		120.800.000		111.331.000		
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2	101.800.000	2	120.800.000	2	111.331.000	Pokja Perencanaan Transportasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70.14	5.457.000.000	70.14	5.457.000.000	70.14	5.287.752.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					5.457.000.000		5.457.000.000		5.287.752.000		
						Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B	%	53.48	5.457.000.000	53.48	5.457.000.000	53.48	5.287.752.000	Pokja Terminal Penumpang	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				155.000.000		155.000.000		265.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2	155.000.000	2	155.000.000	2	265.000.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.107.000.000		1.107.000.000		1.052.440.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.107.000.000	1	1.107.000.000	1	1.052.440.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				4.195.000.000		4.195.000.000		3.970.312.000		
						Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	4.195.000.000	1	4.195.000.000	1	3.970.312.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4.42	118.885.631.000	4.42	118.930.631.000	4.42	118.648.288.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					811.634.000		856.634.000		830.299.000		
						Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	%	28.06	811.634.000	28.06	856.634.000	28.06	830.299.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				811.634.000		856.634.000		830.299.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	811.634.000	6	856.634.000	6	830.299.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					118.073.997.000		118.073.997.000		117.817.989.000		
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	9557771	118.073.997.000	9557771	118.073.997.000	9557771	117.817.989.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				118.073.997.000		118.073.997.000		117.817.989.000		
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	118.073.997.000	115	118.073.997.000	115	117.817.989.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3.99	55.000.000	3.99	55.000.000	3.99	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	40.06	55.000.000	40.06	55.000.000	40.06	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		55.000.000		55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22.04	55.000.000	22.04	55.000.000	22.04	345.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		55.000.000		345.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31.91	55.000.000	31.91	55.000.000	31.91	345.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		55.000.000		345.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	2	345.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8.04	55.000.000	8.04	55.000.000	8.04	125.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		55.000.000		125.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38.31	55.000.000	38.31	55.000.000	38.31	125.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		55.000.000		125.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	2	125.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28.16	55.000.000	28.16	55.000.000	28.16	167.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		55.000.000		167.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	42.94	55.000.000	42.94	55.000.000	42.94	167.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		55.000.000		167.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	2	167.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43.53	55.000.000	43.53	55.000.000	43.53	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	31.71	55.000.000	31.71	55.000.000	31.71	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45.11	80.000.000	45.11	80.000.000	45.11	80.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	28.44	80.000.000	28.44	80.000.000	28.44	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69.85	696.815.000	69.85	696.815.000	69.85	682.461.000	Bidang Angkutan Jalan	
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					696.815.000		696.815.000		682.461.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	35063886	696.815.000	35063886	696.815.000	35063886	682.461.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				696.815.000		696.815.000		682.461.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	696.815.000	3	696.815.000	3	682.461.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46.74	783.757.000	46.74	781.557.000	46.74	759.010.000	Bidang Angkutan Jalan	
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					19.810.000		19.810.000		19.810.000		
						Persentase angkutan barang yang berijin	%	68.95	19.810.000	68.95	19.810.000	68.95	19.810.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19.810.000		19.810.000		19.810.000		
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	60	19.810.000	60	19.810.000	60	19.810.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					660.173.000		660.173.000		648.171.000		
						Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	48.72	660.173.000	48.72	660.173.000	48.72	648.171.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				586.551.000		586.551.000		582.426.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	586.551.000	6	586.551.000	6	582.426.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				73.622.000		73.622.000		65.745.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	73.622.000	7	73.622.000	7	65.745.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.15.02.1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					18.000.000		18.000.000		15.880.000		
						Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	%	13.04	18.000.000	13.04	18.000.000	13.04	15.880.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		2.15.02.1.11.0001			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				18.000.000		18.000.000		15.880.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	18.000.000	1	18.000.000	1	15.880.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					48.400.000		46.200.000		41.642.000		
						Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	%	53.1	48.400.000	53.1	46.200.000	53.1	41.642.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				48.400.000		46.200.000		41.642.000		
						Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	26	48.400.000	26	46.200.000	26	41.642.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.374.000		17.374.000		15.671.000		
						Persentase angkutan taksi terpenuhi	%	18.85	17.374.000	18.85	17.374.000	18.85	15.671.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				17.374.000		17.374.000		15.671.000		
						Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	37	17.374.000	37	17.374.000	37	15.671.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		2.15.02.1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		17.836.000		
						Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	17.836.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		20.000.000		17.836.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.836.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						716.983.000		814.783.000		863.781.000		
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0.472	716.983.000	0.472	814.783.000	0.472	863.781.000	Bidang Pelayaran	
		2.15.03.1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					56.400.000		154.200.000		145.494.000		
						Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	%	51.52	56.400.000	51.52	154.200.000	51.52	145.494.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan				56.400.000		154.200.000		145.494.000		

					Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	3	56.400.000	3	154.200.000	3	145.494.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.03.1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				37.387.000		37.387.000		35.025.000		
						Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	%	56.84	37.387.000	56.84	37.387.000	56.84	35.025.000	Pokja Angkutan Laut	
		2.15.03.1.06.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				37.387.000		37.387.000		35.025.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	37.387.000	30	37.387.000	30	35.025.000	Pokja Angkutan Laut	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.15.03.1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				38.536.000		38.536.000		35.382.000		
						Berth occupancy ratio	%	20.44	38.536.000	20.44	38.536.000	20.44	35.382.000	Pokja Kepelabuhanan	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				38.536.000		38.536.000		35.382.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	8	38.536.000	8	38.536.000	8	35.382.000	Pokja Kepelabuhanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		2.15.03.1.09.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				0		0		0		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Kepelabuhanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		2.15.03.1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				584.660.000		584.660.000		647.880.000		
						Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	%	60	584.660.000	60	584.660.000	60	647.880.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				77.000.000		77.000.000		75.720.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	77.000.000	1	77.000.000	1	75.720.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				483.000.000		483.000.000		547.500.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	1	483.000.000	1	483.000.000	1	547.500.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.03.1.10.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				24.660.000		24.660.000		24.660.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	18	24.660.000	18	24.660.000	18	24.660.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan									**68.792.811.000**		**68.635.411.000**		**68.015.048.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	85.15		85.15		85.15		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan								**68.547.128.000**		**68.389.728.000**		**67.810.726.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	81.6	68.547.128.000	81.6	68.389.728.000	81.6	67.810.726.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						68.547.128.000		68.389.728.000		67.810.726.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	67.243.976.000	100	67.086.576.000	100	66.475.527.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.162.594.000		47.162.594.000		47.149.070.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	36	47.162.594.000	36	47.162.594.000	36	47.149.070.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.366.833.000		46.366.833.000		46.366.833.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	46.366.833.000	300	46.366.833.000	300	46.366.833.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				745.200.000		745.200.000		735.860.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	745.200.000	12	745.200.000	12	735.860.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.561.000		50.561.000		46.377.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.561.000	12	50.561.000	12	46.377.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					955.000.000		867.700.000		713.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	955.000.000	1	867.700.000	1	713.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				955.000.000		867.700.000		713.700.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	955.000.000	1	867.700.000	1	713.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					160.000.000		160.000.000		129.953.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	160.000.000	100	160.000.000	100	129.953.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		9.169.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.169.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		120.784.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	150.000.000	150	150.000.000	150	120.784.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.024.000.000		1.024.000.000		960.367.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.024.000.000	100	1.024.000.000	100	960.367.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.323.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.500.000		52.500.000		55.509.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.500.000	1	52.500.000	1	55.509.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		3.750.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	5.000.000	40	5.000.000	40	3.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		50.880.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	50.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				760.000.000		760.000.000		702.355.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	760.000.000	12	760.000.000	12	702.355.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.500.000		37.500.000		38.550.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	37.500.000	12	37.500.000	12	38.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.885.000.000		1.885.000.000		2.147.135.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	11	1.885.000.000	11	1.885.000.000	11	2.147.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.700.000.000		1.700.000.000		1.684.425.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.684.425.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		167.710.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80.000.000	3	80.000.000	16	167.710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.000.000		105.000.000		295.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	105.000.000	3	105.000.000	4	295.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.552.912.000		14.436.022.000		13.386.242.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	14.552.912.000	36	14.436.022.000	36	13.386.242.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		3.560.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	3.560.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000		1.513.855.000		1.453.855.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	12	1.513.855.000	12	1.453.855.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.959.687.000		12.918.167.000		11.928.827.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.959.687.000	12	12.918.167.000	12	11.928.827.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.504.470.000		1.551.260.000		1.989.060.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	288	1.504.470.000	288	1.551.260.000	288	1.989.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				857.400.000		857.400.000		849.400.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	857.400.000	73	857.400.000	73	849.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		350.000.000		800.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	350.000.000	2	350.000.000	5	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		116.790.000		116.790.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	92	116.790.000	92	116.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.070.000		147.070.000		142.870.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	117.070.000	93	147.070.000	93	142.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	247.100.000	100	247.100.000	100	238.244.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.540.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.540.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.500.000		132.500.000		124.104.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	132.500.000	100	132.500.000	100	124.104.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		44.500.000		44.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		10.510.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	10.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		11.000.000		9.184.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	9.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.000.000		52.000.000		47.550.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.000.000	1	52.000.000	1	47.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.860.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.600.000		46.600.000		46.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Laporan	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000		45.600.000		45.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	123.612.000	100	123.612.000	100	114.529.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.000.000	12	3.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.612.000		56.612.000		48.954.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	56.612.000	100	56.612.000	100	48.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		35.500.000		35.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.500.000	1	35.500.000	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.612.000		7.612.000		694.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.612.000	1	7.612.000	1	694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.760.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Laporan	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000		51.000.000		51.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	157.840.000	100	157.840.000	100	156.785.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.840.000		74.840.000		74.210.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	74.840.000	100	74.840.000	100	74.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		37.500.000		37.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.340.000		19.340.000		19.340.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.870.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Laporan	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		54.000.000		54.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	164.700.000	100	164.700.000	100	166.298.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.570.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.570.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.700.000		76.700.000		80.660.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	76.700.000	100	76.700.000	100	80.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		37.500.000		37.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.200.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.200.000		21.200.000		26.085.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.200.000	1	21.200.000	1	26.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.875.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.000.000		26.000.000		25.268.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Laporan	24	26.000.000	24	26.000.000	24	25.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		25.000.000		24.968.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	24.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		54.000.000		52.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	8	54.000.000	8	54.000.000	8	52.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		2.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	7	4.000.000	7	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	171.400.000	100	171.400.000	100	170.215.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.575.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		81.000.000		80.370.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	81.000.000	100	81.000.000	100	80.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		38.500.000		38.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.870.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.400.000		27.400.000		27.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Laporan	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		870.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		26.400.000		26.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	141.500.000	100	141.500.000	100	145.925.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		4.575.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.700.000		74.700.000		83.638.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	74.700.000	100	74.700.000	100	83.638.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000		36.500.000		46.238.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.500.000	1	36.500.000	1	46.238.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.830.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	3.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.200.000		22.200.000		22.200.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.870.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.800.000		5.800.000		5.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Laporan	24	5.800.000	24	5.800.000	24	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		53.000.000		51.412.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	7	53.000.000	7	53.000.000	7	51.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		3.000.000		1.412.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	3.000.000	6	3.000.000	6	1.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	297.000.000	100	297.000.000	100	343.203.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		2.500.000		2.288.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		2.500.000		2.288.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.000.000		34.000.000		30.215.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	34.000.000	100	34.000.000	100	30.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		5.256.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		10.500.000		8.700.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	1	8.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		2.504.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		6.755.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	12	7.500.000	12	6.755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		252.500.000		303.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Unit	7	252.500.000	7	252.500.000	7	303.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		2.500.000		3.700.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	5	2.500.000	11	3.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan								**245.683.000**		**245.683.000**		**204.322.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3.11	245.683.000	3.11	245.683.000	3.11	204.322.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						245.683.000		245.683.000		204.322.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	245.683.000	100	245.683.000	100	204.322.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					245.683.000		245.683.000		204.322.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	245.683.000	100	245.683.000	100	204.322.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				120.064.000		120.064.000		91.154.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	120.064.000	9	120.064.000	9	91.154.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.619.000		62.619.000		55.899.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	62.619.000	4	62.619.000	4	55.899.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		45.552.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	126	50.000.000	126	50.000.000	126	45.552.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				13.000.000		13.000.000		11.717.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	13.000.000	1	13.000.000	1	11.717.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**207.548.490.000**		**207.548.490.000**		**213.199.945.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan									**60.610.629.000**		**67.338.435.000**		**64.920.783.000**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital**	
						Indeks Pemerintahan Digital	Angka	2.1		2.1		2.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis								**16.085.000.000**		**17.448.600.000**		**17.838.123.000**		
						Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	2.6	16.085.000.000	2.6	17.448.600.000	2.6	17.838.123.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						15.345.000.000		16.755.200.000		17.313.326.000		
						Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	15.345.000.000	85	16.755.200.000	85	17.313.326.000	Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					15.345.000.000		16.755.200.000		17.313.326.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	190	3.729.008.000	190	3.670.808.000	195	5.346.334.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	
		2.16.02.1.01.001			Relasi Media				2.588.285.000		2.387.094.000		4.272.259.000		
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	4	2.588.285.000	4	2.387.094.000	6	4.272.259.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.0024			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.140.723.000		1.283.714.000		1.074.075.000		
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	1.140.723.000	4	1.283.714.000	4	1.074.075.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	OPD Provinsi
						Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun	Rekomendasi	135	4.499.192.000	135	6.052.592.000	135	5.425.985.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	
		2.16.02.1.01.0019			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				3.884.375.000		5.384.375.000		4.766.319.000		
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	3.884.375.000	1	5.384.375.000	1	4.766.319.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.0023			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				614.817.000		668.217.000		659.666.000		
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	135	614.817.000	135	668.217.000	135	659.666.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
						Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi	%	40	4.815.000.000	40	4.760.000.000	40	4.615.912.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	
		2.16.02.1.01.0016			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				95.000.000		95.000.000		76.516.000		
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	20	95.000.000	20	95.000.000	20	76.516.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.0021			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				4.720.000.000		4.665.000.000		4.539.396.000		
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	20	4.720.000.000	20	4.665.000.000	20	4.539.396.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
						Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan	%	84	2.301.800.000	84	2.271.800.000	84	1.925.095.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
		2.16.02.1.01.0020			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				1.700.000.000		1.670.000.000		1.391.576.000		
						Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	55	1.700.000.000	55	1.670.000.000	55	1.391.576.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.002			Pelayanan Informasi Publik				601.800.000		601.800.000		533.519.000		
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	108	601.800.000	76	601.800.000	108	533.519.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	OPD Provinsi
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						740.000.000		693.400.000		524.797.000		
						Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	740.000.000	86	693.400.000	80	524.797.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
		2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					740.000.000		693.400.000		524.797.000		
						Jumlah data geospasial yang dipublikasikan	Data	30	220.000.000	30	253.400.000	30	190.040.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	
		2.20.02.1.01.0019			Peningkatan kualitas statistik sektoral				220.000.000		253.400.000		190.040.000		
						Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	40	220.000.000	40	253.400.000	30	190.040.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	OPD Provinsi
						Jumlah perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai prinsip SDI	Unit	10	260.000.000	10	220.000.000	10	196.877.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	
		2.20.02.1.01.0018			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				260.000.000		220.000.000		196.877.000		
						Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	40	260.000.000	40	220.000.000	30	196.877.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	OPD Provinsi
						Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik	%	30	260.000.000	30	220.000.000	20	137.880.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Integrasi Data	
		2.20.02.1.01.0016			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				260.000.000		220.000.000		137.880.000		
						Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	40	260.000.000	40	220.000.000	30	137.880.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Integrasi Data	OPD Provinsi
	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK								**44.525.629.000**		**49.889.835.000**		**47.082.660.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Angka	4.03	44.525.629.000	4.03	49.889.835.000	4.03	47.082.660.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						42.741.829.000		48.206.035.000		45.740.887.000		
						Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	20.173.604.000	65	19.932.010.000	65	19.266.111.000	UPT Pusat Data	
		2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					20.173.604.000		19.932.010.000		19.266.111.000		
						Persentase penyimpanan yang termanfaatkan	%	70	20.173.604.000	70	19.932.010.000	70	19.266.111.000		
		2.16.03.1.02.0037			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				20.173.604.000		19.932.010.000		19.266.111.000		
						Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	20.173.604.000	1	19.932.010.000	1	19.266.111.000		
						Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	12	20.027.500.000	12	19.717.500.000	12	18.037.136.000	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					20.027.500.000		19.717.500.000		18.037.136.000		
						Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi	Aplikasi	10	19.027.500.000	10	18.717.500.000	10	17.288.353.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0033			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				19.027.500.000		18.717.500.000		17.288.353.000		
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	5	19.027.500.000	5	18.717.500.000	5	17.288.353.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	
						Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas	Entitas	10	450.000.000	10	450.000.000	10	261.382.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0031			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas				450.000.000		450.000.000		261.382.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Laporan	4	450.000.000	4	450.000.000	4	261.382.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	
						Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE	Rekomendasi	5	550.000.000	5	550.000.000	5	487.401.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0035			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				550.000.000		550.000.000		487.401.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	3	550.000.000	3	550.000.000	3	487.401.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	
						Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	2.540.725.000	25	8.556.525.000	25	8.437.640.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	
		2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					2.540.725.000		8.556.525.000		8.437.640.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	35	1.181.000.000	35	1.578.385.000	35	1.537.833.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Digital	
		2.16.03.1.02.0019			Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				1.181.000.000		1.578.385.000		1.537.833.000		
						Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	35	1.181.000.000	35	1.578.385.000	35	1.537.833.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Digital	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi	Unit	250	1.213.000.000	250	5.810.820.000	250	5.797.559.000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	
		2.16.03.1.02.0032			Penyediaan Akses Internet				1.213.000.000		5.810.820.000		5.797.559.000		
						Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	100	1.213.000.000	100	5.810.820.000	100	5.797.559.000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya	Unit	250	146.725.000	250	1.167.320.000	250	1.102.248.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	
		2.16.03.1.02.0030			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				146.725.000		1.167.320.000		1.102.248.000		
						Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	107	146.725.000	107	1.167.320.000	107	1.102.248.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1.783.800.000		1.683.800.000		1.341.773.000		
						Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3.59	1.783.800.000	3.59	1.683.800.000	3.59	1.341.773.000	Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
		2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.164.140.000		1.183.436.000		907.197.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian	Unit	50	213.520.000	50	213.520.000	50	156.000.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	
		2.21.02.1.01.0008			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				213.520.000		213.520.000		156.000.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	1	213.520.000	1	213.520.000	1	156.000.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik	Unit	50	429.500.000	50	448.796.000	50	352.801.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	
		2.21.02.1.01.0005			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				429.500.000		448.796.000		352.801.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	50	429.500.000	50	448.796.000	50	352.801.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	63.520.000	4	63.520.000	4	54.449.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	
		2.21.02.1.01.0007			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				63.520.000		63.520.000		54.449.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	4	63.520.000	4	63.520.000	4	54.449.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	%	100	457.600.000	100	457.600.000	100	343.947.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	
		2.21.02.1.01.0006			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				457.600.000		457.600.000		343.947.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	50	457.600.000	50	457.600.000	50	343.947.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					619.660.000		500.364.000		434.576.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Unit	50	619.660.000	50	500.364.000	50	434.576.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	
		2.21.02.1.02.0002			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				619.660.000		500.364.000		434.576.000		
						Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Perangkat Daerah	50	619.660.000	50	500.364.000	50	434.576.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital									**36.762.703.000**		**36.034.897.000**		**32.663.931.000**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	72		72		69.23		Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital								**36.426.816.000**		**35.724.010.000**		**32.446.276.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	79.5	36.426.816.000	79.5	35.724.010.000	79.5	32.446.276.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						36.426.816.000		35.724.010.000		32.446.276.000		
						Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79.5	36.250.807.000	79.5	35.626.407.000	79.5	32.360.916.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.824.042.000		19.809.042.000		19.749.705.000		
						Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	100	19.824.042.000	7	19.809.042.000	7	19.749.705.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.000.242.000		19.000.242.000		19.000.242.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	115	19.000.242.000	115	19.000.242.000	115	19.000.242.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				763.800.000		763.800.000		710.760.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	763.800.000	12	763.800.000	12	710.760.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20.000.000		15.000.000		13.869.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	20.000.000	4	15.000.000	4	13.869.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				21.000.000		16.000.000		12.520.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	21.000.000	1	16.000.000	1	12.520.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				19.000.000		14.000.000		12.314.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	19.000.000	4	14.000.000	4	12.314.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					220.678.000		220.678.000		212.948.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	220.678.000	6	220.678.000	6	212.948.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		9.000.000		6.051.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.051.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.178.000		7.178.000		2.774.000		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.178.000	1	7.178.000	1	2.774.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000		4.500.000		4.123.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.123.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					93.000.000		83.000.000		38.822.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	93.000.000	20	83.000.000	20	38.822.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13.000.000		13.000.000		9.952.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	13.000.000	2	13.000.000	2	9.952.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		710.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Amerika Utara --> United States of America; DKI JAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		10.000.000		8.978.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	20.000.000	2	10.000.000	2	8.978.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		17.257.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	10	50.000.000	10	17.257.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		1.925.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	5.000.000	0	5.000.000	100	1.925.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.055.280.000		1.045.280.000		1.155.833.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.055.280.000	30	1.045.280.000	30	1.155.833.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.300.000		28.300.000		23.034.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	28.300.000	2	28.300.000	2	23.034.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				165.200.000		165.200.000		167.416.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	165.200.000	20	165.200.000	20	167.416.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		45.111.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	45.111.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		43.757.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	50.000.000	6	50.000.000	6	43.757.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				78.000.000		78.000.000		64.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.000.000	4	78.000.000	4	64.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		678.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1.000.000	5	1.000.000	5	678.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				169.000.000		159.000.000		245.435.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	169.000.000	12	159.000.000	12	245.435.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		400.000.000		496.014.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	400.000.000	12	400.000.000	12	496.014.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		22.351.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.351.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				88.780.000		88.780.000		47.537.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	88.780.000	2	88.780.000	2	47.537.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.200.000.000		5.200.000.000		1.820.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5.200.000.000	12	5.200.000.000	4	1.820.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	2	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	8	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.200.000.000		5.200.000.000		1.820.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5.200.000.000	0	5.200.000.000	4	1.820.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.894.507.000		8.565.107.000		8.552.248.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan / Dokumen	4	8.894.507.000	27	8.565.107.000	27	8.552.248.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.913.000		2.913.000		2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2.913.000	2	2.913.000	2	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.600.000.000		1.600.000.000		1.526.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.600.000.000	12	1.600.000.000	12	1.526.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		18.000.000		14.671.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	18.000.000	1	18.000.000	1	14.671.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.273.594.000		6.944.194.000		7.008.977.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.273.594.000	12	6.944.194.000	12	7.008.977.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					963.300.000		703.300.000		831.360.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	963.300.000	171	703.300.000	171	831.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		300.000.000		346.897.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	400.000.000	20	300.000.000	20	346.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000		70.000.000		79.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	90.000.000	25	70.000.000	25	79.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				37.000.000		27.000.000		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	37.000.000	4	27.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				278.000.000		178.000.000		259.135.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	278.000.000	2	178.000.000	2	259.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.000.000		71.000.000		97.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	106	101.000.000	106	71.000.000	106	97.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.300.000		46.300.000		37.028.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	46.300.000	4	46.300.000	4	37.028.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	176.009.000	100	97.603.000	100	85.360.000	UPT Pusat Data	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.306.000		41.900.000		31.768.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	40.306.000	30	41.900.000	30	31.768.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.926.000		0		0		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.926.000	1	0	0	0		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	0		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.800.000		9.870.000		8.170.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.800.000	1	9.870.000	1	8.170.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		1.060.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.060.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.580.000		30.030.000		22.538.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	27.580.000	1	30.030.000	1	22.538.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	1	0	0	0		
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan UPT Pusat Data, selama satu tahun anggaran	Unit	100	0	1	0	0	0		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	0		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.703.000		5.703.000		4.146.000		
						Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPT Pusat Data	Laporan	100	5.703.000	1	5.703.000	1	4.146.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.703.000		5.703.000		4.146.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.703.000	1	5.703.000	1	4.146.000		
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.000.000		50.000.000		49.446.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%	100	130.000.000	100	50.000.000	100	49.446.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	0	5	0	0	0		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				130.000.000		50.000.000		49.446.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	130.000.000	1	50.000.000	1	49.446.000		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital								**335.887.000**		**310.887.000**		**217.655.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	3.02	335.887.000	3.02	310.887.000	2.75	217.655.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						335.887.000		310.887.000		217.655.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	76	335.887.000	100	310.887.000	100	217.655.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					335.887.000		310.887.000		217.655.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	335.887.000	100	310.887.000	100	217.655.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		150.770.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	200.000.000	5	200.000.000	5	150.770.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.887.000		110.887.000		66.885.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	135.887.000	2	110.887.000	2	66.885.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	0	2	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**97.373.332.000**		**103.373.332.000**		**97.584.714.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (PE)									**4.989.070.000**		**4.912.070.000**		**4.266.493.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13.52		13.52		13.52		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi								**3.278.390.000**		**3.256.390.000**		**2.898.365.000**		
						Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	10.49	3.278.390.000	10.49	3.256.390.000	10.49	2.898.365.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						3.278.390.000		3.256.390.000		2.898.365.000		
						Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	3.278.390.000	30	3.256.390.000	30	2.898.365.000	Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
		2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					3.278.390.000		3.256.390.000		2.898.365.000		
						Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	%	60	3.072.040.000	60	3.060.040.000	60	2.720.334.000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	
		2.17.08.1.01.000			Pengembangan Usaha Kecil				3.072.040.000		3.060.040.000		2.720.334.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	330	3.072.040.000	330	3.060.040.000	330	2.720.334.000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	%	27	206.350.000	60	196.350.000	60	178.031.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				185.551.000		175.551.000		162.662.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	165	185.551.000	165	175.551.000	225	162.662.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				20.799.000		20.799.000		15.369.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	60	20.799.000	60	20.799.000	60	15.369.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB								**1.710.680.000**		**1.655.680.000**		**1.368.128.000**		
						Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2.16	1.710.680.000	2.16	1.655.680.000	2.16	1.368.128.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						938.680.000		916.680.000		773.812.000		
						Persentase Koperasi Berkualitas	%	27.1	938.680.000	27.1	916.680.000	27.1	773.812.000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
		2.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					400.000.000		389.000.000		332.239.000		
						Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	%	13.72	400.000.000	13.72	389.000.000	13.72	332.239.000	Pokja Kelembagaan	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				400.000.000		389.000.000		332.239.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	110	400.000.000	110	389.000.000	110	332.239.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					538.680.000		527.680.000		441.573.000		
						Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	%	100	538.680.000	100	527.680.000	100	441.573.000	Pokja Pengawasan	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				538.680.000		527.680.000		441.573.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	250	538.680.000	250	527.680.000	250	441.573.000	Pokja Pengawasan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						195.000.000		184.000.000		136.714.000		
						Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	195.000.000	91	184.000.000	91	136.714.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					195.000.000		184.000.000		136.714.000		
						Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	91	195.000.000	91	184.000.000	91	136.714.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				195.000.000		184.000.000		136.714.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	225	195.000.000	225	184.000.000	225	136.714.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						577.000.000		555.000.000		457.602.000		

						Persentase Koperasi Produktif	%	53.3	577.000.000	53.3	555.000.000	53.3	457.602.000	Bidang Bina Usaha Koperasi	
		2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					577.000.000		555.000.000		457.602.000		
						Presentase pertumbuhan modal Koperasi	%	5.25	288.500.000	5.25	280.000.000	5.25	221.572.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				238.500.000		238.500.000		190.437.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	60	238.500.000	60	238.500.000	60	190.437.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.0008			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000		41.500.000		31.135.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	10	50.000.000	10	41.500.000	10	31.135.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	4.1	288.500.000	4.1	275.000.000	4.1	236.030.000	Pokja Produktivitas Usaha	
		2.17.06.1.01.0006			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				53.500.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	10	53.500.000	10	40.000.000	10	40.000.000	Pokja Produktivitas Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				235.000.000		235.000.000		196.030.000		
						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	66	235.000.000	66	235.000.000	66	196.030.000	Pokja Produktivitas Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (TPT)									**855.000.000**		**822.000.000**		**701.386.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13.52		13.52		13.52		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah								**855.000.000**		**822.000.000**		**701.386.000**		
						Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3.53	855.000.000	3.53	822.000.000	3.35	701.386.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						855.000.000		822.000.000		701.386.000		
						Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	151.578.000	91	134.728.000	91	80.536.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					151.578.000		134.728.000		80.536.000		
						Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	%	91	151.578.000	91	134.728.000	91	80.536.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				151.578.000		134.728.000		80.536.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	725	151.578.000	725	134.728.000	725	80.536.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	178.422.000	85	184.272.000	85	143.298.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					178.422.000		184.272.000		143.298.000		
						Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	%	85	178.422.000	85	184.272.000	85	143.298.000	Pokja Kewirausahaan	
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				178.422.000		184.272.000		143.298.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	425	178.422.000	425	184.272.000	425	143.298.000	Pokja Kewirausahaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17.15	525.000.000	17.15	503.000.000	17.15	477.552.000	Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					525.000.000		503.000.000		477.552.000		

						Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM	%	5	395.000.000	5	385.000.000	5	372.138.000	Pokja Perlindungan Usaha	
		2.17.07.1.01.0010			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				52.000.000		47.000.000		37.866.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	30	52.000.000	30	47.000.000	30	37.866.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				270.000.000		269.000.000		273.719.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	90	270.000.000	90	269.000.000	90	273.719.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				73.000.000		69.000.000		60.553.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	210	73.000.000	210	69.000.000	210	60.553.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	%	51.77	130.000.000	51.77	118.000.000	51.77	105.414.000	Pokja Pembiayaan dan Data	
		2.17.07.1.01.0005			Penyusunan Basis Data Usaha Kecil				25.000.000		25.000.000		20.909.000		
						Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	4	25.000.000	4	25.000.000	1000	20.909.000	Pokja Pembiayaan dan Data	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				105.000.000		93.000.000		84.505.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	180	105.000.000	180	93.000.000	180	84.505.000	Pokja Pembiayaan dan Data	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									**28.089.628.000**		**28.199.628.000**		**25.786.672.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	71.5		71.5		75.19		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								**27.969.628.000**		**28.079.628.000**		**25.677.807.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	78.6	27.969.628.000	78.6	28.079.628.000	87.8	25.677.807.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.969.628.000		28.079.628.000		25.677.807.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	24.463.628.000	100	24.463.628.000	100	21.857.950.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.433.081.000		14.433.081.000		14.383.712.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.433.081.000	12	14.433.081.000	12	14.383.712.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.008.081.000		14.008.081.000		13.970.709.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	14.008.081.000	12	14.008.081.000	80	13.970.709.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				410.000.000		410.000.000		399.610.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	410.000.000	12	410.000.000	12	399.610.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000		15.000.000		13.393.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	13.393.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	90.000.000	12	90.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					8.000.000		8.000.000		7.669.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	8.000.000	100	8.000.000	100	7.669.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.000.000		8.000.000		7.669.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	8.000.000	3	8.000.000	3	7.669.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					473.425.000		473.425.000		462.851.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	473.425.000	100	473.425.000	100	462.851.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		14.942.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	14.942.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.761.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		15.900.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	4	12.500.000	4	15.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	48.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.925.000		7.925.000		6.616.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.925.000	4	7.925.000	4	6.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		80.000.000		73.396.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	73.396.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		295.236.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	295.236.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		51.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	0	6	0	1	51.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		51.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	51.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.285.622.000		9.285.622.000		6.607.218.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	9.285.622.000	12	9.285.622.000	12	6.607.218.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.628.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.000.000		510.000.000		483.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	510.000.000	12	510.000.000	12	483.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		12.523.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	12.523.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.757.622.000		8.757.622.000		6.109.067.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.757.622.000	12	8.757.622.000	12	6.109.067.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					173.500.000		173.500.000		255.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	173.500.000	12	173.500.000	12	255.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		75.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	50.000.000	12	50.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	5.000.000	12	5.000.000	3	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.500.000		33.500.000		46.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	33.500.000	12	33.500.000	12	46.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		20.000.000		40.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		32.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000	12	15.000.000	1	32.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		27.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	20.000.000	12	20.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	3.506.000.000	100	3.616.000.000	100	3.819.857.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.550.000		109.550.000		102.597.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	109.550.000	100	109.550.000	100	102.597.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		13.142.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	13.142.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		13.142.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	13.142.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.550.000		34.550.000		34.203.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.550.000	12	34.550.000	12	34.203.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.174.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		22.936.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	22.936.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Unit	23	0	23	0	0	0	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.269.600.000		3.379.600.000		3.354.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Laporan	12	3.269.600.000	12	3.379.600.000	12	3.354.920.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.314.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	4	1.500.000	4	1.314.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				577.310.000		687.310.000		662.816.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	577.310.000	12	687.310.000	12	662.816.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.685.790.000		2.685.790.000		2.685.790.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.685.790.000	12	2.685.790.000	12	2.685.790.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.850.000		126.850.000		362.340.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Unit	80	126.850.000	80	126.850.000	80	362.340.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.000.000		41.000.000		41.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	41.000.000	4	41.000.000	4	41.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.850.000		14.850.000		14.850.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	14.850.000	11	14.850.000	11	14.850.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.000.000		31.000.000		266.490.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	31.000.000	3	31.000.000	3	266.490.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	62	40.000.000	62	40.000.000	62	40.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								**120.000.000**		**120.000.000**		**108.865.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	3.12	120.000.000	3.12	120.000.000	3.12	108.865.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						120.000.000		120.000.000		108.865.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	120.000.000	100	120.000.000	100	108.865.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					120.000.000		120.000.000		108.865.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	11	120.000.000	100	120.000.000	100	108.865.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000		75.000.000		68.559.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	75.000.000	5	75.000.000	5	68.559.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		31.507.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	35.000.000	6	35.000.000	6	31.507.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		4.400.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.400.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		4.399.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.399.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									**33.933.698.000**		**33.933.698.000**		**30.754.551.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									**19.521.177.000**		**19.521.177.000**		**18.589.955.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	84.5		84.5		84.5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								**19.254.517.000**		**19.254.517.000**		**18.503.483.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	91	19.254.517.000	92	19.254.517.000	92	18.503.483.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.254.517.000		19.254.517.000		18.503.483.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	19.254.517.000	100	19.254.517.000	100	18.503.483.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.720.401.000		14.720.401.000		14.353.598.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	14.720.401.000	1	14.720.401.000	1	14.353.598.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.394.401.000		14.394.401.000		14.089.334.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	91	14.394.401.000	91	14.394.401.000	91	14.089.334.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				326.000.000		326.000.000		264.264.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	326.000.000	12	326.000.000	12	264.264.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					56.500.000		56.500.000		45.977.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	56.500.000	100	56.500.000	100	45.977.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1.500.000	0	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000		25.000.000		18.700.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	18.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		25.777.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	30.000.000	50	30.000.000	50	25.777.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					624.110.000		624.110.000		607.459.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	624.110.000	100	624.110.000	100	607.459.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		26.285.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	26.285.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		54.489.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	54.489.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.891.000		70.891.000		60.504.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	70.891.000	1	70.891.000	1	60.504.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.000.000		56.000.000		56.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000		55.000.000		63.095.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	55.000.000	1	55.000.000	1	63.095.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		3.500.000		2.633.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.500.000	12	3.500.000	12	2.633.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				79.000.000		79.000.000		73.819.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	73.819.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				244.219.000		244.219.000		245.692.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	244.219.000	12	244.219.000	12	245.692.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13.500.000		13.500.000		13.190.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000		12.000.000		11.752.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	11.752.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					218.000.000		218.000.000		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	218.000.000	6	218.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.000.000		178.000.000		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	178.000.000	3	178.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.049.660.000		3.049.660.000		3.033.148.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	3.049.660.000	12	3.049.660.000	12	3.033.148.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		9.000.000		8.752.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	8.752.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				534.000.000		534.000.000		505.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	534.000.000	12	534.000.000	12	505.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.000.000		53.000.000		48.213.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	53.000.000	12	53.000.000	12	48.213.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.453.660.000		2.453.660.000		2.471.183.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.453.660.000	12	2.453.660.000	12	2.471.183.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					505.846.000		505.846.000		383.301.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	160	505.846.000	197	505.846.000	197	383.301.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		113.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	100.000.000	24	100.000.000	24	113.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				305.846.000		305.846.000		155.301.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160	305.846.000	160	305.846.000	160	155.301.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		90.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	75.000.000	2	75.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								**266.660.000**		**266.660.000**		**86.472.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	3.05	266.660.000	3.05	266.660.000	3.05	86.472.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						266.660.000		266.660.000		86.472.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	266.660.000	100	266.660.000	100	86.472.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					266.660.000		266.660.000		86.472.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	266.660.000	100	266.660.000	100	86.472.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				121.660.000		121.660.000		41.006.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	121.660.000	4	121.660.000	4	41.006.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000		115.000.000		45.041.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	115.000.000	4	115.000.000	4	45.041.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		15.000.000		275.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	15.000.000	1	15.000.000	1	275.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		15.000.000		150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	150.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Penanaman Modal									**3.532.154.000**		**3.532.154.000**		**2.721.600.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Kontribusi PMTB terhadap PDRB	%	30.63		30.63		30.63		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal								**3.532.154.000**		**3.532.154.000**		**2.721.600.000**		
						Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	6.4	3.532.154.000	10.13	3.532.154.000	10.13	2.721.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						667.200.000		667.200.000		614.748.000		
						Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	100	667.200.000	10	667.200.000	10	614.748.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
		2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					667.200.000		667.200.000		614.748.000		
						Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan	Dokumen	2	667.200.000	3	667.200.000	3	614.748.000		
		2.18.02.1.02.0003			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				357.200.000		357.200.000		342.489.000		
						Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	35	357.200.000	35	357.200.000	35	342.489.000		
		2.18.02.1.02.0004			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				100.000.000		100.000.000		74.015.000		
						Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	8	100.000.000	8	100.000.000	8	74.015.000		
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				210.000.000		210.000.000		198.244.000		
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1	210.000.000	1	210.000.000	1	198.244.000		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.514.954.000		1.514.954.000		1.180.383.000		
						Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	62	1.514.954.000	62	1.514.954.000	62	1.180.383.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
		2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.514.954.000		1.514.954.000		1.180.383.000		
						Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan	Unit	40	1.514.954.000	40	1.514.954.000	40	1.180.383.000		
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1.439.954.000		1.439.954.000		1.118.569.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	40	1.439.954.000	40	1.439.954.000	40	1.118.569.000		
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		61.814.000		
						Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	61.814.000		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						790.000.000		790.000.000		497.738.000		
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91.5	480.000.000	91.5	480.000.000	91.5	250.072.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan	
		2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					480.000.000		480.000.000		250.072.000		
						Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun	Dokumen	4	160.000.000	4	160.000.000	4	59.030.000		
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				160.000.000		160.000.000		59.030.000		
						Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	4	160.000.000	4	160.000.000	4	59.030.000		
						Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan	Pelaku Usaha	7200	160.000.000	6000	160.000.000	6000	110.585.000		
		2.18.04.1.02.0006			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				160.000.000		160.000.000		110.585.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6000	160.000.000	6000	160.000.000	6000	110.585.000		
						Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen	1500	160.000.000	1500	160.000.000	1500	80.457.000		
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				160.000.000		160.000.000		80.457.000		
						Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1500	160.000.000	1500	160.000.000	1500	80.457.000		
						Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	310.000.000	100	310.000.000	100	247.666.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					310.000.000		310.000.000		247.666.000		
						Jumlah dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	2	175.695.000	2	175.695.000	2	169.493.000		
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				175.695.000		175.695.000		169.493.000		
						Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	1	175.695.000	1	175.695.000	1	169.493.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	134.305.000	100	134.305.000	100	78.173.000		
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				134.305.000		134.305.000		78.173.000		
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	134.305.000	600	134.305.000	600	78.173.000		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						350.000.000		350.000.000		260.388.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	350.000.000	25	350.000.000	25	260.388.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					350.000.000		350.000.000		260.388.000		
						Persentase LKPM yang disetujui	%	22	225.000.000	36	225.000.000	70	166.855.000		
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				225.000.000		225.000.000		166.855.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	225.000.000	400	225.000.000	400	166.855.000		
						Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan	%	90	125.000.000	51	125.000.000	51	93.533.000		
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal				125.000.000		125.000.000		93.533.000		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	180	125.000.000	180	125.000.000	180	93.533.000		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						210.000.000		210.000.000		168.343.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	210.000.000	10	210.000.000	10	168.343.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					210.000.000		210.000.000		168.343.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	165.150.000	1	165.150.000	1	134.445.000		
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				165.150.000		165.150.000		134.445.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	165.150.000	1	165.150.000	1	134.445.000		
						Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan	%	100	44.850.000	100	44.850.000	100	33.898.000		
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				44.850.000		44.850.000		33.898.000		
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	44.850.000	4	44.850.000	4	33.898.000		
JUMLAH									**23.053.331.000**		**23.053.331.000**		**21.311.555.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan									**100.444.700.000**		**101.389.700.000**		**106.973.058.000**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
						Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0.389		0.389		0.389		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan								**100.444.700.000**		**101.389.700.000**		**106.973.058.000**		
						Tingkat Kebugaran	%	0.186	11.564.700.000	0.16	11.564.700.000	0.16	12.822.360.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						11.564.700.000		11.564.700.000		12.822.360.000		
						Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0.34	11.564.700.000	0.34	11.564.700.000	0.34	12.822.360.000	Bidang Pembudayaan Olahraga	
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		215.574.000		
						Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swas	Kegiatan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	215.574.000		
		2.19.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				200.000.000		200.000.000		215.574.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	215.574.000		
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					10.364.700.000		10.364.700.000		11.656.630.000		
						Jumlah kejuaraan olahraga masyarakat yang diselenggarakan level provinsi (sportourisme)	Kegiatan	3	10.364.700.000	3	10.364.700.000	3	11.656.630.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				10.364.700.000		10.364.700.000		11.656.630.000		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	5	10.364.700.000	5	10.364.700.000	5	11.656.630.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					1.000.000.000		1.000.000.000		950.156.000		
						Jumlah Sport Science yang dikembangkan	Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	950.156.000	Pokja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga	
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.000.000.000		1.000.000.000		950.156.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	950.156.000	Pokja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga	
						Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	%	25	88.880.000.000	25	89.825.000.000	25	94.150.698.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						88.880.000.000		89.825.000.000		94.150.698.000		
						Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	14.050.000.000	79	14.050.000.000	79	13.655.678.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					300.000.000		300.000.000		258.888.000		
						Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional antar PPLOP	Orang	50	300.000.000	50	300.000.000	50	258.888.000	Seksi Kepelatihan	
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				300.000.000		300.000.000		258.888.000		
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	25	300.000.000	25	300.000.000	25	258.888.000	Seksi Kepelatihan	
						Jumlah kejuaraan olahraga pelajar (PPLOP) yang diselenggarakan level provinsi	Kegiatan	1	0	1	0	0	0	Seksi Kepelatihan	
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	Seksi Kepelatihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					13.750.000.000		13.750.000.000		13.396.790.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang terseleksi	Orang	81	300.000.000	81	300.000.000	81	286.159.000	Seksi Kepelatihan	
		2.19.03.1.03.000			Seleksi Atlet Daerah				300.000.000		300.000.000		286.159.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	320	300.000.000	320	300.000.000	320	286.159.000	Seksi Kepelatihan	
						Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pelajar prestasi tingkat nasional (PPLOP)	Orang	222	13.450.000.000	222	13.450.000.000	222	13.110.631.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.450.000.000		13.450.000.000		13.110.631.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	222	13.450.000.000	222	13.450.000.000	222	13.110.631.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	
						Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	15.900.000.000	79	15.900.000.000	79	20.261.882.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					300.000.000		300.000.000		227.889.000		
						Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swasta	Dokumen		150.000.000		150.000.000	1	89.583.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			150.000.000		150.000.000		89.583.000		
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	89.583.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
						Jumlah sarpras olahraga kewenangan daerah provinsi	Unit		150.000.000		150.000.000	1	138.306.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi			150.000.000		150.000.000		138.306.000		
						Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	138.306.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					3.400.000.000		3.400.000.000		936.758.000		
						Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional	Buah	50	3.000.000.000	50	3.000.000.000	50	440.175.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				3.000.000.000		3.000.000.000		440.175.000		
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	440.175.000	Pokja Olahraga Prestasi	
						Jumlah kejuaraan olahraga Paralympic yang diselenggarakan level provinsi	Kegiatan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	496.583.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				400.000.000		400.000.000		496.583.000		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	496.583.000	Pokja Olahraga Prestasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					12.200.000.000		12.200.000.000		19.097.235.000		
						Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	Orang	700	12.200.000.000	700	12.200.000.000	700	19.097.235.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				9.500.000.000		9.500.000.000		15.496.250.000		
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	200	9.500.000.000	200	9.500.000.000	250	15.496.250.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				2.700.000.000		2.700.000.000		3.600.985.000		
						Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	200	2.700.000.000	200	2.700.000.000	200	3.600.985.000	Pokja Olahraga Prestasi	
						Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	10	58.930.000.000	10	59.875.000.000	10	60.233.138.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					150.000.000		150.000.000		191.346.000		
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	191.346.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				150.000.000		150.000.000		191.346.000		
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	191.346.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.19.03.1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					58.780.000.000		59.725.000.000		60.041.792.000		
						Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi	6	58.780.000.000	6	59.725.000.000	6	60.041.792.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				58.580.000.000		59.525.000.000		59.853.182.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	58.580.000.000	4	59.525.000.000	4	59.853.182.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				200.000.000		200.000.000		188.610.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	188.610.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan									**11.965.000.000**		**11.340.000.000**		**11.523.755.000**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	60.25		60.25		60.25		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan								**11.965.000.000**		**11.340.000.000**		**11.523.755.000**		
						Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda	Angka	45.8	1.900.000.000	45.8	1.900.000.000	45.8	2.197.931.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						1.900.000.000		1.900.000.000		2.197.931.000		
						Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20.85	1.900.000.000	20.85	1.900.000.000	20.85	2.197.931.000	Bidang Pengembangan Pemuda	
		2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					1.900.000.000		1.900.000.000		2.197.931.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepeloporan	Orang	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	932.977.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				400.000.000		400.000.000		386.807.000		
						Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	%	200	400.000.000	200	400.000.000	200	386.807.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		2.19.02.1.01.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				600.000.000		600.000.000		546.170.000		
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	100	600.000.000	100	600.000.000	100	546.170.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
						Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar)	%	0.56	900.000.000	0.56	900.000.000	0.56	1.264.954.000	Pokja Kewirausahaan Pemuda	
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				900.000.000		900.000.000		1.264.954.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	300	900.000.000	300	900.000.000	500	1.264.954.000	Pokja Kewirausahaan Pemuda	
						Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Angka	47.2	10.065.000.000	47.2	9.440.000.000	47.2	9.325.824.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						10.065.000.000		9.440.000.000		9.325.824.000		
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8.6	9.345.000.000	8.6	8.720.000.000	8.6	8.553.576.000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	
		2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					1.100.000.000		1.100.000.000		1.041.043.000		
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	%	13.15	1.100.000.000	13.15	1.100.000.000	13.15	1.041.043.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0010			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				200.000.000		200.000.000		204.983.000		
						Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	50	200.000.000	50	200.000.000	50	204.983.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0011			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				700.000.000		700.000.000		662.324.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	5	700.000.000	5	700.000.000	5	662.324.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				200.000.000		200.000.000		173.736.000		
						Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	173.736.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					8.245.000.000		7.620.000.000		7.512.533.000		
						Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	970.972.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				1.000.000.000		1.000.000.000		970.972.000		
						Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	%	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	970.972.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
						Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Orang	1000	7.245.000.000	1000	6.620.000.000	1000	6.541.561.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				7.245.000.000		6.620.000.000		6.541.561.000		
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	50	7.245.000.000	50	6.620.000.000	50	6.541.561.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80.6	720.000.000	80.6	720.000.000	80.6	772.248.000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	
		2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					720.000.000		720.000.000		772.248.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya	Orang	3775	720.000.000	3775	720.000.000	3775	772.248.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				720.000.000		720.000.000		772.248.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1500	720.000.000	1500	720.000.000	1500	772.248.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
						Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi	Unit	1	0	1	0	0	0	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
		2.19.02.1.01.0005			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi				0		0		0		

						Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kepemudaan dan Olahraga									**39.242.745.000**		**39.242.745.000**		**38.580.926.000**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	81.55		81.55		81.55		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga								**38.392.745.000**		**38.392.745.000**		**37.962.131.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	77	38.392.745.000	77	38.392.745.000	77	37.962.131.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38.392.745.000		38.392.745.000		37.962.131.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	6.249.000.000	100	6.249.000.000	100	6.725.811.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.000.000		133.000.000		114.317.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.000.000	100	133.000.000	100	114.317.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		2.504.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.504.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		11.908.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	11.908.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.400.000		71.400.000		56.305.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	71.400.000	12	71.400.000	12	56.305.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				3.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	3.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.041.000.000		2.041.000.000		1.890.426.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.041.000.000	12	2.041.000.000	12	1.890.426.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		876.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	876.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.000.000.000		2.000.000.000		1.849.550.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	1.849.550.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					975.000.000		975.000.000		1.621.068.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	975.000.000	5	975.000.000	5	1.621.068.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		113.618.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	113.618.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				900.000.000		900.000.000		1.507.450.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	900.000.000	1	900.000.000	1	1.507.450.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	32.143.745.000	86	32.143.745.000	86	31.236.320.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.683.731.000		17.683.731.000		17.045.949.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	17.683.731.000	12	17.683.731.000	12	17.045.949.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.917.871.000		16.917.871.000		16.301.163.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	170	16.917.871.000	100	16.917.871.000	100	16.301.163.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				765.860.000		765.860.000		744.786.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	765.860.000	12	765.860.000	12	744.786.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					300.000.000		300.000.000		220.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				300.000.000		300.000.000		220.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		55.036.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	55.036.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		17.756.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000		15.000.000		16.080.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	15.000.000	20	15.000.000	20	16.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.000.000		75.000.000		21.200.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	75.000.000	100	75.000.000	100	21.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.217.463.000		1.217.463.000		1.104.449.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.217.463.000	100	1.217.463.000	100	1.104.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		40.000.000		39.350.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	12	40.000.000	12	39.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		49.641.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	49.641.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.000.000		46.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	12	40.000.000	12	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.463.000		27.463.000		23.833.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	27.463.000	12	27.463.000	12	23.833.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				150.000.000		150.000.000		115.779.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	115.779.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		800.000.000		733.964.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	800.000.000	12	800.000.000	12	733.964.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		50.000.000		35.882.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	35.882.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000		110.000.000		185.437.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	110.000.000	3	110.000.000	3	185.437.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		185.437.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	185.437.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		60.000.000		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	10	60.000.000	10	60.000.000	10	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.142.551.000		11.142.551.000		10.708.318.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	11.142.551.000	12	11.142.551.000	12	10.708.318.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		7.540.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.000.000	12	30.000.000	12	7.540.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		1.500.000.000		1.103.457.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.103.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		59.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	12	50.000.000	12	59.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.562.551.000		9.562.551.000		9.537.721.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9.562.551.000	12	9.562.551.000	12	9.537.721.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.585.000.000		1.585.000.000		1.917.131.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	26	1.585.000.000	26	1.585.000.000	26	1.917.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		170.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	200.000.000	10	200.000.000	10	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		117.131.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100.000.000	100	100.000.000	100	117.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				985.000.000		985.000.000		1.330.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	985.000.000	1	985.000.000	1	1.330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga								**850.000.000**		**850.000.000**		**618.795.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	3.03	850.000.000	3.03	850.000.000	3.03	618.795.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						850.000.000		850.000.000		618.795.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	618.795.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000		850.000.000		618.795.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	618.795.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		450.000.000		345.704.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	450.000.000	4	450.000.000	4	345.704.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		350.000.000		240.801.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	350.000.000	3	350.000.000	3	240.801.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		16.145.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	25	25.000.000	25	25.000.000	25	16.145.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		16.145.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	16.145.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									**151.652.445.000**		**151.972.445.000**		**157.077.739.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah									**617.892.000**		**617.892.000**		**534.892.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96.27		96.27		96.27		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah								**617.892.000**		**617.892.000**		**534.892.000**		
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Angka	97.29	459.117.000	97.29	459.117.000	97.29	402.009.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						439.052.000		439.052.000		384.172.000		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44.74	261.125.000	44.74	261.125.000	44.74	224.708.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					261.125.000		261.125.000		224.708.000		
						Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Orang	5	10.000.000	5	10.000.000	5	9.451.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis				10.000.000		10.000.000		9.451.000		
						Jumlah arsiparis	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.451.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
						Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Instansi	51	116.125.000	51	116.125.000	51	132.201.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				116.125.000		116.125.000		132.201.000		
						Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	51	116.125.000	51	116.125.000	51	132.201.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
						Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Lembaga	34	135.000.000	34	135.000.000	34	83.056.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				135.000.000		135.000.000		83.056.000		
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	135.000.000	117	135.000.000	117	83.056.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79.15	177.927.000	79.15	177.927.000	79.15	159.464.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					177.927.000		177.927.000		159.464.000		
						Jumlah arsip statis yang terkelola	Arsip	146012	177.927.000	146012	177.927.000	146012	159.464.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				13.508.000		13.508.000		11.684.000		
						Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	2	13.508.000	2	13.508.000	2	11.684.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.000			Akuisisi Arsip Statis				34.225.000		34.225.000		26.503.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	34.225.000	1500	34.225.000	1500	26.503.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				130.194.000		130.194.000		121.277.000		
						jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	13500	130.194.000	13500	130.194.000	13500	121.277.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						20.065.000		20.065.000		17.837.000		
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20.34	9.012.000	20.34	9.012.000	20.34	8.238.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					9.012.000		9.012.000		8.238.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	11.4	9.012.000	2034	9.012.000	2034	8.238.000	Pokja Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				9.012.000		9.012.000		8.238.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	600	9.012.000	600	9.012.000	600	8.238.000	Pokja Pelestarian Arsip	
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	11.4	5.000.000	11.4	5.000.000	11.4	4.809.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					5.000.000		5.000.000		4.809.000		
						Jumlah Arsip yang dialih-mediakan	Arsip	20.34	5.000.000	6545	5.000.000	6545	4.809.000	Pokja Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				5.000.000		5.000.000		4.809.000		
						Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	670	5.000.000	670	5.000.000	670	4.809.000	Pokja Pelestarian Arsip	
						Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66.67	6.053.000	66.67	6.053.000	66.67	4.790.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					6.053.000		6.053.000		4.790.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Arsip	10000	6.053.000	10000	6.053.000	10000	4.790.000	Pokja Akuisisi Arsip	
		2.24.03.1.01.0004			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				6.053.000		6.053.000		4.790.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	10000	6.053.000	10000	6.053.000	10000	4.790.000	Pokja Akuisisi Arsip	
						Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	50	158.775.000	50	158.775.000	50	132.883.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						158.775.000		158.775.000		132.883.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.7	158.775.000	85.7	158.775.000	85.7	132.883.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					158.775.000		158.775.000		132.883.000		
						Jumlah Arsip yang terlayankan	Arsip	1000	75.000.000	1000	75.000.000	1000	61.749.000	Pokja Layanan Arsip	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				75.000.000		75.000.000		61.749.000		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3500	75.000.000	3500	75.000.000	4150	61.749.000	Pokja Layanan Arsip	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	83.775.000	41	83.775.000	41	71.134.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				83.775.000		83.775.000		71.134.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	4	83.775.000	4	83.775.000	4	71.134.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									**30.309.985.000**		**30.309.985.000**		**30.065.422.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	73.78		73.78		73.78		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								**30.131.669.000**		**30.131.669.000**		**29.892.025.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	85.45	30.131.669.000	85.45	30.131.669.000	85.45	29.892.025.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.131.669.000		30.131.669.000		29.892.025.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	30.131.669.000	100	30.131.669.000	100	29.892.025.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.997.559.000		24.997.559.000		24.995.681.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	24.997.559.000	1	24.997.559.000	1	24.995.681.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.770.389.000		24.770.389.000		24.770.389.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	147	24.770.389.000	147	24.770.389.000	147	24.770.389.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				227.170.000		227.170.000		225.292.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	227.170.000	1	227.170.000	1	225.292.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91.708.000		91.708.000		85.919.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	91.708.000	1	91.708.000	1	85.919.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.200.000		2.200.000		1.785.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.200.000	1	2.200.000	1	1.785.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89.508.000		89.508.000		84.134.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	89.508.000	1	89.508.000	1	84.134.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.700.000		17.700.000		14.921.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	17.700.000	100	17.700.000	100	14.921.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		2.500.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.200.000		5.200.000		3.595.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.200.000	1	5.200.000	1	3.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		10.000.000		9.326.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	10.000.000	20	10.000.000	20	9.326.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					884.438.000		884.438.000		862.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	884.438.000	100	884.438.000	100	862.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		43.305.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	43.305.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.380.000		78.380.000		66.382.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	78.380.000	1	78.380.000	1	66.382.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		17.640.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	17.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.250.000		155.250.000		147.115.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	155.250.000	5	155.250.000	5	147.115.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.345.000		12.345.000		12.971.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.345.000	1	12.345.000	1	12.971.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		6.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		87.610.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	87.610.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				246.279.000		246.279.000		202.685.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	246.279.000	1	246.279.000	1	202.685.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.184.000		5.184.000		4.252.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.184.000	1	5.184.000	1	4.252.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				222.000.000		222.000.000		273.978.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	222.000.000	2	222.000.000	2	273.978.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					424.295.000		424.295.000		445.836.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	45	424.295.000	47	424.295.000	47	445.836.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136.000.000		136.000.000		111.805.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	136.000.000	21	136.000.000	12	111.805.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				288.295.000		288.295.000		334.031.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	288.295.000	13	288.295.000	23	334.031.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.186.166.000		3.278.506.000		3.076.575.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.186.166.000	1	3.278.506.000	1	3.076.575.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.314.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.314.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		1.100.000.000		873.330.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	873.330.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		126.000.000		125.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	120.000.000	1	126.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.964.666.000		2.051.006.000		2.076.931.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.964.666.000	1	2.051.006.000	1	2.076.931.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					529.803.000		437.463.000		410.655.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	165	529.803.000	155	437.463.000	155	410.655.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.553.000		112.553.000		112.553.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	112.553.000	23	112.553.000	23	112.553.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		4.800.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	5.000.000	15	5.000.000	15	4.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		35.000.000		40.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	41	35.000.000	41	35.000.000	72	40.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107.300.000		107.300.000		67.250.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	107.300.000	4	107.300.000	4	67.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				151.200.000		58.860.000		42.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	151.200.000	2	58.860.000	2	42.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.750.000		88.750.000		113.152.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	88.750.000	63	88.750.000	91	113.152.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								**178.316.000**		**178.316.000**		**173.397.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	3.08	178.316.000	3.08	178.316.000	3.08	173.397.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						178.316.000		178.316.000		173.397.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	178.316.000	100	178.316.000	100	173.397.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					178.316.000		178.316.000		173.397.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	178.316.000	100	178.316.000	100	173.397.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				143.396.000		143.396.000		135.463.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	143.396.000	5	143.396.000	5	135.463.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.920.000		24.920.000		28.370.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	24.920.000	5	24.920.000	5	28.370.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		4.840.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	67	5.000.000	67	5.000.000	67	4.840.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		4.724.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.724.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan literasi masyarakat									**1.572.289.000**		**1.572.289.000**		**1.512.349.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	42		42		40.1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								**1.572.289.000**		**1.572.289.000**		**1.512.349.000**		
						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Angka	68.5	1.572.289.000	68.5	1.572.289.000	60.25	1.512.349.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.469.708.000		1.469.708.000		1.441.994.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2	788.796.000	85.2	788.796.000	85.2	778.134.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					502.480.000		502.480.000		502.022.000		
						Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	3166650	5.000.000	3166650	5.000.000	3166650	4.986.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.0011			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		4.986.000		
						Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.986.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	46.500.000	12	46.500.000	12	59.964.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26.500.000		26.500.000		41.320.000		
						Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	6	26.500.000	6	26.500.000	6	41.320.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				20.000.000		20.000.000		18.644.000		
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.644.000	Pokja Layanan dan Otomasi	OPD Provinsi
						Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	%	5	450.980.000	3	450.980.000	3	437.072.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				450.980.000		450.980.000		437.072.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10386	450.980.000	6120	450.980.000	6120	437.072.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	OPD Provinsi
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					286.316.000		286.316.000		276.112.000		
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	1070	286.316.000	1070	286.316.000	1070	276.112.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				286.316.000		286.316.000		276.112.000		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	286.316.000	1	286.316.000	1	276.112.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	45.27	680.912.000	45.27	680.912.000	45.27	663.860.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					126.604.000		126.604.000		112.015.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Perpustakaan	4	52.000.000	4	52.000.000	4	45.840.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				23.620.000		23.620.000		20.914.000		
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	23.620.000	1	23.620.000	1	20.914.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0017			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				28.380.000		28.380.000		24.926.000		
						Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	28.380.000	10	28.380.000	10	24.926.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP	Perpustakaan	270	12.785.000	270	12.785.000	270	10.168.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				12.785.000		12.785.000		10.168.000		
						Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	12.785.000	10	12.785.000	10	10.168.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
						Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Orang	25	61.819.000	25	61.819.000	25	56.007.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				61.819.000		61.819.000		56.007.000		
						Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	30	61.819.000	30	61.819.000	30	56.007.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					554.308.000		554.308.000		551.845.000		
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	2	524.308.000	2	524.308.000	2	522.974.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				182.294.000		182.294.000		180.969.000		
						Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	12	182.294.000	12	182.294.000	12	180.969.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				342.014.000		342.014.000		342.005.000		
						Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	342.014.000	1	342.014.000	1	342.005.000	Pokja Kegemaran Membaca	
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Kegiatan	2	30.000.000	2	30.000.000	2	28.871.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				30.000.000		30.000.000		28.871.000		
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	13	30.000.000	13	30.000.000	13	28.871.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						102.581.000		102.581.000		70.355.000		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9.43	102.581.000	9.43	102.581.000	9.43	70.355.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					46.535.000		46.535.000		22.152.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penerbit	88	46.535.000	88	46.535.000	88	22.152.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				6.535.000		6.535.000		5.852.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3400	6.535.000	3400	6.535.000	3400	5.852.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	OPD Provinsi
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				40.000.000		40.000.000		16.300.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	6	40.000.000	6	40.000.000	6	16.300.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					21.430.000		21.430.000		18.188.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	21.430.000	2	21.430.000	2	18.188.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				11.535.000		11.535.000		9.892.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	5000	11.535.000	5000	11.535.000	5000	9.892.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				9.895.000		9.895.000		8.296.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	9.895.000	1	9.895.000	1	8.296.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					14.326.000		14.326.000		12.622.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Eksemplar	269	14.326.000	269	14.326.000	269	12.622.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.03.0003			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				14.326.000		14.326.000		12.622.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	6	14.326.000	6	14.326.000	6	12.622.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					20.290.000		20.290.000		17.393.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah	Eksemplar	415	20.290.000	415	20.290.000	415	17.393.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				8.800.000		8.800.000		7.901.000		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	19	8.800.000	21	8.800.000	21	7.901.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				11.490.000		11.490.000		9.492.000		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	22	11.490.000	21	11.490.000	21	9.492.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
JUMLAH									**32.500.166.000**		**32.500.166.000**		**32.112.663.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan									**63.857.762.000**		**63.864.762.000**		**62.990.938.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	84		84		84		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								**63.404.071.000**		**63.411.071.000**		**62.545.233.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85	63.404.071.000	85	63.411.071.000	85	62.545.233.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63.404.071.000		63.411.071.000		62.545.233.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	742.039.000	100	742.039.000	100	683.981.000	Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.804.000		21.804.000		27.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	21.804.000	100	21.804.000	100	27.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.948.000		4.948.000		5.082.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.948.000	1	4.948.000	1	5.082.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.056.000		12.056.000		13.011.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.056.000	1	12.056.000	1	13.011.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.800.000		4.800.000		9.007.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	12	9.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.855.000		654.855.000		575.001.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	654.855.000	12	654.855.000	12	575.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		1.300.000		2.880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.300.000	12	1.300.000	12	2.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.000.000		303.000.000		255.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	303.000.000	12	303.000.000	12	255.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.555.000		350.555.000		316.821.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.555.000	12	350.555.000	12	316.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.380.000		65.380.000		81.880.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	65.380.000	1	65.380.000	1	81.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.880.000		9.880.000		18.880.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	9.880.000	1	9.880.000	1	18.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.500.000		5.500.000		13.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.500.000	1	5.500.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	4.390.153.000	100	4.390.153.000	100	4.126.437.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.000.000		26.000.000		18.853.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	26.000.000	100	26.000.000	100	18.853.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		6.720.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	6.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		5.454.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		8.000.000		6.679.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	6.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.257.153.000		4.257.153.000		4.016.084.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	4.257.153.000	12	4.257.153.000	12	4.016.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		2.366.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.500.000	12	3.500.000	12	2.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				505.000.000		505.000.000		505.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.748.653.000		3.748.653.000		3.508.718.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.748.653.000	12	3.748.653.000	12	3.508.718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		107.000.000		91.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	107.000.000	1	107.000.000	1	91.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		7.000.000		5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		36.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	596.473.000	100	596.473.000	100	548.918.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.367.000		19.367.000		17.615.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	19.367.000	100	19.367.000	100	17.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.400.000		2.400.000		2.102.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.500.000		4.230.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.467.000		12.467.000		11.283.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12.467.000	1	12.467.000	1	11.283.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.433.000		537.433.000		491.811.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.433.000	12	537.433.000	12	491.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.290.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.272.000		44.272.000		43.808.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.272.000	12	44.272.000	12	43.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				490.161.000		490.161.000		445.713.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	490.161.000	12	490.161.000	12	445.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.673.000		39.673.000		39.492.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	39.673.000	1	39.673.000	1	39.492.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.815.000		24.815.000		24.923.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.815.000	1	24.815.000	1	24.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		2.711.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.711.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.858.000		11.858.000		11.858.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.858.000	1	11.858.000	1	11.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	513.636.000	100	513.636.000	100	692.227.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.554.000		17.554.000		18.712.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.554.000	100	17.554.000	100	18.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		500.000		438.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	1	500.000	1	438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.012.000		9.012.000		7.896.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.012.000	1	9.012.000	1	7.896.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.042.000		8.042.000		10.378.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.042.000	12	8.042.000	12	10.378.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.972.000		271.972.000		250.135.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	271.972.000	12	271.972.000	12	250.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		455.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	12	455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.472.000		241.472.000		219.680.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	241.472.000	12	241.472.000	12	219.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					224.110.000		224.110.000		423.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	224.110.000	1	224.110.000	1	423.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.110.000		4.110.000		3.380.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.110.000	1	4.110.000	1	3.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		400.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	406.687.000	100	406.687.000	100	372.958.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.935.000		16.935.000		14.183.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	16.935.000	100	16.935.000	100	14.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.640.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.774.000		3.774.000		3.774.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.774.000	1	3.774.000	1	3.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.161.000		10.161.000		7.769.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.161.000	12	10.161.000	12	7.769.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					357.372.000		357.372.000		331.484.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	357.372.000	12	357.372.000	12	331.484.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		860.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	860.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.200.000		34.200.000		34.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				322.172.000		322.172.000		296.424.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	322.172.000	12	322.172.000	12	296.424.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.380.000		32.380.000		27.291.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	32.380.000	1	32.380.000	1	27.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.080.000		18.080.000		18.080.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.080.000	1	18.080.000	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.300.000		4.300.000		4.211.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.211.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	49.277.557.000	100	49.277.557.000	100	49.228.163.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.977.993.000		43.977.993.000		44.023.159.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	43.977.993.000	1	43.977.993.000	1	44.023.159.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.055.093.000		43.055.093.000		43.055.093.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252	43.055.093.000	252	43.055.093.000	252	43.055.093.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				851.400.000		851.400.000		851.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	851.400.000	12	851.400.000	12	851.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				71.500.000		71.500.000		116.666.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	71.500.000	1	71.500.000	1	116.666.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					136.000.000		136.000.000		117.310.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	136.000.000	100	136.000.000	100	117.310.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	252	0	252	0	252	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16.000.000		16.000.000		11.926.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	16.000.000	12	16.000.000	12	11.926.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		75.000.000		84.249.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	84.249.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		45.000.000		21.135.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	45.000.000	30	45.000.000	30	21.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.251.710.000		1.251.710.000		1.194.105.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.251.710.000	100	1.251.710.000	100	1.194.105.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				115.140.000		115.140.000		107.704.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	115.140.000	1	115.140.000	1	107.704.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.490.000		164.490.000		148.154.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	164.490.000	1	164.490.000	1	148.154.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		25.047.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.047.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				154.080.000		154.080.000		135.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	154.080.000	1	154.080.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				57.500.000		57.500.000		46.147.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	57.500.000	1	57.500.000	1	46.147.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.500.000		650.500.000		659.425.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	650.500.000	12	650.500.000	12	659.425.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000		8.000.000		7.009.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	8.000.000	12	8.000.000	12	7.009.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72.000.000		72.000.000		65.619.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	72.000.000	1	72.000.000	1	65.619.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		75.000.000		133.453.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	50.000.000	1	75.000.000	1	133.453.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar				0		0		0		
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		75.000.000		133.453.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	75.000.000	1	133.453.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.698.854.000		2.673.854.000		2.418.306.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.698.854.000	1	2.673.854.000	1	2.418.306.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		2.781.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	2.781.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.792.000		390.792.000		340.792.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	390.792.000	12	390.792.000	12	340.792.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.302.062.000		2.277.062.000		2.074.733.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.302.062.000	12	2.277.062.000	12	2.074.733.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.063.000.000		1.063.000.000		1.241.830.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.063.000.000	1	1.063.000.000	1	1.241.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				290.000.000		290.000.000		375.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	290.000.000	1	290.000.000	1	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.000.000		142.000.000		90.450.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	142.000.000	1	142.000.000	1	90.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				450.000.000		450.000.000		596.680.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	450.000.000	1	450.000.000	1	596.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				181.000.000		181.000.000		179.700.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	181.000.000	1	181.000.000	1	179.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	644.022.000	100	644.022.000	100	615.505.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.134.000		32.134.000		30.901.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	32.134.000	100	32.134.000	100	30.901.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.974.000		2.974.000		2.233.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.974.000	1	2.974.000	1	2.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.750.000		23.750.000		23.750.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.750.000	1	23.750.000	1	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.410.000		5.410.000		4.918.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5.410.000	12	5.410.000	12	4.918.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.336.000		543.336.000		501.201.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	543.336.000	12	543.336.000	12	501.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.100.000		61.100.000		48.870.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.100.000	12	61.100.000	12	48.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				479.236.000		479.236.000		449.331.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	479.236.000	12	479.236.000	12	449.331.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.552.000		68.552.000		83.403.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	68.552.000	1	68.552.000	1	83.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		40.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.409.000		25.409.000		25.260.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.409.000	1	25.409.000	1	25.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.143.000		18.143.000		18.143.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.143.000	1	18.143.000	1	18.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	1.444.788.000	100	1.444.788.000	100	1.362.673.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.960.000		73.960.000		113.088.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	73.960.000	100	73.960.000	100	113.088.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.744.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.744.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.000.000		34.000.000		73.207.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.000.000	1	34.000.000	1	73.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.960.000		9.960.000		9.137.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	9.960.000	1	9.960.000	1	9.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.226.908.000		1.226.908.000		1.105.665.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.226.908.000	12	1.226.908.000	12	1.105.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		800.000		738.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	800.000	12	800.000	12	738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.800.000		202.468.000		199.864.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	201.800.000	12	202.468.000	12	199.864.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.024.308.000		1.023.640.000		905.063.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.024.308.000	12	1.023.640.000	12	905.063.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.920.000		143.920.000		143.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	143.920.000	1	143.920.000	1	143.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.000.000		56.000.000		56.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		23.000.000		23.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.920.000		64.920.000		64.920.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	64.920.000	1	64.920.000	1	64.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	1.220.856.000	100	1.220.856.000	100	1.093.205.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		50.200.000		41.920.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.200.000	100	50.200.000	100	41.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		7.885.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	7.885.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		19.985.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	19.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.200.000		21.200.000		14.050.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	21.200.000	12	21.200.000	12	14.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.061.156.000		1.061.156.000		945.985.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.061.156.000	12	1.061.156.000	12	945.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.254.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				203.980.000		203.980.000		188.780.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	203.980.000	12	203.980.000	12	188.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.676.000		855.676.000		755.951.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	855.676.000	12	855.676.000	12	755.951.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.500.000		109.500.000		105.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	109.500.000	1	109.500.000	1	105.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		35.000.000		32.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.500.000		22.500.000		20.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.500.000	1	22.500.000	1	20.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	491.265.000	100	491.265.000	100	454.297.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.300.000		25.300.000		25.491.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	25.300.000	100	25.300.000	100	25.491.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		1.500.000		5.970.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	5.970.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		17.063.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.063.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.800.000		3.800.000		2.458.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.800.000	12	3.800.000	12	2.458.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.960.000		432.960.000		396.631.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	432.960.000	12	432.960.000	12	396.631.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.210.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.210.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		41.995.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	41.995.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				391.460.000		391.460.000		353.426.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	391.460.000	12	391.460.000	12	353.426.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.005.000		33.005.000		32.175.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	33.005.000	1	33.005.000	1	32.175.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.875.000		12.875.000		12.045.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	12.875.000	1	12.875.000	1	12.045.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.130.000		5.130.000		5.130.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.130.000	1	5.130.000	1	5.130.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	507.428.000	100	507.428.000	100	452.176.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.252.000		36.252.000		35.232.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	36.252.000	100	36.252.000	100	35.232.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.896.000		6.896.000		6.042.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.896.000	1	6.896.000	1	6.042.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.356.000		27.356.000		27.356.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.356.000	1	27.356.000	1	27.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		2.000.000		1.834.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	1.834.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.876.000		410.876.000		386.810.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.876.000	12	410.876.000	12	386.810.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.051.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.051.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.346.000		121.346.000		121.346.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	121.346.000	12	121.346.000	12	121.346.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				288.330.000		288.330.000		264.413.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.330.000	12	288.330.000	12	264.413.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.300.000		60.300.000		30.134.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	60.300.000	1	60.300.000	1	30.134.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.100.000		21.100.000		21.100.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.100.000	1	21.100.000	1	21.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		5.700.000		5.534.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.534.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.500.000		33.500.000		3.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.500.000	1	33.500.000	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	756.170.000	100	756.170.000	100	707.799.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.300.000		41.300.000		33.346.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.300.000	100	41.300.000	100	33.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.000		800.000		800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	800.000	1	800.000	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		32.046.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	32.046.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					529.370.000		529.370.000		481.695.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	529.370.000	12	529.370.000	12	481.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				37.350.000		37.350.000		33.020.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.350.000	12	37.350.000	12	33.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				491.520.000		491.520.000		448.175.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	491.520.000	12	491.520.000	12	448.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.500.000		185.500.000		192.758.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	185.500.000	1	185.500.000	1	192.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		8.000.000		15.258.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	15.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.000.000		174.000.000		174.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	174.000.000	1	174.000.000	1	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	442.160.000	100	442.160.000	100	411.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.160.000		18.160.000		16.760.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.160.000	100	18.160.000	100	16.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.250.000		3.250.000		2.750.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.250.000	1	3.250.000	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.150.000		9.150.000		9.150.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.150.000	1	9.150.000	1	9.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.760.000		5.760.000		4.860.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.760.000	1	5.760.000	1	4.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.060.000		371.060.000		344.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	371.060.000	12	371.060.000	12	344.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.280.000		2.280.000		1.402.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.280.000	12	2.280.000	12	1.402.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				327.980.000		327.980.000		302.678.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	327.980.000	12	327.980.000	12	302.678.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.940.000		52.940.000		49.840.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.940.000	1	52.940.000	1	49.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.190.000		27.190.000		24.190.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.190.000	1	27.190.000	1	24.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.750.000		2.750.000		2.650.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.000.000		23.000.000		23.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	667.879.000	100	667.879.000	100	644.842.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.988.000		60.988.000		57.146.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.988.000	100	60.988.000	100	57.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.898.000		5.898.000		5.166.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.898.000	1	5.898.000	1	5.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.800.000		36.800.000		36.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.800.000	1	36.800.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.290.000		18.290.000		15.980.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.290.000	12	18.290.000	12	15.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.051.000		537.051.000		497.756.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.051.000	12	537.051.000	12	497.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		1.400.000		1.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	12	1.400.000	12	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		64.800.000		64.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				470.851.000		470.851.000		431.556.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470.851.000	12	470.851.000	12	431.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.840.000		69.840.000		89.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	69.840.000	1	69.840.000	1	89.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.140.000		32.140.000		32.140.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	32.140.000	1	32.140.000	1	32.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.700.000	1	7.700.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		50.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	381.904.000	100	381.904.000	100	362.314.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.400.000		44.400.000		40.705.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	44.400.000	100	44.400.000	100	40.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.400.000		19.400.000		16.705.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.400.000	12	19.400.000	12	16.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.154.000		287.654.000		251.201.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	275.154.000	12	287.654.000	12	251.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		3.200.000		3.192.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		36.000.000		24.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	12	36.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.954.000		248.454.000		224.009.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231.954.000	12	248.454.000	12	224.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.350.000		49.850.000		70.408.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	62.350.000	1	49.850.000	1	70.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.350.000		24.350.000		50.550.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.350.000	1	24.350.000	1	50.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		13.000.000		11.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	13.000.000	1	13.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		12.500.000		8.858.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	12.500.000	1	8.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	457.676.000	100	464.676.000	100	435.115.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		28.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	28.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		7.000.000		5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.176.000		382.176.000		359.615.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	375.176.000	12	382.176.000	12	359.615.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.880.000		44.880.000		44.880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.880.000	12	44.880.000	12	44.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				324.296.000		331.296.000		310.735.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	324.296.000	12	331.296.000	12	310.735.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.500.000		52.500.000		47.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.500.000	1	52.500.000	1	47.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		20.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	463.378.000	100	463.378.000	100	353.143.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.830.000		18.830.000		18.830.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.830.000	100	18.830.000	100	18.830.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		1.850.000		1.850.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.980.000		1.980.000		1.980.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.980.000	12	1.980.000	12	1.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.048.000		387.048.000		282.413.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	387.048.000	12	387.048.000	12	282.413.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				356.048.000		356.048.000		251.533.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	356.048.000	12	356.048.000	12	251.533.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.500.000		57.500.000		51.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	57.500.000	21	57.500.000	21	51.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.500.000		25.500.000		21.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	25.500.000	5	25.500.000	5	21.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10.000.000	15	10.000.000	15	8.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								**453.691.000**		**453.691.000**		**445.705.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3.13	453.691.000	3.13	453.691.000	3.13	445.705.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						453.691.000		453.691.000		445.705.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	453.691.000	100	453.691.000	100	445.705.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.691.000		453.691.000		445.705.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	453.691.000	100	453.691.000	100	445.705.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				208.000.000		208.000.000		160.050.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	208.000.000	5	208.000.000	5	160.050.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				195.691.000		195.691.000		272.155.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	195.691.000	1	195.691.000	1	272.155.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		9.750.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	180	25.000.000	180	25.000.000	180	9.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		3.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	3.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)									**616.533.000**		**616.533.000**		**581.756.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	66.88		66.88		66.88		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi								**616.533.000**		**616.533.000**		**581.756.000**		
						Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	%	0.84	616.533.000	0.84	616.533.000	0.84	581.756.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						616.533.000		616.533.000		581.756.000		
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0.07	200.732.000	0.07	200.732.000	0.07	188.747.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					200.732.000		200.732.000		188.747.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	2	200.732.000	2	200.732.000	2	188.747.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				48.898.000		48.898.000		37.180.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	4253.36	48.898.000	4253.6	48.898.000	4253.6	37.180.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				151.834.000		151.834.000		151.567.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	151.834.000	2.42	151.834.000	2.42	151.567.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0.16	184.824.000	0.16	184.824.000	0.16	178.963.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					184.824.000		184.824.000		178.963.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	1	184.824.000	1	184.824.000	1	178.963.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				10.506.000		10.506.000		7.208.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	288.98	10.506.000	288.98	10.506.000	288.98	7.208.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				174.318.000		174.318.000		171.755.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	174.318.000	2.42	174.318.000	2.42	171.755.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0.19	230.977.000	0.19	230.977.000	0.19	214.046.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					230.977.000		230.977.000		214.046.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	3	230.977.000	3	230.977.000	3	214.046.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				87.930.000		87.930.000		81.445.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	772.78	87.930.000	772.78	87.930.000	772.78	81.445.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				143.047.000		143.047.000		132.601.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	143.047.000	2.42	143.047.000	2.42	132.601.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)									**25.289.303.000**		**25.842.303.000**		**21.471.689.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	%	2		2		2		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan								**25.289.303.000**		**25.842.303.000**		**21.471.689.000**		
						Produksi Garam	Ton	541775.75	491.310.000	541775.75	491.310.000	541775.75	479.272.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						491.310.000		491.310.000		479.272.000		
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50.17	491.310.000	50.17	491.310.000	50.17	479.272.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					491.310.000		491.310.000		479.272.000		
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	10	70.245.000	10	70.245.000	10	60.213.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				70.245.000		70.245.000		60.213.000		
						Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	120	70.245.000	120	70.245.000	120	60.213.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Kelompok	10	421.065.000	10	421.065.000	10	419.059.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0005			Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman				421.065.000		421.065.000		419.059.000		
						Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	10	421.065.000	10	421.065.000	10	419.059.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	954029	24.797.993.000	954029	25.350.993.000	954029	20.992.417.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						274.068.000		274.068.000		254.834.000		
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	274.068.000	25	274.068.000	25	254.834.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					274.068.000		274.068.000		254.834.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	200.000.000	1	200.000.000	1	191.842.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				200.000.000		200.000.000		191.842.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	2245.99	200.000.000	750.3	200.000.000	750.3	191.842.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Lokasi	5	74.068.000	5	74.068.000	5	62.992.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0006			Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir				74.068.000		74.068.000		62.992.000		
						Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	4	74.068.000	4	74.068.000	4	62.992.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						9.248.576.000		9.771.576.000		7.214.874.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	1.381.613.000	100	1.381.613.000	100	1.344.453.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.381.613.000		1.381.613.000		1.344.453.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	72.051.000	6600	72.051.000	6600	68.294.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				72.051.000		72.051.000		68.294.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	72.051.000	15	72.051.000	15	68.294.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.309.562.000	1	1.309.562.000	1	1.276.159.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.309.562.000		1.309.562.000		1.276.159.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	29	1.309.562.000	29	1.309.562.000	29	1.276.159.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	230.988.000	100	230.988.000	100	202.369.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					230.988.000		230.988.000		202.369.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	74.710.000	6600	74.710.000	6600	59.510.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.710.000		74.710.000		59.510.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	74.710.000	15	74.710.000	15	59.510.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Unit	1	156.278.000	1	156.278.000	1	142.859.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				156.278.000		156.278.000		142.859.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	12	156.278.000	12	156.278.000	12	142.859.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	633.497.000	100	633.497.000	100	596.995.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					633.497.000		633.497.000		596.995.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	9725	192.182.000	9725	192.182.000	9725	168.077.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				192.182.000		192.182.000		168.077.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	18	192.182.000	18	192.182.000	18	168.077.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	441.315.000	1	441.315.000	1	428.918.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				441.315.000		441.315.000		428.918.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	26	441.315.000	26	441.315.000	26	428.918.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	92.096.000	100	92.096.000	100	83.405.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					92.096.000		92.096.000		83.405.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	950	40.226.000	950	40.226.000	950	37.540.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.226.000		40.226.000		37.540.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	10	40.226.000	10	40.226.000	10	37.540.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.870.000	1	51.870.000	1	45.865.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.870.000		51.870.000		45.865.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	22	51.870.000	22	51.870.000	22	45.865.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	204.283.000	100	204.283.000	100	200.402.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					204.283.000		204.283.000		200.402.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	800	117.158.000	800	117.158.000	800	116.119.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				117.158.000		117.158.000		116.119.000		

						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	117.158.000	15	117.158.000	15	116.119.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	2	87.125.000	2	87.125.000	2	84.283.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				87.125.000		87.125.000		84.283.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	23	87.125.000	23	87.125.000	23	84.283.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	91.400.000	100	91.400.000	100	84.472.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					91.400.000		91.400.000		84.472.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4050	67.400.000	4050	67.400.000	4050	64.781.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				67.400.000		67.400.000		64.781.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	11	67.400.000	11	67.400.000	11	64.781.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	1	19.691.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.000.000		24.000.000		19.691.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	24.000.000	19	24.000.000	19	19.691.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	88.778.000	100	88.778.000	100	75.332.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					88.778.000		88.778.000		75.332.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	150	36.967.000	150	36.967.000	150	32.217.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.967.000		36.967.000		32.217.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	14	36.967.000	14	36.967.000	14	32.217.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.811.000	1	51.811.000	1	43.115.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.811.000		51.811.000		43.115.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	14	51.811.000	14	51.811.000	14	43.115.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	119.301.000	100	119.301.000	100	79.759.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					119.301.000		119.301.000		79.759.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	52	11.933.000	52	11.933.000	52	11.235.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				11.933.000		11.933.000		11.235.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	16	11.933.000	16	11.933.000	16	11.235.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	107.368.000	1	107.368.000	1	68.524.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				107.368.000		107.368.000		68.524.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	25	107.368.000	25	107.368.000	25	68.524.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; KEBUMEN --> AYAH --> DESA AYAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	1.116.347.000	91	1.116.347.000	91	1.089.427.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.116.347.000		1.116.347.000		1.089.427.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4500	61.090.000	4500	61.090.000	4500	37.132.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				61.090.000		61.090.000		37.132.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	61.090.000	12	61.090.000	12	37.132.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.055.257.000	1	1.055.257.000	1	1.052.295.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.055.257.000		1.055.257.000		1.052.295.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	1.055.257.000	19	1.055.257.000	19	1.052.295.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	577.223.000	100	570.223.000	100	387.405.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					577.223.000		570.223.000		387.405.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	50	285.420.000	50	285.420.000	50	283.756.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				285.420.000		285.420.000		283.756.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	17	285.420.000	17	285.420.000	17	283.756.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	kg/kapita/tahun	1	291.803.000	1	284.803.000	1	103.649.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				291.803.000		284.803.000		103.649.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	17	291.803.000	17	284.803.000	17	103.649.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	127.772.000	100	127.772.000	100	117.143.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					127.772.000		127.772.000		117.143.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	1200	126.252.000	1200	126.252.000	1200	115.623.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				126.252.000		126.252.000		115.623.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	126.252.000	12	126.252.000	12	115.623.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	1.520.000	1	1.520.000	1	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.520.000		1.520.000		1.520.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	24	1.520.000	24	1.520.000	24	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	4.585.278.000	354029	5.115.278.000	354029	2.953.712.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					4.147.175.000		4.677.175.000		2.563.617.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Data	30	44.100.000	30	44.100.000	30	41.438.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				44.100.000		44.100.000		41.438.000		
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	44.100.000	1	44.100.000	1	41.438.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
						Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Orang	30	817.850.000	30	1.347.850.000	30	1.131.575.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0010			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				817.850.000		1.347.850.000		1.131.575.000		
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	30	817.850.000	30	1.347.850.000	30	1.131.575.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Orang	10000	3.285.225.000	10000	3.285.225.000	10000	1.390.604.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				3.285.225.000		3.285.225.000		1.390.604.000		
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	3.285.225.000	1	3.285.225.000	1	1.390.604.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					260.035.000		260.035.000		223.300.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	1000	260.035.000	1000	260.035.000	1000	223.300.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.03.0004			Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				260.035.000		260.035.000		223.300.000		
						Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	%	100	260.035.000	100	260.035.000	100	223.300.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					178.068.000		178.068.000		166.795.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	178.068.000	1	178.068.000	1	166.795.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.06.0001			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				178.068.000		178.068.000		166.795.000		
						Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	11	178.068.000	11	178.068.000	11	166.795.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						12.612.050.000		13.272.050.000		11.658.718.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	268.890.000	100	268.890.000	100	325.519.000	Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					268.890.000		268.890.000		325.519.000		
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	450	220.325.000	450	220.325.000	450	282.618.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		3.25.04.1.05.0011			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				220.325.000		220.325.000		282.618.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	3	220.325.000	3	220.325.000	3	282.618.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Unit	40	48.565.000	40	48.565.000	40	42.901.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	
		3.25.04.1.05.0013			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				48.565.000		48.565.000		42.901.000		
						Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35	48.565.000	35	48.565.000	35	42.901.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	6.530.616.000	5	9.230.616.000	5	9.181.621.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					476.560.000		476.560.000		470.274.000		
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	476.560.000	1	476.560.000	1	470.274.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				105.200.000		105.200.000		104.831.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	105.200.000	1	105.200.000	1	104.831.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				371.360.000		371.360.000		365.443.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	371.360.000	3	371.360.000	3	365.443.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					6.054.056.000		8.754.056.000		8.711.347.000		
						Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Jenis	1	1.948.168.000	1	4.648.168.000	1	4.605.564.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.948.168.000		4.648.168.000		4.605.564.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	27	1.948.168.000	27	4.648.168.000	27	4.605.564.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Lokasi	9	4.105.888.000	9	4.105.888.000	9	4.105.783.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0004			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.105.888.000		4.105.888.000		4.105.783.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	4.105.888.000	4	4.105.888.000	4	4.105.783.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	5.812.544.000	600000	3.772.544.000	600000	2.151.578.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					912.548.000		112.548.000		103.363.000		
						Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Jenis	3	43.358.000	3	43.358.000	3	38.162.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				43.358.000		43.358.000		38.162.000		
						Jumlah Pembudidaya	Orang	30	43.358.000	30	43.358.000	30	38.162.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Orang	10	869.190.000	10	69.190.000	10	65.201.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0001			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				46.050.000		46.050.000		42.061.000		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	46.050.000	1	46.050.000	1	42.061.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				823.140.000		23.140.000		23.140.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	823.140.000	1	23.140.000	1	23.140.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					4.899.996.000		3.659.996.000		2.048.215.000		
						Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	4.899.996.000	3	3.659.996.000	3	2.048.215.000		
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.899.996.000		3.659.996.000		2.048.215.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	4.899.996.000	10	3.659.996.000	10	2.048.215.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.663.227.000		983.227.000		974.012.000		
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	182.011.000	72	182.011.000	72	175.400.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					182.011.000		182.011.000		175.400.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	75	182.011.000	75	182.011.000	75	175.400.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				182.011.000		182.011.000		175.400.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	12	182.011.000	12	182.011.000	12	175.400.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	103.390.000	50	103.390.000	50	110.102.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					103.390.000		103.390.000		110.102.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	103.390.000	50	103.390.000	50	110.102.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				103.390.000		103.390.000		110.102.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	8	103.390.000	8	103.390.000	8	110.102.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	244.953.000	61	244.953.000	61	236.212.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					244.953.000		244.953.000		236.212.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	244.953.000	50	244.953.000	50	236.212.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				244.953.000		244.953.000		236.212.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	10	244.953.000	10	244.953.000	10	236.212.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	58.212.000	17	58.212.000	17	52.317.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					58.212.000		58.212.000		52.317.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	10.061.000	10	10.061.000	10	8.836.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai				10.061.000		10.061.000		8.836.000		

					kewenangan provinsi									
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	10.061.000	20	10.061.000	20	8.836.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	48.151.000	100	48.151.000	100	43.481.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.416.000		4.416.000		3.660.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.416.000	5	4.416.000	5	3.660.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.500.000		2.500.000		2.301.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.301.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				3.570.000		3.570.000		2.726.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	3.570.000	5	3.570.000	5	2.726.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				37.665.000		37.665.000		34.794.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	37.665.000	3	37.665.000	3	34.794.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	56.960.000	50	56.960.000	50	52.107.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					56.960.000		56.960.000		52.107.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	3.870.000	10	3.870.000	10	3.545.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				3.870.000		3.870.000		3.545.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	3.870.000	15	3.870.000	15	3.545.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	%	80	53.090.000	80	53.090.000	80	48.562.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				2.610.000		2.610.000		1.173.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	1	2.610.000	1	2.610.000	1	1.173.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.610.000		2.610.000		2.389.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.610.000	3	2.610.000	3	2.389.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				47.870.000		47.870.000		45.000.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	47.870.000	3	47.870.000	3	45.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	64.710.000	17	64.710.000	17	62.760.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					64.710.000		64.710.000		62.760.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	3	4.410.000	3	4.410.000	3	3.950.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				4.410.000		4.410.000		3.950.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	4.410.000	10	4.410.000	10	3.950.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	60.300.000	100	60.300.000	100	58.810.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.700.000		4.700.000		4.160.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.700.000	5	4.700.000	5	4.160.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.105.000		2.105.000		1.880.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	10	2.105.000	10	1.880.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.105.000		2.105.000		1.880.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	10	2.105.000	10	1.880.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				51.390.000		51.390.000		50.890.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	2	51.390.000	2	51.390.000	2	50.890.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	952.991.000	70	272.991.000	70	285.114.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					899.261.000		219.261.000		237.767.000		
						Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Orang	50	42.020.000	50	42.020.000	50	32.331.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				42.020.000		42.020.000		32.331.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	42.020.000	5	42.020.000	5	32.331.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	%	90	857.241.000	90	177.241.000	90	205.436.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				56.784.000		56.784.000		47.411.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	3	56.784.000	3	56.784.000	3	47.411.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				781.310.000		101.310.000		142.223.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	781.310.000	5	101.310.000	5	142.223.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0018			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah				19.147.000		19.147.000		15.802.000		
						Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	19.147.000	1	19.147.000	1	15.802.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					53.730.000		53.730.000		47.347.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	90	35.820.000	90	35.820.000	90	30.537.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		17.910.000		15.752.000		
						Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	5	17.910.000	5	15.752.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		17.910.000		14.785.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	5	17.910.000	5	14.785.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	%	90	17.910.000	90	17.910.000	90	16.810.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0004			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		17.910.000		16.810.000		
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	5	17.910.000	5	16.810.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.000.072.000		1.050.072.000		889.979.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	17.71	637.000.000	17.71	687.000.000	17.71	541.079.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		40.820.000		
						Jumlah Produk Olahan Ikan	Ton	161604	50.000.000	161604	50.000.000	161604	40.820.000		
		3.25.06.1.01.0004			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		40.820.000		

						Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	40.820.000		
		3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					585.000.000		635.000.000		498.259.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Orang	2000	585.000.000	2000	635.000.000	2000	498.259.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			585.000.000		635.000.000		498.259.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	10	585.000.000	10	635.000.000	10	498.259.000		
		3.25.06.1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Kegiatan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
		3.25.06.1.03.0004			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	981000	2.000.000	981000	2.000.000	981000	2.000.000		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	363.072.000	4	363.072.000	4	348.900.000	Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					82.037.000		82.037.000		70.172.000		
						Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Unit	85	82.037.000	85	82.037.000	85	70.172.000		
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				82.037.000		82.037.000		70.172.000		
						Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	90	82.037.000	105	82.037.000	105	70.172.000		OPD Provinsi
		3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					281.035.000		281.035.000		278.728.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Dokumen	550	281.035.000	550	281.035.000	550	278.728.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			281.035.000		281.035.000		278.728.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	575	281.035.000	575	281.035.000	575	278.728.000		OPD Provinsi
JUMLAH									**89.763.598.000**		**90.323.598.000**		**85.044.383.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									**43.262.477.000**		**43.262.477.000**		**40.610.775.000**	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	81.55		81.55		81.55		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								**42.712.477.000**		**42.712.477.000**		**40.070.138.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	77	42.712.477.000	77	42.712.477.000	77	40.070.138.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						42.712.477.000		42.712.477.000		40.070.138.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	34.469.477.000	86	34.469.477.000	86	32.485.845.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.133.641.000		23.133.641.000		22.154.596.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	23.133.641.000	12	23.133.641.000	12	22.154.596.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.533.641.000		22.533.641.000		21.555.310.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	170	22.533.641.000	170	22.533.641.000	170	21.555.310.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				600.000.000		600.000.000		599.286.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	600.000.000	12	600.000.000	12	599.286.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		110.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	110.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		110.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		149.833.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	149.833.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		50.000.000		54.247.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	54.247.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		45.743.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50.000.000	50	50.000.000	50	45.743.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		49.843.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	50.000.000	100	50.000.000	100	49.843.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.305.000.000		1.305.000.000		1.208.634.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.305.000.000	100	1.305.000.000	100	1.208.634.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		43.809.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	43.809.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		41.745.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	41.745.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		55.100.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				240.000.000		240.000.000		183.361.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	183.361.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		700.000.000		706.219.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	706.219.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000		12.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	30.000.000	12	30.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		75.000.000		56.400.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	56.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		540.996.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	540.996.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		540.996.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	540.996.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.955.836.000		7.955.836.000		6.656.196.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.955.836.000	12	7.955.836.000	12	6.656.196.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.226.000		9.226.000		8.083.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	9.226.000	1	9.226.000	1	8.083.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.180.000.000		1.180.000.000		730.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.180.000.000	12	1.180.000.000	12	730.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.716.610.000		6.716.610.000		5.868.113.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.716.610.000	12	6.716.610.000	12	5.868.113.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					825.000.000		825.000.000		1.665.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	26	825.000.000	26	825.000.000	26	1.665.090.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		126.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	315	100.000.000	315	100.000.000	315	126.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		1.113.690.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.113.690.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	3.468.000.000	100	3.468.000.000	100	3.386.412.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					316.677.000		316.677.000		288.190.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	316.677.000	100	316.677.000	100	288.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.192.000		32.192.000		28.206.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	32.192.000	2	32.192.000	2	28.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.568.000		65.568.000		61.519.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	65.568.000	2	65.568.000	2	61.519.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.053.000		26.053.000		21.751.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	26.053.000	1	26.053.000	1	21.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.400.000		27.400.000		22.876.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	27.400.000	2	27.400.000	2	22.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.888.000		2.888.000		2.442.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.888.000	2	2.888.000	2	2.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.080.000		10.080.000		9.240.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.080.000	1	10.080.000	1	9.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.496.000		117.496.000		107.156.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	117.496.000	1	117.496.000	1	107.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					239.415.000		239.415.000		222.879.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	239.415.000	10	239.415.000	10	222.879.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				176.915.000		176.915.000		160.379.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	176.915.000	5	176.915.000	5	160.379.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.500.000		57.500.000		57.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.123.850.000		2.123.850.000		2.081.172.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.123.850.000	4	2.123.850.000	4	2.081.172.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.050.000		2.050.000		2.050.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.050.000	4	2.050.000	4	2.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				654.600.000		654.600.000		596.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	654.600.000	4	654.600.000	4	596.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.900.000		32.900.000		53.222.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.900.000	4	32.900.000	4	53.222.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.434.300.000		1.434.300.000		1.429.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.434.300.000	4	1.434.300.000	4	1.429.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					748.058.000		748.058.000		754.171.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	748.058.000	27	748.058.000	27	754.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.000.000		19.000.000		19.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				81.900.000		81.900.000		78.763.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	81.900.000	8	81.900.000	8	78.763.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				32.000.000		32.000.000		32.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	32.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				362.753.000		362.753.000		373.153.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	362.753.000	5	362.753.000	5	373.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				163.605.000		163.605.000		162.455.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	163.605.000	2	163.605.000	2	162.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				83.800.000		83.800.000		83.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	83.800.000	2	83.800.000	2	83.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	4.775.000.000	100	4.775.000.000	100	4.197.881.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					558.996.000		558.996.000		428.552.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	558.996.000	100	558.996.000	100	428.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.000.000		80.000.000		70.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		70.005.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	70.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		85.000.000		71.077.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	85.000.000	2	85.000.000	2	71.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		75.000.000		72.900.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	2	75.000.000	2	72.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		14.732.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.500.000		49.500.000		18.450.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	49.500.000	12	49.500.000	12	18.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174.496.000		174.496.000		111.388.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	174.496.000	12	174.496.000	12	111.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	31	0	31	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.815.996.000		1.815.996.000		1.797.196.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.815.996.000	12	1.815.996.000	12	1.797.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		17.520.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	17.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				630.000.000		630.000.000		630.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	630.000.000	4	630.000.000	4	630.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.165.996.000		1.165.996.000		1.149.676.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	1.165.996.000	7	1.165.996.000	7	1.149.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.350.008.000		2.350.008.000		1.922.133.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	117	2.350.008.000	117	2.350.008.000	117	1.922.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		140.000.000		55.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	140.000.000	7	140.000.000	7	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.060.008.000		2.060.008.000		1.744.308.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.060.008.000	5	2.060.008.000	5	1.744.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		122.825.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105	150.000.000	105	150.000.000	105	122.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								**550.000.000**		**550.000.000**		**540.637.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	3.03	550.000.000	3.03	550.000.000	3.03	540.637.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						550.000.000		550.000.000		540.637.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	550.000.000	100	550.000.000	100	540.637.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					550.000.000		550.000.000		540.637.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	550.000.000	100	550.000.000	100	540.637.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		348.843.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	300.000.000	5	300.000.000	5	348.843.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		170.600.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	200.000.000	3	200.000.000	3	170.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		10.597.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	1	25.000.000	1	10.597.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		10.597.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	10.597.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan									**27.680.000.000**		**30.095.000.000**		**30.462.233.000**	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
						Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	62.86		62.86		62.86		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Partisipasi Budaya								**27.680.000.000**		**30.095.000.000**		**30.462.233.000**		
						Angka Melek Budaya	%	55.32	27.680.000.000	55.32	30.095.000.000	55.32	30.462.233.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						22.675.000.000		25.090.000.000		25.698.202.000		
						Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	1.150.000.000	72	1.150.000.000	72	1.085.165.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.150.000.000		1.150.000.000		1.085.165.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase kesenian yang direvitalisasi dan dikembangkan	%	1.21	1.150.000.000	1.21	1.150.000.000	1.21	1.085.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.150.000.000		1.150.000.000		1.085.165.000		
						Jumlah kesenian & tradisi budaya yang menjadi karya baru	Objek	1	51.795.000	1	51.795.000	1	51.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah kesenian yang di revitalisasi	Objek	1	98.205.000	1	98.205.000	1	98.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	200	935.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27.11	17.300.000.000	27.11	19.715.000.000	27.11	21.061.375.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.300.000.000		19.715.000.000		21.061.375.000		
						Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan	Orang	14	480.000.000	14	480.000.000	14	392.170.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				480.000.000		480.000.000		392.170.000		
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	14	480.000.000	14	480.000.000	14	392.170.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	12.12	3.300.000.000	12.12	3.300.000.000	12.12	3.041.958.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	
		2.22.02.1.01.0013			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				3.300.000.000		3.300.000.000		3.041.958.000		
						Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	20	1.300.000.000	20	1.300.000.000	20	1.150.885.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah OPK yang dikembangkan	Angka	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	1.891.073.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian	%	16.66	13.520.000.000	16.66	15.935.000.000	16.66	17.627.247.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				13.520.000.000		15.935.000.000		17.627.247.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1221	13.520.000.000	1221	15.935.000.000	1221	17.627.247.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						jumlah satpendik (SMA/SMK/SLB) yang mengarusutamakan kebudayaan dan kearifan lokal	Unit	3	0	3	0	3	0	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26.1	4.225.000.000	26.1	4.225.000.000	26.1	3.551.662.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					4.225.000.000		4.225.000.000		3.551.662.000		
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	10.3	4.225.000.000	10.3	4.225.000.000	10.3	3.551.662.000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0010			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan				4.225.000.000		4.225.000.000		3.551.662.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek	17	4.225.000.000	17	4.225.000.000	17	3.551.662.000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1.12	1.750.000.000	1.12	1.750.000.000	1.12	1.750.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
						Persentase SDM & lembaga kesenian yang dilakukan pembinaan	%	0.14	1.750.000.000	0.14	1.750.000.000	0.14	1.750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.03.1.01.0001			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	50	1.750.000.000	50	1.750.000.000	50	1.750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						150.000.000		150.000.000		127.895.000		
						Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53.55	150.000.000	53.55	150.000.000	53.55	127.895.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					150.000.000		150.000.000		127.895.000		
						Jumlah literasi tradisi	Angka	317	150.000.000	317	150.000.000	317	127.895.000		
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				150.000.000		150.000.000		127.895.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	7	150.000.000	7	150.000.000	7	127.895.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.205.000.000		1.205.000.000		1.082.312.000		
						Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16.12	580.000.000	16.12	580.000.000	16.12	507.174.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					580.000.000		580.000.000		507.174.000		
						Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan	Angka	13	300.000.000	13	300.000.000	13	278.719.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				100.000.000		100.000.000		98.793.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	14	100.000.000	14	100.000.000	14	98.793.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.05.1.02.0003			Pemanfaatan Cagar Budaya				200.000.000		200.000.000		179.926.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	29	200.000.000	29	200.000.000	29	179.926.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan	Orang	224	280.000.000	224	280.000.000	224	228.455.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.05.1.02.0004			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				280.000.000		280.000.000		228.455.000		
						Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	44	280.000.000	44	280.000.000	44	228.455.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13.6	625.000.000	13.6	625.000.000	13.6	575.138.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.05.1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					475.000.000		475.000.000		436.148.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi	%	9.65	475.000.000	9.65	475.000.000	9.65	436.148.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	
		2.22.05.1.01.0002			Penetapan Cagar Budaya				475.000.000		475.000.000		436.148.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	262	475.000.000	262	475.000.000	262	436.148.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					150.000.000		150.000.000		138.990.000		
						Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi yang dilindungi	%	43.75	150.000.000	43.75	150.000.000	43.75	138.990.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	
		2.22.05.1.02.0001			Pelindungan Cagar Budaya				150.000.000		150.000.000		138.990.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	285	150.000.000	285	150.000.000	285	138.990.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1.900.000.000		1.900.000.000		1.803.824.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90.1	1.900.000.000	90.1	1.900.000.000	90.1	1.803.824.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
		2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi					1.900.000.000		1.900.000.000		1.803.824.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	60000	1.900.000.000	60000	1.900.000.000	60000	1.803.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				675.000.000		675.000.000		668.807.000		
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	2020	675.000.000	2020	675.000.000	2020	668.807.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				975.000.000		975.000.000		885.547.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	7	975.000.000	7	975.000.000	7	885.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				250.000.000		250.000.000		249.470.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	250.000.000	4	250.000.000	4	249.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
Meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									**17.077.675.000**		**16.902.675.000**		**13.289.360.000**	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
						Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	13.08		13.08		13.08		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3.6		3.6		3.6		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya pengeluaran wisatawan								**15.777.675.000**		**15.752.675.000**		**12.190.459.000**		
						Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	8243954	15.777.675.000	8243954	15.752.675.000	8243954	12.190.459.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6.525.625.000		6.525.625.000		4.621.371.000		
						Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	6.525.625.000	10	6.525.625.000	20	4.621.371.000	Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					6.000.625.000		6.000.625.000		4.171.544.000		
						Daya Tarik Wisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	2	6.000.625.000	2	6.000.625.000	2	4.171.544.000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.01.0001			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0005			Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0006			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0007			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				6.000.625.000		6.000.625.000		4.171.544.000		
						Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	6.000.625.000	200	6.000.625.000	200	4.171.544.000	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					175.000.000		175.000.000		134.650.000		
						Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	1	175.000.000	1	175.000.000	1	134.650.000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.03.0001			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0002			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.03.0009			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				175.000.000		175.000.000		134.650.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen	1	175.000.000	1	175.000.000	1	134.650.000	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0011			Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					350.000.000		350.000.000		315.177.000		
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Unit Usaha	0	350.000.000	0	350.000.000	50	315.177.000	Pokja Usaha Pariwisata	
		3.26.02.1.04.0009			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)				150.000.000		150.000.000		140.258.000		
						Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	100	150.000.000	100	150.000.000	100	140.258.000	Pokja Usaha Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Usaha Pariwisata	
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				200.000.000		200.000.000		174.919.000		
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	100	200.000.000	100	200.000.000	100	174.919.000	Pokja Usaha Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						8.652.050.000		8.652.050.000		6.640.702.000		
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75348282	8.652.050.000	75348282	8.652.050.000	75348282	6.640.702.000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					8.652.050.000		8.652.050.000		6.640.702.000		
						Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu Orang	70.79	8.652.050.000	70.79	8.652.050.000	70.79	6.640.702.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				165.000.000		165.000.000		386.618.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	165.000.000	3	165.000.000	3	386.618.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				590.000.000		590.000.000		508.410.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	2	590.000.000	2	590.000.000	2	508.410.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7.897.050.000		7.897.050.000		5.745.674.000		
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	7.897.050.000	30	7.897.050.000	30	5.745.674.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						600.000.000		575.000.000		928.386.000		
						Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3.3	600.000.000	3.3	575.000.000	20	928.386.000	Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					600.000.000		575.000.000		928.386.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	25	600.000.000	25	575.000.000	25	928.386.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	
		3.26.05.1.01.0004			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				150.000.000		150.000.000		140.242.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	25	150.000.000	25	150.000.000	25	140.242.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi
		3.26.05.1.01.0012			Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				300.000.000		275.000.000		677.652.000		
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	150	300.000.000	150	275.000.000	150	677.652.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				150.000.000		150.000.000		110.492.000		
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	100	150.000.000	100	150.000.000	100	110.492.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.26.05.1.01.0018			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0		0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif								**1.300.000.000**		**1.150.000.000**		**1.098.901.000**		
						Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Juta Rupiah	102344465	1.300.000.000	102344465	1.150.000.000	102344465	1.098.901.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						850.000.000		700.000.000		618.389.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/ Kota	1	850.000.000	1	700.000.000	1	618.389.000	Bidang Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					250.000.000		250.000.000		227.725.000		
						Uji Petik PMK3I Kab/Kota	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	1	227.725.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				50.000.000		50.000.000		47.070.000		

						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	47.070.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.01.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				50.000.000		50.000.000		48.196.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	48.196.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				0		0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.01.0006			Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				150.000.000		150.000.000		132.459.000		
						Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	132.459.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					600.000.000		450.000.000		390.664.000		
						Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya	Dokumen	1	600.000.000	1	450.000.000	1	390.664.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0010			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0012			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0013			Fasilitasi Kekayaan Intelektual				200.000.000		200.000.000		179.218.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	179.218.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0014			Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif				50.000.000		50.000.000		19.886.000		
						Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	2	50.000.000	2	50.000.000	2	19.886.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0015			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				200.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0017			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				50.000.000		50.000.000		41.560.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	41.560.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0019			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif				0		0		0		
						Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						450.000.000		450.000.000		480.512.000		
						Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4.3	450.000.000	4.3	450.000.000	16	480.512.000	Bidang Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					150.000.000		150.000.000		136.255.000		
						Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	100	150.000.000	100	150.000.000	100	136.255.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				150.000.000		150.000.000		136.255.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	136.255.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					300.000.000		300.000.000		344.257.000		
						Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	150	300.000.000	150	300.000.000	150	344.257.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100.000.000		100.000.000		95.595.000		
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	150	100.000.000	150	100.000.000	150	95.595.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.05.1.02.0005			Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.05.1.02.0007			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				200.000.000		200.000.000		248.662.000		
						Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	248.662.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
JUMLAH									**88.020.152.000**		**90.260.152.000**		**84.362.368.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pertanian dan Peternakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pertanian dan Peternakan									**168.558.597.000**		**168.652.097.000**		**163.598.861.000**	**Dinas Pertanian dan Peternakan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	74.5		74.5		74.5		Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan								**166.816.686.000**		**166.910.186.000**		**162.275.669.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	81.5	166.816.686.000	81.5	166.910.186.000	81.5	162.275.669.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						166.816.686.000		166.910.186.000		162.275.669.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	863.000.000	100	956.500.000	100	935.195.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	0	100	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					226.000.000		227.500.000		212.717.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	226.000.000	100	227.500.000	100	212.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		120.000.000		116.383.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	120.000.000	1	120.000.000	1	116.383.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		14.380.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	14.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		4.150.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	4.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.000.000		77.500.000		69.250.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	76.000.000	4	77.500.000	4	69.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					233.000.000		247.000.000		215.328.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	233.000.000	12	247.000.000	12	215.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		1.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	1.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.000.000		204.000.000		173.448.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	230.000.000	4	204.000.000	4	173.448.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					404.000.000		482.000.000		507.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	404.000.000	1	482.000.000	1	507.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.000.000		47.000.000		42.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	47.000.000	1	47.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.000.000		46.000.000		46.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	58.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				297.000.000		387.000.000		417.150.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	297.000.000	1	387.000.000	1	417.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	952.000.000	100	952.000.000	100	921.105.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	0	100	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.000.000		155.000.000		129.622.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.000.000	100	155.000.000	100	129.622.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		35.047.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	4	40.000.000	4	35.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.996.000		19.996.000		16.694.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.996.000	1	19.996.000	1	16.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		25.583.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	25.583.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.004.000		40.004.000		38.537.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	40.004.000	4	40.004.000	4	38.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					91.750.000		91.750.000		91.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	91.750.000	1	91.750.000	1	91.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				91.750.000		91.750.000		91.750.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	91.750.000	14	91.750.000	14	91.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.250.000		368.250.000		363.306.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	368.250.000	1	368.250.000	1	363.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		3.250.000		2.847.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.250.000	1	3.250.000	1	2.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		330.000.000		330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	330.000.000	4	330.000.000	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		13.761.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		20.000.000		16.698.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					337.000.000		337.000.000		336.427.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	337.000.000	7	337.000.000	7	336.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		49.587.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	50.000.000	52	50.000.000	52	49.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laimnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				212.000.000		212.000.000		211.840.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	212.000.000	5	212.000.000	5	211.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	4.182.590.000	100	4.182.590.000	100	4.180.327.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.610.000		122.610.000		104.964.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	122.610.000	100	122.610.000	100	104.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.810.000		12.810.000		9.350.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.810.000	1	12.810.000	1	9.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.190.000		16.190.000		14.285.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.190.000	1	16.190.000	1	14.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.783.000		20.783.000		18.938.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.783.000	1	20.783.000	1	18.938.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.008.000		4.008.000		3.346.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.008.000	1	4.008.000	1	3.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.034.000		21.034.000		13.110.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	21.034.000	4	21.034.000	4	13.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.785.000		47.785.000		45.935.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	47.785.000	4	47.785.000	4	45.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.158.849.000		3.158.849.000		3.145.188.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	100	3.158.849.000	100	3.158.849.000	29	3.145.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.900.000		30.900.000		23.248.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	30.900.000	0	30.900.000	2	23.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.052.949.000		3.052.949.000		3.046.940.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	3.052.949.000	28	3.052.949.000	17	3.046.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.619.000		350.619.000		350.489.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	100	350.619.000	100	350.619.000	4	350.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		870.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				349.619.000		349.619.000		349.619.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	349.619.000	4	349.619.000	4	349.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					545.512.000		545.512.000		574.686.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	545.512.000	100	545.512.000	37	574.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		60.000.000		90.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	60.000.000	2	60.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	55.000.000	13	55.000.000	13	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				360.512.000		360.512.000		360.512.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	360.512.000	2	360.512.000	2	360.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		69.174.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	70.000.000	20	70.000.000	20	69.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	1.906.924.000	100	1.906.924.000	100	1.904.865.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.396.000		283.396.000		252.204.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	283.396.000	100	283.396.000	100	252.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.705.000		101.705.000		101.705.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	101.705.000	1	101.705.000	1	101.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.275.000		17.275.000		14.475.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.275.000	1	17.275.000	1	14.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.680.000		31.680.000		29.040.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	31.680.000	1	31.680.000	1	29.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.236.000		87.236.000		61.484.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	87.236.000	12	87.236.000	12	61.484.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					171.013.000		171.013.000		174.160.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	171.013.000	1	171.013.000	1	174.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				16.700.000		16.700.000		16.700.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	16.700.000	1	16.700.000	1	16.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				129.875.000		129.875.000		145.460.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	129.875.000	1	129.875.000	1	145.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.438.000		24.438.000		12.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	24.438.000	1	24.438.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					967.825.000		967.825.000		990.398.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	967.825.000	1	967.825.000	1	990.398.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000		275.000.000		272.363.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	275.000.000	1	275.000.000	1	272.363.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.450.000		15.450.000		15.450.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.450.000	1	15.450.000	1	15.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.375.000		672.375.000		697.585.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	672.375.000	1	672.375.000	1	697.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					484.690.000		484.690.000		488.103.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	484.690.000	1	484.690.000	1	488.103.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.410.000		77.410.000		80.823.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	77.410.000	1	77.410.000	1	80.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.680.000		130.680.000		165.680.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	130.680.000	1	130.680.000	1	165.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				90.000.000		90.000.000		55.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	90.000.000	1	90.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.575.000		136.575.000		136.575.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	136.575.000	1	136.575.000	1	136.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.025.000		50.025.000		50.025.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.025.000	1	50.025.000	1	50.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	12.518.445.000	100	12.518.445.000	100	9.968.900.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		X.XX.01.1.i03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		40.000.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	0	10.000.000	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.000.000		221.000.000		272.644.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	221.000.000	100	221.000.000	100	272.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		13.041.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	13.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		39.598.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	39.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		16.441.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	16.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		11.457.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	2	11.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		752.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.000.000	4	1.000.000	4	752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		16.934.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	16.934.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		75.000.000		174.421.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	174.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.460.000.000		11.460.000.000		9.000.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11.460.000.000	1	11.460.000.000	25	9.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.460.000.000		11.460.000.000		9.000.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	11.460.000.000	34	11.460.000.000	25	9.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.000.000		180.000.000		61.202.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	61.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		3.760.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	3.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.000.000		175.000.000		57.442.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	175.000.000	4	175.000.000	4	57.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					607.445.000		607.445.000		595.054.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	607.445.000	1	607.445.000	107	595.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		137.609.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	105	150.000.000	105	150.000.000	70	137.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				457.445.000		457.445.000		457.445.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	457.445.000	2	457.445.000	2	457.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	1.128.000.000	100	1.128.000.000	100	1.152.347.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.500.000		125.500.000		105.370.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	1	125.500.000	1	125.500.000	1	105.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	4	12.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		71.500.000		57.370.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.500.000	4	71.500.000	4	57.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					186.000.000		186.000.000		186.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	186.000.000	1	186.000.000	1	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.000.000		16.000.000		16.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.500.000		301.500.000		351.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu	Laporan	12	301.500.000	12	301.500.000	12	351.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		350.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					515.000.000		515.000.000		509.477.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	515.000.000	1	515.000.000	1	509.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	125	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		44.477.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	50.000.000	29	50.000.000	29	44.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000		195.000.000		195.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	3.993.060.000	100	3.993.060.000	100	3.819.448.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					519.377.000		519.377.000		503.307.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	519.377.000	100	519.377.000	100	503.307.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.610.000		24.610.000		24.610.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.610.000	1	24.610.000	1	24.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.000.000		96.000.000		95.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	96.000.000	1	96.000.000	1	95.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.105.000		45.105.000		45.105.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.105.000	1	45.105.000	1	45.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				102.432.000		102.432.000		102.432.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	102.432.000	1	102.432.000	1	102.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.500.000		50.500.000		50.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.350.000		55.350.000		39.480.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	55.350.000	1	55.350.000	1	39.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000		135.000.000		135.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.380.000		10.380.000		10.380.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10.380.000	12	10.380.000	12	10.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					469.400.000		469.400.000		390.742.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	469.400.000	1	469.400.000	1	390.742.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				400.000.000		400.000.000		318.900.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	1	400.000.000	1	318.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		52.792.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.400.000		19.400.000		19.050.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	19.400.000	1	19.400.000	1	19.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.054.433.000		2.054.433.000		2.056.149.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.054.433.000	1	2.054.433.000	1	2.056.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.600.000		4.600.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.600.000	12	4.600.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				402.000.000		402.000.000		388.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	402.000.000	12	402.000.000	12	388.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				165.200.000		165.200.000		157.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	165.200.000	1	165.200.000	1	157.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.482.633.000		1.482.633.000		1.510.149.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.482.633.000	1	1.482.633.000	1	1.510.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					949.850.000		949.850.000		869.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	949.850.000	1	949.850.000	1	869.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.350.000		54.350.000		54.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	54.350.000	1	54.350.000	1	54.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000		56.000.000		40.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	56.000.000	1	56.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		10.000.000		19.400.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	19.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				768.000.000		768.000.000		698.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	768.000.000	1	768.000.000	1	698.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				61.500.000		61.500.000		57.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.500.000	1	61.500.000	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	900.000.000	100	900.000.000	100	887.957.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		29.814.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	29.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		29.814.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	29.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		97.156.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	97.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		17.523.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	265	20.000.000	265	20.000.000	265	17.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.349.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		13.761.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	4	13.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		27.523.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	27.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					415.000.000		375.000.000		371.795.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	415.000.000	12	375.000.000	12	371.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		110.000.000		107.415.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	150.000.000	4	110.000.000	4	107.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325.000.000		325.000.000		324.192.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	325.000.000	1	325.000.000	1	324.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.600.000		64.600.000		64.600.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	64.600.000	10	64.600.000	10	64.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.400.000		40.400.000		39.592.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.400.000	1	40.400.000	1	39.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	%	100	5.183.485.000	100	5.183.485.000	100	5.233.343.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					656.919.000		656.919.000		572.334.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	656.919.000	100	656.919.000	100	572.334.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.800.000		45.800.000		45.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.800.000	1	45.800.000	1	45.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				198.769.000		198.769.000		188.694.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	198.769.000	1	198.769.000	1	188.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				59.850.000		59.850.000		42.971.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	59.850.000	1	59.850.000	1	42.971.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		34.083.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	34.083.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		225.000.000		183.286.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	225.000.000	12	225.000.000	12	183.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					578.975.000		578.975.000		650.265.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	578.975.000	1	578.975.000	1	650.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				78.975.000		78.975.000		150.265.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	78.975.000	1	78.975.000	1	150.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.598.491.000		2.598.491.000		2.658.644.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.598.491.000	1	2.598.491.000	1	2.658.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		3.300.000		2.893.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.300.000	12	3.300.000	12	2.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				323.000.000		323.000.000		279.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	323.000.000	12	323.000.000	12	279.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.272.191.000		2.272.191.000		2.376.251.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.272.191.000	1	2.272.191.000	1	2.376.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.349.100.000		1.349.100.000		1.352.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.349.100.000	1	1.349.100.000	1	1.352.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.000.000		74.000.000		77.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	74.000.000	1	74.000.000	1	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.500.000		112.500.000		112.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	112.500.000	1	112.500.000	1	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				305.000.000		305.000.000		305.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	305.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				840.000.000		840.000.000		840.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	840.000.000	1	840.000.000	1	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.600.000		17.600.000		17.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.600.000	1	17.600.000	1	17.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	1.759.003.000	100	1.530.983.000	100	1.478.046.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					32.240.000		32.240.000		29.048.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	32.240.000	100	32.240.000	100	29.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		27.086.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	27.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.240.000		2.240.000		1.962.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.240.000	1	2.240.000	1	1.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.000.000		110.000.000		112.778.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	110.000.000	100	110.000.000	100	112.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.580.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		9.171.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		6.599.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	9.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		70.000.000		79.254.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	70.000.000	2	70.000.000	2	79.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					879.948.000		651.928.000		636.620.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	879.948.000	1	651.928.000	1	636.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				879.948.000		651.928.000		636.620.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	879.948.000	45	651.928.000	23	636.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					258.770.000		258.770.000		231.860.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	258.770.000	4	258.770.000	4	231.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		2.802.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.802.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		216.000.000		192.900.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	216.000.000	1	216.000.000	1	192.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.770.000		37.770.000		36.158.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	37.770.000	1	37.770.000	1	36.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					478.045.000		478.045.000		467.740.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	478.045.000	1	478.045.000	1	467.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				228.575.000		228.575.000		226.820.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	228.575.000	12	228.575.000	4	226.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.550.000		25.550.000		17.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	25.550.000	2	25.550.000	2	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				223.920.000		223.920.000		223.920.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	223.920.000	7	223.920.000	7	223.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	133.430.179.000	100	133.658.199.000	100	131.794.136.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					110.646.685.000		110.646.685.000		109.511.262.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	110.646.685.000	100	110.646.685.000	100	109.511.262.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				109.642.685.000		109.642.685.000		108.488.534.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	750	109.642.685.000	750	109.642.685.000	630	108.488.534.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				954.000.000		954.000.000		978.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	954.000.000	12	954.000.000	12	978.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		44.728.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	44.728.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.595.000		400.595.000		275.479.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	350.595.000	100	400.595.000	100	275.479.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				255.000.000		255.000.000		184.110.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	255.000.000	4	255.000.000	4	184.110.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		75.000.000		74.174.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	74.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				20.595.000		70.595.000		17.195.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.595.000	1	70.595.000	1	17.195.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					96.000.000		96.000.000		88.075.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	96.000.000	1	96.000.000	1	88.075.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen					0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				96.000.000		96.000.000		88.075.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	96.000.000	1	96.000.000	1	88.075.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					278.621.000		278.621.000		142.842.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	278.621.000	100	278.621.000	100	142.842.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0001			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.920.000		3.920.000		3.758.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.920.000	1	3.920.000	1	3.758.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.920.000		3.920.000		3.272.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	3.920.000	1	3.920.000	1	3.272.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				258.294.000		258.294.000		123.422.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1445	258.294.000	750	258.294.000	750	123.422.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.487.000		12.487.000		12.390.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180	12.487.000	90	12.487.000	90	12.390.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.068.165.000		2.073.655.000		1.861.014.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.068.165.000	100	2.073.655.000	100	1.861.014.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				61.601.000		64.001.000		64.001.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	61.601.000	4	64.001.000	4	64.001.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				179.316.000		179.316.000		138.936.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	179.316.000	4	179.316.000	4	138.936.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				156.185.000		156.185.000		152.785.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	156.185.000	4	156.185.000	4	152.785.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.816.000		151.816.000		76.247.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	151.816.000	1	151.816.000	1	76.247.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				137.941.000		137.941.000		120.002.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	137.941.000	4	137.941.000	4	120.002.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				247.010.000		247.010.000		226.620.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	247.010.000	4	247.010.000	4	226.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.093.906.000		1.093.906.000		1.044.327.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.093.906.000	4	1.093.906.000	4	1.044.327.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.390.000		43.480.000		38.096.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	40.390.000	4	43.480.000	4	38.096.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.189.820.000		1.512.840.000		1.119.693.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.189.820.000	1	1.512.840.000	97	1.119.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				215.000.000		215.000.000		137.253.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	31	215.000.000	31	215.000.000	11	137.253.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				615.720.000		938.740.000		676.040.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	43	615.720.000	43	938.740.000	60	676.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				44.100.000		44.100.000		19.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	37	44.100.000	37	44.100.000	8	19.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		65.000.000		37.400.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	65.000.000	30	65.000.000	17	37.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.271.675.000		14.716.435.000		14.963.372.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	15.271.675.000	12	14.716.435.000	12	14.963.372.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.645.719.000		1.651.839.000		1.634.899.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1.645.719.000	12	1.651.839.000	12	1.634.899.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.604.956.000		13.043.596.000		13.308.299.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	13.604.956.000	4	13.043.596.000	4	13.308.299.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.528.618.000		3.933.368.000		3.832.399.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.528.618.000	1	3.933.368.000	1	3.832.399.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				849.700.000		884.000.000		806.900.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	48	849.700.000	48	884.000.000	48	806.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.200.000		30.200.000		30.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	30.200.000	6	30.200.000	6	30.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				483.560.000		483.560.000		396.686.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	307	483.560.000	307	483.560.000	307	396.686.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				185.500.000		135.500.000		88.566.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	185.500.000	2	135.500.000	2	88.566.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				49.000.000		49.000.000		44.955.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	49.000.000	1	49.000.000	1	44.955.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.230.099.000		1.650.549.000		1.620.549.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1.230.099.000	7	1.650.549.000	7	1.620.549.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.559.000		580.559.000		724.543.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	580.559.000	4	580.559.000	4	724.543.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan								**1.741.911.000**		**1.741.911.000**		**1.323.192.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	2.9	1.741.911.000	2.9	1.741.911.000	2.9	1.323.192.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.741.911.000		1.741.911.000		1.323.192.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	1.741.911.000	100	1.741.911.000	100	1.323.192.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.741.911.000		1.741.911.000		1.323.192.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.741.911.000	100	1.741.911.000	100	1.323.192.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.016.754.000		1.016.754.000		837.365.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.016.754.000	4	1.016.754.000	6	837.365.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				725.157.000		725.157.000		485.827.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	725.157.000	4	725.157.000	8	485.827.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian									**400.962.343.000**		**403.873.943.000**		**350.021.144.000**	**Dinas Pertanian dan Peternakan**	
						Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian	%	1.05		1.05		1.05		Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Meningkatnya Produksi Pertanian								**330.929.905.000**		**332.296.405.000**		**290.880.701.000**		
						Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya	%	100	35.004.978.000	100	35.004.978.000	100	26.459.415.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						35.004.978.000		35.004.978.000		26.459.415.000		
						Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0.2	30.032.978.000	0.2	30.032.978.000	0.56	21.731.294.000	Bidang Kelembagaan	
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					29.282.978.000		29.282.978.000		21.003.664.000		
						jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Dokumen	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	10	2.069.568.000	Pokja Kerjasama dan Kemitraan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				2.000.000.000		2.000.000.000		2.069.568.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Laporan	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.069.568.000	Pokja Kerjasama dan Kemitraan	
						jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi	Kelompok	23	14.458.478.000	23	14.458.478.000	242	16.349.015.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				14.458.478.000		14.458.478.000		16.349.015.000		
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	79	14.458.478.000	79	14.458.478.000	242	16.349.015.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
						Jumlah luas lahan petani yang terfasilitasi asuransi	Ha	10130	12.324.500.000	10130	12.324.500.000	10449	2.241.649.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				12.324.500.000		12.324.500.000		2.241.649.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian	Laporan	4	12.324.500.000	4	12.324.500.000	4	2.241.649.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
						Jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan	Orang	800	500.000.000	800	500.000.000	550	343.432.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				500.000.000		500.000.000		343.432.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian	Laporan	4	500.000.000	4	500.000.000	4	343.432.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				500.000.000		500.000.000		343.432.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian	Laporan	4	500.000.000	4	500.000.000	4	343.432.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					750.000.000		750.000.000		727.630.000		
						jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menuju korporasi	Unit	5	750.000.000	5	750.000.000	5	727.630.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				750.000.000		750.000.000		727.630.000		
						Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	5	500.000.000	5	500.000.000	5	480.270.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
						Jumlah pendampingan korporasi petani	Unit	24	250.000.000	24	250.000.000	24	247.360.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
						Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	4.972.000.000	100	4.972.000.000	100	4.728.121.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					4.972.000.000		4.972.000.000		4.728.121.000		
						Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis	Orang	1410	4.523.000.000	1410	4.523.000.000	3970	4.327.013.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Peternakan	
		3.27.07.1.02.0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				3.111.000.000		3.111.000.000		3.030.225.000		
						Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	3.111.000.000	4	3.111.000.000	4	3.030.225.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Peternakan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.412.000.000		1.412.000.000		1.296.788.000		
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	9	1.412.000.000	9	1.412.000.000	915	1.296.788.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Peternakan	
						Jumlah SDM peternak yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis	Orang	690	449.000.000	690	449.000.000	990	401.108.000	Pokja Penjaminan Mutu Pelatihan dan Bimbingan Teknis	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				449.000.000		449.000.000		401.108.000		
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Perah	Kali	7	130.665.000	7	130.665.000	10	120.580.000	Pokja Penjaminan Mutu Pelatihan dan Bimbingan Teknis	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Petelur	Kali	5	94.800.000	5	94.800.000	7	87.420.000	Pokja Penjaminan Mutu Pelatihan dan Bimbingan Teknis	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Potong	Kali	11	223.535.000	11	223.535.000	16	193.108.000	Pokja Penjaminan Mutu Pelatihan dan Bimbingan Teknis	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	1073636	9.902.149.000	1073636	10.485.157.000	1046521	10.097.770.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						9.557.329.000		10.140.337.000		9.781.887.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	1.066.012.000	100	1.066.012.000	100	1.041.157.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.066.012.000		1.066.012.000		1.041.157.000		
						Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk	Batang	6500	603.850.000	6500	603.850.000	6500	592.384.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				603.850.000		603.850.000		592.384.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	6500	603.850.000	6500	603.850.000	6500	592.384.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih sayuran	Batang	0.2	46.300.000	0.2	46.300.000	200	44.688.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				46.300.000		46.300.000		44.688.000		
						Jumlah pengembangan benih sayuran	Kg	200	46.300.000	200	46.300.000	200	44.688.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman buah	Batang	10000	415.862.000	10000	415.862.000	25000	404.085.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				415.862.000		415.862.000		404.085.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	25000	415.862.000	25000	415.862.000	25000	404.085.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	847.491.000	100	755.499.000	100	502.334.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					847.491.000		755.499.000		502.334.000		
						Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura	Bulan	12	501.035.000	12	409.043.000	12	324.352.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0019			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				210.398.000		210.398.000		182.627.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (hortik)	Laporan	12	210.398.000	12	210.398.000	12	182.627.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0020			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				290.637.000		198.645.000		141.725.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (perkebunan)	Laporan	12	290.637.000	12	198.645.000	12	141.725.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	700000	231.764.000	700000	231.764.000	1000000	81.312.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				231.764.000		231.764.000		81.312.000		
						Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura buah	Batang	700000	231.764.000	700000	231.764.000	1000000	81.312.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ton	6000	66.307.000	6000	66.307.000	1100	53.731.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				66.307.000		66.307.000		53.731.000		
						Luas pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura sayuran	Ha	500	66.307.000	500	66.307.000	800	53.731.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ton	6000	48.385.000	6000	48.385.000	1100	42.939.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				48.385.000		48.385.000		42.939.000		
						Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih hortikultura sayuran	Sertifikat	125	48.385.000	125	48.385.000	80	42.939.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Produksi Bawang Merah	Ton	617015	1.786.616.000	617015	1.827.216.000	589900	1.973.745.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.786.616.000		1.827.216.000		1.973.745.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan bawang merah	Ha	25	1.786.616.000	25	1.827.216.000	25	1.973.745.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.786.616.000		1.827.216.000		1.973.745.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (bawang merah)	Laporan	4	1.786.616.000	4	1.827.216.000	4	1.973.745.000	Pokja Hortikultura	
						Produksi Cabai	Ton	456621	4.244.735.000	456621	4.414.135.000	456621	4.387.832.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.244.735.000		4.414.135.000		4.387.832.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan cabai	Ha	310	4.244.735.000	310	4.414.135.000	310	4.387.832.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				4.244.735.000		4.414.135.000		4.387.832.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (cabai)	Laporan	4	4.244.735.000	4	4.414.135.000	4	4.387.832.000	Pokja Hortikultura	
						Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392201	1.612.475.000	392201	2.077.475.000	392201	1.876.819.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.612.475.000		2.077.475.000		1.876.819.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman buah	Ha	20	308.600.000	20	723.600.000	20	1.015.600.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				308.600.000		723.600.000		1.015.600.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman buah)	Laporan	4	308.600.000	4	723.600.000	4	1.015.600.000	Pokja Hortikultura	
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman obat	Ha	3	1.303.875.000	3	1.353.875.000	3	861.219.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.303.875.000		1.353.875.000		861.219.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman obat)	Laporan	4	1.303.875.000	4	1.353.875.000	4	861.219.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						344.820.000		344.820.000		315.883.000		
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	300.000.000	10	300.000.000	10	280.823.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					300.000.000		300.000.000		280.823.000		
						Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura	Ha	152542	300.000.000	152542	300.000.000	55	280.823.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				300.000.000		300.000.000		280.823.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Hortikultura)	Ha	55	300.000.000	55	300.000.000	55	280.823.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	44.820.000	5	44.820.000	5	35.060.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					44.820.000		44.820.000		35.060.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Hortikultura	Unit	0	44.820.000	10	44.820.000	10	35.060.000	Pokja Pelindungan Tanaman Pangan	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				44.820.000		44.820.000		35.060.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	5	44.820.000	5	44.820.000	10	35.060.000	Pokja Pelindungan Tanaman Pangan	
						Produksi Tanaman Pangan	Ton	12734625	224.750.812.000	12734625	225.522.312.000	12692335	209.469.381.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						47.206.452.000		45.482.952.000		42.891.998.000		
						Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	228.993.000	100	228.993.000	100	217.307.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					228.993.000		228.993.000		217.307.000		
						Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan	Dokumen	1	228.993.000	1	228.993.000	1	217.307.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				228.993.000		228.993.000		217.307.000		
						Jumlah laporan rekomendasi rekayasa teknis alsintan	Dokumen	5	228.993.000	5	228.993.000	4	217.307.000		OPD Provinsi
						Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	377.562.000	3	377.562.000	3	376.512.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					377.562.000		377.562.000		376.512.000		
						Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan	Dokumen	12	377.562.000	12	377.562.000	12	376.512.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				377.562.000		377.562.000		376.512.000		
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	377.562.000	4	377.562.000	4	376.512.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	3.828.717.000	100	3.735.217.000	100	3.732.322.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					704.097.000		637.097.000		661.155.000		
						Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura	Batang	12725	178.550.000	12725	178.550.000	6894	176.000.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				178.550.000		178.550.000		176.000.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	5000	47.500.000	5000	47.500.000	5000	44.950.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi tanaman hias yang dihasilkan	Batang	12000	131.050.000	12000	131.050.000	12000	131.050.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	41	2.033.200.000	41	2.015.380.000	193.8	2.039.148.000	Pokja Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.033.200.000		2.015.380.000		2.039.148.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	193.8	1.979.965.000	193.8	1.962.145.000	193.8	1.985.913.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan lainnya berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.6	53.235.000	1.6	53.235.000	1.6	53.235.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah produksi benih rempah penyegar	Setek	1	608.097.000	1	541.097.000	1300	520.955.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				608.097.000		541.097.000		520.955.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	1300	129.833.000	1300	129.833.000	1300	127.945.000		
						Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara	Ha	67	478.264.000	67	411.264.000	83	393.010.000		
						Jumlah produksi benih tanaman buah	Batang	5000	912.870.000	5000	904.190.000	5000	856.019.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				912.870.000		904.190.000		856.019.000		
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	12725	912.870.000	12725	904.190.000	6894	856.019.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman semusim	Mata	0	96.000.000	0	96.000.000	0	140.200.000		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				96.000.000		96.000.000		140.200.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	8360000	96.000.000	8360000	96.000.000	1188000	140.200.000		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.124.620.000		3.098.120.000		3.071.167.000		
						Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura	Batang	12725	178.550.000	12725	178.550.000	6894	176.000.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				178.550.000		178.550.000		176.000.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	5000	47.500.000	5000	47.500.000	5000	44.950.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi tanaman hias yang dihasilkan	Batang	12000	131.050.000	12000	131.050.000	12000	131.050.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	41	2.033.200.000	41	2.015.380.000	193.8	2.039.148.000	Pokja Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.033.200.000		2.015.380.000		2.039.148.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	193.8	1.979.965.000	193.8	1.962.145.000	193.8	1.985.913.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan lainnya berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.6	53.235.000	1.6	53.235.000	1.6	53.235.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah produksi benih rempah penyegar	Setek	1	608.097.000	1	541.097.000	1300	520.955.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				608.097.000		541.097.000		520.955.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	1300	129.833.000	1300	129.833.000	1300	127.945.000		
						Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara	Ha	67	478.264.000	67	411.264.000	83	393.010.000		
						Jumlah produksi benih tanaman buah	Batang	5000	912.870.000	5000	904.190.000	5000	856.019.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				912.870.000		904.190.000		856.019.000		
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	12725	912.870.000	12725	904.190.000	6894	856.019.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman semusim	Mata	0	96.000.000	0	96.000.000	0	140.200.000		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				96.000.000		96.000.000		140.200.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	8360000	96.000.000	8360000	96.000.000	1188000	140.200.000		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	0	0	0	0	0		
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	4.657.200.000	100	4.657.200.000	100	4.505.282.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.083.900.000		1.083.900.000		1.015.310.000		
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	3	3.573.300.000	3	3.573.300.000	3	3.489.972.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				1.109.280.000		1.133.280.000		1.100.790.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	30000	456.262.000	30000	480.262.000	30000	460.719.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak	Ton	1.8	460.783.000	1.8	460.783.000	1.8	447.836.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	3000	192.235.000	3000	192.235.000	3000	192.235.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.464.020.000		2.440.020.000		2.389.182.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	313.2	2.464.020.000	313.2	2.440.020.000	249.2	2.389.182.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar	Batang	0.5	79.485.000	0.5	79.485.000	25000	74.785.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				79.485.000		79.485.000		74.785.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	79.485.000	0	79.485.000	25000	74.785.000		
						Jumlah produksi benih tanaman semusim	Mata	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	10000	0	10000	0	0	0		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	1.004.415.000	0	1.004.415.000	20000	940.525.000		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				1.004.415.000		1.004.415.000		940.525.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	20000	1.004.415.000	20000	1.004.415.000	20000	940.525.000		
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.573.300.000		3.573.300.000		3.489.972.000		
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	3	3.573.300.000	3	3.573.300.000	3	3.489.972.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				1.109.280.000		1.133.280.000		1.100.790.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	30000	456.262.000	30000	480.262.000	30000	460.719.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak	Ton	1.8	460.783.000	1.8	460.783.000	1.8	447.836.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	3000	192.235.000	3000	192.235.000	3000	192.235.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.464.020.000		2.440.020.000		2.389.182.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	313.2	2.464.020.000	313.2	2.440.020.000	249.2	2.389.182.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar	Batang	0.5	79.485.000	0.5	79.485.000	25000	74.785.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				79.485.000		79.485.000		74.785.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	79.485.000	0	79.485.000	25000	74.785.000		
						Jumlah produksi benih tanaman semusim	Mata	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	10000	0	10000	0	0	0		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	1.004.415.000	0	1.004.415.000	20000	940.525.000		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				1.004.415.000		1.004.415.000		940.525.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	20000	1.004.415.000	20000	1.004.415.000	20000	940.525.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	2.947.988.000	100	2.947.988.000	100	2.880.373.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.947.988.000		2.947.988.000		2.880.373.000		
						Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	212.2	2.947.988.000	212.2	2.947.988.000	357.4	2.880.373.000	Pokja Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.947.988.000		2.947.988.000		2.880.373.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	353.4	2.873.613.000	353.4	2.873.613.000	353.4	2.804.026.000	Pokja Tanaman Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	4	74.375.000	4	74.375.000	4	76.347.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	1.156.787.000	100	1.156.787.000	100	927.252.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.156.787.000		1.156.787.000		927.252.000		
						Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan	Bulan	12	442.303.000	12	442.303.000	12	309.948.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0018			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				442.303.000		442.303.000		309.948.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (tanaman pangan)	Laporan	12	442.303.000	12	442.303.000	12	309.948.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan	Ton	1000	104.110.000	1000	104.110.000	500	97.792.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				104.110.000		104.110.000		97.792.000		
						Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih tanaman pangan	Sertifikat	1500	104.110.000	1500	104.110.000	2100	97.792.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan	Ton	20800	610.374.000	20800	610.374.000	15200	519.512.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				610.374.000		610.374.000		519.512.000		
						Jumlah sertifikat benih tanaman pangan	Ha	5200	532.830.000	5200	532.830.000	5200	456.108.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Luas sertifikasi benih tanaman pangan lainnya	Ha	390	77.544.000	390	77.544.000	500	63.404.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Produksi Jagung	Ton	3301024	3.208.005.000	3301024	3.268.005.000	3301024	3.139.219.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					3.208.005.000		3.268.005.000		3.139.219.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Jagung dan serealia	Ha	3200	3.208.005.000	3200	3.268.005.000	3200	3.139.219.000	Pokja Palawija	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3.208.005.000		3.268.005.000		3.139.219.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (jagung dan serealia)	Laporan	4	3.208.005.000	4	3.268.005.000	4	3.139.219.000	Pokja Palawija	
						Produksi Kedelai	Ton	52790	8.700.000.000	52790	8.700.000.000	10500	6.217.295.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					8.700.000.000		8.700.000.000		6.217.295.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Kedelai, Aneka kacang dan Umbi	Ha	3100	8.700.000.000	3100	8.700.000.000	3100	6.217.295.000	Pokja Palawija	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				8.700.000.000		8.700.000.000		6.217.295.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (kedelai, aneka kacang dan umbi)	Laporan	4	8.700.000.000	4	8.700.000.000	4	6.217.295.000	Pokja Palawija	
						Produksi Padi	Ton	9380811	22.101.200.000	9380811	20.411.200.000	9380811	20.896.436.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					22.101.200.000		20.411.200.000		20.896.436.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Padi	Ha	47300	22.101.200.000	47300	20.411.200.000	47300	20.896.436.000	Pokja Padi	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				22.101.200.000		20.411.200.000		20.896.436.000		
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestsida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	22.101.200.000	4	20.411.200.000	4	20.896.436.000	Pokja Padi	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						175.834.000.000		178.329.000.000		164.800.282.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	175.834.000.000	1	178.329.000.000	1	164.800.282.000	Bidang Prasarana dan Sarana	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					175.834.000.000		178.329.000.000		164.800.282.000		
						Jumlah fasilitasi pupuk/pembenah tanah	Ha	14800	23.300.000.000	14800	23.300.000.000	40169	23.124.724.000	Seksi Sarana	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				23.300.000.000		23.300.000.000		23.124.724.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	14800	23.300.000.000	4	23.300.000.000	4	23.124.724.000	Seksi Sarana	
						Jumlah jaringan irigasi alternatif yang difasilitasi	Paket	75	9.038.950.000	75	9.468.950.000	75	9.753.100.000	Seksi Prasarana	
		3.27.03.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				9.038.950.000		9.468.950.000		9.753.100.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	4	9.038.950.000	4	9.468.950.000	4	9.753.100.000	Seksi Prasarana	
						jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi	Paket	334	66.541.050.000	334	66.541.050.000	334	66.043.460.000	Seksi Prasarana	
		3.27.03.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				66.541.050.000		66.541.050.000		66.043.460.000		
						Jumlah Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (irigasi tersier)	Dokumen	4	66.541.050.000	4	66.541.050.000	4	66.043.460.000	Seksi Prasarana	
						jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	240	76.654.000.000	240	78.679.000.000	1507	65.578.998.000	Seksi Alat Mesin	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				76.654.000.000		78.679.000.000		65.578.998.000		
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan sarana pendukung pertanian lainnya (alsintan)	Dokumen	25	76.654.000.000	4	78.679.000.000	4	65.578.998.000	Seksi Alat Mesin	
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	50	300.000.000	50	340.000.000	50	300.000.000	Seksi Sarana	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				300.000.000		340.000.000		300.000.000		
						Jumlah stimulan benih mendukung optimasi lahan	Kg	1875	28.125.000	1875	28.125.000	1875	28.125.000	Seksi Sarana	
						Jumlah stimulan pupuk mendukung optimasi lahan	Kg	133200	271.875.000	133200	311.875.000	133200	271.875.000	Seksi Sarana	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.710.360.000		1.710.360.000		1.777.101.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.589.320.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					1.500.000.000		1.500.000.000		1.589.320.000		
						Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan	Ha	4014129	1.500.000.000	4014129	1.500.000.000	4195	1.589.320.000	Pokja Pelindungan Tanaman Pangan	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1.500.000.000		1.500.000.000		1.589.320.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	640	1.500.000.000	640	1.500.000.000	4195	1.589.320.000	Pokja Pelindungan Tanaman Pangan	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	210.360.000	5	210.360.000	5	187.781.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					210.360.000		210.360.000		187.781.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan	Unit	29	210.360.000	29	210.360.000	29	187.781.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				210.360.000		210.360.000		187.781.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Tanaman Pangan)	Ha	5	210.360.000	5	210.360.000	29	187.781.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
						Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	3868066	61.271.966.000	3868066	61.283.958.000	3844211	44.854.135.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						57.477.146.000		57.489.138.000		41.063.815.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	950.000.000	100	950.000.000	100	751.249.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					950.000.000		950.000.000		751.249.000		
						Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar	Setek	20000	0	20000	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	11000	0	11000	0	0	0		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	950.000.000	0	950.000.000	1500	751.249.000		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				950.000.000		950.000.000		751.249.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	1500	950.000.000	1500	950.000.000	1500	751.249.000		
						Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara	Pohon	2.357	0	2.357	0	0	0		
						Jumlah produksi benih tebu tanaman semusim	Mata	0	0	0	0	0	0		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				0		0		0		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	38000	0	38000	0	0	0		
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	486.719.000	100	578.711.000	100	568.501.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					486.719.000		578.711.000		568.501.000		
						Jumlah sertifikasi benih perkebunan	Batang	874180	486.719.000	874180	578.711.000	1100000	568.501.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				486.719.000		578.711.000		568.501.000		
						Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit perkebunan	Batang	874180	486.719.000	874180	578.711.000	1100000	568.501.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Produksi Kelapa	Ton	166955	4.630.000.000	166955	4.600.000.000	143100	4.595.950.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.630.000.000		4.600.000.000		4.595.950.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kelapa dan tanaman tahunan lainnya	Ha	630	4.630.000.000	630	4.600.000.000	585	4.595.950.000	Pokja Tanaman Tahunan	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				4.630.000.000		4.600.000.000		4.595.950.000		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereedaran sarana pertanian (kelapa dan tanaman tahunan lainnya)	Dokumen	4	4.630.000.000	4	4.600.000.000	4	4.595.950.000	Pokja Tanaman Tahunan	
						Produksi Kopi	Ton	26875	5.550.000.000	26875	5.500.000.000	26875	5.381.100.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					5.550.000.000		5.500.000.000		5.381.100.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kopi dan rempah penyegar lainnya	Ha	960	5.550.000.000	960	5.500.000.000	907	5.381.100.000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				5.550.000.000		5.500.000.000		5.381.100.000		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	5.550.000.000	4	5.500.000.000	4	5.381.100.000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	
						Produksi Tebu	Ton	3674236	45.860.427.000	3674236	45.860.427.000	3674236	29.767.015.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					45.860.427.000		45.860.427.000		29.767.015.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tebu dan tanaman semusim lainnya	Ha	1408	45.860.427.000	1408	45.860.427.000	3737	29.767.015.000	Pokja Tanaman Semusim	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				45.860.427.000		45.860.427.000		29.767.015.000		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereedaran sarana pertanian (tebu dan tanaman semusim lainnya)	Dokumen	4	45.860.427.000	4	45.860.427.000	4	29.767.015.000	Pokja Tanaman Semusim	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						3.794.820.000		3.794.820.000		3.790.320.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	3.750.000.000	10	3.750.000.000	10	3.750.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
						Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas perkebunan	Ha	1929741	3.750.000.000	1929741	3.750.000.000	1065	3.750.000.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Perkebunan)	Ha	1065	3.750.000.000	1065	3.750.000.000	1065	3.750.000.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	44.820.000	5	44.820.000	5	40.320.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					44.820.000		44.820.000		40.320.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Perkebunan	Unit	0	44.820.000	10	44.820.000	10	40.320.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				44.820.000		44.820.000		40.320.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Perkebunan)	Ha	20	44.820.000	20	44.820.000	10	40.320.000	Pokja Pelindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Peternakan								**70.032.438.000**		**71.577.538.000**		**59.140.443.000**		
						Produksi Ternak	Ton	1936930	70.032.438.000	1936930	71.577.538.000	1936930	59.140.443.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						45.040.601.000		46.445.701.000		41.406.433.000		
						Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6135083	29.692.000.000	6135083	31.097.100.000	6135083	25.544.633.000	Bidang Peternakan	
		3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					6.337.000.000		6.457.000.000		6.163.884.000		
						Jumlah kelompok atau usaha budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practices	Unit	3	6.337.000.000	3	6.457.000.000	3	6.163.884.000	Pokja Produksi	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				6.337.000.000		6.457.000.000		6.163.884.000		
						Jumlah Generasi Muda/Milenial yang Mengikuti Pelatihan/Seminar Budidaya Ternak	Orang	30	97.296.000	30	97.296.000	30	72.521.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	4	6.119.750.000	4	6.239.750.000	4	5.993.253.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan good farming practice	Orang	40	119.954.000	40	119.954.000	40	98.110.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					23.355.000.000		24.640.100.000		19.380.749.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	3	5.440.365.000	3	6.490.365.000	3	4.089.675.000	Pokja Pakan	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				5.440.365.000		6.490.365.000		4.089.675.000		
						Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	37.590.000	4	37.590.000	4	27.400.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pengujian pakan/bahan pakan	sampel	520	216.000.000	520	216.000.000	520	212.734.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak	Unit	3	5.186.775.000	3	6.236.775.000	3	3.849.541.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan	Buah	3	17.914.635.000	3	18.149.735.000	3	15.291.074.000	Pokja Perbibitan	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				17.914.635.000		18.149.735.000		15.291.074.000		
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	121.012.000	4	121.012.000	4	158.477.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan good breeding practice	Orang	40	176.465.000	40	176.465.000	40	179.569.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan benih/bibit ternak	Unit	4	17.617.158.000	4	17.852.258.000	4	14.953.028.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	2.213.100.000	1	2.213.100.000	1	2.213.100.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.213.100.000		2.213.100.000		2.213.100.000		
						Jumlah produksi ternak non ruminansia petelur yang diedarkan	Ekor	16399	2.213.100.000	16399	2.213.100.000	43092	2.213.100.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.213.100.000		2.213.100.000		2.213.100.000		

						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	27331	2.213.100.000	27331	2.213.100.000	53864	2.213.100.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	6.878.612.000	1	6.878.612.000	1	7.256.012.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					6.878.612.000		6.878.612.000		7.256.012.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia pedaging yang ber sklb	Ekor	62	4.986.357.000	62	4.986.357.000	50	5.364.357.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				4.986.357.000		4.986.357.000		5.364.357.000		
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	2.823.207.000	4	2.823.207.000	4	3.201.207.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	144	2.163.150.000	144	2.163.150.000	144	2.163.150.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak non ruminansia pedaging yang diedarkan	Ekor	14433	1.892.255.000	14433	1.892.255.000	36571	1.891.655.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.892.255.000		1.892.255.000		1.891.655.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia pedaging	Ekor	20618	1.892.255.000	20618	1.892.255.000	40635	1.891.655.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	960.818.000	1	960.818.000	1	924.339.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					960.818.000		960.818.000		924.339.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber sklb	Ekor	4	960.818.000	4	960.818.000	4	924.339.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				960.818.000		960.818.000		924.339.000		
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	11	960.818.000	11	960.818.000	11	924.339.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	860.000.000	81	860.000.000	81	809.787.000	Bidang Veteriner	
		3.27.02.1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					860.000.000		860.000.000		809.787.000		
						Jumlah laporan pemeriksaan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	860.000.000	4	860.000.000	4	809.787.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				860.000.000		860.000.000		809.787.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	5	80.816.000	5	88.816.000	5	73.698.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	43.810.000	12	43.810.000	12	53.618.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	735.374.000	4	727.374.000	4	682.471.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	4.436.071.000	1	4.436.071.000	100	4.658.562.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					4.436.071.000		4.436.071.000		4.658.562.000		
						Jumlah produksi semen segar	Liter	15.36	2.912.581.000	15.36	2.912.581.000	15.36	3.150.092.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.912.581.000		2.912.581.000		3.150.092.000		
						Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	150.450.000	4	173.051.000	4	156.296.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak pejantan yang layak diproses semen segarnya	Ekor	20	2.762.131.000	20	2.739.530.000	20	2.993.796.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Presentase semen beku layak edar	%	80	1.523.490.000	80	1.523.490.000	80	1.508.470.000	Pokja Produksi dan Distribusi	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.523.490.000		1.523.490.000		1.508.470.000		
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	47.088.000	4	47.088.000	4	41.488.000	Pokja Produksi dan Distribusi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi semen beku	Dosis	407000	1.476.402.000	407000	1.476.402.000	210000	1.466.982.000	Pokja Produksi dan Distribusi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						2.400.000.000		2.400.000.000		2.315.121.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	2.400.000.000	5	2.400.000.000	5	2.315.121.000	Bidang Prasarana dan Sarana	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					2.400.000.000		2.400.000.000		2.315.121.000		
						Jumlah fasilitasi sarpras peternakan	Unit	10	2.400.000.000	10	2.400.000.000	10	2.315.121.000	Seksi Prasarana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.400.000.000		2.400.000.000		2.315.121.000		
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Lahan dan prasarana peternakan)	Dokumen	4	2.400.000.000	4	2.400.000.000	4	2.315.121.000	Seksi Prasarana	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						4.637.563.000		4.637.563.000		4.411.423.000		
						Persentase Layanan Veteriner	%	100	2.497.563.000	100	2.497.563.000	100	2.542.267.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
		3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					2.497.563.000		2.497.563.000		2.542.267.000		
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Jawa Tengah	Ekor	24950	1.005.933.000	24950	1.016.435.000	24950	1.061.755.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.03.0003			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1.005.933.000		1.016.435.000		1.061.755.000		
						Jumlah laporan pemeriksaan dan pengobatan hewan	Laporan	4	1.005.933.000	4	1.016.435.000	4	1.061.755.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengujian di Laboratorium Veteriner di Jawa Tengah	sampel	44930	1.491.630.000	44930	1.481.128.000	44930	1.480.512.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.04.1.03.0003			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1.491.630.000		1.481.128.000		1.480.512.000		
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	1.491.630.000	4	1.481.128.000	4	1.480.512.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	1.230.000.000	1	1.230.000.000	1	1.064.691.000	Bidang Veteriner	
		3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.080.000.000		1.080.000.000		961.337.000		
						Jumlah laporan Situasi Penyakit Menular Strategis (PHMS)	Laporan	4	1.080.000.000	4	1.080.000.000	4	961.337.000	Pokja Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.080.000.000		1.080.000.000		961.337.000		
						Jumlah Ternak/hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	256.742.000	2000	256.742.000	2000	184.737.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	4	823.258.000	4	823.258.000	4	776.600.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.27.04.1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		103.354.000		
						Jumlah Ternak yang diberikan rekomendasi keluar masuk Jawa Tengah	Ekor	2920000	150.000.000	2920000	150.000.000	2920000	103.354.000	Pokja Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.02.0007			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				150.000.000		150.000.000		103.354.000		
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	103.354.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	910.000.000	30	910.000.000	30	804.465.000	Bidang Veteriner	
		3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					910.000.000		910.000.000		804.465.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Unit	45	910.000.000	45	910.000.000	63	804.465.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.04.1.03.0002			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				910.000.000		910.000.000		804.465.000		
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	15	582.020.000	15	582.020.000	15	521.935.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	4	327.980.000	4	327.980.000	4	282.530.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						17.954.274.000		18.094.274.000		11.007.466.000		
						Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1.25	17.954.274.000	1.25	18.094.274.000	1.25	11.007.466.000	Bidang Kelembagaan	
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					50.000.000		50.000.000		49.546.000		
						Jumlah peternak yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	30	49.546.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				50.000.000		50.000.000		49.546.000		
						jumlah laporan fasilitasi asuransi dan pembiayaan peternakan	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	49.546.000	Pokja Pembiayaan dan Permodalan	
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					17.904.274.000		18.044.274.000		10.957.920.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak menuju korporasi	Kelompok	2	17.904.274.000	2	18.044.274.000	2	10.957.920.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	
		3.27.07.1.03.0005			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani				17.904.274.000		18.044.274.000		10.957.920.000		
						jumlah fasilitasi sarpras penguatan kelembagaan	Unit	2	14.356.149.000	2	14.496.149.000	2	8.080.875.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah korporasi/kelompok ternak yang mendapat pelatihan manajemen usaha peternakan	Kelompok	2	23.149.000	2	23.149.000	2	21.929.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	3	3.474.976.000	3	3.474.976.000	3	2.805.116.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Pokja Kelembagaan Petani dan Peternak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**569.520.940.000**		**572.526.040.000**		**513.620.005.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									**48.653.595.000**		**48.653.595.000**		**48.124.430.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	79.71		79.71		79.71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								**48.096.095.000**		**48.096.095.000**		**47.691.871.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	89.2	48.096.095.000	89.2	48.096.095.000	89.2	47.691.871.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.096.095.000		48.096.095.000		47.691.871.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	619.465.000	100	619.465.000	100	600.506.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.012.000		72.012.000		64.064.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.012.000	100	72.012.000	100	64.064.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.633.000		5.633.000		4.935.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.633.000	2	5.633.000	2	4.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.875.000		13.875.000		13.825.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.875.000	3	13.875.000	3	13.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.751.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		2.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		34.751.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	34.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					444.852.000		444.852.000		409.752.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	444.852.000	12	444.852.000	12	409.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		98.000.000		98.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.000.000	12	98.000.000	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.352.000		345.352.000		310.352.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	345.352.000	12	345.352.000	12	310.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.601.000		54.601.000		78.690.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	54.601.000	6	54.601.000	6	78.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.601.000		31.601.000		31.601.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	31.601.000	3	31.601.000	3	31.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		39.350.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	39.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		7.739.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	7.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	538.173.000	100	538.173.000	100	525.117.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.236.000		74.236.000		68.402.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.236.000	100	74.236.000	100	68.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.630.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.543.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	3.543.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.732.000		12.732.000		12.732.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.732.000	2	12.732.000	2	12.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.788.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		1.545.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		41.990.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	41.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.433.000		361.433.000		330.056.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	361.433.000	12	361.433.000	12	330.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.470.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		85.000.000		55.173.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	85.000.000	12	85.000.000	12	55.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				274.933.000		274.933.000		273.413.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	274.933.000	12	274.933.000	12	273.413.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.504.000		54.504.000		78.659.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	54.504.000	6	54.504.000	6	78.659.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.111.000		14.111.000		38.466.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	14.111.000	3	14.111.000	3	38.466.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.393.000		32.393.000		32.393.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.393.000	1	32.393.000	1	32.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		7.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	562.349.000	100	562.349.000	100	560.825.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.386.000		80.386.000		74.378.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.386.000	100	80.386.000	100	74.378.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.945.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	3.945.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.561.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.315.000		17.315.000		17.065.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	17.315.000	3	17.315.000	3	17.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.006.000		2.006.000		1.766.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.006.000	1	2.006.000	1	1.766.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		625.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.565.000		46.565.000		43.416.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	46.565.000	12	46.565.000	12	43.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.659.000		351.659.000		331.459.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	351.659.000	1	351.659.000	1	331.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.400.000		59.400.000		44.953.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	59.400.000	12	59.400.000	12	44.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.759.000		290.759.000		285.206.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.759.000	12	290.759.000	12	285.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.304.000		37.304.000		61.988.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	37.304.000	6	37.304.000	6	61.988.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.304.000		20.304.000		38.702.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.304.000	3	20.304.000	3	38.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		12.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		10.786.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	10.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	930.780.000	100	930.780.000	100	928.382.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.808.000		74.808.000		73.915.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.808.000	100	74.808.000	100	73.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.500.000		3.710.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.500.000	2	4.500.000	2	3.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.200.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.304.000		12.304.000		12.304.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12.304.000	3	12.304.000	3	12.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.777.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.777.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.764.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		46.660.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	46.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.972.000		729.972.000		700.967.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	729.972.000	12	729.972.000	12	700.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.310.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.947.000		129.947.000		125.047.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	129.947.000	12	129.947.000	12	125.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				598.525.000		598.525.000		574.610.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	598.525.000	12	598.525.000	12	574.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		78.000.000		105.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	78.000.000	6	78.000.000	6	105.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		75.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		10.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	538.526.000	100	538.526.000	100	541.825.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.799.000		77.799.000		71.596.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.799.000	100	77.799.000	100	71.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.626.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.504.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	3.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.175.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.009.000		12.009.000		12.009.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	12.009.000	5	12.009.000	5	12.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.010.000		2.010.000		1.690.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.010.000	1	2.010.000	1	1.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.486.000		2.486.000		2.288.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.486.000	12	2.486.000	12	2.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.294.000		49.294.000		45.304.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	49.294.000	12	49.294.000	12	45.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					372.006.000		372.006.000		356.308.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	372.006.000	12	372.006.000	12	356.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.420.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.713.000		89.713.000		74.095.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	89.713.000	12	89.713.000	12	74.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.793.000		280.793.000		280.793.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	280.793.000	12	280.793.000	12	280.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.721.000		40.721.000		65.921.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	40.721.000	6	40.721.000	6	65.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.686.000		17.686.000		22.686.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	17.686.000	3	17.686.000	3	22.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.035.000		15.035.000		26.578.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.035.000	1	15.035.000	1	26.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		16.657.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	16.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	471.644.000	100	471.644.000	100	476.976.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.698.000		74.698.000		66.620.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.698.000	100	74.698.000	100	66.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.625.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.503.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	3.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.193.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.193.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.194.000		13.194.000		13.552.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.194.000	3	13.194.000	3	13.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.686.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		1.950.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		39.111.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	39.111.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.600.000		5.600.000		5.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.600.000	1	5.600.000	1	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.600.000		5.600.000		5.600.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.600.000	1	5.600.000	1	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.792.000		298.792.000		298.002.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	298.792.000	1	298.792.000	1	298.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.310.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.548.000		65.548.000		64.948.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	65.548.000	12	65.548.000	12	64.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.744.000		231.744.000		231.744.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231.744.000	12	231.744.000	12	231.744.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.554.000		44.554.000		58.754.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	44.554.000	6	44.554.000	6	58.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.964.000		17.964.000		27.964.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	17.964.000	3	17.964.000	3	27.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		16.800.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.590.000		11.590.000		13.990.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	11.590.000	2	11.590.000	2	13.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	523.562.000	100	523.562.000	100	529.241.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.908.000		67.908.000		65.337.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	67.908.000	100	67.908.000	100	65.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.480.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		6.831.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	6.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.429.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.404.000		11.404.000		10.924.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	11.404.000	3	11.404.000	3	10.924.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		1.920.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		36.749.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	36.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.654.000		371.654.000		352.254.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	371.654.000	12	371.654.000	12	352.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		90.000.000		71.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.154.000		280.154.000		280.154.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	280.154.000	12	280.154.000	12	280.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		36.000.000		63.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	36.000.000	6	36.000.000	6	63.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.000.000		13.000.000		28.700.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	13.000.000	3	13.000.000	3	28.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		18.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		16.950.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	16.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	518.303.000	100	518.303.000	100	523.387.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.866.000		80.866.000		76.070.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.866.000	100	80.866.000	100	76.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.937.000		16.937.000		16.937.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	16.937.000	3	16.937.000	3	16.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		1.650.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.425.000		47.425.000		43.479.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	47.425.000	12	47.425.000	12	43.479.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					342.880.000		342.880.000		335.705.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	342.880.000	12	342.880.000	12	335.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		90.000.000		82.825.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	82.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				251.380.000		251.380.000		251.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	251.380.000	12	251.380.000	12	251.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.557.000		46.557.000		63.612.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	46.557.000	6	46.557.000	6	63.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.818.000		16.818.000		19.123.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	16.818.000	3	16.818.000	3	19.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		29.750.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	29.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.739.000		14.739.000		14.739.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	14.739.000	2	14.739.000	2	14.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	506.976.000	100	506.976.000	100	520.811.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.936.000		76.936.000		70.064.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	76.936.000	100	76.936.000	100	70.064.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.882.000		4.882.000		4.347.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.882.000	2	4.882.000	2	4.347.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.174.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.550.000		14.550.000		14.550.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	14.550.000	3	14.550.000	3	14.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.629.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		2.250.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		40.486.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	40.486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.540.000		330.540.000		322.985.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	330.540.000	12	330.540.000	12	322.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.370.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.800.000		82.800.000		75.375.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	82.800.000	12	82.800.000	12	75.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				246.240.000		246.240.000		246.240.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	246.240.000	12	246.240.000	12	246.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.500.000		51.500.000		79.762.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	51.500.000	6	51.500.000	6	79.762.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		21.694.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	21.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		41.440.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	41.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		16.500.000		16.628.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	1.004.321.000	100	1.004.321.000	100	950.142.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.231.000		75.231.000		67.839.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo	%	100	75.231.000	100	75.231.000	100	67.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.500.000		4.183.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		4.260.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.727.000		12.727.000		12.707.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.727.000	4	12.727.000	4	12.707.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.668.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		2.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		40.393.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	40.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					792.699.000		792.699.000		721.124.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	792.699.000	12	792.699.000	12	721.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.425.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.550.000		152.550.000		144.550.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	152.550.000	12	152.550.000	12	144.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				638.649.000		638.649.000		575.149.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	638.649.000	12	638.649.000	12	575.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					88.391.000		88.391.000		113.179.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	88.391.000	10	88.391.000	10	113.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.391.000		40.391.000		40.391.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	40.391.000	7	40.391.000	7	40.391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		65.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		7.788.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2	7.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	41.448.297.000	100	41.448.297.000	100	41.056.999.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.653.286.000		36.653.286.000		36.621.283.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	36.653.286.000	12	36.653.286.000	12	36.621.283.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				36.149.286.000		36.149.286.000		36.149.286.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	234	36.149.286.000	234	36.149.286.000	234	36.149.286.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				294.000.000		294.000.000		288.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	294.000.000	1	294.000.000	1	288.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110.000.000		110.000.000		99.976.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	110.000.000	12	110.000.000	12	99.976.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				100.000.000		100.000.000		84.021.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	84.021.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					318.218.000		318.218.000		315.335.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	318.218.000	12	318.218.000	12	315.335.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				294.500.000		294.500.000		293.589.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	294.500.000	3	294.500.000	3	293.589.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23.718.000		23.718.000		21.746.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	23.718.000	12	23.718.000	12	21.746.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.901.000		99.901.000		59.513.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	99.901.000	100	99.901.000	100	59.513.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				45.000.000		45.000.000		38.270.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	38.270.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		40.000.000		21.243.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	40.000.000	13	40.000.000	13	21.243.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.901.000		14.901.000		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	14.901.000	10	14.901.000	10	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					567.269.000		567.269.000		561.071.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	567.269.000	100	567.269.000	100	561.071.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.418.000		22.418.000		19.642.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.418.000	1	22.418.000	1	19.642.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.772.000		46.772.000		76.509.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.772.000	2	46.772.000	2	76.509.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.940.000		16.940.000		16.240.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.940.000	3	16.940.000	3	16.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.140.000		46.140.000		46.140.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	46.140.000	5	46.140.000	5	46.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.438.000		11.438.000		9.547.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.438.000	1	11.438.000	1	9.547.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.049.000		22.049.000		19.115.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	22.049.000	12	22.049.000	12	19.115.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378.022.000		378.022.000		351.025.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	378.022.000	12	378.022.000	12	351.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				23.490.000		23.490.000		22.853.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	23.490.000	12	23.490.000	12	22.853.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.332.051.000		3.332.051.000		2.953.720.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	3.332.051.000	12	3.332.051.000	12	2.953.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.190.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				614.246.000		624.246.000		423.261.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	614.246.000	12	624.246.000	12	423.261.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.250.000		13.250.000		9.805.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13.250.000	1	13.250.000	1	9.805.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.702.055.000		2.692.055.000		2.518.464.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.702.055.000	12	2.692.055.000	12	2.518.464.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					477.572.000		477.572.000		546.077.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	42	477.572.000	42	477.572.000	42	546.077.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		45.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				202.572.000		202.572.000		210.072.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	202.572.000	17	202.572.000	17	210.072.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		97.985.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	80.000.000	20	80.000.000	20	97.985.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		118.820.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	1	118.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		74.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	35.000.000	5	35.000.000	5	74.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	433.699.000	100	433.699.000	100	477.660.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					65.958.000		65.958.000		62.455.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	65.958.000	100	65.958.000	100	62.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	1	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.004.000		2.004.000		2.004.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.004.000	2	2.004.000	2	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.525.000		13.525.000		13.525.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.525.000	3	13.525.000	3	13.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		2.004.000		1.674.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	1	2.004.000	1	1.674.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		2.500.000		1.970.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.925.000		22.925.000		20.282.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	22.925.000	12	22.925.000	12	20.282.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					209.953.000		209.953.000		199.783.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	209.953.000	12	209.953.000	12	199.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		930.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.003.000		70.003.000		60.403.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	70.003.000	12	70.003.000	12	60.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				138.450.000		138.450.000		138.450.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	138.450.000	12	138.450.000	12	138.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.788.000		109.788.000		167.422.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	109.788.000	5	109.788.000	5	167.422.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.745.000		8.745.000		8.245.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	8.745.000	1	8.745.000	1	8.245.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.330.000		30.330.000		90.159.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.330.000	1	30.330.000	1	90.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.713.000		70.713.000		69.018.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	70.713.000	3	70.713.000	3	69.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								**557.500.000**		**557.500.000**		**432.559.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	3.11	557.500.000	3.11	557.500.000	3.11	432.559.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						557.500.000		557.500.000		432.559.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	557.500.000	100	557.500.000	100	432.559.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					557.500.000		557.500.000		432.559.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	557.500.000	100	557.500.000	100	432.559.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				160.592.000		160.592.000		106.099.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	160.592.000	5	160.592.000	5	106.099.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				334.701.000		334.701.000		282.266.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	334.701.000	15	334.701.000	15	282.266.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				31.427.000		31.427.000		23.862.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	31.427.000	4	31.427.000	4	23.862.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.780.000		30.780.000		20.332.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	30.780.000	2	30.780.000	2	20.332.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan									**923.631.000**		**923.631.000**		**831.332.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	360		360		360		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya ketersediaan air tanah								**923.631.000**		**923.631.000**		**831.332.000**		
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.67	923.631.000	3.67	923.631.000	3.67	831.332.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						923.631.000		923.631.000		831.332.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	285.463.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					300.000.000		300.000.000		285.463.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	285.463.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				300.000.000		300.000.000		285.463.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1100	300.000.000	1100	300.000.000	1100	285.463.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27.58	358.631.000	27.58	358.631.000	27.58	312.349.000	Bidang Geologi dan Air Tanah	
		3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					251.266.000		251.266.000		214.756.000		
						Jumlah Cakupan Wilayah Penyediaan Data Geologi Untuk Konservasi Di Jawa Tengah	Kabupaten/Kota	35	251.266.000	35	251.266.000	35	214.756.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				251.266.000		251.266.000		214.756.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	251.266.000	4	251.266.000	4	214.756.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					107.365.000		107.365.000		97.593.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	107.365.000	100	107.365.000	100	97.593.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				107.365.000		107.365.000		97.593.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	107.365.000	4	107.365.000	4	97.593.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.3	17.001.000	3.3	17.001.000	3.3	15.546.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					17.001.000		17.001.000		15.546.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	17.001.000	100	17.001.000	100	15.546.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				17.001.000		17.001.000		15.546.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	17.001.000	5	17.001.000	5	15.546.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.27	15.127.000	2.27	15.127.000	2.27	14.094.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					15.127.000		15.127.000		14.094.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	15.127.000	100	15.127.000	100	14.094.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				15.127.000		15.127.000		14.094.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	15.127.000	11	15.127.000	11	14.094.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.65	18.746.000	2.65	18.746.000	2.65	17.547.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					18.746.000		18.746.000		17.547.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	18.746.000	100	18.746.000	100	17.547.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				18.746.000		18.746.000		17.547.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	18.746.000	11	18.746.000	11	17.547.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6.99	52.574.000	6.99	52.574.000	6.99	39.239.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					52.574.000		52.574.000		39.239.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	52.574.000	100	52.574.000	100	39.239.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				52.574.000		52.574.000		39.239.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	32	52.574.000	32	52.574.000	32	39.239.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1.98	14.408.000	1.98	14.408.000	1.98	13.499.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					14.408.000		14.408.000		13.499.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	14.408.000	100	14.408.000	100	13.499.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				14.408.000		14.408.000		13.499.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	8	14.408.000	8	14.408.000	8	13.499.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.49	15.210.000	1.49	15.210.000	1.49	14.247.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					15.210.000		15.210.000		14.247.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	15.210.000	100	15.210.000	100	14.247.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				15.210.000		15.210.000		14.247.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	15.210.000	5	15.210.000	5	14.247.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.58	41.127.000	1.58	41.127.000	1.58	38.193.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					41.127.000		41.127.000		38.193.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	41.127.000	100	41.127.000	100	38.193.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				41.127.000		41.127.000		38.193.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	25	41.127.000	25	41.127.000	25	38.193.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.6	19.031.000	2.6	19.031.000	2.6	15.361.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					19.031.000		19.031.000		15.361.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	19.031.000	100	19.031.000	100	15.361.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				19.031.000		19.031.000		15.361.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	19.031.000	6	19.031.000	6	15.361.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	3.95	39.991.000	3.95	39.991.000	3.95	36.710.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					39.991.000		39.991.000		36.710.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	39.991.000	100	39.991.000	100	36.710.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.991.000		39.991.000		36.710.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	22	39.991.000	22	39.991.000	22	36.710.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2.98	31.785.000	2.98	31.785.000	2.98	29.084.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					31.785.000		31.785.000		29.084.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	31.785.000	100	31.785.000	100	29.084.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				31.785.000		31.785.000		29.084.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	31.785.000	11	31.785.000	11	29.084.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan									**5.344.901.000**		**5.344.901.000**		**5.439.887.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Intensitas Energi Primer	SBM/Rp	203.21		203.21		203.21		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Konsumsi Listrik per Kapita	KWh/Kapita	883.94		883.94		883.94		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Kontribusi PDRB sektor pertambangan	%	2.01		2.01		2.01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP)								**1.077.356.000**		**1.077.356.000**		**953.589.000**		
						Persentase Penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	63.5	1.077.356.000	63.5	1.077.356.000	63.5	953.589.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						1.077.356.000		1.077.356.000		953.589.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	95.000.000	100	95.000.000	100	80.320.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		3.29.03.1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					95.000.000		95.000.000		80.320.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	95.000.000	100	95.000.000	100	80.320.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				95.000.000		95.000.000		80.320.000		
						Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	242	95.000.000	242	95.000.000	296	80.320.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72.9	418.787.000	72.9	418.787.000	72.9	385.316.000	Bidang Mineral dan Batubara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				295.333.000		295.333.000		275.004.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	295.333.000	35	295.333.000	35	275.004.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				295.333.000		295.333.000		275.004.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	5	295.333.000	5	295.333.000	5	275.004.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					123.454.000		123.454.000		110.312.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	9.88	123.454.000	9.88	123.454.000	9.88	110.312.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				123.454.000		123.454.000		110.312.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	123.454.000	1	123.454.000	1	110.312.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72.9	43.366.000	72.9	43.366.000	72.9	38.536.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				43.366.000		43.366.000		38.536.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Kabupaten/Kota	3	43.366.000	3	43.366.000	3	38.536.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			9.789.000		9.789.000		8.915.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	6	9.789.000	6	9.789.000	6	8.915.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			33.577.000		33.577.000		29.621.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	7	33.577.000	7	33.577.000	7	29.621.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72.9	56.484.000	72.9	56.484.000	72.9	52.767.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				56.484.000		56.484.000		52.767.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Kabupaten/Kota	3	56.484.000	3	56.484.000	3	52.767.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			14.474.000		14.474.000		13.560.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10	14.474.000	10	14.474.000	10	13.560.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			42.010.000		42.010.000		39.207.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	22	42.010.000	22	42.010.000	22	39.207.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72.9	74.163.000	72.9	74.163.000	72.9	69.104.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				74.163.000		74.163.000		69.104.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Kabupaten/Kota	4	74.163.000	4	74.163.000	4	69.104.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			17.406.000		17.406.000		14.278.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10	17.406.000	10	17.406.000	10	14.278.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			56.757.000		56.757.000		54.826.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	28	56.757.000	28	56.757.000	28	54.826.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72.9	76.135.000	72.9	76.135.000	72.9	52.456.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				76.135.000		76.135.000		52.456.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Kabupaten/Kota	6	76.135.000	6	76.135.000	6	52.456.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			21.725.000		21.725.000		16.034.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	15	21.725.000	15	21.725.000	15	16.034.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			54.410.000		54.410.000		36.422.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	21	54.410.000	21	54.410.000	21	36.422.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	72.9	39.878.000	72.9	39.878.000	72.9	34.989.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				39.878.000		39.878.000		34.989.000		

						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Kabupaten/Kota	3	39.878.000	3	39.878.000	3	34.989.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				9.989.000		9.989.000		9.249.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7	9.989.000	7	9.989.000	7	9.249.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.889.000		29.889.000		25.740.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	9	29.889.000	9	29.889.000	9	25.740.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72.9	35.768.000	72.9	35.768.000	72.9	31.918.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				35.768.000		35.768.000		31.918.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Kabupaten/Kota	2	35.768.000	2	35.768.000	2	31.918.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				8.608.000		8.608.000		6.468.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	6	8.608.000	6	8.608.000	6	6.468.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				27.160.000		27.160.000		25.450.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	7	27.160.000	7	27.160.000	7	25.450.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72.9	40.018.000	72.9	40.018.000	72.9	36.979.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				40.018.000		40.018.000		36.979.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Kabupaten/Kota	3	40.018.000	3	40.018.000	3	36.979.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				10.799.000		10.799.000		9.949.000		

						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7	10.799.000	7	10.799.000	7	9.949.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			29.219.000		29.219.000		27.030.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	10	29.219.000	10	29.219.000	10	27.030.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72.9	58.019.000	72.9	58.019.000	72.9	49.155.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			58.019.000		58.019.000		49.155.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Kabupaten/Kota	2	58.019.000	2	58.019.000	2	49.155.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			11.915.000		11.915.000		10.143.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7	11.915.000	7	11.915.000	7	10.143.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			46.104.000		46.104.000		39.012.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	15	46.104.000	15	46.104.000	15	39.012.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72.9	54.450.000	72.9	54.450.000	72.9	47.398.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			54.450.000		54.450.000		47.398.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Kabupaten/Kota	4	54.450.000	4	54.450.000	4	47.398.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			16.309.000		16.309.000		12.602.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10	16.309.000	10	16.309.000	10	12.602.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			38.141.000		38.141.000		34.796.000		

						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	11	38.141.000	11	38.141.000	11	34.796.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72.9	85.288.000	72.9	85.288.000	72.9	74.651.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					85.288.000		85.288.000		74.651.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Kabupaten/Kota	5	85.288.000	5	85.288.000	5	74.651.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					24.866.000		24.866.000		21.452.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10	24.866.000	10	24.866.000	10	21.452.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					60.422.000		60.422.000		53.199.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	20	60.422.000	20	60.422.000	20	53.199.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer								**2.135.551.000**		**2.135.551.000**		**2.466.886.000**		
						Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	21.6	2.135.551.000	21.6	2.135.551.000	22.35	2.466.886.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						2.135.551.000		2.135.551.000		2.466.886.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972.99	500.631.000	972.99	500.631.000	1032.45	445.302.000	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					400.631.000		400.631.000		345.302.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	990	400.631.000	990	400.631.000	1070	345.302.000		
		3.29.05.1.07.0002			Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				400.631.000		400.631.000		345.302.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	400.631.000	1	400.631.000	1	345.302.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Bangunan yang Telah Menerapkan Konservasi Energi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	1	100.000.000	3	100.000.000	2	100.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26.08	47.520.000	26.08	47.520.000	17.38	46.464.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					47.520.000		47.520.000		46.464.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	8	47.520.000	8	47.520.000	8	46.464.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				47.520.000		47.520.000		46.464.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	47.520.000	2	47.520.000	2	46.464.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Kendeng Muria	Unit		0		0		0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98.93	140.760.000	98.93	140.760.000	98.93	140.172.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				0		0		0		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		140.760.000		140.172.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	150	140.760.000	150	140.760.000	150	140.172.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		140.760.000		140.172.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	1	140.760.000	1	140.172.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Solo	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit		0		0		0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28.97	91.520.000	28.97	91.520.000	28.97	90.512.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					91.520.000		91.520.000		90.512.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi	Orang	24	91.520.000	24	91.520.000	24	90.512.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				91.520.000		91.520.000		90.512.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	91.520.000	2	91.520.000	2	90.512.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Merapi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127.91	232.280.000	127.91	232.280.000	218.13	430.170.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					91.520.000		91.520.000		90.128.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Orang	24	91.520.000	24	91.520.000	24	90.128.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				91.520.000		91.520.000		90.128.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	91.520.000	2	91.520.000	2	90.128.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		140.760.000		340.042.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Orang	150	140.760.000	150	140.760.000	190	340.042.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		140.760.000		340.042.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	1	140.760.000	3	340.042.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		

						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Semarang - Demak	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0	0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57.95	131.520.000	57.95	131.520.000	57.95	129.879.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					131.520.000		131.520.000		129.879.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	40	131.520.000	40	131.520.000	40	129.879.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				131.520.000		131.520.000		129.879.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	131.520.000	2	131.520.000	2	129.879.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Selatan	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98.93	140.760.000	98.93	140.760.000	98.93	140.072.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				0		0		0		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		140.760.000		140.072.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	150	140.760.000	150	140.760.000	150	140.072.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		140.760.000		140.072.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	1	140.760.000	1	140.072.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Tengah	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144.05	261.520.000	144.05	261.520.000	189.16	360.057.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				0		0		0		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					261.520.000		261.520.000		360.057.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	320	261.520.000	320	261.520.000	340	360.057.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				261.520.000		261.520.000		360.057.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	2	261.520.000	2	261.520.000	4	360.057.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Utara	Unit		0		0		0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165.42	182.760.000	165.42	182.760.000	75.19	142.874.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				0		0		0		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					182.760.000		182.760.000		142.874.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	20	182.760.000	20	182.760.000	20	142.874.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				182.760.000		182.760.000		142.874.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	182.760.000	1	182.760.000	1	142.874.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Slamet Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45.11	120.760.000	45.11	120.760.000	45.11	120.223.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					0		0		0		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				0		0		0		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					120.760.000		120.760.000		120.223.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	20	120.760.000	20	120.760.000	20	120.223.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				120.760.000		120.760.000		120.223.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	120.760.000	1	120.760.000	1	120.223.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Slamet Utara	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179.64	285.520.000	179.64	285.520.000	202.67	421.161.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.05.1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					285.520.000		285.520.000		281.161.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo	Orang	84	285.520.000	84	285.520.000	84	281.161.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				285.520.000		285.520.000		281.161.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	7	285.520.000	7	285.520.000	7	281.161.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					0		0		140.000.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo	Orang	0	0	0	0	20	140.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				0		0		140.000.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	0	0	0	0	1	140.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.05.1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					0		0		0		
						Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Solo	Unit		0		0		0	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				0		0		0		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	0	0	0	0	0	0	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Terjaganya ketersediaan daya listrik								**2.131.994.000**		**2.131.994.000**		**2.019.412.000**		
						Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	2.131.994.000	1	2.131.994.000	1	2.019.412.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						2.131.994.000		2.131.994.000		2.019.412.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43.02	600.000.000	43.02	600.000.000	43.02	532.399.000	Bidang Ketenagalistrikan	
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan					600.000.000		600.000.000		532.399.000		

				Perdesaan										
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Jawa Tengah	%	97.4	600.000.000	97.4	600.000.000	97.4	532.399.000		
		3.29.06.1.06.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				600.000.000		600.000.000		532.399.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	6	600.000.000	6	600.000.000	6	532.399.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43.13	89.682.000	43.13	89.682.000	43.13	86.558.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					13.520.000		13.520.000		12.357.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria	%	100	13.520.000	100	13.520.000	100	12.357.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				13.520.000		13.520.000		12.357.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	9	13.520.000	9	13.520.000	9	12.357.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					13.412.000		13.412.000		12.225.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.7	13.412.000	43.7	13.412.000	43.7	12.225.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				13.412.000		13.412.000		12.225.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	13.412.000	7	13.412.000	7	12.225.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					62.750.000		62.750.000		61.976.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.4	62.750.000	97.4	62.750.000	97.4	61.976.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.376.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.376.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				61.250.000		61.250.000		60.600.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	50	61.250.000	50	61.250.000	50	60.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43.1	141.280.000	43.1	141.280.000	43.1	139.040.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					7.538.000		7.538.000		7.168.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	7.538.000	100	7.538.000	100	7.168.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				7.538.000		7.538.000		7.168.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	5	7.538.000	5	7.538.000	5	7.168.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					9.742.000		9.742.000		8.982.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.33	9.742.000	43.33	9.742.000	43.33	8.982.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9.742.000		9.742.000		8.982.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	9.742.000	7	9.742.000	7	8.982.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.890.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.890.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.390.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.390.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43.03	148.168.000	43.03	148.168.000	43.03	144.714.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					14.554.000		14.554.000		13.332.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	%	100	14.554.000	100	14.554.000	100	13.332.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				14.554.000		14.554.000		13.332.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	10	14.554.000	10	14.554.000	10	13.332.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					9.614.000		9.614.000		8.810.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.12	9.614.000	43.12	9.614.000	43.12	8.810.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9.614.000		9.614.000		8.810.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	9.614.000	7	9.614.000	7	8.810.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.572.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.572.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.370.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.370.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.202.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.202.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42.31	184.307.000	42.31	184.307.000	42.31	173.830.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					41.859.000		41.859.000		36.754.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang - Demak	%	100	41.859.000	100	41.859.000	100	36.754.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				41.859.000		41.859.000		36.754.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	29	41.859.000	29	41.859.000	29	36.754.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					17.948.000		17.948.000		14.056.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.04	17.948.000	43.04	17.948.000	43.04	14.056.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				17.948.000		17.948.000		14.056.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	13	17.948.000	13	17.948.000	13	14.056.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.500.000		124.500.000		123.020.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak	%	97.4	124.500.000	97.4	124.500.000	97.4	123.020.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.000.000		2.000.000		1.807.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.807.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.213.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.213.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43.13	147.000.000	43.13	147.000.000	43.13	144.363.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					8.910.000		8.910.000		8.540.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	%	100	8.910.000	100	8.910.000	100	8.540.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				8.910.000		8.910.000		8.540.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	8.910.000	6	8.910.000	6	8.540.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					14.090.000		14.090.000		12.933.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.7	14.090.000	43.7	14.090.000	43.7	12.933.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14.090.000		14.090.000		12.933.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	9	14.090.000	9	14.090.000	9	12.933.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.890.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.890.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.390.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.390.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43.07	135.977.000	43.07	135.977.000	43.07	133.514.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					6.479.000		6.479.000		5.920.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	%	100	6.479.000	100	6.479.000	100	5.920.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				6.479.000		6.479.000		5.920.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	5	6.479.000	5	6.479.000	5	5.920.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					5.498.000		5.498.000		5.028.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	42.81	5.498.000	42.81	5.498.000	42.81	5.028.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				5.498.000		5.498.000		5.028.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	5.498.000	4	5.498.000	4	5.028.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.566.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.5	124.000.000	97.5	124.000.000	97.5	122.566.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.370.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.370.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.196.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.196.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43.11	147.578.000	43.11	147.578.000	43.11	144.514.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					12.028.000		12.028.000		11.081.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	%	100	12.028.000	100	12.028.000	100	11.081.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				12.028.000		12.028.000		11.081.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	9	12.028.000	9	12.028.000	9	11.081.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					11.550.000		11.550.000		10.670.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.37	11.550.000	43.37	11.550.000	43.37	10.670.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				11.550.000		11.550.000		10.670.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	8	11.550.000	8	11.550.000	8	10.670.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.763.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.763.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.383.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.383.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.380.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.380.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43.11	158.376.000	43.11	158.376.000	43.11	149.721.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					17.426.000		17.426.000		13.759.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	%	100	17.426.000	100	17.426.000	100	13.759.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				17.426.000		17.426.000		13.759.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	11	17.426.000	11	17.426.000	11	13.759.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					16.950.000		16.950.000		13.358.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.31	16.950.000	43.31	16.950.000	43.31	13.358.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				16.950.000		16.950.000		13.358.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	16.950.000	11	16.950.000	11	13.358.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.604.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.604.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.104.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.104.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43.07	147.000.000	43.07	147.000.000	43.07	143.632.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					8.910.000		8.910.000		8.160.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	%	100	8.910.000	100	8.910.000	100	8.160.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				8.910.000		8.910.000		8.160.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	8.910.000	6	8.910.000	6	8.160.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					14.090.000		14.090.000		12.921.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.29	14.090.000	43.29	14.090.000	43.29	12.921.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14.090.000		14.090.000		12.921.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	10	14.090.000	10	14.090.000	10	12.921.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		124.000.000		122.551.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.4	124.000.000	97.4	124.000.000	97.4	122.551.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		1.500.000		1.373.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.373.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		122.500.000		121.178.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	100	122.500.000	100	121.178.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43.11	232.626.000	43.11	232.626.000	43.11	227.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					22.970.000		22.970.000		21.114.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Solo	%	100	22.970.000	100	22.970.000	100	21.114.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				22.970.000		22.970.000		21.114.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	22.970.000	6	22.970.000	6	21.114.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					23.906.000		23.906.000		21.895.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.17	23.906.000	43.17	23.906.000	43.17	21.895.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				23.906.000		23.906.000		21.895.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	23.906.000	6	23.906.000	6	21.895.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					185.750.000		185.750.000		184.118.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.4	185.750.000	97.4	185.750.000	97.4	184.118.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.000.000		2.000.000		1.843.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.843.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				183.750.000		183.750.000		182.275.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	150	183.750.000	150	183.750.000	150	182.275.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**54.922.127.000**		**54.922.127.000**		**54.395.649.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan									**53.787.345.000**		**53.787.345.000**		**52.909.890.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	83.85		83.85		83.85		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan								**53.000.652.000**		**53.000.652.000**		**52.074.869.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	95.52	53.000.652.000	95.52	53.000.652.000	95.52	52.074.869.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.000.652.000		53.000.652.000		52.074.869.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	%	100	3.848.955.000	100	3.848.955.000	100	3.822.532.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.880.000		77.880.000		77.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	77.880.000	12	77.880.000	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.880.000		77.880.000		77.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	77.880.000	12	77.880.000	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.960.000		30.960.000		30.960.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.960.000	1	30.960.000	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.960.000		30.960.000		30.960.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.960.000	1	30.960.000	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					197.559.000		197.559.000		190.430.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	197.559.000	100	197.559.000	100	190.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		14.110.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	20.000.000	16	20.000.000	16	14.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.559.000		55.559.000		55.559.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	55.559.000	48	55.559.000	12	55.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					233.000.000		233.000.000		220.323.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	233.000.000	4	233.000.000	4	220.323.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				233.000.000		233.000.000		220.323.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	233.000.000	4	233.000.000	4	220.323.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.773.556.000		2.773.556.000		2.762.160.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	2.773.556.000	2	2.773.556.000	2	2.762.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				340.000.000		340.000.000		331.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	340.000.000	12	340.000.000	12	331.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.433.556.000		2.433.556.000		2.431.160.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2.433.556.000	2	2.433.556.000	2	2.431.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					536.000.000		536.000.000		540.779.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	36	536.000.000	36	536.000.000	36	540.779.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		53.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	50.000.000	6	50.000.000	6	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		29.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	25.000.000	16	25.000.000	16	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				440.000.000		440.000.000		437.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	440.000.000	3	440.000.000	3	437.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		21.000.000		21.679.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	21.000.000	11	21.000.000	11	21.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	2.204.177.000	100	2.204.177.000	100	2.183.870.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					86.280.000		86.280.000		72.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	86.280.000	12	86.280.000	12	72.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				86.280.000		86.280.000		72.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	86.280.000	12	86.280.000	12	72.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.945.000		168.945.000		158.349.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	168.945.000	100	168.945.000	100	158.349.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		15.180.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	12	10.000.000	12	15.180.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		22.000.000		19.276.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	12	22.000.000	12	19.276.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		41.745.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	12	50.000.000	12	41.745.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.945.000		1.945.000		1.630.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.945.000	12	1.945.000	12	1.630.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		8.820.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	10.000.000	12	10.000.000	12	8.820.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		36.698.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	40.000.000	12	40.000.000	12	36.698.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	45.000.000	13	45.000.000	13	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.608.952.000		1.608.952.000		1.601.111.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	1.608.952.000	2	1.608.952.000	2	1.601.111.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				325.000.000		325.000.000		305.696.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	325.000.000	12	325.000.000	12	305.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.283.952.000		1.283.952.000		1.295.415.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.283.952.000	12	1.283.952.000	12	1.295.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.000.000		260.000.000		271.810.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	82	260.000.000	82	260.000.000	82	271.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	60.000.000	5	60.000.000	11	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				135.000.000		135.000.000		127.510.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	135.000.000	1	135.000.000	1	127.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		29.300.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	57	30.000.000	57	29.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	1.357.782.000	100	1.357.782.000	100	1.310.291.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.040.000		77.040.000		75.130.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	404	77.040.000	404	77.040.000	4	75.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.040.000		77.040.000		75.130.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	77.040.000	4	77.040.000	4	75.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.500.000		325.500.000		312.893.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	325.500.000	100	325.500.000	100	312.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.930.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		18.747.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	18.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				141.500.000		141.500.000		132.395.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	141.500.000	17	141.500.000	17	132.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		28.860.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	3	20.000.000	3	28.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000		18.000.000		16.205.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	18.000.000	2	18.000.000	2	16.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.000.000		112.000.000		102.756.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	112.000.000	12	112.000.000	12	102.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					761.028.000		761.028.000		729.854.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	761.028.000	24	761.028.000	24	729.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		185.000.000		158.966.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	185.000.000	12	185.000.000	12	158.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				576.028.000		576.028.000		570.888.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	576.028.000	12	576.028.000	12	570.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					184.214.000		184.214.000		182.414.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	184.214.000	40	184.214.000	40	182.414.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		21.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.214.000		121.214.000		121.214.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	121.214.000	12	121.214.000	12	121.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		17.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	20.000.000	2	20.000.000	2	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	2.040.364.000	100	2.040.364.000	100	1.850.885.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.120.000		78.120.000		74.520.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	78.120.000	5	78.120.000	5	74.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				78.120.000		78.120.000		74.520.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	78.120.000	5	78.120.000	5	74.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.750.000		404.750.000		409.549.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	404.750.000	100	404.750.000	100	409.549.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.373.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	5.000.000	10	5.000.000	10	4.373.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		27.512.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	12	12.000.000	12	27.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.500.000		21.500.000		27.950.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.500.000	1	21.500.000	1	27.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				301.820.000		301.820.000		291.089.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	301.820.000	4	301.820.000	4	291.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.405.000		2.405.000		2.405.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.405.000	1	2.405.000	1	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.025.000		12.025.000		10.395.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	12.025.000	2	12.025.000	2	10.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		45.825.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	45.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.365.494.000		1.365.494.000		1.120.737.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	6	1.365.494.000	6	1.365.494.000	6	1.120.737.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.050.000		307.050.000		272.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	307.050.000	4	307.050.000	4	272.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.058.444.000		1.058.444.000		848.137.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.058.444.000	2	1.058.444.000	2	848.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.000.000		147.000.000		201.079.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	147.000.000	33	147.000.000	33	201.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		41.793.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	25.000.000	3	25.000.000	3	41.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		81.136.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	5	81.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.000.000		17.000.000		23.150.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	17.000.000	20	17.000.000	20	23.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	41.923.196.000	100	41.923.196.000	100	41.294.644.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.811.706.000		31.811.706.000		31.467.717.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	31.811.706.000	4	31.811.706.000	4	31.467.717.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.761.706.000		30.761.706.000		30.761.706.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	187	30.761.706.000	185	30.761.706.000	190	30.761.706.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		1.000.000.000		658.001.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	658.001.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		48.010.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	50.000.000	3	50.000.000	3	48.010.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		125.000.000		148.652.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	148.652.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		25.000.000		48.652.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	48.652.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					615.000.000		615.000.000		627.770.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	615.000.000	100	615.000.000	100	627.770.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				55.000.000		55.000.000		76.500.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	55.000.000	1	55.000.000	1	76.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		42.570.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	50.000.000	20	50.000.000	20	42.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				510.000.000		510.000.000		508.700.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	287	510.000.000	300	510.000.000	300	508.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					855.150.000		855.150.000		1.081.237.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	855.150.000	100	855.150.000	100	1.081.237.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		41.285.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	3	30.000.000	4	41.285.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		69.636.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	50.000.000	4	50.000.000	5	69.636.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		103.473.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	103.473.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.750.000		133.750.000		154.589.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	133.750.000	12	133.750.000	12	154.589.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		35.018.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.000.000	2	12.000.000	3	35.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		110.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				399.400.000		399.400.000		529.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	399.400.000	12	399.400.000	12	529.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		10.000.000		19.574.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	19.574.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		20.000.000		18.262.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	18.262.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					580.000.000		580.000.000		875.840.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	23	580.000.000	23	580.000.000	48	875.840.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.000.000		580.000.000		875.840.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	580.000.000	21	580.000.000	48	875.840.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.746.740.000		6.746.740.000		5.570.207.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	0	6.746.740.000	0	6.746.740.000	4	5.570.207.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.320.000.000		1.320.000.000		925.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.320.000.000	12	1.320.000.000	12	925.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.426.740.000		5.426.740.000		4.645.207.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.426.740.000	5	5.426.740.000	5	4.645.207.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.189.600.000		1.189.600.000		1.523.221.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	1.189.600.000	0	1.189.600.000	50	1.523.221.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				245.000.000		245.000.000		262.973.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	245.000.000	13	245.000.000	13	262.973.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.000.000		160.000.000		170.648.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	250	160.000.000	250	160.000.000	150	170.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		25.000.000		90.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				550.000.000		550.000.000		630.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	550.000.000	2	550.000.000	2	630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	2	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				189.600.000		189.600.000		349.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75	189.600.000	75	189.600.000	75	349.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	1.626.178.000	100	1.626.178.000	100	1.612.647.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		76.080.000		71.520.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	1	76.080.000	1	71.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		76.080.000		71.520.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	76.080.000	1	76.080.000	1	71.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.000.000		138.000.000		134.425.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.000.000	100	138.000.000	100	134.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.385.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		32.000.000		32.252.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	32.000.000	4	32.000.000	4	32.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.698.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		28.000.000		28.970.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		4.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000		18.000.000		11.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	18.000.000	4	18.000.000	4	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		32.620.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	32.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.280.249.000		1.280.249.000		1.244.552.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.280.249.000	3	1.280.249.000	3	1.244.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				213.000.000		213.000.000		170.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	213.000.000	1	213.000.000	1	170.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.066.249.000		1.066.249.000		1.073.352.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.066.249.000	1	1.066.249.000	1	1.073.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.849.000		111.849.000		142.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	111.849.000	77	111.849.000	77	142.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.000.000		16.000.000		21.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	16.000.000	3	16.000.000	3	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		54.560.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	40.000.000	45	40.000.000	45	54.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.000.000		34.000.000		45.850.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34.000.000	1	34.000.000	1	45.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.349.000		13.349.000		12.240.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	13.349.000	20	13.349.000	20	12.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan								**786.693.000**		**786.693.000**		**835.021.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	3.07	786.693.000	3.07	786.693.000	3.07	835.021.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						786.693.000		786.693.000		835.021.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	786.693.000	100	786.693.000	100	835.021.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					786.693.000		786.693.000		835.021.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	786.693.000	100	786.693.000	100	835.021.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		284.057.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	250.000.000	5	250.000.000	5	284.057.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		341.224.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	250.000.000	5	250.000.000	5	341.224.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	25.000.000	28	25.000.000	28	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				261.693.000		261.693.000		184.740.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	261.693.000	2	261.693.000	2	184.740.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)									**33.550.000.000**		**33.550.000.000**		**32.962.828.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.26		4.3		4.3		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Sistem Logistik D?aerah								**33.550.000.000**		**33.550.000.000**		**32.962.828.000**		
						Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7.23	33.550.000.000	6.6	33.550.000.000	6.6	32.962.828.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						33.550.000.000		33.550.000.000		32.962.828.000		
						Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0.52	33.550.000.000	0.52	33.550.000.000	0.52	32.962.828.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					95.000.000		95.000.000		121.375.000		
						Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok	Unit	0	95.000.000	0	95.000.000	36	121.375.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				95.000.000		95.000.000		121.375.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	0	95.000.000	3	95.000.000	3	121.375.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.04.1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					33.455.000.000		33.455.000.000		32.841.453.000		
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	0	33.315.000.000	0	33.315.000.000	9	32.666.453.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.02.0002			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				33.315.000.000		33.315.000.000		32.666.453.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Laporan	0	33.315.000.000	3	33.315.000.000	3	32.666.453.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

						Daerah Provinsi								
						Jumlah lokasi pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Pantauan	Kabupaten/ Kota	0	140.000.000	0	140.000.000	35	175.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.02.0001			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				140.000.000		140.000.000		175.000.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	0	140.000.000	12	140.000.000	12	175.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)									**10.210.600.000**		**10.840.600.000**		**6.954.536.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.26		4.3		4.3		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan								**10.210.600.000**		**10.840.600.000**		**6.954.536.000**		
						PDRB Sektor Perdagangan	Milyar	235513.52	10.210.600.000	272562	10.840.600.000	272562	6.954.536.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.02.1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	4.65	70.000.000	4.65	70.000.000	4.65	70.000.000	Pokja Ekspor dan Impor	
		3.30.02.1.04.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	107000	70.000.000	107000	70.000.000	107000	70.000.000	Pokja Ekspor dan Impor	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	3	0	3	0	0	0	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					0		0		0		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Unit	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.02.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		
						Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						200.000.000		200.000.000		210.000.000		
						Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	200.000.000	3	200.000.000	3	210.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.03.1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					200.000.000		200.000.000		210.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Orang	0	200.000.000	0	200.000.000	200	210.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.03.1.01.0002			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				200.000.000		200.000.000		210.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	0	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.03.1.01.0003			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				0		0		0		
						Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.03.1.01.0004			Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi				0		0		0		
						Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						2.150.000.000		2.150.000.000		785.067.000		
						Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11.12	2.150.000.000	11.12	2.150.000.000	11.12	785.067.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.05.1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					2.150.000.000		2.150.000.000		785.067.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	218.172.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.05.1.01.0001			Pameran Dagang Internasional/Nasional				1.000.000.000		1.000.000.000		187.958.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	4	187.958.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.05.1.01.0003			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				500.000.000		500.000.000		30.214.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	500.000.000	30	500.000.000	15	30.214.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah	Dokumen	1	650.000.000	1	650.000.000	1	566.895.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	
		3.30.05.1.01.0004			Peningkatan Citra Produk Ekspor				650.000.000		650.000.000		566.895.000		
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	4	650.000.000	4	650.000.000	4	566.895.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						999.054.000		999.054.000		980.469.000		
						Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1.05	425.000.000	1.05	425.000.000	1.05	404.702.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.06.1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000		300.000.000		279.702.000		
						Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Kasus	12	300.000.000	12	300.000.000	12	279.702.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				300.000.000		300.000.000		279.702.000		
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	300.000.000	1	300.000.000	1	279.702.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan aduan masyarakat yang tertangani	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				0		0		0		
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah penambahan lembaga perlindungan konsumen yang aktif	Lembaga	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.01.0002			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen				0		0		0		
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.06.1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Unit	30	125.000.000	30	125.000.000	30	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	173.342.000	5	173.342.000	5.5	164.640.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
		3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					173.342.000		173.342.000		164.640.000		
						Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Dokumen	2695	140.000.000	2695	140.000.000	2995	135.298.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				70.000.000		70.000.000		67.649.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	2537	70.000.000	2537	70.000.000	2837	67.649.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				70.000.000		70.000.000		67.649.000		
						Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	158	70.000.000	158	70.000.000	158	67.649.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan sertifikasi	Dokumen	5	33.342.000	5	33.342.000	5	29.342.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				33.342.000		33.342.000		29.342.000		
						Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	5	33.342.000	5	33.342.000	5	29.342.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	400.712.000	2	400.712.000	2	411.127.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
		3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					400.712.000		400.712.000		411.127.000		
						Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Sertifikat	2100	250.712.000	2100	250.712.000	2100	240.300.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				120.000.000		120.000.000		114.743.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	800	120.000.000	1040	120.000.000	1040	114.743.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				130.712.000		130.712.000		125.557.000		
						Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	1300	130.712.000	1500	130.712.000	1500	125.557.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan sertifikasi	Dokumen	45	150.000.000	45	150.000.000	45	170.827.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				150.000.000		150.000.000		170.827.000		
						Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	45	150.000.000	60	150.000.000	60	170.827.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						6.791.546.000		7.421.546.000		4.909.000.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	6.791.546.000	10	7.421.546.000	10	4.909.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.07.1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					6.336.546.000		6.336.546.000		4.400.000.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	UMKM	0	6.336.546.000	0	6.336.546.000	100	4.400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				6.336.546.000		6.336.546.000		4.400.000.000		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	0	6.336.546.000	100	6.336.546.000	100	4.400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.07.1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					455.000.000		1.085.000.000		509.000.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Kelompok	0	455.000.000	0	1.085.000.000	10	509.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				455.000.000		1.085.000.000		509.000.000		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	0	455.000.000	9	1.085.000.000	10	509.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.30.07.1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					0		0		0		
						Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	0	0	0	0	0	0		
		3.30.07.1.03.0002			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0		0		0		
						Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)									**10.438.146.000**		**10.963.146.000**		**9.175.426.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4		3.95		3.95		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian								**10.438.146.000**		**10.963.146.000**		**9.175.426.000**		
						PDRB Sektor Perindustrian	Milyar	664756150.81	10.438.146.000	675350	10.963.146.000	675350	9.175.426.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						9.876.146.000		10.401.146.000		8.613.426.000		
						Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	1.830.000.000	10	2.355.000.000	10	3.135.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.830.000.000		2.355.000.000		3.135.000.000		
						Jumlah Sertifikasi Industri	Industri	87	1.830.000.000	87	2.355.000.000	84	3.135.000.000	Pokja Sarana Prasarana Industri	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.830.000.000		2.355.000.000		3.135.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1.830.000.000	1	2.355.000.000	1	3.135.000.000	Pokja Sarana Prasarana Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.4	140.000.000	4.4	140.000.000	4.4	130.296.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					140.000.000		140.000.000		130.296.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Pelaku Usaha	20	70.000.000	20	70.000.000	40	66.925.000	Pokja Pengembangan Kemasan	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				70.000.000		70.000.000		66.925.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	66.925.000	Pokja Pengembangan Kemasan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Industri	1	70.000.000	1	70.000.000	40	63.371.000	Pokja Industri Kreatif Digital	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70.000.000		70.000.000		63.371.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	63.371.000	Pokja Industri Kreatif Digital	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	110.000.000	5	110.000.000	5	103.056.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					110.000.000		110.000.000		103.056.000		
						Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Pelaku Usaha	180	70.000.000	180	70.000.000	180	65.531.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70.000.000		70.000.000		65.531.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	70.000.000	2	70.000.000	2	65.531.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Pelaku Usaha	70	40.000.000	70	40.000.000	70	37.525.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				40.000.000		40.000.000		37.525.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	40.000.000	2	40.000.000	2	37.525.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2.41	2.428.000.000	2.41	2.428.000.000	2.41	858.713.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.428.000.000		2.428.000.000		858.713.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Perwilayahan Industri	Kegiatan	2	1.875.000.000	2	1.875.000.000	2	305.713.000		
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1.875.000.000		1.875.000.000		305.713.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	1.875.000.000	2	1.875.000.000	2	305.713.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Industri Yang dilatih dan Jumlah Kegiatan fasiliatasi Pengembangan Teknologi Industri	Orang	95	553.000.000	95	553.000.000	95	553.000.000		
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				553.000.000		553.000.000		553.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	553.000.000	4	553.000.000	4	553.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6.23	5.368.146.000	6.23	5.368.146.000	6.23	4.386.361.000	Bidang Pemberdayaan Industri	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					5.368.146.000		5.368.146.000		4.386.361.000		
						Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan industri	Industri	256	5.368.146.000	256	5.368.146.000	256	4.386.361.000		
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.368.146.000		5.368.146.000		4.386.361.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	5.368.146.000	6	5.368.146.000	6	4.386.361.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						502.000.000		502.000.000		502.000.000		
						Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	502.000.000	6	502.000.000	6	502.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		3.31.03.1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					502.000.000		502.000.000		502.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Laporan / Dokumen	6	502.000.000	6	502.000.000	6	502.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				477.000.000		477.000.000		477.000.000		
						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	6	477.000.000	2	477.000.000	2	477.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen	10	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		3.31.04.1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Unit	1200	60.000.000	1200	60.000.000	1200	60.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Data dan Informasi Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	2	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)									**885.000.000**		**885.000.000**		**883.985.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4		3.95		3.95		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki								**885.000.000**		**885.000.000**		**883.985.000**		
						Persentase pe?ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	%	0.32	885.000.000	0.32	885.000.000	0.32	883.985.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						885.000.000		885.000.000		883.985.000		
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	885.000.000	86	885.000.000	86	883.985.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					885.000.000		885.000.000		883.985.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	Orang	100	314.500.000	100	314.500.000	100	317.640.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				314.500.000		314.500.000		317.640.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	314.500.000	2	314.500.000	2	317.640.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	Orang	200	570.500.000	200	570.500.000	200	566.345.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				570.500.000		570.500.000		566.345.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	570.500.000	2	570.500.000	2	566.345.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**108.871.091.000**		**110.026.091.000**		**102.886.665.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**427.000.853.000**		**438.427.061.000**		**423.602.087.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**427.000.853.000**		**438.427.061.000**		**423.602.087.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Angka	29.5	3.191.539.000	29.5	3.837.747.000	29.5	3.213.607.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.410.458.000		2.056.666.000		1.665.086.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71.42	120.398.000	71.42	120.398.000	71.42	111.124.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					120.398.000		120.398.000		111.124.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	2	120.398.000	2	120.398.000	2	111.124.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				120.398.000		120.398.000		111.124.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Dokumen	4	120.398.000	4	120.398.000	4	111.124.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91.43	144.920.000	91.43	144.920.000	91.43	116.028.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					144.920.000		144.920.000		116.028.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	144.920.000	1	144.920.000	1	116.028.000		
		4.01.02.1.01.0002			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				144.920.000		144.920.000		116.028.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	144.920.000	4	144.920.000	4	116.028.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71.43	214.847.000	71.43	214.847.000	71.43	174.424.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					214.847.000		214.847.000		174.424.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	214.847.000	2	214.847.000	2	174.424.000		
		4.01.02.1.02.0002			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				214.847.000		214.847.000		174.424.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	104.458.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah unit kerja yang difasilitasi pembangunan zona integritasnya	Unit Kerja	15	94.847.000	15	94.847.000	15	69.966.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	217.896.000	93	217.896.000	93	169.584.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					217.896.000		217.896.000		169.584.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	217.896.000	2	217.896.000	2	169.584.000		
		4.01.02.1.02.0003			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				217.896.000		217.896.000		169.584.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	4	217.896.000	4	217.896.000	4	169.584.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	164.094.000	92	164.094.000	92	133.126.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					164.094.000		164.094.000		133.126.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	164.094.000	1	164.094.000	1	133.126.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				164.094.000		164.094.000		133.126.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4	164.094.000	4	164.094.000	4	133.126.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59.52	145.202.000	59.52	145.202.000	59.52	112.452.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					145.202.000		145.202.000		112.452.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	145.202.000	2	145.202.000	2	112.452.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				145.202.000		145.202.000		112.452.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	145.202.000	4	145.202.000	4	112.452.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	71	199.101.000	71	199.101.000	71	158.501.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					199.101.000		199.101.000		158.501.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	199.101.000	2	199.101.000	2	158.501.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				199.101.000		199.101.000		158.501.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	2	189.071.000	2	189.071.000	2	156.176.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi	Laporan	0	10.030.000	0	10.030.000	1	2.325.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39.21	204.000.000	39.21	850.208.000	39.21	689.847.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					204.000.000		850.208.000		689.847.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	204.000.000	2	850.208.000	2	689.847.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				204.000.000		850.208.000		689.847.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	4	204.000.000	4	850.208.000	4	689.847.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.781.081.000		1.781.081.000		1.548.521.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	475.139.000	85	475.139.000	85	432.358.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					475.139.000		475.139.000		432.358.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	475.139.000	4	475.139.000	4	432.358.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				130.282.000		130.282.000		49.604.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	130.282.000	4	130.282.000	4	49.604.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.374.000		300.374.000		344.788.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	300.374.000	4	300.374.000	4	344.788.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				44.483.000		44.483.000		37.966.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	44.483.000	4	44.483.000	4	37.966.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Faslilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	839.176.000	92	839.176.000	92	782.462.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					839.176.000		839.176.000		782.462.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	549.326.000	4	529.326.000	4	437.470.000		
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				312.326.000		312.326.000		260.954.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	312.326.000	12	312.326.000	12	260.954.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				237.000.000		217.000.000		176.516.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	157.000.000	4	137.000.000	4	118.597.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	80.000.000	4	80.000.000	4	57.919.000		
						Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	%	75	289.850.000	75	309.850.000	75	344.992.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				289.850.000		309.850.000		344.992.000		
						Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	149.897.000	4	165.118.000	4	134.695.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	139.953.000	2	144.732.000	2	210.297.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	466.766.000	83	466.766.000	83	333.701.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					466.766.000		466.766.000		333.701.000		
						Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	466.766.000	4	466.766.000	4	333.701.000		
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				130.063.000		130.063.000		81.883.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8	130.063.000	8	130.063.000	8	81.883.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				86.703.000		86.703.000		75.317.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	86.703.000	4	86.703.000	4	75.317.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000		250.000.000		176.501.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	176.501.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Angka	44	6.395.000.000	44	6.395.000.000	44	5.517.956.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						4.640.000.000		4.640.000.000		4.131.912.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	206.218.000	85	206.218.000	85	166.796.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					206.218.000		206.218.000		166.796.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Dokumen	2	206.218.000	2	206.218.000	2	166.796.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				206.218.000		206.218.000		166.796.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	206.218.000	4	206.218.000	4	166.796.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	175.870.000	85	175.870.000	85	115.098.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					175.870.000		175.870.000		115.098.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	175.870.000	2	175.870.000	2	115.098.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				175.870.000		175.870.000		115.098.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	175.870.000	4	175.870.000	4	115.098.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	600.000.000	85	600.000.000	85	441.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					600.000.000		600.000.000		441.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	600.000.000	4	600.000.000	4	441.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				600.000.000		600.000.000		441.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	275.597.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	165.403.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	1.462.912.000	87	1.462.912.000	87	1.650.614.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.462.912.000		1.462.912.000		1.650.614.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	106.133.000	2	106.133.000	2	71.888.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				106.133.000		106.133.000		71.888.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	106.133.000	4	106.133.000	4	71.888.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Dokumen	2	125.000.000	2	125.000.000	2	78.047.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				125.000.000		125.000.000		78.047.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan	Dokumen	4	125.000.000	4	125.000.000	4	78.047.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Dokumen	2	1.231.779.000	2	1.231.779.000	2	1.500.679.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.231.779.000		1.231.779.000		1.500.679.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	231.779.000	4	231.779.000	4	200.679.000		
						Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Laporan	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.300.000.000		
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	355.000.000	55	355.000.000	55	291.183.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					355.000.000		355.000.000		291.183.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	146.741.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				180.000.000		180.000.000		146.741.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	146.741.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	175.000.000	2	175.000.000	2	144.442.000		
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				175.000.000		175.000.000		144.442.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	2	175.000.000	2	175.000.000	2	144.442.000		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	215.000.000	80	215.000.000	80	158.151.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					215.000.000		215.000.000		158.151.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	215.000.000	4	215.000.000	4	158.151.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				215.000.000		215.000.000		158.151.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	215.000.000	4	215.000.000	4	158.151.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2.3	750.000.000	2.3	750.000.000	2.3	478.637.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					750.000.000		750.000.000		478.637.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	750.000.000	4	750.000.000	4	478.637.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				750.000.000		750.000.000		478.637.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	232.767.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	245.870.000		
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1.95	875.000.000	1.95	875.000.000	1.95	830.433.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					875.000.000		875.000.000		830.433.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	875.000.000	4	875.000.000	4	830.433.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				875.000.000		875.000.000		830.433.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	361.486.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4	475.000.000	4	475.000.000	4	468.947.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.755.000.000		1.755.000.000		1.386.044.000		
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	740.000.000	86	740.000.000	86	476.307.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					740.000.000		740.000.000		476.307.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Dokumen	4	740.000.000	4	740.000.000	4	476.307.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				740.000.000		740.000.000		476.307.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	8	370.000.000	4	370.000.000	4	257.852.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	Laporan	8	370.000.000	4	370.000.000	4	218.455.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	625.000.000	90	625.000.000	90	526.911.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					625.000.000		625.000.000		526.911.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Dokumen	4	625.000.000	4	625.000.000	4	526.911.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				575.000.000		575.000.000		490.052.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	67.124.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD	Laporan	12	225.000.000	12	225.000.000	12	188.212.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Laporan	12	125.000.000	12	125.000.000	12	112.105.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	122.611.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				50.000.000		50.000.000		36.859.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	8	50.000.000	4	50.000.000	4	36.859.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	195.000.000	100	195.000.000	100	212.028.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		195.000.000		212.028.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	195.000.000	1	195.000.000	1	212.028.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				95.000.000		95.000.000		86.177.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	95.000.000	4	95.000.000	4	86.177.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		125.851.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.851.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86.5	195.000.000	86.5	195.000.000	86.5	170.798.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		195.000.000		170.798.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	195.000.000	4	195.000.000	4	170.798.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				195.000.000		195.000.000		170.798.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4	195.000.000	4	195.000.000	4	170.798.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka	37	417.414.314.000	37	428.194.314.000	37	414.870.524.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2.919.557.000		2.919.557.000		2.860.176.000		
						Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	1.686.294.000	100	1.686.294.000	100	1.369.505.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah					1.686.294.000		1.686.294.000		1.369.505.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100	1.214.294.000	100	1.214.294.000	100	1.024.902.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				1.214.294.000		1.214.294.000		1.024.902.000		
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	8	524.294.000	8	524.294.000	45	483.824.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	4	690.000.000	4	690.000.000	4	541.078.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	100	347.000.000	100	347.000.000	100	243.723.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				347.000.000		347.000.000		243.723.000		
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	4	75.000.000	4	75.000.000	160	86.865.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	272.000.000	4	272.000.000	4	156.858.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	%	95	125.000.000	95	125.000.000	95	100.880.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				125.000.000		125.000.000		100.880.000		
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	24.690.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	4	60.000.000	4	60.000.000	4	56.178.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	20.012.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	675.000.000	100	675.000.000	100	591.730.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					675.000.000		675.000.000		591.730.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	675.000.000	8	675.000.000	8	591.730.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				480.000.000		480.000.000		426.591.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	480.000.000	4	480.000.000	4	426.591.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				90.000.000		90.000.000		76.373.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	90.000.000	4	90.000.000	4	76.373.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.0003			Fasilitasi Penataan Wilayah				105.000.000		105.000.000		88.766.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	105.000.000	4	105.000.000	4	88.766.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	558.263.000	100	558.263.000	100	898.941.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah					558.263.000		558.263.000		898.941.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	80.000.000	3	80.000.000	3	68.356.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				80.000.000		80.000.000		68.356.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	68.356.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	202.874.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				100.000.000		100.000.000		202.874.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	7	100.000.000	7	100.000.000	7	202.874.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	378.263.000	100	378.263.000	100	627.711.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				378.263.000		378.263.000		627.711.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	378.263.000	37	378.263.000	37	627.711.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						411.638.757.000		422.418.757.000		409.511.144.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	600.000.000	85	600.000.000	85	448.574.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					600.000.000		600.000.000		448.574.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Dokumen	4	600.000.000	4	600.000.000	4	448.574.000		
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		164.820.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	164.820.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		200.000.000		161.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	4	160.000.000	4	160.000.000	4	136.873.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	40.000.000	4	40.000.000	4	25.077.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				200.000.000		200.000.000		121.804.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	4	157.043.000	4	157.043.000	4	90.261.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Dokumen	4	42.957.000	4	42.957.000	4	31.543.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	650.000.000	85	650.000.000	85	560.231.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					650.000.000		650.000.000		560.231.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Dokumen	4	650.000.000	4	650.000.000	4	560.231.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				200.000.000		200.000.000		178.990.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	178.990.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				450.000.000		450.000.000		381.241.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	180.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	200.691.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	410.388.757.000	63	421.168.757.000	63	408.502.339.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					410.388.757.000		421.168.757.000		408.502.339.000		
						Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	%	100	3.061.700.000	100	3.061.700.000	100	2.625.722.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				3.061.700.000		3.061.700.000		2.625.722.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Dokumen	1	1.206.000.000	1	1.206.000.000	1	857.821.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	4	1.855.700.000	4	1.855.700.000	4	1.767.901.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	85	407.327.057.000	85	418.107.057.000	85	405.876.617.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				407.327.057.000		418.107.057.000		405.876.617.000		
						Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan	Dokumen	1	250.000.000	2	250.000.000	2	224.840.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	2500	407.077.057.000	900	417.857.057.000	900	405.651.777.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.856.000.000		2.856.000.000		2.499.204.000		
						Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	1.321.326.000	100	1.321.326.000	100	1.224.997.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					1.321.326.000		1.321.326.000		1.224.997.000		
						Persentase bantuan hukum yang tertangani	%	100	1.321.326.000	100	1.321.326.000	100	1.224.997.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.321.326.000		1.321.326.000		1.224.997.000		
						Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	12	301.326.000	12	301.326.000	12	293.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	340	1.020.000.000	340	1.020.000.000	340	931.997.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	866.821.000	92	866.821.000	92	737.167.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					866.821.000		866.821.000		737.167.000		
						Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	%	30	169.967.000	30	169.967.000	30	130.892.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				169.967.000		169.967.000		130.892.000		
						Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	Dokumen	13	169.967.000	13	169.967.000	13	130.892.000		OPD Provinsi
						Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	%	91	175.530.000	91	175.530.000	91	166.810.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				175.530.000		175.530.000		166.810.000		
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	350	175.530.000	350	175.530.000	350	166.810.000		OPD Provinsi
						Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	91	64.361.000	91	64.361.000	91	63.350.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				64.361.000		64.361.000		63.350.000		
						Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	250	64.361.000	250	64.361.000	250	63.350.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	89.5	456.963.000	89.5	456.963.000	89.5	376.115.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				456.963.000		456.963.000		376.115.000		
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	40	456.963.000	40	456.963.000	40	376.115.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	151.540.000	86	151.540.000	86	140.898.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					151.540.000		151.540.000		140.898.000		
						Persentase Fasilitasi HAM Daerah	%	100	58.199.000	100	58.199.000	100	52.557.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				58.199.000		58.199.000		52.557.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah	Laporan	4	58.199.000	4	58.199.000	4	52.557.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani	%	85	93.341.000	85	93.341.000	85	88.341.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				93.341.000		93.341.000		88.341.000		
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	20	93.341.000	20	93.341.000	20	88.341.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	516.313.000	96	516.313.000	96	396.142.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					516.313.000		516.313.000		396.142.000		
						Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	%	96	516.313.000	96	516.313.000	96	396.142.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				516.313.000		516.313.000		396.142.000		
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	125	162.480.000	125	162.480.000	125	135.280.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II	Dokumen	130	179.093.000	130	179.093.000	130	123.958.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III	Dokumen	130	174.740.000	130	174.740.000	130	136.904.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**275.716.004.000**		**275.716.004.000**		**270.007.477.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**275.546.004.000**		**275.546.004.000**		**269.861.532.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	275.546.004.000	83	275.546.004.000	83	269.861.532.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						275.546.004.000		275.546.004.000		269.861.532.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	228.284.149.000	100	228.284.149.000	100	218.235.122.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					103.175.104.000		103.449.553.000		102.148.103.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	103.175.104.000	12	103.449.553.000	12	102.148.103.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.550.104.000		100.824.553.000		100.157.689.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	100.550.104.000	12	100.824.553.000	12	100.157.689.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000.000		2.000.000.000		1.397.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	1.397.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				475.000.000		475.000.000		470.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	475.000.000	12	475.000.000	12	470.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				150.000.000		150.000.000		123.414.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	123.414.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.250.000.000		1.250.000.000		1.264.096.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.264.096.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				750.000.000		750.000.000		820.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	750.000.000	12	750.000.000	12	820.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000.000		500.000.000		444.096.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	12	444.096.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		56.330.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	56.330.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000		50.000.000		56.330.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	56.330.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.325.000.000		14.325.000.000		16.754.586.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	14.325.000.000	100	14.325.000.000	100	16.754.586.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				550.000.000		550.000.000		575.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	550.000.000	12	550.000.000	12	575.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		700.000.000		750.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	700.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000.000		9.000.000.000		10.250.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.000.000.000	12	9.000.000.000	12	10.250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.000.000.000		3.000.000.000		4.104.586.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	4.104.586.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					28.004.338.000		27.864.338.000		16.521.663.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	28.004.338.000	2	27.864.338.000	2	16.521.663.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				700.000.000		1.252.500.000		1.000.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	700.000.000	4	1.252.500.000	4	1.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.304.338.000		26.611.838.000		15.521.663.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	27.304.338.000	30	26.611.838.000	30	15.521.663.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.468.016.000		39.358.016.000		37.904.785.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	39.468.016.000	12	39.358.016.000	12	37.904.785.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.200.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.268.016.000		30.158.016.000		28.404.785.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	29.218.516.000	12	29.108.516.000	12	27.380.426.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	299.500.000	12	299.500.000	12	398.656.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	750.000.000	2	750.000.000	2	625.703.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.100.000.000		15.350.000.000		17.191.755.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	15.100.000.000	833	15.350.000.000	833	17.191.755.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.116.755.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	182	4.000.000.000	182	4.000.000.000	182	4.116.755.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				100.000.000		100.000.000		125.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	100.000.000	30	100.000.000	30	125.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000.000		2.250.000.000		2.050.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	2.000.000.000	300	2.250.000.000	300	2.050.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.000.000.000		8.000.000.000		9.750.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	8.000.000.000	17	8.000.000.000	17	9.750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		750.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	600.000.000	300	600.000.000	300	750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.911.691.000		26.637.242.000		26.393.804.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.911.691.000	100	26.637.242.000	100	26.393.804.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		2.743.094.000		2.743.094.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2.743.094.000	2	2.743.094.000	2	2.743.094.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.168.597.000		23.894.148.000		23.650.710.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	24.168.597.000	2	23.894.148.000	2	23.650.710.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000	100	204.272.000	100	172.458.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.272.000		204.272.000		172.458.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000	100	204.272.000	100	172.458.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		151.359.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	151.359.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24.272.000		24.272.000		21.099.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.272.000	12	24.272.000	12	21.099.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000	100	421.074.000	100	574.567.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.074.000		421.074.000		574.567.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000	100	421.074.000	100	574.567.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.283.000		386.283.000		520.241.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	340.395.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	146.283.000	12	146.283.000	12	179.846.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				34.791.000		34.791.000		54.326.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	8.760.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.791.000	12	24.791.000	12	45.566.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	631.018.000	100	631.018.000	100	578.728.000	BIRO HUKUM	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					380.622.000		380.622.000		360.284.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	380.622.000	100	380.622.000	100	360.284.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				380.622.000		380.622.000		360.284.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1000	380.622.000	1000	380.622.000	1000	360.284.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.396.000		250.396.000		218.444.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	250.396.000	100	250.396.000	100	218.444.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213.686.000		213.686.000		186.963.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	213.686.000	12	213.686.000	12	186.963.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36.710.000		36.710.000		31.481.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	36.710.000	12	36.710.000	12	31.481.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	511.956.000	100	511.956.000	100	462.410.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					511.956.000		511.956.000		462.410.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	511.956.000	100	511.956.000	100	462.410.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000		450.000.000		388.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	182.763.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	206.087.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.956.000		61.956.000		73.560.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	12	8.956.000	12	8.956.000	12	25.644.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	53.000.000	12	53.000.000	12	47.916.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	10.535.000.000	100	10.535.000.000	100	12.562.445.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		212.071.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	212.071.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		150.000.000		212.071.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	212.071.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		40.000.000		36.482.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	36.482.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40.000.000		40.000.000		36.482.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	36.482.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					460.000.000		460.000.000		560.000.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	460.000.000	100	460.000.000	100	560.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				400.000.000		400.000.000		500.000.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	400.000.000	8	400.000.000	8	500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					9.385.000.000		9.385.000.000		11.280.847.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	9.385.000.000	100	9.385.000.000	100	11.280.847.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				4.000.000.000		4.000.000.000		5.470.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	5.470.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.200.000.000		3.200.000.000		3.878.847.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	3.200.000.000	12	3.200.000.000	12	3.878.847.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.185.000.000		2.185.000.000		1.932.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.885.000.000	12	1.885.000.000	12	1.632.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan	Paket	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					500.000.000		500.000.000		473.045.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	12	473.045.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				500.000.000		500.000.000		473.045.000		
						Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	500.000.000	12	500.000.000	12	473.045.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	32.173.932.000	100	32.173.932.000	100	34.847.692.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					238.000.000		238.000.000		310.084.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	238.000.000	100	238.000.000	100	310.084.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				68.000.000		68.000.000		55.600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	68.000.000	12	68.000.000	12	55.600.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				170.000.000		170.000.000		254.484.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	170.000.000	4	170.000.000	4	254.484.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					28.564.057.000		28.564.057.000		31.082.308.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Laporan	12	28.564.057.000	12	28.564.057.000	12	31.082.308.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				24.071.431.000		24.071.431.000		26.317.431.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	24.071.431.000	12	24.071.431.000	12	26.317.431.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				4.492.626.000		4.492.626.000		4.764.877.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	4.492.626.000	12	4.492.626.000	12	4.764.877.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan					3.371.875.000		3.371.875.000		3.455.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	1	3.371.875.000	1	3.371.875.000	1	3.455.300.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				3.001.846.000		3.001.846.000		3.141.335.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	3.001.846.000	12	3.001.846.000	12	3.141.335.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				70.029.000		70.029.000		13.965.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	1	70.029.000	1	70.029.000	1	13.965.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000	100	1.630.155.000	100	1.404.708.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.630.155.000		1.630.155.000		1.404.708.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000	100	1.630.155.000	100	1.404.708.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.120.000		565.120.000		498.086.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	565.120.000	3	565.120.000	3	498.086.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.065.035.000		1.065.035.000		906.622.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	1.065.035.000	6	1.065.035.000	6	906.622.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	590.064.000	100	590.064.000	100	535.835.000	BIRO ORGANISASI	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					135.678.000		135.678.000		105.206.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	135.678.000	100	135.678.000	100	105.206.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80.682.000		80.682.000		68.466.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	80.682.000	4	80.682.000	4	68.466.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				54.996.000		54.996.000		36.740.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	54.996.000	12	54.996.000	12	36.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					454.386.000		454.386.000		430.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	454.386.000	100	454.386.000	100	430.629.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				395.969.000		395.969.000		380.645.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	207.193.000	12	207.193.000	12	226.625.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	188.776.000	12	188.776.000	12	154.020.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				58.417.000		58.417.000		49.984.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	15.184.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	38.417.000	12	38.417.000	12	34.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000	100	346.500.000	100	303.906.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					346.500.000		346.500.000		303.906.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000	100	346.500.000	100	303.906.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				331.281.000		331.281.000		289.840.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	331.281.000	24	331.281.000	24	289.840.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.219.000		15.219.000		14.066.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.219.000	12	15.219.000	12	14.066.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	217.884.000	100	217.884.000	100	183.661.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.884.000		217.884.000		183.661.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	217.884.000	100	217.884.000	100	183.661.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.884.000		202.884.000		174.002.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	202.884.000	12	202.884.000	12	174.002.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		15.000.000		9.659.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	9.659.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**170.000.000**		**170.000.000**		**145.945.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	3	170.000.000	3	170.000.000	3	145.945.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						170.000.000		170.000.000		145.945.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	90	170.000.000	100	170.000.000	100	145.945.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					170.000.000		170.000.000		145.945.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	170.000.000	100	170.000.000	100	145.945.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		60.559.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	70.000.000	4	70.000.000	4	60.559.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		85.386.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	100.000.000	6	100.000.000	6	85.386.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**702.716.857.000**		**714.143.065.000**		**693.609.564.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO HUKUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.856.000.000**		**2.856.000.000**		**2.499.204.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**2.856.000.000**		**2.856.000.000**		**2.499.204.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka	37	2.856.000.000	37	2.856.000.000	37	2.499.204.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.856.000.000		2.856.000.000		2.499.204.000		
						Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	1.321.326.000	100	1.321.326.000	100	1.224.997.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					1.321.326.000		1.321.326.000		1.224.997.000		
						Persentase bantuan hukum yang tertangani	%	100	1.321.326.000	100	1.321.326.000	100	1.224.997.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.321.326.000		1.321.326.000		1.224.997.000		
						Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	12	301.326.000	12	301.326.000	12	293.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	340	1.020.000.000	340	1.020.000.000	340	931.997.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	866.821.000	92	866.821.000	92	737.167.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					866.821.000		866.821.000		737.167.000		
						Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	%	30	169.967.000	30	169.967.000	30	130.892.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				169.967.000		169.967.000		130.892.000		
						Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	Dokumen	13	169.967.000	13	169.967.000	13	130.892.000		OPD Provinsi
						Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	%	91	175.530.000	91	175.530.000	91	166.810.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				175.530.000		175.530.000		166.810.000		
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	350	175.530.000	350	175.530.000	350	166.810.000		OPD Provinsi
						Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	91	64.361.000	91	64.361.000	91	63.350.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				64.361.000		64.361.000		63.350.000		
						Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	250	64.361.000	250	64.361.000	250	63.350.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	89.5	456.963.000	89.5	456.963.000	89.5	376.115.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				456.963.000		456.963.000		376.115.000		
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	40	456.963.000	40	456.963.000	40	376.115.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	151.540.000	86	151.540.000	86	140.898.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					151.540.000		151.540.000		140.898.000		
						Persentase Fasilitasi HAM Daerah	%	100	58.199.000	100	58.199.000	100	52.557.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				58.199.000		58.199.000		52.557.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah	Laporan	4	58.199.000	4	58.199.000	4	52.557.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani	%	85	93.341.000	85	93.341.000	85	88.341.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				93.341.000		93.341.000		88.341.000		
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	20	93.341.000	20	93.341.000	20	88.341.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	516.313.000	96	516.313.000	96	396.142.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					516.313.000		516.313.000		396.142.000		
						Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	%	96	516.313.000	96	516.313.000	96	396.142.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				516.313.000		516.313.000		396.142.000		
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	125	162.480.000	125	162.480.000	125	135.280.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II	Dokumen	130	179.093.000	130	179.093.000	130	123.958.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III	Dokumen	130	174.740.000	130	174.740.000	130	136.904.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**631.018.000**		**631.018.000**		**578.728.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**631.018.000**		**631.018.000**		**578.728.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	631.018.000	83	631.018.000	83	578.728.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						631.018.000		631.018.000		578.728.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	631.018.000	100	631.018.000	100	578.728.000	BIRO HUKUM	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					380.622.000		380.622.000		360.284.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	380.622.000	100	380.622.000	100	360.284.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				380.622.000		380.622.000		360.284.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1000	380.622.000	1000	380.622.000	1000	360.284.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.396.000		250.396.000		218.444.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	250.396.000	100	250.396.000	100	218.444.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213.686.000		213.686.000		186.963.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	213.686.000	12	213.686.000	12	186.963.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36.710.000		36.710.000		31.481.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	36.710.000	12	36.710.000	12	31.481.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**3.487.018.000**		**3.487.018.000**		**3.077.932.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.755.000.000**		**1.755.000.000**		**1.386.044.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**1.755.000.000**		**1.755.000.000**		**1.386.044.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Angka	44	1.755.000.000	44	1.755.000.000	44	1.386.044.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.755.000.000		1.755.000.000		1.386.044.000		
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	740.000.000	86	740.000.000	86	476.307.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					740.000.000		740.000.000		476.307.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Dokumen	4	740.000.000	4	740.000.000	4	476.307.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				740.000.000		740.000.000		476.307.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	8	370.000.000	4	370.000.000	4	257.852.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	Laporan	8	370.000.000	4	370.000.000	4	218.455.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	625.000.000	90	625.000.000	90	526.911.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					625.000.000		625.000.000		526.911.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Dokumen	4	625.000.000	4	625.000.000	4	526.911.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				575.000.000		575.000.000		490.052.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	67.124.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD	Laporan	12	225.000.000	12	225.000.000	12	188.212.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Laporan	12	125.000.000	12	125.000.000	12	112.105.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	122.611.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				50.000.000		50.000.000		36.859.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	8	50.000.000	4	50.000.000	4	36.859.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	195.000.000	100	195.000.000	100	212.028.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		195.000.000		212.028.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	195.000.000	1	195.000.000	1	212.028.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				95.000.000		95.000.000		86.177.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	95.000.000	4	95.000.000	4	86.177.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		125.851.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.851.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86.5	195.000.000	86.5	195.000.000	86.5	170.798.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		195.000.000		170.798.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	195.000.000	4	195.000.000	4	170.798.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				195.000.000		195.000.000		170.798.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4	195.000.000	4	195.000.000	4	170.798.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**516.500.000**		**516.500.000**		**449.851.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**346.500.000**		**346.500.000**		**303.906.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	346.500.000	83	346.500.000	83	303.906.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						346.500.000		346.500.000		303.906.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000	100	346.500.000	100	303.906.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					346.500.000		346.500.000		303.906.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000	100	346.500.000	100	303.906.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				331.281.000		331.281.000		289.840.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	331.281.000	24	331.281.000	24	289.840.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.219.000		15.219.000		14.066.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.219.000	12	15.219.000	12	14.066.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**170.000.000**		**170.000.000**		**145.945.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	3	170.000.000	3	170.000.000	3	145.945.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						170.000.000		170.000.000		145.945.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	90	170.000.000	100	170.000.000	100	145.945.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					170.000.000		170.000.000		145.945.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	170.000.000	100	170.000.000	100	145.945.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		60.559.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	70.000.000	4	70.000.000	4	60.559.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		85.386.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	100.000.000	6	100.000.000	6	85.386.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.271.500.000**		**2.271.500.000**		**1.835.895.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.660.000.000**		**2.660.000.000**		**2.531.659.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**2.660.000.000**		**2.660.000.000**		**2.531.659.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Angka	44	2.660.000.000	44	2.660.000.000	44	2.531.659.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.660.000.000		2.660.000.000		2.531.659.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	206.218.000	85	206.218.000	85	166.796.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					206.218.000		206.218.000		166.796.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Dokumen	2	206.218.000	2	206.218.000	2	166.796.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				206.218.000		206.218.000		166.796.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	206.218.000	4	206.218.000	4	166.796.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	175.870.000	85	175.870.000	85	115.098.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					175.870.000		175.870.000		115.098.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	175.870.000	2	175.870.000	2	115.098.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				175.870.000		175.870.000		115.098.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	175.870.000	4	175.870.000	4	115.098.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	600.000.000	85	600.000.000	85	441.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					600.000.000		600.000.000		441.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	600.000.000	4	600.000.000	4	441.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				600.000.000		600.000.000		441.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	275.597.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	165.403.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	1.462.912.000	87	1.462.912.000	87	1.650.614.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.462.912.000		1.462.912.000		1.650.614.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	106.133.000	2	106.133.000	2	71.888.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				106.133.000		106.133.000		71.888.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	106.133.000	4	106.133.000	4	71.888.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Dokumen	2	125.000.000	2	125.000.000	2	78.047.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				125.000.000		125.000.000		78.047.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan	Dokumen	4	125.000.000	4	125.000.000	4	78.047.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Dokumen	2	1.231.779.000	2	1.231.779.000	2	1.500.679.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.231.779.000		1.231.779.000		1.500.679.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	231.779.000	4	231.779.000	4	200.679.000		
						Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Laporan	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.300.000.000		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	215.000.000	80	215.000.000	80	158.151.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					215.000.000		215.000.000		158.151.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	215.000.000	4	215.000.000	4	158.151.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				215.000.000		215.000.000		158.151.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	215.000.000	4	215.000.000	4	158.151.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**217.884.000**		**217.884.000**		**183.661.000**	**Sekretariat Daerah**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**217.884.000**		**217.884.000**		**183.661.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	217.884.000	83	217.884.000	83	183.661.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						217.884.000		217.884.000		183.661.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	217.884.000	100	217.884.000	100	183.661.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.884.000		217.884.000		183.661.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	217.884.000	100	217.884.000	100	183.661.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.884.000		202.884.000		174.002.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	202.884.000	12	202.884.000	12	174.002.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		15.000.000		9.659.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	9.659.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.877.884.000**		**2.877.884.000**		**2.715.320.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**411.638.757.000**		**422.418.757.000**		**409.511.144.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**411.638.757.000**		**422.418.757.000**		**409.511.144.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka	37	411.638.757.000	37	422.418.757.000	37	409.511.144.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						411.638.757.000		422.418.757.000		409.511.144.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	600.000.000	85	600.000.000	85	448.574.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					600.000.000		600.000.000		448.574.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Dokumen	4	600.000.000	4	600.000.000	4	448.574.000		
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		164.820.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	164.820.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		200.000.000		161.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	4	160.000.000	4	160.000.000	4	136.873.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	40.000.000	4	40.000.000	4	25.077.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				200.000.000		200.000.000		121.804.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	4	157.043.000	4	157.043.000	4	90.261.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Dokumen	4	42.957.000	4	42.957.000	4	31.543.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	650.000.000	85	650.000.000	85	560.231.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					650.000.000		650.000.000		560.231.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Dokumen	4	650.000.000	4	650.000.000	4	560.231.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				200.000.000		200.000.000		178.990.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	178.990.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				450.000.000		450.000.000		381.241.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	180.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	200.691.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	410.388.757.000	63	421.168.757.000	63	408.502.339.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					410.388.757.000		421.168.757.000		408.502.339.000		
						Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	%	100	3.061.700.000	100	3.061.700.000	100	2.625.722.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				3.061.700.000		3.061.700.000		2.625.722.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Dokumen	1	1.206.000.000	1	1.206.000.000	1	857.821.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	4	1.855.700.000	4	1.855.700.000	4	1.767.901.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	85	407.327.057.000	85	418.107.057.000	85	405.876.617.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				407.327.057.000		418.107.057.000		405.876.617.000		
						Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan	Dokumen	1	250.000.000	2	250.000.000	2	224.840.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	2500	407.077.057.000	900	417.857.057.000	900	405.651.777.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**1.630.155.000**		**1.630.155.000**		**1.404.708.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**1.630.155.000**		**1.630.155.000**		**1.404.708.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	1.630.155.000	83	1.630.155.000	83	1.404.708.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.630.155.000		1.630.155.000		1.404.708.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000	100	1.630.155.000	100	1.404.708.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.630.155.000		1.630.155.000		1.404.708.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000	100	1.630.155.000	100	1.404.708.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.120.000		565.120.000		498.086.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	565.120.000	3	565.120.000	3	498.086.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.065.035.000		1.065.035.000		906.622.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	1.065.035.000	6	1.065.035.000	6	906.622.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**413.268.912.000**		**424.048.912.000**		**410.915.852.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.410.458.000**		**2.056.666.000**		**1.665.086.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**1.410.458.000**		**2.056.666.000**		**1.665.086.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Angka	29.5	1.410.458.000	29.5	2.056.666.000	29.5	1.665.086.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.410.458.000		2.056.666.000		1.665.086.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71.42	120.398.000	71.42	120.398.000	71.42	111.124.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					120.398.000		120.398.000		111.124.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	2	120.398.000	2	120.398.000	2	111.124.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				120.398.000		120.398.000		111.124.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Dokumen	4	120.398.000	4	120.398.000	4	111.124.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91.43	144.920.000	91.43	144.920.000	91.43	116.028.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					144.920.000		144.920.000		116.028.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	144.920.000	1	144.920.000	1	116.028.000		
		4.01.02.1.01.0002			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				144.920.000		144.920.000		116.028.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	144.920.000	4	144.920.000	4	116.028.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71.43	214.847.000	71.43	214.847.000	71.43	174.424.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					214.847.000		214.847.000		174.424.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	214.847.000	2	214.847.000	2	174.424.000		
		4.01.02.1.02.0002			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				214.847.000		214.847.000		174.424.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	104.458.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah unit kerja yang difasilitasi pembangunan zona integritasnya	Unit Kerja	15	94.847.000	15	94.847.000	15	69.966.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	217.896.000	93	217.896.000	93	169.584.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					217.896.000		217.896.000		169.584.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	217.896.000	2	217.896.000	2	169.584.000		
		4.01.02.1.02.0003			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				217.896.000		217.896.000		169.584.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	4	217.896.000	4	217.896.000	4	169.584.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	164.094.000	92	164.094.000	92	133.126.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					164.094.000		164.094.000		133.126.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	164.094.000	1	164.094.000	1	133.126.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				164.094.000		164.094.000		133.126.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4	164.094.000	4	164.094.000	4	133.126.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59.52	145.202.000	59.52	145.202.000	59.52	112.452.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					145.202.000		145.202.000		112.452.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	145.202.000	2	145.202.000	2	112.452.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				145.202.000		145.202.000		112.452.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	145.202.000	4	145.202.000	4	112.452.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	71	199.101.000	71	199.101.000	71	158.501.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					199.101.000		199.101.000		158.501.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	199.101.000	2	199.101.000	2	158.501.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				199.101.000		199.101.000		158.501.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	2	189.071.000	2	189.071.000	2	156.176.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi	Laporan	0	10.030.000	0	10.030.000	1	2.325.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39.21	204.000.000	39.21	850.208.000	39.21	689.847.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					204.000.000		850.208.000		689.847.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	204.000.000	2	850.208.000	2	689.847.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				204.000.000		850.208.000		689.847.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	4	204.000.000	4	850.208.000	4	689.847.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**590.064.000**		**590.064.000**		**535.835.000**	**Sekretariat Daerah**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**590.064.000**		**590.064.000**		**535.835.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	590.064.000	83	590.064.000	83	535.835.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						590.064.000		590.064.000		535.835.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	590.064.000	100	590.064.000	100	535.835.000	BIRO ORGANISASI	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					135.678.000		135.678.000		105.206.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	135.678.000	100	135.678.000	100	105.206.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80.682.000		80.682.000		68.466.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	80.682.000	4	80.682.000	4	68.466.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				54.996.000		54.996.000		36.740.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	54.996.000	12	54.996.000	12	36.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					454.386.000		454.386.000		430.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	454.386.000	100	454.386.000	100	430.629.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				395.969.000		395.969.000		380.645.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	207.193.000	12	207.193.000	12	226.625.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	188.776.000	12	188.776.000	12	154.020.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				58.417.000		58.417.000		49.984.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	15.184.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	38.417.000	12	38.417.000	12	34.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.000.522.000**		**2.646.730.000**		**2.200.921.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO UMUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**270.993.081.000**		**270.993.081.000**		**265.645.259.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**270.993.081.000**		**270.993.081.000**		**265.645.259.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	270.993.081.000	83	270.993.081.000	83	265.645.259.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						270.993.081.000		270.993.081.000		265.645.259.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	228.284.149.000	100	228.284.149.000	100	218.235.122.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					103.175.104.000		103.449.553.000		102.148.103.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	103.175.104.000	12	103.449.553.000	12	102.148.103.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.550.104.000		100.824.553.000		100.157.689.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	100.550.104.000	12	100.824.553.000	12	100.157.689.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000.000		2.000.000.000		1.397.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	1.397.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				475.000.000		475.000.000		470.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	475.000.000	12	475.000.000	12	470.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				150.000.000		150.000.000		123.414.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	123.414.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.250.000.000		1.250.000.000		1.264.096.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.264.096.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				750.000.000		750.000.000		820.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	750.000.000	12	750.000.000	12	820.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000.000		500.000.000		444.096.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	12	444.096.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		56.330.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	56.330.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000		50.000.000		56.330.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	56.330.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.325.000.000		14.325.000.000		16.754.586.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	14.325.000.000	100	14.325.000.000	100	16.754.586.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				550.000.000		550.000.000		575.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	550.000.000	12	550.000.000	12	575.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		700.000.000		750.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	700.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000.000		9.000.000.000		10.250.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.000.000.000	12	9.000.000.000	12	10.250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.000.000.000		3.000.000.000		4.104.586.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	4.104.586.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					28.004.338.000		27.864.338.000		16.521.663.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	28.004.338.000	2	27.864.338.000	2	16.521.663.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				700.000.000		1.252.500.000		1.000.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	700.000.000	4	1.252.500.000	4	1.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.304.338.000		26.611.838.000		15.521.663.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	27.304.338.000	30	26.611.838.000	30	15.521.663.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.468.016.000		39.358.016.000		37.904.785.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	39.468.016.000	12	39.358.016.000	12	37.904.785.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000	12	8.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.200.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.268.016.000		30.158.016.000		28.404.785.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	29.218.516.000	12	29.108.516.000	12	27.380.426.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	299.500.000	12	299.500.000	12	398.656.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	750.000.000	2	750.000.000	2	625.703.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.100.000.000		15.350.000.000		17.191.755.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	15.100.000.000	833	15.350.000.000	833	17.191.755.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.116.755.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	182	4.000.000.000	182	4.000.000.000	182	4.116.755.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				100.000.000		100.000.000		125.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	100.000.000	30	100.000.000	30	125.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000.000		2.250.000.000		2.050.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	2.000.000.000	300	2.250.000.000	300	2.050.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.000.000.000		8.000.000.000		9.750.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	8.000.000.000	17	8.000.000.000	17	9.750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		750.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	600.000.000	300	600.000.000	300	750.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.911.691.000		26.637.242.000		26.393.804.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.911.691.000	100	26.637.242.000	100	26.393.804.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		2.743.094.000		2.743.094.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2.743.094.000	2	2.743.094.000	2	2.743.094.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.168.597.000		23.894.148.000		23.650.710.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	24.168.597.000	2	23.894.148.000	2	23.650.710.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	10.535.000.000	100	10.535.000.000	100	12.562.445.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		212.071.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	212.071.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		150.000.000		212.071.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	212.071.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		40.000.000		36.482.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	36.482.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40.000.000		40.000.000		36.482.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	36.482.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					460.000.000		460.000.000		560.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	460.000.000	100	460.000.000	100	560.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				400.000.000		400.000.000		500.000.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	400.000.000	8	400.000.000	8	500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					9.385.000.000		9.385.000.000		11.280.847.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	9.385.000.000	100	9.385.000.000	100	11.280.847.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				4.000.000.000		4.000.000.000		5.470.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	5.470.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.200.000.000		3.200.000.000		3.878.847.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	3.200.000.000	12	3.200.000.000	12	3.878.847.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.185.000.000		2.185.000.000		1.932.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.885.000.000	12	1.885.000.000	12	1.632.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan	Paket	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					500.000.000		500.000.000		473.045.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	12	473.045.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				500.000.000		500.000.000		473.045.000		
						Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	500.000.000	12	500.000.000	12	473.045.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	32.173.932.000	100	32.173.932.000	100	34.847.692.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					238.000.000		238.000.000		310.084.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	238.000.000	100	238.000.000	100	310.084.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				68.000.000		68.000.000		55.600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	68.000.000	12	68.000.000	12	55.600.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				170.000.000		170.000.000		254.484.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	170.000.000	4	170.000.000	4	254.484.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					28.564.057.000		28.564.057.000		31.082.308.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Laporan	12	28.564.057.000	12	28.564.057.000	12	31.082.308.000		
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				24.071.431.000		24.071.431.000		26.317.431.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	24.071.431.000	12	24.071.431.000	12	26.317.431.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				4.492.626.000		4.492.626.000		4.764.877.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	4.492.626.000	12	4.492.626.000	12	4.764.877.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan					3.371.875.000		3.371.875.000		3.455.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	1	3.371.875.000	1	3.371.875.000	1	3.455.300.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				3.001.846.000		3.001.846.000		3.141.335.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	3.001.846.000	12	3.001.846.000	12	3.141.335.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				70.029.000		70.029.000		13.965.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	1	70.029.000	1	70.029.000	1	13.965.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**270.993.081.000**		**270.993.081.000**		**265.645.259.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.919.557.000**		**2.919.557.000**		**2.860.176.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**2.919.557.000**		**2.919.557.000**		**2.860.176.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka	37	2.919.557.000	37	2.919.557.000	37	2.860.176.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2.919.557.000		2.919.557.000		2.860.176.000		
						Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	1.686.294.000	100	1.686.294.000	100	1.369.505.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah					1.686.294.000		1.686.294.000		1.369.505.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100	1.214.294.000	100	1.214.294.000	100	1.024.902.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				1.214.294.000		1.214.294.000		1.024.902.000		
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	8	524.294.000	8	524.294.000	45	483.824.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	4	690.000.000	4	690.000.000	4	541.078.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	100	347.000.000	100	347.000.000	100	243.723.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				347.000.000		347.000.000		243.723.000		
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	4	75.000.000	4	75.000.000	160	86.865.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	272.000.000	4	272.000.000	4	156.858.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	%	95	125.000.000	95	125.000.000	95	100.880.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				125.000.000		125.000.000		100.880.000		
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	24.690.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	4	60.000.000	4	60.000.000	4	56.178.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	20.012.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	675.000.000	100	675.000.000	100	591.730.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					675.000.000		675.000.000		591.730.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	675.000.000	8	675.000.000	8	591.730.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				480.000.000		480.000.000		426.591.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	480.000.000	4	480.000.000	4	426.591.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				480.000.000		480.000.000		426.591.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	480.000.000	4	480.000.000	4	426.591.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				90.000.000		90.000.000		76.373.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	90.000.000	4	90.000.000	4	76.373.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.000			Fasilitasi Penataan Wilayah				105.000.000		105.000.000		88.766.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	105.000.000	4	105.000.000	4	88.766.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	558.263.000	100	558.263.000	100	898.941.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah					558.263.000		558.263.000		898.941.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	80.000.000	3	80.000.000	3	68.356.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				80.000.000		80.000.000		68.356.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	68.356.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	202.874.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				100.000.000		100.000.000		202.874.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	7	100.000.000	7	100.000.000	7	202.874.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	378.263.000	100	378.263.000	100	627.711.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				378.263.000		378.263.000		627.711.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	378.263.000	37	378.263.000	37	627.711.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**511.956.000**		**511.956.000**		**462.410.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**511.956.000**		**511.956.000**		**462.410.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	511.956.000	83	511.956.000	83	462.410.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						511.956.000		511.956.000		462.410.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	511.956.000	100	511.956.000	100	462.410.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					511.956.000		511.956.000		462.410.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	511.956.000	100	511.956.000	100	462.410.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000		450.000.000		388.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	182.763.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	206.087.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.956.000		61.956.000		73.560.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	12	8.956.000	12	8.956.000	12	25.644.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	53.000.000	12	53.000.000	12	47.916.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**3.431.513.000**		**3.431.513.000**		**3.322.586.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.781.081.000**		**1.781.081.000**		**1.548.521.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**1.781.081.000**		**1.781.081.000**		**1.548.521.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Angka	29.5	1.781.081.000	29.5	1.781.081.000	29.5	1.548.521.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.781.081.000		1.781.081.000		1.548.521.000		
						Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	475.139.000	85	475.139.000	85	432.358.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					475.139.000		475.139.000		432.358.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	475.139.000	4	475.139.000	4	432.358.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				130.282.000		130.282.000		49.604.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	130.282.000	4	130.282.000	4	49.604.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.374.000		300.374.000		344.788.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	300.374.000	4	300.374.000	4	344.788.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				44.483.000		44.483.000		37.966.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	44.483.000	4	44.483.000	4	37.966.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	839.176.000	92	839.176.000	92	782.462.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					839.176.000		839.176.000		782.462.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	549.326.000	4	529.326.000	4	437.470.000		
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				312.326.000		312.326.000		260.954.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	312.326.000	12	312.326.000	12	260.954.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				237.000.000		217.000.000		176.516.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	157.000.000	4	137.000.000	4	118.597.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	80.000.000	4	80.000.000	4	57.919.000		
						Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	%	75	289.850.000	75	309.850.000	75	344.992.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				289.850.000		309.850.000		344.992.000		
						Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	149.897.000	4	165.118.000	4	134.695.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	139.953.000	2	144.732.000	2	210.297.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	466.766.000	83	466.766.000	83	333.701.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					466.766.000		466.766.000		333.701.000		
						Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	466.766.000	4	466.766.000	4	333.701.000		
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				130.063.000		130.063.000		81.883.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8	130.063.000	8	130.063.000	8	81.883.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				86.703.000		86.703.000		75.317.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	86.703.000	4	86.703.000	4	75.317.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000		250.000.000		176.501.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	176.501.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**204.272.000**		**204.272.000**		**172.458.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**204.272.000**		**204.272.000**		**172.458.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	204.272.000	83	204.272.000	83	172.458.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						204.272.000		204.272.000		172.458.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000	100	204.272.000	100	172.458.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.272.000		204.272.000		172.458.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000	100	204.272.000	100	172.458.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		151.359.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	151.359.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24.272.000		24.272.000		21.099.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.272.000	12	24.272.000	12	21.099.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**1.985.353.000**		**1.985.353.000**		**1.720.979.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BIRO BUMD DAN BLUD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.980.000.000**		**1.980.000.000**		**1.600.253.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4		66.4		66.4		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								**1.980.000.000**		**1.980.000.000**		**1.600.253.000**		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Angka	44	1.980.000.000	44	1.980.000.000	44	1.600.253.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.980.000.000		1.980.000.000		1.600.253.000		
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	355.000.000	55	355.000.000	55	291.183.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					355.000.000		355.000.000		291.183.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	146.741.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				180.000.000		180.000.000		146.741.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	146.741.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	175.000.000	2	175.000.000	2	144.442.000		
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				175.000.000		175.000.000		144.442.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	2	175.000.000	2	175.000.000	2	144.442.000		
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2.3	750.000.000	2.3	750.000.000	2.3	478.637.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					750.000.000		750.000.000		478.637.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	750.000.000	4	750.000.000	4	478.637.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				750.000.000		750.000.000		478.637.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	232.767.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	245.870.000		
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1.95	875.000.000	1.95	875.000.000	1.95	830.433.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					875.000.000		875.000.000		830.433.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	875.000.000	4	875.000.000	4	830.433.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				875.000.000		875.000.000		830.433.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	361.486.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4	475.000.000	4	475.000.000	4	468.947.000		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									**421.074.000**		**421.074.000**		**574.567.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								**421.074.000**		**421.074.000**		**574.567.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	421.074.000	83	421.074.000	83	574.567.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						421.074.000		421.074.000		574.567.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000	100	421.074.000	100	574.567.000	BIRO BUMD DAN BLUD	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.074.000		421.074.000		574.567.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000	100	421.074.000	100	574.567.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.283.000		386.283.000		520.241.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	340.395.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	146.283.000	12	146.283.000	12	179.846.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				34.791.000		34.791.000		54.326.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	8.760.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.791.000	12	24.791.000	12	45.566.000		
JUMLAH									**2.401.074.000**		**2.401.074.000**		**2.174.820.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD									**231.064.554.000**		**231.064.554.000**		**225.229.468.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	72.1		72.1		72.1		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat DPRD								**62.544.937.000**		**62.544.937.000**		**64.959.037.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	90.75	62.544.937.000	90.75	62.544.937.000	90.75	64.959.037.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						62.544.937.000		62.544.937.000		64.959.037.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	62.544.937.000	100	62.544.937.000	100	64.959.037.000	Bagian Umum	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.330.474.000		1.330.474.000		1.410.474.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	14	1.330.474.000	14	1.330.474.000	15	1.410.474.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.330.474.000		1.330.474.000		1.410.474.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	1.330.474.000	14	1.330.474.000	15	1.410.474.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					586.602.000		586.602.000		141.168.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	586.602.000	100	586.602.000	100	141.168.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				150.000.000		150.000.000		141.168.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	141.168.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				436.602.000		436.602.000		0		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	436.602.000	100	436.602.000	0	0	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					8.019.369.000		8.019.369.000		8.427.311.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	8.019.369.000	100	8.019.369.000	100	8.427.311.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				244.485.000		244.485.000		244.485.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	244.485.000	12	244.485.000	12	244.485.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				187.269.000		187.269.000		187.269.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	187.269.000	12	187.269.000	12	187.269.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				136.750.000		136.750.000		105.469.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	136.750.000	12	136.750.000	12	105.469.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.500.000.000		6.500.000.000		6.841.465.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6.500.000.000	12	6.500.000.000	12	6.841.465.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				780.453.000		780.453.000		883.958.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	780.453.000	12	780.453.000	12	883.958.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				170.412.000		170.412.000		164.665.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	170.412.000	3	170.412.000	3	164.665.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.309.086.000		10.309.086.000		11.788.088.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	279	10.309.086.000	279	10.309.086.000	441	11.788.088.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.002.240.000		4.002.240.000		3.943.201.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	4.002.240.000	8	4.002.240.000	8	3.943.201.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				2.048.833.000		2.048.833.000		2.485.046.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	2.048.833.000	25	2.048.833.000	26	2.485.046.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.443.188.000		1.443.188.000		2.242.081.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	114	1.443.188.000	114	1.443.188.000	234	2.242.081.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.814.825.000		2.814.825.000		3.117.760.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	132	2.814.825.000	132	2.814.825.000	173	3.117.760.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.904.952.000		28.904.952.000		27.932.072.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	28.904.952.000	48	28.904.952.000	48	27.932.072.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				179.542.000		179.542.000		145.708.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	179.542.000	12	179.542.000	12	145.708.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.474.000.000		4.474.000.000		4.074.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.474.000.000	12	4.474.000.000	12	4.074.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.047.586.000		1.047.586.000		942.841.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.047.586.000	12	1.047.586.000	12	942.841.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				23.203.824.000		23.203.824.000		22.769.523.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	23.203.824.000	12	23.203.824.000	12	22.769.523.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.435.453.000		11.435.453.000		13.300.923.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	495	11.435.453.000	495	11.435.453.000	520	13.300.923.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				596.253.000		596.253.000		650.253.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	596.253.000	10	596.253.000	10	650.253.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.865.858.000		2.865.858.000		2.860.828.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	77	2.865.858.000	77	2.865.858.000	85	2.860.828.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				86.425.000		86.425.000		86.425.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	335	86.425.000	335	86.425.000	335	86.425.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.191.084.000		5.191.084.000		6.713.584.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.191.084.000	3	5.191.084.000	11	6.713.584.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.695.833.000		2.695.833.000		2.989.833.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	2.695.833.000	70	2.695.833.000	79	2.989.833.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.001.000		1.959.001.000		1.959.001.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.959.001.000	100	1.959.001.000	100	1.959.001.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.392.880.000		1.392.880.000		1.392.880.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	1.392.880.000	4	1.392.880.000	4	1.392.880.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		566.121.000		566.121.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	120	566.121.000	120	566.121.000	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat DPRD								**168.519.617.000**		**168.519.617.000**		**160.270.431.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	2.75	168.519.617.000	2.75	168.519.617.000	2.75	160.270.431.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						168.519.617.000		168.519.617.000		160.270.431.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	168.519.617.000	100	168.519.617.000	100	160.270.431.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					827.739.000		827.739.000		859.303.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	827.739.000	100	827.739.000	100	859.303.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				526.015.000		526.015.000		550.101.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	526.015.000	6	526.015.000	6	550.101.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				251.724.000		251.724.000		259.202.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	251.724.000	20	251.724.000	20	259.202.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.578.455.000		19.578.455.000		18.497.705.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	19.578.455.000	24	19.578.455.000	24	18.497.705.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.570.007.000		18.570.007.000		17.457.294.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	116	18.570.007.000	116	18.570.007.000	116	17.457.294.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.008.448.000		1.008.448.000		1.040.411.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	1.008.448.000	24	1.008.448.000	24	1.040.411.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					148.113.423.000		148.113.423.000		140.913.423.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	148.113.423.000	100	148.113.423.000	100	140.913.423.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				148.113.423.000		148.113.423.000		140.913.423.000		
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	120	148.113.423.000	120	148.113.423.000	120	140.913.423.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									**336.517.695.000**		**336.517.695.000**		**340.447.712.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	92		92		92		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia								**234.499.088.000**		**234.499.088.000**		**247.287.388.000**		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	Angka	77	234.499.088.000	77	234.499.088.000	77	247.287.388.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						234.499.088.000		234.499.088.000		247.287.388.000		
						Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	234.499.088.000	75	234.499.088.000	75	247.287.388.000	Bagian Hubungan Masyarakat	
		4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					132.659.088.000		132.659.088.000		126.094.388.000		
						Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan	Angka	4	132.659.088.000	4	132.659.088.000	4	126.094.388.000	Pokja Publikasi	
		4.02.02.1.04.0004			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.939.086.000		1.939.086.000		1.866.672.000		
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	42	1.939.086.000	42	1.939.086.000	42	1.866.672.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.0005			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				418.741.000		418.741.000		363.612.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	418.741.000	8	418.741.000	8	363.612.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.0006			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12.781.261.000		12.781.261.000		10.816.561.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	6	12.781.261.000	6	12.781.261.000	6	10.816.561.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0007			Penyusunan Program Kerja DPRD				117.520.000.000		117.520.000.000		113.047.543.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	7	117.520.000.000	7	117.520.000.000	7	113.047.543.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah					101.840.000.000		101.840.000.000		121.193.000.000		
						Jumlah publikasi melalui berbagai media	Angka	4	101.840.000.000	4	101.840.000.000	4	121.193.000.000	Pokja Publikasi	
		4.02.02.1.07.0002			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				101.840.000.000		101.840.000.000		121.193.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	12	101.840.000.000	12	101.840.000.000	12	121.193.000.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD Yang baik								**102.018.607.000**		**102.018.607.000**		**93.160.324.000**		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	Angka	77	102.018.607.000	77	102.018.607.000	77	93.160.324.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						102.018.607.000		102.018.607.000		93.160.324.000		
						Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	102.018.607.000	75	102.018.607.000	75	93.160.324.000	Bagian Persidangan	
		4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					7.206.440.000		7.206.440.000		7.547.440.000		
						Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	Angka	22	7.206.440.000	22	7.206.440.000	23	7.547.440.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.01.0001			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4.262.440.000		4.262.440.000		4.627.440.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	22	4.262.440.000	22	4.262.440.000	23	4.627.440.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.01.0006			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				2.944.000.000		2.944.000.000		2.920.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	600	2.944.000.000	600	2.944.000.000	600	2.920.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					2.210.534.000		2.210.534.000		2.055.534.000		
						Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Angka	2	2.210.534.000	2	2.210.534.000	2	2.055.534.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.02.000			Pembahasan APBD				2.210.534.000		2.210.534.000		2.055.534.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	2	2.210.534.000	2	2.210.534.000	2	2.055.534.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					12.515.582.000		12.515.582.000		10.200.848.000		
						Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Angka	3	12.515.582.000	3	12.515.582.000	3	10.200.848.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.03.0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.850.000.000		1.850.000.000		1.601.771.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	17	1.850.000.000	17	1.850.000.000	17	1.601.771.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.850.000.000		1.850.000.000		1.588.821.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	17	1.850.000.000	17	1.850.000.000	17	1.588.821.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.850.000.000		1.850.000.000		1.654.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	17	1.850.000.000	17	1.850.000.000	17	1.654.480.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.850.000.000		1.850.000.000		1.711.930.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	17	1.850.000.000	17	1.850.000.000	17	1.711.930.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1.850.000.000		1.850.000.000		1.681.680.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	17	1.850.000.000	17	1.850.000.000	17	1.681.680.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.169.722.000		1.169.722.000		338.256.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	1.169.722.000	1	1.169.722.000	1	338.256.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				2.095.860.000		2.095.860.000		1.623.910.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	21	2.095.860.000	21	2.095.860.000	20	1.623.910.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					4.380.000.000		4.380.000.000		2.032.500.000		
						Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	Orang	120	4.380.000.000	120	4.380.000.000	120	2.032.500.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				4.380.000.000		4.380.000.000		2.032.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	4.380.000.000	6	4.380.000.000	5	2.032.500.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					50.243.046.000		50.243.046.000		47.076.997.000		
						Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Angka	5	50.243.046.000	5	50.243.046.000	5	47.076.997.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah				11.461.502.000		11.461.502.000		10.154.248.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	11.461.502.000	12	11.461.502.000	12	10.154.248.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				38.606.544.000		38.606.544.000		36.747.749.000		
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	38.606.544.000	24	38.606.544.000	24	36.747.749.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					1.152.000.000		1.152.000.000		1.136.000.000		
						Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Angka	45	1.152.000.000	45	1.152.000.000	45	1.136.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				1.152.000.000		1.152.000.000		1.136.000.000		
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	45	1.152.000.000	45	1.152.000.000	45	1.136.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.08		Fasilitasi Tugas DPRD					24.311.005.000		24.311.005.000		23.111.005.000		
						Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Angka	30	24.311.005.000	30	24.311.005.000	30	23.111.005.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24.311.005.000		24.311.005.000		23.111.005.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	30	24.311.005.000	30	24.311.005.000	30	23.111.005.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**567.582.249.000**		**567.582.249.000**		**565.677.180.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah									**10.085.000.000**		**10.085.000.000**		**8.071.835.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Angka	94.19		94.19		94.19		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah								**4.700.000.000**		**4.700.000.000**		**3.666.640.000**		
						Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Angka	27.75	4.700.000.000	27.75	4.700.000.000	27.75	3.666.640.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.100.000.000		1.100.000.000		929.359.000		
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80.23	1.100.000.000	80.31	1.100.000.000	80.31	929.359.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.100.000.000		1.100.000.000		929.359.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Yang Selaras Dengan Nasional	Kabupaten/ Kota	27	1.100.000.000	27	1.100.000.000	27	929.359.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.100.000.000		1.100.000.000		929.359.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	70	1.100.000.000	70	1.100.000.000	70	929.359.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.600.000.000		3.600.000.000		2.737.281.000		
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	82.92	1.155.000.000	83.84	1.155.000.000	83.84	826.885.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.155.000.000		1.155.000.000		826.885.000		
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur	Angka	15	490.000.000	83.44	490.000.000	83.44	414.692.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				490.000.000		490.000.000		414.692.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	490.000.000	1	490.000.000	1	414.692.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan	Angka	15	665.000.000	84.25	665.000.000	84.25	412.193.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				665.000.000		665.000.000		412.193.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	665.000.000	1	665.000.000	1	412.193.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	82.21	1.315.000.000	80.49	1.315.000.000	80.49	962.056.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.315.000.000		1.315.000.000		962.056.000		
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia	Angka	67	710.000.000	82.42	710.000.000	82.42	539.038.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				710.000.000		710.000.000		539.038.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	710.000.000	1	710.000.000	1	539.038.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan	Angka	67	605.000.000	78.56	605.000.000	78.56	423.018.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				605.000.000		605.000.000		423.018.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	605.000.000	1	605.000.000	1	423.018.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	82.48	1.130.000.000	76.59	1.130.000.000	76.59	948.340.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.130.000.000		1.130.000.000		948.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian	Angka	77	655.000.000	75.47	655.000.000	75.47	521.553.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				655.000.000		655.000.000		521.553.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	655.000.000	1	655.000.000	1	521.553.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA	Angka	77	475.000.000	77.7	475.000.000	77.7	426.787.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				475.000.000		475.000.000		426.787.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	475.000.000	1	475.000.000	1	426.787.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah								**1.885.000.000**		**1.885.000.000**		**1.351.284.000**		
						Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	Angka	56.44	1.885.000.000	56.44	1.885.000.000	56.44	1.351.284.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						830.000.000		830.000.000		567.715.000		
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	76.08	830.000.000	87.29	830.000.000	87.29	567.715.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					180.000.000		180.000.000		161.337.000		
						Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Perencanaan Berbasis Risiko	Urusan	27	180.000.000	37	180.000.000	37	161.337.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0002			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				180.000.000		180.000.000		161.337.000		
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	161.337.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					450.000.000		450.000.000		331.378.000		
						Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis Data	Urusan	27	450.000.000	37	450.000.000	37	331.378.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				350.000.000		350.000.000		245.063.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	350.000.000	1	350.000.000	1	245.063.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		86.315.000		
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100.000.000	1	100.000.000	1	86.315.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					200.000.000		200.000.000		75.000.000		
						Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis hasil evaluasi	Urusan	27	200.000.000	37	200.000.000	37	75.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200.000.000		200.000.000		75.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	75.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.055.000.000		1.055.000.000		783.569.000		
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	66.67	385.000.000	87.03	385.000.000	87.03	305.604.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					385.000.000		385.000.000		305.604.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	3	150.000.000	87.06	150.000.000	87.06	106.458.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		150.000.000		106.458.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	106.458.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	3	235.000.000	87.01	235.000.000	87.01	199.146.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				235.000.000		235.000.000		199.146.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	235.000.000	1	235.000.000	1	199.146.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	65.56	220.000.000	89.08	220.000.000	89.08	164.718.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					220.000.000		220.000.000		164.718.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	7	120.000.000	89.2	120.000.000	89.2	101.374.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				120.000.000		120.000.000		101.374.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	101.374.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	7	100.000.000	88.97	100.000.000	88.97	63.344.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000		100.000.000		63.344.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	63.344.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	65.81	450.000.000	85.76	450.000.000	85.76	313.247.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					450.000.000		450.000.000		313.247.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	5	300.000.000	85.79	300.000.000	85.79	203.761.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000		300.000.000		203.761.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	203.761.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	4	150.000.000	85.73	150.000.000	85.73	109.486.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				150.000.000		150.000.000		109.486.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	109.486.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah								**3.500.000.000**		**3.500.000.000**		**3.053.911.000**		
						Skor Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	Angka	10	3.500.000.000	10	3.500.000.000	10	3.053.911.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						2.920.000.000		2.920.000.000		2.634.327.000		
						Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98.55	2.920.000.000	98.74	2.920.000.000	98.74	2.634.327.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					2.920.000.000		2.920.000.000		2.634.327.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun penjenjangan kinerja selaras dengan kinerja daerah	OPD	43	2.920.000.000	43	2.920.000.000	43	2.634.327.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				2.920.000.000		2.920.000.000		2.634.327.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2.920.000.000	2	2.920.000.000	2	2.634.327.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						580.000.000		580.000.000		419.584.000		
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100.000.000	99.29	100.000.000	99.29	64.086.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					100.000.000		100.000.000		64.086.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah	%	9	50.000.000	99.73	50.000.000	99.73	35.811.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.000.000		50.000.000		35.811.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	35.811.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah	%	3	50.000.000	98.75	50.000.000	98.75	28.275.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				50.000.000		50.000.000		28.275.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	28.275.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	380.000.000	99.07	380.000.000	99.07	279.556.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					380.000.000		380.000.000		279.556.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah	%	15	330.000.000	99.34	330.000.000	99.34	250.638.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				330.000.000		330.000.000		250.638.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	330.000.000	2	330.000.000	2	250.638.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah	%	10	50.000.000	98.8	50.000.000	98.8	28.918.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				50.000.000		50.000.000		28.918.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	50.000.000	2	50.000.000	2	28.918.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100.000.000	97.84	100.000.000	97.84	75.942.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					100.000.000		100.000.000		75.942.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah	%	5	50.000.000	97.9	50.000.000	97.9	44.647.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				50.000.000		50.000.000		44.647.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	44.647.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah	%	13	50.000.000	97.74	50.000.000	97.74	31.295.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				50.000.000		50.000.000		31.295.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	31.295.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									**30.989.576.000**		**30.989.576.000**		**29.957.665.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	82.5		82.5		84.4		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								**30.494.576.000**		**30.494.576.000**		**29.548.458.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	94.25	30.494.576.000	94.25	30.494.576.000	98.5	29.548.458.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.494.576.000		30.494.576.000		29.548.458.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	30.494.576.000	100	30.494.576.000	100	29.548.458.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.008.081.000		21.008.081.000		20.941.212.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	21.008.081.000	1	21.008.081.000	1	20.941.212.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.391.201.000		20.391.201.000		20.391.201.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	118	20.391.201.000	118	20.391.201.000	118	20.391.201.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				341.880.000		341.880.000		310.380.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	341.880.000	12	341.880.000	12	310.380.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		150.000.000		129.492.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	129.492.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				75.000.000		75.000.000		66.187.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	66.187.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		50.000.000		43.952.000		

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	43.952.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					237.001.000		237.001.000		228.144.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	237.001.000	1	237.001.000	1	228.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				190.000.000		190.000.000		187.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	190.000.000	1	190.000.000	1	187.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				47.001.000		47.001.000		41.144.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	47.001.000	2	47.001.000	2	41.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					334.174.000		334.174.000		216.266.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	334.174.000	100	334.174.000	100	216.266.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				138.729.000		138.729.000		125.405.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	138.729.000	1	138.729.000	1	125.405.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				195.445.000		195.445.000		90.861.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	195.445.000	35	195.445.000	35	90.861.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.047.492.000		2.047.492.000		1.665.662.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.047.492.000	100	2.047.492.000	100	1.665.662.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		70.000.000		57.072.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	1	70.000.000	1	57.072.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		87.934.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	87.934.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		92.409.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	92.409.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		68.631.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	80.000.000	1	80.000.000	1	68.631.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		68.631.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	80.000.000	1	80.000.000	1	68.631.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		20.000.000		17.864.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.864.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				155.500.000		155.500.000		167.245.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	155.500.000	4	155.500.000	4	167.245.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				850.001.000		850.001.000		676.197.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	850.001.000	4	850.001.000	4	676.197.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.480.000		61.480.000		52.598.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	61.480.000	1	61.480.000	1	52.598.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				510.511.000		510.511.000		445.712.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	510.511.000	1	510.511.000	1	445.712.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					720.000.000		720.000.000		574.104.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	720.000.000	4	720.000.000	4	574.104.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.000.000		180.000.000		166.132.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	180.000.000	1	180.000.000	1	166.132.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				440.000.000		440.000.000		407.972.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	440.000.000	2	440.000.000	2	407.972.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.165.478.000		4.165.478.000		3.859.685.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.165.478.000	1	4.165.478.000	1	3.859.685.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.050.000.000		1.050.000.000		967.860.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000	12	967.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.115.478.000		3.115.478.000		2.891.825.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.115.478.000	12	3.115.478.000	12	2.891.825.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.982.350.000		1.982.350.000		2.063.385.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	57	1.982.350.000	57	1.982.350.000	57	2.063.385.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				720.000.000		720.000.000		641.148.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	39	720.000.000	39	720.000.000	39	641.148.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				338.350.000		338.350.000		242.870.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	338.350.000	8	338.350.000	8	242.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				34.000.000		34.000.000		34.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		855.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	600.000.000	2	600.000.000	2	855.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		156.707.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	156.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		103.660.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	110.000.000	2	110.000.000	2	103.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								**495.000.000**		**495.000.000**		**409.207.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	3.1	495.000.000	3.1	495.000.000	3.16	409.207.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						495.000.000		495.000.000		409.207.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	495.000.000	100	495.000.000	100	409.207.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					495.000.000		495.000.000		409.207.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	495.000.000	100	495.000.000	100	409.207.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				240.000.000		240.000.000		203.311.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	240.000.000	4	240.000.000	4	203.311.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		202.265.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	202.265.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		3.631.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.631.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**41.074.576.000**		**41.074.576.000**		**38.029.500.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Pengelola Pendapatan Daerah									**230.746.052.000**		**230.746.052.000**		**229.563.664.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	80.21		80.21		80.21		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah								**230.371.295.000**		**230.371.295.000**		**229.286.370.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	80	230.371.295.000	80	230.371.295.000	80	229.286.370.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						230.371.295.000		230.371.295.000		229.286.370.000		
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	1.350.567.000	95	1.350.567.000	95	1.280.407.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		8.000.000		7.955.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	7.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		8.000.000		7.955.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	7.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.676.000		111.676.000		114.156.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.676.000	100	111.676.000	100	114.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.157.000		9.157.000		10.773.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.157.000	1	9.157.000	1	10.773.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.764.000		17.764.000		17.030.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.764.000	1	17.764.000	1	17.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.864.000		9.864.000		10.735.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.864.000	1	9.864.000	1	10.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.120.000		1.120.000		842.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.120.000	4	1.120.000	4	842.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.000			Penyediaan Bahan/Material				32.017.000		32.017.000		31.052.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	32.017.000	1	32.017.000	1	31.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.923.000		8.923.000		9.753.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.923.000	4	8.923.000	4	9.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.831.000		32.831.000		33.971.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.831.000	4	32.831.000	4	33.971.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					913.265.000		913.265.000		833.594.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Unit	4	913.265.000	4	913.265.000	4	833.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.281.000		2.281.000		1.998.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.281.000	4	2.281.000	4	1.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.714.000		250.714.000		175.576.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	250.714.000	4	250.714.000	4	175.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				660.270.000		660.270.000		656.020.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	660.270.000	4	660.270.000	4	656.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.126.000		275.126.000		282.602.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	275.126.000	1	275.126.000	1	282.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.700.000		129.700.000		133.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	129.700.000	0	129.700.000	0	133.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.960.000		2.960.000		1.650.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2.960.000	0	2.960.000	0	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.366.000		50.366.000		44.838.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	50.366.000	1	50.366.000	1	44.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.850.000		68.850.000		81.930.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	68.850.000	1	68.850.000	1	81.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		8.250.000		8.184.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	1	8.250.000	1	8.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	173.322.892.000	95	173.322.892.000	95	173.092.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					140.259.511.000		140.259.511.000		140.293.310.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	140.259.511.000	4	140.259.511.000	4	140.293.310.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				139.514.175.000		139.514.175.000		139.514.175.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	605	139.514.175.000	605	139.514.175.000	605	139.514.175.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				634.767.000		634.767.000		664.659.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	634.767.000	4	634.767.000	4	664.659.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.569.000		110.569.000		114.476.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	110.569.000	4	110.569.000	4	114.476.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					372.400.000		372.400.000		372.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	372.400.000	4	372.400.000	4	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				372.400.000		372.400.000		372.400.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	372.400.000	0	372.400.000	0	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					234.144.000		234.144.000		141.138.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	234.144.000	100	234.144.000	100	141.138.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				184.144.000		184.144.000		139.154.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	184.144.000	1	184.144.000	1	139.154.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		1.984.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1.984.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.328.052.000		7.328.052.000		6.880.211.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	7.328.052.000	100	7.328.052.000	100	6.880.211.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.067.000		85.067.000		74.534.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	85.067.000	1	85.067.000	1	74.534.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				341.623.000		341.623.000		251.804.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	341.623.000	1	341.623.000	1	251.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.559.810.000		5.559.810.000		5.544.810.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.559.810.000	1	5.559.810.000	1	5.544.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				39.821.000		39.821.000		24.960.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	39.821.000	4	39.821.000	4	24.960.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				545.814.000		545.814.000		434.370.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	545.814.000	4	545.814.000	4	434.370.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				719.917.000		719.917.000		534.064.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	719.917.000	4	719.917.000	4	534.064.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000		15.669.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	4	15.669.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.000.000		6.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.606.387.000		3.606.387.000		3.918.162.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.606.387.000	1	3.606.387.000	1	3.918.162.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000		500.000.000		1.098.945.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.098.945.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.106.387.000		3.106.387.000		2.819.217.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.106.387.000	1	3.106.387.000	1	2.819.217.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.493.006.000		19.493.006.000		18.766.013.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	19.493.006.000	4	19.493.006.000	4	18.766.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.400.000		6.400.000		3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	6.400.000	4	6.400.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.116.126.000		2.116.126.000		1.742.547.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.116.126.000	4	2.116.126.000	4	1.742.547.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.707.654.000		2.707.654.000		2.589.066.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.707.654.000	4	2.707.654.000	4	2.589.066.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.662.826.000		14.662.826.000		14.431.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14.662.826.000	4	14.662.826.000	4	14.431.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.029.392.000		2.029.392.000		2.720.785.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.029.392.000	1	2.029.392.000	1	2.720.785.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				526.062.000		526.062.000		571.912.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	526.062.000	1	526.062.000	1	571.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				768.640.000		768.640.000		1.035.890.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	768.640.000	1	768.640.000	1	1.035.890.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				63.548.000		63.548.000		44.538.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	63.548.000	1	63.548.000	1	44.538.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				671.142.000		671.142.000		1.068.445.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	671.142.000	1	671.142.000	1	1.068.445.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	95	0	95	0	95	0	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	1.349.213.000	95	1.349.213.000	95	1.339.571.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.800.000		9.800.000		9.776.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	9.800.000	4	9.800.000	4	9.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.800.000		9.800.000		9.776.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	9.800.000	4	9.800.000	4	9.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.423.000		154.423.000		157.617.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	154.423.000	100	154.423.000	100	157.617.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.125.000		5.125.000		3.450.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.125.000	1	5.125.000	1	3.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.393.000		37.393.000		36.656.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	37.393.000	1	37.393.000	1	36.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.580.000		10.580.000		12.583.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.580.000	1	10.580.000	1	12.583.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		35.000.000		35.714.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.714.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.200.000		7.200.000		7.964.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.625.000		56.625.000		61.250.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.625.000	4	56.625.000	4	61.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					833.690.000		833.690.000		802.166.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	833.690.000	4	833.690.000	4	802.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.056.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.500.000		157.500.000		127.150.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	157.500.000	4	157.500.000	4	127.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.600.000		3.600.000		2.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.600.000	4	3.600.000	4	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.590.000		670.590.000		670.260.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	670.590.000	4	670.590.000	4	670.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.800.000		308.800.000		327.512.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	308.800.000	1	308.800.000	1	327.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.750.000		16.750.000		15.377.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	16.750.000	1	16.750.000	1	15.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.550.000		154.550.000		178.550.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	154.550.000	1	154.550.000	1	178.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.500.000		30.500.000		23.405.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	30.500.000	1	30.500.000	1	23.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		1.280.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		73.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	73.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		31.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	1.369.277.000	95	1.369.277.000	95	1.354.883.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					135.717.000		135.717.000		134.959.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	135.717.000	100	135.717.000	100	134.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.439.000		5.439.000		5.268.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.439.000	1	5.439.000	1	5.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.119.000		23.119.000		22.949.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	23.119.000	1	23.119.000	1	22.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.352.000		7.352.000		7.200.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.352.000	1	7.352.000	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				47.169.000		47.169.000		43.178.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	47.169.000	1	47.169.000	1	43.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.910.000		12.910.000		10.425.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.910.000	4	12.910.000	4	10.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.728.000		39.728.000		45.939.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	39.728.000	4	39.728.000	4	45.939.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					917.058.000		917.058.000		887.728.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	917.058.000	4	917.058.000	4	887.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.000.000		204.000.000		175.420.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.000.000	4	204.000.000	4	175.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				712.058.000		712.058.000		711.508.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	712.058.000	4	712.058.000	4	711.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.502.000		260.502.000		276.258.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	260.502.000	1	260.502.000	1	276.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.536.000		55.536.000		54.526.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	55.536.000	1	55.536.000	1	54.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.823.000		131.823.000		139.734.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	131.823.000	1	131.823.000	1	139.734.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.043.000		27.043.000		26.698.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.043.000	1	27.043.000	1	26.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.600.000		23.600.000		32.800.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.600.000	1	23.600.000	1	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	1.664.910.000	95	1.664.910.000	95	1.670.216.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		39.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		39.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.550.000		145.550.000		134.515.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.550.000	100	145.550.000	100	134.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		11.101.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	11.101.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000		36.000.000		26.139.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	36.000.000	1	36.000.000	1	26.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.800.000		7.800.000		8.012.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.800.000	1	7.800.000	1	8.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				23.710.000		23.710.000		23.270.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	23.710.000	1	23.710.000	1	23.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.550.000		12.550.000		10.525.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.550.000	4	12.550.000	4	10.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.490.000		50.490.000		55.468.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.490.000	4	50.490.000	4	55.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.193.935.000		1.193.935.000		1.146.513.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.193.935.000	4	1.193.935.000	4	1.146.513.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.820.000		1.820.000		2.012.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.820.000	4	1.820.000	4	2.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.200.000		223.200.000		193.865.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	223.200.000	4	223.200.000	4	193.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		3.500.000		2.520.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.500.000	4	3.500.000	4	2.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				965.415.000		965.415.000		948.116.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	965.415.000	4	965.415.000	4	948.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.925.000		272.925.000		339.688.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	272.925.000	1	272.925.000	1	339.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.000.000		14.000.000		21.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	14.000.000	1	14.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.225.000		104.225.000		151.138.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	104.225.000	1	104.225.000	1	151.138.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.200.000		36.200.000		53.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	36.200.000	1	36.200.000	1	53.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		79.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	79.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.500.000		20.500.000		17.100.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.500.000	1	20.500.000	1	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	1.493.881.000	95	1.493.881.000	95	1.477.585.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.000.000		44.000.000		43.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	44.000.000	4	44.000.000	4	43.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.000.000		44.000.000		43.350.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	44.000.000	4	44.000.000	4	43.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.416.000		126.416.000		121.032.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	126.416.000	100	126.416.000	100	121.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.030.000		4.030.000		3.531.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.030.000	1	4.030.000	1	3.531.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.166.000		21.166.000		19.874.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.166.000	1	21.166.000	1	19.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.400.000		14.400.000		12.022.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.400.000	1	14.400.000	1	12.022.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.572.000		21.572.000		19.999.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	21.572.000	1	21.572.000	1	19.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.620.000		13.620.000		10.722.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.620.000	4	13.620.000	4	10.722.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.628.000		51.628.000		54.884.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.628.000	4	51.628.000	4	54.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.001.125.000		1.001.125.000		976.653.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.001.125.000	4	1.001.125.000	4	976.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		1.700.000		1.480.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.700.000	4	1.700.000	4	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.305.000		177.305.000		140.993.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	177.305.000	4	177.305.000	4	140.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				822.120.000		822.120.000		834.180.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	822.120.000	4	822.120.000	4	834.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.340.000		322.340.000		336.550.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	322.340.000	1	322.340.000	1	336.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.650.000		35.650.000		35.650.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	35.650.000	1	35.650.000	1	35.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				184.016.000		184.016.000		200.898.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	184.016.000	1	184.016.000	1	200.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		1.000.000		2.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.449.000		29.449.000		28.577.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	29.449.000	1	29.449.000	1	28.577.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		42.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.225.000		20.225.000		20.225.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.225.000	1	20.225.000	1	20.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	2.086.024.000	95	2.086.024.000	95	2.068.723.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.809.000		180.809.000		166.139.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	180.809.000	100	180.809.000	100	166.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.882.000		2.882.000		2.525.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.882.000	1	2.882.000	1	2.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.838.000		25.838.000		26.822.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.838.000	1	25.838.000	1	26.822.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.320.000		8.320.000		6.946.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.320.000	1	8.320.000	1	6.946.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.500.000		1.500.000		1.128.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		50.000.000		55.309.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.309.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.660.000		10.660.000		9.564.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.660.000	4	10.660.000	4	9.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.609.000		81.609.000		63.845.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.609.000	4	81.609.000	4	63.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.553.281.000		1.553.281.000		1.526.643.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.553.281.000	4	1.553.281.000	4	1.526.643.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.921.000		1.921.000		1.683.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.921.000	4	1.921.000	4	1.683.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				381.990.000		381.990.000		380.590.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	381.990.000	4	381.990.000	4	380.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.169.370.000		1.169.370.000		1.144.370.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.169.370.000	4	1.169.370.000	4	1.144.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.434.000		299.434.000		323.503.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	299.434.000	1	299.434.000	1	323.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.330.000		17.330.000		23.480.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	17.330.000	1	17.330.000	1	23.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		120.400.000		143.400.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	120.400.000	1	120.400.000	1	143.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.005.000		44.005.000		38.924.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	44.005.000	1	44.005.000	1	38.924.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.589.000		71.589.000		71.589.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	71.589.000	1	71.589.000	1	71.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.110.000		34.110.000		34.110.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34.110.000	1	34.110.000	1	34.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	1.974.787.000	95	1.974.787.000	95	1.947.551.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.050.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.050.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.600.000		14.600.000		14.050.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	14.600.000	4	14.600.000	4	14.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				14.600.000		14.600.000		14.050.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	14.600.000	4	14.600.000	4	14.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.719.000		184.719.000		147.196.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	184.719.000	100	184.719.000	100	147.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.084.000		10.084.000		8.835.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.084.000	1	10.084.000	1	8.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.794.000		30.794.000		25.710.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.794.000	1	30.794.000	1	25.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.436.000		4.436.000		3.703.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.436.000	1	4.436.000	1	3.703.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		50.000.000		43.809.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	43.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.226.000		10.226.000		8.050.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.226.000	4	10.226.000	4	8.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.179.000		71.179.000		49.089.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.179.000	4	71.179.000	4	49.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.302.760.000		1.302.760.000		1.273.183.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.302.760.000	4	1.302.760.000	4	1.273.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				296.400.000		296.400.000		267.483.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	296.400.000	4	296.400.000	4	267.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		2.460.000		1.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.460.000	4	2.460.000	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.002.400.000		1.002.400.000		1.002.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.002.400.000	4	1.002.400.000	4	1.002.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.208.000		430.208.000		471.072.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	430.208.000	1	430.208.000	1	471.072.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.952.000		37.952.000		37.952.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.952.000	1	37.952.000	1	37.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.056.000		217.056.000		268.656.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	217.056.000	1	217.056.000	1	268.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.950.000		40.950.000		30.214.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	40.950.000	1	40.950.000	1	30.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.500.000		87.500.000		87.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		24.750.000		24.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	1	24.750.000	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	1.349.132.000	95	1.349.132.000	95	1.399.993.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.147.000		155.147.000		155.455.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.147.000	100	155.147.000	100	155.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		5.764.000		7.050.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.764.000	1	5.764.000	1	7.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.890.000		40.890.000		38.141.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40.890.000	1	40.890.000	1	38.141.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.160.000		11.160.000		13.399.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.160.000	1	11.160.000	1	13.399.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		1.800.000		1.354.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				34.412.000		34.412.000		34.411.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	34.412.000	1	34.412.000	1	34.411.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.110.000		8.110.000		7.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.110.000	4	8.110.000	4	7.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.011.000		53.011.000		54.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	53.011.000	4	53.011.000	4	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					865.858.000		865.858.000		854.106.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	865.858.000	4	865.858.000	4	854.106.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		2.150.000		1.883.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.150.000	4	2.150.000	4	1.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		162.800.000		151.675.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	162.800.000	4	162.800.000	4	151.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.908.000		700.908.000		700.548.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	700.908.000	4	700.908.000	4	700.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.627.000		280.627.000		342.994.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	280.627.000	1	280.627.000	1	342.994.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.375.000		27.375.000		27.375.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.375.000	1	27.375.000	1	27.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.346.000		133.346.000		167.221.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	133.346.000	1	133.346.000	1	167.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.606.000		34.606.000		53.598.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	34.606.000	1	34.606.000	1	53.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.500.000		52.500.000		52.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.800.000		22.800.000		32.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.800.000	1	22.800.000	1	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	1.515.708.000	95	1.515.708.000	95	1.472.566.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		42.200.000		39.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.200.000	4	42.200.000	4	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		42.200.000		39.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.200.000	4	42.200.000	4	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.607.000		112.607.000		123.614.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	112.607.000	100	112.607.000	100	123.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.365.000		7.365.000		6.930.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.365.000	1	7.365.000	1	6.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.132.000		20.132.000		21.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.132.000	1	20.132.000	1	21.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.240.000		18.240.000		20.981.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	18.240.000	1	18.240.000	1	20.981.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.260.000		8.260.000		9.207.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.260.000	4	8.260.000	4	9.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.610.000		48.610.000		54.696.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.610.000	4	48.610.000	4	54.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.049.505.000		1.049.505.000		985.376.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.049.505.000	4	1.049.505.000	4	985.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.530.000		1.530.000		1.530.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.530.000	4	1.530.000	4	1.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.000.000		311.000.000		248.246.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	311.000.000	4	311.000.000	4	248.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				736.975.000		736.975.000		735.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	736.975.000	4	736.975.000	4	735.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.396.000		311.396.000		324.576.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	311.396.000	1	311.396.000	1	324.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.788.000		15.788.000		15.450.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.788.000	1	15.788.000	1	15.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.073.000		156.073.000		166.073.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	156.073.000	1	156.073.000	1	166.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.228.000		47.228.000		48.746.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	47.228.000	1	47.228.000	1	48.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.107.000		35.107.000		37.107.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.107.000	1	35.107.000	1	37.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	1.344.862.000	95	1.344.862.000	95	1.363.860.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.446.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.446.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.890.000		161.890.000		158.015.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	161.890.000	100	161.890.000	100	158.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.163.000		4.163.000		3.647.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.163.000	1	4.163.000	1	3.647.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.380.000		45.380.000		38.363.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.380.000	1	45.380.000	1	38.363.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.794.000		7.794.000		7.507.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.794.000	1	7.794.000	1	7.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				44.118.000		44.118.000		40.548.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	44.118.000	1	44.118.000	1	40.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.900.000		9.900.000		9.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.900.000	4	9.900.000	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.535.000		50.535.000		58.350.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.535.000	4	50.535.000	4	58.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					843.518.000		843.518.000		839.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	843.518.000	4	843.518.000	4	839.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				650.000		650.000		650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	650.000	4	650.000	4	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.400.000		186.400.000		183.272.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	186.400.000	4	186.400.000	4	183.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.640.000		1.640.000		1.360.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.640.000	4	1.640.000	4	1.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				654.828.000		654.828.000		654.278.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	654.828.000	4	654.828.000	4	654.278.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.954.000		271.954.000		298.839.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	271.954.000	1	271.954.000	1	298.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.854.000		22.854.000		22.854.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.854.000	1	22.854.000	1	22.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.950.000		123.950.000		153.745.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	123.950.000	1	123.950.000	1	153.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.400.000		46.400.000		46.490.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	46.400.000	1	46.400.000	1	46.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.500.000		43.500.000		43.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	43.500.000	1	43.500.000	1	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		27.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.250.000		5.250.000		5.250.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	1.474.579.000	95	1.474.579.000	95	1.488.815.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		43.360.000		43.191.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	43.360.000	4	43.360.000	4	43.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		43.360.000		43.191.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	43.360.000	4	43.360.000	4	43.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.342.000		152.342.000		149.641.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	152.342.000	100	152.342.000	100	149.641.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.277.000		3.277.000		3.277.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.277.000	1	3.277.000	1	3.277.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.484.000		32.484.000		26.653.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	32.484.000	1	32.484.000	1	26.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.760.000		7.760.000		7.178.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.760.000	1	7.760.000	1	7.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				31.821.000		31.821.000		27.881.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	31.821.000	1	31.821.000	1	27.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.750.000		9.750.000		8.140.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.750.000	4	9.750.000	4	8.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.250.000		67.250.000		76.512.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.250.000	4	67.250.000	4	76.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.013.729.000		1.013.729.000		1.006.847.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.013.729.000	4	1.013.729.000	4	1.006.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	4	500.000	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.705.000		189.705.000		182.823.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	189.705.000	4	189.705.000	4	182.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				823.524.000		823.524.000		823.524.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	823.524.000	4	823.524.000	4	823.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.148.000		265.148.000		289.136.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	265.148.000	1	265.148.000	1	289.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.800.000		134.800.000		164.788.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	134.800.000	1	134.800.000	1	164.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.250.000		11.250.000		11.250.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	11.250.000	0	11.250.000	0	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.929.000		32.929.000		32.929.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	32.929.000	1	32.929.000	1	32.929.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.143.000		53.143.000		53.143.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.143.000	1	53.143.000	1	53.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.026.000		26.026.000		20.026.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.026.000	1	26.026.000	1	20.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	1.332.485.000	95	1.332.485.000	95	1.335.120.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.514.000		42.514.000		42.450.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.514.000	4	42.514.000	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.514.000		42.514.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.514.000	4	42.514.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		450.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					121.446.000		121.446.000		117.959.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	121.446.000	100	121.446.000	100	117.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.677.000		5.677.000		6.474.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.677.000	1	5.677.000	1	6.474.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.076.000		21.076.000		18.293.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.076.000	1	21.076.000	1	18.293.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.660.000		5.660.000		5.725.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.660.000	1	5.660.000	1	5.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		840.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	840.000	4	840.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				32.787.000		32.787.000		30.745.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	32.787.000	1	32.787.000	1	30.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.990.000		13.990.000		12.725.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.990.000	4	13.990.000	4	12.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.416.000		41.416.000		43.997.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.416.000	4	41.416.000	4	43.997.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.777.000		905.777.000		897.277.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	905.777.000	4	905.777.000	4	897.277.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.377.000		1.377.000		1.606.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.377.000	4	1.377.000	4	1.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.569.000		234.569.000		225.952.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	234.569.000	4	234.569.000	4	225.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				669.831.000		669.831.000		669.719.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	669.831.000	4	669.831.000	4	669.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.748.000		262.748.000		277.434.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	262.748.000	1	262.748.000	1	277.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.285.000		27.285.000		28.891.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.285.000	1	27.285.000	1	28.891.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.105.000		92.105.000		111.105.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	92.105.000	1	92.105.000	1	111.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.787.000		35.787.000		39.789.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.787.000	1	35.787.000	1	39.789.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.778.000		65.778.000		65.356.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	65.778.000	1	65.778.000	1	65.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.793.000		31.793.000		24.293.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	31.793.000	1	31.793.000	1	24.293.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	2.313.640.000	95	2.313.640.000	95	2.291.803.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.131.000		162.131.000		173.966.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.131.000	100	162.131.000	100	173.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.150.000		7.150.000		8.507.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.150.000	1	7.150.000	1	8.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.060.000		6.060.000		6.059.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.060.000	1	6.060.000	1	6.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.026.000		5.026.000		2.160.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.026.000	1	5.026.000	1	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				55.154.000		55.154.000		59.537.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	55.154.000	1	55.154.000	1	59.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.131.000		21.131.000		22.443.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	21.131.000	4	21.131.000	4	22.443.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.610.000		67.610.000		75.260.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.610.000	4	67.610.000	4	75.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.775.957.000		1.775.957.000		1.696.694.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.775.957.000	4	1.775.957.000	4	1.696.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				960.000		960.000		841.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	960.000	4	960.000	4	841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				353.159.000		353.159.000		273.760.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	353.159.000	4	353.159.000	4	273.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.421.838.000		1.421.838.000		1.422.093.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.421.838.000	4	1.421.838.000	4	1.422.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.052.000		323.052.000		368.705.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	323.052.000	1	323.052.000	1	368.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.701.000		19.701.000		19.701.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	19.701.000	1	19.701.000	1	19.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				153.950.000		153.950.000		179.538.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	153.950.000	1	153.950.000	1	179.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.491.000		48.491.000		41.016.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	48.491.000	1	48.491.000	1	41.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.300.000		1.300.000		910.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.300.000	1	1.300.000	1	910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.020.000		61.020.000		95.690.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.020.000	1	61.020.000	1	95.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.590.000		28.590.000		21.850.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	28.590.000	1	28.590.000	1	21.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	1.438.657.000	95	1.438.657.000	95	1.483.135.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		6.700.000		6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.700.000	4	6.700.000	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		6.700.000		6.700.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.700.000	4	6.700.000	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.166.000		162.166.000		179.521.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.166.000	100	162.166.000	100	179.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		30.053.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	30.053.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.950.000		9.950.000		8.775.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.950.000	1	9.950.000	1	8.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				44.950.000		44.950.000		51.407.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	44.950.000	1	44.950.000	1	51.407.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.884.000		12.884.000		13.522.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.884.000	4	12.884.000	4	13.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.982.000		46.982.000		64.603.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.982.000	4	46.982.000	4	64.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.400.000	4	2.400.000	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					901.029.000		901.029.000		912.140.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	901.029.000	4	901.029.000	4	912.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.281.000		1.281.000		1.122.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.281.000	4	1.281.000	4	1.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.200.000		202.200.000		216.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	202.200.000	4	202.200.000	4	216.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		1.230.000		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.230.000	0	1.230.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.318.000		696.318.000		694.818.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	696.318.000	4	696.318.000	4	694.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.262.000		326.262.000		342.336.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	326.262.000	1	326.262.000	1	342.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.226.000		22.226.000		22.226.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.226.000	1	22.226.000	1	22.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.200.000		134.200.000		149.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	134.200.000	1	134.200.000	1	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.110.000		49.110.000		50.384.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	49.110.000	1	49.110.000	1	50.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				22.500.000		22.500.000		22.500.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.226.000		40.226.000		40.226.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.226.000	1	40.226.000	1	40.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	1.015.425.000	95	1.015.425.000	95	965.915.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.440.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.440.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		3.919.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	3.919.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		6.000.000		3.919.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	3.919.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.650.000		133.650.000		131.305.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.650.000	100	133.650.000	100	131.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.204.000		5.204.000		4.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.204.000	1	5.204.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.250.000		15.250.000		15.250.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.250.000	1	15.250.000	1	15.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.660.000		8.660.000		7.230.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.660.000	1	8.660.000	1	7.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				825.000		825.000		718.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	825.000	4	825.000	4	718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.496.000		41.496.000		36.381.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.496.000	1	41.496.000	1	36.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.575.000		16.575.000		13.788.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	16.575.000	4	16.575.000	4	13.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.640.000		45.640.000		53.938.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	45.640.000	4	45.640.000	4	53.938.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					681.576.000		681.576.000		644.970.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	681.576.000	4	681.576.000	4	644.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.280.000		1.280.000		700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.280.000	4	1.280.000	4	700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.740.000		162.740.000		127.795.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	162.740.000	4	162.740.000	4	127.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				517.556.000		517.556.000		516.475.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	517.556.000	4	517.556.000	4	516.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					151.699.000		151.699.000		143.281.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	151.699.000	1	151.699.000	1	143.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.511.000		20.511.000		20.511.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	20.511.000	1	20.511.000	1	20.511.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.820.000		72.820.000		77.820.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	72.820.000	1	72.820.000	1	77.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.968.000		18.968.000		15.550.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.968.000	1	18.968.000	1	15.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.350.000		13.350.000		13.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.350.000	1	13.350.000	1	13.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.050.000		6.050.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	1.624.624.000	95	1.578.101.000	95	1.552.729.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.250.000		8.250.000		8.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.250.000		8.250.000		8.250.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.559.000		150.559.000		145.812.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	150.559.000	100	150.559.000	100	145.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		5.764.000		5.764.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.764.000	1	5.764.000	1	5.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.590.000		34.590.000		32.948.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34.590.000	1	34.590.000	1	32.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.600.000		12.600.000		12.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.600.000	1	12.600.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				750.000		750.000		564.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	750.000	4	750.000	4	564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				29.821.000		29.821.000		35.628.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	29.821.000	1	29.821.000	1	35.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.463.000		14.463.000		12.593.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	14.463.000	4	14.463.000	4	12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.571.000		52.571.000		46.315.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	52.571.000	4	52.571.000	4	46.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.114.850.000		1.068.327.000		1.031.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.114.850.000	4	1.068.327.000	4	1.031.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.562.000		2.562.000		2.244.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.562.000	4	2.562.000	4	2.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.600.000		204.600.000		174.260.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.600.000	4	204.600.000	4	174.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				820.000		820.000		820.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	820.000	4	820.000	4	820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				906.868.000		860.345.000		853.752.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	906.868.000	4	860.345.000	4	853.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.465.000		308.465.000		325.153.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	308.465.000	1	308.465.000	1	325.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.080.000		18.080.000		18.080.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.080.000	1	18.080.000	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.793.000		135.793.000		171.659.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	135.793.000	1	135.793.000	1	171.659.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.229.000		35.229.000		29.051.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.229.000	1	35.229.000	1	29.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.100.000		2.100.000		2.100.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.360.000		62.360.000		52.360.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	62.360.000	1	62.360.000	1	52.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.903.000		45.903.000		45.903.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.903.000	1	45.903.000	1	45.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	1.513.868.000	95	1.513.868.000	95	1.498.079.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.456.000		42.456.000		42.456.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.456.000	4	42.456.000	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.456.000		42.456.000		42.456.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.456.000	4	42.456.000	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.307.000		162.307.000		147.387.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.307.000	100	162.307.000	100	147.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.628.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.986.000		45.986.000		39.199.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.986.000	1	45.986.000	1	39.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.223.000		4.223.000		3.525.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.223.000	1	4.223.000	1	3.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				500.000		500.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	500.000	4	500.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				20.038.000		20.038.000		25.235.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	20.038.000	1	20.038.000	1	25.235.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.950.000		18.950.000		12.771.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	18.950.000	4	18.950.000	4	12.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.610.000		67.610.000		62.029.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.610.000	4	67.610.000	4	62.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.012.615.000		1.012.615.000		982.570.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.012.615.000	4	1.012.615.000	4	982.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				980.000		980.000		858.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	980.000	4	980.000	4	858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				272.160.000		272.160.000		244.160.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	272.160.000	4	272.160.000	4	244.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				739.475.000		739.475.000		737.552.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	739.475.000	4	739.475.000	4	737.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.490.000		276.490.000		305.666.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	276.490.000	1	276.490.000	1	305.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				147.750.000		147.750.000		189.250.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	147.750.000	1	147.750.000	1	189.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.690.000		58.690.000		46.366.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	58.690.000	1	58.690.000	1	46.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.810.000		32.810.000		32.810.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.810.000	1	32.810.000	1	32.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.240.000		10.240.000		10.240.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.240.000	1	10.240.000	1	10.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	1.363.328.000	95	1.363.328.000	95	1.351.019.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.880.000		9.880.000		9.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	9.880.000	4	9.880.000	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.880.000		9.880.000		9.880.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	9.880.000	4	9.880.000	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.759.000		133.759.000		127.627.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.759.000	100	133.759.000	100	127.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.731.000		7.731.000		14.773.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.731.000	1	7.731.000	1	14.773.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.045.000		19.045.000		20.012.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.045.000	1	19.045.000	1	20.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.275.000		3.275.000		2.734.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.275.000	1	3.275.000	1	2.734.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				950.000		950.000		714.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	950.000	4	950.000	4	714.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				45.320.000		45.320.000		41.208.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45.320.000	1	45.320.000	1	41.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.850.000		2.850.000		2.430.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2.850.000	4	2.850.000	4	2.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.338.000		53.338.000		44.506.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	53.338.000	4	53.338.000	4	44.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		1.250.000		1.250.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1.250.000	4	1.250.000	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					912.564.000		912.564.000		898.322.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	912.564.000	4	912.564.000	4	898.322.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		640.000		560.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	640.000	4	640.000	4	560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.200.000		205.200.000		191.455.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	205.200.000	4	205.200.000	4	191.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		1.230.000		925.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.230.000	4	1.230.000	4	925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.494.000		705.494.000		705.382.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	705.494.000	4	705.494.000	4	705.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.625.000		264.625.000		272.752.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	264.625.000	1	264.625.000	1	272.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.541.000		18.541.000		18.541.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.541.000	1	18.541.000	1	18.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.840.000		117.840.000		126.840.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	117.840.000	1	117.840.000	1	126.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.029.000		27.029.000		26.156.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.029.000	1	27.029.000	1	26.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.250.000		68.250.000		68.250.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	68.250.000	1	68.250.000	1	68.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.965.000		16.965.000		16.965.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.965.000	1	16.965.000	1	16.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	1.492.296.000	95	1.492.296.000	95	1.461.760.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					27.000.000		27.000.000		25.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	27.000.000	4	27.000.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				27.000.000		27.000.000		25.200.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	27.000.000	4	27.000.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.772.000		149.772.000		166.058.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	149.772.000	100	149.772.000	100	166.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.087.000		8.087.000		9.850.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.087.000	1	8.087.000	1	9.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.998.000		24.998.000		24.149.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.998.000	1	24.998.000	1	24.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.110.000		7.110.000		10.118.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.110.000	1	7.110.000	1	10.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				31.922.000		31.922.000		41.481.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	31.922.000	1	31.922.000	1	41.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasiliitasi Kunjungan Tamu				6.315.000		6.315.000		8.803.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.315.000	4	6.315.000	4	8.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.340.000		68.340.000		68.657.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	68.340.000	4	68.340.000	4	68.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					926.232.000		926.232.000		874.611.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	926.232.000	4	926.232.000	4	874.611.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		300.000		800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	300.000	4	300.000	4	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.200.000		199.200.000		164.760.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	199.200.000	4	199.200.000	4	164.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		2.219.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				723.732.000		723.732.000		706.832.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	723.732.000	4	723.732.000	4	706.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.292.000		347.292.000		353.891.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	347.292.000	1	347.292.000	1	353.891.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.028.000		21.028.000		21.678.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	21.028.000	1	21.028.000	1	21.678.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				181.884.000		181.884.000		221.540.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	181.884.000	1	181.884.000	1	221.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		6.600.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	0	5.000.000	0	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.360.000		79.360.000		42.053.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	79.360.000	1	79.360.000	1	42.053.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.520.000		5.520.000		5.520.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.520.000	1	5.520.000	1	5.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	1.369.057.000	95	1.369.057.000	95	1.343.927.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					187.149.000		187.149.000		190.016.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	187.149.000	100	187.149.000	100	190.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		3.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.062.000		31.062.000		33.505.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	31.062.000	1	31.062.000	1	33.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.037.000		12.037.000		12.399.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.037.000	1	12.037.000	1	12.399.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		840.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	840.000	4	840.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		35.000.000		43.122.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	43.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.990.000		9.990.000		6.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.990.000	4	9.990.000	4	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96.220.000		96.220.000		90.740.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	96.220.000	4	96.220.000	4	90.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					880.450.000		880.450.000		799.598.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	880.450.000	4	880.450.000	4	799.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.340.000		3.340.000		4.491.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.340.000	4	3.340.000	4	4.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.300.000		204.300.000		184.013.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.300.000	4	204.300.000	4	184.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.910.000		4.910.000		3.694.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.910.000	4	4.910.000	4	3.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.900.000		667.900.000		607.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	667.900.000	4	667.900.000	4	607.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					248.958.000		248.958.000		301.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	248.958.000	1	248.958.000	1	301.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.168.000		24.168.000		27.016.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.168.000	1	24.168.000	1	27.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.460.000		127.460.000		160.540.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	127.460.000	1	127.460.000	1	160.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.037.000		37.037.000		41.026.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.037.000	1	37.037.000	1	41.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		48.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.093.000		16.093.000		16.093.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.093.000	1	16.093.000	1	16.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	%	95	1.400.360.000	95	1.400.360.000	95	1.352.360.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.217.000		178.217.000		150.568.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	178.217.000	100	178.217.000	100	150.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.683.000		6.683.000		5.855.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.683.000	1	6.683.000	1	5.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.720.000		39.720.000		33.360.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39.720.000	1	39.720.000	1	33.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		4.800.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.940.000		35.940.000		31.490.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.940.000	1	35.940.000	1	31.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.340.000		23.340.000		13.235.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	23.340.000	4	23.340.000	4	13.235.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.534.000		66.534.000		61.828.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	66.534.000	4	66.534.000	4	61.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.550.000		905.550.000		872.333.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	905.550.000	4	905.550.000	4	872.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	4	500.000	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.700.000		231.700.000		201.567.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	231.700.000	4	231.700.000	4	201.567.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				673.350.000		673.350.000		670.266.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	673.350.000	4	673.350.000	4	670.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					269.093.000		269.093.000		281.959.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	269.093.000	1	269.093.000	1	281.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.993.000		18.993.000		18.993.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.993.000	1	18.993.000	1	18.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.700.000		115.700.000		140.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	115.700.000	1	115.700.000	1	140.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	0	3.000.000	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		45.000.000		43.866.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	43.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		2.000.000		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000		16.000.000		10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.000.000	1	16.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	1.874.332.000	95	1.874.332.000	95	1.896.497.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.887.000		44.887.000		42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	44.887.000	4	44.887.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.887.000		44.887.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	44.887.000	4	44.887.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.100.000		16.100.000		16.050.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	16.100.000	4	16.100.000	4	16.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.100.000		16.100.000		16.050.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	16.100.000	4	16.100.000	4	16.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.368.000		156.368.000		141.422.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	156.368.000	100	156.368.000	100	141.422.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		6.571.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.500.000	1	7.500.000	1	6.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.100.000		17.100.000		14.760.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.100.000	1	17.100.000	1	14.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.310.000		12.310.000		10.279.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.310.000	1	12.310.000	1	10.279.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.500.000		1.500.000		650.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.500.000	4	1.500.000	4	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.008.000		50.008.000		45.118.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.008.000	1	50.008.000	1	45.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.850.000		7.850.000		4.062.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	7.850.000	4	7.850.000	4	4.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.100.000		60.100.000		59.982.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	60.100.000	4	60.100.000	4	59.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.345.327.000		1.345.327.000		1.331.736.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.345.327.000	4	1.345.327.000	4	1.331.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.260.000		3.260.000		1.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.260.000	4	3.260.000	4	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.397.000		233.397.000		221.746.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	233.397.000	4	233.397.000	4	221.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.081.670.000		1.081.670.000		1.081.390.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.081.670.000	4	1.081.670.000	4	1.081.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.650.000		311.650.000		365.289.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	311.650.000	1	311.650.000	1	365.289.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.540.000		17.540.000		17.782.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	17.540.000	1	17.540.000	1	17.782.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.036.000		140.036.000		186.010.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	140.036.000	1	140.036.000	1	186.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.754.000		18.754.000		19.747.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.754.000	1	18.754.000	1	19.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.320.000		79.320.000		84.750.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	79.320.000	1	79.320.000	1	84.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		36.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	1.581.937.000	95	1.581.937.000	95	1.546.717.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.485.000		42.485.000		42.424.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.485.000	4	42.485.000	4	42.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.485.000		42.485.000		42.424.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.485.000	4	42.485.000	4	42.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.388.000		165.388.000		139.855.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	165.388.000	100	165.388.000	100	139.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.855.000		35.855.000		33.374.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.855.000	1	35.855.000	1	33.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.287.000		4.287.000		3.579.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.287.000	1	4.287.000	1	3.579.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.250.000		56.250.000		49.285.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	56.250.000	1	56.250.000	1	49.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000		15.600.000		12.635.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.600.000	4	15.600.000	4	12.635.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.396.000		43.396.000		32.221.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	43.396.000	4	43.396.000	4	32.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.131.772.000		1.131.772.000		1.117.607.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.131.772.000	4	1.131.772.000	4	1.117.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.590.000		2.590.000		2.069.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.590.000	4	2.590.000	4	2.069.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.090.000		180.090.000		166.446.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	182650000	180.090.000	4	180.090.000	4	166.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				949.092.000		949.092.000		949.092.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	949.092.000	4	949.092.000	4	949.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.292.000		232.292.000		236.831.000		
						umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.292.000	1	232.292.000	1	236.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.667.000		12.667.000		12.867.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	12.667.000	1	12.667.000	1	12.867.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.215.000		106.215.000		111.215.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	106.215.000	1	106.215.000	1	111.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.800.000		16.800.000		16.139.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.330.000		67.330.000		67.330.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	67.330.000	1	67.330.000	1	67.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.280.000		23.280.000		23.280.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.280.000	1	23.280.000	1	23.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	%	95	1.064.914.000	95	1.064.914.000	95	1.047.181.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.729.000		101.729.000		106.387.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	101.729.000	100	101.729.000	100	106.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.201.000		4.201.000		5.180.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.201.000	1	4.201.000	1	5.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.693.000		17.693.000		14.488.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.693.000	1	17.693.000	1	14.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.999.000		2.999.000		2.903.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.999.000	1	2.999.000	1	2.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				25.136.000		25.136.000		25.983.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25.136.000	1	25.136.000	1	25.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.600.000		9.600.000		8.209.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.600.000	4	9.600.000	4	8.209.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.100.000		42.100.000		49.624.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.100.000	4	42.100.000	4	49.624.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					693.764.000		693.764.000		627.347.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	693.764.000	4	693.764.000	4	627.347.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		1.920.000		1.682.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.920.000	4	1.920.000	4	1.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.387.000		193.387.000		143.949.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	193.387.000	4	193.387.000	4	143.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		3.334.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	3.334.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				478.457.000		478.457.000		478.382.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	478.457.000	4	478.457.000	4	478.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					216.921.000		216.921.000		261.009.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	216.921.000	1	216.921.000	1	261.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.445.000		18.445.000		22.427.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.445.000	1	18.445.000	1	22.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.919.000		118.919.000		159.026.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	118.919.000	1	118.919.000	1	159.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.443.000		27.443.000		27.442.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.443.000	1	27.443.000	1	27.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.150.000		27.150.000		27.150.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.150.000	1	27.150.000	1	27.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.764.000		14.764.000		14.764.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.764.000	1	14.764.000	1	14.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.200.000		5.200.000		5.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	1.228.838.000	95	1.228.838.000	95	1.171.394.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		42.550.000		42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.550.000	4	42.550.000	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		42.550.000		42.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	4	42.550.000	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.495.000		175.495.000		180.229.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	175.495.000	100	175.495.000	100	180.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.921.000		1.921.000		2.183.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.921.000	1	1.921.000	1	2.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		72.000.000		65.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	72.000.000	1	72.000.000	1	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.596.000		13.596.000		20.303.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.596.000	1	13.596.000	1	20.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.720.000		35.720.000		38.700.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.720.000	1	35.720.000	1	38.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.228.000		13.228.000		14.735.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.228.000	4	13.228.000	4	14.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.030.000		39.030.000		38.808.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	39.030.000	4	39.030.000	4	38.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					713.800.000		713.800.000		655.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	713.800.000	4	713.800.000	4	655.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.320.000		166.320.000		107.920.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	166.320.000	4	166.320.000	4	107.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				546.480.000		546.480.000		546.480.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	546.480.000	4	546.480.000	4	546.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.993.000		296.993.000		293.215.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	296.993.000	1	296.993.000	1	293.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.918.000		18.918.000		23.200.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.918.000	1	18.918.000	1	23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.772.000		99.772.000		99.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	99.772.000	1	99.772.000	1	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.788.000		37.788.000		37.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.788.000	1	37.788.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.086.000		82.086.000		77.086.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	82.086.000	1	82.086.000	1	77.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.429.000		40.429.000		38.429.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.429.000	1	40.429.000	1	38.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	2.038.741.000	95	2.085.264.000	95	2.028.090.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.417.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.417.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					142.962.000		142.962.000		146.829.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	142.962.000	100	142.962.000	100	146.829.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.280.000		4.280.000		6.832.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.280.000	1	4.280.000	1	6.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.375.000		17.375.000		15.741.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.375.000	1	17.375.000	1	15.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.748.000		16.748.000		13.984.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.748.000	1	16.748.000	1	13.984.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		600.000		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	600.000	4	600.000	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.683.000		56.683.000		59.664.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	56.683.000	1	56.683.000	1	59.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.120.000		20.120.000		15.814.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	20.120.000	4	20.120.000	4	15.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.156.000		27.156.000		34.794.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	27.156.000	4	27.156.000	4	34.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.640.936.000		1.687.459.000		1.572.701.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.640.936.000	4	1.687.459.000	4	1.572.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				930.000		930.000		814.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	930.000	4	930.000	4	814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				329.150.000		329.150.000		305.350.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	329.150.000	4	329.150.000	4	305.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				227.500.000		227.500.000		227.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	227.500.000	4	227.500.000	4	227.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.083.356.000		1.129.879.000		1.039.037.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.083.356.000	4	1.129.879.000	4	1.039.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.843.000		206.843.000		260.643.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	206.843.000	1	206.843.000	1	260.643.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.060.000		90.060.000		95.060.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	90.060.000	1	90.060.000	1	95.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.193.000		30.193.000		39.593.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	30.193.000	1	30.193.000	1	39.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.940.000		3.940.000		3.940.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.940.000	1	3.940.000	1	3.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.400.000		29.400.000		62.300.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	29.400.000	1	29.400.000	1	62.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.250.000		45.250.000		51.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.250.000	1	45.250.000	1	51.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	1.493.589.000	95	1.493.589.000	95	1.418.733.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		37.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		37.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.677.000		129.677.000		138.657.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	129.677.000	100	129.677.000	100	138.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.496.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000		24.500.000		23.620.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	1	23.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.860.000		16.860.000		21.131.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.860.000	1	16.860.000	1	21.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				45.917.000		45.917.000		42.131.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45.917.000	1	45.917.000	1	42.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasiliitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		15.080.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	4	12.000.000	4	15.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.400.000		20.400.000		26.199.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	20.400.000	4	20.400.000	4	26.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.087.500.000		1.087.500.000		993.834.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.087.500.000	4	1.087.500.000	4	993.834.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				366.000.000		366.000.000		272.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	366.000.000	4	366.000.000	4	272.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				715.000.000		715.000.000		714.834.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	715.000.000	4	715.000.000	4	714.834.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.412.000		234.412.000		248.742.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	234.412.000	1	234.412.000	1	248.742.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.437.000		24.437.000		26.815.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.437.000	1	24.437.000	1	26.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.425.000		91.425.000		100.762.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	91.425.000	1	91.425.000	1	100.762.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.400.000		35.400.000		38.015.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.400.000	1	35.400.000	1	38.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.150.000		25.150.000		25.150.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.150.000	1	25.150.000	1	25.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	1.766.041.000	95	1.766.041.000	95	1.695.818.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.723.000		138.723.000		119.980.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.723.000	100	138.723.000	100	119.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.124.000		5.124.000		4.489.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.124.000	1	5.124.000	1	4.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.350.000		44.350.000		39.227.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	44.350.000	1	44.350.000	1	39.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.400.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				29.224.000		29.224.000		25.555.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	29.224.000	1	29.224.000	1	25.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.400.000		17.400.000		12.377.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	17.400.000	4	17.400.000	4	12.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.625.000		32.625.000		29.932.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.625.000	4	32.625.000	4	29.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.286.520.000		1.286.520.000		1.212.515.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.286.520.000	4	1.286.520.000	4	1.212.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.250.000		1.250.000		1.095.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.250.000	4	1.250.000	4	1.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				370.925.000		370.925.000		308.122.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	370.925.000	4	370.925.000	4	308.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.000.000		26.000.000		17.025.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	26.000.000	4	26.000.000	4	17.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				888.345.000		888.345.000		886.273.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	888.345.000	4	888.345.000	4	886.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.298.000		298.298.000		320.923.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	298.298.000	1	298.298.000	1	320.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.410.000		15.410.000		14.301.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.410.000	1	15.410.000	1	14.301.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.448.000		108.448.000		111.401.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	108.448.000	1	108.448.000	1	111.401.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.440.000		70.440.000		86.501.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	70.440.000	1	70.440.000	1	86.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.400.000		53.400.000		64.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.400.000	1	53.400.000	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.600.000		42.600.000		36.720.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	42.600.000	1	42.600.000	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	1.519.843.000	95	1.519.843.000	95	1.512.859.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.500.000		10.500.000		5.251.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.500.000	4	10.500.000	4	5.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.500.000		10.500.000		5.251.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.500.000	4	10.500.000	4	5.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.025.000		145.025.000		161.747.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.025.000	100	145.025.000	100	161.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		6.405.000		8.814.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.405.000	1	6.405.000	1	8.814.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.941.000		28.941.000		24.895.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	28.941.000	1	28.941.000	1	24.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.092.000		6.092.000		5.086.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.092.000	1	6.092.000	1	5.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				900.000		900.000		4.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	900.000	4	900.000	4	4.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.894.000		41.894.000		36.706.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.894.000	1	41.894.000	1	36.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.200.000		5.200.000		4.547.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.200.000	4	5.200.000	4	4.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.593.000		55.593.000		81.695.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	55.593.000	4	55.593.000	4	81.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					993.456.000		993.456.000		954.763.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	993.456.000	4	993.456.000	4	954.763.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880.000		880.000		880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	880.000	4	880.000	4	880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.360.000		186.360.000		148.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	186.360.000	4	186.360.000	4	148.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		2.460.000		1.850.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.460.000	4	2.460.000	4	1.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				803.756.000		803.756.000		803.653.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	803.756.000	4	803.756.000	4	803.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					328.362.000		328.362.000		348.598.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	328.362.000	1	328.362.000	1	348.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.444.000		27.444.000		27.034.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.444.000	1	27.444.000	1	27.034.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.555.000		136.555.000		153.865.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	136.555.000	1	136.555.000	1	153.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.663.000		37.663.000		40.999.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.663.000	1	37.663.000	1	40.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.100.000		85.100.000		85.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85.100.000	1	85.100.000	1	85.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.900.000		33.900.000		33.900.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.900.000	1	33.900.000	1	33.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	1	7.700.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	1.215.494.000	95	1.215.494.000	95	1.189.255.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.470.000		42.470.000		42.392.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.470.000	4	42.470.000	4	42.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.470.000		42.470.000		42.392.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.470.000	4	42.470.000	4	42.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.026.000		138.026.000		120.311.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.026.000	100	138.026.000	100	120.311.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.393.000		4.393.000		3.849.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.393.000	1	4.393.000	1	3.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.906.000		30.906.000		25.803.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.906.000	1	30.906.000	1	25.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.990.000		1.990.000		1.661.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.990.000	1	1.990.000	1	1.661.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.825.000		1.825.000		1.373.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.825.000	4	1.825.000	4	1.373.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.497.000		35.497.000		31.504.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.497.000	1	35.497.000	1	31.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.820.000		13.820.000		10.586.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.820.000	4	13.820.000	4	10.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.595.000		49.595.000		45.535.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.595.000	4	49.595.000	4	45.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					772.263.000		772.263.000		764.238.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	772.263.000	4	772.263.000	4	764.238.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.240.000		2.240.000		1.440.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.240.000	4	2.240.000	4	1.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.300.000		178.300.000		165.846.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	178.300.000	4	178.300.000	4	165.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				591.723.000		591.723.000		596.952.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	591.723.000	4	591.723.000	4	596.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.735.000		262.735.000		262.314.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	262.735.000	1	262.735.000	1	262.314.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.345.000		31.345.000		27.345.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.345.000	1	31.345.000	1	27.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.460.000		110.460.000		121.566.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	110.460.000	1	110.460.000	1	121.566.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.125.000		4.125.000		2.825.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	4.125.000	0	4.125.000	0	2.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.175.000		23.175.000		21.451.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	23.175.000	1	23.175.000	1	21.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.890.000		55.890.000		54.837.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	55.890.000	1	55.890.000	1	54.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.390.000		27.390.000		23.940.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.390.000	1	27.390.000	1	23.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.350.000		7.350.000		7.350.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.350.000	1	7.350.000	1	7.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	1.521.260.000	95	1.521.260.000	95	1.471.932.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.284.000		140.284.000		115.682.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	140.284.000	100	140.284.000	100	115.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.054.000		6.054.000		5.304.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.054.000	1	6.054.000	1	5.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.800.000		29.800.000		24.880.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	29.800.000	1	29.800.000	1	24.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.973.000		8.973.000		7.491.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.973.000	1	8.973.000	1	7.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.100.000		2.100.000		1.579.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.100.000	4	2.100.000	4	1.579.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.787.000		41.787.000		32.579.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.787.000	1	41.787.000	1	32.579.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.790.000		10.790.000		8.596.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.790.000	1	10.790.000	1	8.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.780.000		40.780.000		35.253.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	40.780.000	4	40.780.000	4	35.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.037.806.000		1.037.806.000		1.004.489.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.037.806.000	4	1.037.806.000	4	1.004.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.850.000		1.850.000		1.620.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.850.000	4	1.850.000	4	1.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.225.000		242.225.000		212.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	242.225.000	4	242.225.000	4	212.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		90.000.000		86.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	90.000.000	4	90.000.000	4	86.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				703.731.000		703.731.000		703.669.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	703.731.000	4	703.731.000	4	703.669.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.170.000		301.170.000		309.761.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	301.170.000	1	301.170.000	1	309.761.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.980.000		31.980.000		34.980.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.980.000	1	31.980.000	1	34.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.090.000		126.090.000		131.390.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	126.090.000	1	126.090.000	1	131.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		1.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.200.000		43.200.000		44.991.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	43.200.000	1	43.200.000	1	44.991.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.800.000		2.800.000		2.800.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.800.000	1	2.800.000	1	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.100.000		71.100.000		71.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	71.100.000	1	71.100.000	1	71.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	1.467.999.000	95	1.467.999.000	95	1.404.546.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.541.000		111.541.000		99.773.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.541.000	100	111.541.000	100	99.773.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		4.380.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.000		300.000		250.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	300.000	1	300.000	1	250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		7.925.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	7.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		50.000.000		43.809.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	43.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.750.000		12.750.000		8.727.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.750.000	4	12.750.000	4	8.727.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.491.000		34.491.000		34.682.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	34.491.000	4	34.491.000	4	34.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.085.408.000		1.085.408.000		1.017.488.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.085.408.000	4	1.085.408.000	4	1.017.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.600.000		295.600.000		235.274.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	295.600.000	4	295.600.000	4	235.274.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				789.808.000		789.808.000		782.214.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	789.808.000	4	789.808.000	4	782.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					229.050.000		229.050.000		245.285.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	229.050.000	1	229.050.000	1	245.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.704.000		11.704.000		8.902.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	11.704.000	1	11.704.000	1	8.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.459.000		82.459.000		107.459.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	82.459.000	1	82.459.000	1	107.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.927.000		41.927.000		40.044.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	41.927.000	1	41.927.000	1	40.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		44.850.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	44.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.960.000		38.960.000		35.030.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	38.960.000	1	38.960.000	1	35.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	1.554.592.000	95	1.554.592.000	95	1.548.128.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					158.046.000		158.046.000		147.116.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	158.046.000	100	158.046.000	100	147.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		11.834.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.834.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.203.000		43.203.000		38.149.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	43.203.000	1	43.203.000	1	38.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.012.000		6.012.000		5.019.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.012.000	1	6.012.000	1	5.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				36.715.000		36.715.000		34.157.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	36.715.000	1	36.715.000	1	34.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.950.000		12.950.000		10.850.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.950.000	4	12.950.000	4	10.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.166.000		49.166.000		47.107.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.166.000	4	49.166.000	4	47.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.101.260.000		1.101.260.000		1.090.726.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.101.260.000	4	1.101.260.000	4	1.090.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		3.200.000		2.803.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.200.000	4	3.200.000	4	2.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				342.000.000		342.000.000		332.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	342.000.000	4	342.000.000	4	332.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				756.060.000		756.060.000		755.923.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	756.060.000	4	756.060.000	4	755.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.786.000		232.786.000		247.786.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.786.000	1	232.786.000	1	247.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.156.000		10.156.000		10.156.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	10.156.000	1	10.156.000	1	10.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.180.000		77.180.000		87.180.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	77.180.000	1	77.180.000	1	87.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.250.000		47.250.000		52.250.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	47.250.000	1	47.250.000	1	52.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.200.000		13.200.000		13.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.200.000	1	13.200.000	1	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	1.371.567.000	95	1.371.567.000	95	1.319.447.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.026.000		145.026.000		131.403.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.026.000	100	145.026.000	100	131.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.487.000		6.487.000		6.893.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.487.000	1	6.487.000	1	6.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.525.000		41.525.000		38.224.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	41.525.000	1	41.525.000	1	38.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.640.000		8.640.000		7.213.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.640.000	1	8.640.000	1	7.213.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.320.000		1.320.000		1.410.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.320.000	4	1.320.000	4	1.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				34.820.000		34.820.000		33.162.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	34.820.000	1	34.820.000	1	33.162.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.411.000		8.411.000		9.453.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.411.000	4	8.411.000	4	9.453.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.823.000		43.823.000		35.048.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	43.823.000	4	43.823.000	4	35.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.001.386.000		1.001.386.000		957.253.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.001.386.000	4	1.001.386.000	4	957.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.180.000		2.180.000		1.910.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.180.000	4	2.180.000	4	1.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.200.000		181.200.000		137.337.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	181.200.000	4	181.200.000	4	137.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				818.006.000		818.006.000		818.006.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	818.006.000	4	818.006.000	4	818.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.655.000		182.655.000		188.353.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	182.655.000	1	182.655.000	1	188.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.838.000		11.838.000		11.838.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	11.838.000	1	11.838.000	1	11.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.246.000		91.246.000		97.771.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	91.246.000	1	91.246.000	1	97.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.137.000		21.137.000		21.476.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	21.137.000	1	21.137.000	1	21.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.354.000		38.354.000		38.354.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	38.354.000	1	38.354.000	1	38.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.091.000		14.091.000		12.925.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.091.000	1	14.091.000	1	12.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.989.000		5.989.000		5.989.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.989.000	1	5.989.000	1	5.989.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	2.213.840.000	95	2.213.840.000	95	2.210.944.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					177.477.000		177.477.000		158.109.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	177.477.000	100	177.477.000	100	158.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.019.000		12.019.000		10.530.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.019.000	1	12.019.000	1	10.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.451.000		34.451.000		35.061.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34.451.000	1	34.451.000	1	35.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		8.368.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.024.000		50.024.000		46.723.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.024.000	1	50.024.000	1	46.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.573.000		22.573.000		22.305.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	22.573.000	4	22.573.000	4	22.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.410.000		48.410.000		35.122.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.410.000	4	48.410.000	4	35.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.607.560.000		1.607.560.000		1.562.685.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.607.560.000	4	1.607.560.000	4	1.562.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		975.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.000.000		408.000.000		363.972.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	408.000.000	4	408.000.000	4	363.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.400.000		17.400.000		17.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	17.400.000	4	17.400.000	4	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.180.660.000		1.180.660.000		1.180.338.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.180.660.000	4	1.180.660.000	4	1.180.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.303.000		386.303.000		447.712.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	386.303.000	1	386.303.000	1	447.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.320.000		40.320.000		33.620.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40.320.000	1	40.320.000	1	33.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				206.510.000		206.510.000		254.270.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	206.510.000	1	206.510.000	1	254.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.473.000		50.473.000		79.322.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	50.473.000	1	50.473.000	1	79.322.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.900.000		45.900.000		45.900.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.900.000	1	45.900.000	1	45.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.600.000		30.600.000		30.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.600.000	1	30.600.000	1	30.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.500.000		8.500.000		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.500.000	1	8.500.000	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	2.062.516.000	95	2.062.516.000	95	2.023.265.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.774.000		145.774.000		130.598.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.774.000	100	145.774.000	100	130.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.560.000		9.560.000		8.376.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.560.000	1	9.560.000	1	8.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.876.000		33.876.000		28.283.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	33.876.000	1	33.876.000	1	28.283.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.810.000		4.810.000		4.015.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.810.000	1	4.810.000	1	4.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				33.528.000		33.528.000		29.649.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	33.528.000	1	33.528.000	1	29.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.600.000		12.600.000		10.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.600.000	4	12.600.000	4	10.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.400.000		51.400.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.400.000	4	51.400.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.504.027.000		1.504.027.000		1.442.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.504.027.000	4	1.504.027.000	4	1.442.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.800.000		2.800.000		2.453.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.800.000	4	2.800.000	4	2.453.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				317.400.000		317.400.000		256.381.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	317.400.000	4	317.400.000	4	256.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.147.827.000		1.147.827.000		1.147.552.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.147.827.000	4	1.147.827.000	4	1.147.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					370.215.000		370.215.000		407.781.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	370.215.000	1	370.215.000	1	407.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.655.000		27.655.000		31.655.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.655.000	1	27.655.000	1	31.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				155.760.000		155.760.000		184.060.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	155.760.000	1	155.760.000	1	184.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		54.800.000		59.066.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	54.800.000	1	54.800.000	1	59.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		41.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		11.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	1.236.220.000	95	1.236.220.000	95	1.209.528.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.438.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		4.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		6.000.000		4.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		0		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					192.977.000		192.977.000		173.433.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	192.977.000	100	192.977.000	100	173.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		4.483.000		3.927.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.483.000	1	4.483.000	1	3.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.063.000		32.063.000		31.101.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	32.063.000	1	32.063.000	1	31.101.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.960.000		17.960.000		14.995.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.960.000	1	17.960.000	1	14.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.142.000		1.142.000		859.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.142.000	4	1.142.000	4	859.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				43.724.000		43.724.000		44.315.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	43.724.000	1	43.724.000	1	44.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.255.000		15.255.000		12.995.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.255.000	4	15.255.000	4	12.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.350.000		78.350.000		65.241.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	78.350.000	4	78.350.000	4	65.241.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.623.000		710.623.000		691.776.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	710.623.000	4	710.623.000	4	691.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		3.200.000		2.803.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.200.000	4	3.200.000	4	2.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		135.000.000		116.753.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	135.000.000	4	135.000.000	4	116.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				572.423.000		572.423.000		572.220.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	572.423.000	4	572.423.000	4	572.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.120.000		284.120.000		297.881.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	284.120.000	1	284.120.000	1	297.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.630.000		22.630.000		22.630.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.630.000	1	22.630.000	1	22.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.270.000		116.270.000		126.270.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	116.270.000	1	116.270.000	1	126.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.620.000		40.620.000		44.381.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	40.620.000	1	40.620.000	1	44.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.600.000		24.600.000		24.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.600.000	1	24.600.000	1	24.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah								**374.757.000**		**374.757.000**		**277.294.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	3.723	374.757.000	3.723	374.757.000	2.8	277.294.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						374.757.000		374.757.000		277.294.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	374.757.000	90	374.757.000	90	277.294.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					374.757.000		374.757.000		277.294.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	374.757.000	100	374.757.000	100	277.294.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				202.138.000		202.138.000		167.839.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	202.138.000	4	202.138.000	4	167.839.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				172.619.000		172.619.000		109.455.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	172.619.000	4	172.619.000	4	109.455.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah									**31.324.592.000**		**31.324.592.000**		**30.089.433.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%	5.41		5.41		3.15		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								**3.819.325.000**		**3.819.325.000**		**3.398.651.000**		
						Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	-6.63	3.819.325.000	-6.63	3.819.325.000	3.69	3.398.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						315.905.000		315.905.000		269.090.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	315.905.000	100	315.905.000	100	269.090.000	Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					315.905.000		315.905.000		269.090.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah	%	100	315.905.000	100	315.905.000	100	269.090.000	Subbidang Pemanfaatan Aset	
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				315.905.000		315.905.000		269.090.000		
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	4	315.905.000	4	315.905.000	4	269.090.000	Subbidang Pemanfaatan Aset	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.503.420.000		3.503.420.000		3.129.561.000		
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	58.150.000	100	58.150.000	100	54.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					58.150.000		58.150.000		54.300.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	58.150.000	100	58.150.000	100	54.300.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				58.150.000		58.150.000		54.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	58.150.000	4	58.150.000	4	54.300.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	99.878.000	100	99.878.000	100	62.925.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					99.878.000		99.878.000		62.925.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	99.878.000	100	99.878.000	100	62.925.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				99.878.000		99.878.000		62.925.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	99.878.000	4	99.878.000	4	62.925.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	69.020.000	100	69.020.000	100	65.870.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.020.000		69.020.000		65.870.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	69.020.000	100	69.020.000	100	65.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.020.000		69.020.000		65.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.020.000	4	69.020.000	4	65.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	51.140.000	100	51.140.000	100	51.140.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.140.000		51.140.000		51.140.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	51.140.000	100	51.140.000	100	51.140.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				51.140.000		51.140.000		51.140.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	51.140.000	4	51.140.000	4	51.140.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	96.789.000	100	96.789.000	100	96.789.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					96.789.000		96.789.000		96.789.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	96.789.000	100	96.789.000	100	96.789.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				96.789.000		96.789.000		96.789.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	96.789.000	4	96.789.000	4	96.789.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	85.350.000	100	85.350.000	100	85.018.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					85.350.000		85.350.000		85.018.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	85.350.000	100	85.350.000	100	85.018.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				85.350.000		85.350.000		85.018.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	85.350.000	4	85.350.000	4	85.018.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	56.250.000	100	56.250.000	100	41.720.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					56.250.000		56.250.000		41.720.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	56.250.000	100	56.250.000	100	41.720.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				56.250.000		56.250.000		41.720.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	56.250.000	4	56.250.000	4	41.720.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	61.750.000	100	61.750.000	100	61.113.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					61.750.000		61.750.000		61.113.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	61.750.000	100	61.750.000	100	61.113.000		
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				61.750.000		61.750.000		61.113.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	61.750.000	4	61.750.000	4	61.113.000		OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	69.925.000	100	69.925.000	100	36.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.925.000		69.925.000		36.000.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	69.925.000	100	69.925.000	100	36.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.925.000		69.925.000		36.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.925.000	4	69.925.000	4	36.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	37.363.000	100	37.363.000	100	35.338.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.363.000		37.363.000		35.338.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	37.363.000	100	37.363.000	100	35.338.000		
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				37.363.000		37.363.000		35.338.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	37.363.000	4	37.363.000	4	35.338.000		OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	89.870.000	100	89.870.000	100	81.390.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					89.870.000		89.870.000		81.390.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	89.870.000	100	89.870.000	100	81.390.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				89.870.000		89.870.000		81.390.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	89.870.000	4	89.870.000	4	81.390.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	63.000.000	100	63.000.000	100	66.200.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					63.000.000		63.000.000		66.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD kendal	%	100	63.000.000	100	63.000.000	100	66.200.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				63.000.000		63.000.000		66.200.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	63.000.000	4	63.000.000	4	66.200.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	68.700.000	100	68.700.000	100	58.420.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					68.700.000		68.700.000		58.420.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	68.700.000	100	68.700.000	100	58.420.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				68.700.000		68.700.000		58.420.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	68.700.000	4	68.700.000	4	58.420.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	109.650.000	100	109.650.000	100	55.395.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					109.650.000		109.650.000		55.395.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	109.650.000	100	109.650.000	100	55.395.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				109.650.000		109.650.000		55.395.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	109.650.000	4	109.650.000	4	55.395.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	44.858.000	100	44.858.000	100	43.395.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					44.858.000		44.858.000		43.395.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	44.858.000	100	44.858.000	100	43.395.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				44.858.000		44.858.000		43.395.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	44.858.000	4	44.858.000	4	43.395.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	165.070.000	100	165.070.000	100	163.120.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					165.070.000		165.070.000		163.120.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	165.070.000	100	165.070.000	100	163.120.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				165.070.000		165.070.000		163.120.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	165.070.000	4	165.070.000	4	163.120.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	32.200.000	100	32.200.000	100	27.990.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.200.000		32.200.000		27.990.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	32.200.000	100	32.200.000	100	27.990.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				32.200.000		32.200.000		27.990.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	32.200.000	4	32.200.000	4	27.990.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	26.675.000	100	26.675.000	100	25.775.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					26.675.000		26.675.000		25.775.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	26.675.000	100	26.675.000	100	25.775.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				26.675.000		26.675.000		25.775.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	26.675.000	4	26.675.000	4	25.775.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	92.250.000	100	92.250.000	100	89.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					92.250.000		92.250.000		89.250.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	92.250.000	100	92.250.000	100	89.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				92.250.000		92.250.000		89.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	92.250.000	4	92.250.000	4	89.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	73.100.000	100	73.100.000	100	72.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.100.000		73.100.000		72.425.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	73.100.000	100	73.100.000	100	72.425.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				73.100.000		73.100.000		72.425.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	73.100.000	4	73.100.000	4	72.425.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	81.400.000	100	81.400.000	100	77.050.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					81.400.000		81.400.000		77.050.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	81.400.000	100	81.400.000	100	77.050.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				81.400.000		81.400.000		77.050.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	81.400.000	4	81.400.000	4	77.050.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	215.750.000	100	215.750.000	100	161.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					215.750.000		215.750.000		161.100.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	215.750.000	100	215.750.000	100	161.100.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				215.750.000		215.750.000		161.100.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	215.750.000	4	215.750.000	4	161.100.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	69.000.000	100	69.000.000	100	68.500.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.000.000		69.000.000		68.500.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	69.000.000	100	69.000.000	100	68.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.000.000		69.000.000		68.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.000.000	4	69.000.000	4	68.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	59.650.000	100	59.650.000	100	59.125.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					59.650.000		59.650.000		59.125.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	59.650.000	100	59.650.000	100	59.125.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				59.650.000		59.650.000		59.125.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	59.650.000	4	59.650.000	4	59.125.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	29.550.000	100	29.550.000	100	34.575.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					29.550.000		29.550.000		34.575.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	29.550.000	100	29.550.000	100	34.575.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				29.550.000		29.550.000		34.575.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	29.550.000	4	29.550.000	4	34.575.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	176.520.000	100	176.520.000	100	176.520.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.520.000		176.520.000		176.520.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	176.520.000	100	176.520.000	100	176.520.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				176.520.000		176.520.000		176.520.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	176.520.000	4	176.520.000	4	176.520.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	85.400.000	100	85.400.000	100	80.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					85.400.000		85.400.000		80.300.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	85.400.000	100	85.400.000	100	80.300.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				85.400.000		85.400.000		80.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	85.400.000	4	85.400.000	4	80.300.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	78.156.000	100	78.156.000	100	70.058.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					78.156.000		78.156.000		70.058.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	78.156.000	100	78.156.000	100	70.058.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				78.156.000		78.156.000		70.058.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	78.156.000	4	78.156.000	4	70.058.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	56.711.000	100	56.711.000	100	56.711.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					56.711.000		56.711.000		56.711.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	56.711.000	100	56.711.000	100	56.711.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				56.711.000		56.711.000		56.711.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	56.711.000	4	56.711.000	4	56.711.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	59.330.000	100	59.330.000	100	58.490.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					59.330.000		59.330.000		58.490.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	59.330.000	100	59.330.000	100	58.490.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				59.330.000		59.330.000		58.490.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	59.330.000	4	59.330.000	4	58.490.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	46.800.000	100	46.800.000	100	43.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					46.800.000		46.800.000		43.650.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	46.800.000	100	46.800.000	100	43.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				46.800.000		46.800.000		43.650.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	46.800.000	4	46.800.000	4	43.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	69.400.000	100	69.400.000	100	65.500.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.400.000		69.400.000		65.500.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	69.400.000	100	69.400.000	100	65.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.400.000		69.400.000		65.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.400.000	4	69.400.000	4	65.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	54.000.000	100	54.000.000	100	44.635.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					54.000.000		54.000.000		44.635.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	54.000.000	100	54.000.000	100	44.635.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				54.000.000		54.000.000		44.635.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	54.000.000	4	54.000.000	4	44.635.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	68.420.000	100	68.420.000	100	59.170.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					68.420.000		68.420.000		59.170.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	68.420.000	100	68.420.000	100	59.170.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				68.420.000		68.420.000		59.170.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	68.420.000	4	68.420.000	4	59.170.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	80.600.000	100	80.600.000	100	76.180.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					80.600.000		80.600.000		76.180.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	80.600.000	100	80.600.000	100	76.180.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				80.600.000		80.600.000		76.180.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	80.600.000	4	80.600.000	4	76.180.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	75.500.000	100	75.500.000	100	80.350.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					75.500.000		75.500.000		80.350.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	75.500.000	100	75.500.000	100	80.350.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				75.500.000		75.500.000		80.350.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	75.500.000	4	75.500.000	4	80.350.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	28.150.000	100	28.150.000	100	27.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.150.000		28.150.000		27.250.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	28.150.000	100	28.150.000	100	27.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				28.150.000		28.150.000		27.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	28.150.000	4	28.150.000	4	27.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	718.095.000	100	718.095.000	100	616.824.000	Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					718.095.000		718.095.000		616.824.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	718.095.000	100	718.095.000	100	616.824.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				718.095.000		718.095.000		616.824.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	718.095.000	4	718.095.000	4	616.824.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah								**27.505.267.000**		**27.505.267.000**		**26.690.782.000**		
						Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	8.91	27.505.267.000	8.91	27.505.267.000	3	26.690.782.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						27.505.267.000		27.505.267.000		26.690.782.000		
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	267.115.000	100	267.115.000	100	274.790.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					267.115.000		267.115.000		274.790.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	267.115.000	100	267.115.000	100	274.790.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				267.115.000		267.115.000		274.790.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	267.115.000	4	267.115.000	4	274.790.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	343.481.000	100	343.481.000	100	350.675.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					343.481.000		343.481.000		350.675.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	343.481.000	100	343.481.000	100	350.675.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				343.481.000		343.481.000		350.675.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	343.481.000	4	343.481.000	4	350.675.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	267.850.000	100	267.850.000	100	262.715.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					267.850.000		267.850.000		262.715.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	267.850.000	100	267.850.000	100	262.715.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				267.850.000		267.850.000		262.715.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	267.850.000	4	267.850.000	4	262.715.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	257.625.000	100	257.625.000	100	217.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					257.625.000		257.625.000		217.750.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	257.625.000	100	257.625.000	100	217.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				257.625.000		257.625.000		217.750.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	257.625.000	4	257.625.000	4	217.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	383.013.000	100	383.013.000	100	370.642.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					383.013.000		383.013.000		370.642.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	383.013.000	100	383.013.000	100	370.642.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				383.013.000		383.013.000		370.642.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	383.013.000	4	383.013.000	4	370.642.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	395.160.000	100	395.160.000	100	401.285.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					395.160.000		395.160.000		401.285.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	395.160.000	100	395.160.000	100	401.285.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				395.160.000		395.160.000		401.285.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	395.160.000	4	395.160.000	4	401.285.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	416.150.000	100	416.150.000	100	348.575.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					416.150.000		416.150.000		348.575.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	416.150.000	100	416.150.000	100	348.575.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				416.150.000		416.150.000		348.575.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	416.150.000	4	416.150.000	4	348.575.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	369.150.000	100	369.150.000	100	377.995.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					369.150.000		369.150.000		377.995.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	369.150.000	100	369.150.000	100	377.995.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				369.150.000		369.150.000		377.995.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	369.150.000	4	369.150.000	4	377.995.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	325.170.000	100	325.170.000	100	328.450.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					325.170.000		325.170.000		328.450.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	325.170.000	100	325.170.000	100	328.450.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				325.170.000		325.170.000		328.450.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	325.170.000	4	325.170.000	4	328.450.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	294.850.000	100	294.850.000	100	297.846.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					294.850.000		294.850.000		297.846.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	294.850.000	100	294.850.000	100	297.846.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				294.850.000		294.850.000		297.846.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	294.850.000	4	294.850.000	4	297.846.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	291.540.000	100	291.540.000	100	292.225.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					291.540.000		291.540.000		292.225.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	291.540.000	100	291.540.000	100	292.225.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				291.540.000		291.540.000		292.225.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	291.540.000	4	291.540.000	4	292.225.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	399.033.000	100	399.033.000	100	370.785.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					399.033.000		399.033.000		370.785.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	399.033.000	100	399.033.000	100	370.785.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				399.033.000		399.033.000		370.785.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	399.033.000	4	399.033.000	4	370.785.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	364.300.000	100	364.300.000	100	346.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					364.300.000		364.300.000		346.900.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	364.300.000	100	364.300.000	100	346.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				364.300.000		364.300.000		346.900.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	364.300.000	4	364.300.000	4	346.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	251.100.000	100	251.100.000	100	237.050.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					251.100.000		251.100.000		237.050.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	251.100.000	100	251.100.000	100	237.050.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				251.100.000		251.100.000		237.050.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	251.100.000	4	251.100.000	4	237.050.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	232.435.000	100	232.435.000	100	233.965.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					232.435.000		232.435.000		233.965.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	232.435.000	100	232.435.000	100	233.965.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				232.435.000		232.435.000		233.965.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	232.435.000	4	232.435.000	4	233.965.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	301.091.000	100	301.091.000	100	306.708.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					301.091.000		301.091.000		306.708.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	301.091.000	100	301.091.000	100	306.708.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				301.091.000		301.091.000		306.708.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	301.091.000	4	301.091.000	4	306.708.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	340.565.000	100	340.565.000	100	348.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					340.565.000		340.565.000		348.850.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	340.565.000	100	340.565.000	100	348.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				340.565.000		340.565.000		348.850.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	340.565.000	4	340.565.000	4	348.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	205.477.000	100	205.477.000	100	181.302.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					205.477.000		205.477.000		181.302.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	205.477.000	100	205.477.000	100	181.302.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				205.477.000		205.477.000		181.302.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	205.477.000	4	205.477.000	4	181.302.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	406.635.000	100	406.635.000	100	422.135.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					406.635.000		406.635.000		422.135.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	406.635.000	100	406.635.000	100	422.135.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				406.635.000		406.635.000		422.135.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	406.635.000	4	406.635.000	4	422.135.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	251.718.000	100	251.718.000	100	272.455.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					251.718.000		251.718.000		272.455.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	251.718.000	100	251.718.000	100	272.455.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				251.718.000		251.718.000		272.455.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	251.718.000	4	251.718.000	4	272.455.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	312.900.000	100	312.900.000	100	332.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					312.900.000		312.900.000		332.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	312.900.000	100	312.900.000	100	332.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				312.900.000		312.900.000		332.150.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	312.900.000	4	312.900.000	4	332.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	409.659.000	100	409.659.000	100	449.435.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					409.659.000		409.659.000		449.435.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	409.659.000	100	409.659.000	100	449.435.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				409.659.000		409.659.000		449.435.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	409.659.000	4	409.659.000	4	449.435.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	238.700.000	100	238.700.000	100	249.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					238.700.000		238.700.000		249.750.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	238.700.000	100	238.700.000	100	249.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				238.700.000		238.700.000		249.750.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	238.700.000	4	238.700.000	4	249.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	271.915.000	100	271.915.000	100	281.385.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					271.915.000		271.915.000		281.385.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	271.915.000	100	271.915.000	100	281.385.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				271.915.000		271.915.000		281.385.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	271.915.000	4	271.915.000	4	281.385.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	157.690.000	100	157.690.000	100	167.990.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					157.690.000		157.690.000		167.990.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	157.690.000	100	157.690.000	100	167.990.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				157.690.000		157.690.000		167.990.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	157.690.000	4	157.690.000	4	167.990.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	485.745.000	100	485.745.000	100	492.906.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					485.745.000		485.745.000		492.906.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	485.745.000	100	485.745.000	100	492.906.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				485.745.000		485.745.000		492.906.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	485.745.000	4	485.745.000	4	492.906.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	347.150.000	100	347.150.000	100	361.669.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					347.150.000		347.150.000		361.669.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	347.150.000	100	347.150.000	100	361.669.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				347.150.000		347.150.000		361.669.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	347.150.000	4	347.150.000	4	361.669.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	327.900.000	100	327.900.000	100	304.929.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					327.900.000		327.900.000		304.929.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	327.900.000	100	327.900.000	100	304.929.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				327.900.000		327.900.000		304.929.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	327.900.000	4	327.900.000	4	304.929.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	409.412.000	100	409.412.000	100	382.735.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					409.412.000		409.412.000		382.735.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	409.412.000	100	409.412.000	100	382.735.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				409.412.000		409.412.000		382.735.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	409.412.000	4	409.412.000	4	382.735.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	325.920.000	100	325.920.000	100	332.210.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					325.920.000		325.920.000		332.210.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	325.920.000	100	325.920.000	100	332.210.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				325.920.000		325.920.000		332.210.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	325.920.000	4	325.920.000	4	332.210.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	296.425.000	100	296.425.000	100	290.575.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					296.425.000		296.425.000		290.575.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	296.425.000	100	296.425.000	100	290.575.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				296.425.000		296.425.000		290.575.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	296.425.000	4	296.425.000	4	290.575.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	357.837.000	100	357.837.000	100	363.706.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					357.837.000		357.837.000		363.706.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	357.837.000	100	357.837.000	100	363.706.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				357.837.000		357.837.000		363.706.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	357.837.000	4	357.837.000	4	363.706.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	215.970.000	100	215.970.000	100	232.280.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					215.970.000		215.970.000		232.280.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	215.970.000	100	215.970.000	100	232.280.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				215.970.000		215.970.000		232.280.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	215.970.000	4	215.970.000	4	232.280.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	237.610.000	100	237.610.000	100	234.322.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					237.610.000		237.610.000		234.322.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	237.610.000	100	237.610.000	100	234.322.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				237.610.000		237.610.000		234.322.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	237.610.000	4	237.610.000	4	234.322.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				237.610.000		237.610.000		234.322.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	237.610.000	4	237.610.000	4	234.322.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	324.300.000	100	324.300.000	100	305.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					324.300.000		324.300.000		305.100.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	324.300.000	100	324.300.000	100	305.100.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				324.300.000		324.300.000		305.100.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	324.300.000	4	324.300.000	4	305.100.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	279.650.000	100	279.650.000	100	289.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					279.650.000		279.650.000		289.750.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	279.650.000	100	279.650.000	100	289.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				279.650.000		279.650.000		289.750.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	279.650.000	4	279.650.000	4	289.750.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	209.340.000	100	209.340.000	100	217.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					209.340.000		209.340.000		217.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	209.340.000	100	209.340.000	100	217.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				209.340.000		209.340.000		217.150.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	209.340.000	4	209.340.000	4	217.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	11.248.986.000	100	11.248.986.000	100	10.901.792.000	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.248.986.000		11.248.986.000		10.901.792.000		
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	%	100	332.956.000	100	332.956.000	100	330.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		5.02.04.1.01.0004			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				332.956.000		332.956.000		330.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	1	332.956.000	1	332.956.000	1	330.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	%	100	10.916.030.000	100	10.916.030.000	100	10.571.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		5.02.04.1.01.0006			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				916.030.000		916.030.000		906.646.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	916.030.000	4	916.030.000	4	906.646.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10.000.000.000		10.000.000.000		9.664.646.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	10.000.000.000	4	10.000.000.000	4	9.664.646.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	600.000.000	100	600.000.000	100	472.735.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					600.000.000		600.000.000		472.735.000		
						Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	%	100	369.673.000	100	369.673.000	100	234.353.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				369.673.000		369.673.000		234.353.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	4	369.673.000	4	369.673.000	4	234.353.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	230.327.000	100	230.327.000	100	238.382.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				230.327.000		230.327.000		238.382.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	230.327.000	4	230.327.000	4	238.382.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	1.370.700.000	100	1.370.700.000	100	1.390.728.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.370.700.000		1.370.700.000		1.390.728.000		
						Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	%	100	850.700.000	100	850.700.000	100	708.442.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan Pendapatan	
		5.02.04.1.01.0001			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				850.700.000		850.700.000		708.442.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	850.700.000	4	850.700.000	4	708.442.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan Pendapatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	520.000.000	100	520.000.000	100	682.286.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				520.000.000		520.000.000		682.286.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	520.000.000	4	520.000.000	4	682.286.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	2.714.000.000	100	2.714.000.000	100	2.394.387.000	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.714.000.000		2.714.000.000		2.394.387.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	%	100	773.000.000	100	773.000.000	100	678.075.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				723.000.000		723.000.000		662.184.000		
						Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	4	723.000.000	4	723.000.000	4	662.184.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50.000.000		50.000.000		15.891.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetuj	4	50.000.000	4	50.000.000	4	15.891.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah	%	100	1.941.000.000	100	1.941.000.000	100	1.716.312.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.941.000.000		1.941.000.000		1.716.312.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	1.941.000.000	4	1.941.000.000	4	1.716.312.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**262.070.644.000**		**262.070.644.000**		**259.653.097.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									**6.857.812.348.000**		**6.507.880.569.000**		**6.377.945.266.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.85		97.85		98.06		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								**6.857.812.348.000**		**6.507.880.569.000**		**6.377.945.266.000**		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	6.853.312.348.000	100	6.503.380.569.000	100	6.373.671.543.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						6.853.312.348.000		6.503.380.569.000		6.373.671.543.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	6.846.312.348.000	100	6.496.380.569.000	100	6.367.833.112.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					6.846.312.348.000		6.496.380.569.000		6.367.833.112.000		
						Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	6.846.312.348.000	1	6.496.380.569.000	1	6.367.833.112.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.425.944.120.000		2.432.499.020.000		1.825.891.815.000		
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	2.425.944.120.000	1	2.432.499.020.000	1	1.825.891.815.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.000.000.000		20.000.000.000		33.300.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	20.000.000.000	1	20.000.000.000	1	33.300.800.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4.400.368.228.000		4.043.881.549.000		4.508.640.497.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	4.400.368.228.000	1	4.043.881.549.000	1	4.508.640.497.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	481.800.000	100	481.800.000	100	796.228.000	Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					481.800.000		481.800.000		796.228.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	70	481.800.000	70	481.800.000	70	796.228.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				168.600.000		168.600.000		213.504.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	35	168.600.000	35	168.600.000	35	213.504.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				168.600.000		168.600.000		500.284.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35	168.600.000	35	168.600.000	35	500.284.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0011			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				144.600.000		144.600.000		82.440.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	144.600.000	35	144.600.000	35	82.440.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
						Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	6.518.200.000	100	6.518.200.000	100	5.042.203.000	Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					6.518.200.000		6.518.200.000		5.042.203.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	2	4.760.200.000	2	4.760.200.000	2	4.331.272.000	Pokja Penyusunan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2.731.200.000		2.731.200.000		2.368.105.000		
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.731.200.000	2	2.731.200.000	2	2.368.105.000	Pokja Penyusunan Anggaran	OPD Provinsi
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.029.000.000		2.029.000.000		1.963.167.000		
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2.029.000.000	2	2.029.000.000	2	1.963.167.000	Pokja Penyusunan Anggaran	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	2	116.000.000	2	116.000.000	2	96.800.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				58.000.000		58.000.000		48.400.000		
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	58.000.000	2	58.000.000	2	48.400.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				58.000.000		58.000.000		48.400.000		
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	58.000.000	2	58.000.000	2	48.400.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	105	0	105	0	105	0	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.01.0013			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	2	1.642.000.000	2	1.642.000.000	2	614.131.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.642.000.000		1.642.000.000		614.131.000		
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	1.642.000.000	2	1.642.000.000	2	614.131.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.529.165.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.500.000.000		3.500.000.000		3.529.165.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.529.165.000	Bidang Akuntansi	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					125.720.000		125.720.000		602.150.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	35	125.720.000	35	125.720.000	35	602.150.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			125.720.000		125.720.000		602.150.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35	125.720.000	35	125.720.000	35	602.150.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				0		0		0		
						Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.374.280.000		3.374.280.000		2.927.015.000		
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1	2.306.774.000	1	2.306.774.000	1	2.064.025.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			1.624.625.000		1.624.625.000		1.329.501.000		
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	1.624.625.000	2	1.624.625.000	2	1.329.501.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				682.149.000		682.149.000		734.524.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	682.149.000	1	682.149.000	1	734.524.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	OPD Provinsi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Dokumen	1	333.116.000	1	333.116.000	1	296.183.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				273.286.000		273.286.000		245.630.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1	273.286.000	1	273.286.000	1	245.630.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				59.830.000		59.830.000		50.553.000		
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	0	59.830.000	0	59.830.000	1	50.553.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran	Dokumen	1	734.390.000	1	734.390.000	1	566.807.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				292.165.000		292.165.000		141.572.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	292.165.000	0	292.165.000	1	141.572.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				442.225.000		442.225.000		425.235.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	442.225.000	41	442.225.000	41	425.235.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD Provinsi
						Persentase realisasi APBD	%	94.2	1.000.000.000	94.2	1.000.000.000	94.2	744.558.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1.000.000.000		1.000.000.000		744.558.000		
						Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	744.558.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					900.000.000		900.000.000		652.008.000		
						Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	201.755.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				250.000.000		250.000.000		201.755.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	201.755.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	OPD Provinsi
		5.02.02.1.03.0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	176.268.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				250.000.000		250.000.000		176.268.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	176.268.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	OPD Provinsi
		5.02.02.1.03.0010			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0		0		0		
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Penatausahaan Keuangan	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	273.985.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				400.000.000		400.000.000		273.985.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	3	400.000.000	3	400.000.000	3	273.985.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					100.000.000		100.000.000		92.550.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan yang tersusun	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	92.550.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				100.000.000		100.000.000		92.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	92.550.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.06.0003			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									**78.751.028.000**		**78.729.527.000**		**58.682.220.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	76		76		76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								**78.066.028.000**		**77.994.527.000**		**58.173.654.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	81.5	78.066.028.000	81.5	77.994.527.000	81.5	58.173.654.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						78.066.028.000		77.994.527.000		58.173.654.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	69.671.780.000	100	69.072.079.000	100	47.857.072.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55.829.727.000		54.596.171.000		30.501.012.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	55.829.727.000	1	54.596.171.000	1	30.501.012.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.639.727.000		52.406.171.000		28.536.317.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	53.639.727.000	150	52.406.171.000	150	28.536.317.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.750.000.000		1.750.000.000		1.583.722.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	1.583.722.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				240.000.000		240.000.000		218.702.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	240.000.000	1	240.000.000	1	218.702.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000		200.000.000		162.271.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	162.271.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		215.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400.000.000		400.000.000		215.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		13.449.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	13.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		13.449.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	150.000.000	5	150.000.000	1	13.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.005.500.000		4.005.500.000		3.535.009.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	4.005.500.000	100	4.005.500.000	100	3.535.009.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				400.000.000		400.000.000		350.473.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	400.000.000	4	400.000.000	4	350.473.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				850.000.000		850.000.000		670.465.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	850.000.000	20	850.000.000	20	670.465.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				550.000.000		550.000.000		459.201.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	550.000.000	25	550.000.000	25	459.201.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	450.000.000	10	450.000.000	10	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000		400.000.000		354.435.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	354.435.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950.000.000		950.000.000		871.583.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	950.000.000	1	950.000.000	1	871.583.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				405.500.000		405.500.000		378.852.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	405.500.000	1	405.500.000	1	378.852.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					948.750.000		1.582.605.000		1.680.942.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	948.750.000	15	1.582.605.000	15	1.680.942.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				150.000.000		150.000.000		137.618.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	150.000.000	10	150.000.000	10	137.618.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				798.750.000		1.432.605.000		1.543.324.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	798.750.000	10	1.432.605.000	10	1.543.324.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.210.207.000		4.210.207.000		8.517.125.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.210.207.000	1	4.210.207.000	1	8.517.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.500.000		10.500.000		9.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.500.000	1	10.500.000	1	9.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000		750.000.000		750.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		142.218.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	142.218.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.249.707.000		3.249.707.000		7.615.707.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.249.707.000	1	3.249.707.000	1	7.615.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.127.596.000		4.127.596.000		3.394.535.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	4.127.596.000	50	4.127.596.000	50	3.394.535.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	40	1.100.000.000	40	1.100.000.000	40	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.777.596.000		2.777.596.000		2.044.535.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	2.777.596.000	8	2.777.596.000	8	2.044.535.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81.5	8.394.248.000	81.5	8.922.448.000	81.5	10.316.582.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.000.000		465.000.000		561.557.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	81.5	465.000.000	81.5	465.000.000	81.5	561.557.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				105.000.000		105.000.000		92.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.000.000	4	105.000.000	4	92.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		200.000.000		362.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	4	200.000.000	4	362.600.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		26.565.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	26.565.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		80.392.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	80.392.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					196.060.000		494.260.000		1.290.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	196.060.000	20	494.260.000	20	1.290.700.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				40.000.000		320.000.000		316.800.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	40.000.000	20	320.000.000	20	316.800.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				156.060.000		174.260.000		973.900.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	156.060.000	0	174.260.000	0	973.900.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.191.948.000		4.191.948.000		4.170.534.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.191.948.000	1	4.191.948.000	1	4.170.534.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.260.000		1.260.000		1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.260.000	1	1.260.000	1	1.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.230.000.000		1.230.000.000		1.230.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.230.000.000	1	1.230.000.000	1	1.230.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.960.688.000		2.960.688.000		2.939.534.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.960.688.000	1	2.960.688.000	1	2.939.534.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.541.240.000		3.771.240.000		4.293.791.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	3.541.240.000	730	3.771.240.000	730	4.293.791.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	140.000.000	15	140.000.000	15	140.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				73.500.000		73.500.000		59.925.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	350	73.500.000	350	73.500.000	350	59.925.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.543.940.000		843.940.000		799.540.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	350	1.543.940.000	350	843.940.000	350	799.540.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.783.800.000		2.713.800.000		3.294.326.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	1.783.800.000	15	2.713.800.000	15	3.294.326.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								**685.000.000**		**735.000.000**		**508.566.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	2.7	685.000.000	2.7	735.000.000	2.7	508.566.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						685.000.000		735.000.000		508.566.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	685.000.000	100	735.000.000	100	508.566.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					685.000.000		735.000.000		508.566.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	685.000.000	100	735.000.000	100	508.566.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				305.000.000		305.000.000		205.484.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	305.000.000	8	305.000.000	8	205.484.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				240.000.000		290.000.000		197.102.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	240.000.000	1	290.000.000	1	197.102.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				60.000.000		60.000.000		47.209.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	60.000.000	1	60.000.000	1	47.209.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				80.000.000		80.000.000		58.771.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	58.771.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.479.448.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indek Pengelolaan Aset (IPA)	Angka	3.12		3.12		3.12		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan								**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.479.448.000**		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.479.448.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2.500.000.000		2.500.000.000		2.479.448.000		
						Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50.5	593.261.000	50.5	593.261.000	50.5	723.704.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					593.261.000		593.261.000		723.704.000		
						Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Dokumen	1	518.381.000	1	518.381.000	1	662.720.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				518.381.000		518.381.000		662.720.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	518.381.000	3	518.381.000	3	662.720.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Dokumen	1	74.880.000	1	74.880.000	1	60.984.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				74.880.000		74.880.000		60.984.000		
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	74.880.000	1	74.880.000	1	60.984.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	541.875.000	9	541.875.000	9	351.647.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					541.875.000		541.875.000		351.647.000		
						Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Dokumen	1	541.875.000	1	541.875.000	1	351.647.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				223.875.000		223.875.000		96.599.000		
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	42	223.875.000	42	223.875.000	42	96.599.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				318.000.000		318.000.000		255.048.000		
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	84	318.000.000	84	318.000.000	84	255.048.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70.5	584.864.000	70.5	584.864.000	70.5	706.098.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					584.864.000		584.864.000		706.098.000		
						Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD	Dokumen	1	584.864.000	1	584.864.000	1	706.098.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				584.864.000		584.864.000		706.098.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	584.864.000	1	584.864.000	1	706.098.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	780.000.000	100	780.000.000	100	697.999.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					780.000.000		780.000.000		697.999.000		
						Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD	%	100	450.000.000	100	450.000.000	100	393.849.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				450.000.000		450.000.000		393.849.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	450.000.000	42	450.000.000	42	393.849.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	%	100	330.000.000	100	330.000.000	100	304.150.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				330.000.000		330.000.000		304.150.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	330.000.000	2	330.000.000	2	304.150.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
		5.02.03.1.01.0011			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	0	0	1	0	0	0	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	%	100	0	100	0	100	0	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				0		0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	OPD Provinsi
JUMLAH									**6.939.063.376.000**		**6.589.110.096.000**		**6.439.106.934.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah									**30.372.842.000**		**30.372.842.000**		**29.300.860.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	86.5		86.5		86.5		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah								**30.066.842.000**		**30.066.842.000**		**29.045.354.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	92	30.066.842.000	92	30.066.842.000	92	29.045.354.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.066.842.000		30.066.842.000		29.045.354.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	30.026.842.000	100	30.026.842.000	100	29.013.956.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.226.255.000		26.226.255.000		25.380.008.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	26.226.255.000	14	26.226.255.000	14	25.380.008.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25.317.611.000		25.317.611.000		24.451.172.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	25.317.611.000	150	25.317.611.000	150	24.451.172.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				858.644.000		858.644.000		885.992.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	858.644.000	12	858.644.000	12	885.992.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000		30.000.000		24.861.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	30.000.000	7	30.000.000	7	24.861.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.000.000		8.962.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.962.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		10.000.000		9.021.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.021.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		8.967.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.967.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		8.967.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.967.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.087.000		99.087.000		80.040.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	99.087.000	100	99.087.000	100	80.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	0	200	0	200	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				74.087.000		74.087.000		60.822.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	74.087.000	30	74.087.000	30	60.822.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		25.000.000		19.218.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	25.000.000	140	25.000.000	140	19.218.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					697.500.000		697.500.000		594.797.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	697.500.000	100	697.500.000	100	594.797.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		15.523.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	15.523.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	42.000.000	2	42.000.000	2	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		18.872.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	18.872.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	12	0	12	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				140.500.000		140.500.000		120.296.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	140.500.000	12	140.500.000	12	120.296.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		235.058.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	235.058.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		22.193.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				65.000.000		65.000.000		60.855.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	65.000.000	12	65.000.000	12	60.855.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					375.000.000		375.000.000		361.318.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	375.000.000	5	375.000.000	5	361.318.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	2	0	2	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		68.318.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	100.000.000	3	100.000.000	3	68.318.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		218.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	200.000.000	6	200.000.000	6	218.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.992.000.000		1.992.000.000		1.988.551.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.992.000.000	12	1.992.000.000	12	1.988.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		3.504.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	3.504.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.000.000		710.000.000		712.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	710.000.000	12	710.000.000	12	712.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		25.047.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	25.047.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.248.000.000		1.248.000.000		1.248.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.248.000.000	12	1.248.000.000	12	1.248.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					517.000.000		517.000.000		490.275.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	517.000.000	27	517.000.000	27	490.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	140.000.000	27	140.000.000	27	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		6.497.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	6.497.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				242.000.000		242.000.000		223.778.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	242.000.000	12	242.000.000	12	223.778.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	40.000.000	100	40.000.000	100	31.398.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		31.398.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		40.000.000		40.000.000		31.398.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		31.398.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	31.398.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		0		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah								**306.000.000**		**306.000.000**		**255.506.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	3.1	306.000.000	3.1	306.000.000	3.1	255.506.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						306.000.000		306.000.000		255.506.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	306.000.000	100	306.000.000	100	255.506.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					306.000.000		306.000.000		255.506.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	306.000.000	100	306.000.000	100	255.506.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				130.000.000		130.000.000		109.715.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	130.000.000	18	130.000.000	18	109.715.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				136.000.000		136.000.000		123.433.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	23	136.000.000	23	136.000.000	23	123.433.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		20.000.000		13.173.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	20	20.000.000	20	20.000.000	20	13.173.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		20.000.000		9.185.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	9.185.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi									**5.871.840.000**		**5.871.840.000**		**5.358.143.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.84		0.87		0.87		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN								**5.871.840.000**		**5.871.840.000**		**5.358.143.000**		
						Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	93	5.871.840.000	93	5.871.840.000	93	5.358.143.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						5.871.840.000		5.871.840.000		5.358.143.000		
						Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	790.000.000	100	790.000.000	100	524.693.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					790.000.000		790.000.000		524.693.000		
						Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi	%	100	790.000.000	100	790.000.000	100	524.693.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				50.000.000		50.000.000		44.836.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	44.836.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				600.000.000		600.000.000		362.647.000		
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	600.000.000	1	600.000.000	1	362.647.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				140.000.000		140.000.000		117.210.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1979	140.000.000	1979	140.000.000	1979	117.210.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
						Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	675.000.000	92	675.000.000	92	755.335.000	Bidang Mutasi dan Promosi	
		5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN					675.000.000		675.000.000		755.335.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu	%	100	145.000.000	100	145.000.000	100	119.717.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				145.000.000		145.000.000		119.717.000		
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	10000	145.000.000	10000	145.000.000	10000	119.717.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi	%	92	530.000.000	92	530.000.000	92	635.618.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Mutasi ASN				130.000.000		130.000.000		103.392.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	300	130.000.000	2	130.000.000	2	103.392.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				400.000.000		400.000.000		532.226.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	149	400.000.000	2	400.000.000	2	532.226.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	620.000.000	100	620.000.000	100	609.211.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN					620.000.000		620.000.000		609.211.000		
						Persentase ASN yang dinilai kompetensinya	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	11250	500.000.000	11250	500.000.000	11250	500.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	%	100	120.000.000	100	120.000.000	100	109.211.000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				120.000.000		120.000.000		109.211.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kompetensi ASN	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	109.211.000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	410.000.000	70	410.000.000	70	333.829.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					410.000.000		410.000.000		333.829.000		
						Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi	%	70	180.000.000	70	180.000.000	70	152.214.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				180.000.000		180.000.000		152.214.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	180.000.000	1	180.000.000	1	152.214.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi	%	70	230.000.000	70	230.000.000	70	181.615.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				75.000.000		75.000.000		57.493.000		
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	75.000.000	1	75.000.000	1	57.493.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				155.000.000		155.000.000		124.122.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	155.000.000	1	155.000.000	1	124.122.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	150.000.000	85	150.000.000	85	123.915.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					150.000.000		150.000.000		123.915.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	123.915.000	Pokja Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				150.000.000		150.000.000		123.915.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	100	150.000.000	5	150.000.000	5	123.915.000	Pokja Penilaian Kinerja	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	2.695.000.000	85	2.695.000.000	85	2.565.888.000	Bidang Pengembangan Kompetensi	
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN					2.695.000.000		2.695.000.000		2.565.888.000		
						Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi	%	100	2.490.000.000	100	2.490.000.000	100	2.383.627.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.490.000.000		2.490.000.000		2.383.627.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	150	2.490.000.000	150	2.490.000.000	150	2.383.627.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN	%	100	205.000.000	100	205.000.000	100	182.261.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				160.000.000		160.000.000		144.157.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1000	160.000.000	1500	160.000.000	1500	144.157.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0015			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				45.000.000		45.000.000		38.104.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	2	45.000.000	2	45.000.000	2	38.104.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	531.840.000	10	531.840.000	10	445.272.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					531.840.000		531.840.000		445.272.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa	%	100	211.840.000	100	211.840.000	100	180.174.000	Pokja Kesejahteraan ASN	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				170.000.000		170.000.000		148.287.000		
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	300	170.000.000	200	170.000.000	200	148.287.000	Pokja Kesejahteraan ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				41.840.000		41.840.000		31.887.000		
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	2000	41.840.000	1000	41.840.000	1000	31.887.000	Pokja Kesejahteraan ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pembinaan disiplin ASN	%	20	320.000.000	20	320.000.000	20	265.098.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				180.000.000		180.000.000		156.892.000		
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	45000	180.000.000	15000	180.000.000	15000	156.892.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				140.000.000		140.000.000		108.206.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	140.000.000	5	140.000.000	5	108.206.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**36.244.682.000**		**36.244.682.000**		**34.659.003.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah									**26.892.349.000**		**26.892.349.000**		**26.308.989.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.1		3.1		3.8		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya daya saing kompetensi sumber daya manusia ASN								**25.300.000.000**		**25.300.000.000**		**24.813.151.000**		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	26.1	25.300.000.000	26.1	25.300.000.000	26.1	24.813.151.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						25.300.000.000		25.300.000.000		24.813.151.000		
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	3.200.000.000	95.5	3.200.000.000	95.5	3.996.356.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					3.200.000.000		3.200.000.000		3.996.356.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1338	3.200.000.000	1200	3.200.000.000	1889	3.996.356.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3.200.000.000		3.200.000.000		3.996.356.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	1082	1.291.242.000	1082	1.291.242.000	6242	2.301.647.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	350	959.913.000	350	959.913.000	413	845.665.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	240	948.845.000	240	948.845.000	240	849.044.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	2.100.000.000	95.5	2.100.000.000	95.5	2.016.874.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					2.100.000.000		2.100.000.000		2.016.874.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	23000	2.100.000.000	23000	2.100.000.000	42600	2.016.874.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			2.100.000.000		2.100.000.000		2.016.874.000		
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	7320	613.915.000	7320	613.915.000	7320	578.745.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	8600	832.085.000	8600	832.085.000	28000	810.303.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Pengukuran jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis inti	Orang	7280	654.000.000	7280	654.000.000	7280	627.826.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	100	20.000.000.000	95.5	20.000.000.000	95.5	18.799.921.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	
		5.04.02.1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri					20.000.000.000		20.000.000.000		18.799.921.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	1300	20.000.000.000	3920	20.000.000.000	19257	18.799.921.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	
		5.04.02.1.03.0002			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000.000		20.000.000.000		18.799.921.000		
						Jumlah Peserta Orientasi Pim Pemdagri	Orang	30	95.800.000	30	95.800.000	0	0	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pealtihan Pim pemdagri jenjang Pengawas	Orang	18	252.750.000	18	252.750.000	0	0	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	850	2.886.680.000	850	2.886.680.000	596	2.140.637.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Pim Pemdagri jenjang administrator	Orang	14	285.000.000	14	285.000.000	0	0	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Pim Pemdagri jenjang JPT	Orang	0	0	0	0	0	0	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	176	3.102.090.000	176	3.102.090.000	285	3.556.525.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	216	3.216.730.000	216	3.216.730.000	350	3.696.559.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	110	2.358.330.000	110	2.358.330.000	96	2.125.300.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1710	7.802.620.000	1710	7.802.620.000	30530	7.280.900.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN								**1.592.349.000**		**1.592.349.000**		**1.495.838.000**		
						Persentase ASN yang tersertifikasi Kompetensi	%	100	1.592.349.000	100	1.592.349.000	100	1.495.838.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.592.349.000		1.592.349.000		1.495.838.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3.5	532.104.000	3.5	532.104.000	3.5	466.158.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					30.253.000		30.253.000		27.436.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	30.253.000	3	30.253.000	3	27.436.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			8.000.000		8.000.000		7.525.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	8.000.000	1	8.000.000	1	7.525.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			22.253.000		22.253.000		19.911.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	17	3.856.000	17	3.856.000	17	3.879.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Dokumen	20	18.397.000	20	18.397.000	20	16.032.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					501.851.000		501.851.000		438.722.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	3	501.851.000	3	501.851.000	3	438.722.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			117.719.000		117.719.000		104.937.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	18	117.719.000	18	117.719.000	18	104.937.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			384.132.000		384.132.000		333.785.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	18	100.712.000	18	100.712.000	20	116.219.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	125.191.000	1	125.191.000	1	60.917.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	84.966.000	1	84.966.000	1	78.780.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	28	73.263.000	28	73.263.000	31	77.869.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	100	752.349.000	50	752.349.000	50	756.913.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					429.305.000		429.305.000		368.274.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	429.305.000	2	429.305.000	2	368.274.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				110.922.000		110.922.000		93.169.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	2	61.962.000	2	61.962.000	3	54.229.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	4	48.960.000	4	48.960.000	3	38.940.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				318.383.000		318.383.000		275.105.000		
						Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	350	318.383.000	350	318.383.000	350	275.105.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri					323.044.000		323.044.000		388.639.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	1	323.044.000	1	323.044.000	1	388.639.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.03.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				323.044.000		323.044.000		388.639.000		
						Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	200	323.044.000	200	323.044.000	185	388.639.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	307.896.000	100	307.896.000	100	272.767.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					176.991.000		176.991.000		137.320.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	176.991.000	3	176.991.000	3	137.320.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,			87.551.000		87.551.000		62.237.000		

					dan Urusan Pemerintahan Umum									
						Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota	Dokumen	2	84.311.000	2	84.311.000	2	59.247.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	3.240.000	1	3.240.000	1	2.990.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				89.440.000		89.440.000		75.083.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	20	89.440.000	20	89.440.000	20	75.083.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					130.905.000		130.905.000		135.447.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional	Dokumen	3	130.905.000	3	130.905.000	3	135.447.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				125.290.000		125.290.000		130.815.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota	Dokumen	2	35.529.000	2	35.529.000	2	47.296.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	3.357.000	1	3.357.000	1	2.107.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Dokumen	60	86.404.000	60	86.404.000	60	81.412.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				5.615.000		5.615.000		4.632.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	5.615.000	1	5.615.000	1	4.632.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah									**45.516.428.000**		**45.516.428.000**		**44.055.398.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	85.3		85.3		85.3		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								**45.135.928.000**		**45.135.928.000**		**43.710.462.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	80	45.135.928.000	80	45.135.928.000	80	43.710.462.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						45.135.928.000		45.135.928.000		43.710.462.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	45.135.928.000	100	45.135.928.000	100	43.710.462.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.975.423.000		26.975.423.000		25.806.303.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	26.975.423.000	6	26.975.423.000	6	25.806.303.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.578.023.000		23.578.023.000		23.578.023.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	133	23.578.023.000	133	23.578.023.000	133	23.578.023.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.200.000.000		3.200.000.000		2.062.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	1	2.062.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				77.200.000		77.200.000		74.562.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	77.200.000	1	77.200.000	1	74.562.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				65.500.000		65.500.000		47.543.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.500.000	1	65.500.000	1	47.543.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				54.700.000		54.700.000		44.175.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	54.700.000	1	54.700.000	1	44.175.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					255.000.000		255.000.000		250.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	255.000.000	1	255.000.000	1	250.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				255.000.000		255.000.000		250.100.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	255.000.000	2	255.000.000	2	250.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					77.600.000		77.600.000		80.941.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	77.600.000	1	77.600.000	1	80.941.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				77.600.000		77.600.000		80.941.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	77.600.000	1	77.600.000	1	80.941.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					257.970.000		257.970.000		225.818.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	257.970.000	100	257.970.000	100	225.818.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24.200.000		24.200.000		22.202.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	24.200.000	10	24.200.000	10	22.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				233.770.000		233.770.000		203.616.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	233.770.000	65	233.770.000	65	203.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.253.243.000		2.253.243.000		2.059.897.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.253.243.000	100	2.253.243.000	100	2.059.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				250.000.000		250.000.000		203.276.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	1	250.000.000	1	203.276.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		173.400.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	173.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				400.000.000		400.000.000		303.879.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	400.000.000	1	400.000.000	1	303.879.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				303.560.000		303.560.000		317.210.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	303.560.000	1	303.560.000	1	317.210.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.987.000		73.987.000		61.772.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	73.987.000	1	73.987.000	1	61.772.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				18.000.000		18.000.000		13.542.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	18.000.000	12	18.000.000	12	13.542.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				96.750.000		96.750.000		79.020.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	96.750.000	12	96.750.000	12	79.020.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				364.846.000		364.846.000		444.730.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	364.846.000	12	364.846.000	12	444.730.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.150.000		31.150.000		24.028.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	31.150.000	12	31.150.000	12	24.028.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				514.950.000		514.950.000		439.040.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	514.950.000	4	514.950.000	4	439.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.421.500.000		2.421.500.000		2.135.787.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	2.421.500.000	1	2.421.500.000	1	2.135.787.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				993.000.000		993.000.000		877.400.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	69	993.000.000	69	993.000.000	121	877.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				35.000.000		35.000.000		17.500.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	200	17.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.393.500.000		1.393.500.000		1.240.887.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1.393.500.000	22	1.393.500.000	69	1.240.887.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.949.942.000		10.310.122.000		9.811.227.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.949.942.000	1	10.310.122.000	1	9.811.227.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		7.009.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	7.009.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.975.000.000		2.975.000.000		2.689.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.975.000.000	12	2.975.000.000	12	2.689.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.964.942.000		7.325.122.000		7.115.118.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.964.942.000	12	7.325.122.000	12	7.115.118.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.945.250.000		2.585.070.000		3.340.389.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	2.945.250.000	1	2.585.070.000	1	3.340.389.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				171.000.000		171.000.000		193.750.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	27	171.000.000	27	171.000.000	27	193.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.250.000		20.250.000		14.850.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	763	20.250.000	763	20.250.000	763	14.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.673.000.000		1.312.820.000		2.012.820.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	41	1.673.000.000	41	1.312.820.000	41	2.012.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.081.000.000		1.081.000.000		1.118.969.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	376	1.081.000.000	376	1.081.000.000	376	1.118.969.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								**380.500.000**		**380.500.000**		**344.936.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	2.89	380.500.000	2.89	380.500.000	2.89	344.936.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						380.500.000		380.500.000		344.936.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	380.500.000	100	380.500.000	100	344.936.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					380.500.000		380.500.000		344.936.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	380.500.000	100	380.500.000	100	344.936.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				84.000.000		84.000.000		63.031.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	84.000.000	10	84.000.000	10	63.031.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				261.500.000		261.500.000		250.554.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	261.500.000	21	261.500.000	21	250.554.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		15.000.000		13.401.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	11	15.000.000	11	15.000.000	11	13.401.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		20.000.000		17.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	17.950.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**72.408.777.000**		**72.408.777.000**		**70.364.387.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif									**3.379.000.000**		**3.379.000.000**		**2.772.622.000**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	
						Kapabilitas Inovasi	Angka	4.66		4.66		4.66		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya kebermanfaatan penelitian								**2.429.000.000**		**2.429.000.000**		**2.016.944.000**		
						Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	2.429.000.000	100	2.429.000.000	100	2.016.944.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						2.429.000.000		2.429.000.000		2.016.944.000		
						Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	949.000.000	100	949.000.000	100	828.974.000	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
		5.05.03.1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					233.000.000		233.000.000		214.450.000		
						Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	233.000.000	1	233.000.000	1	214.450.000		
		5.05.03.1.01.0005			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				233.000.000		233.000.000		214.450.000		
						Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	233.000.000	1	233.000.000	1	214.450.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02		Invensi dan Inovasi					716.000.000		716.000.000		614.524.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	716.000.000	1	716.000.000	1	614.524.000		
		5.05.03.1.02.0001			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				223.000.000		223.000.000		194.242.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	223.000.000	1	223.000.000	1	194.242.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0016			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				396.000.000		396.000.000		353.328.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	396.000.000	1	396.000.000	1	353.328.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0025			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				97.000.000		97.000.000		66.954.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	97.000.000	1	97.000.000	1	66.954.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	800.000.000	100	800.000.000	100	652.907.000	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
		5.05.03.1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					150.000.000		150.000.000		106.885.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	106.885.000		
		5.05.03.1.01.0001			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				150.000.000		150.000.000		106.885.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	106.885.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02		Invensi dan Inovasi					650.000.000		650.000.000		546.022.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	1	650.000.000	1	650.000.000	1	546.022.000		
		5.05.03.1.02.0023			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi				650.000.000		650.000.000		546.022.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	1	650.000.000	1	650.000.000	1	546.022.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	680.000.000	100	680.000.000	100	535.063.000	Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
		5.05.03.1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					380.000.000		380.000.000		303.639.000		
						Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	1	380.000.000	1	380.000.000	1	303.639.000		
		5.05.03.1.01.0004			Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				380.000.000		380.000.000		303.639.000		
						Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	3	380.000.000	3	380.000.000	3	303.639.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02		Invensi dan Inovasi					300.000.000		300.000.000		231.424.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	231.424.000		
		5.05.03.1.02.0007			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				250.000.000		250.000.000		191.372.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	1	191.372.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0020			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				50.000.000		50.000.000		40.052.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	40.052.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi								**950.000.000**		**950.000.000**		**755.678.000**		
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	73.5	950.000.000	73.5	950.000.000	73.5	755.678.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						950.000.000		950.000.000		755.678.000		
						Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	950.000.000	100	950.000.000	100	755.678.000	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
		5.05.03.1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					500.000.000		500.000.000		384.705.000		
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	16.528.000		
		5.05.03.1.01.0002			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				50.000.000		50.000.000		16.528.000		
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	16.528.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	1	450.000.000	1	450.000.000	1	368.177.000		
		5.05.03.1.01.0003			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				450.000.000		450.000.000		368.177.000		
						Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	1	450.000.000	1	450.000.000	1	368.177.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.05.03.1.02		Invensi dan Inovasi					450.000.000		450.000.000		370.973.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	1	450.000.000	1	450.000.000	1	370.973.000		
		5.05.03.1.02.0013			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				450.000.000		450.000.000		370.973.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	1	450.000.000	1	450.000.000	1	370.973.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Riset dan Inovasi Daerah									**13.794.842.000**		**13.794.842.000**		**12.615.598.000**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	73.75		73.75		73.75		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah								**13.574.842.000**		**13.574.842.000**		**12.468.439.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	86	13.574.842.000	91.5	13.574.842.000	91.5	12.468.439.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.574.842.000		13.574.842.000		12.468.439.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	13.574.842.000	100	13.574.842.000	100	12.468.439.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.300.499.000		9.300.499.000		9.173.491.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.300.499.000	12	9.300.499.000	12	9.173.491.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.955.499.000		8.955.499.000		8.955.499.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	8.955.499.000	62	8.955.499.000	62	8.955.499.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				225.000.000		225.000.000		166.130.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	225.000.000	12	225.000.000	12	166.130.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		60.000.000		22.364.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	60.000.000	12	60.000.000	12	22.364.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.000.000		60.000.000		29.498.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	29.498.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					114.500.000		114.500.000		91.630.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	114.500.000	2	114.500.000	2	91.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		110.000.000		87.435.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	110.000.000	1	110.000.000	1	87.435.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000		4.500.000		4.195.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.195.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					157.508.000		157.508.000		111.631.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	157.508.000	100	157.508.000	100	111.631.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				120.000.000		120.000.000		82.404.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	82.404.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.000.000		19.400.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	25.000.000	3	25.000.000	3	19.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.508.000		12.508.000		9.827.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	12.508.000	30	12.508.000	30	9.827.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					487.000.000		487.000.000		425.171.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	487.000.000	100	487.000.000	100	425.171.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.761.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		13.018.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		0		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		9.119.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	9.119.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000		12.000.000		9.028.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	9.028.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		25.965.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.965.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		275.236.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	275.236.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.000.000		6.000.000		4.250.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	1	4.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000		70.000.000		59.794.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	59.794.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					205.000.000		205.000.000		173.554.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	205.000.000	3	205.000.000	3	173.554.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.000.000		175.000.000		158.554.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	175.000.000	1	175.000.000	1	158.554.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		30.000.000		15.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.599.080.000		2.599.080.000		1.873.087.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.599.080.000	1	2.599.080.000	1	1.873.087.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		1.620.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				473.580.000		473.580.000		411.547.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	473.580.000	1	473.580.000	1	411.547.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				166.000.000		166.000.000		107.275.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	166.000.000	1	166.000.000	1	107.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.956.500.000		1.956.500.000		1.352.645.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.956.500.000	1	1.956.500.000	1	1.352.645.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					711.255.000		711.255.000		619.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	711.255.000	1034	711.255.000	1034	619.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		275.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	300.000.000	11	300.000.000	11	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		7.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000	4	10.000.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		30.000.000		24.820.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30.000.000	30	30.000.000	30	24.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		30.000.000		25.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.255.000		137.255.000		137.255.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	137.255.000	2	137.255.000	2	137.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.000.000		104.000.000		50.300.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	104.000.000	7	104.000.000	7	50.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah								**220.000.000**		**220.000.000**		**147.159.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	2.65	220.000.000	2.65	220.000.000	2.65	147.159.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						220.000.000		220.000.000		147.159.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	220.000.000	100	220.000.000	100	147.159.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					220.000.000		220.000.000		147.159.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	220.000.000	100	220.000.000	100	147.159.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				130.000.000		130.000.000		93.970.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	130.000.000	6	130.000.000	6	93.970.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		26.015.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	26.015.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		27.174.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	27.174.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**17.173.842.000**		**17.173.842.000**		**15.388.220.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									**4.732.269.000**		**4.732.269.000**		**4.589.796.000**	**Badan Penghubung**	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	86		86		86		Badan Penghubung	
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								**4.732.269.000**		**4.732.269.000**		**4.589.796.000**		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86	4.732.269.000	86	4.732.269.000	86	4.589.796.000	Badan Penghubung	
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						4.732.269.000		4.732.269.000		4.589.796.000		
						Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	4.732.269.000	100	4.732.269.000	100	4.589.796.000	Badan Penghubung	
		5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					4.732.269.000		4.732.269.000		4.589.796.000		
						Jumlah Jenis Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Dokumen	18	4.732.269.000	18	4.732.269.000	18	4.589.796.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	
		5.07.02.1.01.0001			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				3.681.080.000		3.681.080.000		3.837.563.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	10	3.681.080.000	10	3.681.080.000	10	3.837.563.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1.051.189.000		1.051.189.000		752.233.000		
						Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	15	1.051.189.000	15	1.051.189.000	15	752.233.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Penghubung									**21.512.206.000**		**21.512.206.000**		**19.566.079.000**	**Badan Penghubung**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	71.7		71.7		71.7		Badan Penghubung	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Penghubung								**21.457.471.000**		**21.457.471.000**		**19.527.780.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	85.1	21.457.471.000	85.1	21.457.471.000	85.1	19.527.780.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.457.471.000		21.457.471.000		19.527.780.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	21.457.471.000	100	21.457.471.000	100	19.527.780.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.506.572.000		9.506.572.000		8.973.884.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.506.572.000	12	9.506.572.000	12	8.973.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.433.572.000		9.433.572.000		8.904.246.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	9.433.572.000	55	9.433.572.000	55	8.904.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8.000.000		8.000.000		4.638.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	4.638.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					307.787.000		307.787.000		307.787.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	307.787.000	1	307.787.000	1	307.787.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				307.787.000		307.787.000		307.787.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	41	307.787.000	41	307.787.000	41	307.787.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					130.487.000		130.487.000		130.487.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	130.487.000	100	130.487.000	100	130.487.000		
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				34.271.000		34.271.000		34.271.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	34.271.000	50	34.271.000	50	34.271.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				96.216.000		96.216.000		96.216.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	68	96.216.000	68	96.216.000	68	96.216.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.788.997.000		1.783.997.000		1.580.397.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.788.997.000	100	1.783.997.000	100	1.580.397.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				56.035.000		56.035.000		56.035.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	56.035.000	12	56.035.000	12	56.035.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158.556.000		158.556.000		136.686.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	158.556.000	12	158.556.000	12	136.686.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				436.859.000		436.859.000		378.819.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	436.859.000	12	436.859.000	12	378.819.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				74.967.000		74.967.000		61.547.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	74.967.000	12	74.967.000	12	61.547.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	35.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				630.000.000		630.000.000		519.730.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	630.000.000	12	630.000.000	12	519.730.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				397.580.000		397.580.000		397.580.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	397.580.000	12	397.580.000	12	397.580.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.127.220.000		1.087.690.000		834.992.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	1.127.220.000	9	1.087.690.000	9	834.992.000		
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				362.000.000		362.000.000		132.147.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	362.000.000	4	362.000.000	3	132.147.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				765.220.000		725.690.000		702.845.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	765.220.000	28	725.690.000	14	702.845.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.547.088.000		5.691.618.000		5.179.467.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.547.088.000	12	5.691.618.000	12	5.179.467.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		35.000.000		19.150.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	19.150.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		942.992.000		828.801.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.100.000.000	12	942.992.000	12	828.801.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.036.000		87.036.000		80.532.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	87.036.000	12	87.036.000	12	80.532.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.325.052.000		4.626.590.000		4.250.984.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.325.052.000	12	4.626.590.000	12	4.250.984.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.049.320.000		2.949.320.000		2.520.766.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	3.049.320.000	4	2.949.320.000	4	2.520.766.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.319.720.000		1.319.720.000		1.151.620.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	1.319.720.000	34	1.319.720.000	34	1.151.620.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				27.500.000		27.500.000		7.300.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	27.500.000	5	27.500.000	3	7.300.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000		250.000.000		271.975.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	350.000.000	14	250.000.000	14	271.975.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				47.100.000		47.100.000		25.219.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	47.100.000	7	47.100.000	7	25.219.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.305.000.000		1.305.000.000		1.064.652.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.305.000.000	4	1.305.000.000	4	1.064.652.000		OPD Provinsi; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Resiko di Badan Penghubung								**54.735.000**		**54.735.000**		**38.299.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	3.1	54.735.000	3.1	54.735.000	3.1	38.299.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.735.000		54.735.000		38.299.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	54.735.000	96	54.735.000	100	38.299.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					54.735.000		54.735.000		38.299.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	54.735.000	100	54.735.000	100	38.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.535.000		30.535.000		17.875.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	30.535.000	9	30.535.000	9	17.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.648.000		16.648.000		16.648.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	16.648.000	24	16.648.000	24	16.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.776.000		3.776.000		3.776.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	5	3.776.000	5	3.776.000	5	3.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.776.000		3.776.000		0		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	5	3.776.000	5	3.776.000	5	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**26.244.475.000**		**26.244.475.000**		**24.155.875.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif									**6.492.766.000**		**6.492.766.000**		**4.906.222.000**	**INSPEKTORAT**	
						Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3.52		3.52		3		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal								**6.492.766.000**		**6.492.766.000**		**4.906.222.000**		
						Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3.196	1.797.497.000	3.196	1.797.497.000	3	620.955.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.797.497.000		1.797.497.000		620.955.000		
						Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61.9	114.520.000	61.9	114.520.000	47.6	96.341.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi					114.520.000		114.520.000		96.341.000		
						Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Laporan	84	114.520.000	84	114.520.000	84	96.341.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				114.520.000		114.520.000		96.341.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	114.520.000	42	114.520.000	42	96.341.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
						Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42.85	110.758.000	42.85	110.758.000	38.09	58.833.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi					110.758.000		110.758.000		58.833.000		
						Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD	Laporan	8	110.758.000	8	110.758.000	8	58.833.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.03.1.02.0004			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				110.758.000		110.758.000		58.833.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	8	110.758.000	8	110.758.000	8	58.833.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
						Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35.71	1.572.219.000	35.71	1.572.219.000	35.71	465.781.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi					1.572.219.000		1.572.219.000		465.781.000		
						Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Laporan	3	1.572.219.000	3	1.572.219.000	3	465.781.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.572.219.000		1.572.219.000		465.781.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	9	1.572.219.000	9	1.572.219.000	9	465.781.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
						Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3.4	4.695.269.000	3.4	4.695.269.000	2.5	4.285.267.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						4.568.089.000		4.568.089.000		4.178.996.000		
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	982.440.000	100	982.440.000	100	868.844.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					982.440.000		982.440.000		868.844.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit	Dokumen	100	982.440.000	100	982.440.000	80	868.844.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				982.440.000		982.440.000		868.844.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80	982.440.000	80	982.440.000	80	868.844.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	864.840.000	100	864.840.000	100	913.711.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					864.840.000		864.840.000		913.711.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit	Dokumen	23	864.840.000	23	864.840.000	23	913.711.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				864.840.000		864.840.000		913.711.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	23	864.840.000	23	864.840.000	23	913.711.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.246.920.000	100	1.246.920.000	100	1.112.166.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.246.920.000		1.246.920.000		1.112.166.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang terbit	Dokumen	80	1.246.920.000	80	1.246.920.000	80	1.112.166.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.246.920.000		1.246.920.000		1.112.166.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	64	1.246.920.000	64	1.246.920.000	80	1.112.166.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	1.278.120.000	100	1.278.120.000	100	1.140.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.278.120.000		1.278.120.000		1.140.870.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit	Dokumen	64	1.278.120.000	64	1.278.120.000	64	1.140.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	

		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1.278.120.000		1.278.120.000		1.140.870.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	100	1.278.120.000	100	1.278.120.000	100	1.140.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96.23	195.769.000	96.23	195.769.000	93	143.405.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					195.769.000		195.769.000		143.405.000		
						Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	Dokumen	14	195.769.000	14	195.769.000	14	143.405.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				195.769.000		195.769.000		143.405.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	92	195.769.000	92	195.769.000	92	143.405.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						127.180.000		127.180.000		106.271.000		
						Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	127.180.000	100	127.180.000	100	106.271.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					127.180.000		127.180.000		106.271.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	1	127.180.000	1	127.180.000	1	106.271.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0002			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				127.180.000		127.180.000		106.271.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	127.180.000	1	127.180.000	1	106.271.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT									**29.616.394.000**		**29.616.394.000**		**28.152.021.000**	**INSPEKTORAT**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	83.49		83.49		82		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT								**29.426.411.000**		**29.426.411.000**		**28.020.369.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	85.25	29.426.411.000	85.25	29.426.411.000	85.25	28.020.369.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.426.411.000		29.426.411.000		28.020.369.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	29.426.411.000	100	29.426.411.000	100	28.020.369.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.388.628.000		24.388.628.000		23.963.957.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	24.388.628.000	2	24.388.628.000	2	23.963.957.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.378.628.000		24.378.628.000		23.956.583.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	139	24.378.628.000	139	24.378.628.000	139	23.956.583.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.000.000		7.374.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.374.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					208.006.000		208.006.000		195.506.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	208.006.000	2	208.006.000	2	195.506.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				208.006.000		208.006.000		195.506.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	208.006.000	1	208.006.000	1	195.506.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					365.819.000		365.819.000		161.337.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	365.819.000	100	365.819.000	100	161.337.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.000.000		40.000.000		20.700.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	40.000.000	2	40.000.000	2	20.700.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				325.819.000		325.819.000		140.637.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	325.819.000	40	325.819.000	40	140.637.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					883.944.000		883.944.000		610.576.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	883.944.000	100	883.944.000	100	610.576.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.820.000		13.820.000		12.108.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.820.000	1	13.820.000	1	12.108.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.602.000		34.602.000		27.589.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.602.000	1	34.602.000	1	27.589.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				169.350.000		169.350.000		108.880.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	169.350.000	1	169.350.000	1	108.880.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		131.427.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	131.427.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				251.000.000		251.000.000		156.503.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	251.000.000	1	251.000.000	1	156.503.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.172.000		240.172.000		162.451.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	240.172.000	1	240.172.000	1	162.451.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		25.000.000		11.618.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	11.618.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.500.000		34.500.000		18.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	34.500.000	6	34.500.000	6	18.050.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				0		0		0		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.500.000		34.500.000		18.050.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.500.000	1	34.500.000	1	18.050.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.779.168.000		2.779.168.000		2.485.197.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.779.168.000	4	2.779.168.000	4	2.485.197.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.000.000		14.000.000		7.364.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	14.000.000	1	14.000.000	1	7.364.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		500.000.000		468.601.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	468.601.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.400.000		14.400.000		12.672.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	14.400.000	1	14.400.000	1	12.672.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.250.768.000		2.250.768.000		1.996.560.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.250.768.000	1	2.250.768.000	1	1.996.560.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					766.346.000		766.346.000		585.746.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	136	766.346.000	136	766.346.000	136	585.746.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				380.025.000		380.025.000		300.025.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	380.025.000	23	380.025.000	23	300.025.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.010.000		11.010.000		4.280.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	11.010.000	7	11.010.000	7	4.280.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.511.000		181.511.000		175.511.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	181.511.000	50	181.511.000	50	175.511.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				161.300.000		161.300.000		73.470.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	161.300.000	1	161.300.000	1	73.470.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.500.000		26.500.000		26.460.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.500.000	1	26.500.000	1	26.460.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT								**189.983.000**		**189.983.000**		**131.652.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	3.35	189.983.000	3.35	189.983.000	3.35	131.652.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						189.983.000		189.983.000		131.652.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	189.983.000	100	189.983.000	100	131.652.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					189.983.000		189.983.000		131.652.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	189.983.000	100	189.983.000	100	131.652.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				144.765.000		144.765.000		102.322.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	144.765.000	9	144.765.000	9	102.322.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.218.000		35.218.000		28.430.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	35.218.000	2	35.218.000	2	28.430.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		0		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	5.000.000	4	5.000.000	4	0	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		900.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	900.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
JUMLAH									**36.109.160.000**		**36.109.160.000**		**33.058.243.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Ketahanan Wilayah									**310.151.273.000**		**265.334.343.000**		**254.691.751.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Angka	3.02		3.02		3.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								**41.608.400.000**		**10.754.770.000**		**10.328.663.000**		
						Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7.37	41.608.400.000	6.5	10.754.770.000	6.5	10.328.663.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.608.336.000		3.126.756.000		3.152.919.000		
						Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76.31	2.608.336.000	76.31	3.126.756.000	76.31	3.152.919.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
		8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.608.336.000		3.126.756.000		3.152.919.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	86	1.407.000.000	86	1.673.855.000	86	1.595.968.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				710.000.000		979.255.000		923.697.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1100	710.000.000	1600	979.255.000	1600	923.697.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0007			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				15.890.000		15.890.000		15.792.000		
						Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	35	15.890.000	35	15.890.000	35	15.792.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0008			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				15.110.000		15.110.000		14.291.000		
						Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	4	15.110.000	4	15.110.000	4	14.291.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0009			Pelaksanaan tugas Paskibraka				56.000.000		53.600.000		51.387.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	4	56.000.000	4	53.600.000	4	51.387.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.001			Pembentukan Paskibraka				610.000.000		610.000.000		590.801.000		
						Jumlah Paskibraka	Orang	70	610.000.000	70	610.000.000	70	590.801.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	%	86	1.201.336.000	86	1.452.901.000	86	1.556.951.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.103.336.000		1.354.901.000		1.465.092.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3350	1.103.336.000	3850	1.354.901.000	3850	1.465.092.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				98.000.000		98.000.000		91.859.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	98.000.000	4	98.000.000	4	91.859.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						36.626.664.000		4.728.139.000		4.503.260.000		
						Indeks Kinerja Ormas	Angka	78.26	36.626.664.000	78.26	4.728.139.000	78.26	4.503.260.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					36.626.664.000		4.728.139.000		4.503.260.000		
						PersentaseMasyarakat yangpaham terhadappemberdayaan Ormas	%	92	2.276.664.000	86	3.303.139.000	86	3.239.289.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.211.664.000		1.479.714.000		1.404.876.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1500	1.211.664.000	2000	1.479.714.000	2050	1.404.876.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.065.000.000		1.823.425.000		1.834.413.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1500	1.065.000.000	2400	1.823.425.000	2500	1.834.413.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pengawasan Ormas	%	100	34.350.000.000	100	1.425.000.000	100	1.263.971.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				34.350.000.000		1.425.000.000		1.263.971.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	34.350.000.000	4	1.425.000.000	4	1.263.971.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						2.373.400.000		2.899.875.000		2.672.484.000		
						Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2.89	1.169.434.000	2.89	1.437.194.000	2.89	1.246.186.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.169.434.000		1.437.194.000		1.246.186.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi	%	88	1.169.434.000	88	1.437.194.000	88	1.246.186.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.169.434.000		1.437.194.000		1.246.186.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2020	1.169.434.000	2520	1.437.194.000	2520	1.246.186.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks Toleransi	Angka	75.4	1.203.966.000	75.4	1.462.681.000	75.4	1.426.298.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.203.966.000		1.462.681.000		1.426.298.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	75.4	1.203.966.000	75.4	1.462.681.000	75.4	1.426.298.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.173.966.000		1.432.681.000		1.398.807.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1800	1.173.966.000	2050	1.432.681.000	2300	1.398.807.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30.000.000		30.000.000		27.491.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	27.491.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Stabilitas Politik								**268.542.873.000**		**254.579.573.000**		**244.363.088.000**		
						Indeks Ketahanan Politik	Angka	3.12	268.542.873.000	3.12	254.579.573.000	3.12	244.363.088.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						61.299.273.000		61.817.623.000		61.799.888.000		
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	76.5	58.070.318.000	80.47	58.329.583.000	80.47	58.557.629.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				58.070.318.000		58.329.583.000		58.557.629.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89.7	58.070.318.000	89.7	58.329.583.000	89.7	58.557.629.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	
		8.01.03.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			645.000.000		912.300.000		819.517.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1030	645.000.000	1530	912.300.000	1595	819.517.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.03.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			57.425.318.000		57.417.283.000		57.738.112.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	57.425.318.000	12	57.417.283.000	12	57.738.112.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	76.5	3.228.955.000	88.11	3.488.040.000	88.11	3.242.259.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			3.228.955.000		3.488.040.000		3.242.259.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89.6	95.890.000	89.6	87.675.000	89.6	81.899.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			95.890.000		87.675.000		81.899.000		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	3	95.890.000	3	87.675.000	3	81.899.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	%	89.7	3.133.065.000	89.7	3.400.365.000	89.7	3.160.360.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			3.133.065.000		3.400.365.000		3.160.360.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	3115	3.133.065.000	3615	3.400.365.000	3615	3.160.360.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						207.243.600.000		192.761.950.000		182.563.200.000		
						Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	207.243.600.000	74	192.761.950.000	74	182.563.200.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
		8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					207.243.600.000		192.761.950.000		182.563.200.000		
						Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	205.533.449.000	100	190.800.749.000	100	180.667.332.000	Pokja Penanganan Konflik	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			819.379.000		1.086.679.000		959.826.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1100	819.379.000	1600	1.086.679.000	1650	959.826.000	Pokja Penanganan Konflik	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			204.714.070.000		189.714.070.000		179.707.506.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	204.714.070.000	4	189.714.070.000	4	179.707.506.000	Pokja Penanganan Konflik	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional	%	80	1.710.151.000	80	1.961.201.000	80	1.895.868.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	
		8.01.06.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			73.661.000		73.661.000		68.199.000		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	73.661.000	4	73.661.000	4	68.199.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			636.490.000		903.790.000		813.071.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1200	636.490.000	1700	903.790.000	1750	813.071.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.000.000.000		983.750.000		1.014.598.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	1.000.000.000	12	983.750.000	12	1.014.598.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									**16.545.275.000**		**16.673.205.000**		**16.562.373.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	74.5		74		74		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								**14.173.275.000**		**14.301.205.000**		**14.275.662.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	80.3	14.173.275.000	88.17	14.301.205.000	77	14.275.662.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.173.275.000		14.301.205.000		14.275.662.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	14.173.275.000	100	14.301.205.000	100	14.275.662.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.867.419.000		8.867.419.000		8.865.536.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	8.867.419.000	12	8.867.419.000	12	8.865.536.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.496.019.000		8.496.019.000		8.496.019.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	8.496.019.000	62	8.496.019.000	168	8.496.019.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700.000		700.000		584.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	700.000	12	700.000	12	584.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				700.000		700.000		584.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	700.000	12	700.000	12	584.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		20.000.000		18.349.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	18.349.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		80.000.000		88.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		80.000.000		88.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					203.500.000		203.500.000		191.592.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	203.500.000	100	203.500.000	100	191.592.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	9.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000		9.174.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	9.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				33.000.000		33.000.000		27.565.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	33.000.000	50	33.000.000	35	27.565.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.500.000		150.500.000		145.679.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	130	150.500.000	100	150.500.000	80	145.679.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.218.135.000		1.218.135.000		1.352.285.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.218.135.000	100	1.218.135.000	100	1.352.285.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.761.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	6	10.000.000	2	8.761.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				115.000.000		115.000.000		100.761.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115.000.000	12	115.000.000	12	100.761.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		80.000.000		84.777.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	12	80.000.000	12	84.777.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		151.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	150.000.000	12	150.000.000	12	151.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		41.745.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	41.745.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		7.000.000		5.266.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.000.000	12	7.000.000	12	5.266.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		90.000.000		113.571.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	113.571.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				656.135.000		656.135.000		784.619.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	656.135.000	24	656.135.000	24	784.619.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		15.000.000		12.523.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	1	12.523.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.000.000		45.000.000		48.762.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	45.000.000	4	45.000.000	2	48.762.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					246.031.000		246.031.000		291.642.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	32	246.031.000	32	246.031.000	25	291.642.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		53.872.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	50.000.000	4	50.000.000	3	53.872.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.031.000		196.031.000		237.770.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	196.031.000	30	196.031.000	22	237.770.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.848.131.000		2.989.183.000		2.460.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.848.131.000	84	2.989.183.000	60	2.460.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		876.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	876.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				587.941.000		655.063.000		551.063.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	587.941.000	36	655.063.000	36	551.063.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.259.190.000		2.333.120.000		1.908.413.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.259.190.000	12	2.333.120.000	12	1.908.413.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.059.000		696.937.000		1.026.255.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	710.059.000	352	696.937.000	120	1.026.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				280.000.000		280.000.000		319.873.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	280.000.000	36	280.000.000	36	319.873.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		83.530.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	80.000.000	60	80.000.000	60	83.530.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				271.000.000		271.000.000		577.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	271.000.000	1	271.000.000	2	577.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76.059.000		62.937.000		42.852.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	76.059.000	80	62.937.000	2	42.852.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								**2.372.000.000**		**2.372.000.000**		**2.286.711.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	3.65	2.372.000.000	2.9	2.372.000.000	2.43	2.286.711.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.372.000.000		2.372.000.000		2.286.711.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	2.372.000.000	100	2.372.000.000	100	2.286.711.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.372.000.000		2.372.000.000		2.286.711.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.372.000.000	100	2.372.000.000	100	2.286.711.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.266.033.000		1.266.033.000		1.248.190.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	1.266.033.000	16	1.266.033.000	16	1.248.190.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.055.967.000		1.055.967.000		993.444.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	1.055.967.000	20	1.055.967.000	20	993.444.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		22.538.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	25.000.000	4	25.000.000	1	22.538.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		25.000.000		22.539.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000	1	22.539.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**326.696.548.000**		**282.007.548.000**		**271.254.124.000**		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001